

Driving Innovation and Sustainability in Marine Industry

Mendorong Inovasi dan Keberlanjutan
dalam Industri Kelautan



2024 Annual Report
Laporan Tahunan



Sanggahan dan Batasan Tanggung Jawab

Disclaimer and Limit of Liability

Referensi dan standar yang digunakan dalam penyusunan Laporan Tahunan PT Pertamina Trans Kontinental tahun 2024 menggunakan parameter dan kriteria standar yang berlaku di Indonesia, tempat dimana Perusahaan melaksanakan kegiatan usahanya. Meskipun bukan merupakan emiten atau perusahaan terbuka, Laporan Tahunan ini menggunakan standar yang tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

Laporan Tahunan ini memuat berbagai pernyataan terkait kondisi keuangan, operasi, kebijakan, proyeksi, rencana, strategi, serta tujuan Perusahaan, yang digolongkan sebagai pernyataan ke depan dalam pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku. Pernyataan-pernyataan tersebut memiliki prospek risiko serta ketidakpastian, hingga kemungkinan perbedaan dengan perkembangan yang aktual. Berbagai pernyataan prospektif dalam Laporan Tahunan ini disusun berdasarkan asumsi-asumsi mengenai kondisi terkini, serta proyeksi atas situasi mendatang terkait lingkungan bisnis Perusahaan. PT Pertamina Trans Kontinental tidak dapat menjamin bahwa dokumen-dokumen yang telah dipastikan keabsahannya akan membawa hasil yang pasti.

The references and standards used in the preparation of the 2024 Annual Report of PT Pertamina Trans Kontinental use parameters and standard criteria that apply in Indonesia, where the Company carries out its business activities. Even though it is not an issuer or a public company, this Annual Report uses the standards set out in the Financial Services Authority Regulation No. 29/POJK.04/2016 concerning Annual Reports of Issuers or Public Companies, and Circular of the Financial Services Authority No. 16/SEOJK.04/2021 concerning the Form and Content of Annual Reports of Issuers or Public Companies.

This Annual Report contains various statements related to the Company's financial condition, operations, policies, projections, plans, strategies, and objectives, which are classified as forward-looking statements in the implementation of applicable laws and regulations. These statements have prospects of risk and uncertainty, as well as the possibility of differences from actual developments. Various prospective statements in this Annual Report have been prepared based on assumptions regarding current conditions, as well as projections of future situations related to the Company's business environment. PT Pertamina Trans Kontinental cannot guarantee that the documents of which the validity has been confirmed will bring definite results.

Tema dan Kesenambungan Tema Themes and Its Continuity



2024

Driving Innovation and Sustainability in Marine Industry

Mendorong Inovasi dan Keberlanjutan dalam Industri Kelautan

Memasuki usia ke-55 tahun di tahun 2024, PT Pertamina Trans Kontinental (PTK) telah menunjukkan berbagai pencapaian signifikan yang semakin mengukuhkan posisinya sebagai pemimpin di sektor *marine services* untuk industri energi. Peran strategis PTK tidak hanya mendukung sektor energi, tetapi juga turut mendorong kemajuan industri maritim nasional secara keseluruhan. Seiring dengan bertumbuhnya Perusahaan, PTK tetap fokus pada dua hal utama dalam setiap langkah yang diambil: inovasi dan keberlanjutan. Dalam upayanya berinovasi, PTK terus menghadirkan teknologi dan solusi baru yang meningkatkan efisiensi operasional serta memperkuat daya saing di pasar global. Tidak hanya itu, PTK juga senantiasa memastikan bahwa setiap operasional dan keputusan yang diambil selaras dengan prinsip keberlanjutan, baik dari segi lingkungan, sosial, dan ekonomi.

Keberlanjutan lingkungan menjadi perhatian utama PTK dalam memastikan bahwa kontribusinya terhadap sektor *marine* tidak hanya menguntungkan dari segi ekonomi, tetapi juga mendukung kelestarian alam dan kehidupan masyarakat sekitar. Dengan memperkuat langkah untuk terus berinovasi dan berkomitmen pada keberlanjutan, PTK memastikan bahwa masa depan jasa *marine* akan terus berkembang dengan cara yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Berbagai solusi jasa *marine* mencakup berbagai aspek, seperti pengembangan kapal dengan teknologi terbaru, solusi logistik berbasis digital, serta pendekatan berbasis data untuk mengoptimalkan jalur pelayaran, pengiriman barang, dan pengelolaan armada dengan kapal-kapal yang dilengkapi dengan teknologi efisiensi bahan bakar yang lebih baik dan mengurangi emisi gas rumah kaca (yang memungkinkan pengurangan dampak negatif terhadap kualitas udara dan air laut. Melalui solusi-solusi tersebut, PTK dapat memenuhi kebutuhan pelanggan yang terus berkembang dan mendukung sektor maritim dengan layanan yang lebih terintegrasi dan modern.

Dalam menjalankan visinya, PTK juga berperan aktif dalam membangun sektor maritim yang lebih maju, modern, dan berkelanjutan. Ini tidak hanya bertujuan untuk memperkuat industri maritim nasional, tetapi juga untuk memastikan kontribusi PTK dalam kemajuan bangsa dan kesejahteraan masyarakat. Dengan terus berinovasi, beradaptasi, dan berkomitmen pada prinsip keberlanjutan, PTK memastikan bahwa sektor maritim akan terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang lebih besar dan lebih berkelanjutan di masa depan.

Entering its 55th year in 2024, PT Pertamina Trans Kontinental (PTK) showed various significant achievements that further strengthened its position as a leader in the marine services sector of the energy industry. PTK's strategic role not only supports the energy sector but also contributes to the advancement of the national maritime industry as a whole. As the Company grows, PTK remains focused on two main areas in every step it takes: innovation and sustainability. In its efforts to innovate, PTK continues to deliver new technologies and solutions that improve operational efficiency and strengthen competitiveness in the global market. Moreover, PTK also ensures that every operation and decision made is in line with the principles of sustainability, both from an environmental, social, and economic perspective.

Environmental sustainability is PTK's main concern in ensuring that its contribution to the marine sector is not only economically beneficial but also supports the preservation of nature and the lives of surrounding communities. By strengthening the steps to continuously innovate and commit to sustainability, PTK ensures that the future of marine services will continue to thrive responsibly and sustainably. The marine services solutions cover various aspects, such as the development of vessels with the latest technology, digital-based logistics solutions, as well as data-driven approaches to optimize shipping lanes, freight forwarding, and fleet management with vessels equipped with better fuel efficiency technology and reduced greenhouse gas emissions (which allows for the reduction of negative impacts on air and seawater quality. Through these solutions, PTK can meet customers' evolving needs and support the maritime sector with more integrated and modern services.

In carrying out its vision, PTK also participates actively in building a more advanced, modern, and sustainable maritime sector. This not only aims to strengthen the national maritime industry but also to ensure PTK's contribution to the nation's progress and people's welfare. By continuously innovating, adapting, and committing to the principles of sustainability, PTK ensures that the maritime sector will continue to thrive to meet greater and more sustainable economic needs in the future.



Kesinambungan Tema

Theme Continuity

2023



Memetakan Cakrawala Baru: Memberi Energi Pada Industri Kelautan

Charting New Horizons:
Energizing The Marine Industry

2022



Melaju Menembus Batas, Mewujudkan Keunggulan Berkelanjutan

Sailing Beyond Border For Sustainable
Competitive Advantages

2021



Mengaktifkan Transformasi Energi: Repositioning Untuk Masa Depan

Enabling Energy Transformation:
Repositioning For The Future

2020



Menciptakan Nilai Untuk Pertumbuhan Berkelanjutan

Creating Value For Sustainable Growth

Daftar Isi

Table of Contents

02 Pendahuluan Introduction

2	Sanggahan dan Batasan Tanggung Jawab Disclaimer and Limit of Liability
3	Tema dan Kesenambungan Tema Theme and Its Continuity
5	Daftar Isi Table of Contents
8	Komitmen PTK Meningkatkan Keberlanjutan Sektor Energi dan Maritim Indonesia PTK's Commitment to Improving the Sustainability of Indonesia's Energy and Maritime Sectors
11	Kinerja Penting 2024 2024 Performance Highlights
14	Ikhtisar Data Keuangan Penting Key Financial Data Highlights
19	Ikhtisar Operasi, Pemenuhan K3 dan Lingkungan Operational, OHS and Environmental Fulfillment Highlights
21	Ikhtisar Saham Share Highlights
22	Informasi tentang Efek yang Diterbitkan Information on Issued Securities
22	Aksi Korporasi Corporate Action
23	Penghargaan dan Sertifikasi Awards and Certifications
28	Peristiwa Penting Tahun 2024 Events Highlights in 2024
32	Testimoni Testimoni

34 Laporan Manajemen Management Report

36	Laporan Dewan Komisaris Report from the Board of Commissioners
52	Laporan Direksi Report from the Board of Directors
72	Pernyataan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi untuk Laporan Tahunan 2024 Statement of Responsibility from Board of Commissioners and Board of Directors for 2024 Annual Report

74 Profil Perusahaan Company Profile

76	Identitas Perusahaan Company Identity
77	Sekilas Perusahaan Company at a Glance
78	Logo Perusahaan Company Logo
79	Visi, Misi, Nilai dan Budaya Perusahaan Vision, Mission, Corporate Values and Culture
81	Kegiatan Usaha dan Bisnis Utama Perusahaan Company Business Activities and Core Business
86	Struktur Organisasi Organizational Structure
88	Profil Dewan Komisaris Profile of the Board of Commissioners
94	Profil Direksi Profile of the Board of Directors
100	Informasi Perubahan Komposisi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Tahun Buku 2024 dan Setelah Tahun Buku 2024 Information on Changes in the Composition of Members of the Board of Directors and Board of Commissioners for the 2024 Financial Year and After the 2024 Financial Year
101	Statistik Sumber Daya Manusia Human Resources Statistics
103	Struktur Grup dan Entitas Anak, Entitas Asosiasi serta Kantor Cabang/Perwakilan Structure of the Group and Subsidiaries, Associates, and Branch/Representative Offices
108	Informasi dan Komposisi Pemegang Saham Information on Shareholders Composition
110	Kantor Akuntan Publik dan Lembaga Penunjang Lainnya Public Accounting Firm, and Other Supporting Institutions
112	Keanggotaan Asosiasi Membership in Associations
114	Jaringan Wilayah Operasi Operational Area Network
122	Kronologis Pencatatan Saham Chronology of Share Listing
122	Kronologis Pencatatan Efek Lainnya Chronology of Other Securities Listing
123	Informasi Website Perusahaan Information on Company Website



124 Tinjauan Pendukung Bisnis Business Support Overview

126 **Sumber Daya Manusia**
Human Resources

145 **Teknologi Informasi**
Information Technology

158 Analisis dan Pembahasan Manajemen Management Discussion and Analysis

160 **Tinjauan Umum dan Industri**
General and Industry Review

164 **Tinjauan Operasional per Segmen**
Operational Review by Segment

171 **Sinergi dengan Pertamina Group**
Synergy with Pertamina Group

173 **Rencana Strategis 2022-2027**
2022-2027 Strategic Plan

176 **Aspek Pemasaran**
Marketing Aspect

180 **Analisis Kinerja Keuangan**
Analysis of Financial Performance

180 • Analisis Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
Analysis of the Consolidated Statements of Financial Position

186 • Analisis Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian
Analysis of the Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income

191 • Analisis Laporan Arus Kas Konsolidasian
Analysis of the Consolidated Statements of Cash Flows

193 **Analisis Rasio Keuangan**
Analysis of Financial Ratios

195 **Pencapaian Key Performance Indicator (KPI)**
Key Performance Indicator (KPI) Achievement

195 **Tingkat Kesehatan Perusahaan**
Company's Soundness Level

198 **Realisasi dan Pencapaian Target Tahun 2024**
Target Realization and Achievement in 2024

203 **Kebijakan dan Pembagian Dividen**
Dividend Policy and Distribution

206 **Prospek Usaha dan Rencana Strategis Tahun 2025**
Business Prospects and Strategic Plans for 2025

214 **Target atau Proyeksi Tahun 2025**
Target and Projection for 2025

218 **Ikatan yang Material untuk Investasi Barang Modal**

Material Commitment for Capital Goods Investment

218 **Realisasi Investasi Barang Modal**
Realization of Capital Goods Investment

219 **Kontribusi Kepada Negara**
Contribution to the State

220 **Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum**
Realization of the Use of Public Offering Proceeds

221 **Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Penggabungan Usaha, Akuisisi, dan/atau Restrukturisasi Utang/Modal**
Material Information Regarding Investment, Expansion, Divestment, Business Merger, Acquisition, and/or Debt/Capital Restructuring

221 **Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi/Berelasi**
Information on Material Transactions Containing Conflicts of Interest and/or Transactions with Affiliated/Related Parties

230 **Informasi Keuangan yang Mengandung Kejadian Bersifat Luar Biasa dan Jarang Terjadi**
Financial Information Containing Extraordinary and Rare Events

230 **Informasi dan Fakta Material yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Akuntan**
Material Information and Facts Occurring After the Reporting Date

230 **Perubahan Kebijakan Akuntansi yang Berpengaruh Signifikan Terhadap Perusahaan**
Changes in Accounting Policies Significantly Affecting the Company

231 **Perubahan Peraturan Perundang-Undangan yang Berpengaruh Signifikan Terhadap Perusahaan**
Changes in Laws and Regulations that Have Significant Effects on the Company

234 **Informasi Kelangsungan Usaha**
Information on Business Continuity

235 **Struktur Modal**
Capital Structure

236 Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance

238 **Komitmen Berkelanjutan Dalam Penerapan Tata Kelola Perusahaan**
Sustainable Commitment to the Implementation of Corporate Governance

242 **Peningkatan Kualitas Penerapan Tata Kelola Perusahaan**
Improving the Quality of Corporate Governance Implementation

376 / Tanggung Jawab Sosial
Social Responsibility

378	Tata Kelola (Governansi) Berkelanjutan Sustainable Governance
382	Inisiatif Program Keberlanjutan Sustainability Program Initiatives
383	Kinerja Ekonomi Economic Performance
384	Kinerja Lingkungan Environmental Performance
392	Kinerja Sosial Social Performance
393	• Kinerja Sosial Ketenagakerjaan Social Performance of Employment
399	• Kinerja Sosial Aspek Kemasyarakatan Social Performance of Community Aspects
406	• Kinerja Sosial Aspek Pelanggan Social Performance of Customer Aspects

08 **Laporan Keuangan Audited PTK 2024**
Audited Financial Statements of PTK in 2024



Komitmen PTK Meningkatkan Keberlanjutan Sektor Energi dan Maritim Indonesia

PTK's Commitment to Improving the Sustainability of Indonesia's Energy and Maritime Sectors

PTK berkomitmen meningkatkan keberlanjutan sektor energi dan maritim Indonesia melalui berbagai upaya, di antaranya:

Berkontribusi dalam pengembangan *Blue Economy* Indonesia, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan tetap menjaga kelestarian ekosistem laut.

Contributing to the development of Indonesia's Blue Economy to drive economic growth, improve community welfare, and preserve the marine ecosystem.

Menerapkan teknologi Shore Connection (SC) untuk menyediakan listrik bagi kapal yang bersandar di pelabuhan.

Implementing Shore Connection (SC) technology to provide electricity for vessels docked at the port.

Mengadopsi berbagai teknologi hijau dalam operasional kapal dan aktivitas pendukung lainnya.

Adopting various green technologies in vessel operations and other supporting activities.

Melakukan reboisasi melalui program penanaman bakau untuk memulihkan ekosistem pesisir.

Reforestation through mangrove planting programs to restore coastal ecosystems.

Menerapkan langkah-langkah efisiensi energi di seluruh lini operasional, mendukung pencapaian *Green Building*.

Implementing energy efficiency measures in all operational lines, supporting the achievement of Green Building

Berkontribusi dalam distribusi energi nasional.

Contributing to national energy distribution.



PTK is committed to improving the sustainability of Indonesia's energy and maritime sectors through various efforts, including:

Mengoperasikan armada kapal ramah lingkungan, kapal berbahan bakar ganda dan kapal yang menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

Operating a fleet of environmentally friendly vessels, dual-fuel vessels, and vessels using Solar Power Plants (SPP).

Mengurangi emisi karbon guna mendukung upaya pencapaian target lingkungan global.

Reducing carbon emissions to support efforts to achieve global environmental targets.

Menerapkan konsep pelabuhan berwawasan lingkungan atau *Green Port*.

Implementing the concept of a Green Port.

Mendukung operasi lepas pantai untuk sektor minyak dan gas.

Supporting offshore operations for the oil and gas sector.

Menjaga kelestarian lingkungan yang selaras dengan tema "*Shaping Marine Sustainability*".

Maintaining environmental sustainability in line with the theme "*Shaping Marine Sustainability*".

Meningkatkan efisiensi penggunaan bahan bakar untuk operasional yang lebih hemat energi.

Enhancing fuel use efficiency for more energy-efficient operations.





Lebih lanjut, PTK juga menegaskan kontribusinya dalam mendukung pengembangan *Blue Economy* di Indonesia melalui berbagai program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL), antara lain:

Furthermore, PTK also emphasized its contribution to supporting the development of the *Blue Economy* in Indonesia through various Social and Environmental Responsibility (CSR) programs, among others:

Inkubasi Ekonomi Bahari Maritime Economic Incubation



Meningkatkan UMKM Pesisir Batam

Improving MSMEs in the
Batam Coastal Area



Penanaman 5.500 Mangrove dan Pengembangan Rumah Bibit Mangrove di Bali

Planting 5,500
Mangroves and
Development of
Mangrove Seedling
House in Bali



Pembersihan Pantai Coastal Clean Up

Berhasil mengumpulkan 28 Ton sampah di Yogyakarta

Managed to collect 28 tons
of waste in Yogyakarta



Desa Energi Berdikari Self-sufficient Energy Village

Mampu mengelola 31,5 Ton Sampah menjadi Pusat Eduwisata di Pesisir Jambi

Capable of managing
31.5 tons of Waste into an
Education Center in the
Jambi coastal area



Membangun Penyedia Sarana Air Bersih di Maumere

Building Clean Water Facilities
in Maumere

sebagai upaya mengatasi kekeringan di Wilayah Timur Indonesia

as an effort to overcome
drought in Eastern
Indonesia

Melalui partisipasi secara aktif dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat, PTK tidak hanya memperkuat posisinya sebagai perusahaan penyedia jasa *ship & port solutions* untuk ketahanan energi nasional, tetapi sekaligus membantu pemerintah mencapai visi Indonesia yang berkelanjutan.

Through active participation in environmental sustainability and community empowerment, PTK not only strengthens its position as a provider of ship & port solutions services for national energy security but also assists the government in achieving the vision of a sustainable Indonesia.

Kinerja Penting 2024

2024 Performance Highlights

Kinerja Operasional

Operational Performance



Kinerja Keuangan

Financial Performance





Sumber Daya Manusia

Human Resources



Survei Kepuasan Pegawai
Employee Satisfaction Survey

3,97%

↑ **13,43%**



Jumlah Jam Pelatihan Pekerja
Total Employee Training Hours amounted

39.652 Jam
hours

299 Pekerja
Employees



Rata-rata Jam Pelatihan Pekerja
Average Employee Training hour

132,61 Jam/pekerja
hour/Employees

↑ **4,4%**



Biaya Pelatihan SDM
HR Training Costs

8,58 triliun trillion

K3 dan Lindung Lingkungan

OHS and Environmental Protection



Jam Kerja Selamat
Save Working Hours

21.977.609 Jam
hours



Fatalitas
Fatality

0
kejadian Accidents



Tumpahan Minyak
Oil Spills

0
kejadian Accidents

Tanggung Jawab Sosial Lingkungan

Social and Environmental Responsibility



Jumlah Penggunaan Energi Fosil Operasional Kapal
Total Vessel Operations Fossil Energy Usage

20.267,40 Gigajoule



Jumlah Penggunaan Energi Terbarukan Operasional Kapal
Total Vessel Operations Renewable Energy Usage

1.520.088,31 Gigajoule



Indeks Kepuasan Pelanggan
Indeks Kepuasan Pelanggan

4,0/4,0



Realisasi Biaya CSR
Realisasi Biaya CSRUsage

Rp2,07 triliun trillion



Ikhtisar Data Keuangan Penting

Key Financial Data Highlights

Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

Consolidated Profit or Loss and Other Comprehensive Income

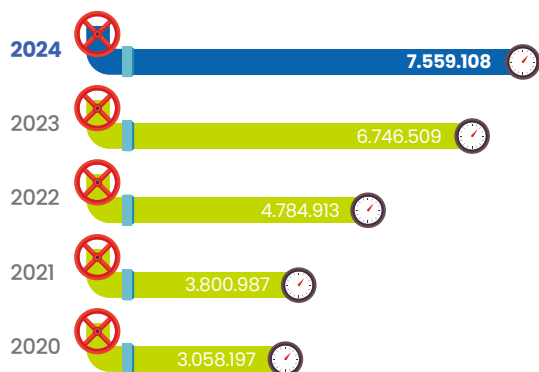
(Dalam Rp Juta | In Rp million)

Uraian Description	2024	2023	2022	2021	2020
Pendapatan usaha Revenue	7.559.108	6.746.509	4.784.913	3.800.987	3.058.197
Beban pokok pendapatan Cost of revenue	(4.963.954)	(4.153.993)	(3.136.987)	(2.688.852)	(2.181.550)
Laba bruto Gross profit	2.595.154	2.592.516	1.647.926	1.112.135	876.647
Beban umum dan administrasi General and administrative expenses	(1.255.901)	(1.161.113)	(649.316)	(458.185)	(318.096)
Pendapatan/(Beban) lain-lain, neto Other revenues/(expenses), net	3.960	(53.526)	25.531	25.543	(26.955)
Pendapatan keuangan Finance income	55.586	46.690	23.565	6.597	15.075
Beban keuangan Finance costs	(89.898)	(97.270)	(99.799)	(54.172)	(58.860)
Bagian atas laba bersih ventura bersama Share in profit of joint venture	32.565	30.925	25.446	28.045	22.283
Beban pajak final Final tax expenses	(13.551)	(11.894)	(18.499)	(17.723)	(26.164)
Laba sebelum pajak penghasilan Profit before income tax	1.327.915	1.346.328	954.854	642.240	483.930
Beban pajak penghasilan Income tax expense	(252.615)	(294.834)	(221.826)	(111.701)	(60.553)
Laba tahun berjalan Profit for the year	1.075.300	1.051.494	733.028	530.539	423.377
Jumlah penghasilan/(rugi) komprehensif lain Total other comprehensive income/ (loss)	23.530	(18.688)	20.683	15.527	(9.644)
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan Total comprehensive income for the year	1.098.830	1.032.806	753.711	546.066	413.733
EBITDA	2.201.999	2.228.500	1.691.788	1.111.055	823.547

Grafik Pendapatan Usaha

Chart of Revenue

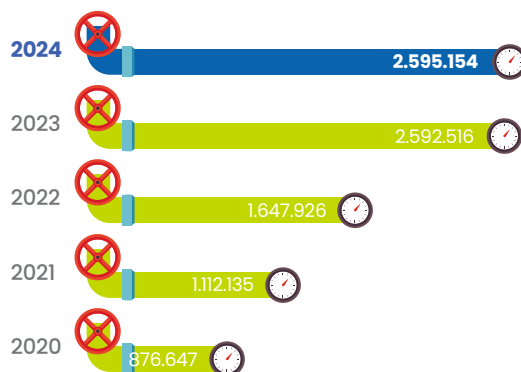
(Dalam Rp Juta | in Rp million)



Grafik Laba Bruto

Chart of Gross Profit

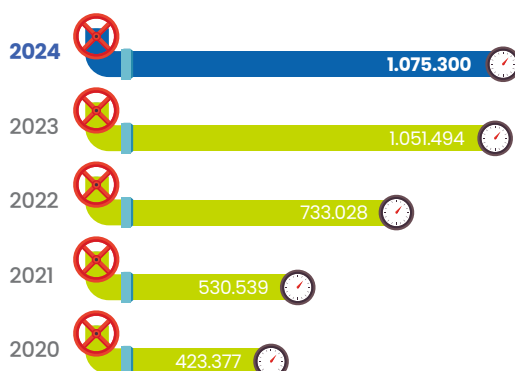
(Dalam Rp Juta | in Rp million)



Grafik Laba Tahun Berjalan

Chart of Profit for the Year

(Dalam Rp Juta | in Rp million)





Posisi Keuangan Konsolidasian

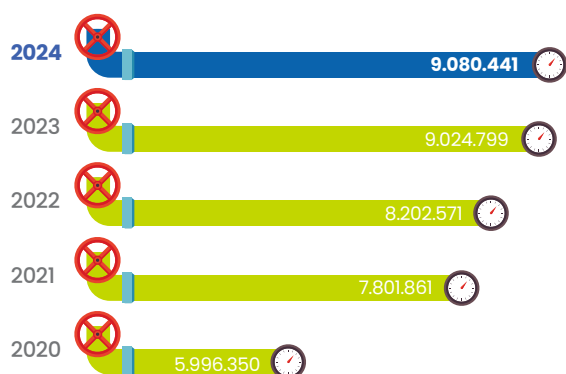
Consolidated Financial Position

(Dalam Rp Juta | In Rp million)

Uraian Description	2024	2023	2022	2021	2020
Aset Lancar Current Assets	4.519.749	4.668.038	3.811.707	3.373.379	2.160.035
Aset Tidak Lancar Non-Current Assets	4.560.692	4.356.761	4.390.864	4.428.482	3.836.315
Jumlah Aset Total Assets	9.080.441	9.024.799	8.202.571	7.801.861	5.996.350
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	3.739.072	3.548.308	3.613.513	3.133.013	2.320.665
Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities	737.504	836.106	981.479	1.219.734	1.096.086
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	4.476.576	4.384.414	4.594.992	4.352.747	3.416.751
Jumlah Ekuitas Total Equity	4.603.865	4.640.385	3.607.579	3.449.114	2.579.599
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas Total Liabilities and Equity	9.080.441	9.024.799	8.202.571	7.801.861	5.996.350

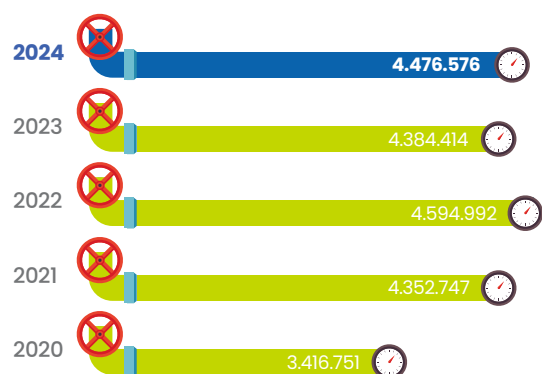
Grafik Jumlah Aset

Chart of Total Assets
(Dalam Rp Juta | in Rp million)



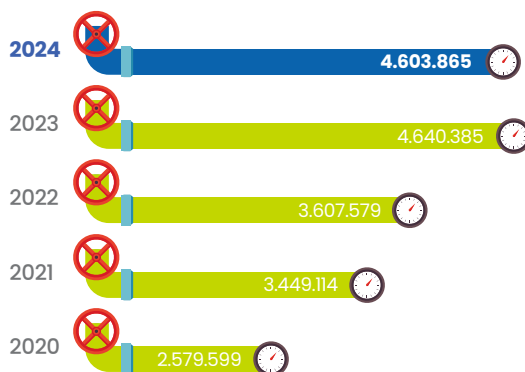
Grafik Jumlah Liabilitas

Chart of Total Liabilities
(Dalam Rp Juta | in Rp million)



Grafik Ekuitas

Chart of Equity
(Dalam Rp Juta | in Rp million)



Arus Kas Konsolidasian

Consolidated Cash Flows

(Dalam Rp Juta | In Rp million)

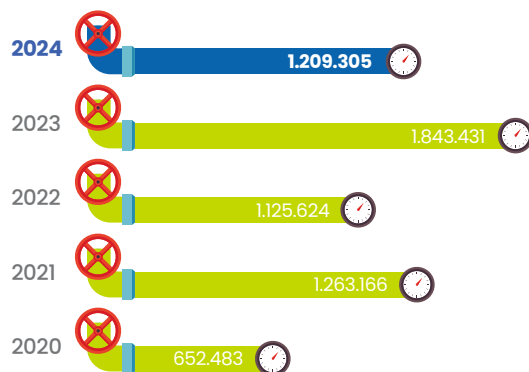
Uraian Description	2024	2023	2022	2021	2020
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi Net cash flows provided by operating activities	1.630.663	1.539.594	1.367.580	1.291.616	604.669
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi Net cash flows used in investing activities	(441.691)	(101.859)	(219.767)	(660.338)	(733.156)
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan Net cash flows used in financing activities	(1.812.721)	(727.361)	(1.290.043)	(23.272)	55.534
Efek perubahan nilai kurs pada kas dan setara kas Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents	(10.377)	7.433	4.688	2.677	10.938
Kenaikan/(penurunan) bersih kas dan setara kas Net increase/(decrease) in cash and cash equivalents	(634.126)	717.807	(137.542)	610.683	(62.015)
Kas dan setara kas pada awal tahun Cash and cash equivalents at the beginning of the year	1.843.431	1.125.624	1.263.166	652.483	714.498
Kas dan setara kas pada akhir tahun Cash and cash equivalents at the end of the year	1.209.305	1.843.431	1.125.624	1.263.166	652.483



Grafik Kas dan Setara Kas

Chart of Cash and Cash Equivalents

(Dalam Rp Juta | In Million Rp)



Rasio-rasio Keuangan

Financial Ratios

Uraian Description	2024	2023	2022	2021	2020
Rasio Likuiditas (%) Liquidity Ratio (%)					
Rasio kas Cash ratio	32,41	51,95	31,15	40,32	28,12
Rasio Lancar Current Ratio	120,88	131,56	105,48	107,67	95,92
Rasio Solvabilitas (%) Solvency Ratio (%)					
Jumlah modal sendiri terhadap total aset Total own capital to total assets	50,70	51,42	43,98	44,21	43,02
Rasio liabilitas terhadap ekuitas Debt to equity ratio	97,24	94,48	127,37	126,20	132,45
Rasio liabilitas terhadap aset Debt to assets ratio	49,30	48,58	56,02	55,79	56,98
Rasio Profitabilitas (%) Profitability Ratio (%)					
Rasio laba bersih terhadap aset Return on assets	11,84	11,65	8,94	6,80	7,06
Rasio laba bersih terhadap ekuitas Return on equity	30,47	22,66	20,32	15,38	19,64
Imbalan investasi Return on investment	24,52	19,90	21,05	14,59	13,73

Uraian Description	2024	2023	2022	2021	2020
Margin laba bruto Gross profit margin	34,33	38,43	34,44	29,26	18,26
Margin laba bersih Net profit margin	14,23	15,59	15,32	13,96	13,84
Rasio Aktivitas Activity Ratio					
Rata-rata periode penagihan piutang (hari) Rata-rata periode penagihan piutang (hari)	71	58	35	72	118
Perputaran aset (%) Asset turnover (%)	84,68	74,83	59,41	50,47	50,98

Ikhtisar Operasi, Pemenuhan K3 dan Lingkungan Operational, OHS and Environmental Fulfillment Highlights

Ikhtisar Pendapatan per Segmen Revenue by Segment Highlights

Revenue by Segment Highlights

(Dalam Rp Juta | In Rp million)

Uraian Description	2024	2023	2022	2021	2020
Shipping Activities	3.250.916	2.598.318	2.019.115	1.851.164	1.501.039
Marine Services	3.959.256	3.766.450	2.435.771	1.652.735	1.223.902
Logistics Services	348.935	381.740	330.026	297.088	333.256
Jumlah Pendapatan Usaha Total Revenue	7.559.108	6.746.509	4.784.913	3.800.987	3.058.197



Ikhtisar Operasi

Operational Highlights

Uraian Description	Satuan Unit	2024	2023	2022	2021
Shipping Activities					
Armada Kapal Milik Fleet of Owned Ships	unit	370	369	369	344
Commission Days Kapal Milik Commission Days of Owned Ships	hari Day	119.841	118.344	112.270	83.281
Commercial Days Kapal Milik Commercial Days of Owned Ships	hari Day	119.220	117.423	116.661	82.883
Marine Services					
Keagenan Tanker Pihak Ketiga Third-Party Tanker Agency	call	5.181	3.385	2.282	2.194
Keagenan Charter Milik Pertamina Pertamina Chartered Agency	call	20.745	21.840	22.403	20.425
Keagenan Umum General Agency	call	4.033	3.034	5.505	5.833
Logistics Services*					
Cargo Handling	ton	471.025	346.887		
Vessel Berthing	call	10.524	10.797		
Cover Storage	m ²	372.074	395.410		
Open Storage	m ²	1.331.698	1.012.914		
Waste Management	ton	1.587	5.674		

* Bisnis dimulai pada tahun 2022

* Business commenced in 2022

Ikhtisar K3 dan Lingkungan serta Ketenagakerjaan

OHS, Environment, and Employment Highlights

Uraian Description	Satuan Unit	2024	2023	2022	2021	2020
K3 dan Lingkungan OHS and Environment						
Number of Accident (NOA)	kejadian Incident	-	-	-	1	-
Fatalitas Fatality	kejadian Incident	-	-	-	1	-
Tumpahan Minyak Oil Spills	kejadian Incident	-	-	-	-	-
Jam Kerja Selamat Safe Working Hours	jam Hour	21.977.609	8.788.200	1.112.160*	6.326.040	7.178.840
Ketenagakerjaan Employment						
Jumlah Pekerja Number of Employees	orang Person	2.971	3.703	3.978	1.798	898

*) Dari kasus LTI 7 Desember 2022

*) From LTI case on December 7, 2022

Ikhtisar Saham

Share Highlights

Jumlah Saham dan Pemegang Saham Serta Informasi Aksi Korporasi

Number of Shares and Shareholders and Information on Corporate Actions

Per 31 Desember 2024, jumlah saham Perusahaan terbagi 1.234.737 lembar saham seri A dan 819 lembar saham seri B dimiliki oleh PT Pertamina International Shipping atau 99,99% sedangkan sebanyak 10 lembar saham seri A atau 0,01% dimiliki oleh PT Pertamina Pedeve Indonesia. Hingga akhir tahun 2024, Perusahaan tidak melakukan penawaran saham umum kepada publik/masyarakat.

As of December 31, 2024, the Company's shares are divided into 1,234,737 series A shares and 819 series B shares owned by PT Pertamina International Shipping or 99.999%, while 10 series A shares or 0.01% are owned by PT Pertamina Pedeve Indonesia. Until the end of 2024, the Company did not exercise public offering of shares to the public.



Dividen Saham Tunai

Cash Stock Dividend

Berdasarkan persetujuan yang diberikan oleh pemegang saham pada Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Tahunan Tahun Buku 2023 yang diselenggarakan pada tanggal 14 Juni 2024, pemegang saham menetapkan penggunaan Laba Perseroan Tahun Buku 2023 sebesar Rp1.051.494.038.985.

Dari jumlah tersebut, dividen yang diusulkan adalah sebesar USD 75.000.000 dan Dividen dapat dibayarkan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat (USD) dan/atau Rupiah (Jisdor H-1) secara bertahap, dan telah dilakukan pembayaran secara bertahap dengan mata uang rupiah ke PT Pertamina International Shipping dan PT Pertamina Pedeve Indonesia dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada tanggal 2 Oktober 2024 Pembayaran Angsuran Pertama ke PT PIS sebesar Rp700.000.000.000, menggunakan kurs Jisdor H-1 Rp 15.204 dengan Nilai Konversi Currency USD 46.040.515,65
2. Pada tanggal 4 Oktober 2024 pelunasan sisa angsuran Dividen ke PT PIS sebesar Rp445.686.847.084, menggunakan kurs Jisdor H-1 Rp 15.394 dengan Nilai Konversi Currency USD 28.951.984,35
3. Pada tanggal 9 Oktober 2024 Pembayaran Dividen ke PT Pertamina Pedeve Indonesia sebesar Rp117.532.500, menggunakan kurs Jisdor H-1 Rp 15.671 dengan Nilai Konversi Currency USD 7.500

Based on the approval given by the shareholders at the Annual General Meeting of Shareholders ("GMS") for the 2023 Fiscal Year held on June 14, 2024, the shareholders determined the use of the Company's Profit for the 2023 Fiscal Year amounting to Rp1,051,494,038,985.

Of this amount, the proposed dividend is US\$75,000,000. Dividends can be paid in United States Dollars (USD) and/or Rupiah (Jisdor H-1) gradually and have been paid in stages with rupiah currency to PT Pertamina International Shipping and PT Pertamina Pedeve Indonesia with the following details:

1. On October 2, 2024, the First Installment Payment to PT PIS amounting to Rp700,000,000,000, using the Jisdor H-1 exchange rate of Rp15,204 with a Currency Conversion Value of US\$46,040,515.65
2. On October 4, 2024, repayment of the remaining installments of Dividends to PT PIS amounting to Rp445,686,847,084, using the Jisdor H-1 exchange rate of Rp15,394 with a Currency Conversion Value of US\$28,951,984.35
3. On October 9, 2024, a Dividend payment to PT Pertamina Pedeve Indonesia amounting to Rp117,532,500, using the Jisdor H-1 exchange rate of Rp15,671 with a Currency Conversion Value of US\$7,500

Ikhtisar tentang Efek yang Diterbitkan

Information on the Issue of Securities

Hingga akhir tahun 2024, Perusahaan tidak menerbitkan efek obligasi maupun efek lainnya.

Up to the end of 2024, the Company did not issue bonds or other securities.

Aksi Korporasi

Corporate Action

Sepanjang tahun 2024, tidak terdapat aksi korporasi yang menyebabkan perubahan pada saham, seperti pemecahan saham, penggabungan saham, dividen saham, saham bonus, perubahan nilai nominal saham, penerbitan surat berharga konversi, serta penambahan dan pengurangan modal.

corporate actions that cause changes in shares, such as stock splits, stock mergers, stock dividends, bonus shares, changes in par value of shares, issuance of convertible securities, and capital increases and decreases.

Penghargaan dan Sertifikasi Awards and Certifications

Penghargaan Awards

Sepanjang Tahun 2024, berbagai penghargaan diterima oleh PTK yaitu:

Throughout 2024, various awards were received by PTK, namely:

17 Januari 2024 January 17, 2024



Penghargaan Indonesia Green Awards 2024 - Kategori program CSR Coastal Clean Up di Semarang.

Indonesia Green Awards 2024 - Category of Coastal Clean Up CSR program in Semarang.

17 Januari 2024 January 17, 2024



Penghargaan Indonesia Green Awards 2024 - Kategori program CSR Green Action Mangrove Program (Green MAP) di Makassar.

Indonesia Green Awards 2024 - Category of Green Action Mangrove CSR program (Green MAP) in Makassar.

17 Januari 2024 January 17, 2024



Penghargaan Indonesia Green Awards 2024 - Kategori Program CSR Desa Energi Berdikari di Jambi.

Indonesia Green Awards 2024 - Category of Self-Sufficient Energy Village CSR Program in Jambi.

10 Maret 2024 March 10, 2024



Penghargaan Best Collaborative Action Program - Pertamina Cost Optimization 2023

Best Collaborative Action Program Award - Pertamina Cost Optimization 2023

7 Mei 2024 May 7, 2024



Penghargaan Indonesia Best CSR in Marine Logistics Sector 2024 pada Indonesia CSR Summit 2024 oleh The Iconomics

Indonesia Best CSR in Marine Logistics Sector 2024 Award at Indonesia CSR Summit 2024 by The Iconomics

30 Agustus 2024 August 30, 2024



Penghargaan The Best GRC for Corporate Governance 2024 untuk kategori Marine & Logistics Industries.

The Best GRC for Corporate Governance 2024 Award for the Marine & Logistics Industries category.



30 Agustus 2024 August 30, 2024



Penghargaan *The Best GRC for Corporate Finance 2024* untuk kategori *Marine & Logistics Industries*.

The Best GRC for Corporate Finance 2024 Award for the Marine & Logistics Industries category.

30 Agustus 2024 August 30, 2024



Penghargaan *The Best Chief Executive Officer 2024* untuk kategori *Marine & Logistics Industries* untuk Direktur Utama PTK I Ketut Laba

The Best Chief Executive Officer 2024 Award for the Marine & Logistics Industries category for PTK's President Director, I Ketut Laba

12 September 2024 September 12, 2024



Penghargaan *The Innovative Bunker Service of the Year* pada *Marketeers Editor's Choice Award 2024* atas program *One Stop Solution Bunker Service Provider*.

The Innovative Bunker Service of the Year award at Marketeers Editor's Choice Award 2024 for the One Stop Solution Bunker Service Provider program.

12 September 2024 September 12, 2024



Penghargaan *The Green Corporate Initiative of the Year* pada *Marketeers Editor's Choice Award 2024* melalui Program *Go Green Vessel*.

The Green Corporate Initiative of the Year award at the Marketeers Editor's Choice Award 2024 through the Go Green Vessel Program.

12 September 2024 September 12, 2024



Penghargaan *The Best Marine Logistic Services of the Year* pada *Marketeers Editor's Choice Award 2024* melalui Program *Next Level SBNP Service Provider*.

The Best Marine Logistic Services of the Year Award at the Marketeers Editor's Choice Award 2024 through the Next Level SBNP Service Provider Program.

8 Oktober 2024 October 8, 2024



Penghargaan *HSSE Recognition Awards 2024* pada *HSSE Contractor Townhall 2024* oleh PT Husky-CNOOC Madura Limited (HCML).

HSSE Recognition Awards 2024 at HSSE Contractor Townhall 2024 by PT Husky-CNOOC Madura Limited (HCML).

25 Oktober 2024 October 25, 2024



Penghargaan Indonesian Safety Culture Award (WISCA) Gold Winner (Level 4-Proaktif) - Organisasi yang Menjalankan Program Budaya Keselamatan.

Indonesian Safety Culture Award (WISCA) Gold Winner (Level 4-Proactive) - Organization Implementing Safety Culture Program.

23 Desember 2024 December 23, 2024



Penghargaan Decarbonization Performance Award dari PT Pertamina International Shipping atas Solar Panel Transko Pari dan FC Dwipangga.

Decarbonization Performance Award from PT Pertamina International Shipping for Solar Panel Transko Pari and FC Dwipangga.

Sertifikasi Certifications

Sertifikasi standar International Organization for Standardization atau "ISO" adalah suatu bukti bahwa perusahaan sudah memenuhi standar yang ditetapkan dalam Manajemen ISO. PTK telah memenuhi beberapa sertifikasi sebagai berikut:

International Organization for Standardization or "ISO" standard certification is a proof that the Company has met the standards set in ISO Management. PTK has fulfilled several certifications as follows:

ISO 9001:2015	: Quality Management System;
ISO 45001:2018	: Occupational Health & Safety Management System;
ISO 14001:2015	: Environmental Management System;
ISO/IEC 27001:2013	: Information Security Management System;
ISO 37001:2016	: Anti Bribery Management System.



Sertifikat ISO 9001:2015 No. 34817/16/AN Quality Management System

Sistem Manajemen PTK telah menerapkan Sistem Manajemen yang berorientasi menjaga mutu dengan memastikan organisasi memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggan secara konsisten.

PTK Management System has implemented a Management System that is oriented towards maintaining quality by ensuring the organization understands and meets customer needs consistently.

Badan Sertifikasi Certification Body
RINA

Penerbitan pertama First Issue
19 Desember 2016
December 19, 2016

Berlaku hingga Valid until
18 Desember 2025
December 18, 2025



Sertifikat ISO 45001:2018 No. OHS-2165 Occupational Health & Safety Management System

Sistem Manajemen PTK telah menerapkan Sistem Manajemen yang mendukung terciptanya keselamatan dan kesehatan kerja sehingga dapat mengelola aspek kesehatan dan keselamatan kerja (K3); tempat kerja yang sehat dan aman; dan perlindungan pekerja dengan baik dan benar.

PTK Management System has implemented a Management System that supports the creation of occupational health and safety so that it can manage aspects of occupational health and safety (OHS); a healthy and safe workplace; and worker protection properly and correctly.

Badan Sertifikasi Certification Body
RINA

Penerbitan pertama First Issue
13 November 2014
November 13, 2014

Berlaku hingga Valid until
12 November 2026
November 12, 2026



ISO 14001:2015 No. EMS-5663/AN Environmental Management System

Sistem Manajemen PTK telah menerapkan Sistem manajemen Lingkungan yang mengelola permasalahan terkait dengan lingkungan (pencemaran, penggunaan sumber daya/energi, pelestarian lingkungan, dan lain-lain) untuk membantu upaya pelestarian lingkungan.

PTK's Management System has implemented an Environmental Management System that manages issues related to the environment (pollution, resource/energy use, environmental conservation, etc.) to assist in environmental conservation efforts.

Badan Sertifikasi Certification Body
RINA

Penerbitan pertama First Issue
07 November 2014
November 7, 2014

Berlaku hingga Valid until
06 November 2026
November 6, 2026



Sertifikat ISO 37001:2016 No. 03 13 L 21000062

Sertifikasi verifikasi kesesuaian Sistem Manajemen Anti Penyuapan ("SMAP") sesuai dengan standar internasional.

Verification Certification in conformity with the Anti-Bribery Management System ("SMAP") according to international standards

Diberikan oleh Provided by
TÜV NORD Indonesia

Tanggal berlaku Effective date
28 Desember 2021
 December 28, 2021

Masa habis Expiry date
1 Maret 2025
 March 1, 2025



Sertifikat ISO/IEC 27001:2013 No. 01528XX

Sertifikasi verifikasi kesesuaian Sistem Manajemen Keamanan Informasi ("SMKI") sesuai dengan standar internasional.

Verification Certification in conformity with the Information Security Management Systems ("ISMS") according to international standards.

Diberikan oleh Provided by
PT Intertek Utama Services

Penerbitan pertama First issuance
04 Juli 2023
 July 4, 2023

Berlaku hingga Valid until
31 October 2025
 October 31, 2025



Peristiwa Penting Tahun 2024

Event Highlights in 2024

15-17 Januari 2024 January 15-17, 2024



Kunjungan Kerja Direksi PT Pertamina Trans Kontinental ("PTK") ke Batam dan Lampung

Working Visit of the Board of Directors of PT Pertamina Trans Kontinental ("PTK") to Batam and Lampung

24-26 Januari 2024 January 24-26, 2024



Rapat Kerja Persatuan Wanita Patra ("PWP") PT Pertamina Trans Kontinental ("PTK") di Lombok

Work Meeting of Patra Women Association ("PWP") of PT Pertamina Trans Kontinental ("PTK") in Lombok

29 Januari 2025 January 29, 2024



Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan ("TJSL") PT Pertamina Trans Kontinental ("PTK") Pilar Pertamina Transkore Care Education – PTK Goes to Campus Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar

Social & Environmental Responsibility ("CSR") of PT Pertamina Trans Kontinental ("PTK") Pertamina Transkore Care Education Pillar – PTK Goes to Campus Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar

29 - 31 Januari 2024 January 29-31, 2024



Kunjungan Kerja Dewan Komisaris beserta Perangkat ke Wilayah Kerja Marine Business & Operation Region ("MBOR") I PT Pertamina Trans Kontinental ("PTK") di Palembang & Lampung

Working Visit of the Board of Commissioners and Staff to Marine Business & Operation Region ("MBOR") I Working Area of PT Pertamina Trans Kontinental ("PTK") in Palembang & Lampung

1 - 2 Februari 2024 February 1-2, 2024



Focus Group Discussion ("FGD") Perizinan Terminal Umum PTK Shorebase Tanjung Batu ("PSTB")

Focus Group Discussion ("FGD") on Licensing of PTK Shorebase Tanjung Batu ("PSTB") Public Terminal

21 Februari 2024 February 21, 2024



Management Walkthrough ("MWT") Marine Business Operation Region ("MBOR") II PT Pertamina Trans Kontinental

Management Walkthrough ("MWT") to Marine Business Operation Region ("MBOR") II of PT Pertamina Trans Kontinental

23 Februari 2024 February 23, 2024



Kuliah Umum & Pertamina Transkore Care Education PT Pertamina Trans Kontinental di Politeknik Pelayaran Surabaya

Public Lecture & Pertamina Transkore Care Education of PT Pertamina Trans Kontinental at Politeknik Pelayaran Surabaya

26 Februari 2024 February 26, 2024



Courtesy Visit (Surveillance) Living Core Values (LCV) AKHLAK 2024

27 Februari 2024 February 27, 2024



Semarak Bulan K3 – Shooting Competition

OHS Month Festivities – Shooting Competition

6 Maret 2024 March 6, 2024



Pertamina Cost Optimization
Appreciation Day

28 Maret 2024 March 28, 2024



Tali Kasih Ramadhan PWP – PT
Pertamina Trans Kontinental
Ramadan Appreciation Program PWP –
PT Pertamina Trans Kontinental

29 Maret 2024 March 29, 2024



Management Walkthrough (“MWT”)
PT Pertamina Trans Kontinental ke
Dockyard Bagus Kuning
Management Walkthrough (“MWT”)
of PT Pertamina Trans Kontinental to
Bagus Kuning Dockyard

1-3 April 2024 April 1-3, 2024



Safari Ramadhan & Management
Walkthrough (“MWT”) PT Pertamina
Trans Kontinental ke Balikpapan
Safari Ramadhan & Management
Walkthrough (“MWT”) of PT Pertamina
Trans Kontinental to Balikpapan

4-5 April 2024 April 4-5, 2024



Safari Ramadhan & Management
Walkthrough (“MWT”) PT Pertamina
Trans Kontinental ke Surabaya
Safari Ramadhan & Management
Walkthrough (“MWT”) of PT Pertamina
Trans Kontinental to Surabaya

22 Mei 2024 May 22, 2024



Signing Ceremony Kontrak Pengelolaan
Ship to Ship Fame Balikpapan 2024
bersama Asosiasi Produsen Biofuel
Indonesia (APROBI)
Signing Ceremony of Ship to Ship Fame
Balikpapan 2024 Management Contract
with Indonesian Biofuel Producers
Association (APROBI)

30 Mei 2024 May 30, 2024



Town Hall Meeting

3-6 Juni 2024 June 3-6, 2024



Management Walkthrough (“MWT”)
MBOR I Pekanbaru & Dumai
Management Walkthrough (“MWT”) to
MBOR I Pekanbaru & Dumai

13 Juni 2024 June 13, 2024



CEO Talk 2024 di Institut Transportasi
dan Logistik Trisakti (ITL Trisakti)
mengangkat tema “Creating Successful
Future by Developing Business and
Leadership Skills”

14 Juni 2024 June 14, 2024



Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan (“RUPST”) PTK Tahun Buku 2023
Annual General Meeting of Shareholders
(“AGMS”) of PTK for the 2023 Fiscal Year

24 Juni 2024 June 24, 2024



Pengukuhan Direksi Anak Perusahaan
PTK dan SH IML
Inauguration of the Board of Directors of
PTK Subsidiaries and IML Sub-Holding

CEO Talk 2024 at Institut Transportasi
dan Logistik Trisakti (ITL Trisakti) with
the theme “Creating Successful Future
by Developing Business and Leadership
Skills”



1 Juli 2024 July 1, 2024



Management Walkthrough ("MWT") Dewan Komisaris PTK ke MBOR I - Batam
Management Walkthrough ("MWT") of PTK's Board of Commissioners to MBOR I - Batam

22 Juli 2024 July 22, 2024



Perpisahan Komisaris Utama Bapak Amir Hamzah
Farewell to President Commissioner Mr. Amir Hamzah

30 Juli 2024 July 30, 2024



Signing Ceremony PT Pertamina Lubricants & PT Pertamina Trans Kontinental
Signing Ceremony between PT Pertamina Lubricants & PT Pertamina Trans Kontinental

9 Agustus 2024 August 9, 2024



Management Walkthrough ("MWT") PT Pertamina Trans Kontinental ke Bali
Management Walkthrough ("MWT") of PT Pertamina Trans Kontinental to Bali

12 Agustus 2024 August 12, 2024



Signing Ceremony Memorandum of Agreement ("MoA") Anak Usaha PTK yakni PT Pertamina Marine Engineering (PME) & PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia (JJPI)

Signing Ceremony for Memorandum of Agreement ("MoA") of PTK Subsidiaries, namely PT Pertamina Marine Engineering (PME) & PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia (JJPI)

19 Agustus 2024 August 19, 2024



Signing Ceremony Memorandum of Understanding Anak Usaha PTK yakni PME & PT FPT Software Indonesia

Signing Ceremony for Memorandum of Understanding of PTK Subsidiaries, namely PME & PT FPT Software Indonesia

6 September 2024 September 6, 2024



PTK berpartisipasi dalam Hub Space 2024 - pameran transportasi dalam rangka memperingati Hari Perhubungan Nasional 2024.

PTK participated in Hub Space 2024 - a transportation exhibition in commemoration of National Transportation Day 2024.

27 September 2024 September 27, 2024



Penandatanganan Akta Jual Beli Kapal AWB Petroleum Superior

The signing of the Deed of Sale and Purchase of AWB Petroleum Superior Vessel

9 Oktober 2024 October 9, 2024



Penandatanganan Kontrak Kerjasama Penyediaan Pekerja Docking dan Sparepart di Lingkungan PME antara PT Jasa Pelabuhan Indonesia dengan PME

The signing of the Cooperation Contract for the Provision of Docking Workers and Spare Parts within PME between PT Jasa Pelabuhan Indonesia and PME

18 Oktober 2024 October 18, 2024



Town Hall Meeting dan Pengenalan Direktur baru yaitu Bapak Yudi Wibisono sebagai Direktur Operasi

Town Hall Meeting and Introduction of new Director, Mr. Yudi Wibisono, as Director of Operations

20 November 2024 November 20, 2024



Gala Dinner Customer Gathering PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI)

Gala Dinner Customer Gathering of PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI)

28-29 November 2024 November 28-29, 2024



Executive Board Retreat SH IML
Executive Board Retreat of IML Sub-Holding

4-5 Desember 2024 December 4-5, 2024



Management Walkthrough ("MWT") Dewan Komisaris PT Pertamina Trans Kontinental ke MBOR II - Cilacap

Management Walkthrough ("MWT") of the Board of Commissioners of PT Pertamina Trans Kontinental to MBOR II - Cilacap

16 Desember 2024 December 16, 2024



Go Live LCT Phase 2024

21 Desember 2024 December 21, 2024



Kunjungan Menteri ESDM & Direktur Utama PT Pertamina (Persero) di LPG Terminal Tanjung Sekong

Visit of the Minister of EMR & President Director of PT Pertamina (Persero) at Tanjung Sekong LPG Terminal

31 Desember 2024 December 31, 2024



Go Live POC Aplikasi MarineM

Go Live POC of the MarineM Application



Testimoni

Testimoni

PTK di Mata Mereka: Komitmen Pada Bisnis Berkelanjutan

PTK from Their Point of View: Commitment to Sustainable Business

Azhar Anwar

Kepala Bidang Keanekaragaman Hayati Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar
Head of Biodiversity Department of Makassar City Environmental Agency



"Kami mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada PTK atas inisiatif yang telah dilakukan dalam melestarikan kawasan pesisir melalui program *Green Mangrove Action* guna mendukung ekosistem karbon biru dengan menanam sebanyak 2.023 bibit mangrove berjenis *Rhizophora mucronata* dan meresmikan rumah pembibitan berkapasitas 2.045 bibit mangrove di Kampung Wisata mangrove Lantebung Kota Makassar. Kami berharap program ini dapat berkelanjutan. Keterlibatan, partisipasi aktif, dan sinergitas antara kelompok binaan dan masyarakat juga menjadi hal yang penting sehingga kegiatan hari ini dapat dirasakan dampaknya secara berkelanjutan."

"We appreciate and express our gratitude to PTK for the initiatives taken in preserving coastal areas through the Green Mangrove Action program to support the blue carbon ecosystem by planting 2,023 *Rhizophora mucronata* mangrove seedlings and inaugurating a seedling house with a capacity of 2,045 mangrove seedlings at the Lantebung mangrove Tourism Village in Makassar City. We hope this program can be sustainable. The involvement, active participation, and synergy between the fostered groups and the community are also important so that today's activities can have a sustainable impact."

Sumber/Source: <https://www.suara.com/bisnis/2023/10/02/171051/dukung-ekosistem-karbon-biru-pertamina-trans-kontinental-gelar-green-mangrove-action-program?page=all>

Dewa Gede Ary Candra Wisnawa

Kepala DLH Jembrana
Head of Jembrana Environmental Agency



Untuk menjaga keberlangsungan lingkungan dan keanekaragaman hayati diperlukan kerja sama dari berbagai pihak. Kami harap program pengembangan lingkungan dari perusahaan-perusahaan seperti PTK terus berlanjut. Kami percaya bahwa dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, kita dapat menciptakan dampak positif yang berkelanjutan bagi lingkungan dan komunitas sekitar.

To maintain the sustainability of the environment and biodiversity, cooperation from various parties is needed. We hope that environmental development programs from companies like PTK will continue. We believe that by involving the community and other stakeholders, we can create a sustainable positive impact on the environment and surrounding communities.

Sumber/Source: <https://money.kompas.com/read/2024/08/22/181756626/pertamina-trans-kontinental-tanam-5500-bibit-mangrove-di-bali>

Moejiono, M.T., M.Mar.E

Direktur Polteknik Pelayaran Surabaya
Director of Polytechnic of Shipping Surabaya



"Kami tentunya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada PTK atas kontribusinya dalam berbagi ilmu maritim migas di Poltekpel Surabaya. Melalui kesempatan tersebut, PTK telah memberikan gambaran lapangan yang sesungguhnya kepada Taruna dan Taruni, yang tentunya sangat bermanfaat. Hal ini telah memberikan motivasi kepada mereka untuk terus meningkatkan nilai diri, serta mempersiapkan diri untuk bersaing di industri maritim dan migas di masa depan."

"We would like to express our deepest gratitude to PTK for their contribution in sharing maritime and oil and gas knowledge at Poltekpel Surabaya. Through this opportunity, PTK provided a real field picture to the Cadets, which is certainly very useful. It has motivated them to continue to improve their grades and prepare themselves to compete in the maritime and oil and gas industry in the future."

Sumber/Source: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240228153907-4-518365/ptk-berbagi-ilmu-maritim-migas-di-poltekpel-surabaya>

Jefridin Hamid

Sekretaris Daerah Kota Batam
Regional Secretary of Batam City



"Dengan program Inkubasi Ekonomi Bahari ini yang merupakan salah satu program flagship TJSL PTK, saya berharap berdampak baik untuk perekonomian dan juga bermanfaat di sektor pendidikan, kesehatan, dan koperasi UKM. Saat ini Pemerintah Kota (Pemko) Batam terus berupaya untuk memperbaiki infrastruktur dan memperlancar akses untuk mendorong pertumbuhan Batam. Kami berharap program ini dapat memaksimalkan pemanfaatan potensi hasil perikanan di wilayah Batam dan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat."

"With this Maritime Economic Incubation program, which is one of PTK's CSR flagship programs, I hope it will have a good impact on the economy and also benefit the education, health, and SME cooperative sectors. Currently, the Batam City Government (Pemko) continues to strive to improve infrastructure and facilitate access to encourage Batam's growth. We hope this program can maximize the utilization of the potential of fishery products in the Batam area and provide significant benefits to the community."

Sumber/Source: <https://www.matakepri.co.id/detail-news/1970/01/01/31177/>

Irma Nurmayanti, S.I.P

Kabid Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Balikpapan
Head of Environmental Damage Pollution Control Department of the Balikpapan Environmental Agency



"Kami mengucapkan terima kasih atas kepedulian dan dukungan PTK terhadap program Desa Energi Berdikari Wisata Kariangau (DEB Wiskar). Dukungan ini sangat berarti dalam mewujudkan keberlanjutan energi dan mendukung sektor pariwisata yang ramah lingkungan. Inisiatif ini sejalan dengan visi Kota Balikpapan untuk menjadi kota yang lebih berkelanjutan, berfokus pada pemanfaatan energi terbarukan, dan memajukan sektor pariwisata yang berbasis pada keberlanjutan lingkungan."

Sumber: IG PTK

"We would like to express our gratitude for PTK's concern and support for the Self-sufficient Energy Village of Kariangau Tourism (DEB Wiskar) program. This support is valuable in realizing energy sustainability and supporting an environmentally friendly tourism sector. This initiative is in line with Balikpapan City's vision to become a more sustainable city, focusing on the utilization of renewable energy and advancing the tourism sector based on environmental sustainability."

Sumber: IG PTK Source: PTK's Instagram



02



Laporan Manajemen

Management Report



Laporan Dewan Komisaris

Report From the Board of Commissioners



Subagjo Hari Moeljanto
Komisaris Utama
President Commissioner

“Dewan Komisaris memandang bahwa strategi dan kebijakan yang disusun dan diimplementasikan Direksi pada tahun 2024 telah mencerminkan arah pengembangan yang tepat serta berorientasi pada pertumbuhan berkelanjutan jangka panjang. Hal tersebut tercermin dari peningkatan pencapaian laba usaha sebesar Rp1,34 triliun atau 140,22% dari target.”

“The Board of Commissioners considers that the strategies and policies formulated and implemented by the Board of Directors in 2024 have reflected the right direction for development and are oriented towards long-term sustainable growth. It is evidenced by the increase in operating profit achievement of Rp1.34 trillion or 140.22% of the target.”

Para Pemegang Saham Dan Pemangku Kepentingan Yang Kami Hormati,

Dear Shareholders and Stakeholders,

Mewakili Dewan Komisaris, pertama-tama kami panjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga PT Pertamina Trans Kontinental (PTK) dapat menutup tahun 2024 dengan capaian kinerja yang positif dan membanggakan. Dengan ini, kami menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun 2024. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kami dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi, sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/ GCG*). Laporan tugas pengawasan ini mencakup aspek pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) maupun Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), penilaian atas kinerja Direksi dan dasar penilaiannya, serta isu strategis yang sedang dihadapi Perusahaan. Selain itu, Dewan Komisaris juga akan menyampaikan penilaian kami terhadap kinerja Direksi dalam upaya merespon tantangan yang ada untuk tetap bertumbuh. Kami juga akan memberikan pandangan terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik termasuk implementasi *Whistle Blowing System* (WBS), dan perubahan komposisi Dewan Komisaris selama tahun 2024 serta prospek usaha PTK pada masa mendatang.

On behalf of the Board of Commissioners, firstly we would like to express praise and gratitude to the Almighty God for the grace and blessings that allows PT Pertamina Trans Kontinental (PTK) to close 2024 with positive and commendable performance achievements. With this, we present the Supervisory Task Report by the Board of Commissioners for 2024. We prepared this report as our accountability in carrying out the supervisory function and providing advice to the Board of Directors according to the principles of Good Corporate Governance (GCG). This supervisory task report covers aspects of supervision over the implementation of the Company's Work Plan and Budget (RKAP) as well as the Company's Long-Term Plan (RJPP), assessment of the Board of Directors' performance, and the basis for the assessment, as well as strategic issues currently faced by the Company. Additionally, the Board of Commissioners will also convey our assessment of the Board of Directors' performance in responding to existing challenges to continue growing. We will also provide our views on the implementation of good corporate governance, including the implementation of the Whistle Blowing System (WBS) and changes in the composition of the Board of Commissioners during 2024, as well as PTK's business prospects in the future.

Tinjauan Ekonomi Global Global Economic Review

Sepanjang tahun 2024, laju pertumbuhan ekonomi global menunjukkan tren perlambatan dengan capaian sebesar 3,2%, sebagaimana dilaporkan dalam *World Economic Outlook* oleh *International Monetary Fund* (IMF). Kinerja ini dipengaruhi oleh berbagai dinamika global, utamanya peningkatan tensi geopolitik yang mengganggu stabilitas rantai pasok dan menekan permintaan global, sehingga mendorong inflasi pada komoditas energi dan pangan di banyak wilayah. Kondisi perekonomian utama dunia menunjukkan performa yang beragam. Amerika Serikat dan India mencatatkan pertumbuhan yang relatif stabil, ditopang oleh tingkat konsumsi domestik yang kuat serta intervensi kebijakan fiskal yang efektif. Di sisi lain, perlambatan terjadi di Tiongkok akibat

Throughout 2024, the global economic growth rate showed a slowing trend with an achievement of 3.2%, as reported in the *World Economic Outlook* by the International Monetary Fund (IMF). This performance is influenced by various global dynamics, primarily the increase in geopolitical tensions that disrupt supply chain stability and suppress global demand, thereby driving inflation in energy and food commodities in many regions. The economic conditions of the world's major economies are showing varied performances. The United States and India recorded relatively stable growth, supported by robust domestic consumption levels and effective fiscal policy interventions. On the other hand, a slowdown is occurring in China due to weak household consumption



lemahnya konsumsi rumah tangga dan penurunan investasi. Sementara itu, konflik yang berkepanjangan antara Israel dan Palestina semakin menambah ketidakpastian geopolitik di kawasan Timur Tengah, yang berdampak terhadap harga energi dan sentimen pasar global. Di tengah tekanan tersebut, berbagai negara merespon dengan kebijakan pengetatan fiskal dan moneter guna mengendalikan inflasi. Namun langkah ini secara bersamaan turut membatasi ruang pemulihan ekonomi global yang masih menghadapi tantangan struktural pasca pandemi dan krisis energi.

and declining investment. Meanwhile, the prolonged conflict between Israel and Palestine further adds to the geopolitical uncertainty in the Middle East, impacting energy prices and global market sentiment. Amidst these pressures, various countries are responding with fiscal and monetary tightening policies to control inflation. However, this step simultaneously limits the space for global economic recovery, which is still facing structural challenges post-pandemic and the energy crisis.

Pertumbuhan Ekonomi Nasional yang Tangguh Resilient National Economic Growth

Dewan Komisaris mencermati bahwa tahun 2024 ditandai oleh dinamika ekonomi nasional yang relatif stabil meskipun diwarnai oleh ketidakpastian global. Dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,03% dan inflasi yang terkendali di angka 1,57%, Indonesia menunjukkan fondasi ekonomi yang cukup kuat. Kondisi ini mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam menjaga stabilitas makroekonomi, sekaligus memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk tetap tumbuh. Penyelenggaraan Pemilu 2024 yang berjalan lancar juga menjadi faktor penting dalam menjaga iklim usaha dan kepercayaan pasar terhadap arah kebijakan ekonomi ke depan.

The Board of Commissioners notes that the year 2024 is marked by relatively stable national economic dynamics despite being colored by global uncertainty. With an economic growth of 5.03% and controlled inflation at 1.57%, Indonesia shows a fairly strong economic foundation. This condition reflects the government's success in maintaining macroeconomic stability while also providing space for business actors to continue growing. The smooth conduct of the 2024 elections is also a crucial factor in maintaining the business climate and market confidence in the direction of future economic policies.

Dewan Komisaris memandang bahwa sektor jasa perkapalan, *marine*, dan logistik terus bergerak dinamis, mengikuti arah perubahan kebutuhan pasar serta perkembangan teknologi. Tuntutan global terhadap pengurangan emisi karbon mendorong pelaku usaha di sektor ini, termasuk PTK, untuk memperkuat strategi keberlanjutan. Inisiatif seperti efisiensi energi, penggunaan teknologi ramah lingkungan, dan implementasi konsep green logistics menjadi langkah penting yang patut terus ditingkatkan. Percepatan digitalisasi di berbagai lini usaha juga menjadi kekuatan transformasional yang signifikan. Dewan Komisaris melihat peluang besar bagi PTK untuk memanfaatkan teknologi digital dalam meningkatkan efektivitas operasional, transparansi layanan, dan daya saing di pasar. Selain itu, pulihnya aktivitas pelabuhan dan meningkatnya kebutuhan logistik energi di kawasan Asia memberikan peluang ekspansi yang menjanjikan.

The Board of Commissioners views that the shipping, marine, and logistics service sectors continue to move dynamically, following the direction of changing market needs and technological developments. Global demands for carbon emission reduction are driving businesses in this sector, including PTK, to strengthen their sustainability strategies. Initiatives such as energy efficiency, the use of environmentally friendly technology, and the implementation of green logistics concepts are essential steps that should continue to be enhanced. The acceleration of digitalization across various business lines has also become a significant transformational force. The Board of Commissioners sees great opportunities for PTK to leverage digital technology in enhancing operational effectiveness, service transparency, and market competitiveness. In addition, the recovery of port activities and the increasing demand for energy logistics in the Asia region provide promising expansion opportunities.

Dewan Komisaris juga menaruh perhatian pada tantangan eksternal seperti geopolitik global dan disrupsi rantai pasok yang masih perlu diantisipasi dengan kebijakan mitigasi risiko yang adaptif. Oleh karena itu, kolaborasi erat antara Direksi dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci untuk menjaga ketahanan dan relevansi bisnis Perusahaan. Ke depan, dengan dukungan stabilitas pemerintahan dan kelanjutan proyek strategis nasional, Dewan Komisaris optimis bahwa PTK memiliki ruang pertumbuhan yang solid. Transformasi bisnis yang konsisten, pemanfaatan teknologi, serta komitmen terhadap prinsip keberlanjutan akan menjadi pondasi penting dalam menyongsong masa depan industri yang semakin kompetitif dan berbasis nilai jangka panjang.

The Board of Commissioners also pays attention to external challenges, such as global geopolitics and supply chain disruptions, that still need to be anticipated with adaptive risk mitigation policies. Therefore, close collaboration between the Board of Directors and all stakeholders is key to maintaining the resilience and relevance of the Company's business. In the future, with the support of government stability and the continuation of national strategic projects, the Board of Commissioners is optimistic that PTK has solid growth potential. Consistent business transformation, the utilization of technology, and a commitment to sustainability principles will be key foundations in facing the future of an increasingly competitive and long-term value-based industry.

Penilaian Terhadap Kinerja Direksi dan Dasar Penilaiannya

Performance Assessment for the Board of Directors and the Basis for the Assessment

Dewan Komisaris menilai bahwa kinerja Direksi dalam mengelola Perusahaan telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang sehat. Direksi dinilai mampu merespon berbagai tantangan yang muncul melalui implementasi strategi, kebijakan, dan inisiatif yang tepat sasaran, sehingga mampu mendorong peningkatan kinerja operasional maupun keuangan Perusahaan. Salah satu indikator keberhasilan tersebut tercermin dari tingkat kesehatan Perusahaan yang mencapai skor 93,64 dan berada pada level "AA", termasuk dalam klasifikasi "SEHAT". Realisasi *Key Performance Indicators* (KPI) Perusahaan yang mencapai 108,25% menjadi indikator kuat atas keberhasilan Direksi dalam menjalankan strategi operasional, keuangan, dan pengelolaan sumber daya secara efektif. Capaian ini menunjukkan bahwa Perusahaan dikelola secara efisien, *prudent*, dan berorientasi pada keberlanjutan, serta menjadi cerminan dari efektivitas peran Direksi dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan bisnis di tengah dinamika industri sepanjang tahun 2024.

Dewan Komisaris memandang bahwa strategi dan kebijakan yang telah dirumuskan dan dijalankan oleh Direksi PTK sepanjang tahun 2024 telah selaras dengan visi dan misi perusahaan serta sejalan dengan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2022–2027. Strategi tersebut mencerminkan respon yang adaptif terhadap dinamika industri logistik energi nasional dan global, serta mencakup langkah-langkah konkrit untuk memperkuat daya saing

The Board of Commissioners assesses that the performance of the Board of Directors in managing the Company has been good and in accordance with the principles of sound governance. The Board of Directors is deemed capable of responding to various challenges that arise through the implementation of targeted strategies, policies, and initiatives, thereby driving improvements in both the operational and financial performance of the Company. One of the indicators of success is reflected in the Company's soundness level, which reached a score of 93.64 and is at the "AA" level, classified as "HEALTHY." The realization of the Company's Key Performance Indicators (KPI) at 108.25% serves as a strong indicator of the Board of Directors' success in implementing operational, financial, and resource management strategies effectively. This achievement shows that the Company is managed efficiently, prudently, and with a focus on sustainability, and reflects the effectiveness of the Board of Directors in maintaining business stability and growth amidst industry dynamics throughout 2024.

The Board of Commissioners views that the strategies and policies formulated and implemented by the Board of Directors of PTK throughout 2024 have been in line with the Company's vision and mission as well as in accordance with the Company's Long-Term Plan (RJPP) 2022–2027. The strategy reflects an adaptive response to the dynamics of the national and global energy logistics industry and includes concrete steps to strengthen competitiveness and business



dan keberlanjutan usaha. Dewan Komisaris mengapresiasi fokus Direksi dalam menjaga keandalan rantai pasok energi nasional, khususnya melalui optimalisasi potensi logistik domestik, penguatan peran dalam pengangkutan dan layanan kelautan, serta pengembangan jasa logistik secara terintegrasi. Langkah ini tidak hanya mendukung ketahanan energi nasional, tetapi juga berkontribusi terhadap pencapaian agenda transisi energi dan target *Net Zero Emission* (NZE) pada tahun 2060.

Dewan Komisaris mencermati bahwa sebagian besar segmen usaha, seperti *Shipping Activities*, *Marine Services*, dan *Logistic Services*, berhasil menunjukkan kinerja operasional yang solid, bahkan pada beberapa indikator kunci berhasil melampaui target secara signifikan. Dewan Komisaris menilai strategi penguatan pada tiga segmen utama usaha PTK yaitu *Shipping Activities*, *Marine Services*, dan *Logistics Services*, telah dijalankan dengan arah yang tepat dan terukur. Penguatan armada dan efisiensi operasional di segmen *Shipping*, peningkatan mutu layanan keagenan dan pengembangan jasa maritim di segmen *Marine*, serta ekspansi dan digitalisasi layanan logistik merupakan langkah strategis yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan tuntutan operasional yang makin kompleks. Dewan Komisaris memandang bahwa transformasi digital, peningkatan kapabilitas sumber daya manusia, serta penguatan budaya organisasi yang adaptif telah menjadi bagian penting dari strategi korporat. Inisiatif-inisiatif seperti pengembangan sistem tata kerja, implementasi program keberlanjutan, peningkatan ESG rating, serta perbaikan berkelanjutan melalui *Continuous Improvement Program* (CIP) menunjukkan keseriusan Direksi dalam membangun fondasi bisnis yang solid dan kompetitif. Dengan mempertimbangkan kompleksitas tantangan eksternal dan kebutuhan internal, Dewan Komisaris memandang bahwa strategi dan kebijakan yang disusun dan diimplementasikan Direksi pada tahun 2024 telah mencerminkan arah pengembangan yang tepat serta berorientasi pada pertumbuhan berkelanjutan jangka panjang. Dewan Komisaris mendorong agar Direksi terus menjaga konsistensi pelaksanaan strategi tersebut dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, kepatuhan terhadap regulasi, serta aspirasi pemangku kepentingan. Dewan Komisaris mendukung sepenuhnya langkah dan komitmen Direksi bersama seluruh jajaran manajemen PTK untuk secara berkelanjutan melakukan perbaikan kinerja dan semangat memberikan layanan terbaik kelas dunia kepada *stakeholder*-nya.

sustainability. The Board of Commissioners appreciates the Board of Directors' focus on maintaining the reliability of the national energy supply chain, particularly through the optimization of domestic logistics potential, strengthening roles in transportation and maritime services, and the development of integrated logistics services. This step not only supports national energy resilience but also contributes to achieving the energy transition agenda and the *Net Zero Emissions* (NZE) target by 2060.

The Board of Commissioners noted that most business segments, such as *Shipping Activities*, *Marine Services*, and *Logistics Services*, managed to demonstrate solid operational performance, even exceeding targets significantly on several key indicators. The Board of Commissioners assesses that the strengthening strategy in the three main business segments of PTK, namely *Shipping Activities*, *Marine Services*, and *Logistics Services*, has been implemented in the right and measurable direction. Strengthening the fleet and operational efficiency in the *Shipping* segment, improving the quality of agency services, and developing maritime services in the *Marine* segment, as well as the expansion and digitalization of logistics services, are strategic steps that align with market needs and increasingly complex operational demands. The Board of Commissioners views that digital transformation, enhancement of human resource capabilities, and strengthening of an adaptive organizational culture have become crucial parts of the corporate strategy. Initiatives such as the development of work system structures, the implementation of sustainability programs, the improvement of ESG ratings, and continuous improvement through the *Continuous Improvement Program* (CIP) demonstrate the Board of Directors' seriousness in building a solid and competitive business foundation. Considering the complexity of external challenges and internal needs, the Board of Commissioners views that the strategies and policies formulated and implemented by the Board of Directors in 2024 reflect the right direction for development and are oriented towards long-term sustainable growth. The Board of Commissioners encourages the Board of Directors to continue maintaining the consistency of implementing these strategies by adhering to the principles of prudence, regulatory compliance, and stakeholder aspirations. The Board of Commissioners fully supports the steps and commitments of the Board of Directors, along with the entire management team of PTK, to continuously improve performance and maintain the spirit of providing world-class services to its stakeholders.

Dewan Komisaris juga memberikan apresiasi atas capaian positif yang berhasil diraih Direksi dalam mengelola kinerja keuangan Perusahaan sepanjang tahun 2024. Meskipun pendapatan usaha tercatat sebesar Rp7,56 triliun atau setara 98,11% dari target RKAP sebesar Rp7,70 triliun, Direksi berhasil mengelola biaya secara efisien sehingga mampu mendorong peningkatan profitabilitas Perusahaan secara signifikan. Beban pokok pendapatan berhasil ditekan hingga hanya 90,73% dari target, yang pada akhirnya menghasilkan laba bruto sebesar Rp2,60 triliun atau 116,21% dari target. Strategi efisiensi juga tampak pada pengelolaan beban umum dan administrasi serta total beban usaha yang terealisasi di bawah target, sehingga menopang pencapaian laba usaha sebesar Rp1,34 triliun atau 140,22% dari target. Meskipun terdapat beberapa komponen pendapatan non-operasional yang belum mencapai target, secara keseluruhan Perusahaan berhasil membukukan laba sebelum pajak sebesar Rp1,33 triliun (149,82% dari target) dan laba tahun berjalan sebesar Rp1,08 triliun atau 153,54% dari target RKAP. Dewan Komisaris menilai bahwa pencapaian ini menunjukkan keberhasilan Direksi dalam menjalankan strategi bisnis yang tepat, responsif, dan efisien, serta menjadi indikator kuat atas peningkatan daya saing dan ketahanan finansial Perusahaan dalam menghadapi tantangan industri yang dinamis.

Dewan Komisaris memandang bahwa posisi keuangan PTK pada tahun 2024 menunjukkan perkembangan yang positif dan stabil. Total aset yang mencapai Rp9,08 triliun atau 100,51% dari target merupakan pencapaian yang menggembirakan, didukung oleh peningkatan kas dan piutang usaha yang sehat. Meskipun liabilitas tercatat meningkat menjadi Rp4,48 triliun atau 131,61% dari target, hal ini merupakan bagian dari strategi perusahaan dalam mengelola utang usaha untuk mendukung kelancaran operasional dan ekspansi bisnis. Di sisi lain, ekuitas tercatat sebesar Rp4,60 triliun atau 81,74% dari target, yang masih memberikan ruang bagi penguatan modal melalui penyertaan investasi di masa depan. Secara keseluruhan, Dewan Komisaris meyakini bahwa struktur keuangan PTK tetap kuat, sehat, dan terkendali, sehingga mendukung kelangsungan usaha serta pertumbuhan yang berkelanjutan.

The Board of Commissioners also expressed appreciation for the positive achievements attained by the Board of Directors in managing the Company's financial performance throughout 2024. Although revenue was recorded at Rp7.56 trillion or equivalent to 98.11% of the ABOP target of Rp7.70 trillion, the Board of Directors successfully managed costs efficiently, significantly boosting the Company's profitability. The cost of revenue was successfully reduced to only 90.73% of the target, ultimately resulting in a gross profit of Rp2.60 trillion or 116.21% of the target. Efficiency strategies were also evident in the management of general and administrative expenses, as well as total operating expenses, which were realized below the target, thereby supporting the achievement of the operating profit of Rp1.34 trillion or 140.22% of the target. Although there are several non-operational income components that have not yet reached their targets, overall, the Company successfully recorded a pre-tax profit of Rp1.33 trillion (149.82% of the target) and a current year profit of Rp1.08 trillion or 153.54% of the ABOP target. The Board of Commissioners assesses that this achievement demonstrates the Board of Directors success in implementing the right, responsive, and efficient business strategies and serves as a strong indicator of the Company's increased competitiveness and financial resilience in facing the dynamic industry challenges.

The Board of Commissioners views that PTK's financial position in 2024 shows positive and stable development. Total assets reaching Rp9.08 trillion or 100.51% of the target is an encouraging achievement, supported by an increase in cash and healthy accounts receivable. Although recorded liabilities increased to Rp4.48 trillion or 131.61% of the target, this is part of the Company's strategy in managing trade debts to support operational smoothness and business expansion. On the other hand, equity was recorded at Rp4.60 trillion or 81.74% of the target, which still provides room for capital strengthening through future investment participation. Overall, the Board of Commissioners believes that PTK's financial structure remains strong, healthy, and controlled, thus supporting business continuity and sustainable growth.



Pengawasan dalam Perumusan Strategi dan Kebijakan Perusahaan

Supervision in Formulating Company Strategy and Policy

Dewan Komisaris secara aktif berperan dalam proses perumusan dan penerapan strategi serta kebijakan strategis Perusahaan dengan memberikan arahan dan rekomendasi yang konstruktif kepada Direksi, sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sepanjang tahun 2024, Dewan Komisaris telah melaksanakan fungsi pengawasan secara komprehensif terhadap pengelolaan Perusahaan oleh Direksi. Pengawasan ini mencakup penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*governance*), manajemen risiko secara menyeluruh, pengelolaan isu keberlanjutan yang semakin krusial, serta memastikan kepatuhan Perusahaan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Dewan Komisaris senantiasa memastikan bahwa seluruh langkah strategis dan operasional Perusahaan berjalan secara terarah, transparan, dan bertanggung jawab.

Sepanjang tahun 2024, Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan dan pendampingan strategi usaha serta tata kelola PTK melalui beberapa langkah utama. Rapat rutin bersama Direksi digelar setiap bulan untuk membahas implementasi RKAP dan kinerja keuangan, serta rapat internal guna menelaah hasil pengawasan komite dan memberikan arahan perbaikan. Dewan Komisaris juga aktif melakukan kunjungan lapangan (MWT) ke unit kerja dan bertemu pemangku kepentingan untuk memastikan tata kelola operasional berjalan baik. Selain itu, Dewan memberikan tanggapan atas dokumen perencanaan strategis seperti RKAP dan RJPP serta menyetujui atau merekomendasikan usulan Direksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Dewan Komisaris secara aktif memberikan persetujuan, nasihat, dan saran yang konstruktif kepada Direksi dalam rangka memastikan pengelolaan Perusahaan berjalan efektif, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Beberapa hal penting yang menjadi perhatian dan persetujuan Dewan Komisaris meliputi pengukuran dan penetapan tata kelola perusahaan yang baik, penggantian anggota Komite Audit, serta persetujuan konsorsium tender terkait layanan *towing*, *tank cleaning*, dan *lay-up* FSO Arco Ardjuna. Dewan Komisaris juga memberikan persetujuan atas pengisian jabatan Chief Audit Executive serta menyetujui

The Board of Commissioners actively participates in the formulation and implementation of the Company's strategies and strategic policies by providing constructive guidance and recommendations to the Board of Directors in accordance with the authority regulated in the Company's Articles of Association and applicable laws and regulations. Throughout 2024, the Board of Commissioners comprehensively performed its supervisory function over the management of the Company by the Board of Directors. This supervision includes the implementation of good corporate governance principles, comprehensive risk management, increasingly crucial sustainability issue management, and ensuring the Company's compliance with all laws and regulations. Thus, the Board of Commissioners consistently ensures that all strategic and operational steps of the Company are conducted in a directed, transparent, and responsible manner.

Throughout 2024, the Board of Commissioners carried out the functions of oversight and support for business strategy and PTK governance through several key steps. Regular meetings with the Board of Directors are held every month to discuss the implementation of the ABOP and financial performance, as well as internal meetings to review the results of committee oversight and provide improvement directions. The Board of Commissioners also actively conducts field visits (MWT) to work units and meets with stakeholders to ensure that operational governance runs smoothly. In addition, the Board provides feedback on strategic planning documents such as ABOP and RJPP and approves or recommends the Board of Directors' proposals in accordance with applicable regulations.

The Board of Commissioners actively provides approval, advice, and constructive suggestions to the Board of Directors to ensure the Company's management runs effectively, transparently, and in accordance with applicable regulations. Several essential matters that received the attention and approval of the Board of Commissioners include the measurement and establishment of good corporate governance, the replacement of Audit Committee members, and the approval of the tender consortium related to towing services, tank cleaning, and the lay-up of FSO Arco Ardjuna. The Board of Commissioners also approved the filling of the Chief

Laporan Manajemen 2024 sebagai bagian dari komitmen transparansi dan akuntabilitas. Dalam hal pengawasan fungsi internal audit, Dewan Komisaris menerima *Annual Audit Plan* (AAP) tahun 2024, serta memantau pelaksanaan kerja sama strategis, seperti penandatanganan Memorandum of Agreement dengan NKA Energy Ventures Sdn. Bhd.

Sepanjang tahun 2024, Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas berbagai keputusan strategis, termasuk penggunaan laba 2023, remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, serta penghargaan kinerja. Dewan Komisaris juga menyetujui penyesuaian struktur organisasi, penempatan wakil perseroan di anak perusahaan, kerja sama operasi, dan penunjukan mitra strategis. Selain itu, Dewan mengesahkan Buku RKAP 2024, penghapusan aset tetap, serta kontrak manajemen yang memuat KPI Direksi.

Dengan rangkaian persetujuan dan arahan tersebut, Dewan Komisaris memastikan Perusahaan tetap berada pada jalur pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan serta mampu menghadapi tantangan bisnis secara proaktif. Dalam menjalankan peran pengawasan terhadap pengelolaan Perusahaan, Dewan Komisaris secara aktif melakukan evaluasi dan pemantauan melalui berbagai forum resmi. Sepanjang tahun 2024, Dewan Komisaris telah melaksanakan total 35 (tiga puluh lima) kali rapat, yang terdiri atas Rapat Internal Dewan Komisaris sebanyak 23 (dua puluh tiga) dan 12 (dua belas) Rapat Gabungan bersama Direksi. Melalui Rapat Gabungan tersebut, Dewan Komisaris memberikan perhatian khusus terhadap berbagai isu strategis yang mempengaruhi kinerja Perusahaan, antara lain laporan kinerja bulanan operasional, keuangan, dan investasi, kemajuan proyek-proyek utama, serta implementasi tata kelola, pengelolaan risiko, dan pengendalian internal. Pembahasan juga mencakup hal-hal krusial seperti pengalihan aset kepada entitas anak, sebagai bagian dari penataan portofolio usaha Perusahaan.

Sebagai bentuk komitmen terhadap pengawasan yang konstruktif dan berbasis fakta lapangan, Dewan Komisaris juga melaksanakan kunjungan kerja melalui kegiatan *Management Walk Through* (MWT) ke berbagai lokasi operasional strategis. Kegiatan ini dilaksanakan bersama Komite Audit, Komite Pemantau Risiko & Investasi, serta Komite Nominasi dan Remunerasi. Melalui MWT, Dewan Komisaris memperoleh masukan dan gambaran nyata atas kondisi di lapangan, yang selanjutnya menjadi dasar dalam memberikan rekomendasi perbaikan dan penguatan strategi pengelolaan kepada Direksi.

Audit Executive position and the 2024 Management Report as part of the commitment to transparency and accountability. In terms of overseeing the internal audit function, the Board of Commissioners received the 2024 Annual Audit Plan (AAP) and monitored the implementation of strategic cooperation, such as the signing of the Memorandum of Agreement with NKA Energy Ventures Sdn. Bhd.

Throughout 2024, the Board of Commissioners approved various strategic decisions, including the use of 2023 profits, remuneration for the Board of Directors and the Board of Commissioners, as well as performance awards. The Board also approved adjustments to the organizational structure, the placement of company representatives in subsidiaries, operational cooperation, and the appointment of strategic partners. In addition, the Board approved the 2024 ABOP Book, the disposal of fixed assets, and the management contracts containing the Board of Directors' KPIs.

With this series of approvals and directives, the Board of Commissioners ensures that the Company remains on a path of healthy and sustainable growth and can proactively face business challenges. In carrying out its supervisory role over the management of the Company, the Board of Commissioners actively conducts evaluations and monitoring through various official forums. Throughout 2024, the Board of Commissioners held a total of 35 (thirty-five) meetings, consisting of 23 (twenty-three) Internal Board of Commissioners Meetings and 12 (twelve) Joint Meetings with the Board of Directors. Through these Joint Meetings, the Board of Commissioners paid special attention to various strategic issues affecting the Company's performance, including monthly operational, financial, and investment performance reports, progress on major projects, as well as the implementation of governance, risk management, and internal control. The discussions also covered crucial matters, such as the transfer of assets to subsidiaries, as part of the restructuring of the Company's business portfolio.

As a form of commitment to constructive and fact-based supervision, the Board of Commissioners also conducts work visits through *Management Walk Through* (MWT) activities to various strategic operational locations. These activities are carried out together with the Audit Committee, Risk & Investment Monitoring Committee, and the Nomination and Remuneration Committee. Through MWT, the Board of Commissioners obtains input and a real picture of the conditions on the ground, which subsequently serves as the basis for providing recommendations for improvements and strengthening management strategies to the Board of Directors.



Selain itu, Dewan Komisaris juga turut hadir dan berperan aktif dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan yang diselenggarakan pada 14 Juni 2024 sebagai bagian dari upaya menjaga hubungan tata kelola yang akuntabel dan transparan antara Perusahaan dan pemegang saham. Dengan pendekatan pengawasan yang komprehensif dan kolaboratif ini, Dewan Komisaris meyakini bahwa peran pengawasan dapat dijalankan secara efektif dan berkontribusi positif terhadap pencapaian kinerja Perusahaan secara berkelanjutan.

In addition, the Board of Commissioners also attended and actively participated in the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) held on June 14, 2024, as part of efforts to maintain an accountable and transparent governance relationship between the Company and its shareholders. With this comprehensive and collaborative oversight approach, the Board of Commissioners believes that the oversight role can be effectively carried out and positively contribute to the Company's sustainable performance achievement.

Pandangan Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Internal

Views on the Implementation of Corporate Governance, Risk Management, and Internal Control

Dewan Komisaris memandang bahwa penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*) di lingkungan PT Pertamina Trans Kontinental (PTK) selama tahun 2024 telah menunjukkan komitmen dan kemajuan yang signifikan. PTK terus menjadikan prinsip GCG bukan hanya sebagai kewajiban normatif, melainkan sebagai pilar strategis dalam pengelolaan usaha secara bertanggung jawab, berkelanjutan, dan akuntabel. Penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan telah diintegrasikan dalam proses pengambilan keputusan di seluruh lini organisasi. Dewan Komisaris juga mengapresiasi langkah Direksi dalam mengadopsi prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG) ke dalam strategi bisnis jangka panjang, yang mencerminkan orientasi PTK terhadap pertumbuhan usaha yang berkelanjutan dan inklusif.

The Board of Commissioners views that the implementation of Good Corporate Governance (GCG) within PT Pertamina Trans Kontinental (PTK) during 2024 demonstrated significant commitment and progress. PTK continues to make the principles of GCG not only a normative obligation but also a strategic pillar in managing the business responsibly, sustainably, and accountably. The application of the principles of transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness has been integrated into the decision-making process across all lines of the organization. The Board of Commissioners also appreciates the Board of Directors steps in adopting Environmental, Social, and Governance (ESG) principles into the long-term business strategy, which reflects PTK's orientation towards sustainable and inclusive business growth.

Dalam aspek pengelolaan risiko, Dewan Komisaris menilai bahwa PTK telah menerapkan sistem manajemen risiko yang andal dan terstruktur dengan baik, mengacu pada ISO 31000:2018. Kerangka kerja *Enterprise Risk Management* (ERM) dan model *Three Lines of Defense* telah dijalankan secara konsisten untuk mengantisipasi dan memitigasi risiko strategis, operasional, hukum, maupun kepatuhan yang dihadapi sepanjang tahun. Dewan Komisaris mencatat bahwa kebijakan dan praktik manajemen risiko yang diterapkan telah memperkuat ketahanan dan daya saing Perusahaan dalam menghadapi tantangan bisnis.

In terms of risk management, the Board of Commissioners assesses that PTK has implemented a reliable and well-structured risk management system, referring to ISO 31000:2018. The Enterprise Risk Management (ERM) framework and the Three Lines of Defense model have been consistently implemented to anticipate and mitigate strategic, operational, legal, and compliance risks faced throughout the year. The Board of Commissioners noted that the risk management policies and practices implemented have strengthened the Company's resilience and competitiveness in facing business challenges.

Dari sisi pengendalian internal, Dewan Komisaris memberikan penilaian positif terhadap integrasi sistem pengendalian internal berbasis COSO *Framework* yang dijalankan secara menyeluruh pada aspek keuangan, operasional, serta kepatuhan hukum. Evaluasi terhadap efektivitas sistem ini yang dilakukan oleh Internal Audit menunjukkan hasil yang memadai, sehingga memastikan kegiatan usaha tetap berada dalam koridor tata kelola yang baik.

Penguatan integritas bisnis juga terus dilakukan, terutama terkait pencegahan korupsi, gratifikasi dan benturan kepentingan melalui berbagai pelatihan maupun kampanye. Pedoman dalam mencegah dan mendeteksi berbagai potensi tindakan penyuapan yaitu Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) mengacu standar internasional ISO 37001:2016. Dewan Komisaris mengapresiasi komitmen tinggi Perusahaan terhadap integritas dan antikorupsi. Implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) berbasis ISO 37001:2016 serta pelaksanaan berbagai inisiatif edukasi dan sosialisasi internal menjadi bukti bahwa budaya integritas telah tertanam kuat di lingkungan kerja PTK. Pengoperasian *Whistleblowing System* (WBS) yang terintegrasi dengan Pertamina *Clean* juga menunjukkan keseriusan Perusahaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari praktik pelanggaran dan penyimpangan. Dengan seluruh inisiatif tersebut, Dewan Komisaris menilai bahwa PTK telah berada pada jalur yang tepat dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang unggul. Ke depan, Dewan Komisaris mendorong agar Perusahaan terus meningkatkan kualitas implementasi GCG, memperkuat sistem pengawasan internal, serta memperluas penerapan prinsip ESG agar mampu beradaptasi dengan tuntutan pemangku kepentingan dan dinamika industri maritim yang terus berkembang.

From the perspective of internal control, the Board of Commissioners gave a positive assessment of the integration of the internal control system based on the COSO Framework, which is comprehensively implemented in financial, operational, and legal compliance aspects. The evaluation of the effectiveness of this system conducted by Internal Audit showed adequate results, ensuring that business activities remain within the corridor of good governance.

Strengthening business integrity is also continuously carried out, especially regarding the prevention of corruption, gratuities, and conflicts of interest through various training and campaigns. The guidelines for preventing and detecting various potential bribery actions are the Anti-Bribery Management System (ABMS), which refers to the international standard ISO 37001:2016. The Board of Commissioners appreciates the Company's high commitment to integrity and anti-corruption. The implementation of the Anti-Bribery Management System (ABMS) based on ISO 37001:2016, along with the execution of various internal education and socialization initiatives, serves as evidence that a culture of integrity has been firmly embedded in the PTK work environment. The operation of the Whistleblowing System (WBS) integrated with Pertamina Clean also demonstrates the Company's seriousness in creating a work environment free from violations and deviations. With all these initiatives, the Board of Commissioners assesses that PTK is on the right track in achieving excellent corporate governance. In the future, the Board of Commissioners encourages the Company to continue improving the quality of GCG implementation, strengthening the internal control system, and expanding the application of ESG principles to be able to adapt to stakeholder demands and the ever-evolving dynamics of the maritime industry.

Penilaian atas Kinerja Organ Pendukung Dewan Komisaris

Performance Assessment of the Board of Commissioners Supporting Organs

Dalam menjalankan fungsi pengawasannya, Dewan Komisaris dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris dan 3 (tiga) Komite Dewan Komisaris, yaitu Komite Audit, Komite Nominasi & Remunerasi, serta Komite Pemantau Risiko & Investasi. Sekretaris Dewan Komisaris dan 3 (tiga) Komite Dewan Komisaris telah menjalankan fungsi dan tanggung jawab masing-masing guna mendukung fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Dewan Komisaris. Seluruh Komite telah menyusun program kerja tahunan dan

In carrying out its supervisory function, the Board of Commissioners is assisted by the Secretary of the Board of Commissioners and 3 (three) Committees of the Board of Commissioners, namely the Audit Committee, the Nomination & Remuneration Committee, and the Risk Monitoring & Investment Committee. The Secretary of the Board of Commissioners and the 3 (three) Committees of the Board of Commissioners have each performed their functions and responsibilities to support the supervisory function



laporan pelaksanaan tugas komite setiap tahunnya, untuk selanjutnya disampaikan kepada Dewan Komisaris setiap Triwulan. Laporan setiap komite menjadi acuan penilaian kinerja dan KPI masing-masing Komite. Penilaian kinerja terhadap organ pendukung dilakukan 1 (satu) tahun sekali.

Selama tahun 2024, Komite Audit telah melaksanakan tugas sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan, mencakup berbagai aspek pengawasan terhadap kinerja keuangan, operasional, kepatuhan, serta efektivitas sistem pengendalian internal. Kegiatan utama Komite Audit meliputi evaluasi laporan keuangan perusahaan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku, serta peninjauan penerapan kebijakan kesehatan, keselamatan, keamanan, dan lingkungan (HSSE), dengan rekomendasi untuk meningkatkan pelatihan dan kesadaran di seluruh lini kerja. Selain itu, Komite melakukan peninjauan efektivitas operasional perusahaan, termasuk efisiensi pengelolaan sumber daya, optimalisasi aset, dan produktivitas unit operasional. Komite juga meninjau pelaksanaan *Annual Audit Plan* (AAP) dari tim Internal Audit dan mengevaluasi efektivitas pengendalian manajemen. Hasil audit dari Auditor Eksternal turut dikaji, dan Komite memantau tindak lanjut atas temuan audit internal. Berdasarkan analisis dan telaah laporan manajemen serta laporan keuangan yang diterbitkan setiap bulan, Komite Audit menyampaikan masukan dan rekomendasi yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris

Kinerja Komite Audit dilakukan sesuai dengan indikator penilaian kinerja yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris, meliputi tingkat kehadiran dalam rapat Komite Audit, tingkat kehadiran dalam rapat internal Dewan Komisaris, tingkat kontribusi tertulis anggota Komite Audit, akurasi rekomendasi tertulis, akurasi rekomendasi lisan, peran aktif (inisiatif) dan inovasi. Selain itu, penilaian kinerja Komite Audit dilakukan berdasarkan realisasi dan penyelesaian program kerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Komite Audit dan dilaporkan kepada Dewan Komisaris dalam laporan Komite Audit. Komite Audit juga menghadiri rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi yang diselenggarakan setiap bulan dengan agenda pembahasan terkait laporan kinerja bulanan Perusahaan serta mengadakan rapat dengan Internal Audit maupun Fungsi lain sebanyak 10 (sepuluh) kali.

carried out by the Board of Commissioners. All Committees have prepared annual work programs and reports on the implementation of committee tasks each year, which are subsequently submitted to the Board of Commissioners every quarter. The reports from each Committee serve as a reference for performance evaluation and the KPIs of each Committee. Performance evaluations of the supporting organs are conducted once a year.

During 2024, the Audit Committee carried out its duties in accordance with the established work plan, covering various aspects of oversight on financial performance, operational performance, compliance, and the effectiveness of the internal control system. The main activities of the Audit Committee include evaluating the company's financial statements to ensure compliance with applicable accounting standards, as well as reviewing the implementation of health, safety, security, and environmental (HSSE) policies, with recommendations to enhance training and awareness across all work lines. Additionally, the Committee reviews the operational effectiveness of the company, including resource management efficiency, asset optimization, and the productivity of operational units. The Committee also reviews the implementation of the Annual Audit Plan (AAP) from the Internal Audit team and evaluates the effectiveness of management controls. The audit results from the External Auditor are also reviewed, and the Committee monitors the follow-up on internal audit findings. Based on the analysis and review of management reports and financial statements published monthly, the Audit Committee provides input and recommendations that require the attention of the Board of Commissioners.

The performance of the Audit Committee is conducted in accordance with the performance assessment indicators set by the Board of Commissioners, including the attendance rate in Audit Committee meetings, the attendance rate in internal Board of Commissioners meetings, the written contribution level of Audit Committee members, the accuracy of written recommendations, the accuracy of oral recommendations, active roles (initiative), and innovation. Additionally, the performance evaluation of the Audit Committee is conducted based on the realization and completion of the work programs outlined in the Audit Committee Work Plan and reported to the Board of Commissioners in the Audit Committee report. The Audit Committee also attends the joint meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors held monthly, with an agenda discussing the Company's monthly performance reports, and holds meetings with Internal Audit or other Functions ten (10) times.

Demikian juga dengan Komite Pemantau Risiko & Investasi secara aktif melakukan berbagai telaah dan memberikan rekomendasi penting kepada Dewan Komisaris. Kegiatan mereka mencakup reviu menyeluruh terhadap rencana investasi dalam RKAP 2024 beserta perubahannya, serta pemantauan dan evaluasi kinerja investasi serta pengelolaan manajemen risiko yang disampaikan Direksi melalui laporan bulanan. Komite juga secara konsisten memonitor pelaksanaan investasi sesuai RKAP dan melakukan evaluasi pasca investasi terhadap proyek-proyek yang telah selesai dalam tiga tahun terakhir. Selain itu, Komite melakukan pengawasan terhadap pengelolaan risiko perusahaan dan mengevaluasi tingkat risiko yang telah ditetapkan oleh Direksi. Komite turut meninjau usulan FUPP yang menjadi rekomendasi Dewan Komisaris serta melakukan review berkala terhadap aktivitas investasi perusahaan dan anak perusahaan, termasuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan investasi dan pengelolaan risiko terkait. Rapat koordinasi rutin dengan fungsi *Business Optimization* dan fungsi terkait lainnya diadakan untuk mengevaluasi pencapaian fisik proyek, mengidentifikasi kendala, serta merumuskan tindak lanjut yang diperlukan. Tidak hanya itu, Komite juga melakukan evaluasi terhadap kebijakan investasi dan manajemen risiko, serta mengusulkan perbaikan bila diperlukan. Sebagai bagian dari pengawasan ketat, Komite melaksanakan kunjungan langsung ke wilayah kerja PTK untuk memastikan proses monitoring berjalan efektif.

Kinerja Komite Pemantau Risiko & Investasi dinilai berdasarkan indikator yang ditetapkan Dewan Komisaris, meliputi tingkat kehadiran dalam rapat, kontribusi tertulis, akurasi rekomendasi baik tertulis maupun lisan, serta peran aktif dan inovasi. Selain itu, penilaian juga didasarkan pada realisasi dan penyelesaian program kerja sesuai Rencana Kerja Komite yang dilaporkan secara berkala kepada Dewan Komisaris. Komite secara rutin mendampingi Dewan Komisaris dalam rapat gabungan dengan Direksi setiap bulan untuk membahas laporan kinerja bulanan perusahaan, serta mengadakan rapat koordinasi dengan fungsi terkait sebanyak 17 (tujuh belas) kali. Dengan kinerja yang solid ini, Komite Pemantau Risiko & Investasi berkontribusi signifikan dalam memastikan tata kelola risiko dan investasi PTK berjalan dengan efektif dan efisien.

Sementara itu, Komite Nominasi & Remunerasi juga telah menjalankan berbagai tugas dan kegiatan penting. KNR melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan sumber daya manusia (SDM) yang disampaikan oleh Direksi melalui laporan kinerja manajemen, serta memberikan masukan dan pendapat kepada Dewan Komisaris mengenai efektivitas kebijakan pengelolaan SDM dan remunerasi

Similarly, the Risk Monitoring & Investment Committee actively conducts various reviews and provides important recommendations to the Board of Commissioners. Their activities include a comprehensive review of the investment plan in the 2024 ABOP and its changes, as well as monitoring and evaluating investment performance and risk management conveyed by the Board of Directors through monthly reports. The Committee also consistently monitors the implementation of investments according to the ABOP and conducts post-investment evaluations of projects completed in the past three years. Additionally, the Committee oversees the Company's risk management and evaluates the risk levels set by the Board of Directors. The Committee also reviews the FUPP proposals recommended by the Board of Commissioners and conducts periodic reviews of the investment activities of the Company and its subsidiaries, including ensuring compliance with investment policies and related risk management. Regular coordination meetings with the Business Optimization function and other related functions are held to evaluate the physical progress of projects, identify obstacles, and formulate necessary follow-up actions. Moreover, the Committee also evaluates investment policies and risk management and proposes improvements if necessary. As part of strict oversight, the Committee conducts direct visits to PTK's work areas to ensure the monitoring process runs effectively.

The performance of the Risk Monitoring & Investment Committee is assessed based on indicators set by the Board of Commissioners, including attendance at meetings, written contributions, the accuracy of both written and oral recommendations, as well as active roles and innovations. In addition, the assessment is based on the realization and completion of the work program according to the Committee's Work Plan, which is reported periodically to the Board of Commissioners. The Committee routinely accompanies the Board of Commissioners in joint meetings with the Board of Directors every month to discuss the company's monthly performance reports and holds coordination meetings with related functions 17 (seventeen) times. With this solid performance, the Risk Monitoring & Investment Committee significantly contributes to ensuring that PTK's risk and investment governance runs effectively and efficiently.

Meanwhile, the Nomination & Remuneration Committee (NRC) has also carried out various important tasks and activities. The NRC conducts monitoring and evaluation of human resource (HR) management presented by the Board of Directors through management performance reports and provides input and opinions to the Board of Commissioners regarding the effectiveness of the



perusahaan. Komite juga melakukan evaluasi terhadap calon Wakil Perseroan yang akan diusulkan sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris di perusahaan anak atau perusahaan patungan sebelum diajukan kepada RUPS. Selain itu, KNR mengevaluasi usulan *Key Performance Indicator* (KPI) individu anggota Direksi dan memantau realisasinya secara periodik. KNR juga menyusun rekomendasi terkait remunerasi dan tantiem atau insentif kinerja untuk Direksi PTK berdasarkan usulan Direksi, yang kemudian diajukan kepada Dewan Komisaris sebelum disampaikan kepada Pemegang Saham. Selain itu, KNR melakukan evaluasi atas usulan struktur organisasi perusahaan dan melaksanakan kunjungan langsung (*site visit*) ke wilayah kerja PTK sebagai bagian dari *monitoring* guna memastikan pelaksanaan tugas berjalan efektif.

Kinerja Komite Nominasi & Remunerasi dilakukan sesuai dengan indikator penilaian kinerja yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris, meliputi tingkat kehadiran dalam rapat KNR, tingkat kehadiran dalam rapat internal Dewan Komisaris, tingkat kontribusi tertulis bagi KNR, akurasi rekomendasi tertulis, akurasi rekomendasi lisan, peran aktif (inisiatif) dan inovasi. Selain itu, penilaian kinerja KNRM dilakukan berdasarkan realisasi dan penyelesaian program kerja yang tercantum dalam Rencana Kerja KNR dan dilaporkan kepada Dewan Komisaris. KNR juga mendampingi Dewan Komisaris dalam rapat gabungan dengan Direksi yang diselenggarakan setiap bulan terkait laporan kinerja bulanan Perusahaan serta mengadakan rapat dengan fungsi terkait lain sebanyak 9 (sembilan) kali.

Pada tahun 2024, evaluasi kinerja anggota komite dilakukan melalui metode 360 derajat dan AKHLAK *Behavioural Survey* (ABS), dengan skor rata-rata Komite Audit 94,3, Komite Pemantau Risiko & Investasi 94,15, dan Komite Nominasi & Remunerasi 95,2, seluruhnya memperoleh predikat *high*. Dewan Komisaris menilai bahwa seluruh komite telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara baik dan efektif. Hasil penilaian ini menjadi pertimbangan dalam pengangkatan kembali atau pemberhentian anggota komite untuk periode berikutnya. Dewan Komisaris menyampaikan apresiasi atas kontribusi dan kinerja seluruh organ pendukung tersebut.

company's HR management and remuneration policies. The Committee also evaluates the candidates for the Company's Representative who will be proposed as members of the Board of Directors or Board of Commissioners in subsidiaries or joint ventures before being submitted to the GMS. Additionally, NRC evaluates the proposed Key Performance Indicators (KPIs) for individual members of the Board of Directors and monitors their realization periodically. NRC also prepares recommendations regarding remuneration and bonuses or performance incentives for the PTK Board of Directors based on the Board's proposals, which are then submitted to the Board of Commissioners before being presented to the Shareholders. Additionally, NRC evaluates the proposed organizational structure of the company and conducts direct visits (*site visits*) to PTK's work areas as part of monitoring to ensure the effective execution of tasks.

The performance of the Nomination & Remuneration Committee is conducted in accordance with the performance assessment indicators set by the Board of Commissioners, including attendance levels in NRC meetings, attendance levels in internal Board of Commissioners meetings, levels of written contributions to NRC, accuracy of written recommendations, accuracy of oral recommendations, active roles (initiative), and innovation. In addition, the performance evaluation of the KNRM is conducted based on the realization and completion of the work programs outlined in the NRC Work Plan and reported to the Board of Commissioners. The NRC also assists the Board of Commissioners in joint meetings with the Board of Directors held monthly regarding the Company's monthly performance reports and holds meetings with other related functions a total of 9 (nine) times.

In 2024, the performance evaluation of committee members was conducted using the 360-degree method and the AKHLAK *Behavioural Survey* (ABS), with an average score of 94.3 for the Audit Committee, 94.15 for the Risk & Investment Monitoring Committee, and 95.2 for the Nomination & Remuneration Committee, all of which received a high rating. The Board of Commissioners assesses that all committees have carried out their duties and responsibilities well and effectively. The results of this assessment will be taken into consideration for the reappointment or dismissal of committee members for the next period. The Board of Commissioners expresses appreciation for the contributions and performance of all supporting organs.

Pandangan dan Peran Dewan Komisaris atas Penerapan *Whistleblowing System* (“WBS”)

Views and Role of the Board of Commissioners on the Implementation of the Whistleblowing System (“WBS”)

Secara khusus, Dewan Komisaris memberikan pandangan terhadap penerapan *Whistleblowing System* (WBS) di PTK sepanjang tahun 2024. Saluran WBS dinilai berjalan dengan baik dan didukung oleh berbagai kampanye yang meningkatkan fungsi pengaduan tersebut. Dewan Komisaris melihat WBS sebagai alat yang sangat efektif dalam mencegah, mendeteksi, dan menindaklanjuti pelanggaran etika dan hukum internal PTK, selain dari proses audit internal dan eksternal. Untuk itu, Dewan Komisaris menekankan pentingnya peningkatan efektivitas penerapan WBS dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) secara berkelanjutan guna mencegah korupsi dan *fraud*.

Dalam perannya sebagai pengawas, Dewan Komisaris memantau laporan WBS yang masuk dan memiliki kewenangan untuk mengeskalsasi laporan tersebut hingga ke tingkat Dewan Komisaris. Bila laporan mengandung bukti kuat dan meyakinkan, Dewan Komisaris mengharuskan dilakukannya investigasi oleh pihak eksternal yang independen sebagai dasar pemberian sanksi. Apabila pengaduan melibatkan anggota Dewan Komisaris, laporan yang diterima oleh Fungsi Internal Audit PT Pertamina (Persero) akan ditelaah untuk menentukan tindakan lanjutan yang diperlukan. Sepanjang tahun 2024, seluruh pengaduan yang masuk melalui saluran WBS PT Pertamina (Persero) telah ditindaklanjuti secara serius oleh fungsi terkait.

Specifically, the Board of Commissioners provided insights on the implementation of the Whistleblowing System (WBS) at PTK throughout 2024. The WBS channel was deemed to be functioning well and was supported by various campaigns that enhanced its reporting function. The Board of Commissioners views the Whistleblowing System (WBS) as a highly effective tool in preventing, detecting, and following up on internal ethical and legal violations at PTK, in addition to internal and external audit processes. Therefore, the Board of Commissioners emphasizes the importance of continuously enhancing the effectiveness of the WBS and the Anti-Bribery Management System (SMAP) to prevent corruption and fraud.

In its role as a supervisor, the Board of Commissioners monitors incoming WBS reports and has the authority to escalate these reports to the Board of Commissioners level. If the report contains strong and convincing evidence, the Board of Commissioners mandates an investigation by an independent external party as the basis for imposing sanctions. If the complaint involves members of the Board of Commissioners, the report received by the Internal Audit Function of PT Pertamina (Persero) will be reviewed to determine the necessary follow-up actions. Throughout 2024, all complaints received through the WBS channel of PT Pertamina (Persero) have been seriously followed up by the relevant functions.

Pandangan Atas Prospek Usaha Tahun 2025

Views on Business Prospects for 2025

Dewan Komisaris menilai bahwa prospek usaha PTK untuk tahun 2025 sangat menjanjikan dan berada pada jalur yang positif, sejalan dengan gambaran yang disampaikan oleh Direksi. Optimisme ini didasarkan pada kondisi industri jasa perkapalan, marine, dan logistik yang menunjukkan peluang strategis kuat, khususnya dalam konteks Indonesia sebagai negara kepulauan dengan tantangan konektivitas antar wilayah yang sangat kompleks. Program Tol Laut yang dicanangkan pemerintah sebagai upaya memperkuat konektivitas domestik dan mengurangi disparitas harga di daerah 3T diproyeksikan akan mengalami peningkatan signifikan, sehingga membuka ruang bagi PTK untuk memperluas perannya dalam penyediaan jasa perkapalan dan transportasi laut terintegrasi.

The Board of Commissioners assesses that PTK's business prospects for 2025 are highly promising and on a positive trajectory, in line with the outlook presented by the Board of Directors. This optimism is based on the condition of the shipping, marine, and logistics service industry, which shows strong strategic opportunities, particularly in the context of Indonesia as an archipelagic country with very complex inter-regional connectivity challenges. The Sea Toll program initiated by the government as an effort to strengthen domestic connectivity and reduce price disparities in the 3T regions is projected to experience significant growth, thereby opening up opportunities for PTK to expand its role in providing integrated shipping and maritime transportation services.



Selain itu, Dewan Komisaris mencermati stabilitas industri pengiriman dan perkapalan global yang diprediksi tetap terjaga pada tahun 2025, sebagaimana laporan *Fitch Ratings Global*. Hal ini memberikan dasar yang kuat bagi PTK untuk mengantisipasi pemulihan pasar pascapandemi dan ketegangan geopolitik. Dewan Komisaris juga mendukung komitmen PTK dalam menghadapi isu dekarbonisasi dan transisi energi melalui pengembangan inisiatif *Green Port* serta peningkatan efisiensi operasional berbasis energi bersih, yang merupakan langkah strategis untuk mendukung bisnis berkelanjutan.

Di sektor logistik, pertumbuhan yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya menjadi sinyal positif bagi penguatan kinerja PTK, dengan dukungan dari berbagai subsektor industri nasional. Namun, Dewan Komisaris tetap waspada terhadap dinamika eksternal seperti ketegangan geopolitik dan konflik internasional yang berpotensi mempengaruhi rantai pasok energi dan logistik. Oleh karena itu, strategi PTK yang menitikberatkan pada inovasi, digitalisasi layanan, penguatan kapabilitas sumber daya manusia, serta pengelolaan risiko yang adaptif dinilai sangat tepat dan sejalan dengan tuntutan pasar saat ini.

Dengan fondasi operasional yang kuat dan dukungan dari pemangku kepentingan, Dewan Komisaris yakin PTK memiliki kapasitas untuk terus tumbuh dan berkembang sebagai penyedia jasa logistik maritim energi yang andal, kompetitif, dan relevan untuk masa depan. Penguatan portofolio layanan, perluasan peluang pasar, serta penerapan prinsip keberlanjutan akan menjadi pilar utama dalam strategi pertumbuhan perusahaan yang akan dijalankan pada tahun mendatang.

In addition, the Board of Commissioners noted that the stability of the global shipping and maritime industry is predicted to remain intact in 2025, according to the *Fitch Ratings Global* report. It provides a strong foundation for PTK to anticipate post-pandemic market recovery and geopolitical tensions. The Board of Commissioners also supports PTK's commitment to addressing decarbonization and energy transition issues through the development of *Green Port* initiatives and the enhancement of operational efficiency based on clean energy, which are strategic steps to support sustainable business.

In the logistics sector, higher growth than the previous year is a positive signal for strengthening PTK's performance, supported by various subsectors of the national industry. However, the Board of Commissioners remains vigilant against external dynamics such as geopolitical tensions and international conflicts that could potentially affect the energy and logistics supply chains. Therefore, PTK's strategy, which emphasizes innovation, service digitalization, strengthening human resource capabilities, and adaptive risk management, is considered very appropriate and in line with current market demands.

With a strong operational foundation and support from stakeholders, the Board of Commissioners is confident that PTK can continue to grow and develop as a reliable, competitive, and future-relevant provider of energy maritime logistics services. Strengthening the service portfolio, expanding market opportunities, and implementing sustainability principles will be the main pillars of the Company's growth strategy to be carried out in the coming years.

Perubahan Susunan Dewan Komisaris

Changes in the Composition of the Board of Commissioners

Pada tahun 2024, telah terjadi beberapa perubahan dalam susunan Dewan Komisaris PTK sebagai bagian dari upaya penyegaran organisasi dan penguatan fungsi pengawasan. Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler (KPSSS) tanggal 12 Januari 2024 yang dituangkan dalam Akta No. 38 tanggal 17 Januari 2024, Sdr. Hartanto diangkat sebagai Komisaris. Selanjutnya, melalui KPSSS tanggal 12 Februari 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta No. 40 tanggal 22 Februari 2024, Sdr. Agustinus Ico Tri Prasetyantoko ditetapkan sebagai Komisaris Independen. Selanjutnya, dalam rangka penyegaran organisasi, berdasarkan KPSSS pada tanggal 10 Juli 2024 yang telah dituangkan dalam dan Akta No. 28 tanggal 19 Juli 2024 terjadi pengangkatan Sdr. Subagjo Hari

In 2024, there were several changes in the composition of PTK's Board of Commissioners as part of efforts to refresh the organization and strengthen the supervisory function. Based on the Circular Shareholders' Resolution (CSR) dated January 12, 2024, as stated in Deed No. 38 dated January 17, 2024, Mr. Hartanto was appointed as Commissioner. Subsequently, through the CSR dated February 12, 2024, as stated in Deed No. 40 dated February 22, 2024, Mr. Agustinus Ico Tri Prasetyantoko was appointed as Independent Commissioner. Furthermore, to refresh the organization, based on the CSR on July 10, 2024, as stated in Deed No. 28 dated July 19, 2024, Mr. Subagjo Hari Moeljanto was appointed as President Commissioner, Mr. Khalid Zabidi was respectfully dismissed as Commissioner,

Moeljanto sebagai Komisaris Utama dan memberhentikan dengan hormat Sdr. Khalid Zabidi sebagai Komisaris serta mengangkat kembali Sdr. Amir Hamzah sebagai Komisaris. Dengan demikian komposisi Dewan Komisaris sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama	: Subagjo Hari Moeljanto
Komisaris	: Amir Hamzah
Komisaris	: Andi Saiful Haq
Komisaris	: Hartanto
Komisaris Independen	: Agustinus Ico Tri Prasetyantoko

and Mr. Amir Hamzah was reappointed as Commissioner. Thus, the composition of the Board of Commissioners as of December 31, 2024, is as follows:

President Commissioner	: Subagjo Hari Moeljanto
Commissioner	: Amir Hamzah
Commissioner	: Andi Saiful Haq
Commissioner	: Hartanto
Independent Commissioner	: Agustinus Ico Tri Prasetyantoko

Atas nama seluruh anggota Dewan Komisaris, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Sdr. Khalid Zabidi atas dedikasi dan kontribusinya selama menjabat sebagai Komisaris. Kami juga menyambut dengan hangat kehadiran para anggota baru dalam jajaran Dewan Komisaris. Semoga dengan formasi baru ini, sinergi dan efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan serta arahan strategis perusahaan dapat semakin diperkuat ke depannya.

On behalf of all members of the Board of Commissioners, we express our utmost appreciation and gratitude to Mr. Khalid Zabidi for his dedication and contributions during his tenure as Commissioner. We also warmly welcome the new members of the Board of Commissioners. Hopefully, with this new formation, the synergy and effectiveness of the supervisory function and the Company's strategic direction can be further strengthened in the future.

Penutup

Letter of Appreciation

Dewan Komisaris memberikan apresiasi atas sinergi dan kontribusi seluruh pihak yang telah berperan aktif dalam mendukung keberhasilan operasional dan pencapaian kinerja PTK sepanjang tahun 2024. Terima kasih kami sampaikan kepada Pemegang Saham atas komitmen dan kepercayaannya, serta kepada Direksi dan seluruh insan PTK atas dedikasi dan integritas dalam menjalankan tugasnya. Dewan Komisaris meyakini bahwa capaian yang telah diraih menjadi pondasi penting untuk mengakselerasi pertumbuhan perusahaan ke depan. Dengan semangat transformasi dan kolaborasi yang terus dijaga, kami optimis PTK dapat mewujudkan visinya sebagai perusahaan jasa marine terintegrasi yang berkelas global pada tahun 2026.

The Board of Commissioners expresses appreciation for the synergy and contributions of all parties who have actively participated in supporting the operational success and performance achievements of PTK throughout 2024. We extend our gratitude to the Shareholders for their commitment and trust, as well as to the Board of Directors and all PTK employees for their dedication and integrity in carrying out their duties. The Board of Commissioners believes that the achievements attained have become a crucial foundation to accelerate the Company's growth in the future. With the spirit of transformation and collaboration that continues to be maintained, we are optimistic that PTK can realize its vision as a globally-class integrated marine service company by 2026.

Jakarta, Mei 2025 May ..., 2025

Atas nama Dewan Komisaris PT Pertamina Trans Kontinental,
On behalf of the Board of Commissioners of PT Pertamina Trans Kontinental,

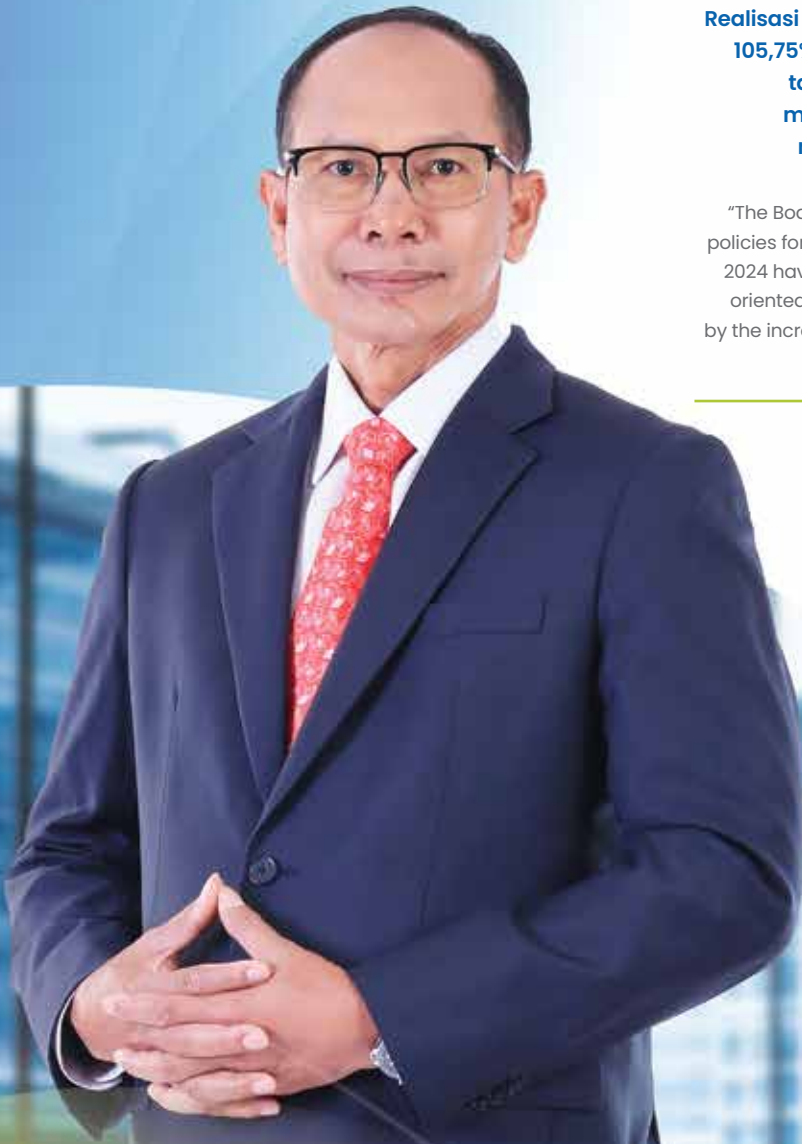


Subagjo Hari Moeljanto
Komisaris Utama
President Commissioner



Laporan Direksi

Report From the Board of Directors



I Ketut Laba
Direktur Utama
President Director

Kinerja operasional dan keuangan PTK sepanjang tahun 2024 menunjukkan peningkatan yang signifikan dan berhasil melampaui target yang ditetapkan. Realisasi capaian KPI Perusahaan tahun 2024 mencapai 105,75%, meningkat sebesar 1,88% dibanding capaian tahun sebelumnya yang sebesar 103,80%. Hal ini mencerminkan keberhasilan manajemen dalam mengelola strategi operasional, keuangan, dan pemasaran secara efektif.

"The Board of Commissioners considers that the strategies and policies formulated and implemented by the Board of Directors in 2024 have reflected the right direction for development and are oriented towards long-term sustainable growth. It is evidenced by the increase in operating profit achievement of Rp1.34 trillion or 140.22% of the target."

Para Pemegang Saham Dan Pemangku Kepentingan Yang Kami Hormati,

Dear Shareholders and Stakeholders,

Dengan penuh rasa syukur dan tanggung jawab, izinkan kami, segenap jajaran Direksi PTK, menyampaikan Laporan Tahunan 2024. Tahun ini merupakan periode yang penuh dinamika dan tantangan, baik dari sisi industri energi maupun kondisi ekonomi global. Berkat kerja keras dan semangat kolaboratif seluruh Insan PTK, Perusahaan mampu mencatatkan kinerja yang solid dan progresif. Capaian ini menjadi cerminan dari upaya berkelanjutan PTK dalam menjalankan transformasi dan penguatan peran sebagai penyedia jasa logistik energi yang andal. Melalui laporan ini, kami menyampaikan kinerja perusahaan secara transparan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada para pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan. PTK terus berkomitmen untuk memperkuat kontribusi dalam mendukung agenda ketahanan energi nasional melalui layanan logistik energi yang semakin unggul dan terintegrasi.

With gratitude and responsibility, kindly allow us, the entire Board of Directors of PTK, to present the 2024 Annual Report. This year was a period full of dynamics and challenges, both in terms of the energy industry and global economic conditions. Due to the hard work and collaborative spirit of all PTK employees, the Company was able to record a solid and progressive performance. This achievement is a reflection of PTK's continuous efforts in carrying out transformation and strengthening its role as a reliable energy logistics service provider. Through this report, we convey the Company's performance transparently as a form of accountability to shareholders and all stakeholders. PTK continues to be committed to strengthening its contribution to supporting the national energy security agenda through excellent and integrated energy logistics services.

Tinjauan Ekonomi Global Global Economic Review

Pertumbuhan ekonomi global sepanjang tahun 2024 tercatat melambat, dengan angka hanya mencapai 3,2% sebagaimana dipublikasikan oleh International Monetary Fund (IMF) dalam World Economic Outlook (WEO). Pelemahan ini dipengaruhi oleh eskalasi ketegangan geopolitik yang menghambat kelancaran rantai pasok global dan menekan permintaan, sehingga mendorong kenaikan harga energi dan pangan di berbagai belahan dunia. Kondisi ekonomi negara-negara besar menunjukkan pola yang bervariasi. Amerika Serikat dan India mampu mencatatkan pertumbuhan yang cukup stabil berkat daya beli masyarakat yang kuat dan dukungan stimulus dari pemerintah. Sebaliknya, ekonomi Tiongkok mengalami perlambatan karena konsumsi domestik yang lemah serta penurunan tingkat investasi. Konflik Israel dan Palestina yang belum mereda turut memperkeruh situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah dan menambah ketidakpastian global. Selain itu, langkah pengetatan fiskal dan moneter yang diambil oleh sejumlah negara turut menekan laju pemulihan ekonomi dunia yang masih rentan.

Throughout 2024, global economic growth recorded to slow down, reaching only 3.2% as published by the International Monetary Fund (IMF) in its World Economic Outlook (WEO). This slowdown was influenced by the escalation of geopolitical tensions that hampered the smooth running of global supply chains and suppressed demand. Thus, pushing up energy and food prices in various parts of the world. The economic conditions of major economies showed varied patterns. The United States and India were able to record fairly stable growth due to strong purchasing power and the government's stimulus support. On the contrary, China's economy experienced a slowdown due to weak domestic consumption and declining investment levels. The ongoing conflict between Israel and Palestine has also worsened the geopolitical situation in the Middle East and added to global uncertainty. In addition, fiscal and monetary tightening measures taken by several countries also suppressed the pace of recovery of the world economy, which is still vulnerable.

Kondisi Ekonomi Nasional dan Industri Tahun 2024

National Economic and Industrial Conditions in 2024

Perekonomian Indonesia pada tahun 2024 mencatat pertumbuhan positif sebesar 5,03%, meskipun sedikit melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Stabilitas inflasi yang terjaga di angka 1,57% serta indikator seperti PMI yang masih berada di zona ekspansi, mencerminkan kepercayaan pelaku usaha terhadap arah perekonomian nasional. Pilpres 2024 yang berlangsung kondusif turut memberikan kepastian dalam transisi pemerintahan dan arah kebijakan ekonomi ke depan. Dalam iklim ekonomi yang relatif stabil tersebut, sektor jasa perkapalan, marine, dan logistik terus beradaptasi dengan dinamika strategis, baik dari sisi global maupun domestik. Tuntutan dekarbonisasi mendorong transformasi menuju green logistics. Hal ini menciptakan dorongan bagi perusahaan pelayaran dan logistik, termasuk PTK, untuk mulai mengadopsi teknologi rendah emisi, meningkatkan efisiensi bahan bakar, serta mengembangkan solusi operasional yang lebih berkelanjutan.

Digitalisasi turut mendorong transformasi bisnis di sektor jasa perkapalan, marine, dan logistik, membuka peluang bagi pelaku industri seperti PTK untuk melakukan akselerasi teknologi dan meningkatkan efisiensi layanan. Di sisi lain, pemulihan sektor energi dan meningkatnya aktivitas Pelabuhan khususnya di kawasan Asia, telah mendorong lonjakan *volume port call* serta permintaan terhadap layanan logistik dan *marine support*. Terbentuknya pemerintahan baru pasca-Pilpres 2024 membawa harapan akan kesinambungan kebijakan yang mampu memperkuat ekosistem logistik dan perkapalan nasional. Stabilitas arah pembangunan dan komitmen terhadap proyek-proyek strategis diharapkan dapat terus terjaga, sebagai fondasi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di masa mendatang.

The Indonesian economy in 2024 recorded positive growth of 5.03%, although it slowed slightly compared to the previous year. Inflation stability was maintained at 1.57%, and indicators such as PMI, which are still in the expansion zone, reflecting the confidence of business actors in the direction of the national economy. The conducive 2024 presidential election also provided certainty in the transition of government and the direction of future economic policies. In this relatively stable economic climate, the shipping, marine, and logistics services sector continues to adapt to strategic dynamics, both global and domestic. The demand for decarbonization drives the transformation towards green logistics. It creates encouragement for shipping and logistics companies, including PTK, to start adopting low-emission technologies, improve fuel efficiency, and develop more sustainable operational solutions.

Digitalization is driving business transformation in the shipping, marine, and logistics services sectors, opening up opportunities for industry players such as PTK to accelerate technology and improve service efficiency. On the other hand, the recovery of the energy sector and increased port activity, especially in Asia, has driven a surge in port call volumes and demand for logistics and marine support services. The formation of a new government post-Presidential Election 2024 brings hope for policy continuity that can strengthen the national logistics and shipping ecosystem. Stability in development direction and commitment to strategic projects are expected to be maintained as essential foundations in driving sustainable economic growth in the future.

Strategi dan Kebijakan Perusahaan Tahun 2024

Company Strategy and Policy in 2024

Sebagai entitas yang bergerak di sektor logistik energi, PTK berperan strategis dalam menjaga keandalan rantai pasok energi nasional. Ketersediaan pasokan migas untuk kebutuhan dalam negeri menjadi fokus utama, yang dapat dicapai melalui optimalisasi produksi dalam negeri, pengelolaan impor secara bijak, serta pengendalian ekspor guna menekan defisit neraca migas. Keamanan energi merupakan pilar penting dalam mendukung ketahanan

As an entity engaged in the energy logistics sector, PTK plays a strategic role in maintaining the reliability of the national energy supply chain. The availability of oil and gas supplies for domestic needs is the main focus, which can be achieved through optimizing domestic production, managing imports wisely, and controlling exports to reduce the oil and gas balance deficit. Energy security is a crucial pillar in supporting national resilience, and PTK, as part of

nasional, dan PTK sebagai bagian dari Pertamina Group memiliki tanggung jawab untuk mendukung terciptanya sistem energi yang andal dan berkelanjutan. Peran ini mencakup peningkatan kapasitas logistik energi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, mendorong pemanfaatan sumber daya domestik, serta berkontribusi pada agenda transisi energi melalui efisiensi, dekarbonisasi, dan komitmen terhadap pencapaian *Net Zero Emission* (NZE) pada tahun 2060.

Dalam menjalankan usahanya, PTK memiliki 3 (tiga) segmen usahanya, yaitu *Shipping Activities*, *Marine Services*, dan *Logistics Services*.

Pertamina Group, has a responsibility to support the creation of a reliable and sustainable energy system. This role includes increasing energy logistics capacity to support economic growth, encouraging the utilization of domestic resources, and contributing to the energy transition agenda through efficiency, decarbonization, and commitment to achieving Net Zero Emissions (NZE) by 2060.

In performing business, PTK has 3 (three) business segments, namely Shipping Activities, Marine Services, and Logistics Services.



Layanan *Shipping Activities* merupakan segmen dalam menyediakan layanan transportasi laut untuk BBM, produk kimia, dan gas cair menggunakan berbagai jenis armada seperti tanker, tug & barge, dan SPOB melalui skema kontrak sewa kapal (*time charter*, *spot charter*) serta *Contract of Affreightment* (COA). Selain pengangkutan, PTK juga mendukung operasional pelabuhan, termasuk layanan masuk-keluar kapal tanker dan navigasi *area marine*, memasarkan kapal pihak ketiga kepada pelanggan, serta mengelola kegiatan *Ship to Ship* (STS) untuk proyek *Fatty Acid Methyl Ester* (FAME) Balikpapan. Kinerja segmen ini mencakup pemanfaatan kapal milik yang diukur melalui data armada, hari operasi (*commission days*), dan hari komersial (*commercial days*).

Adapun segmen usaha *Marine Services* adalah layanan PTK dalam jasa marine atau keagenan di seluruh pelabuhan di Indonesia, baik sebagai pelabuhan umum (keagenan umum), di pelabuhan khusus Pertamina (keagenan kapal-kapal *tanker charter*/milik Pertamina) maupun pihak ketiga. Layanan jasa *marine* mencakup pengurusan perizinan: *inout clearance* (*formality*), menyiapkan kebutuhan kapal dan crew (*crew supply*, *bunker handling*, *water supply*), membuat perhitungan dan mempertanggungjawabkan jasa layanan kapal, pengurusan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), pengurusan administrasi pelabuhan khusus, serta pelaksanaan kegiatan keamanan pelabuhan sesuai *standar Recognized Security Organization* dan ISPS Code.

Shipping Activities Services is a segment that provides marine transportation services for fuel, chemical products, and liquefied gas using various types of fleets such as tankers, tug & barge, and SPOB through ship charter contract schemes (*time charter*, *spot charter*) and *Contract of Affreightment* (COA). In addition to transportation, PTK supports port operations, including tanker entry and exit services and marine area navigation, marketing third-party vessels to customers, and managing *Ship-to-Ship* (STS) activities for the Balikpapan *Fatty Acid Methyl Ester* (FAME) project. The performance of this segment includes the utilization of owned vessels as measured by fleet data, commission days, and commercial days.

The Marine Services business segment is PTK's services in marine or agency services at all ports in Indonesia, both as a general port (general agency), at Pertamina's special ports (agency for chartered/Pertamina-owned tankers), and third parties. Marine services include licensing: in-out clearance (*formality*), preparing ship and crew needs (*crew supply*, *bunker handling*, *water supply*), making calculations and accounting for ship services, processing Notification of Import of Goods (PIB) and Notification of Export of Goods (PEB) documents, managing special port administration, and implementing port security activities according to Recognized Security Organization and ISPS Code standards.



Dan segmen usaha *Logistic Services* merupakan layanan PTK meliputi jasa keagenan (*freight forwarding*) yang mengurus seluruh proses pengiriman barang hingga sampai ke tangan penerima, termasuk dokumen, biaya, dan klaim asuransi. Selain itu, AP PTK juga menyediakan jasa bongkar muat dari dan ke kapal (*stevedoring*), pemindahan barang dari dermaga ke gudang atau tempat penumpukan (*cargodoring*), serta penyediaan layanan dermaga untuk kegiatan labuh-tambat, bongkar muat barang dan peti kemas, serta penundaan kapal. PTK juga menyediakan layanan *bunker agent*, *bunker handling*, dan pengelolaan logistik secara terpadu.

Sepanjang tahun 2024, PTK merumuskan strategi dan kebijakan bisnis yang selaras dengan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2022–2027 sebagai landasan pertumbuhan berkelanjutan. Fokus utama diarahkan pada optimalisasi potensi logistik dalam negeri, perluasan pasar internasional, serta pengembangan bisnis turunan di sektor logistik energi. PTK juga mendorong transformasi digital untuk meningkatkan efisiensi operasional, termasuk dalam perawatan armada kapal secara terintegrasi guna menekan biaya dan meningkatkan keandalan. Seiring dengan itu, penguatan struktur organisasi dan peningkatan kompetensi SDM terus dilakukan, terutama melalui sertifikasi teknis di bidang *marine & port engineering*, pemeliharaan sarana pelabuhan, dan pengerukan alur pelayaran, guna mendukung daya saing bisnis ke depan.

Pada tahun 2024, strategi dan kebijakan PTK dalam segmen usaha *Shipping Activities* diarahkan untuk memperkuat keberlanjutan operasional serta meningkatkan efisiensi dan daya saing armada. Fokus utama mencakup penguatan budaya HSSE dan peningkatan standar operasional demi menjaga keandalan dan keselamatan pelayaran. PTK melakukan investasi pada armada *marine support vessel* dan *offshore support vessel* guna mendukung kebutuhan Pertamina Group dan KKKS, sejalan dengan strategi penguatan peran domestik. Di sisi lain, Perusahaan menjalankan program divestasi kapal yang telah melewati usia ekonomis serta peremajaan kapal yang telah berusia di atas 30 tahun untuk menjaga efektivitas dan produktivitas aset. Penguatan sinergi dengan entitas Pertamina Group maupun BUMN lain dilakukan melalui pendekatan *bundling* pekerjaan guna memperluas peluang bisnis sewa kapal. Di samping itu, PTK mendorong pertumbuhan bisnis di *Dockyard* Sorong dan Bagus Kuning melalui kemitraan strategis serta mengembangkan layanan *ship vetting & inspection* untuk meningkatkan nilai tambah. Akselerasi digitalisasi juga menjadi prioritas guna memperkuat sistem monitoring dan evaluasi kinerja kapal secara real time dalam mencapai *full commission*.

The Logistic Services business segment is a PTK service that includes freight forwarding services that take care of the entire process of shipping goods to the recipient, including documents, fees, and insurance claims. In addition, AP PTK provides loading and unloading services from and to ships (*stevedoring*), transferring goods from the dock to the warehouse or stacking (*cargodoring*), as well as providing dock services for mooring activities, loading and unloading goods and containers, and ship delays. PTK also provides bunker agent services, bunker handling, and integrated logistics management.

Throughout 2024, PTK formulated business strategies and policies in line with the Company's Long-Term Plan (RJPP) 2022–2027 as a foundation for sustainable growth. The main focus is on optimizing domestic logistics potential, expanding international markets, and developing derivative businesses in the energy logistics sector. PTK also encourages digital transformation to improve operational efficiency, including integrated ship fleet maintenance to reduce costs and improve reliability. Along with that, strengthening the organizational structure and improving the competence of human resources continues to be carried out, especially through technical certification in the fields of marine & port engineering, maintenance of port facilities, and dredging of shipping lanes to support future business competitiveness.

In 2024, PTK's strategies and policies in the Shipping Activities business segment were directed at strengthening operational sustainability and improving fleet efficiency and competitiveness. The main focus includes strengthening HSSE culture and improving operational standards to maintain shipping reliability and safety. PTK invested in a fleet of marine support vessels and offshore support vessels to support the needs of Pertamina Group and KKKS, in line with the strategy to strengthen its domestic role. On the other hand, the Company carries out a ship divestment program that has passed the economic age and rejuvenates ships over 30 years old to maintain asset effectiveness and productivity. Strengthening synergies with Pertamina Group entities and other SOEs is carried out through a work bundling approach to expand ship charter business opportunities. In addition, PTK encourages business growth at Sorong and Bagus Kuning Dockyards through strategic partnerships and develops ship vetting & inspection services to increase added value. Digitalization acceleration is also a priority to strengthen the monitoring and evaluation system of ship performance in real-time to achieve full commission.

Dalam segmen *Marine Services* tahun 2024, PTK memfokuskan strategi pada peningkatan mutu layanan keagenan kapal dan pengembangan jasa maritim yang lebih adaptif dan kompetitif. Implementasi layanan berbasis *Service Level Agreement* dijalankan secara konsisten untuk memenuhi ekspektasi pelanggan. Dalam rangka mendukung inisiatif energi bersih nasional, PTK juga memperkuat bisnis *transportasi Fatty Acid Methyl Ester (FAME)* sesuai arahan *Holding*. Di sisi lain, Perusahaan terus memperluas cakupan layanan melalui pengembangan sektor *port management, EPC & maintenance* pelabuhan, jasa pemanduan, penanganan tumpahan minyak (*oil spill response*), serta layanan marine lainnya. Upaya ini ditunjang dengan investasi pada peralatan kerja serta peningkatan kapabilitas SDM. Kolaborasi dengan entitas di lingkungan Pertamina Group dan BUMN diperkuat untuk menjangkau lebih banyak peluang bisnis, termasuk melalui strategi *bundling* pekerjaan. Selain itu, PTK juga mendorong transformasi digital di lini layanan *Marine Services* sebagai langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas, ketepatan layanan, dan daya saing operasional.

Pada segmen usaha *Logistic Services* tahun 2024, PTK menetapkan strategi dan kebijakan yang berfokus pada peningkatan aspek HSSE serta keunggulan operasional di setiap aktivitas logistik. Perusahaan terus memperluas cakupan layanan melalui penambahan area *shorebase logistic* dan menjalin kemitraan strategis dengan mitra potensial untuk mengembangkan fasilitas yang telah ada. Optimalisasi bisnis *shorebase* di Kabil dan Tanjung Batu juga menjadi prioritas, disertai upaya eksplorasi lokasi-lokasi baru yang memiliki potensi pengembangan logistik. Selain itu, PTK berkomitmen memperkuat infrastruktur melalui penambahan aset produksi, pengembangan kompetensi sumber daya manusia, serta penerapan digitalisasi proses bisnis guna mendukung efisiensi dan peningkatan layanan logistik secara menyeluruh.

Pada lini pendukung bisnis, khususnya aspek Organisasi dan Manajemen Portofolio, PTK menjalankan berbagai kebijakan dan strategi guna memperkuat fondasi internal Perusahaan dalam mendukung keberlanjutan usaha jangka panjang. Upaya ini mencakup pengembangan budaya organisasi yang *agile* dan kompetitif, penyusunan *workforce planning* yang selaras dengan arah bisnis entitas induk, serta optimalisasi portofolio anak perusahaan melalui strategi *rebranding*. Selain itu, PTK menginisiasi program *HSE Excellence* dan peningkatan rating ESG sebagai bagian dari komitmen terhadap keberlanjutan, etika bisnis, kepatuhan hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. PTK juga memfokuskan langkahnya pada pembaruan Sistem Tata Kerja (STK) untuk PTK Group serta mempersiapkan

In the *Marine Services* segment in 2024, PTK focused its strategy on enhancing the quality of ship agency services and developing more adaptive and competitive maritime services. The implementation of *Service Level Agreement*-based services is carried out consistently to meet customer expectations. To support national clean energy initiatives, PTK also strengthened its *Fatty Acid Methyl Ester (FAME)* transportation business in accordance with the Holding's direction. On the other hand, the Company continues to expand its scope of services through the development of *port management, port EPC & maintenance, pilotage services, oil spill response*, and other marine services. This effort is supported by investment in work equipment and improvement of human resource capabilities. Collaboration with entities within *Pertamina Group* and *SOEs* is strengthened to reach more business opportunities, including through *job bundling* strategies. In addition, PTK encouraged digital transformation in the *Marine Services* service line as a strategic step to improve effectiveness, service accuracy, and operational competitiveness.

In the *Logistic Services* business segment in 2024, PTK defined strategies and policies that focus on improving HSSE aspects and operational excellence in every logistics activity. The Company continues to expand its service coverage through the addition of logistics *shorebase* areas and the establishment of strategic partnerships with potential partners to develop existing facilities. Optimizing the *shorebase* business in Kabil and Tanjung Batu is also a priority, along with exploring new locations with logistics development potential. In addition, PTK is committed to strengthening infrastructure through the addition of production assets, developing human resource competencies, and implementing business process digitization to support efficiency and improve overall logistics services.

In the business support line, especially the Organization and Portfolio Management aspects, PTK implemented various policies and strategies to strengthen the Company's internal foundation in supporting long-term business sustainability. These efforts include the development of an agile and competitive organizational culture, the preparation of workforce planning that is aligned with the parent entity's business direction, and the optimization of subsidiary portfolios through *rebranding* strategies. In addition, PTK initiated the *HSE Excellence* program and improved its ESG rating as part of its commitment to sustainability, business ethics, legal compliance, and respect for human rights. PTK also focused on updating the *Work Procedure System (STK)* for PTK Group and preparing for the implementation



pelaksanaan *Project Charter* Budaya. Beberapa inisiatif lainnya yang dijalankan antara lain: peningkatan jumlah gugus *Continuous Improvement Program* (CIP) sebagai bagian dari program perbaikan berkelanjutan; peningkatan kapabilitas pekerja melalui forum *Knowledge Sharing* (BONGKAR MUAT); dan implementasi STK sebagai dasar kegiatan operasional serta upaya peningkatan kinerja. PTK juga menjaga sertifikasi ISO 9001:2015 untuk menjamin mutu dan kredibilitas layanan, melakukan asesmen QMA berbasis KKEP sebagai tolok ukur inovasi, serta menetapkan kebijakan berkorespondensi sebagai pendukung operasional bisnis.

of the Culture Charter Project. Some of the other initiatives undertaken include increasing the number of Continuous Improvement Program (CIP) clusters as part of the continuous improvement program, increasing worker capabilities through Knowledge-Sharing forums (BONGKAR MUAT), and implementing STK as the basis for operational activities and performance improvement efforts. PTK also maintains ISO 9001:2015 certification to ensure service quality and credibility, conducts KKEP-based QMA assessments as a benchmark for innovation, and establishes correspondence policies to support business operations.

Peranan Direksi dalam Perumusan serta Implementasi Strategi dan Kebijakan Strategis

The Role of the Board of Directors in the Formulation and Implementation of Strategies and Strategic Policies

Direksi PTK memainkan peranan strategis dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi perusahaan guna menjawab tantangan bisnis, memanfaatkan peluang, dan mendukung pencapaian tujuan jangka panjang Perusahaan. Dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahunan maupun Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Direksi melakukan pemetaan terhadap isu-isu strategis, risiko usaha, dan dinamika eksternal yang mempengaruhi kinerja bisnis. Hasil pemetaan tersebut menjadi dasar dalam menyusun strategi dan kebijakan yang selaras dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG), serta memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG).

PTK's Board of Directors plays a strategic role in formulating the Company's policy direction and strategy to respond to business challenges, capitalize on opportunities, and support the achievement of the Company's long-term goals. In preparing the Annual Budget and Operational Plan (ABOP) and the Long-Term Business Plan (RJPP), the Board of Directors maps out strategic issues, business risks, and external dynamics that affect business performance. The results of this mapping serve as the foundation for developing strategies and policies aligned with the principles of good corporate governance (GCG), while also considering environmental, social, and governance (ESG) aspects.

Dalam proses perumusannya, Direksi secara aktif melakukan konsultasi dengan Dewan Komisaris guna memperoleh masukan strategis, serta memastikan keselarasan arah kebijakan dengan kepentingan jangka panjang Perusahaan. Selanjutnya, strategi dan kebijakan yang telah difinalisasi dilaporkan dan disampaikan kepada Pemegang Saham untuk mendapatkan persetujuan. Setelah ditetapkan, Direksi melakukan sosialisasi atas program strategis kepada seluruh jajaran organisasi melalui berbagai forum formal seperti *Town Hall Meeting* dan Rapat Koordinasi (Rakor), *Focus Group Discussion* (FGD), guna memastikan keselarasan pemahaman di seluruh lini organisasi. Untuk menjamin efektivitas implementasi, Direksi juga melakukan pemantauan berkala atas capaian kinerja dan efektivitas kebijakan melalui forum evaluasi strategis bersama unit-unit terkait. Pendekatan ini menjadi bagian dari komitmen Direksi dalam menciptakan organisasi yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada pencapaian nilai tambah berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan.

During the formulation process, the Board of Directors actively consulted with the Board of Commissioners to obtain strategic input and ensure that the policy direction was in line with the Company's long-term interests. Subsequently, the finalized strategies and policies were reported and submitted to the Shareholders for approval. Once established, the Board of Directors communicates the strategic program to all levels of the organization through various formal forums such as Town Hall Meetings, and Coordination Meetings (Rakor), Focus Group Discussions (FGD) to ensure alignment of understanding across all organizational lines. To ensure the effectiveness of implementation, the Board of Directors also conducts regular monitoring of performance achievements and policy effectiveness through strategic evaluation forums with relevant units. This approach is part of the Board of Directors' commitment to creating an adaptive, collaborative organization focused on achieving sustainable value creation for all stakeholders.

Pencapaian Kinerja 2024 serta Perbandingan Antara Hasil yang Dicapai Dengan Target

2023 Performance Achievements and Comparison Between Results Achieved and Targets

Secara umum, kinerja operasional dan keuangan PTK sepanjang tahun 2024 menunjukkan peningkatan yang signifikan dan berhasil melampaui target yang ditetapkan dalam RKAP 2024 maupun Key Performance Indicators (KPI) Perusahaan sebagaimana tertuang dalam Kontrak Manajemen antara PTK dan pemegang saham. Realisasi capaian KPI Perusahaan tahun 2024 mencapai 108,25%, meningkat sebesar 4,11% dibanding capaian tahun sebelumnya yang sebesar 103,80%. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan manajemen dalam mengelola strategi operasional, keuangan, dan pemasaran secara efektif. Sebagian besar indikator kinerja utama menunjukkan hasil yang baik dan bahkan melampaui target, mencerminkan soliditas implementasi strategi bisnis serta efektivitas pengambilan keputusan dalam menghadapi dinamika industri dan tantangan eksternal sepanjang tahun 2024.

In general, PTK's operational and financial performance throughout 2024 showed significant improvement and successfully exceeded the targets set in the 2024 ABOP and the Company's Key Performance Indicators (KPIs) as stipulated in the Management Contract between PTK and its shareholders. The achievement of the Company's KPIs for 2024 reached 108.25%, an increase of 4.11% compared to the previous year's achievement of 103.80%. This increase reflects the success of management in effectively managing operational, financial, and marketing strategies. Most key performance indicators showed good results and even exceeded targets, reflecting the solid implementation of business strategies and the effectiveness of decision-making in addressing industry dynamics and external challenges throughout 2024.

Kinerja Operasional Operational Performance

Pada tahun 2024, segmen Shipping Activities menunjukkan kinerja yang sangat baik, tercermin dari realisasi indikator operasional utama yang melampaui target. Jumlah armada kapal PTK mencapai 370 unit atau 128,47% dari target RKAP sebesar 386 unit. Armada tersebut terdiri dari 23 unit *Cargo Vessel* (100% dari target), 9 unit *Offshore Support Vessel* (52,94%), 50 unit *Harbour Tug* (90,91%), dan 288 unit *Small Craft* (98,97%). Kinerja operasional kapal juga menunjukkan hasil positif, di mana *commission days* kapal milik terealisasi selama 119.841 hari atau 106,55% dari target 112.471 hari. Capaian ini didukung oleh pengalihan 13 unit kapal dari *intermediate survey* menjadi *underwater survey* yang hanya memerlukan satu hari, serta optimalisasi jadwal *annual survey* untuk 147 unit *small craft* melalui koordinasi dengan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP). Sementara itu, *commercial days* kapal milik tercapai sebesar 119.220 hari atau 107,47% dari target 110.938 hari, yang diperoleh melalui efisiensi pelaksanaan survey dan optimalisasi pemanfaatan kapal milik untuk mendukung kegiatan komersial. Kinerja

In 2024, the Shipping Activities segment showed excellent performance, as reflected in the realization of key operational indicators that exceeded targets. PTK's total fleet of ships reached 370 units or 128.47% of the ABOP target of 386 units. The fleet consists of 23 Cargo Vessels (100% of the target), 9 Offshore Support Vessels (52.94%), 50 Harbour Tugs (90.91%), and 288 Small Craft (98.97%). Operational performance of the vessels also showed positive results, with commission days for owned vessels realized at 119,841 days, or 106.55% of the target of 112,471 days. This achievement was supported by the transfer of 13 vessels from intermediate surveys to underwater surveys, which only required one day, as well as the optimization of annual survey schedules for 147 small craft through coordination with the Port Authority and Port Authority Office (KSOP). Meanwhile, commercial days for owned vessels reached 119,220 days or 107.47% of the target of 110,938 days, achieved through survey efficiency and optimization of owned vessel utilization to support commercial activities. The outstanding performance in this segment



unggul di segmen ini mencerminkan keberhasilan PTK dalam meningkatkan efektivitas operasional dan utilisasi aset secara maksimal, sekaligus memperkuat posisi Perusahaan sebagai penyedia jasa maritim logistik energi yang andal dan kompetitif.

Pada tahun 2024, kinerja segmen *Marine Services* PTK menunjukkan performa yang solid dengan total layanan keagenan kapal mencapai 29.959 call atau sebesar 98,34% dari target RKAP tahun 2024 sebesar 30.466 call. Capaian ini mencerminkan stabilitas operasional perusahaan di tengah tantangan eksternal, terutama dinamika distribusi serta pembelian minyak dan gas oleh Pertamina yang mempengaruhi volume armada yang diageni. Secara lebih rinci, keagenan kapal terbagi dalam tiga kategori utama. Pertama, Keagenan *Tanker Pihak Ketiga* berhasil mencatat 5.181 call, jauh melampaui target sebesar 3.230 call atau mencapai 160,40% dari target, menandakan peningkatan kepercayaan pihak ketiga terhadap layanan keagenan PTK yang profesional dan andal. Kedua, Keagenan *Charter Milik Pertamina* terealisasi sebesar 20.745 call atau 87,04% dari target 23.834 call, dengan penurunan ini lebih disebabkan oleh fluktuasi kebutuhan logistik yang mengikuti pola operasional Pertamina. Ketiga, Keagenan Umum mencatat 4.033 call, melampaui target 3.402 call dengan pencapaian sebesar 118,55%, mencerminkan keberhasilan PTK dalam memperluas layanan keagenan secara agresif di pasar non-group Pertamina. Meskipun total realisasi belum sepenuhnya memenuhi target, kinerja segmen ini tetap menunjukkan daya saing yang kuat dan menjadi modal penting bagi PTK dalam memperkuat posisinya sebagai penyedia jasa *marine support* yang adaptif terhadap dinamika sektor energi nasional dan kebutuhan mitra usaha.

Adapun kinerja operasional segmen *Logistic Services* PTK menunjukkan pencapaian yang sangat positif, dengan total luas area penyimpanan yang dikelola mencapai 1.703.772 m² atau setara 150,24% dari target RKAP 2024 sebesar 1.134.049 m². Pencapaian ini terdiri atas dua komponen utama, yaitu *cover storage* dan *open storage*. Untuk *cover storage*, realisasi mencapai 372.074 m² atau 106,96% dari target 347.879 m², mencerminkan optimalisasi fasilitas penyimpanan tertutup secara efisien. Sementara itu, *open storage* terealisasi jauh melampaui target, yakni sebesar 1.331.698 m² dibandingkan dengan target 786.170 m², atau setara 169,39% dari target. Capaian signifikan ini menunjukkan efektivitas PTK dalam mengelola dan memanfaatkan ruang penyimpanan terbuka, serta meningkatnya kepercayaan pelanggan terhadap layanan logistik yang disediakan. Secara keseluruhan, hasil ini memperkuat posisi PTK sebagai penyedia layanan logistik energi yang kompetitif dan mampu menjawab kebutuhan pasar secara adaptif dan responsif.

reflects PTK's success in enhancing operational effectiveness and maximizing asset utilization while strengthening the Company's position as a reliable and competitive provider of maritime logistics services for the energy sector.

In 2024, PTK's Marine Services segment showed solid performance with a total of 29,959 vessel agency services, or 98.34% of the 2024 ABOP target of 30,466 calls. This achievement reflects the Company's operational stability amid external challenges, particularly the dynamics of distribution and the purchase of oil and gas by Pertamina, which have impacted the volume of the fleet under the agency. More specifically, ship agency services are divided into three main categories. First, Third-Party Tanker Agency successfully recorded 5,181 calls, far exceeding the target of 3,230 calls or reaching 160.40% of the target, indicating an increase in third-party confidence in PTK's professional and reliable agency services. Second, Pertamina's Own Charter Agency achieved 20,745 calls or 87.04% of the target of 23,834 calls. This decline was primarily due to fluctuations in logistics needs following Pertamina's operational patterns. Third, General Agency recorded 4,033 calls, exceeding the target of 3,402 calls with an achievement of 118.55%, reflecting PTK's success in aggressively expanding its agency services in the non-Pertamina group market. Although the total realization has not fully met the target, the performance of this segment still demonstrates strong competitiveness and serves as a crucial asset for PTK in strengthening its position as an adaptive marine support service provider in response to the dynamics of the national energy sector and the needs of business partners.

The operational performance of PTK's Logistics Services segment showed significantly positive results, with the total managed storage area reaching 1,703,772 m² or 150.24% of the 2024 RKAP target of 1,134,049 m². This achievement consists of two main components: covered storage and open storage. For covered storage, the realization reached 372,074 m², or 106.96% of the target of 347,879 m², reflecting the efficient optimization of closed storage facilities. Meanwhile, open storage was realized far exceeding the target, at 1,331,698 m² compared to the target of 786,170 m², or equivalent to 169.39% of the target. This significant achievement demonstrates PTK's effectiveness in managing and utilizing open storage space, as well as increasing customer confidence in the logistics services provided. Overall, these results strengthen PTK's position as a competitive energy logistics service provider capable of responding to market needs in an adaptive and responsive manner.

Kinerja Keuangan

Financial Performance

Pada tahun 2024, PTK berhasil menunjukkan kinerja keuangan yang solid dengan capaian yang melampaui sebagian besar target yang telah ditetapkan dalam RKAP. Pendapatan usaha tercatat sebesar Rp7,56 triliun atau setara 98,11% dari target sebesar Rp7,70 triliun. Meskipun sedikit di bawah target, efisiensi pada sisi biaya berdampak positif terhadap pencapaian laba. Beban pokok pendapatan terealisasi sebesar Rp4,96 triliun atau hanya 90,73% dari target, menghasilkan laba bruto sebesar Rp2,60 triliun, melampaui target sebesar Rp2,23 triliun (116,21%). Efisiensi juga tercermin dari beban umum dan administrasi yang berhasil ditekan hingga 98,27% dari target, serta total beban usaha yang tercapai 92,16% dari target. Hal ini mendukung realisasi laba usaha sebesar Rp1,34 triliun, jauh melampaui target sebesar Rp955 miliar atau mencapai 140,22%. Meskipun pendapatan lain-lain dan bunga investasi belum mencapai target, dengan masing-masing sebesar 30,47% dan 25,96%, laba sebelum pajak tetap tercatat tinggi sebesar Rp1,33 triliun atau 149,82% dari target. Setelah dikurangi beban pajak, laba tahun berjalan yang berhasil dibukukan mencapai Rp1,08 triliun, atau 153,54% dari target RKAP sebesar Rp700 miliar. Pencapaian ini mencerminkan efektivitas strategi operasional dan efisiensi biaya yang konsisten sepanjang tahun.

Adapun posisi keuangan, total aset PTK pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp9,08 triliun atau 100,51% dari target. Kinerja ini ditopang oleh kenaikan kas dan piutang usaha. Namun, liabilitas perusahaan mencapai Rp4,48 triliun atau 131,61% dari target akibat peningkatan utang usaha. Di sisi lain, ekuitas tercatat Rp4,60 triliun atau 81,74% dari target yang disebabkan oleh belum tercapainya target penyertaan modal dari proyek investasi. Meskipun demikian, secara keseluruhan, struktur keuangan PTK masih berada dalam kondisi yang sehat dan terkendali.

In 2024, PTK successfully demonstrated solid financial performance, exceeding most of the targets set in the ABOP. Revenues stood at Rp7.56 trillion, equivalent to 98.11% of the target of Rp7.70 trillion. Although slightly below target, cost efficiency had a positive impact on profit achievement. The cost of revenue was realized at Rp4.96 trillion, or only 90.73% of the target, resulting in a gross profit of Rp2.60 trillion, exceeding the target of Rp2.23 trillion (116.21%). Efficiency was also reflected in general and administrative expenses, which were successfully reduced to 98.27% of the target, as well as total operating expenses, which reached 92.16% of the target. It supported the realization of operating profit of Rp1.34 trillion, far exceeding the target of Rp955 billion or reaching 140.22%. Although other income and investment interest have not yet reached the target, at 30.47% and 25.96%, respectively, profit before tax remains high at Rp1.33 trillion or 149.82% of the target. After deducting tax expenses, the profit for the year reached Rp1.08 trillion, or 153.54% of the budgeted target of Rp700 billion. This achievement reflects the effectiveness of operational strategies and consistent cost efficiency throughout the year.

Regarding the financial position, PTK's total assets in 2024 were recorded at Rp9.08 trillion, or 100.51% of the target. This performance was supported by an increase in cash and trade receivables. However, the Company's liabilities reached Rp4.48 trillion, or 131.61% of the target, due to an increase in trade payables. On the other hand, equity was recorded at Rp4.60 trillion or 81.74% of the target due to the failure to achieve the capital participation target from investment projects. Nevertheless, overall, PTK's financial structure remains healthy and under control.

Tantangan dan Kendala serta Langkah Penyelesaian

Challenges and Obstacles, as well as Settlement Steps

Pada tahun 2024, jasa shipping PTK menghadapi dinamika tantangan seiring dengan kembali meningkatnya aktivitas eksplorasi *migas offshore*. Peluang ini membuka potensi ekspansi ke pasar *non-captive*, namun sekaligus menghadirkan tantangan yang kompleks, baik dari sisi tingkat persaingan yang semakin ketat maupun adaptasi terhadap ekosistem pelanggan yang berbeda dari segmen eksisting. Salah satu tantangan utama yang dihadapi PTK

In 2024, PTK's shipping services faced dynamic challenges as offshore oil and gas exploration activities increased again. This opportunity opened up the potential for expansion into non-captive markets but, at the same time, presented complex challenges, both in terms of increasingly fierce competition and adaptation to a customer ecosystem that was different from the existing segment. One of the main challenges faced by PTK is the potential overlap of roles between entities within



adalah potensi tumpang tindih peran antar entitas dalam grup Pertamina, di mana pelanggan dapat memilih alternatif penyedia jasa perkapalan dari entitas lain di dalam grup yang juga bergerak di segmen serupa. Hal ini menuntut PTK untuk mampu menunjukkan proposisi nilai yang kuat serta memperkuat posisi dalam internal grup melalui sinergi yang terarah dan produktif. Di sisi lain, penetrasi ke pasar luar grup Pertamina juga dihadapkan pada tantangan struktural, khususnya terkait tingginya posisi tawar supplier dalam industri perkapalan. Komponen dan suku cadang kapal, terutama untuk jenis kapal pendukung eksplorasi migas (*Offshore Support Vessel/OSV*), sering kali bersifat spesifik dan sulit diperoleh dengan harga yang kompetitif, sehingga berdampak pada biaya operasional dan keandalan layanan.

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, PTK menempuh sejumlah langkah strategis yang difokuskan pada penguatan daya saing dan perluasan pasar. Di internal grup, PTK mengoptimalkan sinergi dengan entitas Pertamina dan BUMN lainnya dengan menonjolkan keunggulan operasional serta rekam jejak dalam pengelolaan kapal *Offshore Support Vessel* (OSV). Sementara itu, untuk memperluas pasar eksternal, PTK mengembangkan strategi jangka panjang yang berorientasi pada kemitraan strategis dan pendekatan layanan yang fleksibel terhadap kebutuhan industri migas *offshore*. Di sisi operasional, PTK juga memperkuat rantai pasok dengan melakukan diversifikasi sumber komponen kapal dan menjalin hubungan jangka panjang dengan pemasok strategis guna menekan ketergantungan terhadap pemasok tunggal. Selain itu, PTK terus berinvestasi dalam peningkatan keandalan armada serta digitalisasi proses operasional untuk menjaga efisiensi dan responsivitas layanan. Langkah-langkah ini diharapkan mampu menjawab tantangan pasar yang kompetitif sekaligus memperkuat posisi PTK sebagai penyedia jasa perkapalan yang adaptif dan berdaya saing tinggi. Jika dilihat dari peta persaingan di jasa perkapalan untuk segmen *captive market*, posisi PTK relatif aman karena didukung oleh basis pelanggan internal yang kuat dalam grup Pertamina. Namun, ketika melakukan ekspansi ke pasar *non-captive*, tingkat persaingan menjadi lebih ketat, mengingat banyaknya pemain lain dengan kapabilitas serupa di industri ini. Meskipun demikian, PTK dinilai memiliki modal yang kuat untuk bersaing, termasuk pengalaman panjang dalam layanan perkapalan migas, reputasi yang baik, serta keahlian teknis yang telah teruji di berbagai proyek strategis nasional.

Segmen jasa marine PTK menghadapi karakteristik industri yang unik, di mana hambatan masuk (*barrier to entry*) cukup tinggi, sehingga tidak mudah diakses oleh pemain baru tanpa pengalaman atau rekam jejak dalam bidang jasa perkapalan maupun pengelolaan pelabuhan. Meskipun jumlah penyedia jasa pengganti relatif sedikit dan loyalitas pelanggan terhadap penyedia eksisting cukup tinggi, namun kompetisi tetap terasa di tiap lini layanan, seperti kegiatan pemanduan,

the Pertamina group, where customers can choose alternative shipping service providers from other entities within the group that also operate in similar segments. It requires PTK to be able to demonstrate a strong value proposition and strengthen its position within the group through targeted and productive synergies. On the other hand, penetration into markets outside the Pertamina group also faces structural challenges, particularly related to the high bargaining power of suppliers in the shipping industry. Ship components and spare parts, especially for offshore support vessels (OSVs) used in oil and gas exploration, are often highly specialized and difficult to obtain at competitive prices, thereby impacting operational costs and service reliability.

To overcome these challenges, PTK has taken several strategic steps focused on strengthening competitiveness and expanding the market. Internally, PTK optimizes synergies with Pertamina entities and other state-owned enterprises by highlighting its operational excellence and track record in managing Offshore Support Vessels (OSVs). Meanwhile, to expand its external market, PTK has developed a long-term strategy focused on strategic partnerships and a flexible service approach tailored to the needs of the offshore oil and gas industry. On the operational side, PTK is also strengthening its supply chain by diversifying ship component sources and establishing long-term relationships with strategic suppliers to reduce reliance on single suppliers. Additionally, PTK continues to invest in improving fleet reliability and operational process digitalization to maintain service efficiency and responsiveness. These steps are expected to address the challenges of a competitive market while strengthening PTK's position as an adaptive and highly competitive shipping service provider. From the perspective of competition in the shipping services market for the captive market segment, PTK's position is relatively secure, supported by a robust internal customer base within the Pertamina group. However, when expanding into the non-captive market, competition becomes more intense, given the presence of numerous other players with similar capabilities in the industry. Despite this, PTK is deemed to have robust competitive advantages, including extensive experience in oil and gas shipping services, a good reputation, and proven technical expertise across various national strategic projects.

PTK's marine services segment faces unique industry characteristics, where barriers to entry are quite high, making it difficult for new players without experience or a track record in shipping services or port management to enter the market. Although the number of alternative service providers is relatively small and customer loyalty to existing providers is quite high, competition remains intense across all service lines, such as pilotage activities, vessel delays, and ship-to-ship

penundaan kapal, dan operasi *ship-to-ship transfer*. Kondisi ini menuntut PTK untuk terus menjaga kualitas layanan serta efisiensi operasional agar tetap menjadi pilihan utama pelanggan. Tantangan lainnya muncul dari kompleksitas operasional dan regulasi di wilayah pelabuhan yang sering kali melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk otoritas pelabuhan, regulator, dan operator logistik lainnya. Selain itu, dinamika tarif dan tekanan biaya turut menjadi perhatian, khususnya dalam menjaga margin usaha di tengah kebutuhan investasi berkelanjutan terhadap armada dan peralatan pendukung. Dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut, PTK menempuh pendekatan adaptif dan kolaboratif. Salah satu langkah strategisnya adalah menjalin aliansi dan kemitraan dengan pelaku usaha sejenis, guna meningkatkan kapabilitas layanan sekaligus memperluas jangkauan operasional secara efisien. PTK juga terus memperkuat sistem manajemen operasional berbasis digital, meningkatkan standar keselamatan dan kepatuhan regulasi, serta menjaga hubungan yang baik dengan pelanggan dan otoritas Pelabuhan. Melalui strategi ini, PTK berupaya tidak hanya mempertahankan posisi di pasar jasa marine yang kompetitif, tetapi juga memperluas peluang pertumbuhan secara berkelanjutan.

Segmen jasa logistik, khususnya yang mendukung aktivitas hulu migas (*upstream logistics*), menghadirkan tantangan tersendiri bagi PTK. Industri ini didominasi oleh pelaku yang telah memiliki rekam jejak kuat, relasi bisnis jangka panjang, dan keunggulan geografis karena beroperasi dekat dengan lokasi proyek. Pelanggan di sektor ini umumnya memiliki posisi tawar yang tinggi, cenderung memilih mitra logistik yang tidak hanya efisien secara biaya, tetapi juga memiliki kemampuan memenuhi persyaratan teknis dan operasional yang kompleks. Tantangan lainnya adalah tingginya biaya operasional yang harus ditanggung oleh penyedia jasa untuk memenuhi standar dan ekspektasi sektor hulu migas yang sangat spesifik. Persaingan yang ketat dengan BUMN maupun swasta berpengalaman menjadikan penetrasi pasar ini tidak mudah. Untuk menghadapi tantangan tersebut, PTK mengandalkan pengalaman di sektor perkapalan dan potensi integrasi layanan logistik *end-to-end* untuk memberikan nilai tambah bagi pelanggan. Selain itu, PTK juga memiliki keunggulan strategis melalui pengelolaan pelabuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai basis logistik terpadu. Dalam rangka memperkuat daya saing, PTK merencanakan investasi pada peningkatan infrastruktur *shorebase* di Kabil dan Tanjung Batu serta menjajaki pengembangan *shorebase* baru di lokasi strategis yang berdekatan dengan wilayah operasi hulu migas. Langkah ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kapabilitas layanan logistik PTK, tetapi juga memperkuat kehadiran Perusahaan di pasar *upstream logistics* yang kompetitif, sekaligus membuka peluang untuk menjalin kemitraan strategis dengan KKKS maupun pelaku pertambangan.

This situation requires PTK to continuously maintain service quality and operational efficiency to remain the top choice for customers. Additional challenges arise from the operational and regulatory complexities in port areas, which often involve multiple stakeholders, including port authorities, regulators, and other logistics operators. Additionally, tariff dynamics and cost pressures are also a concern, particularly in maintaining business margins amid the need for ongoing investment in the fleet and supporting equipment. In addressing these challenges, PTK adopts an adaptive and collaborative approach. One strategic step is to form alliances and partnerships with similar businesses to enhance service capabilities while efficiently expanding operational reach. PTK also continues to strengthen its digital-based operational management system, improve safety standards and regulatory compliance, and maintain good relationships with customers and port authorities. Through this strategy, PTK aims not only to maintain its position in the competitive marine services market but also to expand sustainable growth opportunities.

The logistics services segment, especially those supporting upstream oil and gas activities (*upstream logistics*), presents unique challenges for PTK. This industry is dominated by players with strong track records, long-term business relationships, and geographical advantages due to their proximity to project sites. Customers in this sector typically have strong bargaining power and tend to choose logistics partners that are not only cost-efficient but also capable of meeting complex technical and operational requirements. Another challenge is the high operational costs that service providers must bear to meet the highly specific standards and expectations of the upstream oil and gas sector. Intense competition with state-owned enterprises and experienced private companies makes market penetration difficult. To address these challenges, PTK relies on its experience in the shipping sector and the potential for end-to-end logistics service integration to provide added value to customers. Additionally, PTK has a strategic advantage through port management that can be utilized as an integrated logistics base. To strengthen its competitiveness, PTK plans to invest in improving shorebase infrastructure in Kabil and Tanjung Batu and explore the development of new shorebases in strategic locations near upstream oil and gas operational areas. This initiative is expected not only to enhance PTK's logistics service capabilities but also to strengthen the Company's presence in the competitive upstream logistics market while opening opportunities for strategic partnerships with KKKS and mining operators.



Perkembangan Implementasi Tata Kelola Perusahaan Development of Corporate Governance Implementation

PTK senantiasa menjadikan etika dan tanggung jawab sebagai fondasi utama dalam menjalankan aktivitas bisnis. Bagi PTK, penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*) tidak hanya merupakan kewajiban normatif, tetapi juga merupakan landasan strategis dalam menjamin keberlangsungan usaha serta meningkatkan kepercayaan dari seluruh pemangku kepentingan. Konsistensi ini diwujudkan melalui implementasi nilai-nilai dasar GCG, yakni transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan dalam setiap proses pengambilan keputusan dan operasional. Dalam menghadapi dinamika dan ekspektasi tata kelola yang kian berkembang, PTK memandang pentingnya mengadopsi prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG) sebagai bagian dari strategi bisnis jangka panjang. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat fondasi keberlanjutan, tetapi juga mencerminkan komitmen Perusahaan untuk tumbuh secara bertanggung jawab, inklusif, dan berorientasi pada masa depan. Pendekatan ini memungkinkan Perusahaan untuk terus tumbuh secara berkelanjutan dengan tetap memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. Struktur tata kelola yang dijalankan oleh PTK berlandaskan keseimbangan peran antara RUPS, Dewan Komisaris, dan Direksi, yang masing-masing melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara profesional, sesuai prinsip *check and balances* serta ketentuan hukum yang berlaku.

PTK always puts ethics and responsibility as the main foundation in running a business. For PTK, implementing Good Corporate Governance (GCG) isn't just a normative obligation but also a strategic foundation for ensuring the business keeps running and boosting trust from all stakeholders. This consistency is realized through the implementation of GCG's core values, namely transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness in every decision-making and operational process. In overcoming the dynamics and expectations of the increasingly evolving governance, PTK considers it crucial to adopt the principles of Environmental, Social, and Governance (ESG) as part of its long-term business strategy. This approach not only strengthens the foundation of sustainability but also reflects the Company's commitment to grow responsibly, inclusively, and with a focus on the future. This approach enables the Company to continuously grow sustainably while paying attention to social and environmental impacts. The governance structure implemented by PTK is based on a balance of roles between the General Meeting of Shareholders, the Board of Commissioners, and the Board of Directors, each of which carries out their duties and responsibilities professionally, in accordance with the principles of checks and balances and applicable legal provisions.

Implementasi Manajemen Risiko Risk Management Implementation

Sebagai bagian dari tata kelola perusahaan yang baik, PTK mengimplementasikan sistem manajemen risiko berdasarkan standar internasional ISO 31000:2018. Sistem ini dirancang untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko secara menyeluruh agar tujuan strategis perusahaan tercapai dengan risiko yang minimal. Direksi telah menetapkan Kebijakan Manajemen Risiko sebagai panduan dalam pendekatan yang sistematis dan terintegrasi melalui kerangka *Enterprise Risk Management* (ERM). PTK menerapkan model *Three Lines of Defense* dalam pengelolaan risiko, di mana lini pertama merupakan fungsi atau unit kerja sebagai pemilik risiko, lini kedua adalah unit manajemen risiko yang memberikan panduan dan pemantauan, serta lini ketiga Internal Audit yang melakukan penilaian independen terhadap efektivitas pengelolaan risiko. Komitmen perusahaan terhadap manajemen risiko

As part of good corporate governance, PTK implements a risk management system based on the international standard ISO 31000:2018. This system is designed to identify, analyze, and manage risks comprehensively so that the Company's strategic objectives are achieved with minimal risk. The Board of Directors has established a Risk Management Policy as a guide for a systematic and integrated approach through the Enterprise Risk Management (ERM) framework. PTK applies the Three Lines of Defense model in risk management, where the first line consists of functions or work units as risk owners. The second line is the risk management unit that provides guidance and monitoring, and the third line is Internal Audit, which conducts independent assessments of the effectiveness of risk management. The Company's commitment to risk management is strengthened by the signing of the Risk Management Treaty by the Board of

diperkuat dengan penandatanganan Traktat Manajemen Risiko oleh Direksi pada September 2023, menjadikan manajemen risiko sebagai bagian dari budaya kerja dan pengambilan keputusan di seluruh organisasi. PTK juga telah menyusun *Roadmap* Manajemen Risiko 2020–2026 sebagai pedoman strategis penerapan ERM secara berkelanjutan.

Sepanjang tahun 2024, PTK menghadapi berbagai risiko utama yang mencakup aspek lingkungan bisnis, strategi usaha, citra perusahaan, manajemen keuangan, hukum, tata kelola & kepatuhan, serta operasional. Risiko-risiko tersebut antara lain meliputi potensi tidak tercapainya target pendapatan, terhambatnya proses bisnis akibat isu organisasi, rendahnya pengembalian dana *idle cash*, serta klaim dan *off hired* akibat gangguan operasional armada. Di sisi keselamatan, risiko insiden besar seperti kebakaran dan kecelakaan kerja juga menjadi perhatian utama. PTK telah merespon risiko-risiko tersebut dengan strategi mitigasi komprehensif, antara lain memperkuat pendekatan pasar, mempercepat investasi, menyusun proses bisnis dan uraian jabatan, serta mengoptimalkan pengelolaan kas melalui program *Liquidity Control Tower*. Mitigasi juga dilakukan melalui perawatan armada tepat waktu, pelatihan keselamatan, penyempurnaan proses perizinan, serta penataan kontrak dan penguatan aspek hukum oleh Fungsi Legal. Secara keseluruhan, PTK berkomitmen menjaga kesinambungan usaha melalui pendekatan mitigasi risiko yang sistematis dan terukur di seluruh lini perusahaan.

Directors in September 2023, making risk management an integral part of the work culture and decision-making process across the organization. PTK has also developed a Risk Management Roadmap 2020–2026 as a strategic guide for the sustainable implementation of ERM.

Throughout 2024, PTK faced various key risks covering aspects of the business environment, business strategy, corporate image, financial management, legal, governance & compliance, and operations. These risks included the potential for not achieving revenue targets, business processes being hampered by organizational issues, low returns on idle cash, as well as claims and off-hires due to operational disruptions to the fleet. In terms of safety, major incidents such as fires and workplace accidents are also a key concern. PTK responded to these risks with a comprehensive mitigation strategy, including strengthening its market approach, accelerating investments, developing business processes and job descriptions, and optimizing cash management through the Liquidity Control Tower program. Mitigation efforts also include timely fleet maintenance, safety training, improving licensing processes, and contract restructuring and legal reinforcement by the Legal Function. Overall, PTK is committed to ensuring business continuity through a systematic and measurable risk mitigation approach across all company divisions.

Implementasi Sistem Pengendalian Internal

Internal Control System Implementation

PTK menerapkan sistem pengendalian internal yang kuat dan terintegrasi sebagai bagian dari komitmen terhadap tata kelola perusahaan yang baik dan keberlanjutan usaha. Sistem ini dirancang mengacu pada kerangka kerja COSO dan pendekatan *Three Lines Model*, yang mencakup lima elemen utama: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta kegiatan pengawasan. Pengendalian internal diterapkan secara menyeluruh pada aspek keuangan, operasional, dan kepatuhan. Pengelolaan keuangan dilakukan secara hati-hati dan akuntabel berdasarkan RKAP, sementara kegiatan operasional dijalankan sesuai prosedur dan target yang telah ditetapkan. Aspek kepatuhan dijalankan melalui Fungsi Legal yang memastikan seluruh aktivitas usaha mematuhi ketentuan hukum, tanpa adanya pelanggaran atau sanksi sepanjang tahun 2024. Evaluasi efektivitas sistem dilakukan melalui mekanisme ICOFR dan ICR, yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal PTK berjalan efektif dan sesuai dengan praktik terbaik.

PTK implements a robust and integrated internal control system as part of its commitment to good corporate governance and business sustainability. This system is designed in accordance with the COSO framework and the Three Lines Model approach, which encompasses five key elements: control environment, risk assessment, control activities, information and communication, and monitoring activities. Internal control is applied comprehensively to financial, operational, and compliance aspects. Financial management is conducted carefully and accountably based on the ABOP, while operational activities are performed in accordance with established procedures and targets. Compliance aspects are carried out through the Legal Function, which ensures that all business activities comply with legal provisions, with no violations or sanctions throughout 2024. The evaluation of system's effectiveness through the ICOFR and ICR mechanisms, confirming that PTK's internal control system is effective and aligns with best practices.



Penguatan Budaya Antikorupsi dan Sistem Pelaporan Pelanggaran Strengthening Anti-Corruption Culture and Whistleblowing Systems

Sebagai bagian dari komitmen kuat terhadap integritas, PTK mengadopsi kebijakan *zero tolerance* terhadap segala bentuk korupsi dan penyuapan. Perusahaan menegaskan bahwa setiap tindakan yang bertentangan dengan kebijakan ini akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk mendukung hal tersebut, PTK telah mengimplementasikan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang mengacu pada standar internasional ISO 37001:2016. Komitmen ini dipertegas melalui penandatanganan deklarasi anti korupsi dan penyuapan oleh Direksi sebagai acuan etik yang berlaku bagi seluruh insan PTK. Langkah preventif juga terus diperkuat melalui berbagai kegiatan edukatif seperti sosialisasi, pelatihan, dan pengawasan berkala terhadap kebijakan antikorupsi. Sepanjang tahun 2024, PTK telah melaksanakan sejumlah kegiatan, antara lain sharing session mengenai *fraud awareness* dan sistem pelaporan pelanggaran (WBS), pelaksanaan survei PERFECT (*Fraud Perception Index*) untuk mengukur tingkat pemahaman pegawai dan mitra terhadap pencegahan korupsi, serta kampanye gratifikasi. Selain itu, pelatihan khusus seperti *Internal Auditor and Awareness Training* untuk Sistem dan Standar Manajemen Terintegrasi (ISO 9001, 14001, 45001, 27001, dan 37001) juga telah diberikan kepada 39 pegawai di Yogyakarta pada Oktober 2024.

Sebagai hasil dari berbagai upaya tersebut, hingga 31 Desember 2024, tidak terdapat insiden korupsi yang terbukti dan berakibat pada pemberhentian pegawai maupun pemutusan hubungan kerja dengan mitra usaha karena pelanggaran terkait korupsi. PTK juga terus memperkuat budaya antikorupsi melalui pengendalian gratifikasi secara sistematis dan berkelanjutan, yang menjadi bagian dari kerangka pencegahan korupsi secara menyeluruh. Sebagai instrumen penguatan pengendalian internal, PTK menerapkan sistem pelaporan pelanggaran atau *Whistleblowing System* (WBS). Sistem ini telah terintegrasi dengan Pertamina Clean, saluran resmi pelaporan WBS milik Holding yang dikelola secara independen, menjamin kerahasiaan pelapor, serta menyediakan akses yang aman dan terpercaya. Kebijakan ini diperkuat melalui Surat Keputusan Direksi PTK No. Kpts-06/PTK0000/2023-S9 tentang Ratifikasi Sistem Tata Kerja Pengelolaan Pengaduan, yang menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan WBS di lingkungan PTK. Melalui sistem ini, seluruh insan PTK, termasuk Dewan Komisaris, Direksi, karyawan, hingga mitra kerja dan pemangku kepentingan

As part of its strong commitment to integrity, PTK has adopted a zero-tolerance policy towards all forms of corruption and bribery. The Company emphasizes that any action that violates this policy will be subject to sanctions in accordance with the provisions of the law. To support this, PTK has implemented an Anti-Bribery Management System (ABMS) that complies with the international standard ISO 37001:2016. This commitment is strengthened through the signing of an anti-corruption and bribery declaration by the Board of Directors as an ethical guideline applicable to all PTK employees. Preventive measures are also continuously reinforced through various educational activities such as awareness campaigns, training, and regular monitoring of anti-corruption policies. Throughout 2024, PTK conducted several activities, including a sharing session on fraud awareness and the violation reporting system (WBS), the implementation of the PERFECT survey (*Fraud Perception Index*) to measure the level of understanding of employees and partners regarding corruption prevention, and a campaign against gratuities. Additionally, specialized training such as *Internal Auditor and Awareness Training* for Integrated Management Systems and Standards (ISO 9001, 14001, 45001, 27001, and 37001) was provided to 39 employees in Yogyakarta in October 2024.

As a result of these efforts, there were no proven incidents of corruption that resulted in the dismissal of employees or termination of business partnerships due to corruption-related violations as of December 31, 2024. PTK also continues to strengthen its anti-corruption culture through systematic and sustainable control of gratuities, which is part of a comprehensive corruption prevention framework. As an instrument of internal control strengthening, PTK implemented a whistleblowing system (WBS). This system has been integrated with Pertamina Clean, the Holding Company's official WBS reporting channel, which is managed independently, guarantees the confidentiality of whistleblowers and provides secure and reliable access. This policy is reinforced by a Decree of PTK's Board of Directors No. Kpts-06/PTK0000/2023-S9 on the Ratification of the Complaint Management Work System, which serves as the legal basis for the implementation of the WBS within PTK. Through this system, all PTK employees, including the Board of Commissioners, the Board of Directors, staff, business partners, and other stakeholders, have access to submit

lainnya, memiliki akses untuk menyampaikan laporan atas dugaan pelanggaran. Setiap laporan yang diterima melalui WBS akan dianalisis dan diproses secara menyeluruh berdasarkan prosedur yang berlaku. Sepanjang tahun 2024, tercatat terdapat dua laporan pelanggaran yang masuk melalui sistem WBS, seluruhnya telah ditindaklanjuti hingga tahap investigasi selesai.

Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan, PTK meyakini bahwa penguatan GCG, antikorupsi, dan sistem pelaporan pelanggaran akan menciptakan tata kelola perusahaan yang tidak hanya patuh terhadap regulasi, tetapi juga mencerminkan budaya integritas, profesionalisme, dan kepercayaan publik terhadap Perusahaan.

reports on suspected violations. Every report received through the WBS will be analyzed and processed comprehensively in accordance with applicable procedures. Throughout 2024, two reports of violations were submitted through the WBS system, all of which have been followed up until the investigation stage was completed.

Through various efforts undertaken, PTK believes that strengthening GCG, anti-corruption measures, and the violation reporting system will create corporate governance that not only complies with regulations but also reflects a culture of integrity, professionalism, and public trust in the Company.

Mendukung Strategi Keberlanjutan dan Green Port di Indonesia

Supporting Sustainability Strategies and Green Ports in Indonesia

PTK terus memperkuat komitmennya dalam mendukung agenda keberlanjutan nasional melalui integrasi prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG) ke dalam seluruh lini bisnis. Sejalan dengan pendekatan *triple bottom line* (*profit, people, dan planet*), PTK berupaya memastikan bahwa pertumbuhan bisnis tidak mengabaikan dampak terhadap lingkungan maupun kesejahteraan masyarakat sekitar. Bentuk konkrit dari komitmen ini, PTK mengembangkan strategi keberlanjutan yang diwujudkan melalui berbagai program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Program ini mencakup pengelolaan lingkungan hidup, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), pemberdayaan sosial kemasyarakatan, hingga peningkatan layanan kepada pelanggan. Keseluruhan capaian ini dilaporkan setiap tahun dalam Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) sebagai bagian integral dari Laporan Tahunan Perusahaan.

Salah satu fokus utama PTK dalam mendorong keberlanjutan adalah penerapan konsep pelabuhan berwawasan lingkungan atau *Green Port*. Sebagai perusahaan logistik energi yang beroperasi di sektor maritim, PTK menyadari bahwa aktivitas pelabuhan dapat memberikan tekanan ekologis yang signifikan terhadap ekosistem laut dan pesisir. Oleh karena itu, PTK mengambil langkah proaktif untuk mengelola pelabuhan secara berkelanjutan, termasuk efisiensi energi, pengelolaan limbah, penggunaan teknologi bersih, serta peningkatan digitalisasi layanan sesuai prinsip *Smart Port*. Upaya ini sejalan dengan arahan pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang mendorong pelabuhan-pelabuhan di Indonesia untuk mengadopsi konsep *Green Port* demi meningkatkan daya saing logistik nasional.

PTK continues to strengthen its commitment to supporting the national sustainability agenda by integrating Environmental, Social, and Governance (ESG) principles into all lines of business. In line with the triple bottom line approach (*profit, people, and planet*), PTK strives to ensure that business growth does not neglect the impact on the environment and the welfare of the surrounding community. A concrete manifestation of this commitment, PTK has developed a sustainability strategy implemented through various Corporate Social Responsibility (CSR) programs. These programs encompass environmental management, occupational safety and health (OSH), community empowerment, and enhanced customer service. All these achievements are reported annually in the Sustainability Report, which is an integral part of the Company's Annual Report.

One of PTK's main focuses in promoting sustainability is the implementation of the concept of an environmentally-friendly port or *Green Port*. As an energy logistics company operating in the maritime sector, PTK realizes that port activities can have a significant ecological impact on marine and coastal ecosystems. Therefore, PTK takes proactive measures to manage ports sustainably, including energy efficiency, waste management, the use of clean technology, and the improvement of service digitalization in accordance with the *Smart Port* principle. These efforts are in line with the government's directive through the Coordinating Ministry for Maritime Affairs and Investment, which encourages ports in Indonesia to adopt the *Green Port* concept to improve national logistics competitiveness.



Komitmen PTK terhadap keberlanjutan dan inovasi diwujudkan melalui implementasi inisiatif *Next Level SBNP Service Provider*, yang berhasil mengantarkan perusahaan meraih dua penghargaan bergengsi pada ajang *Marketeers Editor's Choice Award 2024*, yaitu *The Green Corporate Initiative of the Year* dan *The Best Marine Logistic Services of the Year*. Selain itu, PTK juga menerima penghargaan *Indonesia Green Awards 2024* atas kontribusi nyata dalam pelestarian lingkungan melalui program CSR seperti *Coastal Clean Up* di Semarang, *Green Action Mangrove Program* (Green MAP) di Makassar, serta Desa Energi Berdikari di Jambi. Seluruh pencapaian ini menjadi refleksi dari visi jangka panjang PTK untuk tumbuh sebagai perusahaan maritim logistik energi yang andal, kompetitif, dan berperan aktif dalam mendukung transisi energi nasional. Ke depan, PTK berkomitmen untuk terus menghadirkan inovasi dan memperkuat kolaborasi lintas sektor guna membangun ekosistem logistik nasional yang ramah lingkungan, efisien, dan berkelanjutan.

PTK's commitment to sustainability and innovation is realized through the implementation of the *Next Level SBNP Service Provider* initiative, which has successfully led the Company to win two prestigious awards at the *Marketeers Editor's Choice Award 2024*, namely *The Green Corporate Initiative of the Year* and *The Best Marine Logistic Services of the Year*. Additionally, PTK received the *Indonesia Green Awards 2024* for its tangible contributions to environmental conservation through CSR programs such as the *Coastal Clean Up* in Semarang, the *Green Action Mangrove Program* (Green MAP) in Makassar, and the *Energy-Self-Reliant Village* in Jambi. All these achievements reflect PTK's long-term vision to grow as a reliable, competitive maritime energy logistics company actively supporting the national energy transition. Moving forward, PTK is committed to continuously delivering innovation and strengthening cross-sector collaboration to build a green, efficient, and sustainable national logistics ecosystem.

Prospek Usaha 2025

Business Prospects 2025

Menghadapi tahun 2025, Direksi memandang bahwa prospek usaha PTK berada pada jalur yang positif dan penuh peluang strategis. Optimisme ini didasarkan pada berbagai perkembangan di sektor industri yang menjadi ruang lingkup utama kegiatan usaha PTK, yakni jasa perkapalan, jasa *marine*, dan jasa logistik. Sebagai negara kepulauan, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menghubungkan ribuan pulau yang tersebar luas. Pemerintah melalui Program Tol Laut terus berkomitmen untuk memperkuat konektivitas domestik dan mengurangi disparitas harga antarwilayah, terutama di daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal). Pada tahun 2025, program ini diproyeksikan mengalami peningkatan signifikan, baik dari sisi jumlah armada maupun rute layanan. Peningkatan konektivitas ini tidak hanya mendorong efisiensi distribusi logistik ke daerah terpencil, tetapi juga menciptakan permintaan yang lebih besar terhadap armada kapal domestik. Kondisi ini membuka peluang bagi PTK untuk memperluas peran dalam penyediaan jasa perkapalan dan transportasi laut terintegrasi.

Facing the year 2025, the Board of Directors views that PTK's business prospects are on a positive path and full of strategic opportunities. This optimism is based on various developments in the industrial sector that are the main scope of PTK's business activities, namely shipping services, marine services, and logistics services. As an archipelagic country, Indonesia faces significant challenges in connecting thousands of widely dispersed islands. The government, through the Sea Toll Program, continues to commit to strengthening domestic connectivity and reducing price disparities between regions, especially in the 3T areas (Frontier, Outermost, and Disadvantaged). By 2025, this program is projected to experience significant increases, both in terms of the number of fleets and service routes. This increase in connectivity not only drives the efficiency of logistics distribution to remote areas but also creates greater demand for the domestic fleet. This condition opens up opportunities for PTK to expand its role in providing integrated shipping and maritime transportation services.

Sementara itu, laporan dari *Fitch Ratings Global* pada akhir tahun 2024 menunjukkan bahwa industri pengiriman dan perkapalan global diproyeksikan akan tetap stabil pada tahun 2025. Stabilitas ini mencerminkan kondisi pasar yang mulai kembali ke level normal setelah periode tekanan global akibat pandemi dan ketegangan geopolitik. Isu dekarbonisasi dan transisi energi menjadi tantangan sekaligus peluang, yang selaras dengan komitmen PTK dalam mengembangkan bisnis berkelanjutan melalui inisiatif *Green Port* dan efisiensi operasional berbasis energi bersih.

Pada sektor logistik, proyeksi pertumbuhan yang lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya memberikan sinyal positif bagi penguatan kinerja PTK. Dengan dukungan geliat sektor industri pengolahan, perdagangan, pertanian, kehutanan, dan perikanan, subsektor transportasi dan pergudangan nasional diperkirakan tumbuh sebesar 12,53% pada tahun 2025, meningkat signifikan dari proyeksi pertumbuhan tahun 2024 sebesar 9,52%. Pertumbuhan ini akan turut mendorong permintaan layanan logistik energi yang efisien, handal, dan adaptif terhadap kebutuhan pelanggan, baik dalam skala nasional maupun regional. Meskipun demikian, PTK juga mencermati dinamika eksternal seperti ketegangan geopolitik global, konflik Rusia-Ukraina, dan ketidakpastian di Timur Tengah yang dapat mempengaruhi rantai pasok energi dan logistik secara keseluruhan. Oleh karena itu, strategi bisnis PTK ke depan akan mengedepankan inovasi, digitalisasi layanan, penguatan kapabilitas SDM, serta pengelolaan risiko yang adaptif terhadap perubahan pasar.

Dengan fondasi operasional yang kuat, dukungan pemangku kepentingan, serta prospek industri yang kian membaik, PTK optimis untuk terus tumbuh sebagai perusahaan penyedia jasa logistik maritim energi yang andal, berdaya saing, dan relevan dengan kebutuhan masa depan. Upaya penguatan portofolio layanan, ekspansi peluang pasar, dan implementasi prinsip keberlanjutan akan menjadi pilar utama dalam strategi pertumbuhan perusahaan di tahun 2025 dan seterusnya.

Meanwhile, a report from *Fitch Ratings Global* at the end of 2024 indicates that the global shipping and maritime industry is projected to remain stable in 2025. This stability reflects market conditions that are beginning to return to normal levels after a period of global pressure due to the pandemic and geopolitical tensions. The issue of decarbonization and energy transition presents both challenges and opportunities, aligning with PTK's commitment to developing sustainable business through the *Green Port* initiative and clean energy-based operational efficiency.

In the logistics sector, higher growth projections compared to the previous year signal positive reinforcement for PTK's performance. With support from the vibrant processing industry, trade, agriculture, forestry, and fisheries sectors, the national transportation and warehousing subsector is expected to grow by 12.53% in 2025, significantly increased from the 2024 growth projection of 9.52%. This increase will also drive demand for efficient, reliable, and adaptive energy logistics services to meet customer needs, both nationally and regionally. Nevertheless, PTK is also monitoring external dynamics such as global geopolitical tensions, the Russia-Ukraine conflict, and uncertainty in the Middle East that could affect the overall energy and logistics supply chain. Therefore, PTK's future business strategy will prioritize innovation, service digitalization, strengthening human resource capabilities, and adaptive risk management to market changes.

With a strong operational foundation, stakeholder support, and improving industry prospects, PTK is optimistic about continuing to grow as a reliable, competitive, and future-relevant maritime energy logistics service provider. Efforts to strengthen the service portfolio, expand market opportunities, and implement sustainability principles will be the main pillars of the Company's growth strategy in 2025 and beyond.



Perubahan Komposisi Direksi

Changes in the Board of Directors Composition

Sepanjang tahun 2024, terjadi perubahan komposisi Direksi sebagai tindak lanjut pembentukan Direktorat Armada, yang bertujuan memperkuat fokus operasional perusahaan dalam pengelolaan armada secara lebih terstruktur dan strategis. Berdasarkan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham (RUPS Sirkuler) yang dituangkan dalam Akta Notaris No. 38 tanggal 23 Oktober 2024 oleh Ivan Lazuardi Suwana, S.H., M.Kn., dilakukan pengalihan tugas Sdr. Slamet Harianto dari jabatan Direktur Operasi menjadi Direktur Operasi Armada. Bersamaan dengan itu, Sdr. Yudi Wibisono diangkat sebagai Direktur Operasi yang baru. Perubahan ini merupakan bagian dari upaya penyegaran kepemimpinan sekaligus penguatan tata kelola perusahaan untuk mendukung pencapaian strategi bisnis jangka panjang yang berkelanjutan. Dengan demikian, susunan Direksi PT Pertamina Trans Kontinental per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Direktur Utama	: I Ketut Laba
Direktur Keuangan dan SDM	: Afan Aftory
Direktur Operasi Armada	: Slamet Harianto
Direktur Operasi	: Yudi Wibisono
Direktur Pemasaran	: Andy Arvianto

Perusahaan menyampaikan apresiasi atas dedikasi seluruh jajaran Direksi, serta mengucapkan selamat bergabung kepada Sdr. Yudi Wibisono. Dengan komposisi yang baru ini, diharapkan Direksi dapat bekerja lebih solid dan sinergis dalam menjalankan visi, memperkuat kinerja, serta memberikan nilai tambah yang berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan. Setelah periode Laporan Tahunan ini berakhir hingga disahkannya laporan ini, tidak terdapat pergantian dan perubahan susunan Direksi Perusahaan.

Throughout 2024, there was a change in the composition of the Board of Directors as a follow-up to the establishment of the Fleet Directorate, aimed at strengthening the Company's operational focus in fleet management in a more structured and strategic manner. Based on the Circular Shareholders' Meeting (RUPS Sirkuler) decision recorded in Notarial Deed No. 38 dated October 23, 2024, by Ivan Lazuardi Suwana, S.H., M.Kn., Mr. Slamet Harianto's position was transferred from Director of Operations to Director of Fleet Operations. Concurrently, Mr. Yudi Wibisono was appointed as the new Director of Operations. This change is part of the efforts to refresh leadership and strengthen corporate governance to support the achievement of sustainable long-term business strategies. Thus, the composition of the Board of Directors of PT Pertamina Trans Kontinental as of December 31, 2024, is as follows:

President Director	: I Ketut Laba
Director of Finance and HR	: Afan Aftory
Director of Fleet Operations	: Slamet Harianto
Director of Operations	: Yudi Wibisono
Director of Marketing	: Andy Arvianto

The Company expresses appreciation for the dedication of the entire Board of Directors and extends a warm welcome to Mr. Yudi Wibisono. With this new composition, it is expected that the Board of Directors can work more solidly and synergistically in executing the vision, strengthening performance, and providing sustainable added value for all stakeholders. After the Annual Report period ends until this report is ratified, there will be no changes or alterations to the composition of the Company's Board of Directors.

Apresiasi

Appreciation

Direksi menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pemegang saham, Dewan Komisaris, mitra kerja, dan pemangku kepentingan atas dukungan, kepercayaan, dan kerja sama yang telah diberikan sepanjang tahun 2024. Kami juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh insan PTK atas dedikasi, profesionalisme, dan semangat pantang menyerah dalam menghadapi berbagai tantangan dan dinamika usaha.

The Board of Directors extends its highest appreciation to all shareholders, the Board of Commissioners, business partners, and stakeholders for the support, trust, and cooperation provided throughout 2024. We also extend our appreciation to all PTK employees for their dedication, professionalism, and unwavering spirit in facing various challenges and business dynamics.

Ke depannya, kami tetap berkomitmen untuk selalu memberikan yang terbaik guna peningkatan pencapaian kinerja secara berkelanjutan. Direksi berharap PTK dapat terus memainkan peran strategis sebagai bagian penting dalam mendukung terwujudnya ketahanan energi nasional, baik untuk masa kini maupun masa mendatang. Dengan semangat transformasi, kolaborasi, dan inovasi yang terus dijaga, PTK akan terus melangkah maju dengan komitmen kuat untuk menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan, memperkuat tata kelola perusahaan, serta memberikan kontribusi nyata dalam ekosistem energi nasional. Kami optimis bahwa PTK akan terus berkembang menjadi perusahaan maritim logistik energi yang andal, kompetitif, dan berdaya saing global.

In the future, we remain committed to always providing the best to enhance performance achievements sustainably. The Board of Directors hopes that PTK can continue to play a strategic role as a crucial part in supporting the realization of national energy resilience, both for the present and the future. With a spirit of transformation, collaboration, and innovation that is continuously upheld, PTK will continue to move forward with a strong commitment to creating sustainable growth, strengthening corporate governance, and making tangible contributions to the national energy ecosystem. We are optimistic that PTK will continue to develop into a reliable, competitive, and globally competitive energy logistics maritime company.

Jakarta, Mei 2025 May, 2025

Atas nama Direksi PT Pertamina Trans Kontinental,

On behalf of the Board of Directors of PT Pertamina Trans Kontinental,



I Ketut Laba

Direktur Utama
President Director



Pernyataan Tanggung Jawab Dewan Komisaris untuk Laporan Tahunan 2024

Statement of Responsibility from Board of Commissioners for 2024 Annual Report

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Pertamina Trans Kontinental tahun 2024 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.

We, the undersigned, declare that all information in the 2024 Annual Report of PT Pertamina Trans Kontinental has been presented in its entirety and we are fully responsible for the accuracy of the contents of the Annual Report and Financial Statements of the Company.

Jakarta, Mei May 2025

Dewan Komisaris PT Pertamina Trans Kontinental
PT Pertamina Trans Kontinental Board of Commissioners

Amir Hamzah
Komisaris Utama

President Commissioner

(Periode 1 Januari 2024 – 28 Mei 2024)
(Period January 1, 2024 – May 28, 2024)

Subagjo Hari Moeljanto
Komisaris Utama

President Commissioner

(Periode 10 Juli 2024 – 31 Desember 2024)
(Period July 10, 2024 – December 31, 2024)

Khalid Zabidi
Komisaris
Commissioner

(Periode 1 Januari 2024 – 9 Juli 2024)
(Period January 1, 2024 – July 9, 2024)

Amir Hamzah
Komisaris
Commissioner

(Periode 10 Juli 2024 – 31 Desember 2024)
(Period July 10, 2024 – December 31, 2024)

Andi Saiful Haq
Komisaris
Commissioner

(Periode 1 Januari 2024 – 31 Desember 2024)
(Period January 1, 2024 – December 31, 2024)

Hartanto
Komisaris
Commissioner

(Periode 12 Januari 2024 – 31 Desember 2024)
(Period January 12, 2024 – December 31, 2024)

A.I.T. Prasetyantoko
Komisaris Independen
Independent Commissioner

(Periode 12 Februari 2024 – 31 Desember 2024)
(Period February 12, 2024 – December 31, 2024)

Pernyataan Tanggung Jawab Direksi untuk Laporan Tahunan 2024

Statement of Responsibility from Board of Directors for 2024 Annual Report

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Pertamina Trans Kontinental tahun 2024 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.

We, the undersigned, declare that all information in the 2024 Annual Report of PT Pertamina Trans Kontinental has been presented in its entirety and we are fully responsible for the accuracy of the contents of the Annual Report and Financial Statements of the Company.

Jakarta, Mei May 2025

Direksi PT Pertamina Trans Kontinental
PT Pertamina Trans Kontinental Board of Directors



I Ketut Laba
Direktur Utama
President Director

(Periode 01 Januari 2024 – 31 Desember 2024)
(Period January 01, 2024 – December 31, 2024)



Andy Arvianto
Direktur Pemasaran
Director of Marketing

(Periode 01 Januari 2024 – 31 Desember 2024)
(Period January 01, 2024 – December 31, 2024)



Afan Aftory
Direktur Keuangan & SDM
Director of Finance & HR

(Periode 01 Januari 2024 – 31 Desember 2024)
(Period January 01, 2024 – December 31, 2024)



Slamet Harianto
Direktur Operasi
Director of Operation

(Periode 1 Januari 2024 – 14 Oktober 2024)
(Period January 1, 2024 – October 14, 2024)



Yudi Wibisono
Direktur Operasi
Director of Operation

(Periode 15 Oktober 2024 – 31 Desember 2024)
(Period October 15, 2024 – December 31, 2024)



Slamet Harianto
Direktur Armada
Director of Fleet

(Periode 15 Oktober 2024 – 31 Desember 2024)
(Period October 15, 2024 – December 31, 2024)



03



PERTAMINA
TRANS KONTINENTAL

NG
ST

Profil Perusahaan Company Profile

Identitas Perusahaan

Company Identity

	Nama Perusahaan Company Name	PT Pertamina Trans Kontinental
	Nama Panggilan Perusahaan Common Name	PTK atau Perusahaan PTK or the Company
	Bidang Usaha Line of Business	- Jasa Pelayaran, Jasa Maritim dan Jasa Logistik - Shipping, Maritime, and Logistics Services
	Tanggal Pendirian Date of Establishment	9 September 1969 September 9, 1969
	Dasar Hukum Pendirian Legal Basis of Establishment	- Akta No 3 Tanggal 9 September 1969 dibuat di hadapan Tan Thong Kie, Notaris di Jakarta. - Akta No. 012 tanggal 26 Oktober 2011 dibuat di hadapan Dewantari Handayani, MPA., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No. AHU-58581.AH.01.02 Tahun 2011 tanggal 29 November 2011, nama PT Pertamina Tongkang berubah menjadi PT Pertamina Trans Kontinental. - Deed No. 3 dated September 9, 1969, was made before Notary Tan Thong Kie in Jakarta. - Deed No. 012 dated October 26, 2011, was made before Notary Dewantari Handayani, MPA., approved under the Minister of Law and Human Rights Republic of Indonesia Decree No: AHU58581.AH.01.01 Year 2011 dated November 29, 2011, the name PT Pertamina Tongkang was changed to PT Pertamina Trans Kontinental.
	Status Badan Hukum Legal Entity Status	Perseroan Terbatas ("PT"); Penanaman Modal Dalam Negeri ("PMDN") Limited Liability Company ("PT"), Domestic Investment ("PMDN")
	Kepemilikan Saham Share Ownership	PT Pertamina International Shipping: 99,999% PT Pertamina Pedeve Indonesia: 0,001%
	Modal Dasar Authorized Capital	Rp4.424.580.819.000,-; terbagi atas 4.424.580 lembar saham seri A dengan masing-masing bernilai Rp1.000.000,- dan 819 lembar saham seri B dengan nominal masing-masing Rp1.000,- Rp4,424,580,819,000 divided into 4,424,580 series A shares with a nominal value of Rp1,000,000 each and 819 series B shares with a nominal value of Rp1,000 each.
	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Subscribed and Fully Paid-in Capital	Rp1.234.747.819.000,-; terbagi atas 1.234.747 lembar saham seri A dengan nominal masing-masing Rp1.000.000,- dan 819 lembar saham seri B dengan nominal masing-masing Rp1.000,- Rp1,234,747,819,000 divided into 1,234,747 series A shares with a nominal value of Rp1,000,000 each and 819 series B shares with a nominal value of Rp1,000 each.
	Jumlah Pegawai Number of Employees	2971
	Alamat Kantor Pusat Head Office Address	Jl. Yos Sudarso No. 32 - 34 Jakarta Utara 14320, Indonesia North Jakarta 14320, Indonesia
	Website	https://pertamina-ptk.com/
	Email	pusat.ptk@pertamina-ptk.com
	Telepon Telephone	+6221 3192 3005
	Media Sosial Social Media	- Instagram : pertaminatranskontinental - Linkedin : PT Pertamina Trans Kontinental
	Serikat Pekerja Trade Union	Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT Pertamina Trans Kontinental ("SPSI PTK") All Indonesian Trade Union of PT Pertamina Trans Kontinental ("SPSI PTK")

Sekilas Perusahaan Company At A Glance

PT Pertamina Trans Kontinental disebut juga sebagai “Perusahaan” atau “PTK”, pertama kali didirikan pada 9 September 1969 di Jakarta dan menjalankan usaha di bidang industri jasa marine. PT Pertamina Trans Kontinental semula bernama PT Pertamina Tongkang berfungsi memberikan dukungan bagi aktivitas PT Pertamina (Persero) dan *subholding* lainnya dengan 3 (tiga) kegiatan strategis yaitu:

- Pengadaan distribusi bahan bakar ke semua pelabuhan di seluruh wilayah Indonesia;
- Pengadaan transportasi maritim bagi Pertamina Logistik untuk pengembangan proyek yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia;
- Bertindak sebagai *General Agent* dan *Handling Agent* bagi kapal-kapal tanker milik PT Pertamina (Persero) yang disewakan.

Pada awalnya peranan Perusahaan masih sebagai sebatas unit bisnis yang diperbantukan pada aktivitas pengembangan PT Pertamina (Persero). Dalam Perkembangannya, pada tahun 1974 Perusahaan menerima tambahan armada kapal jenis *supply vessel*. Hal ini untuk melayani dan mendukung pelaksanaan eksplorasi pengeboran minyak dan gas bumi (migas) lepas pantai dan juga keperluan produksi. Setelah 4 (empat) tahun berselang, Perusahaan memperluas layanan jasa, menyusul selesainya program konstruksi depot bahan bakar baru di belahan timur dan tengah Indonesia. Selanjutnya, Perusahaan mengubah model bisnisnya untuk tujuan mencari keuntungan dan fokus kepada aktivitas lepas pantai dengan menyediakan layanan:

- Membantu eksplorasi minyak dan gas bumi di lepas pantai;
- Menjadi *Handling Agent* dari penyewa kapal milik PT Pertamina (Persero) dan kapal pihak ketiga.

Pada tahun 1988 Perusahaan melakukan penyesuaian izin dari semula izin bisnis sebagai Perusahaan pelayaran yang spesifik di bidang lepas pantai sesuai Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1988 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut, menjadi perusahaan bidang pelayaran dengan izin SIUPAL No. BXXV-1203/AL 58 pada tanggal 26 Maret 2002 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Kian luasnya pelayanan dan jasa yang diberikan, menjadikan Perusahaan melakukan beberapa perubahan. Salah satunya perubahan nama dari PT Pertamina Tongkang menjadi PT Pertamina Trans Kontinental. Perubahan nama berlaku efektif 29 November 2011 sesuai dengan Akta No. 012 tanggal 26 Oktober 2011 Notaris Dewantari Handayani, MPA, yang telah disetujui dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No: AHU- 58581. AH.01.02 Tahun 2011 tanggal 29 November 2011.

PT Pertamina Trans Kontinental, also known as the “Company” or “PTK” was first established on September 9, 1969, in Jakarta and operates a business in the marine services industry. PT Pertamina Trans Kontinental was originally named PT Pertamina Tongkang. PT Pertamina Tongkang functions to provide support for the activities of PT Pertamina (Persero) and other sub-holdings with 3 (three) strategic activities, namely:

- Procurement of fuel distribution to all ports throughout Indonesia;
- Procurement of maritime transportation for Pertamina Logistics for project development spread throughout Indonesia;
- Acting as General Agent and Handling Agent for tanker ships owned by PT Pertamina (Persero) leased by PT Pertamina Trans Kontinental.

Initially, the role of the Company was still limited to a business unit seconded in the development activities of PT Pertamina (Persero). In its development, the Company received an additional fleet of supply vessel-type ships in 1974 to serve and support the implementation of offshore oil and gas drilling exploration and also production requirements. 4 (four) years later, the Company expanded its services following the completion of the new fuel depot construction program in the eastern and central regions of Indonesia. Subsequently, the Company altered its business model to gain profit and focus on offshore activities by providing the following services:

- Assisting offshore oil and gas exploration;
- Becoming a Handling Agent for charterers of vessels owned by PT Pertamina (Persero) and third parties.

In 1988, the Company adjusted its license from a business license as a shipping company specifically in the offshore sector, in accordance with Government Regulation No. 17 of 1988 concerning the Implementation and Business of Sea Transportation, to a shipping company with SIUPAL license No. BXXV-1203/AL 58 on March 26, 2002, issued by the Directorate General of Sea Transportation.

The expanding services provided urged the Company to make several changes, including the name change from PT Pertamina Tongkang to PT Pertamina Trans Kontinental. The name change was effective on November 29, 2011, in accordance with Deed No. 012 dated October 26, 2011, by Notary Dewantari Handayani, MPA, which was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Decree No: AHU-58581.AH.01.02 of 2011 of November 29, 2011.



Kerja sama usaha dan sinergi dengan berbagai pihak ditempuh oleh PTK dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan dan mendorong pertumbuhan kinerja Perusahaan. PTK juga memiliki komitmen untuk menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik sebagai upaya yang ditempuh untuk mendukung keberlanjutan bisnis jangka panjang.

Business cooperation and synergy with various parties are pursued by PTK to improve the quality of service to customers and encourage the growth of the Company's performance. PTK is also committed to implementing good corporate governance principles as an effort to support long-term business sustainability.

Logo Perusahaan Company Logo

Logo Perusahaan telah disahkan berdasarkan Pedoman Standarisasi Identitas Perusahaan No. Revisi: PDM-001/G0000/2011-S0 dan berlaku sejak 22 Desember 2011.

The Company logo has been ratified based on the Company Identity Standardization Guidelines Revision No: PDM-001/G0000/2011-S0 valid since December 22, 2011.



Simbol Anak Panah "Arrow" Symbol

Melambangkan aspirasi organisasi Perusahaan untuk senantiasa bergerak ke depan, maju dan progresif. Ketiga elemen melambangkan pulau-pulau dengan berbagai skala yang merupakan bentuk Negara Indonesia. Simbol tersebut terlihat seperti monogram huruf "P" yang merupakan huruf pertama "PERTAMINA".

Symbolizes the Company's organizational aspirations to continuously move forward, advance, and be progressive. The three elements symbolize the islands of various scales that represent the country of Indonesia. The symbol appears as a monogram of the letter "P", which is the first letter of "PERTAMINA".

PERTAMINA

Kata "PERTAMINA" "PERTAMINA" Terms

Mencerminkan insan Pertamina Trans Kontinental yang pekerja keras, berani, dan rajin serta mampu melawan tantangan.

Reflects Pertamina Trans Kontinental employees who are hardworking, brave, diligent, and able to face challenges.

TRANS KONTINENTAL

Kata "TRANS" dan "KONTINENTAL" "TRANS" and "KONTINENTAL" Terms

TRANS berdasarkan kamus berarti melalui, melewati. KONTINENTAL berdasarkan kamus berarti benua. Jadi Pertamina Trans Kontinental adalah bagian dari PT Pertamina (Persero) yang core businessnya menunjang kegiatan usaha induknya di bidang oil & gas dimana siap untuk menjadi Perusahaan Bisnis Pelayaran dan Jasa Marine Kelas Dunia.

According to the dictionary, TRANS means through, passing through. Meanwhile CONTINENTAL means continent. Therefore, Pertamina Trans Kontinental is a part of PT Pertamina (Persero) carrying out the core business that supports the activities of its parent business in the oil & gas sector which is ready to become a World Class Shipping and Marine Services Business Company.

Visi, Misi, Nilai dan Budaya Perusahaan

Vision, Mission, Corporate Value and Culture

Menjadi Perusahaan Jasa Maritim yang Terintegrasi dengan Skala Global pada Tahun 2026

To be an Integrated Maritime Service Company on Global Scale in 2026

VISI
VISION



Melaksanakan kegiatan bisnis yang berorientasi pada aspek HSE, kehandalan operasional dan mengutamakan kepuasan pelanggan dalam bidang:

- Penyediaan jasa perkapalan sektor energi;
- Penyediaan layanan marine;
- Penyediaan jasa logistik.

Carrying out business activities oriented to HSE aspects, operational reliability and prioritizing customer satisfaction in the fields of:

- Providing shipping services in the energy sector;
- Providing marine services;
- Providing logistics services.

MISI
MISSION



Visi dan Misi PTK ditetapkan berdasarkan hasil *review* dari Direksi. Pada tahun 2024 tidak terdapat perubahan visi dan misi karena masih relevan dengan tujuan dan bidang usaha Perusahaan.

PTK's vision and mission are determined based on the results of a review by the Board of Directors. In 2024, there were no changes in the vision and mission because it is still relevant to the Company's goals and line of business.

NILAI DAN BUDAYA PERUSAHAAN

CORPORATE VALUE AND CULTURE



PTK melakukan penyesuaian nilai dan budaya Perusahaan "AKHLAK" yang diterapkan di lingkungan Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) No. Kpts-1344/PTK0000/2021-S0 tanggal 07 Desember 2021 tentang Penerapan Nilai-Nilai Utama (Core Values) AKHLAK di Lingkungan PT Pertamina Trans Kontinental Group.

PTK aligns the values and culture of the Company, namely "AKHLAK" which is implemented within the Company following the Decree by the President Director of PT Pertamina Trans Kontinental No. Kpts-1344/PTK0000/2021-S0 dated December 7, 2021, concerning the Implementation of AKHLAK Core Values within PT Pertamina Trans Kontinental Group.

AKHLAK

Nilai dan Pedoman perilaku AKHLAK sebagai *Core Value* BUMN yang harus diterapkan Insan Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Amanah (Integritas, Tulus, Konsisten, Dapat Dipercaya), yaitu memegang teguh kepercayaan yang diberikan, dengan pedoman perilaku sebagai berikut:
 - a. Memenuhi janji dan komitmen;
 - b. Bertanggung jawab atas tugas, keputusan, dan tindakan yang dilakukan;
 - c. Berpegang teguh kepada nilai moral dan etika.
2. Kompeten (Kinerja Terbaik, Sukses, Keberhasilan, *Learning Agility*, Ahli di Bidangnya), yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, dengan pedoman perilaku sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
 - b. Membantu orang lain belajar;
 - c. Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik.
3. Harmonis (Peduli, Perbedaan), yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan, dengan pedoman perilaku sebagai berikut:
 - a. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya;
 - b. Suka menolong orang lain;
 - c. Membangun lingkungan kerja yang kondusif.
4. Loyal (Komitmen, Dedikasi, Kontribusi), yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara, dengan pedoman perilaku sebagai berikut:
 - a. Menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan, BUMN, dan Negara;
 - b. Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar;
 - c. Patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika.
5. Adaptif (Inovasi, Antusias Terhadap Perubahan, Proaktif), yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan, dengan pedoman perilaku sebagai berikut:
 - a. Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik;
 - b. Terus-menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi;
 - c. Bertindak proaktif.
6. Kolaboratif (Kesediaan Bekerjasama, Sinergi Untuk Hasil yang Lebih Baik), yaitu membangun kerjasama yang sinergis, dengan pedoman perilaku sebagai berikut:
 - a. Memberi kesempatan kepada pihak untuk berkontribusi;
 - b. Terbuka dalam bekerjasama untuk menghasilkan nilai tambah;
 - c. Menggerakkan pemanfaatan berbagi sumber daya untuk tujuan bersama.

Core Values AKHLAK selanjutnya disosialisasikan oleh PTK kepada seluruh pemangku kepentingan terutama karyawan sebagai upaya internalisasi agar senantiasa mendukung pencapaian visi misi PTK.

The values and Code of Conduct of AKHLAK as the *Core Value* of SOEs that must be applied by the Company's employees are as follows:

1. Trustworthy (Integrity, Sincere, Consistent, Reliable), namely upholding the trust given, with the following code of conduct:
 - a. Fulfilling promises and commitments;
 - b. Responsible for the tasks, decisions, and actions taken;
 - c. Adhering to moral and ethical values.
2. Competent (Best Performance, Success, Accomplishment, Learning Agility, Expert in the Field), namely continuously learning and developing capabilities, with the following code of conduct:
 - a. Increasing self-competence to respond to ever-changing challenges;
 - b. Helping others learn;
 - c. Completing tasks with the best quality.
3. Harmonious (Caring, Differences), namely caring for each other and respecting differences, with the following code of conduct:
 - a. Respecting everyone regardless of background;
 - b. Likes to help others;
 - c. Building a conducive work environment.
4. Loyal (Commitment, Dedication, Contribution), namely dedicated and prioritizing the interests of the Nation and State, with the following code of conduct:
 - a. Maintaining the good name of fellow employees, leaders, SOEs, and the State;
 - b. Willing to make sacrifices to achieve a greater goal;
 - c. Obeying the leaders as long as it does not conflict with law and ethics.
5. Adaptive (Innovation, Enthusiasm for Change, Proactivity), namely continue to innovate and be enthusiastic in driving or facing change, with the following code of conduct:
 - a. Quickly adjust to become better;
 - b. Continuously make improvements following technological developments;
 - c. Acting proactively.
6. Collaborative (Willingness to Work Together, Synergy for Better Results), namely building synergistic cooperation, with the following code of conduct:
 - a. Providing opportunities for various parties to contribute;
 - b. Open in working together to produce added value;
 - c. Mobilizing the use of various resources for common goals.

The AKHLAK Core Values are then socialized by PTK to all stakeholders, particularly employees, as an internalization effort so that they always support the achievement of PTK's vision and mission.

Kegiatan Usaha dan Bisnis Utama Perusahaan

Company Business Activities and Core Business

Kegiatan Usaha

Business Activities

Sesuai pasal 3 Anggaran Dasar yang tercantum pada Akta No. 07 tanggal 3 Juli 2013, yang terakhir diubah melalui Akta No. 30 tanggal 29 November 2022 yang dibuat dihadapan Lenny Janis Ishak, SH., Notaris di Jakarta, maksud didirikannya Perusahaan adalah untuk menyelenggarakan usaha di bidang jasa perkapalan, *marine* dan logistik baik di dalam negeri maupun di luar negeri serta kegiatan usaha lain yang terkait atau menunjang kegiatan usaha di bidang jasa perkapalan, *marine* dan logistik tersebut. Kegiatan Usaha Perusahaan yaitu:

In accordance with article 3 of the Articles of Association stated in Deed No. 07 dated July 3, 2013, which was last amended by Deed No. 30 dated November 29, 2022, made before Lenny Janis Ishak, S.H., Notary in Jakarta, the purpose of establishing the Company is to carry out business in the field of shipping, marine and logistics services both domestically and abroad as well as other related business activities or support business activities in the shipping, marine and logistics services sector. The Company's Business Activities, namely:



Jasa Perkapalan

Shipping Services

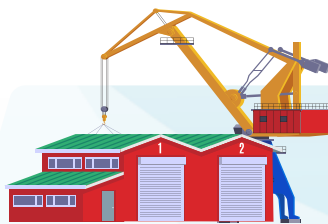
- Usaha-usaha dalam bidang pengangkutan hasil industri pertambangan dan umum;
- Usaha dalam bidang pengangkutan laut antar pelabuhan serta jasa penunjangnya, baik dalam maupun luar negeri yang dilakukan secara tetap dan teratur dan/atau perkapalan yang tidak tetap dan tidak teratur dengan menggunakan semua jenis kapal serta jasa penunjangnya;
- Usaha di bidang perkapalan/pengangkutan khusus peralatan dan kebutuhan pengeboran migas, muatan batu bara, muatan cair dan gas serta kargo umum lainnya;
- Menjalankan usaha penunjang bidang perkapalan;
- Usaha di bidang jasa manajemen kapal/*ship management services* (*ship crewing, ship operator, dan ship maintenance*);
- Menjalankan usaha penyewaan kapal (*ship chartering dan brokerage*);
- Menjalankan usaha keagenan kapal (*ship agencies*);
- STS Provider;
- Dockyard;
- Ship Vetting;
- Usaha *salvage* dan penundaan kapal;
- Jasa pemeliharaan peralatan perkapalan (navigasi).
- Business in the transport of mining and general industry products sector;
- Business in the inter-port sea transport as well as supporting services, whether domestic or overseas, performed permanently and regularly and/or impermanent and irregular shipping using all types of vessels and supporting services sector;
- Business in the specific shipping/freight of oil and gas drilling equipment and needs, coal cargo, liquid and gas cargo, as well as other general cargo;
- Conducting the shipping sector supporting business;
- Business in the ship management services sector (*ship crewing, ship operator, ship maintenance*);
- Conducting the ship charter business (*ship chartering & brokerage*);
- Conducting the ship agency business (*ship agencies*);
- STS Provider;
- Dockyard;
- Ship Vetting;
- Ship salvaging and Tug business;
- Navigation equipment maintenance services (navigation).



Jasa Marine Marine Services



- Manajemen dan operasional pelabuhan;
- Izin dan lisensi kepelabuhanan;
- Melakukan pembelian dan penjualan alat-alat transportasi dan/atau logistik termasuk suku cadangnya, tapi tidak terbatas pada kapal tanker, *supply vessel*, tongkang, kapal tunda dan RIB;
- Melakukan usaha pengangkutan dan penimbunan muatan cair, gas, dan general cargo;
- Penanganan tumpahan minyak di perairan;
- Melaksanakan *bunker service* berupa pengisian dan/atau pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk kapal baik di laut maupun di darat;
- Melakukan jasa pengolahan dan penyediaan air untuk keperluan kapal dan industri;
- Melaksanakan kegiatan distribusi dan *supply* bahan bakar dan air untuk kebutuhan kapal-kapal, depot-depot dan industri;
- Melakukan usaha pembuatan dan perbaikan kapal serta penyediaan suku cadang kapal dan alat transportasi lainnya;
- Melakukan jasa perencanaan, pembangunan, perbaikan dan pemeliharaan kapal-kapal, alat-alat apung dan konstruksi-konstruksi bangunan di lepas pantai dan di bawah air beserta peralatannya;
- Jasa *tank cleaning* dan pengelolaan limbah (*sludge*);
- Melakukan usaha jasa bongkar muat barang di kapal;
- Melakukan usaha bidang kepelabuhanan dan administrasi pelabuhan khusus;
- Jasa pemeliharaan fasilitas pelabuhan;
- *Mooring Master* dan POAC
- Jasa *Recognize Security Organization* ("RSO");
- Survei kelautan mengenai arus dan kedalaman laut (Hydrography, *Oceanography* dan Pemetaan/HOP);
- Konstruksi bawah air berupa pemasangan dan pemeliharaan pipa dan kabel bawah laut dan lain-lain;
- Jasa pengerukan dan reklamasi pantai;
- Jasa perawatan pekerjaan minyak dan gas bawah air;
- Jasa penyelaman dan pekerjaan bawah air.
- Port Management & Operations;
- Port Permits and Licenses;
- Purchasing and selling of transportation and/or logistic equipment, including spare parts but are not limited to tankers, supply vessels, barges, tug boats, and RIB;
- Liquid, gas, and general cargo transport and storing business;
- Handling of Oil Spills in Waters;
- Providing bunker services, including fuel oil refilling and/or distribution for vessels, whether on or offshore;
- Conducting water processing and supply services for vessels and industry needs;
- Conducting fuel and water distribution and supply activities for vessels, depots, and industry needs;
- Conducting the ship manufacturing and repair business as well as provision of spare parts for ships and other means of transportation;
- Conducting the business of planning, construction, repair, and maintenance services for vessels, flotation devices, and construction of offshore and underwater constructs and their equipment;
- Tank cleaning and waste management (*sludge*) services;
- Ship loading and unloading services;
- Port Activities and Special Port Administration;
- Port facility maintenance services;
- Mooring Master and POAC;
- Recognized Security Organization ("RSO") services;
- Maritime Survey on Ocean Stream and Depth (Hydrographic and Oceanographic Prediction/HOP);
- Underwater construction service as submarine pipe and cable installation and maintenance and other services;
- Seabed dredging and beach reclamation service;
- Subsea oil and gas project maintenance service;
- Commercial diving and underwater work services.



Jasa Logistik Logistic Services



- Melakukan usaha pengangkutan dan penimbunan muatan cair, gas, dan *general cargo*;
- Jasa ekspor impor barang dan jasa pengurusan dokumen ekspor impor (*customs clearance*);
- Mengadakan usaha di bidang Freight Forwarding, tidak terbatas pada jasa pengangkutan, pengiriman, dan pendistribusian barang;
- *Ship Chandler*;
- Penyewaan alat-alat berat dan atau peralatan kerja serta produksi;
- Melakukan kegiatan usaha penyimpanan, pergudangan, pengangkutan dan penyaluran berbagai jenis barang serta usaha lainnya (*logistic base*);
- Jasa penyewaan dan pengelolaan gedung dan perkantoran;
- Conducting the liquid, gas, and general cargo transportation and storing business;
- Export, import, and customs clearance services;
- Freight Forwarding business, not limited to logistics, delivery, and distribution services;
- *Ship Chandler*;
- Heavy equipment and/or production equipment rental;
- Storage, warehouse, logistics, and distribution services of various commodities and other services (*logistics base*);
- Building and office rental and management services.

Seluruh kegiatan di atas telah dilaksanakan oleh Perusahaan.

All of the above activities have been implemented by the Company.

Bisnis Utama Perusahaan Company Core Business

Penyediaan Kapal Vessel Provider

PTK memiliki bisnis inti penyedia kapal sebagai armada operasional, yang digunakan dalam memenuhi kebutuhan penyewa guna mendukung kegiatan eksplorasi minyak di lepas pantai dan darat seperti PT Pertamina (Persero), perusahaan migas kontraktor kontrak kerja sama ("KKKS"), dan lainnya.

PTK has the core business as a provider of vessels as an operational fleet, used in fulfilling the needs of charterers to support the offshore and onshore oil exploration activities, such as PT Pertamina (Persero), Contractors of Cooperation Contract ("KKKS") oil and gas companies, and others.

Charter & Brokerage

Aktivitas bisnis melalui *Charter and Brokerage* dilakukan atas permintaan pelanggan, untuk memenuhi kebutuhan jenis kapal yang tidak dimiliki oleh PTK. *Charter and Brokerage* dilakukan dengan cara menyewa kapal sesuai dengan permintaan.

Business activities through *Charter and Brokerage* are conducted based on customer demand to meet the needs of types of vessels not owned by PTK. *Charter and Brokerage* are performed by chartering vessels according to demand.

Keagenan Kapal Ship Agency

PTK menyediakan layanan keagenan kapal sebagai Agen Umum (*General Agent*) atau Agen Penanganan (*Handling Agent*) untuk kapal yang berlabuh di semua pelabuhan di Indonesia. Sebagai keagenan kapal, maka tugas utama Perusahaan adalah mewakili pemilik/ *principal* dalam

PTK provides shipping agent services as a General Agent or Handling Agent for vessels docking at all ports in Indonesia. As a shipping agent, the Company's main task is to represent the owner/principal in fulfilling the requirements or obligations for ships arriving in Indonesia. During the reporting period, PTK



memenuhi persyaratan atau kewajiban bagi kapal yang tiba di Indonesia. Selama periode pelaporan PTK telah melaksanakan keagenan kapal yang meliputi Agen Umum atau Agen Penanganan. Perusahaan menjadi Agen Penanganan di semua pelabuhan di Indonesia serta pelabuhan umum atau *port* tertentu. Jasa yang diberikan mencakup penyediaan crew, penanganan *bunker*, penyediaan air dan kegiatan lain yang berhubungan dengan agen.

Jasa *shipping agent* yang diberikan PTK melayani:

- *In/out clearance* kapal di pelabuhan;
- Mengurus perizinan yang berkaitan dengan keimigrasian atau perhubungan laut;
- Menyiapkan fasilitas darat maupun laut;
- Layanan untuk awak dan kapal;
- Penyelesaian kewajiban keuangan (pencairan).

Tanggung jawab PTK sebagai *shipping agent*:

- Memastikan kelancaran kapal operasional di pelabuhan;
- Menyelesaikan kewajiban finansial;
- Menyampaikan laporan realisasi kunjungan kapal-kapal di pelabuhan Indonesia.

Pemanduan Kapal Pilotage Services

Dalam bidang usaha ini telah melaksanakan Jasa Pelayanan Pemanduan Kapal di Terminal Khusus (Tersus) dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri ("TUKS") Pertamina.

Pengelolaan Pelabuhan Port Management

PTK melalui entitas anak, PT Pertamina Port and Logistics ("PPL", dahulu bernama PT Peteka Karya Samudera), melaksanakan jasa Administrasi Pelabuhan Khusus (Pelsus) di 16 lokasi Terminal Khusus (Tersus) Kontraktor Kontrak Kerja Sama ("KKKS") – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi ("SKK") Migas. Ruang lingkup tugas dan tanggung jawab Perusahaan di bidang ini meliputi:

- Pelaksanaan administrasi pada layanan pelabuhan yang meliputi labuh, tambat, pandu, tunda (di luar wilayah kerja PT Pelindo) sebagai delegasi PT Pertamina (Persero), di mana pekerjaan Perusahaan atas nama PT Pertamina (Persero);
- Membuat laporan secara periodik terkait penyelesaian pekerjaannya, Perusahaan bertanggung jawab kepada PT Pertamina (Persero);
- Mengurus perizinan;
- Mengelola administrasi pelabuhan khusus. Dalam hal ini Perusahaan hanya mengelola pelabuhan khusus KKKS dan JOB;
- Melakukan penagihan jasa pelabuhan kepada Agen;

has carried out a shipping agent, which includes a General Agent or Handling Agent. The Company became a Handling Agent in all ports in Indonesia as well as general or specific ports. The services provided include crew provision, bunker handling, water supply, and other agent-related activities.

PTK provides shipping agent services:

- *In/out clearance* of ships at the Port;
- Processing licenses related to immigration or sea transportation;
- Setting up land and sea facilities;
- Services for crew and vessels;
- Settlement of financial obligations (disbursements).

PTK responsibilities as a shipping agent:

- Ensuring the ease of operational ships at the port;
- Settling financial liability;
- Submitting the report for the visits of ships at Indonesian ports.

In this line of business, PTK has carried out Ship Pilotage Services at Pertamina's Special Purpose Terminals (Tersus) and Terminals for Own-Interest ("TUKS").

PTK, through its subsidiary PT Pertamina Port and Logistics ("PPL", formerly named PT Peteka Karya Samudera), implements Special Port (Pelsus) Administration services in 16 locations of Special Purposes Terminal (Tersus) Special Task Force for Upstream Oil and Gas Business Activities ("SKK") Migas – Contractors of Cooperation Contract ("KKKS"). The scope of the Company's duties and responsibilities in this sector includes:

- Conducting the administration of port services, which include anchoring, mooring, guidance, and tug (outside the PT Pelindo operational areas) as a delegate of PT Pertamina (Persero), where the Company acts on behalf of PT Pertamina (Persero);
- Preparing periodic reports relevant to job completion, the Company is responsible to PT Pertamina (Persero);
- Permits handling;
- Managing special port administration. In this case, the Company only manages KKKS and JOB special ports;
- Conducting the collection for port services to the Agent;

- Melakukan penyeteroran jasa pelabuhan kepada PT Pertamina (Persero) dan Pemerintah;
- Membuat laporan kegiatan kepelabuhanan kepada PT Pertamina (Persero), BP Migas, Kantor Pelabuhan/ Administrasi Pelabuhan;
- Membantu pengurusan yang berkaitan dengan administrasi kepelabuhanan di Pelabuhan Khusus KKKS dan JOB.
- Conducting the Port Services deposit to PT Pertamina (Persero) and the Government;
- Preparing reports of port activities to PT Pertamina (Persero), BP Migas, Port/Port Administration Office;
- Assisting management relevant to port administration at KKKS and JOB Special Ports.

Bunker Agent

Bunker agent merupakan fasilitas yang disediakan PTK untuk jasa pengiriman bahan bakar minyak untuk kapal atau tanker.

Bunker agent is a service provided by PTK for the delivery of fuel oil for ships or tankers.

Offshore & Onshore Logistic Base

PTK menawarkan jasa pelayanan yang terintegrasi dalam *offshore & onshore logistic base* yang terdapat di Batam dan Tanjung Batu, Balikpapan, yang meliputi:

PTK offers integrated services in the offshore & onshore logistics base, which are located in Batam and Tanjung Batu, Balikpapan, which include:

Batam

- Luas Area Logistics shore base 45,28 hektar.
- Pengiriman kargo dan jasa kargo administrasi.
- Perbaikan dan pembersihan kargo dengan fasilitas lengkap.
- Menyediakan layanan pasokan air bersih, pasokan bahan bakar gas dan jasa lainnya.
- Persewaan gedung kantor di Batam di Jalan Yos Sudarso Batu Ampar, Pulau Batam, terdiri dari tiga lantai untuk kebutuhan kantor, dengan fasilitas pendingin ruangan/ AC, area parkir, keamanan 24 jam, 50 saluran telepon dan dilengkapi dengan sistem PABX. Selain itu, memiliki 350 KVA generator listrik dengan lokasi strategis di kargo jalur utama dan Pelabuhan Batu Ambar.
- Dukungan peralatan dan infrastruktur meliputi:
 - a. Lalu lintas dermaga.
 - b. Peralatan derek (*crane*) dengan kapasitas 50 tons ph, *American Crane* kapasitas 75 ton, *crane Todano* kapasitas 20 ton, *derek pettibone*, *carry lift* kapasitas 20 ton, *forklift* kapasitas 3 dan 5 ton, *prime over* setinggi 40 feet, dan *trailer caps* setinggi 40 kaki.
- 45.28 ha of Logistics shore base.
- Cargo shipping and cargo administration services.
- Cargo repair and cleaning with full facilities.
- Providing clean water supply, gas fuel supply, and other services.
- Office building rental located at Yos Sudarso Street, Batu Ampar–Batam Island comprising 3 floors for office needs, equipped with facilities of Air Conditioner (AC), parking lot, 24-hour security, 50 phone lines, and PABX system facilities. Additionally, the building also has a 350 KVA electricity generator with a strategic location at the primary cargo route and Batu Ambar port.
- Equipment and infrastructure support includes:
 - a. Harbor traffic.
 - b. Crane with 50 tons pH capacity, American Crane with 75 tons capacity, Tadano Crane with 20 tons capacity, petty bone crane, carry lift with 20 tons capacity, forklift with three and five-tons capacity, 40 feet prime over, and 40-feet trailer caps.

Tanjung Batu, Balikpapan

Peteka Shorebase Tanjung Batu ("PSTB") berlokasi di lahan milik Pertamina seluas 49 Ha di Tanjung Batu, Balikpapan. PTSB menyediakan fasilitas logistik untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan migas yang beroperasi di Kalimantan dan Sulawesi melalui penyediaan *one stop logistic services* berupa:

- Penyediaan fasilitas tempat penyimpanan (*open yard*, *warehouse*, dan *tanki*).
- Provision of storage facilities (open yard, warehouse, and tank).



- Fasilitas sandar kapal dengan panjang 200 meter.
- Kegiatan *cargo handling* dan transportasi, penyediaan kantor dan akomodasi.
- Penyediaan fasilitas Pusat Logistik Berikat ("PLB").
- Penyediaan jasa *waste management*, dan jasa-jasa pendukung lainnya.
- Dukungan peralatan dan infrastruktur meliputi:
 - a. Fasilitas Jetty 200 m, 88 m, 65 m, 107 m dan 2-3 m.
 - b. Fasilitas RORO 2x250 ton LCTs.
 - c. Fasilitas Speed Boat Jetty.
- Ship docking facilities (the largest jetty with a length of 200 meters).
- Cargo handling and transportation activities, office provision, and accommodation.
- Provision of Bonded Logistics Center ("PLB") facilities.
- Provision of waste management services and other supporting services.
- Equipment and infrastructure support, including:
 - a. Jetty facilities 200 m, 88 m, 65 m, 107 m and 2-3 m.
 - b. RORO facility 2x250 ton LCTs.
 - c. Speed Boat Jetty facilities.

Recognized Security Organization ("RSO")

PTK ditunjuk sebagai RSO sejak tahun 2004 berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut No. KI.93/1/15-04 yang telah diperbaharui sampai dengan saat ini. Hal ini merupakan wujud komitmen dari Direksi RSO untuk ikut berpartisipasi dalam implementasi ISPS Code di Indonesia.

RSO merupakan konsultan dalam bidang keamanan yang memberikan saran atau menyediakan bantuan dalam bidang operasional kapal dan fasilitas pelabuhan, meliputi:

- Melaksanakan Kegiatan Sertifikasi ISPS Code untuk kapal ("ISSC") dan Fasilitas Pelabuhan ("SoCPF").
- Melaksanakan atau menyelesaikan Penilaian Keamanan Fasilitas Pelabuhan ("PFSA").
- Membantu dalam menyiapkan rencana keamanan fasilitas pelabuhan ("PFSP").

PTK has been appointed as RSO since 2004 based on the Director General of Sea Transportation Decree No. KI.93/1/15-04 which has been updated until now. This is the realization of the commitment of the RSO Board of Directors to participate in ISPS Code implementation in Indonesia.

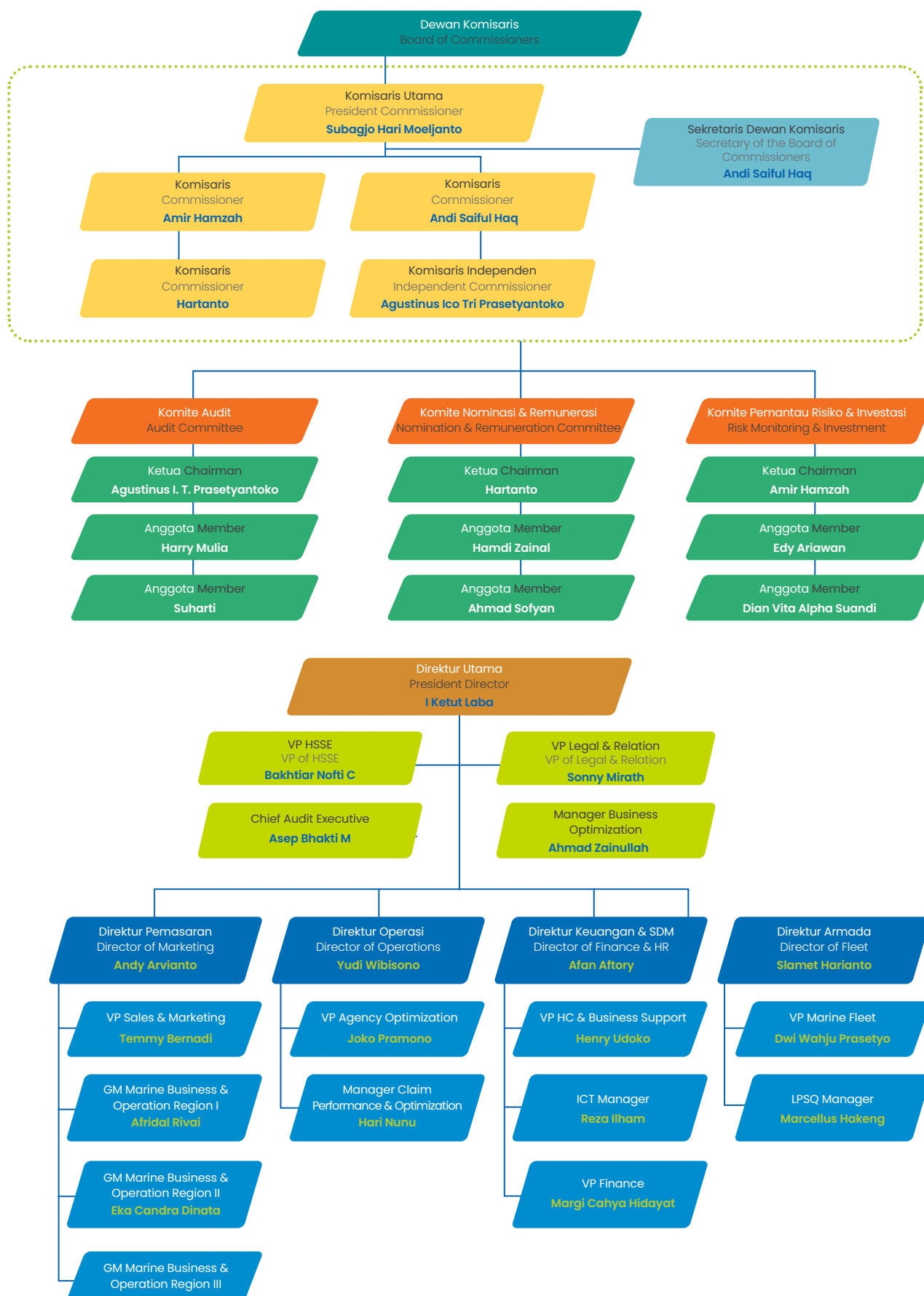
RSO is a security sector consultant that provides suggestions or assistance in vessel operations and port facilities, including:

- Organizing activities of ISPS Code Certification for vessels ("ISSC") and Ports Facilities ("SoCPF").
- Conducting and completing the Ports Facilities Security Assessment ("PFSA").
- Assisting in the preparation of the Ports Facilities Security Plan ("PFSP").

Struktur Organisasi Organizational Structure

Struktur organisasi PTK ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur Utama No. Kpts-107/PTK0000/2023-S8 tanggal 21 Desember 2023 tentang Struktur Organisasi BOD-1 Kebawah PT Pertamina Trans Kontinental dan disesuaikan dalam Surat Keputusan No. Kpts-274/PTK0000/2024-S8 tanggal 27 Agustus 2024 tentang Penyesuaian Struktur Organisasi BOD-1 Ke Bawah Pasca Pembentukan Direktorat Armada PT Pertamina Trans Kontinental dan KPSSS tanggal 15 Oktober 2024 yang disahkan melalui Akta No. 38 tanggal 23 Oktober 2024 berdasarkan rekomendasi Dewan Komisaris No. 058/DEKOM.PTK/2024-SO Perihal Rekomendasi Tertulis untuk Usulan Penambahan Direktorat dan Formasi Direksi pada Struktur Organisasi PT Pertamina Trans Kontinental. Berikut struktur organisasi PTK disertai nama pejabat PTK per 31 Desember 2024:

PTK's organizational structure is stipulated in President Director Decree No. Kpts-107/PTK0000/2023-S8 dated December 21, 2023, concerning the Organizational Structure of BOD-1 and Below of PT Pertamina Trans Kontinental and adjusted in Decree No. Kpts-274/PTK0000/2024-S8 dated August 27, 2024, concerning Adjustment of Organizational Structure of BOD-1 and Below After the Establishment of Fleet Directorate of PT Pertamina Trans Kontinental and KPSSS dated October 15, 2024, which was ratified by Deed No. 38 dated October 23, 2024 Based on the recommendation of the Board of Commissioners No. 058/DEKOM.PTK/2024-SO regarding the Written Recommendation for the Proposal to Add a Directorate and Director Positions in the Organizational Structure of PT Pertamina Trans Kontinental.. The following is the organizational structure of PTK, along with the names of PTK officials as of December 31, 2024:



Profil Dewan Komisaris

Profile of The Board of Commissioners

Pada tahun 2024, terdapat perubahan komposisi Dewan Komisaris PTK yaitu pada tanggal 10 Juli 2024 berdasarkan Akta No. 28 tanggal 19 Juli 2024 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler PT Pertamina Trans Kontinental oleh Notaris Ivan Lazuardi Suwana, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat. Selain itu, pada tahun 2024 terdapat penambahan Dewan Komisaris dan juga perubahan nomenklatur Komite yang berada dibawah Dewan Komisaris. Informasi lebih lanjut terkait perubahan komposisi Dewan Komisaris serta perubahan nomenklatur Komite di bawah Dewan Komisaris dijelaskan pada Bab Laporan Dewan Komisaris dan Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Berikut Profil Dewan Komisaris PTK per 31 Desember 2024:

In 2024, there was a change in the composition of PTK's Board of Commissioners on July 10, 2024, based on Deed No. 28 dated July 19, 2024, concerning the Circular Shareholders Resolution of PT Pertamina Trans Kontinental by Notary Ivan Lazuardi Suwana, S.H., M.Kn., Notary in West Jakarta. In addition, in 2024, there were additions to the Board of Commissioners and also changes in the nomenclature of the Committee under the Board of Commissioners. Further information related to changes in the composition of the Board of Commissioners, as well as changes in the nomenclature of the Committee under the Board of Commissioners, is explained in the Report from the Board of Commissioners Chapter and the Corporate Governance Chapter of this Annual Report.

The following is the profile of PTK's Board of Commissioners as of December 31, 2024:



Hartanto
Komisaris
Commissioner

Amir Hamzah
Komisaris
Commissioner

Subagjo Hari Moeljanto
Komisaris Utama
President Commissioner

Andi Saiful Haq
Komisaris
Commissioner

Agustinus Ico Tri Prasetyantoko
Komisaris Independen
Independent Commissioner



Subagjo Hari Moeljanto

Komisaris Utama
President Commissioner

Domisili Domicile
Jakarta

Kewarganegaraan Citizenship
Indonesia Indonesian

Usia/Tempat & Tanggal Lahir Age/Place & Date of Birth
62 tahun per 31 Desember 2024/Probolinggo, 16 Juni 1962
62 years old as of December 31, 2024/Probolinggo, June 16, 1962

Pendidikan Education	• Sarjana (S1) Teknik Perkapalan Institut Teknologi Sepuluh Nopember pada tahun 1986 • Magister (S2) Shipping Management di World Maritime University - Malmö Swedia pada tahun 1996 • Bachelor's degree in Shipbuilding Engineering at Institut Teknologi Sepuluh Nopember in 1986 • Master's degree in Shipping Management at World Maritime University - Malmö Sweden in 1996
Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	Menjabat sebagai Komisaris Utama sejak 10 Juli 2024 berdasarkan Akta No. 28 tanggal 19 Juli 2024 untuk 1 (satu) periode masa jabatan (3 tahun). Sebelumnya beliau tidak pernah menjabat dalam jajaran Dewan Komisaris Perusahaan. He has served as President Commissioner since July 10, 2024, based on Deed No. 28 dated July 19, 2024, for 1 (one) term of office (3 years). Previously, he never served on the Company's Board of Commissioners.
Pengalaman Kerja Work Experience	• Komisaris PT Pertamina Marine Solution (2023 - 2024) • Advisor PT Pertamina International Shipping (2021-2023) • President Director di PT Pertamina International Shipping (2016 - Maret 2019) • Direktur Utama PT Pertamina Trans Kontinental (2015 - 2016) • GM Marketing Operation Region IV (2013 - 2015) • VP Commercial Shipping PT Pertamina (Persero)(2011 - 2013) • Commissioner of PT Pertamina Marine Solution (2023 - 2024) • Advisor of PT Pertamina International Shipping(2021-2023) • President Director at PT Pertamina International Shipping (2016 - March 2019) • President Director of PT Pertamina Trans Kontinental (2015 - 2016) • GM of Marketing Operation Region IV (2013 - 2015) • VP of Commercial Shipping of PT Pertamina (Persero)(2011 - 2013)
Rangkap Jabatan Concurrent Position	Tidak ada None
Sertifikasi Certification	Certification In Audit Committee Practices (CACP)
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, Pemegang Saham Utama/Pengendali, maupun dengan Pemerintah Indonesia sebagai entitas pemilik akhir Has no affiliation with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, Major/Controlling Shareholders, nor with the Government of Indonesia as the ultimate owner entity
Periode Jabatan Term of Office	Pertama First
Kepemilikan Saham Share Ownership	Tidak ada None



Amir Hamzah

Komisaris
Commissioner

Domisili Domicile
Bogor

Kewarganegaraan Citizenship
Indonesia Indonesian

Usia/Tempat & Tanggal Lahir Age/Place & Date of Birth
66 tahun per 31 Desember 2024/Malang, 24 Agustus 1958
66 years old as of December 31, 2024/Malang, August 24, 1958

Pendidikan Education	Sarjana (S1) Ilmu Tanah Brawijaya Malang pada tahun 1981 Bachelor's degree in Soil Science at Universitas Brawijaya, Malang in 1981
Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	Menjabat sebagai Komisaris sejak 28 Mei 2021 berdasarkan Akta No. 22 tanggal 31 Mei 2021, untuk 1 (satu) periode masa jabatan (3 tahun). Beliau diangkat kembali melalui KPSSS tanggal 10 Juli 2024 dan Akta No. 28 tanggal 19 Juli 2024 (10 Juli 2024 - 9 Juli 2027 (Periode 2)). He has served as Commissioner since May 28, 2021, based on Deed No. 22 dated May 31, 2021, for 1 (one) term of office (3 years). He was reappointed through KPSSS dated July 10, 2024, and Deed No. 28 dated July 19, 2024 (July 10, 2024 - July 9, 2027 (2nd Period)).
Pengalaman Kerja Work Experience	- Komisaris Utama PT Pertamina Trans Kontinental (2021 - Mei 2024) - Direktur Pengembangan Bisnis HCI Cooperation (2015 - 2021) - Kepala Divisi Operation Support BP MIGAS/SKK MIGAS (2010 - 2012) - VP Rep BP MIGAS PT Pertamina Hulu (Upstream), Total Indonesia, Medco Energy and Conocophillips (2009 - 2010) - VP Rep BP MIGAS PT Pertamina Hulu (Upstream), Total Indonesia, Medco Energy and Conocophillips (2013-2014), - Kepala Divisi Hubungan Eksternal dan Komunikasi BP MIGAS (2003-2009) - President Commissioner of PT Pertamina Trans Kontinental (2021 - May 2024) - Director of Business Development of HCI Cooperation (2015 - 2021) - Head of Operation Support Division of BP MIGAS/SKK MIGAS (2010 - 2012) - VP of Rep BP MIGAS of PT Pertamina Hulu (Upstream), Total Indonesia, Medco Energy and Conocophillips (2009 - 2010) - VP of Rep BP MIGAS of PT Pertamina Hulu (Upstream), Total Indonesia, Medco Energy and Conocophillips (2013-2014), - Head of External Relations and Communication Division of BP MIGAS (2003-2009)
Rangkap Jabatan Concurrent Position	Ketua Komite Pemantau Risiko & Investasi Chairman of the Risk Monitoring & Investment Committee
Sertifikasi Certification	Certified Risk Professional (CRP)
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, Pemegang Saham Utama/Pengendali, maupun dengan Pemerintah Indonesia sebagai entitas pemilik akhir. Has no affiliation with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, Major/Controlling Shareholders, nor with the Government of Indonesia as the ultimate owner entity.
Periode Jabatan Term of Office	Kedua Second
Kepemilikan Saham Share Ownership	Tidak ada None



Andi Saiful Haq

Komisaris
Commissioner

Domisili Domicile
Jakarta

Kewarganegaraan Citizenship
Indonesia Indonesian

Usia/Tempat & Tanggal Lahir Age/Place & Date of Birth
49 tahun per 31 Desember 2024/Soppeng, 12 Mei 1975
49 years old as of December 31, 2024/Soppeng, May 12, 1975

Pendidikan Education

- Sarjana (S1) Teknik Sipil di Universitas Hasanuddin Makassar (1997)
- Sarjana (S1) Teknik Sipil di STITEK Makassar
- Magister (S2) Studi Pertahanan di Institut Teknologi Bandung dan Cranfield University Inggris (2007)
- Magister (S2) Hubungan Internasional di Departemen Ilmu Politik Justus Liebig University Giessen, Jerman (2008)
- D3 Teknik Sipil, Universitas Hasanuddin Makasar
- Bachelor's degree in Civil Engineering at Universitas Hasanuddin Makassar (1997)
- Bachelor's degree in Civil Engineering at STITEK Makassar
- Master's degree in Defense Studies at Institut Teknologi Bandung and Cranfield University UK (2007)
- Master's degree in International Relations from Department of Political Science of Justus Liebig University Giessen, Germany (2008)
- Diploma 3 Civil Engineering, Hasanuddin University Makassar

Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment

Menjabat sebagai Komisaris sejak 11 September 2020 berdasarkan Akta No. 15 tanggal 23 November 2020, untuk 1 (satu) periode masa jabatan (3 tahun). Beliau diangkat kembali melalui KPSSS tanggal 11 Oktober 2023 dan Akta No. 29 tanggal 17 Oktober 2023 (11 Oktober 2023 - 10 Oktober 2026 (Periode 2)). He has served as Commissioner since September 11, 2020, based on Deed No. 15 dated November 23, 2020, for 1 (one) term of office (3 years). He was reappointed through KPSSS on October 11, 2023, and Deed no. 29 October 17, 2023 (October 11, 2023 - October 10, 2026 (2nd Period))

Pengalaman Kerja Work Experience

- Staf Khusus Menteri Kehutanan (2024 - sekarang)
- Staf Khusus Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (2022 - 2024))
- Komisaris di Institute for Transformation Studies (INTRANS) Jakarta (2022 - Sekarang)
- Direktur di Institute for Transformation Studies (INTRANS) Jakarta (2013 - 2022)
- Pengajar di Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Paramadina, Jakarta (2011 - 2013)
- Program Officer untuk Perdamaian dan Demokratisasi Aceh di Friedrich Ebert Stiftung (FES) Indonesia (2008 - 2011)
- Special Staff to the Minister of Forestry (2024 - present)
- Special Staff to the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency (2022 - 2024)
- Commissioner at Institute for Transformation Studies (INTRANS) Jakarta (2022 - Present)
- Director at Institute for Transformation Studies (INTRANS) Jakarta (2013 - 2022)
- Lecturer in the Department of International Relations, Universitas Paramadina, Jakarta (2011 - 2013)
- Officer for Aceh Peace and Democratization at the Friedrich Ebert Stiftung (FES) Indonesia (2008 - 2011)

Rangkap Jabatan Concurrent Position

Tidak ada
None

Sertifikasi Certification

Certified Risk Professional (CRP)

Hubungan Afiliasi Affiliation

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, Pemegang Saham Utama/Pengendali, maupun dengan Pemerintah Indonesia sebagai entitas pemilik akhir
Has no affiliation with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, Major/Controlling Shareholders, nor with the Government of Indonesia as the ultimate owner entity

Periode Jabatan Term of Office

Kedua
Second

Kepemilikan Saham Share Ownership

Tidak ada
None



Hartanto

Komisaris
Commissioner

Domisili Domicile
Jakarta

Kewarganegaraan Citizenship
Indonesia Indonesian

Usia/Tempat & Tanggal Lahir Age/Place & Date of Birth
52 tahun Per 31 Desember 2024/ Sukoharjo 23 Juni 1972
52 years old as of December 31, 2024/Sukoharjo, June 23, 1972

Pendidikan Education

- Diploma (D3) Teknik di Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang pada tahun 1995
- Sarjana (S1) Teknik di Pendidikan dan Latihan Ahli Pelayaran (PLAP) pada tahun 2000
- Magister (S2) Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung pada tahun 2011
- Doktorat (S3) Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung pada tahun 2020
- Associate's degree (D3) in Engineering at Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang in 1995
- Bachelor's degree in Shipping Expert Education and Training (PLAP) in 2000
- Master's degree in Law at Universitas Islam Sultan Agung in 2011
- Doctoral's degree in Law at Universitas Islam Sultan Agung in 2020

Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment

Menjabat sebagai Komisaris sejak 11 Januari 2024 berdasarkan Akta No. 38 tanggal 11 Januari 2024 untuk 1 (satu) periode masa jabatan (3 tahun). Sebelumnya beliau tidak pernah menjabat dalam jajaran Dewan Komisaris Perusahaan.

He has served as Commissioner since January 11, 2024, based on Deed No. 38 dated January 11, 2024, for 1 (one) term of office (3 years). Previously, he never served on the Company's Board of Commissioners.

Pengalaman Kerja Work Experience

- Direktur Perkapalan dan Kepelautan Kementerian Perhubungan (2023 - 2024)
- Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan (2022 - 2023)
- Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Banjarmasin (2021 - 2022)
- Kepala Bagian Publikasi dan Pelayanan Informasi Kementerian Perhubungan (2020)
- Plt. Kepala Biro KIP (Kebag. Publikasi dan Pelayanan Publik) (2020)
- Lektor Merangkap Direktur Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang (2018)
- Direktur POLTEKPEL Sumatera Barat (2018)
- Director of Shipping and Maritime Affairs of the Ministry of Transportation (2023 - 2024)
- Head of Public Communication and Information Bureau of the Ministry of Transportation (2022 - 2023)
- Head of Banjarmasin Harbormaster and Port Authority Office Class I (2021 - 2022)
- Head of the Publication and Information Service Department of the Ministry of transportation (2020)
- Act. Head of KIP Bureau (Head of the Publication and Public Services Department) (2020)
- Lecturer concurrently as Director of Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang (2018)
- Director of West Sumatera POLTEKPEL (2018)

Rangkap Jabatan Concurrent Position

- Di Dalam PTK: Ketua Komite Nominasi & Remunerasi
- Di Luar PTK: Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan
- Inside PTK: Chairman of the Nomination & Remuneration Committee
- Outside PTK: Director of Sea Traffic and Transportation of the Ministry of Transportation

Sertifikasi Certification

Tidak ada
None

Hubungan Afiliasi Affiliation

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, Pemegang Saham Utama/Pengendali, maupun dengan Pemerintah Indonesia sebagai entitas pemilik akhir
Has no affiliation with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, Major/Controlling Shareholders, nor with the Government of Indonesia as the ultimate owner entity

Periode Jabatan Term of Office

Pertama
First

Kepemilikan Saham Share Ownership

Tidak ada
None



Agustinus Ico Tri Prasetyantoko

Komisaris Independen
Independent Commissioner

Domisili Domicile
Jakarta

Kewarganegaraan Citizenship
Indonesia Indonesian

Usia/Tempat & Tanggal Lahir Age/Place & Date of Birth
51 tahun Per 31 Desember 2024/ Magelang, 10 Agustus 1973
51 years old as of December 31, 2024/Magelang, August 10, 1973

Pendidikan Education

- Sarjana (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada pada tahun 1997
- Magister (S2) Sains atau DEA (Diploma d'études Approfondies) dari Universite de Science et Technologies de Lille (USTL) pada tahun 2002
- Doktoral (S3) Ekonomi Keuangan di Ecole Normale Supérieure (ENS) de Lyon pada tahun 2008
- Bachelor's degree in Faculty of Economics and Business of Universitas Gadjah Mada in 1997
- master's degree in Science or DEA (Diploma d'études Approfondies) from Universite de Science et Technologies de Lille (USTL) in 2002
- doctoral's degree in Financial Economics at Ecole Normale Supérieure (ENS) de Lyon in 2008

Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment

Menjabat sebagai Komisaris Independen sejak tanggal 12 Februari 2024 berdasarkan Akta No. 40 tanggal 22 Februari 2024 untuk 1 (satu) periode masa jabatan (3 tahun). Sebelumnya beliau tidak pernah menjabat dalam jajaran Dewan Komisaris Perusahaan.
He has served as Independent Commissioner since February 12, 2024, based on Deed No. 40 dated February 22, 2024, for 1 (one) term of office (3 years). Previously, he has never served on the Company's Board of Commissioners.

Pengalaman Kerja Work Experience

- Komisaris Independen PT Prudential Life Assurance (PLA) (2015 – 2021)
- Pengajar di Universitas Atma Jaya selama 2 (dua) periode (2015 – 2019 dan 2019 – 2023)
- Chief Economist PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (2013 – 2015)A
- Pendiri (Founder)Atma Jaya Institute of Public Policy (AJIPP)
- Independent Commissioner of PT Prudential Life Assurance (PLA) (2015 – 2021)
- Lecturer at Universitas Atma Jaya for 2 (two) period (2015 – 2019 and 2019 – 2023)
- Chief Economist of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (2013 – 2015)A
- Founder of Atma Jaya Institute of Public Policy (AJIPP)

Rangkap Jabatan Concurrent Position

- Di Dalam PTK: Ketua Komite Audit
- Di Luar PTK: Anggota Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan (2023 – sekarang), Anggota Komite Pemilihan di Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU) (2023 – sekarang), Komite Audit PT Medela Potentia (Dexa Group) (2022 – sekarang), Anggota Panitia Pemilihan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) (2022 – sekarang), Anggota Steering Committee Indonesia Fintech Society (IFSoc) (2020 – sekarang), Dewan Penasihat Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) (2018 – sekarang), Dewan Pengurus Populi Center (2014 – sekarang)
- Inside PTK: Chairman of the Audit Committee
- Outside PTK: Member of the Supervision Body of the Financial Services Authority (2023 – present), Member of the Election Committee at the Business Competition Supervisory Commission of the Republic of Indonesia (KPPU) (2023 – present), Audit Committee of PT Medela Potentia (Dexa Group) (2022 – present), Member of the Election Committee at the General Election Commission (KPU) (2022 – present), Member of the Steering Committee of the Indonesia Fintech Society (IFSoc) (2020 – present), Advisory Board of the Indonesian Joint Funding Fintech Association (AFPI) (2018 – present), and Management Board of Populi Center (2014 – present).

Sertifikasi Certification

Tidak ada
None

Hubungan Afiliasi Affiliation

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, Pemegang Saham Utama/Pengendali, maupun dengan Pemerintah Indonesia sebagai entitas pemilik akhir
Has no affiliation with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, Major/Controlling Shareholders, nor with the Government of Indonesia as the ultimate owner entity

Periode Jabatan Term of Office

Pertama
First

Kepemilikan Saham Share Ownership

Tidak ada
None



Profil Direksi

Profile of The Board of Directors

Pada tahun 2024, terdapat perubahan komposisi Direksi PTK yaitu pada tanggal 15 Oktober 2024 berdasarkan Akta No. 38 tanggal 23 Oktober 2024 oleh Notaris Ivan Lazuardi Suwana, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat. Informasi lebih lanjut terkait perubahan komposisi Direksi dijelaskan pada Bab Laporan Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

Berikut Profil Direksi PTK per 31 Desember 2024:

In 2024, there was a change in the composition of PTK's Board of Directors on October 15, 2024, based on Deed No. 38 dated October 23, 2024, by Notary Ivan Lazuardi Suwana, S.H., M.Kn., Notary in West Jakarta. Further information related to changes in the composition of the Board of Directors is explained in the Report from the Board of Directors chapter of this Annual Report.

The following is the profile of PTK's Board of Directors as of December 31, 2024:



Afan Aftory

Direktur Keuangan & SDM
Director of Finance & HR

Slamet Harianto

Direktur Armada
Director of Operations

I Ketut Laba

Direktur Utama
President Director

Yudi Wibisono

Direktur Operasi
Director of Operations

Andy Arvianto

Direktur Pemasaran
Director of Marketing



I Ketut Laba

Direktur Utama
President Director

Domisili Domicile
Jakarta

Kewarganegaraan Citizenship
Indonesia Indonesian

Usia/Tempat & Tanggal Lahir Age/Place & Date of Birth
48 tahun per 31 Desember 2023/ Melaya, 21 Agustus 1975
48 years old as of December 31, 2024/ Melaya, August 21, 1975

Pendidikan Education	Sarjana (S1) Teknik Mesin di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta pada tahun 1998. Bachelor's degree in Mechanical Engineering at the Jakarta School of Shipping (STIP) in 1998.
Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	Menjabat sebagai Direktur Utama sejak tanggal 3 Juli 2023, berdasarkan, Akta No 02 tanggal 3 Juli 2023, untuk 1 (satu) periode masa jabatan (3 tahun). Sebelumnya beliau tidak pernah menjabat dalam jajaran Direksi Perusahaan. He has served as President Director since July 3, 2023, based on Deed No. 02 dated July 3, 2023, for 1 (one) term of office (3 years). Previously, he has never served on the Company's Board of Directors.
Pengalaman Kerja Work Experience	• Manager HSSE, Vetting & Risk Management PT Pertamina International Shipping (2018-2019) • Manager Fleet Inspection & Assurance PT Pertamina International Shipping (2019-2021) • Manager Product Domestic Operation PT Pertamina International Shipping (2021-2022) • Direktur Utama PT Perta MC (2022-2023) • Manager of HSSE, Vetting & Risk Management of PT Pertamina International Shipping (2018-2019) • Manager of Fleet Inspection & Assurance of PT Pertamina International Shipping (2019-2021) • Manager of Product Domestic Operation of PT Pertamina International Shipping (2021-2022) • President Director of PT Perta MC (2022-2023)
Rangkap Jabatan Concurrent Position	Tidak ada None
Sertifikasi Certification	Certified Risk Professional (CRP)
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, Pemegang Saham Utama/Pengendali, maupun dengan Pemerintah Indonesia sebagai entitas pemilik akhir Has no affiliation with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, Major/Controlling Shareholders, nor with the Government of Indonesia as the ultimate owner entity
Periode Jabatan Term of Office	Pertama First
Kepemilikan Saham Share Ownership	Tidak ada None



Afan Aftory

Direktur Keuangan & SDM
Director of Finance & HR

Domisili Domicile
Jakarta

Kewarganegaraan Citizenship
Indonesia Indonesian

Usia/Tempat & Tanggal Lahir Age/Place & Date of Birth
47 tahun per 31 Desember 2023/Jakarta, 19 Juni 1976
47 years old as of December 31, 2024/Jakarta, June 19, 1976

Pendidikan Education

- Sarjana (S1) Ekonomi Akuntansi di Universitas Borobudur pada tahun 1997
- Magister (S2) Manajemen di Universitas Satyagama pada tahun 1999
- Pendidikan Profesi Akuntan ("PPAK") di Universitas Indonesia pada tahun 2004
- Bachelor's degree in Accounting Economics from Borobudur University in 1997
- Master's degree in Management at Satyagama University in 1999
- Accountant Professional Education ("PPAk") from the University of Indonesia in 2004

Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment

Menjabat sebagai Komisaris sejak 11 Januari 2007 berdasarkan Akta No. 38 tanggal 17 Januari 2024 untuk 1 (satu) periode masa jabatan (3 tahun). Sebelumnya beliau tidak pernah menjabat dalam jajaran Dewan Komisaris Perusahaan.
He has served as Commissioner since January 11, 2007, based on Deed No. 38 dated January 17, 2024, for 1 (one) term of office (3 years). Previously, he never served on the Company's Board of Commissioners.

Pengalaman Kerja Work Experience

- Vice President Finance PT Pertamina Lubricants (2019–2020)
- Vice President Financial Reporting & Accounting PT Pertamina (Persero) (2020– 2021)
- Direktur Keuangan & SDM PT Pertamina Trans Kontinental (2021–Agustus 2024)
- VP Operational & Project Risk Management PT Pertamina International Shipping (September 2024 – Oktober 2024)
- Vice President of Finance of PT Pertamina Lubricants (2019–2020)
- Vice President of Financial Reporting & Accounting of PT Pertamina (Persero) (2020– 2021)
- Director of Finance & HR of PT Pertamina Trans Kontinental (2021–August 2024)
- VP of Operational & Project Risk Management of PT Pertamina International Shipping (September 2024 – October 2024)

Rangkap Jabatan Concurrent Position

Tidak ada
None

Sertifikasi Certification

- Certified Risk Professional (CRP)
- Sertifikasi Pajak Brevet A & B
- Sertifikasi Pajak Brevet C
- Sertifikasi Enterprise Risk Management (ERM) Berbasis ISO 31000
- ASEAN Chartered Professional Accountant
- Chartered Accountant (CA)
- Certified Professional Management Accountant (CMA)
- MAPPI PDP 1 Business Appraisal
- Certified Risk Professional (CRP)
- Brevet A & B Tax Certification
- Brevet C Tax Certification
- ISO 31000-based Enterprise Risk Management (ERM) Certification
- ASEAN Chartered Professional Accountant
- Chartered Accountant (CA)
- Certified Professional Management Accountant (CMA)
- MAPPI PDP 1 Business Appraisal

Hubungan Afiliasi Affiliation

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, Pemegang Saham Utama/Pengendali, maupun dengan Pemerintah Indonesia sebagai entitas pemilik akhir
Has no affiliation with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, Major/Controlling Shareholders, nor with the Government of Indonesia as the ultimate owner entity

Periode Jabatan Term of Office

Kedua
Second

Kepemilikan Saham Share Ownership

Tidak ada
None



Slamet Harianto

Direktur Armada
Director of Operations

Domisili Domicile

Bekasi

Kewarganegaraan Citizenship

Indonesia Indonesian

Usia/Tempat & Tanggal Lahir Age/Place & Date of Birth

44 tahun per 31 Desember 2023/Malang, 22 Februari 1979

44 years old as of December 31, 2024/Malang, February 22, 1979

Pendidikan Education	• Sarjana (S1) Teknik Mesin dari Universitas Brawijaya Malang pada tahun 2002 • Magister (S2) Teknik dari Universitas Indonesia pada tahun 2011 • Bachelor's degree in Mechanical Engineering from Universitas Brawijaya, Malang in 2002 • Master's degree in in Engineering from Universitas Indonesia in 2011
Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	Menjabat sebagai Direktur Operasi sejak tanggal 5 Agustus 2022, berdasarkan Akta No. 04 tanggal 10 Agustus 2022, untuk 1 (satu) periode masa jabatan (3 tahun). Sebelumnya beliau tidak pernah menjabat dalam jajaran Direksi Perusahaan. He has served as Director of Operations since August 5, 2022, based on Deed No. 04 dated August 10, 2022, for 1 (one) term of office (3 years). Previously, he has never served on the Company's Board of Directors.
Pengalaman Kerja Work Experience	• General Manager Operasi PT Nusantara Regas (2016–2018). • Kepala Divisi Operasi PT Nusantara Regas (2018–2019) • Manager LNG Operation PT Pertamina (Persero) (2019–2022) • Direktur Operasi PT Pertamina Trans Kontinental (2022–Oktober 2024) • General Manager of Operations of PT Nusantara Regas (2016–2018). • Head of Operations Division of PT Nusantara Regas (2018–2019) • Manager of LNG Operation of PT Pertamina (Persero) (2019–2022) • Director of Operations of PT Pertamina Trans Kontinental (2022–October 2024)
Rangkap Jabatan Concurrent Position	Tidak ada None
Sertifikasi Certification	Certified Risk Professional (CRP)
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, Pemegang Saham Utama/Pengendali, maupun dengan Pemerintah Indonesia sebagai entitas pemilik akhir Has no affiliation with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, Major/Controlling Shareholders, nor with the Government of Indonesia as the ultimate owner entity
Periode Jabatan Term of Office	Pertama First
Kepemilikan Saham Share Ownership	Tidak ada None



Andy Arvianto

Direktur Pemasaran
Director of Marketing

Domisili Domicile
Jakarta

Kewarganegaraan Citizenship
Indonesia Indonesian

Usia/Tempat & Tanggal Lahir Age/Place & Date of Birth
43 tahun per 31 Desember 2023/ Boyolali, 27 Februari 1980
43 years old as of December 31, 2024/Boyolali, February 27, 1980

Pendidikan Education

- Sarjana (S1) Ekonomi Manajemen di Universitas Indonusa Esa Unggul Jakarta pada tahun 2002
- Sarjana (S2) Energy Management di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2012
- Bachelor's degree in Management Economics at Universitas Indonusa Esa Unggul, Jakarta in 2002
- Master's degree in Energy Management at Universitas Gadjah Mada, Jakarta in 2012

Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment

Menjabat sebagai Direktur Pemasaran sejak 21 Juli 2023 berdasarkan Akta No. 17 tanggal 24 Juli 2023, untuk 1 (satu) periode masa jabatan (3 tahun). Sebelumnya beliau tidak pernah menjabat dalam jajaran Direksi Perusahaan.
He has served as Director of Marketing since July 21, 2023, based on Deed No. 17 dated July 24, 2023, for 1 (one) term of office (3 years). Previously, he has never served on the Company's Board of Directors.

Pengalaman Kerja Work Experience

- Manager Treasury & Tax PT Pertamina Internasional EP (2015)
- Manager Finance & Commercial PT Pertamina Irak EP (2014-2019)
- Manager Commercial PT Pertamina Internasional EP (2015-2021)
- Direktur PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama (2021-2023)
- Manager of Treasury & Tax of PT Pertamina Internasional EP (2015)
- Manager of Finance & Commercial of PT Pertamina Irak EP (2014-2019)
- Manager of Commercial of PT Pertamina Internasional EP (2015-2021)
- Director of PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama (2021-2023)

Rangkap Jabatan Concurrent Position

Tidak ada
None

Sertifikasi Certification

Certified Risk Professional (CRP)

Hubungan Afiliasi Affiliation

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, Pemegang Saham Utama/Pengendali, maupun dengan Pemerintah Indonesia sebagai entitas pemilik akhir
Has no affiliation with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, Major/Controlling Shareholders, nor with the Government of Indonesia as the ultimate owner entity

Periode Jabatan Term of Office

Pertama
First

Kepemilikan Saham Share Ownership

Tidak ada
None



Yudi Wibisono

Direktur Operasi
Director of Operations

Domisili Domicile
Bekasi

Kewarganegaraan Citizenship
Indonesia Indonesian

Usia/Tempat & Tanggal Lahir Age/Place & Date of Birth
42 tahun per 31 Desember 2024/ Bandung, 11 Juli 1982
42 years old as of December 31, 2024/Bandung, July 11, 1982.

Pendidikan Education

- Sarjana (S1) Teknik Mesin di Institut Teknologi Bandung pada tahun 2006
- Magister (S2) Teknik Kimia di Institut Teknologi Bandung pada tahun 2013
- Bachelor's degree in Mechanical Engineering at Institut Teknologi Bandung in 2006
- Master's degree in Chemical Engineering at Institut Teknologi Bandung in 2013

Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment

Menjabat sebagai Direktur Pemasaran sejak 23 Oktober 2024 berdasarkan Akta No. 38, untuk 1 (satu) periode masa jabatan (3 tahun). Sebelumnya beliau tidak pernah menjabat dalam jajaran Direksi Perusahaan.
He has Served as Marketing Director since October 23, 2024 based on Deed No. 38. for 1 (one) term of office (3 years). Previously, he has never served on the Company's Board of Directors.

Pengalaman Kerja Work Experience

- Manager Asset Management PT Pertamina (Persero) (Agustus 2018 - Juni 2020)
- VP Fleet PT Pertamina Trans Kontinental (Juli 2020 -Agustus 2021)
- VP Fleet & Ship Management PT Pertamina Trans Kontinental (September 2021 - Desember 2023)
- VP Marine Fleet PT Pertamina Trans Kontinental (Januari 2024-Oktobre 2024)
- Manager of Asset Management of PT Pertamina (Persero) (August 2018 - June 2020)
- VP of Fleet of PT Pertamina Trans Kontinental (July 2020 - August 2021)
- VP of Fleet & Ship Management of PT Pertamina Trans Kontinental (September 2021 - December 2023)
- VP of Marine Fleet of PT Pertamina Trans Kontinental (January 2024-October 2024)

Rangkap Jabatan Concurrent Position

Tidak ada
None

Sertifikasi Certification

Tidak ada
None

Hubungan Afiliasi Affiliation

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, Pemegang Saham Utama/Pengendali, maupun dengan Pemerintah Indonesia sebagai entitas pemilik akhir
Has no affiliation with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, Major/Controlling Shareholders, nor with the Government of Indonesia as the ultimate owner entity

Periode Jabatan Term of Office

Pertama
First

Kepemilikan Saham Share Ownership

Tidak ada
None

Informasi Perubahan Komposisi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Tahun Buku 2024 dan Setelah Tahun Buku 2024

Information on Changes in the Composition of Members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for the Financial Year 2024 and After the Financial Year 2024

Dewan Komisaris

Board of Commissioners

Tahun 2024, terjadi perubahan komposisi Dewan Komisaris, dimana Sdr. Khalid Zabidi dan Sdr. Agustinus Bensik Lomboan telah diberhentikan sebagai Komisaris PTK dan mengangkat Sdr. Hartanto sebagai Komisaris berdasarkan KPSSS tanggal 12 Januari 2024 serta Sdr. Agustinus I.T. Prasetyantoko sebagai Komisaris Independen berdasarkan KPSSS tanggal 12 Februari 2024.

Sementara itu melalui KPSSS tanggal 10 Juli 2024 dan Akta No. 28 tanggal 19 Juli 2024 (10 Juli 2024 – 9 Juli 2027 Sdr. Amir Hamzah diangkat kembali sebagai Komisaris (Periode 2), dimana sebelumnya menjabat sebagai Komisaris Utama. Adapun Sdr. Subagjo Hari Moeljanto diangkat sebagai Komisaris Utama sejak 10 Juli 2024 berdasarkan Akta No. 28 tanggal 19 Juli 2024 untuk 1 (satu) periode masa jabatan (3 tahun).

Dengan demikian, jajaran Dewan Komisaris terbaru PTK sebagai berikut sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

1. Subagjo Hari Moeljanto – Komisaris Utama
2. Amir Hamzah – Komisaris
3. Andi Saiful Haq – Komisaris
4. Hartanto – Komisaris
5. Agustinus I. T. Prasetyantoko – Komisaris Independen

In 2024, there was a change in the composition of the Board of Commissioners, where Mr. Khalid Zabidi and Mr. Agustinus Bensik Lomboan were dismissed as PTK's Commissioners and appointed Mr. Hartanto as Commissioner based on KPSSS dated January 12, 2024, and Mr. Agustinus I.T. Prasetyantoko as Independent Commissioner based on KPSSS dated February 12, 2024.

Meanwhile, through KPSSS dated July 10, 2024, and Deed No. 28 dated July 19, 2024 (July 10, 2024 – July 9, 2027, Mr. Amir Hamzah was reappointed as Commissioner (2nd Period), where he previously served as President Commissioner. Mr. Subagjo Hari Moeljanto was appointed as President Commissioner on July 10, 2024, based on Deed No. 28 dated July 19, 2024, for 1 (one) term of office (3 years).

Thus, the current Board of Commissioners of PTK until December 31, 2024, is as follows:

1. Subagjo Hari Moeljanto – President Commissioner
2. Amir Hamzah – Commissioner
3. Andi Saiful Haq – Commissioner
4. Hartanto – Commissioner
5. Agustinus I. T. Prasetyantoko – Independent Commissioner

Direksi

Board of Directors

Tahun 2024, terdapat pengangkatan Direksi baru yaitu Sdr. Yudi Wibisono sebagai Direktur Operasi yang sebelumnya diduduki oleh Sdr. Slamet Harianto melalui KPSSS tanggal 15 Oktober 2024. Kemudian, Sdr. Slamet Harianto menduduki jabatan baru sebagai Direktur Armada. Penambahan Direktur Armada merupakan upaya PTK untuk memastikan seluruh armada beroperasi dengan baik dan efisien dalam mendukung misi perusahaan serta sejalan dengan tupoksi

In 2024, there was a new appointment of Directors, namely Mr. Yudi Wibisono as Director of Operations, which was previously occupied by Mr. Slamet Harianto through KPSSS dated October 15, 2024. Then, Mr. Slamet Harianto took up a new position as Director of Fleet. The addition of the Fleet Director is PTK's effort to ensure that the entire fleet operates properly and efficiently in supporting the Company's mission and in line with the duties and functions of the Fleet Director

Direktur Armada PT Pertamina International Shipping. Sdr. Slamet Harianto yang mengisi jabatan tersebut sebelumnya telah berpengalaman di beberapa jabatan di Pertamina Group, antara lain sebagai Kepala Divisi Operasi PT Nusantara Regas, Manager LNG Operation PT Pertamina (Persero), serta jabatan terakhirnya sebagai Direktur Operasi PTK. Sementara itu, Sdr. Afan Aftory menjabat kembali sebagai Direktur Keuangan & SDM melalui KPSSS tanggal 15 Oktober 2024.

Kemudian, Sdr. Yudi Wibisono yang menjabat sebagai Direktur Operasi juga merupakan wajah lama di jajaran manajemen PTK. Sdr. Yudi Wibisono telah memiliki rekam jejak yang baik di Pertamina Group. Sdr. Yudi Wibisono pernah menduduki posisi Manager Asset Management PT Pertamina (Persero), kemudian menjabat sebagai VP Marine Fleet di PTK sejak 2021. Hal tersebut membuat Sdr. Yudi Wibisono telah memahami dan berpengalaman dalam bisnis PTK.

Dengan demikian, jajaran Direksi terbaru PTK sebagai berikut sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

1. Direktur Utama – I Ketut Laba
2. Direktur Pemasaran – Andy Arvianto
3. Direktur Keuangan & SDM – Afan Aftory
4. Direktur Armada – Slamet Harianto
5. Direktur Operasi – Yudi Wibisono

of PT Pertamina International Shipping. Mr. Slamet Harianto, who filled the position, previously had experience in several positions in Pertamina Group, among others, as Head of the Operations Division of PT Nusantara Regas, Manager of LNG Operations of PT Pertamina (Persero), and his last position as Director of Operations of PTK. Meanwhile, Mr. Afan Aftory was reappointed as Director of Finance & HR through KPSSS dated October 15, 2024.

Furthermore, Mr. Yudi Wibisono, who serves as Director of Operations, is also a familiar face in PTK's management. Mr. Yudi Wibisono has a good track record in the Pertamina Group. He has held the position of Manager of Asset Management of PT Pertamina (Persero), then served as VP of Marine Fleet at PTK since 2021. This makes Mr. Yudi Wibisono understand and experienced in PTK's business.

Therefore, the new Board of Directors of PTK until December 31, 2024, is as follows:

1. President Director – I Ketut Laba
2. Director of Marketing – Andy Arvianto
3. Director of Finance & HR – Afan Aftory
4. Director of Fleet – Slamet Harianto
5. Director of Operations – Yudi Wibisono

Statistik Sumber Daya Manusia Human Resource Statistics

Hingga akhir Desember 2024, PTK memiliki jumlah pegawai sebanyak 2.971 orang. Mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya sebanyak 2.971 orang.

Berikut adalah komposisi jumlah pegawai per 31 Desember 2024 berdasarkan status pegawai, jenjang jabatan, tingkat pendidikan, gender dan usia:

Until the end of December 2024, PTK had a number of employees of 2,971 people. It experienced a decrease compared to the previous year of 3,701 people.

The following is the composition of the number of employees as of December 31, 2024, based on employee status, position level, education level, gender, and age:

Komposisi SDM Berdasarkan Status Pegawai

HR Composition by Employee Status

Keterangan Description	2024	2023	2022
Pegawai Tidak Tetap (TKJP) Non-permanent Employee (TKJP)	2633	2609	2.809
Pegawai Kontrak (PWT) Contract Employee (PWT)	25	547	602
Pegawai Tetap (PWTT) Permanent Employee (PWTT)	313	545	567
Jumlah Pegawai Number of Employees	2971	3701	3.978



Komposisi SDM Berdasarkan Jenjang Jabatan

HR Composition by Position Level

Keterangan Description	2024	2023	2022
Eksekutif Executive	20	17	13
Manager	34	75	45
Asisten Manager Assistant Manager	95	149	16
Staff dan Pekerja Laut Staff and Sea Workers	189	851	1.095
Pekerja Tidak Tetap (TKJP) Non-permanent Workers (TKJP)	2633	2609	2.809
Jumlah Pegawai Number of Employees	2971	3701	3.978

Komposisi SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan

HR Composition by Education Level

Keterangan Description	2024	2023	2022
Pasca Sarjana Master's degree	48	64	63
Sarjana Bachelor's degree	745	773	725
Diploma Associate's degree	283	387	716
SD s/d SMA Elementary School up to Senior High School	1848	2063	1.868
Lain-lain (Ijazah Laut) Others (Sea Diplomas)	47	414	606
Jumlah Pegawai Number of Employees	2971	3701	3.978

Komposisi SDM Berdasarkan Unit Kerja

HR Composition by Work Unit

Keterangan Description	2024	2023	2022
Non Direktorat Non-directorate	112	125	96
Direktorat Operasi Directorate of Operations	96	701	740
Direktorat Pemasaran Directorate of Marketing	2540	2759	3.013
Direktorat Keuangan & SDM Directorate of Finance & HR	95	95	88
Lain-Lain (Organisasi Project) Others (Project Organization)	128	21	41
Jumlah Pegawai Number of Employees	2.971	3701	3.978

Komposisi SDM Berdasarkan Gender

HR Composition by Gender

Keterangan Description	2024	2023	2022
Laki-laki Male	2680	3.378	3.662
Perempuan Female	291	323	316
Jumlah Pegawai Number of Employees	2971	3.701	3.978

Komposisi SDM Berdasarkan Usia

HR Composition by Age

Keterangan Description	2024	2023	2022
<20 tahun <20 years old	0	0	17
21-30 tahun 21-30 years old	533	510	814
31-40 tahun 31-40 years old	1.105	1.329	1.394
41-50 tahun 41-50 years old	911	1.171	1.257
51-55 tahun 51-55 years old	358	548	459
>55 tahun >55 years old	64	143	37
Jumlah Pegawai Number of Employees	2971	3.701	3.978

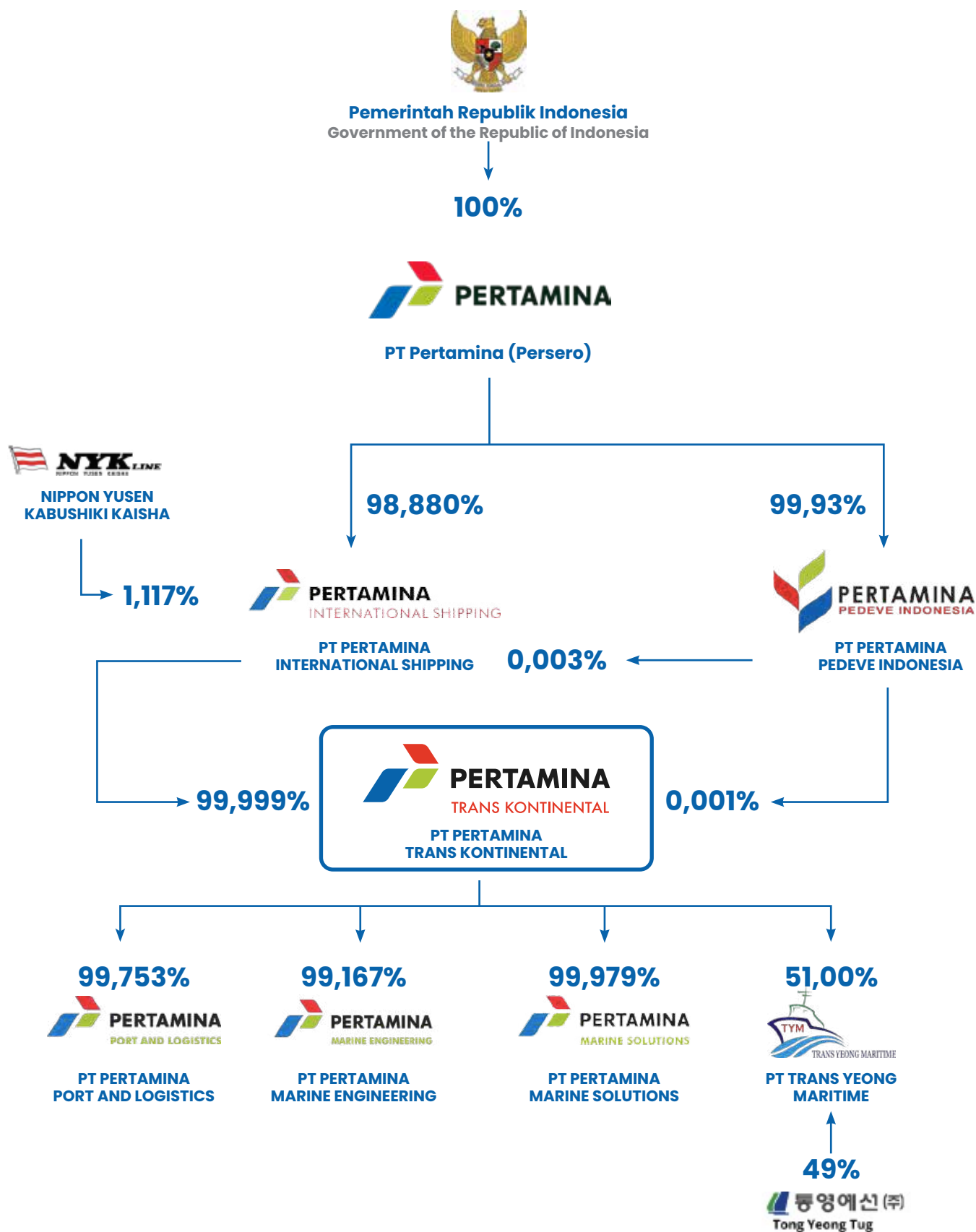
Struktur Grup dan Entitas Anak, Entitas Asosiasi Serta Kantor Cabang/Perwakilan

Structure of The Group and Subsidiaries, Associates, and Branch/Representative Offices

Struktur Grup Group Structure

PT Pertamina Trans Kontinental merupakan Anak Perusahaan PT Pertamina International Shipping yang digambarkan sebagai berikut:

PT Pertamina Trans Kontinental is a Subsidiary of PT Pertamina International Shipping which is described as follows:



Entitas Anak Perusahaan Subsidiaries

Hingga akhir 31 Desember 2024, PTK memiliki Entitas Anak yaitu PT Pertamina Port and Logistics, PT Pertamina Marine Engineering, PT Pertamina Marine Solutions, dan Perusahaan Patungan (*Joint Venture*) yaitu PT Trans Yeong Maritime.

Until the end of December 31, 2024, PTK has Subsidiaries namely Pertamina Port and Logistics, Pertamina Marine Engineering, Pertamina Marine Solutions, and a Joint Venture Company, Trans Yeong Maritime.

Nama Perusahaan Company Name	PT Pertamina Ports and Logistics
Tanggal Pendirian Date of Establishment	10 Februari 1989 February 10, 1989
Dasar Hukum Pendirian Legal Basis of Establishment	Akta pendirian No. 48 tanggal 10 Februari 1986 dibuat di hadapan NY Yetty Taher S.H, M, Notaris di Jakarta Deed of establishment No. 48 dated February 10, 1986, passed before Mrs. Yetty Taher S.H., M, Notary in Jakarta
Status Badan Hukum Legal Entity Status	Perseroan Terbatas ("PT"); Penanaman Modal Dalam Negeri ("PMDN") Limited Liability Company ("PT"); Domestic Investment ("PMDN")
Kepemilikan Saham Share Ownership	PT Pertamina Trans Kontinental: 99,76% PT Pertamina Marine Solutions: 0,24%
Kegiatan Usaha Business Activities	• Badan usaha pelabuhan meliputi <i>port operation, stevedoring, cargo doring, bunkering fuel & water</i> • <i>Logistic service</i> meliputi fasilitas <i>warehouse & open storage</i> • <i>Pilotage service and port management</i> • Port business entities include port operation, stevedoring, cargo doring, bunkering fuel & water • Logistic service includes warehouse & open storage facilities • Pilotage service and port management
Alamat Kantor Pusat Head Office Address	Jl. Raya Pelabuhan Kabil Raya No. 1, Kabil Batam 29467 Kepulauan Riau, Indonesia Riau Islands, Indonesia
Website	www.pertamina-ppl.com
Email	marketing.ppl@pertamina.com
Telepon Telephone	+62778 711 543, 711 126
Faksimili Facsimile	+62778 711 842
Jumlah Aset Total Assets	Rp712.454.144
Dewan Komisaris (Per 31 Desember 2024) Board of Commissioners (As of December 31, 2024)	Vacant
Direksi (Per 31 Desember 2024) Board of Directors (As of December 31, 2024)	Albertus Anto Budi Santosa

Nama Perusahaan Company Name	PT Pertamina Marine Engineering
Tanggal Pendirian Date of Establishment	6 November 1991 November 6, 1991
Dasar Hukum Pendirian Legal Basis of Establishment	Akta pendirian No. 62 tanggal 6 November 1991, dibuat di hadapan Sinta Susikto, S.H., Notaris di Jakarta Deed of establishment No. 62 dated November 6, 1991, passed before Sinta Susikto, S.H., Notary in Jakarta



Status Badan Hukum Legal Entity Status	Perseroan Terbatas ("PT"); Penanaman Modal Dalam Negeri ("PMDN") Limited Liability Company ("PT"); Domestic Investment ("PMDN")
Kepemilikan Saham Share Ownership	PT Pertamina Trans Kontinental: 99,167% PT Pertamina Energy Terminal: 0,833%
Kegiatan Usaha Business Activities	<i>Engineering Procurement, Construction & Diversifikasi Usaha, Pengerukan & Reklamasi, Pekerjaan Bawah Air.</i> Engineering Procurement, Construction & Business Diversification, Dredging & Reclamation, Underwater Works.
Alamat Kantor Pusat Head Office Address	Gedung PT Pertamina Trans Kontinental Area Logistik Pertamina Pertamina Logistics Area Jl Yos Sudarso Kav. 205, Sunter, Tanjung Priok Jakarta Utara 14350, Indonesia North Jakarta 14350, Indonesia
Website	www.pertamina-pme.com
Email	headoffice@pertamina-me.com
Telepon Telephone	+6221 2961 5165
Faksimili Facsimile	+6221 2961 5166
Jumlah Aset Total Assets	Rp298.082.330
Dewan Komisaris (Per 31 Desember 2024) Board of Commissioners (As of December 31, 2024)	Tafkir
Direksi (Per 31 Desember 2024) Board of Directors (As of December 31, 2024)	Heri Santika Permana
Nama Perusahaan Company Name	PT Pertamina Marine Solutions
Tanggal Pendirian Date of Establishment	6 November 1991 November 6, 1991
Dasar Hukum Pendirian Legal Basis of Establishment	Akta pendirian No. 20 tanggal 5 Juni 1987, dibuat di hadapan Notaris Yudo Paripurno, SH dengan nama awal "PT Peteka Karya Samudera" dan diubah berdasarkan risalah rapat yang telah diaktakan dengan No. 68 pada 21 Januari 1988 menjadi "PT Peteka Karya Gapura" Deed of Establishment No. 20 dated June 5, 1987, passed before Notary Yudo Paripurno, S.H., with the initial name "PT Peteka Karya Samudera" and had its name altered based on the minutes of meeting notarized in the Deed No. 68 dated January 21, 1988, to become "PT Peteka Karya Gapura"
Status Badan Hukum Legal Entity Status	Perseroan Terbatas ("PT"); Penanaman Modal Dalam Negeri ("PMDN") Limited Liability Company ("PT"); Domestic Investment ("PMDN")
Kepemilikan Saham Share Ownership	PT Pertamina Trans Kontinental: 99,998% PT Pertamina Energy Terminal: 0,002%
Kegiatan Usaha Business Activities	Jasa Angkutan, <i>Ship Management, Crewing</i> , Jasa Penyediaan Tenaga Kerja, Jasa Perdagangan dan Kegiatan Usaha yang terkait dan/atau menunjang kegiatan usaha di bidang Jasa Pelayaran, Jasa Angkutan dan Jasa Logistik. Transportation Services, Ship Management, Crewing, Manpower Supply Services, Trade Services, and Business Activities relevant to and/or supporting the activities in the Shipping Services, Transportation Services, and Logistics Services sectors.
Alamat Kantor Pusat Head Office Address	Gedung Kontinental Kontinental Building Jl.Yos Sudarso Kav. 32-34, Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350, Indonesia Jl.Yos Sudarso Kav. 32-34, Kebon Bawang, Tanjung Priok, North Jakarta 14350, Indonesia

Website	www.pertamina-pmsol.com
Email	pmsol.pusat@pertamina-ms.com
Telepon Telephone	+6221 6530 7030
Faksimili Facsimile	+6221 651 0030
Jumlah Aset Total Assets	Rp315.738.540
Dewan Komisaris (Per 31 Desember 2024) Board of Commissioners (As of December 31, 2024)	Vacant
Direksi (Per 31 Desember 2024) Board of Directors (As of December 31, 2024)	Dian Prama Irfani

Perusahaan Patungan (Joint Venture)

Joint Venture

Nama Perusahaan Company Name	Trans Yeong Maritime
Tanggal Pendirian Date of Establishment	6 November 1991 November 6, 1991
Dasar Hukum Pendirian Legal Basis of Establishment	Akta Pendirian No. 41 tanggal 16 September 2014, dibuat di hadapan Dewantari Handayani, SH, MPA, Notaris di Jakarta Deed of Establishment No. 41 dated September 16, 2014, passed before Dewantari Handayani, S.H., MPA., Notary in Jakarta
Status Badan Hukum Legal Entity Status	Perseroan Terbatas ("PT"); Penanaman Modal Asing ("PMA") Limited Liability Company ("PT"); Foreign Investment ("PMA")
Kepemilikan Saham Share Ownership	PT Pertamina Trans Kontinental: 51,00% Tong Yeong Tug, Co. Ltd: 49,00%%
Kegiatan Usaha Business Activities	Jasa pelayanan kepelabuhan laut. Sea port services.
Alamat Kantor Pusat Head Office Address	Gedung PT Pertamina Trans Kontinental Area Logistik Armada Perkapalan Lt. 2 Shipping Fleet Logistics Area 2nd Floor Jl. Yos Sudarso Kav. 34, Tanjung Priok Jakarta Utara 14320, Indonesia North Jakarta 14320, Indonesia
Website	www.tym-shipping.com
Email	tymho@tym-shipping.com
Telepon Telephone	+6221 6530 7032
Faksimili Facsimile	+6221 651 6375
Jumlah Aset Total Assets	296.073.610.492
Dewan Komisaris (Per 31 Desember 2024) Board of Commissioners (As of December 31, 2024)	Vacant
Direksi (Per 31 Desember 2024) Board of Directors (As of December 31, 2024)	Soleh Komarudin Ahmad Kudus

Ringkasan Informasi Kinerja Keuangan pada Entitas Anak Perusahaan, Perusahaan Patungan dan Afiliasi

Summary of Financial Performance Information on Subsidiaries, Joint Ventures, and Affiliates

Dalam Juta Rupiah | In Million Rupiah

Nama Perusahaan Company Name	Total Aset Total Assets		Total Liabilitas Total Liabilities		Total Ekuitas Total Equity		Pendapatan Revenue		Laba Bersih Net Profit	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
PT Trans Yeong Maritime	246.982	278.418	39.132	85.921	207.849	192.497	184.618	163.193	63.874	60.626
PT Pertamina Marine Engineering	383.385	297.558	218.093	139.349	165.292	158.208	536.367	392.121	6.909	14.956
PT Pertamina Port and Logistics	841.699	740.453	384.921	336.235	456.778	404.217	1.431.618	945.869	235.374	249.419
PT Pertamina Marine Solutions	763.480	484.761	346.990	188.545	416.490	296.216	2.187.811	1.374.438	132.586	58.444

Informasi Komposisi Pemegang Saham

Information on Shareholders Composition

Struktur Pemegang Saham Perusahaan per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

The Company's Shareholders Structure as of December 31, 2024, is as follows:

No	Komposisi Pemegang Saham Shareholders Composition	Jumlah Saham (lembar) Total Shares (share)	Komposisi Composition %
Kepemilikan Saham di atas 5% Share Ownership above 5%			
1	PT Pertamina International Shipping		
	Saham Seri A Series A Shares	1.234.737	99,93
	Saham Seri B Series B Shares	819	0,06
Kepemilikan Saham di bawah 5% Share Ownership below 5%			
1	PT Pertamina Pedeve Indonesia (Saham Seri A) PT Pertamina Pedeve Indonesia (Series A Shares)	10	0,01

Jumlah pemegang saham dan persentase kepemilikan, berdasarkan klasifikasi

Number of Shareholders and Percentage of Ownership, by Classification

Kepemilikan Saham Share Ownership	Jumlah Saham Number of Shares
Kepemilikan institusi local Local institutional ownership	1.235.566
Kepemilikan individu local Local individual ownership	Nihil Nil
Kepemilikan institusi asing Foreign institutional ownership	Nihil Nil
Kepemilikan individu local Foreign individual ownership	Nihil Nil

Informasi Pemegang Saham Utama dan Pengendali

Information on Major and Controlling Shareholders

PT Pertamina (Persero) merupakan entitas induk PTK yang memiliki 100,00% saham PTK, baik langsung maupun tidak langsung. Sebagai pemilik saham penuh atau 100,00% dari PT Pertamina (Persero), Pemerintah Republik Indonesia bertindak selaku entitas pemilik akhir PTK

PT Pertamina (Persero) is the parent entity of PTK which owns 100.00% of PTK shares. As a full shareholder or 100.00% of PT Pertamina (Persero), the Government of the Republic of Indonesia acts as the ultimate owner of PTK.

Informasi Kepemilikan Saham Perusahaan oleh Dewan Komisaris dan Direksi

Information on Company Share Ownership by the Board of Commissioners and Board of Directors

Hingga akhir Desember 2024, tidak terdapat Dewan Komisaris dan Direksi yang memiliki saham PTK maupun di Perusahaan Lain.

Until the end of December 2024, none of the Board of Commissioners and Board of Directors owned shares in PTK or Other Companies.

Kelompok Pemegang Saham Masyarakat dengan Kepemilikan Kurang dari 5%

Public Shareholder Group with Less than 5% Ownership

Hingga akhir Desember 2024, PTK belum mendaftarkan sahamnya pada Bursa Efek Indonesia sehingga tidak memiliki Pemegang Saham masyarakat dengan kepemilikan saham masing-masing kurang dari 5%.

Until the end of December 2024, PTK has not listed its shares on the Indonesia Stock Exchange. Therefore, there are no public Shareholders with a shareholding of less than 5% each.



Jumlah Pemegang Saham dan Persentase Kepemilikan, Berdasarkan Klasifikasi

Number of Shareholders and Percentage of Ownership, by Classification

PT Pertamina (Persero) merupakan entitas induk PTK yang memiliki 100,00% saham PTK, baik langsung maupun tidak langsung. Sebagai pemilik saham penuh atau 100,00% dari PT Pertamina (Persero), Pemerintah Republik Indonesia bertindak selaku entitas pemilik akhir PTK.

PT Pertamina (Persero) is the parent entity of PTK which owns 100.00% of PTK shares. As a full shareholder or 100.00% of PT Pertamina (Persero), the Government of the Republic of Indonesia acts as the ultimate owner of PTK.

Kantor Akuntan Publik dan Lembaga Penunjang Lainnya

Public Accounting Firm, and Other Supporting Institutions

Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Public Accountant and Public Accounting Firm

Kantor Akuntan Publik (KAP) Public Accounting Firm (KAP)	Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (PricewaterhouseCoopers) Tanda Terdaftar : KEP-315/KM.1/2024 Registered Number : KEP-315/KM.1/2024
Akuntan Publik (AP) Public Accountant (AP)	Yusron Registrasi : AP.0243 Registration : AP.0243
Alamat Kantor Akuntan Publik (KAP) Public Accounting Firm (KAP) Address	WTC 3 Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920 Tel/Phone : +62 21 50992901/31192901 Faks/Facsimile : +62 21 52905555/52905050 Situs Web/Website : www.pwc.com/id
Jasa yang Diberikan Services Provided	Jasa Audit : Audit Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2024 Jasa Non Audit : - Audit Services : Audit of the Consolidated Financial Statements for the 2024 Financial Year Non-Audit Services : -
Periode Penugasan Assignment Period	Tahun Buku 2024 Financial Year 2024
Biaya Jasa (Fee) Service Fee (Fee)	Jasa Audit : Rp 3.276.500.000,- (belum termasuk OPE Maksimal 2% dari Harga Kontrak) Jasa Non Audit : - Audit Services : Rp3,276,500,000,- (excluding OPE Maximum 2% of Contract Price) Non-Audit Services : -

Kustodian Custodian	
Nama Name	: PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
Alamat Address	Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 1, Lt. 5 Indonesia Stock Exchange Building, Tower 1, 5th Floor Jl. Jend. Sudirman kav. 52-53, Jakarta 12190 Tel/Phone : +62 21 515 2855 Faks/Facsimile : +62 21 5299 1199 Surel/Email : helpdesk@ksei.co.id Situs Web/Website : www.ksei.co.id
Notaris Notary	
Nama Name	: Miryany Usman, SH
Alamat Address	Jl. Wijaya I No.9AB, RT.6/RW.4, Petogogan, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12170 Jl. Wijaya I No.9AB, RT.6/RW.4, Petogogan, Kby. Baru District, South Jakarta City, Special Capital Region of Jakarta 12170
Nama Name	: Ivan Lazuardi Suwana, SH., M.Kn
Alamat Address	Grand Slipi Tower Lantai 16 Unit B1, Jl. S. Parman Kav 22-24 Jakarta Barat Grand Slipi Tower 16th Floor Unit B1, Jl. S. Parman Kav 22-24 West Jakarta
Nama Name	: Lenny Janis Ishak, SH
Alamat Address	Jl. Hang Lekir 9 No.1, RT.5/RW.6, Gunung, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12120 Jl. Hang Lekir 9 No.1, RT.5/RW.6, Gunung, Kby. Baru District, South Jakarta City, Special Capital Region of Jakarta 12120
Nama Name	: Fernandia Fabiola, SH., M.Kn
Alamat Address	Jl. Letda Natsir, Bojong Kulur, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat Jl. Letda Natsir, Bojong Kulur, Gunung Putri, Bogor Regency, West Java
Nama Name	: Dewantari Handayani, SH., MPA
Alamat Address	Jl. Ciputat Raya No.3, RT.8/RW.6, Pd. Pinang, Kec. Kby. Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12310 Jl. Ciputat Raya No.3, RT.8/RW.6, Pd. Pinang, Kby. Lama District, South Jakarta City, Special Capital Region of Jakarta 12310
Nama Name	: Fessy Farizqoh Alwi, SH., M.Kn
Alamat Address	DISKURSUS CENTER OFFICE Jl. Pejaten Raya No.Kav. 7, RT.007/RW.5, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Kota Adm. Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12510 Jl. Pejaten Raya No.Kav. 7, RT.007/RW.5, Pejaten Barat, Pasar Minggu, South Jakarta Administrative City, Special Capital Region of Jakarta 12510



Konsultan Hukum Legal Consultant

Nama Name	: Verry Sitorus & Partner
Alamat Address	: Gedung KOPI, lantai 1, JL. R.P Soeroso No.20, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat 10330 KOPI Building, 1st Floor, JL. R.P Soeroso No.20, Cikini, Menteng, Central Jakarta 10330
Nama Name	: Law Firm Indra, Firman & Associates
Alamat Address	: Jl. Tebet Barat dalam VII No.8, 12830. (021) 8301261

JASA PENILAI APPRAISER

Nama Name	: Toto Suharto & Rekan Ijin Lisensi: No. 2.09.0055
Alamat Address	: Komplek Rukan Ginza Green Village Blok A. No.19 Jl. KH. Hasyim Ashari, Kel. Neroktog, Kec. Pinang Kota Tangerang, Banten 15145 Telp./Faks.: (021) 55712316 Email: tnr.tangerang@tnr.co.id

Keanggotaan Asosiasi Membership in Associations

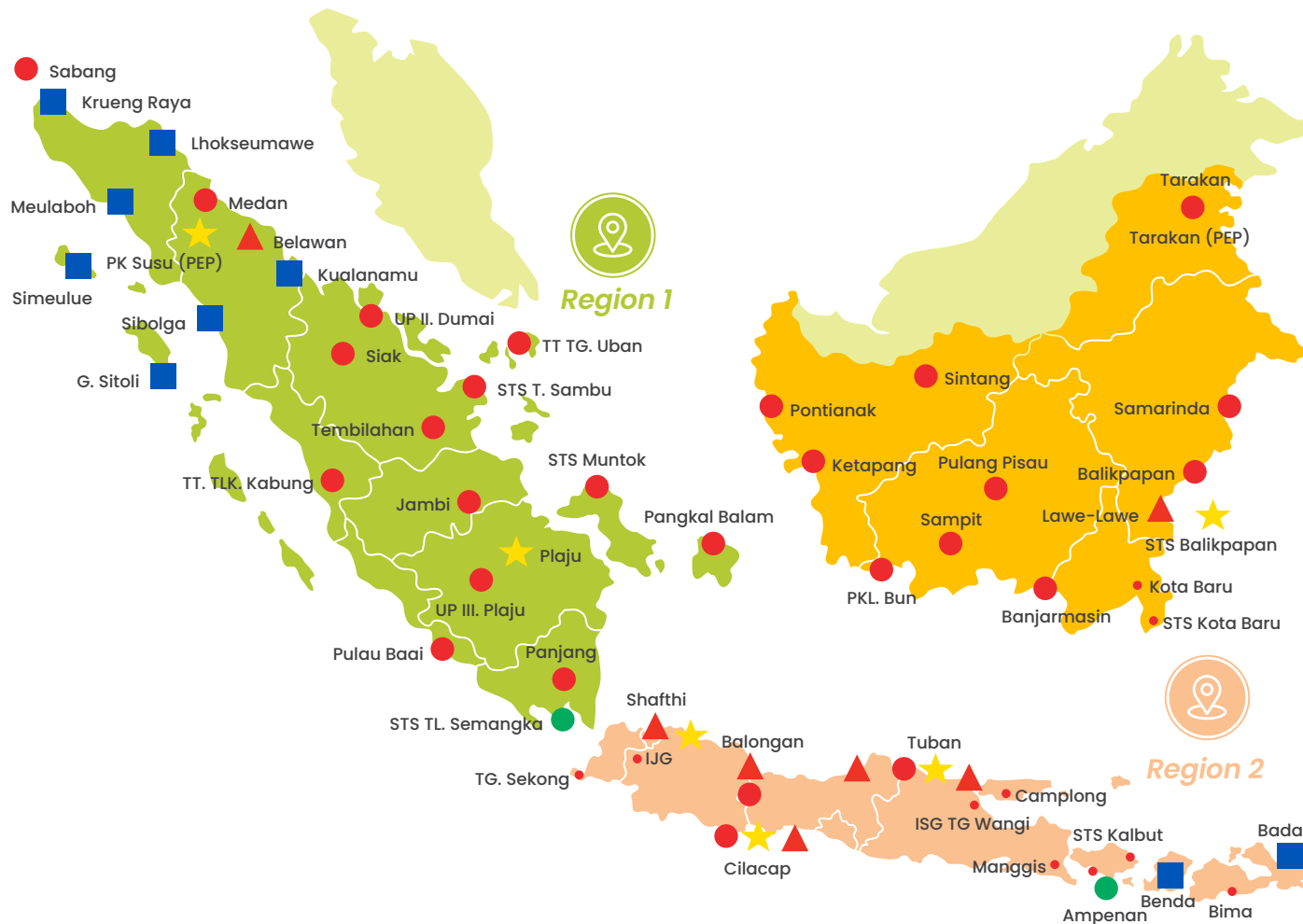
Nama Organisasi Name of Organization	Lingkup Scope	Status
Indonesian National Shipowner Association (INSA)	Nasional National	Anggota Member
Kamar Dagang Indonesia Indonesian Chamber of Commerce	Nasional National	Anggota Member





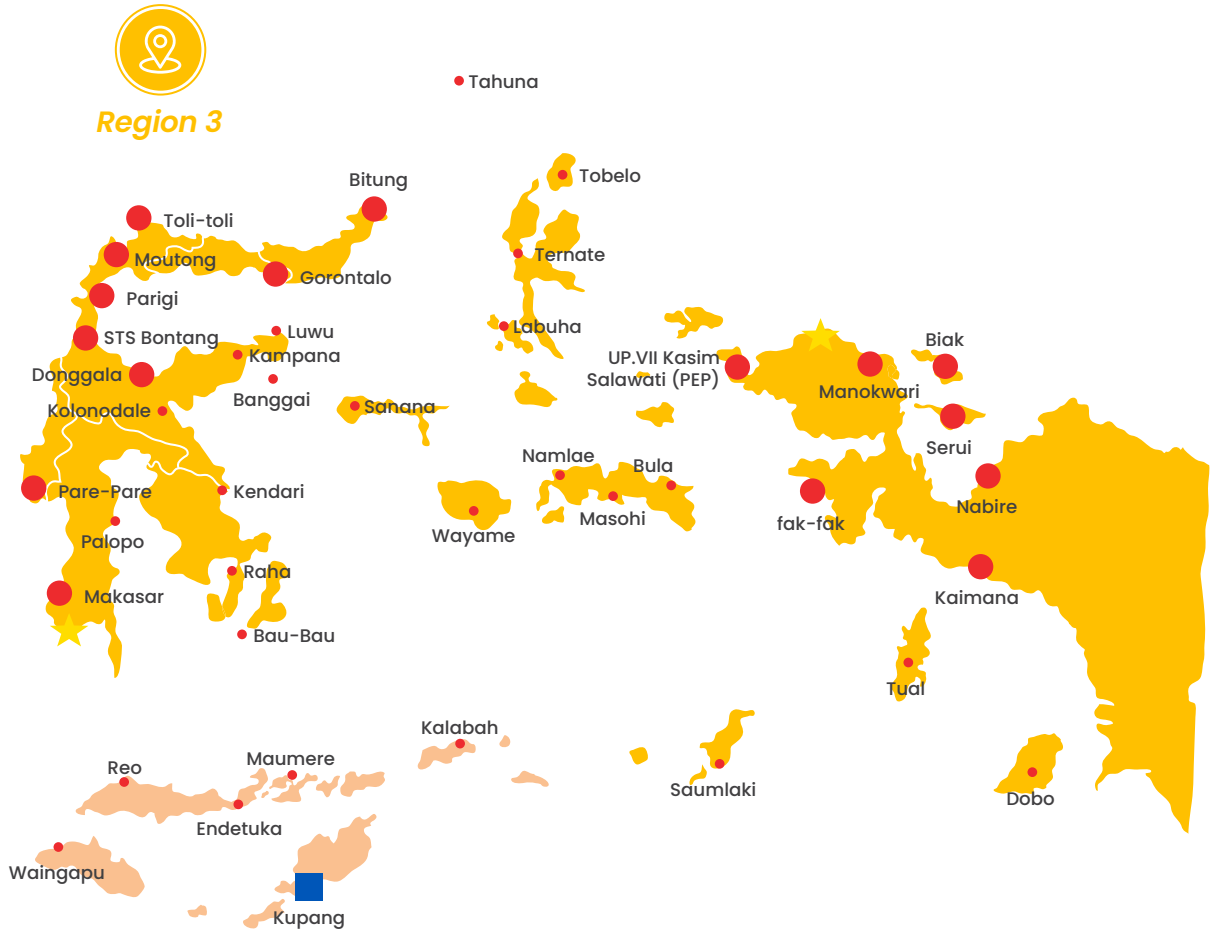
Jaringan Wilayah Operasi

Operational Area Network



Area Pemasaran Marketing Area

(Medan, Dumai, Batam, Palembang, Jakarta, Cilacap, Surabaya, Balikpapan, Makassar, dan Sorong)





Kantor Marketing Business & Operation Region

Marketing Business & Operation Region Offices

REGION I

Jl. Raya Pelabuhan Kabil
Batam 29435

REGION II

Gedung Pertamina MOR V
Pertamina MOR V Building
Jl. Jagir Wonokromo No. 88, Surabaya

REGION III

PT Pertamina Trans Kontinental
(Ex. Kantor Pertamina Patraniaga)
(former Pertamina Patraniaga Office)
Jl. Longikis No.119 Kel. Mekar Sari
Kec. Balikpapan Tengah,
Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76123
Balikpapan City, East Kalimantan 76123

Kantor Marketing Area

Marketing Area Offices

Balikpapan

Jl. Yos Sudarso No.1,
Komp. Pertamina PO BOX 432 Balikpapan
Phone : (0542) 734693, 515663
Fax : (0542) 423766
Email : Cabang.Balikpapan.PTK@pertamina.com

Makassar

Jl. Ahmad Saleh No. 4, Kel. Losari, Kec. Ujung Pandang,
Makassar, Sulawesi Selatan | South Sulawesi
Phone : (0411) 873683
Fax : (0411) 873683
Email : Cabang.Makassar.PTK@pertamina.com

Surabaya

Gedung Pertamina MOR V
Pertamina MOR V Building
Jl. Jagir Wonokromo No. 88, Surabaya
Phone : (031) 3282057, 3299112
Fax : (031) 3299113
Email : Cabang.Surabaya.PTK@pertamina.com

Tanjung Priok

Gedung PT Pertamina Trans Kontinental
Area Logistic Pertamina, Jl. Yos Sudarso, Sunter
Tanjung Priok, Jakarta Utara | North Jakarta
Phone : (021) 65307028, 65307026, 65307029
Fax : (021) 65307035
Email : Cabang.Priok.PTK@pertamina.com

Balikpapan

Jl. Yos Sudarso No.1,
Komp. Pertamina PO BOX 432 Balikpapan
Phone : (0542) 734693, 515663
Fax : (0542) 423766
Email : Cabang.Balikpapan.PTK@pertamina.com

Makassar

Jl. Ahmad Saleh No. 4, Kel. Losari, Kec. Ujung Pandang,
Makassar, Sulawesi Selatan | South Sulawesi
Phone : (0411) 873683
Fax : (0411) 873683
Email : Cabang.Makassar.PTK@pertamina.com

Medan

Kantor Pertamina MOR I
Pertamina MOR I Office
Jl. Yos Sudarso No. 8-10, Medan
Phone : (061) 613666, 618422
Fax : (061) 694241-45
Email : cabang-medan.ptk@pertamina.com

Plaju-Palembang

Jl. Beringin No. 70,
Plaju Palembang, Sumatera Selatan
Plaju Palembang, South Sumatera
Phone : (0711) 595473, 595376, 595475, 596474
Fax : (0711) 542367, 542377
Email : Cabang.Plaju.PTK@pertamina.com

Belawan

Jl. Minyak No. 1, Lingkungan I,
Kel. Belawan I, Kec. Medan, Belawan, Medan
Phone : (061) 6943464
Fax : (061) 694241-45
Email : Cabang.Belawan.PTK@pertamina.com

Dumai

Jl. Sultan Syarif Kasim No. 262,
Dumai, Riau 28811
Phone : (0765) 443981, 38370
Fax : (0765) 35173
Email : Cabang.Dumai.PTK@pertamina.com

Cilacap

Jl. Tongkol No. 20, Cilacap Selatan | South Cilacap
Cilacap, Jawa Tengah | Central Java 53211
Phone : (0282) 521852
Fax : (0282) 521852
Email : Cabang.Cilacap.PTK@pertamina.com

Sorong-Papua

Jl. Yos Sudarso No. 78,
Komperta Lido Sorong, Papua
Phone : (0951) 322294, 329502, 329503
Fax : (0951) 322729
Email : Cabang.Sorong.PTK@pertamina.com

Port Area

Port Area MBOR I

Port Sabang

PT Pertamina (Persero) TBBM
Jl. Teuku Panglima Polem No. 2
Kuta Barat, Sukakarya, Kota Sabang,
23512
West Kuta, Sukakarya, Sabang City,
23512

Port Krueng Raya

PT Pertamina (Persero) TBBM
Jl. Laksamana Malahayati KM. 32
Krueng Raya, Kab. Aceh Besar, 23381
Krueng Raya, Aceh Besar Regency,
23381

Port Siemulue

PT Pertamina FT Simeulue
Jl. Lahapang Tengku Diujung Desa
Suka Jaya
Kec. Simeulue Timur Sinabung, Kab.
Siemulue, Aceh – 23891
Jl. Lahapang Tengku Diujung, Suka
Jaya Village
Simeulue Timur Sinabung District,
Siemulue Regency, Aceh – 23891

Port Meulaboh

Jl. Makam Pahlawan No 02
Kel. Padang Seurahet, Kec. Johan
Pahlawan Meulaboh
Padang Seurahet Sub-district, Johan
Pahlawan District, Meulaboh

Port Arun

PT Pertamina Trans Kontinental,
Arun/Lhokseumawe Branch Office,
Marine Office
Arun LNG Plant Site, Blang Lancang
Lhokseumawe, Aceh – 24352

Port Lhokseumawe

Kantor Pertamina (Persero) | Office
Jl. Samudera No. 1 – 2
Hagu Tengah, Kec. Banda Sakti, Kota
Lhokseumawe
Hagu Tengah, Banda Sakti District,
Lhokseumawe City

Port Pangkalan Susu

Terminal LPG Pangkalan Susu
Kantor Marine)
Jl. Samusera No. 82, Pangkalan Susu,
Langkat, Sumatera Utara
Terminal LPG Pangkalan Susu
(Marine Office)

Port Gunungsitoli

PT Pertamina Trans Kontinental
Jl. Pelud Binaka
Kec. Gunungsitoli Idanoi, Nias,
Sumatera Utara – 22871
Gunungsitoli Idanoi District, Nias, North
Sumatera – 22871

Port Sibolga

PT Pertamina Trans Kontinental
Jl. Janggi No. 17
Kel. Pasar Belakang, Sibolga,
Sumatera Utara – 22523
Pasar Belakang Sub-district, Sibolga,
North Sumatera – 22523

Port Belawan / Kuala Namu

PT Pertamina Trans Kontinental
Jl. Minyak No. 1
Belawan, Medah, Sumatera Utara
Belawan, Medah, North Sumatera

Port Teluk Kabung

Pertamina Integrated Terminal Teluk
Kabung
Jl. Raya Padang-Painan KM 24
Bungkus Teluk Kabung, Kota Padang,
Sumatera Barat
Bungkus Teluk Kabung, Padang City,
West Sumatera

Port Sei Siak

PT Pertamina Patra Niaga
Jl. Tanjung Datuk Ujung No. 348

Port Tembilahan

PT Pertamina Trans Kontinental, Fuel
Terminal Tembilahan
Kampung Kesayangan, Kel. Seberang
Tembilahan
Kec. Tembilahan, Kab. Indragiri Hilir,
Riau
Kampung Kesayangan, Seberang
Tembilahan Sub-district
Tembilahan District, Indragiri Hilir
Regency, Riau

Port Dumai

PT Pertamina (Persero) Marine Region I
Jl. Sultan Syarif Kasim No. 262
Dumai, Riau – 28811

Port Sei Pakning

PT. Pertamina Trans Kontinental
Marine
Jl. Jendral Sudirman Sungai Pakning
(Depan Koramil) – 28761
Jl. Jendral Sudirman Sungai Pakning
(In front of Koramil) – 28761

Port Pulau Sambu

Pertamina Fuel Terminal Pulau Sambu
Kel. Tanjung Sari, Kec. Belakang
Padang, Kota Batam – 29416
Tanjung Sari Sub-district, Belakang
Padang District, Batam City – 29416

Port Batam

Jl Raya Pelabuhan Kabil, Batam

Port Tanjung Uban

PT. Pertamina Trans Kontinental, Port
Tanjung Uban
Jl. Nusa Indah No. 01 Tanjung Uban,
Kepulauan Riau – 29152
Jl. Nusa Indah No. 01 Tanjung Uban,
Riau Islands – 29152

Port Kijang

Pertamina TBBM Kijang
Jl. Sei Walang KM. 25
Kijang Timur Kel. Kijang Kota, Kec.
Bintan Tim
Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau –
29151
Kijang Timur, Kijang Kota Sub-district,
Bintan Tim District
Bintan Regency, Riau Islands – 29151

Port Natuna (Ranai)

FT Natuna Group
Jl.DKW MOH Benteng No. 091
Ranai Natuna,Kepulauan Riau
Ranai Natuna, Riau Islands

Natuna OffShore (Tarempa)

Jl H Amar Raya No41 RT 006/008
Desa Pondok Kelapan, Duren Sawit
Pondok Kelapan Village, Duren Sawit



Port Area MBOR II

Port Surabaya

Jl. Prapat Kurung Utara No.12a
Kec. Pabean Cantikan, Surabaya,
Jawa Timur – 60165
Pabean Cantikan District, Surabaya,
East Java – 60165

Port Gresik

Jl. Pabrik Aspal – Pertamina
Sumberrejo, Puloancikan, Kec. Gresik
Kab. Gresik, Jawa Timur – 61113
Sumberrejo, Puloancikan, Gresik
District
Gresik Regency, East Java – 61113

Port Camplong

Jl. Raya Camplong KM 08
Kec. Camplong, Kabupaten Sampang,
Madura – 69281
Camplong District, Sampang
Regency, Madura – 69281

Port Tuban

Jl. Tanjung Awar-Awar
DS Remen, Kec. Jenu Tuban, Jawa
Timur – 62352
DS Remen, Jenu Tuban District, East
Java – 62352

Port Kalbut

Jl. Pelabuhan Kalbut No.1
Kec. Mangaran, Kab. Situbondo, Jawa
Timur – 68363
Mangaran District, Situbondo
Regency, East Java – 68363

Port Tanjungwangi

Jl. Gatot Subroto No.72
Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, Jawa
Timur – 68455
Kalipuro District, Banyuwangi
Regency, East Java – 68455

Port Benoa Sanggaran

Jl. Raya Pelabuhan Benoa
Denpasar Selatan, Denpasar, Bali
South Denpasar, Denpasar, Bali

Port Bima

Jl. Sultan Kaharuddin No.174
Kec. Rasanae Barat, Bima, NTB – 84111
Rasanae Barat District, Bima, NTB –
84111

Port Maumere

Jl. Nai Roa KM 04
Kec. Kangae, Maumere, NTT
Kangae District, Maumere, NTT

Port Larantuka

Jl. Trans Iarantuka Maumere
Desa Mokantarak, Kec. Larantuka, Kab.
Flores Timur, NTT
Mokantarak Village, Larantuka District,
Flores Timur Regency, NTT

Port Waingapu

Jl. Nangamesi No.07
Dermaga Baru Waingapu, Sumba
Timur, NTT
Dermaga Baru Waingapu, East
Sumba, NTT

Port Manggis

Jl. Raya Ulakan
Manggis, Karangasem, Bali – 80871

Port Reo

Jl. Pelabuhan Kedindi
Kel. Wangkung, Kec. Reo, Kab.
Manggarai Tengah, Flores, NTT
Wangkung Sub-district, Reo District,
Manggarai Tengah Regency, Flores,
NTT

Port Ende

Jl. Adi Sucipto No. 6, Ende – Flores

Port Ampenan

Jl. Yos Sudarso, Ampenan – NTB

Port Kalabahi

Jl. Slamet Riyadi No. 87. Kalabahi, Alor,
NTT

Port Atapupu

Jl. Yos Sudarso KM 01, Atapupu, Belu,
NTT

Port Badas

Jl. Garuda KM. 8
Jur. Pelabuhan Badas, Sumbawa
Besar, NTB

Port Kupang

Jl. Yos Sudarso No.01, Tenau Kupang,
NTT

Port Jakarta

Pertamina Marine Region III
Jl. Jamea No.1 (Seberang Pertamina
Lubricant)
Koja, Jakarta Utara – 14210
Jl. Jamea No.1 (Across Pertamina
Lubricant)
Koja, North Jakarta – 14210

Port Cilacap

PT Pertamina Trans Kontinental
Port Cilacap
Jl. Achmad Yani No. 5 & 7
Tambakreja, Cilacap Selatan – 53213
Jl. Achmad Yani No. 5 & 7
Tambakreja, South Cilacap – 53213

Port Balongan

Marine Region II Balongan, PT
Pertamina RU VI Balongan
Jl. Raya Balongan KM 9, Indramayu –
45217

Port Semarang

TBBM Semarang Group
Jl. Pengapon No. 14, Semarang, Jawa
Tengah 50128
Jl. Pengapon No. 14, Semarang, Central
Java 50128

Tg. Gerem

Jl. Laksamana RE Martadinata No. 50
Gerem, Kec. Grogol, Kota Cilegon,
Banten – 42438
Gerem, Grogol District, Cilegon City,
Banten – 42438

Tg. Sekong

Jl. Yos Sudarso Link Baru I/II
Kantor Terminal LPG Tanjung Sekong
Kel. Lebakgede, Kec. Pulomerak, Kota
Cilegon, Banten – 42431
Terminal LPG Tanjung Sekong Office
Lebakgede Sub-district, Pulomerak
District, Cilegon City, Banten – 42431

Port Area MBOR III

Port Biak

PT Pertamina (Persero) Fuel Terminal Biak
Jl. Jenderal Sudirman No.110
Waupnor, Biak – 98112

Port Bula

PT Pertamina (Persero) Fuel Terminal Bula
Jl. Airpot Tansi Ambon
Kec. Bula, Kab. Seram Bagian Timur – 97555
Bula District, Seram Bagian Timur Regency – 97555

Port Dobo

PT Pertamina (Persero) Fuel Terminal Dobo
Jl. Wamar Dobo
Desa Durdjela, Kec. Pulau-Pulau Aru, Kab. Kepulauan Aru, Maluku – 97662

Port Fak-Fak

PT Pertamina (Persero) Fuel Terminal Fak-Fak
Jl. Tanjung Kiat
Kampung Sekru Tuare, Distrik Pariwari, Kab. Fakfak, Papua Barat – 98611
West Papua – 98611

Port Jayapura

PT Pertamina (Persero) Fuel Terminal Jayapura
Jl. Sei Musi 2 – 4
Kel. Imbi, Kec. Jayapura Utara, Kota Jayapura, Papua – 99116
Jayapura City, Papua – 99116

Kaimana

PT Pertamina (Persero) Fuel Terminal Kaimana
Jl. Utarom Kaki Air Kecil Kaimana
Kel. Kaimana Kota, Kec. Kaimana, Kab. Kaimana, Papua Barat – 98654
West Papua – 98654

Kasim

PT Pertamina (Persero) RU VII Kasim
Jl. Ahmad Yani No 3
Kelurahan Klaligi, Kec. Sorong Kota Sorong – 98413
Klaligi Sub-district, Sorong District, Sorong City – 98413

Labuha

PT Pertamina (Persero) Fuel Terminal Labuha
Jln. Pertamina – Babang No 178
Kec. Bacan Timur, Kab. Halmahera Selatan, Maluku Utara – 97791
Bacan Timur District, Halmahera Selatan Regency, North Maluku – 97791

Manokwari

PT Pertamina (Persero) Fuel Terminal Manokwari
Jl. Trikora Wosi 102
Kec. Manokwari Barat, Kab. Manokwari, Papua Barat – 98321
Manokwari Barat District, Manokwari Regency, West Papua – 98321

Masohi

PT Pertamina (Persero) Fuel Terminal Masohi
Jl. Kapitan Pattimura No. 433
Kelurahan Ampera, Kec. Kota Masohi, Kab. Maluku Tengah – 97513
Ampera Sub-district, Kota Masohi District, Maluku Tengah Regency – 97513

Merauke

PT Pertamina (Persero) Fuel Terminal Merauke
Jl. Gudang Arang No 53
Kelurahan Kamahedoga, Kec. Merauke, Kab. Merauke, Papua – 99613
Kamahedoga Sub-district, Merauke District, Merauke Regency, Papua – 99613

Nabire

PT Pertamina (Persero) Fuel Terminal Nabire
Jl. Frans Kaisiepo
Kelurahan Nabarua, Kab. Nabire – 98817
Nabarua Sub-district, Nabire Regency – 98817

Namlea

PT Pertamina (Persero) Fuel Terminal Namlea
Jl. Pohon durian No.1
Namlea Kabupaten Buru, Maluku – 97571

Sanana

PT Pertamina (Persero) Fuel Terminal Sanana
Jl. Waikolopa No.1
Sanana, Kec. Sanana Utara, Kab. Kepulauan Sula – 97795
Sanana, Sanana Utara District, Kepulauan Sula Regency – 97795

Saumlaki

PT Pertamina (Persero) Fuel Terminal Saumlaki
Jalan Olilit Baru
Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Kepulauan Tanimbar – 97664
Tanimbar Selatan District, Kepulauan Tanimbar Regency – 97664

Serui

PT Pertamina (Persero) Fuel Terminal Serui
Jln. Pertamina No. 01
Desa Banawa, Kelurahan Tarau, Kec. Yapen Selatan, Kab. Yapen, Papua – 98211
Banawa Village, Tarau Sub-district, Yapen Selatan District, Yapen Regency, Papua – 98211

Sorong

PT Pertamina (Persero) Fuel Terminal Sorong
Jl. Ahmad Yani No 3
Kelurahan Klaligi, Kec. Sorong, Kota Sorong – 98413
Klaligi Sub-district, Sorong District, Sorong City – 98413

Ternate

PT Pertamina (Persero) Fuel Ternate
Jl Pertamina Jambula
Kelurahan Jambula, Kec. Kota Ternate, Maluku Utara – 97751
Jambula Sub-district, Kota Ternate District, North Maluku – 97751

Timika

PT Pertamina (Persero) Jobber Timika
Jl. Poros Pelabuhan Pomako
Timika/Mimika Baru, Papua – 99952

Tobelo

PT Pertamina (Persero) Fuel Terminal Tobelo
Jl. Kuda Laut Kupa-kupa, Kec. Tobelo Selatan – 97762
Jl. Kuda Laut Kupa-kupa, Tobelo Selatan District – 97762

Tual

PT Pertamina (Persero) Fuel Terminal Tual
Jl. Yos Sudarso
Kota Tual, Kec. Pulau Dullah Selatan – 97613
Tual City, Pulau Dullah Selatan District – 97613

Wayame

PT Pertamina (Persero) Fuel Terminal Wayame
Jl. Ir. M. Putuhena KM. 24, Wayame, Ambon – 97234

Bontang

PT Pertamina Trans Kontinental
Jl. Selat Bone RT 21 No. 29
Kel. Tanjung Laut, Kec. Bontang Selatan – 75321
Tanjung Laut Sub-district, Bontang Selatan District – 75321



Kotabaru

Pertamina TBBM Kotabaru
Jl. H. Hasan Basri KM. 4,5
Kec. Pulau Laut Utara, Kab. Kotabaru,
Kalimantan Selatan – 72117
South Kalimantan – 72117

Banjarmasin

Pertamina TBBM Banjarmasin
Jl. Kuin Selatan No. 01
Banjarmasin Barat, Kuin Cerucuk, Kec.
Banjarmasin Barat
Kota Banjarmasin, Kalimantan
Selatan – 70129
Banjarmasin City, South Kalimantan
– 70129

Samarinda

Pertamina TBBM Samarinda
Jl. Cendana, Tlk. Lerong Ulu
Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda,
Kalimantan Timur – 75127
Samarinda City, East Kalimantan –
75127

Pontianak

Pertamina TBBM Pontianak
Jl. Khatulistiwa No. 282
Kel. Siantan Jilir, Kec. Pontianak Utara
– 78243

Sampit

Pertamina TBBM Sampit
Jl. Muchran Ali No. 24
Kel. Baamang Hulu Kotawaringin
Timur, Kalimantan Tengah – 74313
Central Kalimantan – 74313

Tarakan

Pertamina TBBM Tarakan
Jl. Yos Sudarso No. 15
Kelurahan Lingkas Ujung Tarakan
Kaltara, Tarakan Timur Kota Tarakan,
Kalimantan Utara – 77126
Tarakan City,
North Kalimantan – 77126

Pangkalan Bun

PT Pertamina TBBM Pangkalan Bun
Jl. Swadaya No. 01 Sei
Kapitan Kumai, Kalimantan Tengah
Central Kalimantan

Sintang

Pertamina TBBM Sintang
Jl. MT. Haryono No. 1
Kel. Kapuas Kanan Hulu, Kec. Sintang,
Kab. Sintang – 78614

Banggai

PT Pertamina (Persero) TBBM Banggai
Jl. Keramat No. 29
Kec. Banggai, Banggai Laut, Sulawesi
Tengah
Central Sulawesi

Palopo

PT Pertamina (Persero) TBBM Palopo
Jl. Pantai Desa Karang Karang, Kab.
Luwu, Sulawesi Selatan
Jl. Pantai Desa Karang Karang,
Luwu Regency, South Sulawesi

Kolaka

PT Pertamina (Persero) TBBM Kolaka
Jl. Abadi No. 261
Kel. Kolakaasi, Kec. Latambaga, Kab.
Kolaka, Sulawesi Tenggara – 93512
Kolakaasi Sub-district, Latambaga
District, Kolaka Regency, Southeast
Sulawesi – 93512

Toli-Toli

PT Pertamina (Persero) TBBM Toli Toli
Jl. Batu Bangga No. 27
Desa Lalos, Kec. Galang, Kab. Toli-Toli,
Sulawesi Tengah – 94561
Lalos Village, Galang District, Toli-Toli
Regency, Central Sulawesi – 94561

Kolonodale

PT Pertamina (Persero) TBBM
Kolonodale
Jl. Wolter Monginsidi No. 25
Kel. Bahoe, Kec. Petasia, Kab. Morowali
Utara, Sulawesi Tengah
Bahoe Sub-district, Petasia District,
Morowali Utara Regency, Central
Sulawesi

Raha

PT Pertamina (Persero) TBBM Raha
Jl. Merdeka No. 40 Tampo
Kec. Napabalano, Kab. Muna, Sulawesi
Tenggara
Napabalano District, Muna Regency,
Southeast Sulawesi

Tahuna

PT Pertamina (Persero) TBBM Tahuna
Jl. Tidore No. 25
Kec. Tahunatimur Ab, Kepulauan
Sangihe, Sulawesi Utara – 95815
Tahunatimur Ab District, Sangihe
Islands, North Sulawesi – 95815

Mountong

PT Pertamina (Persero) TBBM Moutong
Jl. Trans Sulawesi No. 106
Parigi Moutong, Sulawesi Tengah
Parigi Moutong, Central Sulawesi

Bau-Bau

PT Pertamina (Persero) TBBM Bau Bau
Jl. Dayanu Ikhsanuddin KM. 8
Kel. Sulaa, Kec. Betoambari, Kota Bau
Bau, Sulawesi Tenggara – 93724
Sulaa Sub-district, Betoambari
District, Bau Bau City, Southeast
Sulawesi – 93724

Donggala

PT Pertamina (Persero) TBBM
Donggala
Jl. Poros Palu Donggala, Lolioge KM. 15,
Sulawesi Tengah
Jl. Poros Palu Donggala, Lolioge KM. 15,
Central Sulawesi

Poso

PT Pertamina (Persero) TBBM Poso
Jl. Raya Kasiguncu No. 90 Poso,
Sulawesi Tengah – 94618
Jl. Raya Kasiguncu No. 90 Poso,
Central Sulawesi – 94618

Pare-Pare

PT Pertamina (Persero) TBBM Pare-
Pare
Jl. H.a.m. Arsyad No.1
Pare-Pare Sulawesi Selatan – 91132
Pare-Pare, South Sulawesi – 91132

Bitung

PT Pertamina (Persero) TBBM Bitung
Jl. Yos Sudarso No. 1 Bitung, Sulawesi
Utara
Jl. Yos Sudarso No. 1 Bitung, North
Sulawesi

Kendari

PT Pertamina (Persero) TBBM Kendari
Jl. R.E. Martadinata No. 1 Kendari,
Sulawesi Tenggara
Jl. R.E. Martadinata No. 1 Kendari,
Southeast Sulawesi

Luwuk

PT Pertamina (Persero) TBBM Luwuk
Jl. Imam Bonjol – Luwuk
Kel. Bungin Timur, Kec. Luwuk, Kab.
Banggai, Sulawesi Tengah
Bungin Timur Sub-district, Luwuk
District, Banggai Regency, Central
Sulawesi

Gorontalo

PT Pertamina (Persero) TBBM
Gorontalo
Jl. Yos Sudarso No. 06
Kel. Tenda, Kec. Hulonthalangi, Kota
Gorontalo
Tenda Sub-district, Hulonthalangi
District, Gorontalo City

Port Area Balikpapan

Kota Baru

Gedung PT Pertamina (Persero)
UPMS V | Building
Jl. Pertamina RT. 21,
Ds. Semayap, Kec. Pulau Laut Utara,
Kab. Kotabaru, Kalimantan Selatan
South Kalimantan
Phone : (0518) 23256

Kuala Sembaja

Kuala Sembaja RT. 003
Kel. Senipah, Kec. Sembaja,
Kab. Kutai Kartanegara
Kalimantan Timur
East Kalimantan
Phone : (0542) 535137

Samarinda

Jl. Dr. Sutomo 40,
Kel. Sanga-Sanga Dalam
Kec. Sanga-Sanga,
Kab. Kutai Kartanegara
Kalimantan Timur
East Kalimantan
Phone : (0541) 671300
Fax. : (0541) 671487

Tanjung Santan

Komp. Chevron Santan Terminal RT. XI,
Desa Semangko, Kec. Marang Kayu,
Kab. Kutai Kartanegara
Kalimantan Timur
East Kalimantan
Phone : (0542) 548275
Fax. : (0542) 548278

Tarakan

Jl. Kesuma Bangsa
RT. 04/RW. 03, Kel. Lungkas Ujung
Kec. Tarakan Timur
Tarakan, Kalimantan Timur
East Kalimantan

Port Area Batam

Pulau Sambu

Pertamina Pulau Sambu
RT. 01/RW. 06, Kel. Tanjung Sari
Kec. Belakang Padang
Batam

Tarempa

Ds. Payamaran RT. 07/RW. 01,
Kec. Palmatak, Kab. Kepri Anabas,
Kep. Riau
Riau Islands

Tanjung Uban

Jl. Hang Tuah No.24 RT. 001/RW. 007,
Kel. Tanjung Uban, Kec. Bintan Utara,
Kab. Bintan, Kep. Riau
Bintan Regency, Riau Islands

Port Area Makassar

Bau-Bau

Jl. Dayanu Ikhsanuddin KM. 8,
Kel. Sulla, Kec. Betoambari,
Bau-Bau, Sulawesi Utara
North Sulawesi

Kolonodale

Jl. Wolter Mongonsidi No. 25,
Kolonodale, Sulawesi Tengah
Central Sulawesi
Phone : (0518) 21624

Port Area Belawan

Arun Lhokseumawe

2nd Floor Marine Offline
PT. Arun NGL Blang Lancang,
Lhokseumawe NAD
Phone : (0645) 654248
Fax. : (0645) 654165

Port Area Dumai

Sei Pakning

Gd. Marine Jasra Pertamina (Persero)
- UPMS II
Jl. Jend. Sudirman, Sei Pakning 28761
Phone : (0766) 91112
Fax. : (0766) 91112

Port Area Cilacap

Semarang

Mangunharjo RT. 002/RW. 003,
Kel. Mangunharjo, Kec. Tugu,
Semarang

Port Area Sorong

Bintuni

Bintuni, Babo, Irian Jaya Barat
Bintuni, Babo, West Irian Jaya

Bula - Seram Timur

Kantor Wilayah Kerja Pelabuhan Bula
Jl. Lumba-Lumba RT. 002/RW. 001,
Kel. Bula, Seram Timur
Bula Port Working Area Office
Jl. Lumba-Lumba RT. 002/RW. 001,
Bula Sub-district, Seram Timur

Wayame

Jl. Ir. M Putuhena RT. 006/RW. 003,
Ds. Wayame, Kec. Teluk Ambon,
Wayame Village, Teluk Ambon District,
Ambon, Maluku
Phone : (0911) 310087
Fax. : (0911) 346155

Port Area Tanjung Priok

Merak

Jl. Pulorida Kav. M 90-92,
Tanjung Sekong, Merak, Banten
Phone : (0254) 571617, 571178
Fax. : (0254) 571617

Balongan

Jl. Kerang A8, Komplek Pertamina EP,
Jl. Kerang A8, Pertamina EP Complex,
Balongan, Indramayu
Phone : (0234) 4288888

Cirebon

Jl. Sawo 1 C No. 46A,
Komperta, Klayon, Cirebon
Phone : (0231) 211691
Fax. : (0231) 211691

Port Area Surabaya

Tuban

Jl. Tanjung Awar-Awar No. 10, RT. 02/
RW. 01,
Dusun Boro, Ds. Tasik Harjo, Kec. Jenu,
Tuban
Boro Sub-village, Tasik Harjo Village,
Jenu District, Tuban

Gresik

Jl. Yos Sudarso No. 01, RT. 002/RW. 004,
Kel. Bedilan, Gresik, Jawa Timur
Bedilan Sub-district, Gresik, East Java
Phone : (031) 3282057

Telaga Biru

Jl. Raya Pelabuhan No. 60,
Bangkalan, Madura
Phone : (031) 3071229

Situbondo

Jl. Raya Pelabuhan No. 1,
Kalbut, Situbondo
Phone : (0338) 675141

Tanjung Wangi

Jl. Raya Situbondo No. 8A,
Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi
Kalipuro District, Banyuwangi Regency
Phone : (031) 3282057
Fax. : (031) 3299113

Port Area Plaju-Palembang

Jambi

Jl. Yos Sudarso No. 36, Kasang, Jambi
Phone : (0741) 31623
Fax. : (0741) 7552186



Kronologis Pencatatan Saham

Chronology of Share Listing

Sampai dengan 31 Desember 2024, PTK tidak menerbitkan saham sehingga tidak terdapat informasi terkait tahun penerbitan saham, jumlah saham, nilai nominal saham, dan harga penawaran saham untuk masing-masing tindakan korporasi (*corporate action*), jumlah saham tercatat setelah masing-masing tindakan korporasi (*corporate action*), dan nama bursa dimana saham perusahaan dicatatkan.

Until December 31, 2024, PTK did not issue any shares. Therefore, there is no information regarding the year of share issuance, number of shares, nominal value of shares, and share offering price for each corporate action, number of shares listed after each corporate action, and the name of the exchange where the Company's shares are listed.

Kronologis Pencatatan Efek Lainnya

Chronology of Other Securities Listing

Sampai dengan 31 Desember 2024, PTK tidak menerbitkan efek sehingga tidak terdapat informasi terkait nama efek, tahun penerbitan efek, tingkat bunga/imbalan efek lainnya, dan tanggal jatuh tempo efek, nilai penawaran efek, nama bursa dimana efek lainnya dicatatkan, dan peringkat efek

As of December 31, 2024, PTK did not issue any securities. Therefore, there is no information regarding the name of the securities, the year of issuance of the securities, the interest rate/other securities yield, the maturity date of the securities, the offering value of the securities, the name of the exchange where the other securities are listed, and the rating of the securities.



Informasi Website Perusahaan Information on Company Website

PTK menyediakan informasi bagi publik yang senantiasa dimutakhirkan secara berkala melalui sejumlah media diantaranya *website* Perusahaan. Situs *website* PTK dapat diakses di <https://www.pertamina-ptk.com>. Informasi dan data PTK yang dipublikasikan di *website* Perusahaan mengacu pada Surat Keputusan Direksi Tentang Kebijakan Pengelolaan Informasi, Data, dan Dokumen.

Website PTK dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat luas. Informasi pada *website* PTK sebagian besar tersedia dalam Bahasa Indonesia dan beberapa menggunakan Bahasa Inggris antara lain mencakup:

1. **Tentang PTK** terdiri dari informasi mengenai; Gambaran Perusahaan; Visi, Misi & Nilai; Sejarah; Tata Kelola Perusahaan; Manajemen Puncak;
2. **Keberlanjutan** terdiri dari informasi mengenai *Health, Safety, Security and Environment*; Tanggung Jawab Sosial Lingkungan;
3. **Bisnis PTK** terdiri dari informasi mengenai Kompetensi Inti; Aktivitas Bisnis; Wilayah Operasi; Armada;
4. **Stakeholder** terdiri dari informasi mengenai Laporan Tahunan; Laporan Keberlanjutan; Laporan Keuangan; Penghargaan & Sertifikasi;
5. **Berita & Media** terdiri dari informasi Rilis Berita; Galeri;
6. **Kontak** terdiri dari informasi mengenai Kantor Pusat; Region; Anak Perusahaan; Pertamina clean;

PTK provides information to the public that is updated regularly through several media, including the Company's website. PTK's website can be accessed at <https://www.pertamina-ptk.com>. PTK information and data published on the Company's website refers to the Decree of the Board of Directors regarding Information, Data, and Document Management Policy.

PTK's website can be easily accessed by the public. Information on the PTK website is mostly available in Bahasa Indonesia and some in English, including:

1. **About PTK** consists of information on Company Overview; Vision, Mission & Values; History; Corporate Governance; Top management;
2. **Sustainability** consists of information on Health, Safety, Security and Environment; Social and Environmental Responsibility;
3. **PTK Business** consists of information on Core Competencies; Business Activities; Operational Area; Fleet;
4. **Stakeholders** consists of information on Annual Report; Sustainability Report; Financial Statements; Awards & Certifications;
5. **News & Media** consists of information on News Releases; Gallery;
6. **Contact** consists of information on Head Office; Regions; Subsidiaries; Pertamina Clean.





04



PERTAMINA
TRANS KONTINENTAL

Tinjauan Pendukung Bisnis

Business Support Review



Sumber Daya Manusia

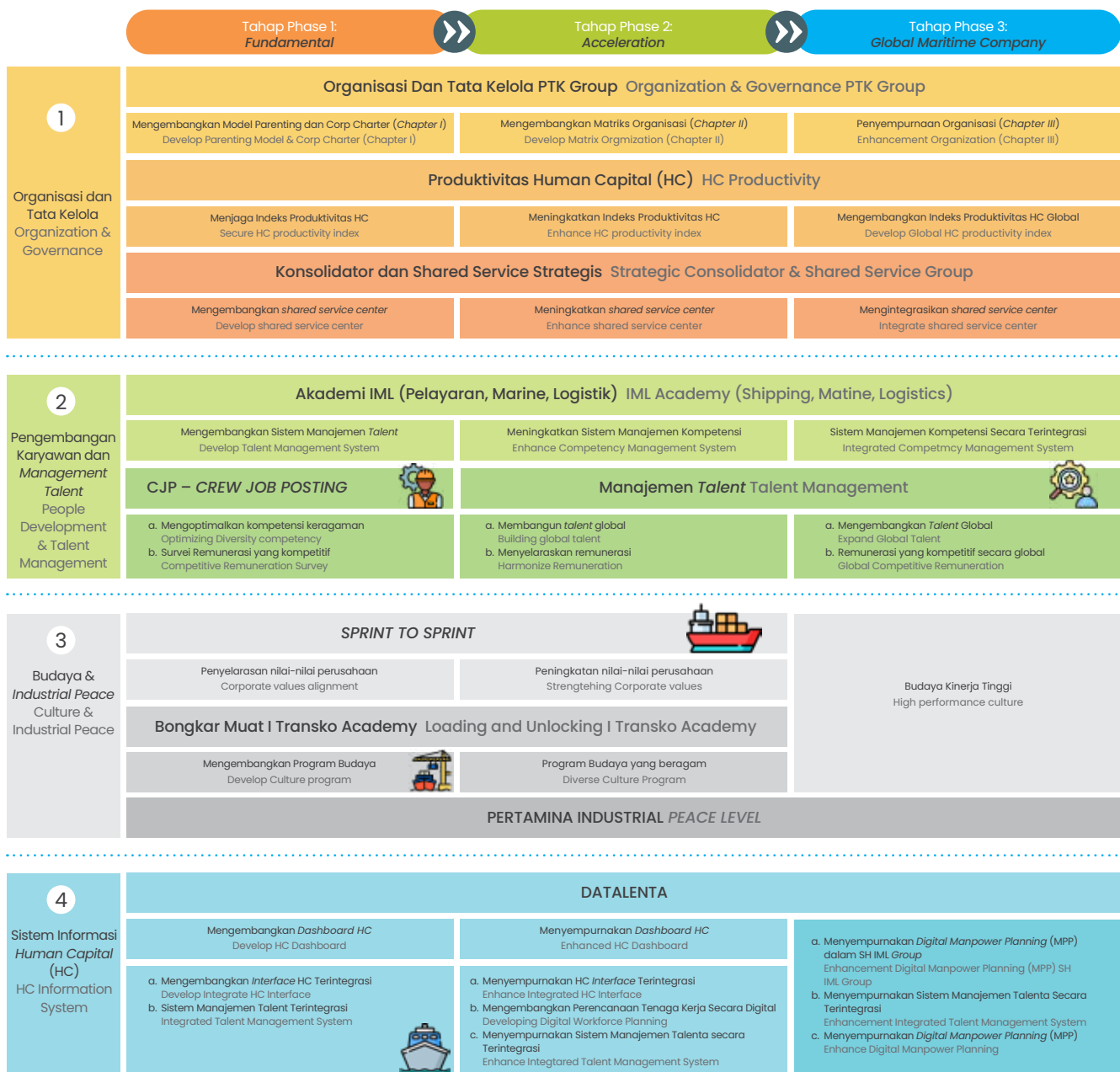
Human Capital

Peta Jalan Pengelolaan SDM

Human Capital Management Roadmap

Peta jalan (*road map*) pengembangan SDM mengacu kepada visi PTK 2026 menjadi perusahaan global yang kompetitif pada lini bisnisnya. Secara bertahap, berikut fokus Fungsi Human Capital secara bertahap.

HC development roadmap refers to vision of PTK 2026 to become a competitive global company in its business line. The following is the focus of the Human Capital Function gradually.



2022–2023: Strengthening Fundamentals

2022–2023: Strengthening Fundamentals

Fokus Fungsi *Human Capital* dalam melakukan penetapan organisasi sesuai dengan klusterisasi bisnis PTK Group beserta konsekuensi variabel kelengkapannya (matriks RASCI dan uraian jabatan) akan menjadi perhatian pada tahun 2022 dan 2023. Penyelarasan kebijakan remunerasi untuk memenuhi sisi *compliance* standar Pertamina dan penguatan matriks kompetensi akan dilanjutkan agar sesuai dengan kebutuhan dan tantangan bisnis.

Peningkatan produktivitas melalui pendekatan kultur yang tepat akan didorong oleh pengembangan penerapan sistem pengelolaan SDM yang lebih baik. *Tool Human Capital Analytics* dan *Career Mapping* akan menjadi sentral perbaikan berkesinambungan yang sehubungan dengan performance organisasi dan pengelolaan talenta. Hal ini ditopang juga oleh kampanye intensif terkait kultur kolaboratif antar fungsi untuk mempertinggi resultan pencapaian perusahaan.

In 2022–2023, PTK gave a great attention on Human Capital Function focus in determining the organization according to PTK Group business cluster along with the consequences of its completeness variables (RASCI matrix and job descriptions). Adjustment on the remuneration policies to meet the compliance side of Pertamina standards and strengthening the competency matrix will be continued to suit business needs and challenges.

Productivity improvement through the right cultural approach will be driven by the development of a better HC management system. The Human Capital Analytics and Career Mapping tools will be the central to continuous improvement related to organizational performance and talent management. This is also supported by an intensive campaign related to collaborative culture among functions to increase achievement results of the Company.

2024–2025: Acceleration

2024–2025: Acceleration

Untuk mempersiapkan pekerja PTK dalam menghadapi perluasan bisnis perusahaan, akan dilakukan pengukuran kompetensi secara bertahap untuk dapat memantau tingkat kompetensi pekerja. Hasil *assessment* akan menjadi material penyesuaian matriks kompetensi. Melalui usaha penyempurnaan layanan berupa penguatan sistem operasional SDM, pemberdayaan *human capital tools*, serta menjadi *culture champion*, diharapkan manajemen Fungsi *Human Capital* dapat proaktif dalam memberikan *insight* dan solusi atas tantangan yang dihadapi perusahaan.

Melalui perkembangan inkremental pada tahun-tahun sebelumnya praktek SDM PTK diharapkan menjadi *center of excellence* sebagai pusat keunggulan pengelolaan SDM di SH IML maupun di Pertamina Group. Selaras dengan perkembangan dan rencana bisnis PTK, evaluasi struktur organisasi perusahaan akan kembali dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi.

To prepare PTK employees in facing business expansion of the Company, PTK carried out competency measurements in stages to be able to monitor the level of worker competency. The assessment results will be the material for adjusting the competency matrix. Through service improvement efforts in the form of strengthening HC operational system, empowering human capital tools, and becoming a culture champion, it is expected that Human Capital Function management can be proactive in providing insight and solutions to the challenges faced by the Company.

Through gradual developments in the previous years, PTK HC practices are expected to become a center of excellence in HR management at SH IML and at Pertamina Group. In line with PTK development and business plan, the Company evaluated its organizational structure to improve the effectiveness and efficiency of the organization.



2026–2027 Onwards: Towards Global Maritime Company

2026–2027 Onwards: Towards Global Maritime Company

Kelincahan organisasi harus dapat mengimbangi laju bisnis perusahaan yang sedang dalam masa perluasan jangkauan bisnis. Fungsi *Human Capital* berencana akan melakukan *improvement* organisasi untuk mengatasi permasalahan yang muncul terkait hal ini. Sebagai perusahaan global, struktur remunerasi & *benefit* akan tetap dijaga kompetitif dan menjadi salah satu strategi penting dalam *employee retention*. Pembaharuan fundamental matriks kompetensi dan *career mapping* untuk ketahanan organisasi dalam tantangan global akan menjadi perhatian utama dalam menyambut tantangan bisnis global.

Organizational agility must be able to keep up with the business pace of the Company which is currently in a period of expanding the business reach. The Human Capital Function plans to make organizational improvements to overcome the arising issues related to this. As a global company, the remuneration & benefit structure will remain competitive and become one of the important strategies in employee retention. Fundamental updates to the competency matrix and career mapping for organizational resilience in global challenges will be a major concern in welcoming global business challenges.

Profil dan Komposisi Pekerja

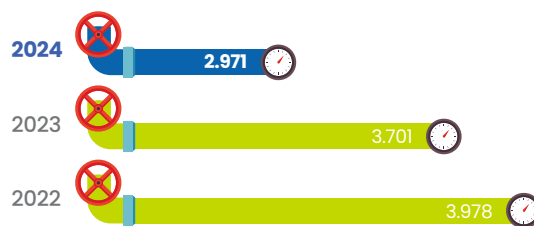
Employee Profile and Composition

Hingga 31 Desember 2024, jumlah pekerja PTK mencapai 2,971 orang, yaitu mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2023 sebanyak 3.701 orang. Hal ini dipengaruhi oleh restrukturisasi organisasi dimana sesuai dengan klusterisasi bisnis, beberapa formasi organisasi berpindah ke Anak Perusahaan.

As of December 31, 2024, total PTK employees reached 2,971 persons, decreased if compared to 2023 of 3,701 persons. This is influenced by organizational restructuring where according to business clustering, several organizational formations moved to the Subsidiaries.

Grafik Jumlah Pekerja (Orang)

Graph of Total Workers (persons)



Informasi lebih lanjut mengenai komposisi pekerja telah disampaikan pada bagian Profil Perusahaan

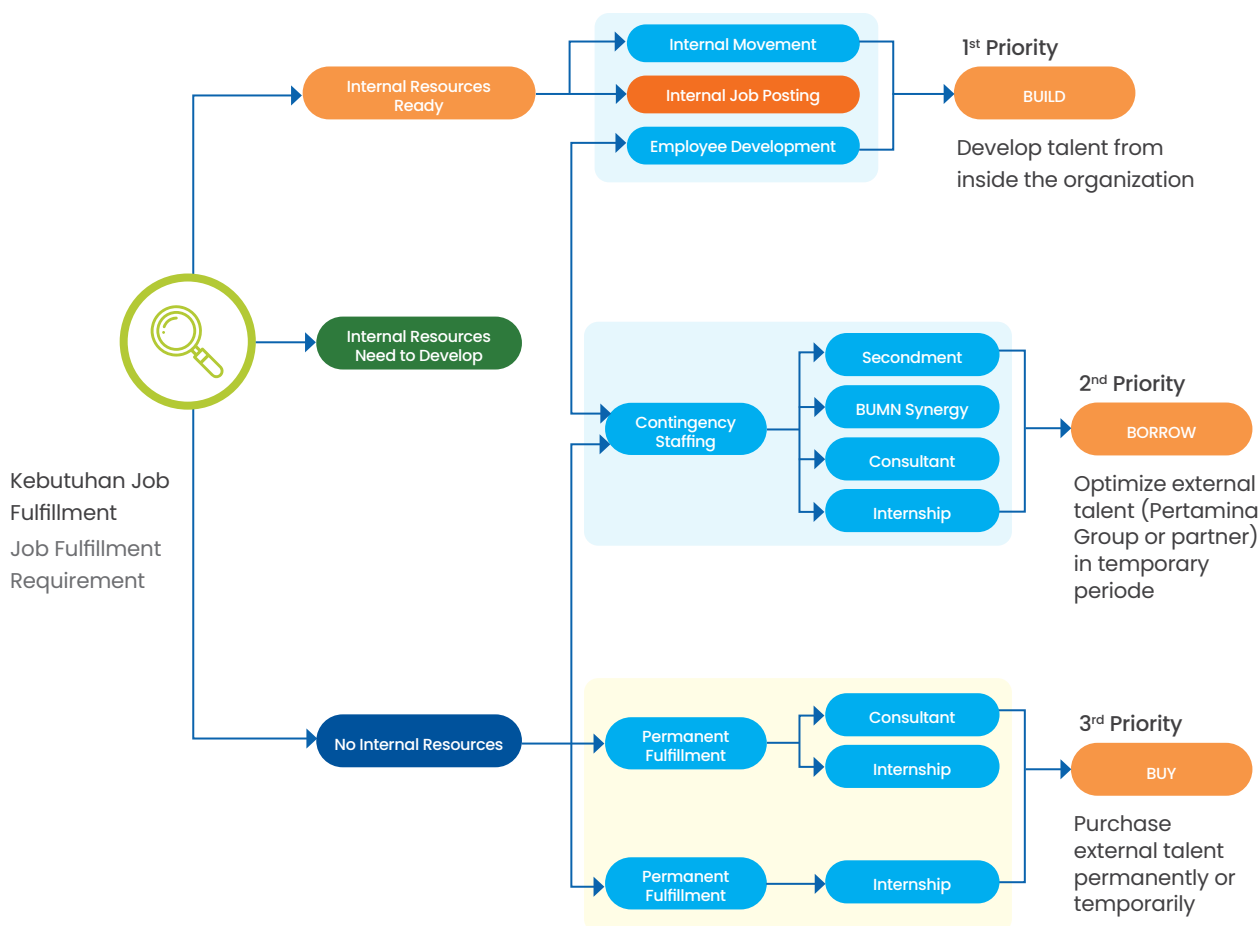
Further information regarding the composition of the workforce is available in the Company Profile section.

Perencanaan Tenaga Kerja Manpower Planning

Perencanaan tenaga kerja setiap tahunnya dievaluasi sesuai kebutuhan organisasi dan perkembangan bisnis perusahaan. Terdapat 3 (tiga) strategi pemenuhan tenaga kerja yang diterapkan. Pertama, melalui pengembangan *talent* dari internal organisasi (*build*); kedua, melalui mekanisme perbantuan baik dari lingkup Pertamina Group maupun BUMN lainnya (*borrow*); ketiga, melalui mekanisme rekrutmen pekerja waktu tidak tertentu (PWTT) baik secara *fresh graduate*, *experienced hire*, maupun rekrutmen pekerja waktu tertentu (PWT).

PTK evaluates the manpower planning annually according following the organization needs and business development of the Company. PTK applies 3 (three) strategies for fulfilling the workforce. First, through talent development from within the organization (*build*); second, through assistance mechanisms both from within the Pertamina Group and other SOEs (*borrow*); third, through an indefinite-term worker recruitment mechanism (PWTT) either through fresh graduates, experienced hires, or specific-term worker recruitment (PWT).

Strategi Perencanaan Tenaga Kerja Manpower Planning Strategy



Jumlah pekerja pada tahun 2024 telah dinilai cukup dan memadai sesuai dengan kebutuhan Perusahaan. *Vacancy rate* PTK tahun 2024 berada di angka 10.79%, namun secara konsolidasi dengan Anak Perusahaan tingkat *vacancy* berada di angka 18%. Realisasi ini masih diatas kebijakan PT Pertamina (Persero) dan Subholding Integrated Marine Logistics (SH IML) yang mengharapkan agar *vacancy rate* dioptimalkan pada angka 10% baik dalam tingkat SH IML maupun Holding.

Dalam rangka mengoptimalkan *vacancy rate* tersebut, selain peningkatan kapabilitas talent untuk mendukung program *succession planning*, PTK dan SH IML juga membuka program rekrutmen baik melalui Pertamina maupun Rekrutmen Bersama BUMN.

Tingkat keterisian formasi organisasi PTK per Desember 2024 yaitu 248 posisi dari 278 posisi (89,21%). Terdiri atas 169 pekerja PWTT *Direct Hire* PTK dan 79 pekerja PWTT Perbantuan Pertamina Grup. Namun masih terdapat 30 posisi *vacant*, posisi *vacant* tersebut juga disupport oleh 14 PWT *Direct Hire* PTK dan 8 TAD Expert. Dalam rangka penguatan organisasi untuk mendukung perubahan bisnis dan organisasi sesuai reklasterisasi bisnis serta reorganisasi, pada tahun 2024 PTK melakukan rekrutmen pekerja baru sebanyak 41 pekerja baru meningkat dari tahun 2023 yang sebanyak 13 pekerja.

Total employees in 2024 has been considered sufficient and adequate according to the Company needs. 2024 vacancy rate in PTK is at 10.79%, but in consolidation with Subsidiaries the vacancy rate is at 18%. This realization is still above the policy of PT Pertamina (Persero) and Subholding Integrated Marine Logistics (SH IML) which expects the vacancy rate to be optimized at 10% both at the SH IML and Holding levels.

In order to optimize the vacancy rate, more than increasing talent capabilities to support the succession planning program, PTK and SH IML also open recruitment programs through Pertamina and Joint SOEs Recruitment.

As of December 2024, occupancy rate of PTK organizational formations is 248 positions out of 278 positions (89.21%). Consisting of 169 PWTT Direct Hire PTK workers and 79 PWTT Assistance by Pertamina Group workers. However, there are still 30 vacant positions, these vacant positions are also supported by 14 PWT Direct Hire PTK and 8 TAD Experts. In order to strengthen the organization to support business and organizational changes according to business reclustering and reorganization, PTK recruited 41 new employees in 2024, an increase from 2023 which was 13 employees.

Tabel Jumlah Pekerja Baru

Table of Total New Employees

(orang, kecuali dinyatakan lain) (person, unless otherwise stated)

Uraian Description	2024	2023	2022	Kenaikan (Penurunan) 2023-2024 Increase (Decrease) 2023-2024	
				Selisih Difference	Persentase Percentage
Laki-laki Male	30	8	-	22	275,00%
Perempuan Female	11	5	-	6	120,00%
Jumlah Pekerja Total Employees	41	13	-	28	215,38%

Selain program rekrutmen reguler, PTK dan SH IML menyelenggarakan program **Crew Talent Mobility** (CTM) yaitu program pemberdayaan *talent* pekerja laut di lingkungan SH IML untuk dapat mengisi kebutuhan jabatan di darat yang memerlukan kompetensi Marine & Shipping Management. Program ini cukup optimal dalam membantu mengoptimalkan *vacancy rate*. Pada tahun 2024 yang merupakan periode kedua program CTM, realisasi penyerapan jabatan vacant terealisasi sebanyak 11 dari total 15 formasi yang dibuka (*success rate* sebesar 73%). Sementara pada tahun 2023, realisasi penyerapan jabatan vacant melalui CTM mencapai 81% (21 dari 26 formasi).

Penyelenggaraan program ini dievaluasi setiap tahun dan dibuka sesuai dengan kebutuhan organisasi.

More than regular recruitment program, PTK and SH IML organize the Crew Talent Mobility (CTM) program, which is a program to empower marine worker talents within SH IML to be able to fill the positions needs on land that require Marine & Shipping Management competencies. This program is quite optimal in helping to optimize the vacancy rate. In 2024, which is the second period of the CTM program, the realization of vacant position absorption was realized reached 11 out of a total of 15 formations opened (*success rate* of 73%). While in 2023, the realization of vacant position absorption through CTM reached 81% (21 out of 26 formations).

PTK evaluates this program implementation annually and opens it according to the organization needs.

Tingkat *Turnover* Pekerja

Employee Turnover Rate

Tingkat *turnover* pekerja pada tahun 2024 adalah sebesar 0,57%, yaitu mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023 sebesar 0,27%. *Turnover* pekerja yang terjadi pada tahun 2024 tidak berpengaruh pada kelancaran pelaksanaan operasional Perusahaan.

Employee turnover rate in 2024 was 0.57%, which increased compared to 2023 by 0.27%. Employee turnover that occurred in 2024 did not affect the smooth operations of the Company.

Tabel Jumlah *Turnover* Pekerja

Table of Employee Turnover

(orang, kecuali dinyatakan lain) (person, unless otherwise stated)

Uraian Description	2024	2023	2022	Kenaikan (Penurunan) 2023-2024 Increase (Decrease) 2023-2024	
				Selisih Difference	Persentase Percentage
Jumlah Pekerja Total Employees	2.971	3.701	3.978	(730)	(19,72)%
Pekerja Keluar Employees Out	19	10	5	9	9,00%
Turnover Pekerja Employee Turnover	0,57%	0,27%	0,13%	0,30	111,11%

Program Pengembangan Kompetensi Competency Development Program

Pemetaan Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Mapping the Needs of Competency Development

Pengembangan kompetensi untuk SDM Perusahaan ditetapkan dalam rangka memenuhi kebutuhan keterampilan tertentu, sesuai kompetensi yang diperlukan masing-masing pekerja. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, PTK memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh manajemen dan pekerja berdasarkan kebutuhan jenjang jabatannya. Berikut ini disajikan realisasi jumlah pengembangan kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan.

Competency development for the Company HC is determined in order to meet the need for certain skills, following the competencies required by each employee. In implementing competency development, PTK provides equal opportunities to all management and workers based on the needs of their position level. The following is the realization of the number of competency developments according to position level.

Tabel Pelatihan Berdasarkan Jenjang Jabatan Tahun 2024
Table of Training Based on Position Level in 2024

Uraian Description	Jumlah Pelatihan Total Training
	Realisasi Realization
Eksekutif Executive	37
Manajer dan Setara Manager and Equivalent	151
Senior Analyst/ Senior Officer dan Setara Senior Analyst/Senior Officer and Equivalent	231
Analyst/Officer dan Setara Analyst/Officer and Equivalent	187
Junior Analyst/ Junior Officer dan Setara Junior Analyst/Junior Officer and Equivalent	192

Jenis Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Types of Training and Competency Development

Secara berkesinambungan Perusahaan senantiasa meningkatkan kompetensi dan kapabilitas pekerja Perusahaan mewujudkannya dengan menyelenggarakan pelatihan bagi para pekerja. Perusahaan menyelenggarakan 2 (dua) jenis program pengembangan pekerja yang bertujuan untuk memastikan ketersediaan pekerja yang memiliki kompetensi, kemampuan serta know-how untuk menampilkan kinerja yang mendukung pencapaian strategi perusahaan.

The Company continuously improves the employees competence and capability. The Company actualizes this by organizing training for its employees. The Company organizes 2 (two) types of employees development programs purposed to ensure the availability of employees with the competence, ability and know-how to display performance that supports strategy achievement of the Company.

1. Program Pengembangan *General* (*General Program*).
Program ini ditujukan kepada seluruh Pekerja PTK dan berfokus pada pengembangan kompetensi dan keahlian pekerja guna memenuhi gap kompetensi pekerja di jabatannya saat ini.
2. Program Pengembangan *Talent* (*Talent Development*).
Program ini ditujukan kepada para *Talent/Successor* dan pekerja baru PTK dengan tujuan:
 - a. Mengembangkan dan meningkatkan kompetensi pada *talent/successor* dalam rangka menyiapkan pada *talent/successor* agar dapat menampilkan kinerja yang optimal pada jabatan yang lebih tinggi (*Talent Readiness*).
 - b. Mengembangkan dan meningkatkan kompetensi pekerja baru agar menjadi *early professional* di bidangnya serta mengidentifikasi pekerja potensial yang akan dimasukkan ke dalam *talent acceleration pool*.

1. General Development Program.
This program is purposed at the entire PTK Employees and focuses on developing employees competency and expertise in order to meet the employees competency gap in their current position.
2. Talent Development Program.
This program is purposed at Talents/Successors and new PTK employees with the following objectives:
 - a. Developing and improving talents/successors competence in order to prepare talents/successors to be able to display optimal performance in the higher positions (Talent Readiness).
 - b. Developing and improving the competence of new employees to become early professionals in their fields and identifying potential employees who will be included in the talent acceleration pool.

Technical Training Program

Technical Training Program

Pengembangan kompetensi teknis dilaksanakan dengan scope kegiatan sebagai berikut:

1. Terpenuhinya *crew* secara jumlah dan sertifikasi (COC, COP) sesuai dengan regulasi serta ketepatan waktu pemenuhannya.
 - a. Pemberdayaan *crew* PWTT.
 - b. *Sourcing* melalui *crew Agent* dengan mengutamakan sinergi bersama anak perusahaan yang bergerak dalam bisnis *crew agent*.
 - c. Merekrut pelaut-pelaut dengan mensyaratkan terpenuhinya sertifikasi sesuai regulasi serta kecakapan yang dibutuhkan dengan dituangkan ke dalam kontrak *crew agent*.
2. Penyiapan kader-kader pelaut yang terbaik untuk operasional kapal dan pemenuhan *talent management* darat dengan *background shipping* sesuai bisnis inti Perusahaan di masa yang akan datang.
3. Mempertahankan pelaut dengan memberikan sistem remunerasi menarik yang bersaing dengan industri perkapalan sejenis.

Technical competency development is carried out with the following scope of activities:

1. Crew fulfillment in terms of number and certification (COC, COP) according to regulations and the fulfillment timeliness.
 - a. Empowerment of PWTT crew.
 - b. Sourcing through crew agents by prioritizing synergy with subsidiaries engaged in the crew agent business.
 - c. Recruiting sailors by requiring certification to be fulfilled according to regulations and the skills needed as stated in the crew agent contract.
2. Preparation of the best sailor cadres for ship operations and fulfillment of land talent management with a shipping background according to core business of the Company in the future.
3. Retaining sailors by providing an attractive remuneration system that competes with similar shipping industries.



Realisasi Rata-rata Jam Pelatihan Pekerja

Average Realization of Employee Training Hours

Selama tahun 2024, PTK telah melaksanakan program pendidikan dan pelatihan pegawai dengan jumlah jam pelatihan mencapai 39.652 jam dengan rata-rata jam pelatihan mencapai 132,61 jam per pekerja. Dan jumlah peserta pelatihan pada tahun 2024 adalah sebanyak 299 pekerja.

Sedangkan pada tahun 2023 program pendidikan dan pelatihan pegawai dengan jumlah jam pelatihan mencapai 69.226 jam dengan rata-rata jam pelatihan mencapai 127,02 jam per pekerja.

During 2024, PTK organized employees education and training programs with a total of 39,652 training hours with an average of 132.61 training hours per employee. And the number of training participants in 2024 was 299 employees.

Meanwhile, in 2023, employee education and training programs with a total of 69,226 training hours with an average of 127.02 training hours per employee.

Tabel Rata-rata Jam Pelatihan

Table of Average Training Hours

Uraian Description	2024	2023
Jumlah Pekerja Total Employees	299	524
Jumlah Jam Pelatihan Total Training Hours	39.652	69.226
Rata-rata Jam Pelatihan per Pekerja (Durasi/ Pekerja) Average Training Hours per Employee (Duration/Employee)	132,61	127,02

Biaya Program Pengembangan Kompetensi Pekerja

Costs for Employee Competency Development Program

Sampai dengan akhir tahun 2024, biaya pengembangan kompetensi pekerja telah terealisasi sebesar Rp 8.579 juta, yaitu menurun (79,51%) dibandingkan tahun 2023. Hal ini dikarenakan terdapat restrukturisasi organisasi pada awal tahun 2024 yang berpengaruh pada perencanaan pelatihan pekerja. Penyelenggaraan pelatihan yang sebelumnya terpusat secara anggaran di PTK menjadi kewenangan masing-masing Anak Perusahaan. PTK hanya mengkoordinasikan penyelenggaraan kebutuhan pelatihan untuk pekerja dalam lingkungan PTK.

Until the end of 2024, PTK realized costs for employee competency development at Rp8,579 million, decreased by 79.51% compared to 2023. This was caused by an organizational restructuring in early 2024 which affected employee training planning. The implementation of training which was previously centralized in terms of budget in PTK is the authority of each Subsidiary. PTK only coordinates the implementation of training needs for employees within the PTK.

Tabel Biaya Pengembangan Kompetensi Pekerja

Table of Cost for Employee Competency Development

Uraian Description	Satuan Unit	2024	2023	2022	Kenaikan (Penurunan) 2023-2024 Increase (Decrease) 2023-2024	
					Selisih Difference	Persentase Percentage
Jumlah Pelatihan Total Trainings	pelatihan training	120	124	46	(4)	96,77%
Jumlah Peserta Total Participants	orang person	1247	3.693	1.739	(2446)	33,77%
Biaya Cost	Rp juta Rp million	8.579	10.789	1.710	(2210)	79,51%

Program Pengembangan Karir Pekerja Employee Career Development Program

Pengelolaan atau pembinaan SDM PTK menjadi bentuk investasi jangka panjang bagi Perusahaan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa Perusahaan memiliki SDM yang andal. Dalam hal pembinaan SDM, perusahaan telah menyiapkan:

1. Sistem *career path* pekerja, pembuatan *career path* tersebut bertujuan untuk mempercepat proses pencarian dan pemilihan kandidat dalam proses *Succession Planning* serta tersedianya pemimpin dan pekerja berkualitas;
2. Sistem *talent pool* sebagai salah satu alat pembinaan;
3. *Talent Management System*, merupakan inisiatif strategis fungsi HR. PTK telah mempersiapkan pembuatan penyusunan *Talent Management System*.

The Company has a long-term investment, it is management or development PTK HC. It aims to ensure that the Company has a reliable HC. In terms of HC development, the Company prepared the following:

1. Employee career path system, the creation of the career path aims to accelerate the process of searching and selecting candidates in the Succession Planning process and the availability of quality leaders and workers;
2. Talent pool system as one of the development tools;
3. Talent Management System, a strategic initiative of HC function. PTK prepared the creation of the Talent Management System.

Career Path

Dalam rangka mendorong tercapainya *high performance organization*, Perusahaan melakukan evaluasi untuk memastikan bahwa setiap jabatan telah diisi oleh pekerja yang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang sesuai. Evaluasi penempatan pekerja (*placement*) pada prinsipnya dilakukan dengan mempertimbangkan hasil asesmen pekerja melalui proses *Job Person Mapping* (JPM) serta PRL Pribadi yang merupakan refleksi dari *exposure*, pengalaman dan kapasitas pekerja.

In order to encourage the achievement of a high performance organization, the Company evaluates to ensure that each position has been filled by employees with the appropriate capacity and capabilities. Employee placement evaluation is in principle carried out by considering the results of employee assessments through the Job Person Mapping (JPM) process and Personal PRL which is a reflection of employee exposure, experience and capacity.



Perusahaan menyadari bahwa mengingat besarnya organisasi, jumlah jabatan dan populasi pekerja, serta mempertimbangkan bahwa penempatan pekerja dalam implementasi RPSDM merupakan perubahan yang sangat mendasar dibandingkan proses penempatan sebelumnya. Dengan demikian pada pelaksanaannya masih terdapat kondisi yang belum ideal, di mana tidak semua jabatan dapat diisi oleh pekerja yang sesuai/tidak ada gap dalam kapasitas dan kapabilitasnya.

Talent Pool

Sebagai bentuk komitmen perusahaan terhadap implementasi *talent management*, maka salah satu langkah awal yang dilakukan adalah mengidentifikasi dan memetakan pekerja yang masuk sebagai *Talent Pool*. Talent Pool adalah kelompok pekerja yang diidentifikasi sebagai talenta terbaik yang memenuhi kriteria *performance*/ nilai kinerja dan potensi/ kompetensi yang dipersyaratkan Perusahaan.

Pada prinsipnya *Talent Pool* digunakan perubahan untuk dasar penetapan *successor list* jabatan di PTK dan AP serta dasar penetapan program pengembangan pekerja. Sejalan dengan reorganisasi SH IML, saat ini PTK sedang menyusun *Competency-based talent pool system* PTK Group yang bertujuan untuk membantu manajemen dalam memetakan *talent* sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan bisnis. Sistem ini juga akan membantu dalam program pengembangan pekerja sesuai kebutuhan kompetensi jabatan yang dipersyaratkan.

The Company realizes that considering the size of the organization, the number of positions and employee population, and considering that employee placement in the implementation of RPSDM is greatly fundamental change compared to the previous placement process. Thus, in its implementation, there are still conditions that are not ideal, where not all positions can be filled by suitable workers/ there are no gaps in their capacity and capabilities.

The Company is committed to the implementation of talent management, one of the initial steps taken is to identify and map workers included as Talent Pool. Talent Pool is a group of workers identified as the best talents who meet the performance criteria/performance value and potential/ competence required by the Company.

In principle, Talent Pool is used as a basis for determining successor lists for positions in PTK and AP as well as the basis for determining employee development programs. In line with the reorganization of SH IML, PTK is currently compiling a Competency-based talent pool system PTK Group which aims to assist management in mapping talents according to competency and business needs. This system will also assist in employee development programs according to the required job competency needs.

Pengelolaan kinerja individu merupakan suatu siklus dari *performance management system* (PMS) yang dimulai dari proses identifikasi dan penyusunan *Key Performance Indicator* (KPI) atau *Individual Goal* (IG) setting hingga proses *dialog day* dengan tujuan untuk membentuk *high performance culture* yang mendukung pencapaian tujuan strategis Perusahaan. Tahapan penilaian kinerja individu dilakukan 2 (dua) kali dalam periode 1 (satu) tahun melalui *Mid-Year People Review* (MYPR) yang dilakukan pada pertengahan tahun, dan juga *End-Year People Review* (EYPR) yang dilakukan pada akhir tahun.

Proses pengelolaan kinerja individu dilakukan melalui aplikasi *people review online* yang dapat diakses seluruh Perwira melalui intra Pertamina (I-AM). PTK secara resmi Go Live menggunakan aplikasi ini terhitung mulai tanggal 15 Desember 2021. Penggunaan aplikasi *people review online* telah memudahkan proses penetapan IG Setting, monitoring & reporting, proses diskusi dan kalibrasi saat MYPR maupun EYPR, serta proses *dialog day*.

Penilaian kinerja individu mengacu pada target distribusi dan *meaningful differentiation* untuk aspek: (1) target kinerja (KPI/IG) dan (2) perilaku nilai budaya AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) dan *Critical 5 Behavior* (termasuk penilaian 360°), juga atas pencapaian kinerja di luar Sasaran Kerja yang dituangkan dalam *rating/nilai 1 s.d 8*, yang sebarannya pada suatu kelompok penilaian *evaluee* melalui komparasi nilai yang dibahas di jenjang/kelompok diskusi *People Review* atau diskusi Kalibrasi. Proses diskusi kalibrasi ini dilakukan bersama dengan pimpinan fungsi sebagai *evaluator* dan dipimpin oleh seorang .

Ringkasan hasil penilaian kinerja individu pada periode EYPR tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Individual performance management is a cycle of the performance management system (PMS) that starts from the process of identifying and compiling Key Performance Indicators (KPIs) or Individual Goal (IG) setting to the dialogue day process with the aim of forming a high performance culture that supports the achievement of the Company's strategic goals. The stages of individual performance assessment are carried out 2 (two) times in a period of 1 (one) year through the Mid-Year People Review (MYPR) which is carried out in the middle of the year, and also the End-Year People Review (EYPR) which is carried out at the end of the year.

PTK carries out individual performance management process through an online people review application that can be accessed by all Officers through intra Pertamina (I-AM). PTK officially Go Live using this application starting December 15, 2021. The use of the online people review application has facilitated the process of determining IG Settings, monitoring & reporting, the discussion and calibration process during MYPR and EYPR, and the dialogue day process.

Individual performance assessment refers to distribution targets and meaningful differentiation for aspects: (1) performance targets (KPI/IG) and (2) behavior of cultural values AKHLAK (Trustworthy, Competent, Harmonious, Loyal, Adaptive, and Collaborative) and Critical 5 Behavior (including 360° assessment), also for performance achievements outside the Work Targets as outlined in ratings/values 1 to 8, which are distributed in an evaluatee assessment group through a comparison of values discussed at the People Review discussion level/group or Calibration discussion. This calibration discussion process is carried out together with the function leader as an evaluator and led by a Chairman.

A summary of the results of the individual performance assessment in the 2024 EYPR period is explained in the following table:

Tabel Hasil Penilaian Kinerja Individu Periode EYPR Tahun 2024

Table of Individual Performance Assessment Results for EYPR 2024 Period

Uraian Description	Jumlah Pekerja (orang) Total Employees	Komposisi (%) Composition (%)
Nilai kinerja 6-7 (diatas rata-rata target pencapaian) Performance score 6-7 (above average target achievement)	495	55%
Nilai kinerja 5 Performance score 5	371	41%
Nilai kinerja 3-4 Performance score 3-4	31	3%
Nilai kinerja 2 Performance score 2	-	0%
Jumlah Total	897	100,00%

Program Kesejahteraan dan Remunerasi

Welfare and Remuneration Programs

PTK berkomitmen untuk melaksanakan program kesejahteraan dan sistem remunerasi secara adil dan merata. Secara berkala, PTK melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi Perusahaan dengan mempertimbangkan persaingan industri sejenis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan.

PTK is committed to implementing welfare programs and remuneration systems fairly and equitably. PTK evaluates the Company's remuneration policies periodically by considering similar industry competition and applicable as well as relevant laws and regulations.

Tabel Komponen Remunerasi Pekerja

Table of Employee Remuneration Components

Komponen Remunerasi & Benefit Remuneration and Benefit Components	Status Pekerja Employee Status		Periode Kalkulasi Calculation Period			Tipe Type	
	Staff Staff	Non-Staff Non-Staff	Harian Daily	Bulanan Monthly	Tahunan Annually	Tetap Permanent	Variabel Variable
Remunerasi Remuneration							
Gaji Pokok Basic Salary	✓	✓		✓		✓	
Tunjangan Allowance	✓	✓		✓		✓	
Lembur Overtime	✓	✓	✓				✓
Benefit Benefit							
Tunjangan Hari Raya Holiday Allowance	✓	✓			✓	✓	
Fasilitas Istirahat Tahunan Annual Break Facility	✓				✓	✓	
Bonus Bonus	✓	✓			✓		✓
Insentif Incentive	✓	✓			✓		✓
Program Jaminan Employment Security Program							
Ketenagakerjaan Ketenagakerjaan	✓	✓		✓		✓	
Kesehatan Health	✓	✓		✓		✓	
Pensiun Pension	✓	✓		✓		✓	

Catatan: Dalam penetapan kebijakan remunerasi bagi pekerja, Perusahaan memerhatikan besaran upah minimum (dipastikan bahwa gaji entry level utk setiap status pekerja berada di atas upah minimum UMP/UMK) serta memerhatikan besaran remunerasi yang diberlakukan pada industri sejenis di Indonesia maupun luar negeri.

Note: In determining remuneration policy for employees, the Company considers minimum wage (ensuring that the entry level salary for each employee status is above the minimum wage) and takes into account the amount of remuneration applied in similar industries in Indonesia and abroad.

Berdasarkan komposisi remunerasi di atas, berikut disajikan biaya yang dialokasikan Perusahaan untuk program kesejahteraan pekerja:

According the remuneration composition above, the following is a presentation of the costs allocated by the Company for employee welfare programs:

Tabel Biaya Pengembangan Kompetensi Pekerja
Table of Costs for Employees Competency Development

(dalam Rp juta, kecuali dinyatakan lain) (in Rp million, unless otherwise stated)

Uraian Description	2024	2023	2022	Kenaikan (Penurunan) 2023-2024 Increase (Decrease) 2023-2024	
				Selisih Difference	Persentase Percentage
Gaji Pekerja Employee Salaries	59.901	93.988	92.687	-34.087	36.27%
Tunjangan Pekerja Employee Benefits	51.713	107.661	234.615	-55.948	51.97%
Program Pensiun Pekerja Employee Pension Programs	6.553	8.155	7.696	-1.062	19.64%
Bonus dan Penghargaan Bonuses and Awards	133.535	125.531	114.612	8.004	-6.38%
Jumlah Total	251.702	335.335	449.610	-83.633	24.94%

Catatan: Pada tahun 2024 terjadi restrukturisasi organisasi PTK seiring reklasterisasi bisnis yang berdampak pada pengurangan jumlah formasi dari 616 pada organisasi PTK 2023 menjadi 278 pada organisasi PTK 2024. Pada tahun yang sama juga terdapat implementasi harmonisasi remunerasi yang berdampak kepada peningkatan remunerasi pekerja PTK.

Note: There were a restructuring of the PTK organization in 2024 along with business reclustering which will result in a reduction in the number of formations from 616 in the 2023 PTK organization to 278 in the 2024 PTK organization. In the same year, there was an implementation of remuneration harmonization which caused increase in the remuneration of PTK employees.

Program Penghargaan Awarding Program

Selain pemberian benefit berbasis kinerja (*performance based remuneration*) berupa insentif dan bonus, PTK juga memiliki program penghargaan bagi pekerja darat dan laut melalui program *Employee of The Year* dan *Vessel of The Year*.

Apart from providing performance-based remuneration in the form of incentives and bonuses, PTK also has awarding program for land and sea workers through the *Employee of The Year* and *Vessel of The Year* programs.

Program penghargaan ini diberikan kepada para pekerja terpilih setiap tahun pada kesempatan Hari Ulang Tahun perusahaan. Seleksi dan penilaian pekerja terpilih dilakukan melalui parameter point system serta keputusan dari Dewan Direksi.

This award program is given to the selected employees every year on the Company's anniversary. PTK selects and assesses the employees through point system parameters and decisions from the Board of Directors.

Parameter point system sesuai masing-masing kategori penghargaan sebagai berikut:

The point system parameters according to each award category are as follows:

A. Employee of The Year

Parameter penilaian mencakup kinerja sesuai pencapaian individual goal, derajat kesehatan pekerja, serta partisipasi aktif pada program inovasi / budaya / HSSE / penugasan dalam project.

A. Employee of The Year

The assessment parameters include performance according to individual goal achievement, worker health level, and active participation in innovation/culture/HSSE/project assignment programs.

Criteria	Sub Criteria	Indicator	Point
Performance	Average Rating (2 years)	5.5 - 6	10
		>= 6-7	20
	Individual Goal	< 100%	5
		100% - 105%	10
		> 105%	20
	Track Record (Internal Audit/ Industrial Relation)	No Track Record	5
Wellness	MCU Result	P5-P7	5
		P1-P4	5
Active Participation	CIP/AOC/HSSE Program/ Assignment within team	Σ Activity	10 (each)

B. Vessel of The Year

Parameter penilaian untuk kategori ini mencakup aspek *ship reliability, compliance*, dan *safety* dari setiap kategori kapal milik PTK.

Penilaian dilakukan oleh fungsi Armada bekerjasama dengan fungsi HSSE dan diputuskan oleh Dewan Direksi.

B. Vessel of The Year

Assessment parameters for this category include aspects of ship reliability, compliance, and safety of each category of PTK ships.

The assessment is carried out by the Fleet function in collaboration with the HSSE function and decided by the Board of Directors.

Tabel B.1 Kategori Offshore Vessel & Cargo

Table B.1 Offshore Vessel & Cargo Category

Category	Criteria	Percentage	Total
AHTS	ISM - Code	20%	100%
	IMCA	20%	
	Record Incident	15%	
	Ship Reliability	10%	
	Negative Feedback	15%	
	Fit to Work	10%	
	Drill	10%	



Category	Criteria	Percentage	Total
Small Cargo	ISM – Code	20%	100%
	PSA (Pertamina Safety Approval)	20%	
	Record Incident	10%	
	Ship Reliability	20%	
	Negative Feedback	10%	
	Fit to Work	10%	
	Drill	10%	

Tabel B.2 Kategori Small Vessel

Table B.2 Small Vessel Categories

Category	Criteria	Percentage	Total
Harbour Tug	PSA (Pertamina Safety Approval)	45%	100%
	Record Incident	15%	
	Commission Days	10%	
	Fit to Work	10%	
	Drill	20%	
Small Craft	Commission Days	40%	100%
	Good Housekeeping	20%	
	Crew Readiness	15%	
	Customer Care	15%	

Pada tahun 2024, jumlah penerima award (*Employee of The Year*) sebanyak 12 pekerja yang merupakan pekerja terpilih dari setiap Direktorat di PTK dan Anak Perusahaan. Sementara untuk kategori *Vessel of The Year* sebagai berikut:

In 2024, the number of award recipients (*Employee of The Year*) was 12 employees who were selected from each Directorate in PTK and Subsidiaries. Meanwhile, the *Vessel of The Year* category is as follows:

Vessel Type Vessel Type	Kapal Terpilih Kapal Terpilih
AHTS	Transko Balihe
Small Cargo	Patra 1201 & Patra 2301
Harbour Tug	Transko Dara 3202
Small Craft	MB Transko Patin 12

Program Pensiun

Pension Program

Sebagai bentuk tanggung jawab kepada pekerja yang telah mendedikasikan diri kepada Perusahaan, PTK memberikan program pensiun. Program pensiun tersebut terdiri dari 2 (dua) program, yaitu:

1. Program pensiun diberikan kepada para pekerja yang diangkat pada usia minimum 18 tahun dengan diikutsertakan dalam program Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Kepada para pekerja dengan status Pekerja Waktu Tidak Tertentu (PWTT) yang telah mencapai usia minimum 46 tahun pada tahun anggaran berjalan dengan masa kerja minimal 15 tahun dapat diberikan uang panjar Penghargaan Atas Pengabdian (PAP) sebesar 10% yang akan diperhitungkan pada saat PHK atau mencapai usia MPPK (55 tahun). PAP 10% dapat dibayarkan kepada pekerja jika hasil perhitungan PAP 10% lebih kecil atau sama dengan perhitungan penghargaan Masa Kerja. Tabel kecil terhitung pada saat pengajuan panjar PAP 10% setelah dikurangi hutang-hutangnya (jika ada).
2. Program pelatihan persiapan masa purna karya diberikan sebagai persiapan pengelolaan mental pekerja dalam menghadapi masa-masa pensiun. Selain itu pada program pelatihan tersebut juga diberikan pengarahan mengenai kegiatan wirausaha, sehingga para pekerja pensiun yang ingin melanjutkan berkarya di bidang lain mendapatkan modal dasar yang tepat.

Untuk pekerja yang pensiun, Perusahaan menyiapkan 2 (dua) program, yaitu Dana Pensiun Pertamina (DPP) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan Tugu Mandiri (DPLK Tugu Mandiri). Adapun besaran iuran/ persentase Dana Pensiun Lembaga Keuangan Tugu Mandiri adalah sebesar 5% kontribusi dari Perusahaan, dan sebesar 5% kontribusi dari pekerja. Besaran manfaat pasti yang dikelola oleh Dana Pensiun Pertamina dengan iuran per bulan 7,5% dari PHDP (Penghasilan Dana Pensiun) terdiri dari Perusahaan 5,5% dan Pekerja 2%.

As the responsibility to employees who have dedicated to the Company, PTK provides a pension program. The pension program consists of 2 (two) programs, namely:

1. Pension program is given to employees who are appointed at a minimum age of 18 years by being included in the Financial Institution Pension Fund (DPLK) program. Employees with the status of Indefinite-Term Workers (PWTT) who have reached a minimum age of 46 years in the current budget year with a minimum work period of 15 years can be given a down payment of Service Reward (PAP) of 10% which will be calculated at the time of termination of employment or reaching the MPPK age (55 years). PAP 10% can be paid to workers if the calculation result of PAP 10% is less than or equal to the calculation of the Length of Service award. The small table is calculated at the time of submitting a PAP down payment of 10% after deducting debts (if any).
2. The retirement preparation training program is given as preparation for managing workers' mentality in facing retirement. In addition, the training program also provides guidance on entrepreneurial activities, so that retired workers who want to continue working in other fields get the right basic capital.

For retired workers, the Company has prepared 2 (two) programs, namely the Pertamina Pension Fund (DPP) and the Tugu Mandiri Financial Institution Pension Fund (DPLK Tugu Mandiri). The amount of contributions/percentage of the Tugu Mandiri Financial Institution Pension Fund is 5% contribution from the Company, and 5% contribution from workers. The amount of definite benefits managed by the Pertamina Pension Fund with a monthly contribution of 7.5% of PHDP (Pension Fund Income) consisting of the Company 5.5% and Employees 2%.



Survei Kepuasan Pekerja Employee Satisfaction Survey

Secara rutin dan berkala, PTK melaksanakan Survei Kepuasan Pekerja (SKP) atau *Internal Customer Satisfaction (ICS) Survey* dengan tujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan pekerja terhadap kebijakan yang secara langsung mengatur hak dan kewajibannya didalam perusahaan.

SKP dilakukan setahun sekali dengan menggunakan metode penyebaran kuesioner secara *online* melalui broadcast PTK. Nilai SKP atau ICS pada tahun 2024 adalah sebesar 3.97 (dari target 3.50). Nilai ini lebih rendah dibandingkan tahun 2023 sebesar 4,03 namun masih sesuai target KPI yang diharapkan.

Routinely and periodically, PTK conducts an Employee Satisfaction Survey (SKP) or Internal Customer Satisfaction (ICS) Survey with the aim of determining the level of employee satisfaction with policies that directly regulate their rights and obligations within the company.

SKP is conducted once a year using an online questionnaire distribution method via PTK broadcast. The SKP or ICS value in 2024 was 3.97 (from a target of 3.50). This value is lower than in 2023 which was 4.03 but is still in line with the expected KPI target.

Implementasi Quality Program & Culture Management

1. Pelaksanaan *Project Charter* Budaya AKHLAK
2. Peningkatan Jumlah Gugus CIP PTK *Group* untuk mendukung Program Continuous Improvement di Perusahaan;
3. Partisipasi Aktif Pekerja pada Forum *Knowledge Sharing (BONGKAR MUAT)* untuk Meningkatkan Kapabilitas Pekerja;
4. Implementasi Sistem Tata Kerja (STK) sebagai Dasar Pelaksanaan Kegiatan Operasional Fungsi dan Upaya Perbaikan Kinerja Berkelanjutan;
5. Mempertahankan Program Sertifikasi ISO 9001:2015 *Quality Management* untuk Peningkatan Mutu dan Kredibilitas Perusahaan;
6. Asesmen QMA berbasis KKEP sebagai Tolok Ukur dan Acuan Proses Perbaikan Kinerja/ Inovasi Bisnis dan Operasional;
7. Penetapan Kebijakan Berkorespondensi sebagai Pendukung Kegiatan Bisnis dan Operasional.

1. Implementation of AKHLAK Culture Project Charter
2. Increasing the Number of CIP PTK Group Clusters to support the Continuous Improvement Program in the Company;
3. Active Participation by Employees in the Knowledge Sharing Forum (LOADING AND UNLOADING) to Improve the Employees Capabilities;
4. Implementation of the Work Procedure System (STK) as the Basis for Implementing Operational Function Activities and Continuous Performance Improvement Efforts;
5. Maintaining the ISO 9001:2015 Quality Management Certification Program to Improve the Company's Quality and Credibility;
6. QMA Assessment based on KKEP as a Benchmark and Reference for the Business and Operational Performance Improvement/Innovation Process;
7. Determination of Corresponding Policies as Support for Business and Operational Activities.

Teknologi Informasi

Information Technology

Peta Jalan IT

IT Roadmap

Dalam rangka pengelolaan *Information Technology* (IT) yang terintegrasi, PTK menyusun peta jalan (*road map*) pengelolaan IT yang terencana dan dilaksanakan secara bertahap.

In the framework to manage integrated Information Technology (IT), PTK arranged a road map for IT management that is planned and implemented in stages.

Peta Jalan IT Tahun 2023–2027

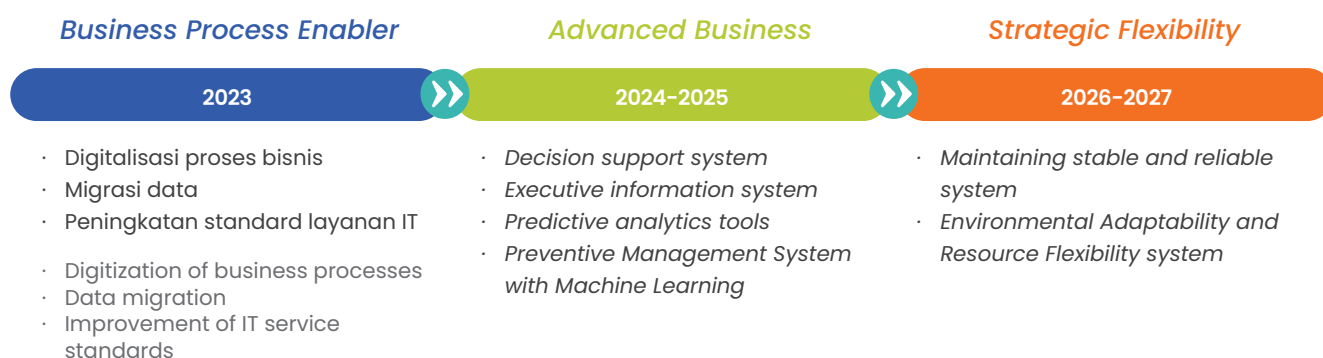
IT Roadmap for 2023–2027

Peta jalan *Information Technology* (IT) dalam jangka panjang ditetapkan dalam dokumen Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Tahun 2023–2027. Dalam rangka mewujudkan komitmen mendukung *Operational Excellence* kepada para stakeholder tidak terlepas dari peran serta layanan teknologi informasi yang handal dan terpercaya. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi menuntut kesiapan resources yang memadai. Sumber daya tersebut mencakup keseluruhan *resources* yang terkait dengan percepatan *Information Technology* (IT) di PTK, seperti *people*, teknologi perangkat keras, perangkat lunak, perangkat nirkabel, infrastruktur hingga kebijakan dan regulasi perusahaan. Untuk mendigitalisasikan proses bisnis yang efektif dan efisiensi serta menciptakan *digital culture* yang dinamis dan agile sesuai dengan target bisnis perusahaan, maka sasaran strategis Fungsi IT dirumuskan dalam *road map* sebagai berikut:

Long-term Information Technology (IT) roadmap is set out in the Company's Long-Term Plan (RJPP) document for 2023–2027. In order to realize the commitment to support Operational Excellence to the stakeholders, it is inseparable from the role of reliable and trusted information technology services. The development of communication and information technology requires adequate resource readiness. These resources include all resources related to the acceleration of Information Technology (IT) in PTK, such as manpower, hardware technology, software, wireless devices, infrastructure to policies and regulations of the Company. To digitize effective and efficient business processes as well as create a dynamic and agile digital culture following business targets of the Company, the strategic targets of the IT Function are formulated in the following road map:

Peta Jalan (*Road Map*) Fungsi Information Technology Tahun 2023 – 2027

Road Map of Information Technology Functions for 2023 – 2027





Program Kerja dan Target Fungsi Information Technology Tahun 2023 – 2027

Work Program and Target of Information Technology Function For 2023 – 2027

2023

Program Kerja & Target Program Kerja & Target Work Program and Target

Business Process Enabler

1. Menciptakan solusi-solusi digital yang dapat memberikan nilai tambah untuk perusahaan melalui inisiatif-inisiatif IT
 2. Melakukan migrasi data dari sistem lama/*legacy* ke sistem baru.
 3. Menyediakan Layanan IT yang sesuai standar internasional.
 4. Awarding ISO/IEC 27001:2013 *Information Security Management System* (ISMS)
1. Creating digital solutions that may provide added value to the Company through IT initiatives
 2. Migrating data from legacy systems to the new systems.
 3. Providing IT services that meet international standards.
 4. Awarding ISO/IEC 27001:2013 *Information Security Management System* (ISMS)

2024–2025

Program Kerja & Target Program Kerja & Target Work Program and Target

Advanced Business

1. DSS/*Decision Support System* atau Sistem Pendukung Keputusan yaitu pengolahan data menjadi informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dari masalah semi-terstruktur yang spesifik
 2. EIS/*Executive Information System* atau Sistem yang dapat memberikan informasi secara *real time*, tervisualisasi dengan grafik dan rangkuman untuk para level eksekutif
 3. *Predictive Analytics Tools*, yaitu suatu metode yang dapat memberikan prediksi di masa yang akan datang melalui analisis data-data yang dimiliki.
 4. *Preventive Management Systems* menggunakan *Machine Learning* (ML) untuk memprediksi kondisi peralatan kapal dan potensi kerusakan di masa yang akan datang.
1. DSS/*Decision Support System* or *Decision Support System*, namely data processing into information to support decision making from specific semi-structured issues
 2. EIS/*Executive Information System* or a system that can provide information in real time, visualized with graphs and summaries for executive levels
 3. *Predictive Analytics Tools*, namely a method that can provide predictions in the future through analysis of existing data.
 4. *Preventive Management Systems* use *Machine Learning* (ML) to predict the condition of ship equipment and potential damage in the future.

2026–2027

Program Kerja & Target Program Kerja & Target Work Program and Target

Strategic Flexibility

1. Solusi IT yang cepat dan dinamis dalam mendukung bisnis perusahaan
 2. Memastikan solusi IT yang diberikan handal dan mempunyai stabilitas yang tinggi
 3. Pemanfaatan teknologi *hybrid cloud* untuk merubah pola kerja seperti *working from anywhere* dan bekerja secara *seamless*.
1. Fast and dynamic IT solutions to support corporate business
 2. Ensuring that IT solutions provided are reliable and have high stability
 3. Utilization of *hybrid cloud* technology to change work patterns such as *working from anywhere* and *working seamlessly*.

Tata Kelola IT Tahun 2024

IT Governance for 2024

Sesuai dengan peta jalan IT yang tercantum dalam RJPP, PTK menyusun tata kelola IT khusus tahun 2024 dalam IT *Strategy Maps* Tahun 2024.

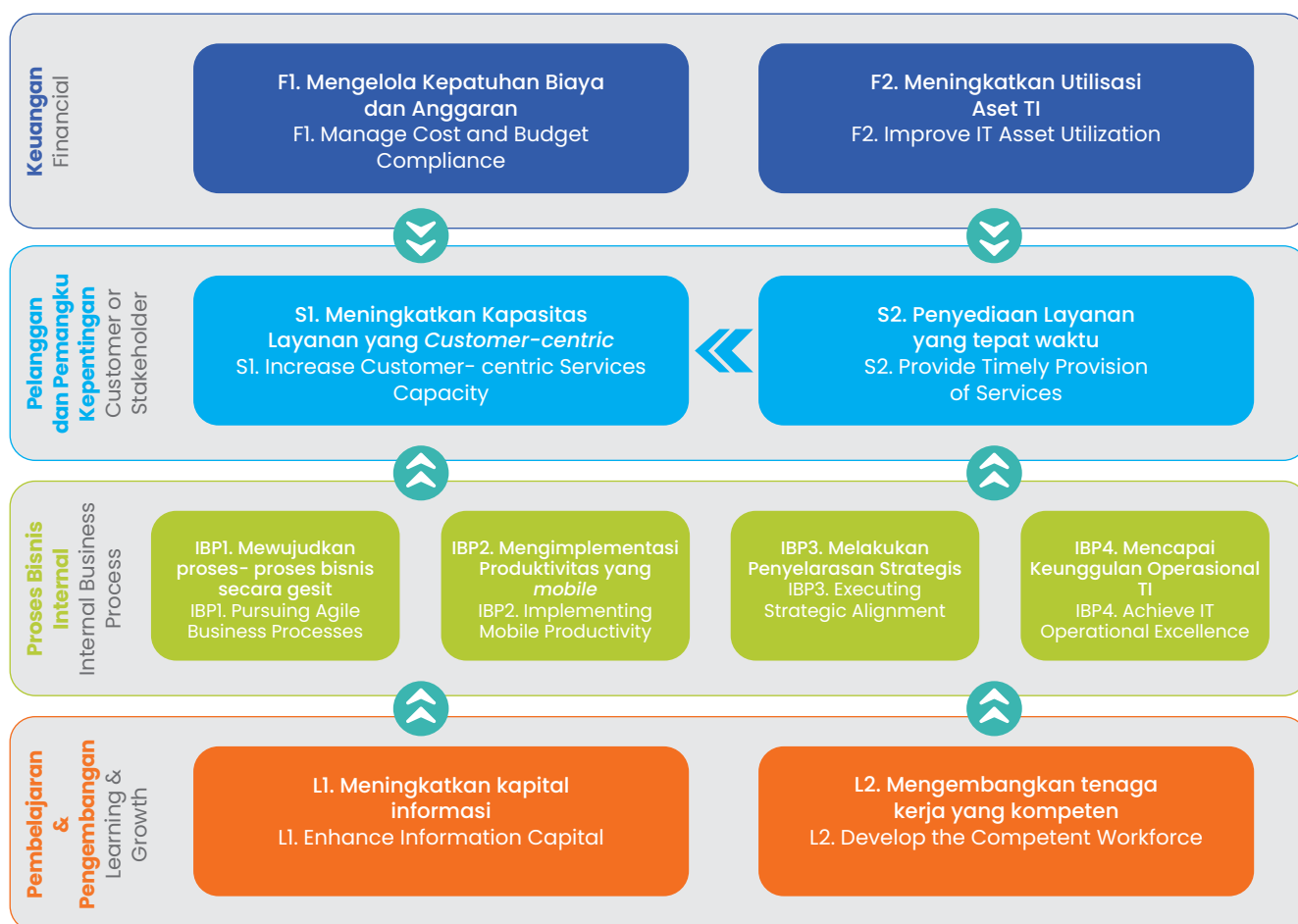
According to IT roadmap listed in the RJPP, PTK prepared special IT governance for 2024 in the 2024 IT Strategy Maps.

Peta Strategi IT 2024

IT Strategy Maps 2024

“Menyediakan layanan Teknologi Informasi yang mampu mendukung proses bisnis PTK serta dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan”

“Providing Information Technology services that able to support PTK business processes and provide added value to the company”



Pada gambar di atas terdapat 4 (empat) Perspektif sebagai berikut:

Perspektif *Financial*, terdapat 2 (dua) *Strategic Objectives*, yaitu:

- F.1. *Manage Cost and Budget Compliance.*
- F.2. *Improve IT Asset Utilization.*

Perspektif *Customer or Stakeholders*, terdapat 2 (dua) *Strategic Objectives*, yaitu:

- S.1. *Increase Customer-Centric Services Capacity.*
- S.2. *Provide Timely Provision of Services.*

Pada perspektif *Internal Business Process*, terdapat 4 (empat) *Strategic Objectives*, yaitu:

- IBP.1. *Pursuing Agile Business Processes.*
- IBP.2. *Implementing Mobile Productivity.*
- IBP.3. *Executing Strategic Alignment.*
- IBP.4. *Achieve IT Operational Excellence.*

Pada perspektif *Learning and Growth*, terdapat 2 (dua) *Strategic Objectives*, yaitu:

- L.1. *Enhance Information Capital.*
- L.2. *Develop the Competent Workforce.*

Keempat perspektif organisasi tersebut untuk selanjutnya didefinisikan dalam rangka membentuk suatu *linkage* antara *Strategic Objectives* pada *IT Strategy Maps* PTK. Sebagai contoh, kondisi pada tahun sebelumnya memberikan porsi kepada Fungsi IT sebagai *strategic workforce* unit untuk mendukung kegiatan bisnis PTK, sehingga Financial Perspective diletakkan pada posisi teratas dari susunan 4 *Organizational Perspectives*. Beberapa faktor *Financial* seperti *Cost, Budget and Assets* merupakan objek yang perlu dikelola dengan baik demi keberlangsungan layanan IT bagi organisasi atau perusahaan.

Pengelolaan faktor-faktor Financial yang baik, memberikan jaminan bagi Fungsi IT PTK untuk memberikan layanan terbaiknya bagi *Customer or Stakeholders*. Fungsi IT PTK berupaya untuk memberikan layanan kepada para pengguna jasanya, yaitu karyawan pada Kantor Pusat, Kantor Cabang dan Anak Perusahaan, dengan sebaik-baiknya. Fungsi IT PTK memiliki pandangan untuk dapat memberikan kapasitas layanan yang terukur, terkontrol dan terencana dengan orientasi kepada *Customer or Stakeholders*.

Dalam rangka memberikan layanan kepada *Customer or Stakeholders*, Fungsi IT melaksanakan proses bisnis internal (*Internal Business Process*), yang tertuang dalam 6 (enam) area kerja Fungsi IT, yaitu Infrastruktur IT, Penyelarasan Strategi IT, Manajemen Proses Bisnis, Manajemen

In the image above, there are 4 (four) Perspectives as follows:

Financial Perspective, there are 2 (two) Strategic Objectives, namely:

- F.1. *Manage Cost and Budget Compliance.*
- F.2. *Improve IT Asset Utilization.*

Customer or Stakeholders Perspective, there are 2 (two) Strategic Objectives, namely:

- S.1. *Increase Customer-Centric Services Capacity.*
- S.2. *Provide Timely Provision of Services.*

In the Internal Business Process perspective, there are 4 (four) Strategic Objectives, namely:

- IBP.1. *Pursuing Agile Business Processes.*
- IBP.2. *Implementing Mobile Productivity.*
- IBP.3. *Executing Strategic Alignment.*
- IBP.4. *Achieve IT Operational Excellence.*

In the Learning and Growth perspective, there are 2 (two) Strategic Objectives, namely:

- L.1. *Enhance Information Capital.*
- L.2. *Develop the Competent Workforce.*

The four organizational perspectives are then defined in order to create a linkage among Strategic Objectives in the IT Strategy Maps PTK. For example, the conditions in the previous year gave a portion to the IT Function as a strategic workforce unit to support PTK business activities, so that Financial Perspective was placed at the top of the 4 Organizational Perspectives. Several Financial factors such as Cost, Budget and Assets are objects that need to be managed well for IT services sustainability for organizations or companies.

Good management of Financial factors, provides a guarantee for the IT Function of PTK to provide the best service for Customers or Stakeholders. The IT Function of PTK strives to provide the best possible service to its service users, namely employees at the Head Office, Branch Offices and Subsidiaries. The IT Function of PTK has a view to be able to provide measurable, controlled and planned service capacity with an orientation towards Customers or Stakeholders.

In order to provide services to Customers or Stakeholders, the IT Function carries out internal business processes (*Internal Business Process*), which are stated in 6 (six) IT Function work areas, namely IT Infrastructure, IT Strategy Alignment, Business Process Management, Knowledge

Pengetahuan, Manajemen Aplikasi dan Manajemen Layanan IT. Untuk memastikan proses bisnis internal dapat berjalan dengan baik, maka Fungsi IT memerlukan kemampuan literasi untuk adaptif terhadap perkembangan zaman dan perubahan bisnis terkait bidang usaha PTK. Fungsi IT memerlukan sumber daya manusia yang kompeten pada bidang kerjanya dan mampu melakukan eksploitasi informasi yang dimiliki sebesar-besarnya untuk kepentingan organisasi atau perusahaan serta dalam rangka mencapai pertumbuhan (*Growth*) dan pembelajaran (*Learning*) yang positif.

Management, Application Management and IT Service Management. To ensure that internal business processes can run well, IT Function requires literacy skills to be adaptive to developments and business changes related to the PTK business field. IT Function requires competent human resources in their fields of work and is able to exploit the information they have as much as possible for the benefit of the organization or company as well as in order to achieve positive growth and learning.

Pembangunan Arsitektur Teknologi Informasi

Development of Information Technology Architecture

Infrastruktur Teknologi Informasi merupakan layanan paling mendasar dikarenakan dibutuhkan untuk memberikan dukungan dan melayani lapisan sistem informasi di atasnya. Infrastruktur teknologi informasi dibagi ke dalam zona-zona sehingga memudahkan pembangunan dan pemeliharaan di kemudian hari. Untuk pengembangan infrastruktur di PTK dibuat secara bertahap sesuai dengan rencana kerja per tahun. Pada Tahun 2024 Fokus Arsitektur IT yaitu *Shared Service Company* dengan menerapkan mekanisme Tata Kelola IT. Guna menjamin respons yang cepat dan kinerja yang baik terkait dengan layanan IT di PTK, maka mekanisme tata kelola IT adalah sebagai berikut:

- a. Pengelolaan Sistem informasi dan Teknologi informasi dikelola secara terpusat di Kantor Pusat PTK. Untuk pengelolaan IT di region dan kapal PTK menggunakan mekanisme *Shared Service* (SS) IT dari *Holding* dengan menggunakan aplikasi Ticketing BMC Remedy yaitu MySSC dan didukung perangkat teknologi informasi penunjang seperti *remote control software*.
- b. Optimalisasi pelayanan *helpdesk* dengan *Service Level Agreement* dan standarisasi Sistem Tata Kelola IT yang align dengan Holding.

Information Technology Infrastructure is the most basic service since it is needed to provide support and serve the information system layer above it. Information technology infrastructure is divided into zones to facilitate development and maintenance in the future. For infrastructure development in PTK, it is made in stages according to the annual work plan. In 2024, IT Architecture focuses on *Shared Service Company* by implementing an IT Governance mechanism. In order to ensure a fast response and good performance related to IT services in PTK, the IT governance mechanism is as follows:

- a. Management of Information Systems and Information Technology is managed centrally at the PTK Head Office. For IT management in the region and ship PTK uses the *Shared Service* (SS) IT mechanism from Holding using the BMC Remedy Ticketing application, namely MySSC and supported by supporting information technology devices such as *remote control software*.
- b. Optimization of *helpdesk* services with *Service Level Agreements* and standardization of IT Governance Systems that are aligned with Holding.



Organisasi Pengelola IT IT Management Organization

Organisasi pengelola IT PTK adalah Fungsi Information Technology. Pada tahun 2024 kebijakan dan program kerja Fungsi IT antara lain:

- 1) Pengembangan aplikasi untuk mendukung keputusan, menunjang bisnis PTK dan efisiensi biaya, yaitu sebagai berikut:
 - a. Pengembangan *Executive Dashboard* untuk Level Komisaris dan Direksi
 - b. Pengembangan aplikasi untuk kegiatan jasa pelayaran
 - c. Pengembangan aplikasi layanan maritim
 - d. Pengembangan aplikasi *logistic*
 - e. Integrasi pengembangan aplikasi fungsi *core* dan fungsi *supporting*
- 2) Optimalisasi infrastruktur teknologi informasi penunjang bisnis
 - a. Melakukan peremajaan infrastruktur IT sesuai dengan tren IT dan arahan dari *Holding* (i.e. *Cyber security Ultimate Goal*) dalam rangka menghadapi ancaman *cybercrime* dan *security threat*.
 - b. Update infrastruktur IT di atas kapal sesuai dengan tren IT dan kebutuhan perusahaan.
- 3) Operasional IT yang efektif dan efisien
 - a. Mengelola *availability* dan *reliability* layanan IT
 - b. Mengelola infrastruktur IT yang *reliable* dan *secure*
 - c. Mengelola kerjasama layanan dari pihak ketiga
 - d. Mengelola risiko dan insiden secara efektif dan efisien
 - e. Meningkatkan budaya digital melalui *change management* yang efektif
- 4) Standardisasi tata kelola IT yang merujuk pada COBIT, IT Infrastructure Library, dan ISO 27001, dimana:
 - a. COBIT merupakan *framework* untuk *IT Governance*
 - b. *IT Infrastructure Library* merupakan satu set konsep dan teknik untuk mengelola teknologi informasi infrastruktur, pengembangan dan operasi
 - c. ISO 27001 merupakan standar yang dipergunakan untuk sertifikasi *Information Security Management System*
- 5) *Learning & Growth*
 - a. Mengembangkan Kompetensi SDM IT PTK
 - b. Menciptakan Struktur Organisasi IT yang optimal (*the right man on the right place*)
 - c. Mengelola investasi IT secara efektif dan efisien

The IT management organization of PTK is the Information Technology Function. In 2024, IT Function has the following policies and work programs:

- 1) Application Development to support decisions, support PTK business and cost efficiency, namely:
 - a. Development of Executive Dashboard for Commissioner and Director Level
 - b. Development of applications for shipping service activities
 - c. Development of maritime service applications
 - d. Development of logistic applications
 - e. Integration of core function and supporting function application development
- 2) Optimization of information technology infrastructure to support business
 - a. Rejuvenating IT infrastructure according to IT trends and directions from Holding (i.e. *Cyber security Ultimate Goal*) in order to face *cybercrime* and *security threats*.
 - b. Update IT infrastructure on board following IT trends and the Company needs.
- 3) Effective and efficient IT operations
 - a. Managing the availability and reliability of IT services
 - b. Managing reliable and secure IT infrastructure
 - c. Managing third-party service cooperation
 - d. Managing risks and incidents effectively and efficiently
 - e. Improving digital culture through effective change management
- 4) Standardization of IT governance referring to COBIT, IT Infrastructure Library, and ISO 27001, where:
 - a. COBIT is a framework for IT Governance
 - b. IT Infrastructure Library is a set of concepts and techniques for managing information technology infrastructure, development and operations
 - c. ISO 27001 is a standard used for Information Security Management System certification
- 5) Learning & Growth
 - a. Developing IT HR Competencies PTK
 - b. Creating an optimal IT Organizational Structure (*the right man on the right place*)
 - c. Managing IT investments effectively and efficiently

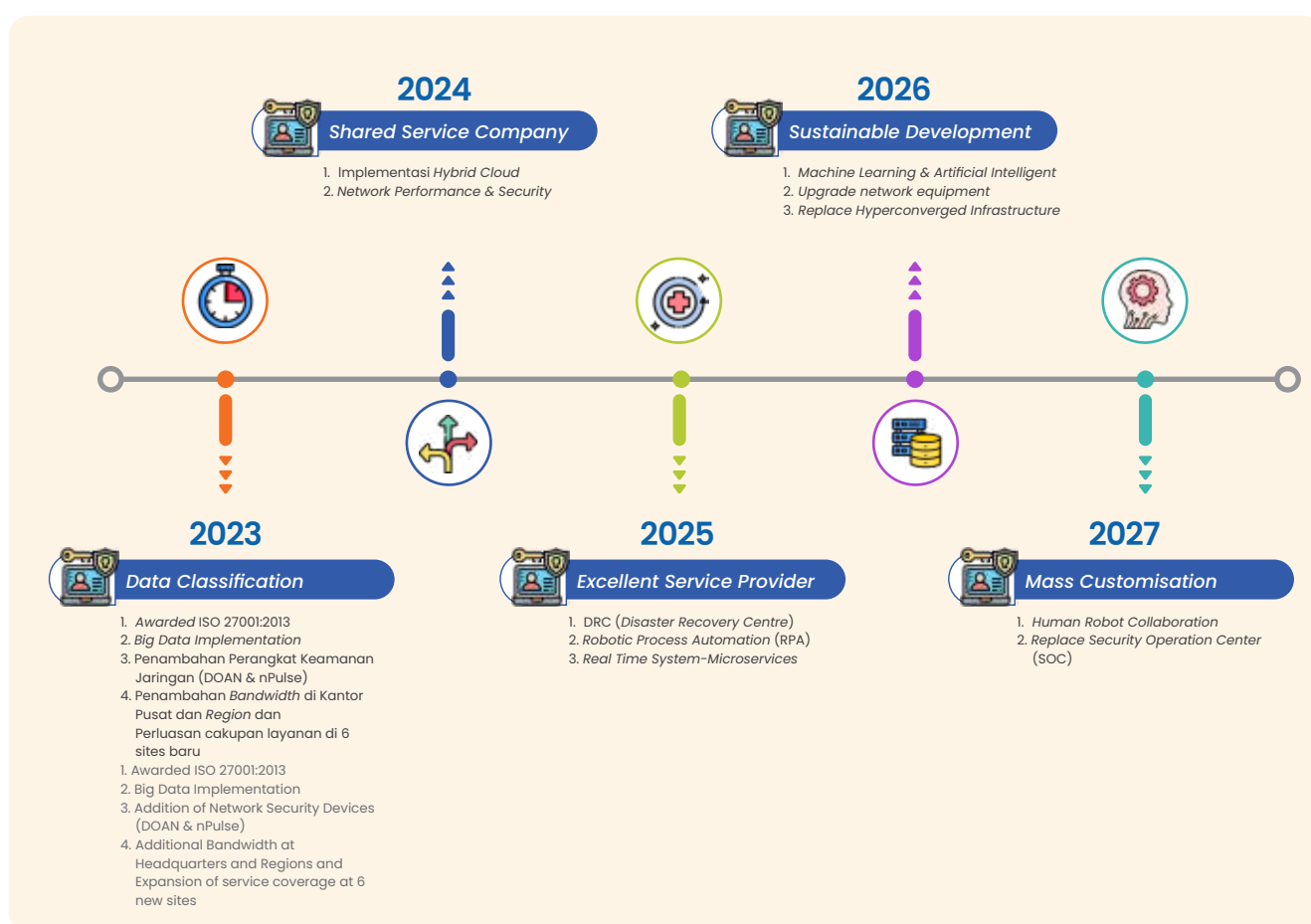
Penguatan Keamanan Dunia Maya (Cyber Security) Strengthening Cyber Security

Dalam rangka penguatan Keamanan Dunia Maya (Cyber Security), PTK telah menyusun peta jalan *Initiative Infrastructure & Cyber Security* PTK 2023-2027.

In the framework to strengthen Cyber Security, PTK prepared a roadmap for PTK Infrastructure & Cyber Security Initiative for 2023-2027.

Peta Jalan *Initiative Infrastructure & Cyber Security* PTK 2023-2027

PTK Infrastructure & Cyber Security Initiative Roadmap for 2023-2027



Adapun kinerja IT PTK terkait penguatan *cyber security* dan peningkatan infrastruktur *Data Center* PTK di tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Melakukan implementasi beberapa *security appliance* antara lain: *Web Application Firewall*, *Privileged Access Management*, dan *End Point Protection/XDR*.
2. Melakukan implementasi *hybrid cloud* berupa perangkat keras dan lisensi *hybrid cloud*.

IT performance in PTK related to strengthening cyber security and improving PTK Data Center infrastructure in 2024 is as follows:

1. Application of several security appliances, including: *Web Application Firewall*, *Privileged Access Management*, and *End Point Protection/XDR*.
2. Application of *hybrid cloud* in the form of hardware and *hybrid cloud* licenses.



3. Melakukan *improvement Initiative Security Hardening* DC Pertamina Group dalam bentuk *hardening Active Directory* dengan menginstalasi VM *Active Directory*, dan penambahan *Policy* di *Firewall*.
4. Meningkatkan keamanan aplikasi internal PTK dan Pertamina Group dengan membatasi akses dari eksternal dengan mengimplementasikan *Demilitarized Zone (DMZ)* di Infrastruktur DC PTK.
5. Mendapatkan asistensi dari BSSN dalam verifikasi *Cyber Security Maturity* di SH IML.
6. Aktif menghadiri acara *cyber security awareness* dari Pertamina Group.

3. Improvement of Pertamina Group DC Security Hardening Initiative in the form of Active Directory hardening by installing Active Directory VM, and adding Policy to the Firewall.
4. Security improvement of PTK and Pertamina Group internal applications by limiting external access by implementing a Demilitarized Zone (DMZ) in the PTK DC Infrastructure.
5. Obtaining assistance from BSSN in verifying Cyber Security Maturity at SH IML.
6. Active participation on cyber security awareness events from Pertamina Group.

Risiko Utama IT dan Disruption serta Mitigasinya

Main IT Risks and Disruption and Their Mitigation

PTK telah mengidentifikasi adanya risiko-risiko dalam bidang IT. Identifikasi tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa segala risiko yang berpotensi dapat mempengaruhi kegiatan dan pencapaian kinerja IT telah diketahui dan disiapkan mitigasinya. Risiko yang diidentifikasi tersebut dikelompokkan menjadi kelompok risiko antara lain:

PTK has identified risks in the IT sector. The identification is needed to ensure that all risks that have the potential to affect IT activities and performance achievements are known and prepared for mitigation. The identified risks are grouped into risk groups, including:

Tabel Risiko Utama Bidang IT dan Rencana Mitigasinya

Table of IT Sector Key Risks and Mitigation Plans

Risiko Risks	Rencana Mitigasi Mitigation Plans
Terjadinya <i>Cyber Attack</i> di lingkungan kerja perusahaan yang mengakibatkan hilangnya data perusahaan Cyber Attack within the Company resulting in the loss of the Company data	1. Implementasi <i>Data Loss Prevention (DLP)</i> Phase II yang sudah dilakukan sejak bulan Oktober 2024. 2. Edukasi mengenai <i>Security Awareness</i> kepada <i>end user</i> melalui media Broadcast dan <i>event Sharing Knowledge</i>. 3. Pemenuhan ISO 27001:2022 terkait dengan <i>Cyber Security</i> dan <i>Data Protection</i>.

Perencanaan *Disaster Recovery Plan* dan *Disaster Recovery Centre*

Disaster Recovery Plan and Disaster Recovery Centre Planning

Dalam rangka meningkatkan layanan sistem, IT PTK telah memiliki *Disaster Recovery Plan* (DRP) dan lokasi *Disaster Recovery Centre* (DRC).

Memenuhi *Opportunity of Improvement* (OFI) ISO 27001:2022, PTK mengadakan sistem *Backup* dan *Restore* di *Data Center* berupa *Data Domain Backup*, *Power Protect Cyber Recovery*, *Cloud One Workload* dan *Web Application Scanning* yang telah dipasang pada 25 Oktober 2023.

Sistem *backup* yang dibangun ini pada dasarnya digunakan sebagai *backup server-server* yang berada di *Data Center* PTK. Sistem yang dibangun juga memiliki kemampuan untuk *restore data state* apabila diperlukan.

In the framework to improve system services, IT in PTK has a *Disaster Recovery Plan* (DRP) and a *Disaster Recovery Centre* (DRC) location.

To meet the *Opportunity of Improvement* (OFI) ISO 27001:2022, PTK has implemented a *Backup* and *Restore* system in the *Data Center* in the form of *Data Domain Backup*, *Power Protect Cyber Recovery*, *Cloud One Workload* and *Web Application Scanning* which was installed on October 25, 2023.

Backup system that was built is basically used as a *backup* for servers located in the PTK *Data Center*. The system that was built also has the ability to *restore data state* if needed.

Program Pengembangan IT

IT Development Program

Sepanjang tahun 2024, Fungsi IT telah memberikan dukungan pada seluruh fungsi di Perusahaan. Adapun program/aplikasi IT yang sedang dikembangkan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Throughout 2024, the IT Function has provided support to all functions in the Company. IT programs/applications that are being developed in 2024 are as follows:

Tabel Program Pengembangan IT Tahun 2024

Table of IT Development Program in 2024

No.	Program atau Aplikasi Program or Application	Deskripsi Description	Fungsi Pemakai User Functions
1.	<i>Implemeantasi Hybrid Cloud</i> Implementation of Hybrid Cloud	Sistem <i>hybrid cloud</i> untuk memenuhi kebutuhan <i>resource cloud computing</i> di PTK. Hybrid cloud system to meet cloud computing resource needs in PTK.	Fungsi IT PTK PTK IT Function
2.	Implementasi CCTV <i>Snapshot</i> dan <i>Storage</i> Kapal Milik PTK Implementation of CCTV Snapshot and Storage of PTK-Owned Ships	Pemenuhan kontrak charter kapal milik berupa CCTV dengan Sistem <i>Snapshot</i> dan perangkat <i>storage</i> di kapal. Fulfilment of charter contracts of owned ships in the form of CCTV with Snapshot System and storage devices on board.	Fungsi Fleet dan Fungsi Marketing Fleet Function and Marketing Function
3.	Implementasi <i>Data Protection</i> Tahap II – <i>Isolate Backup</i> Implementation of Phase II Data Protection – Isolate Backup	Pemenuhan kontrak <i>charter</i> kapal milik berupa CCTV dengan Sistem <i>Snapshot</i> dan perangkat <i>storage</i> di kapal. Phase II Data Protection System with devices, including: Jump host Server, Analytic Server, Storage Backup Vault, Switch, Firewall and KVM.I.	Fungsi IT PTK PTK IT Function



No.	Program atau Aplikasi Program or Application	Deskripsi Description	Fungsi Pemakai User Functions
4.	Implementasi <i>Web Application Firewall</i> (WAF) Implementation of Web Application Firewall (WAF)	Perlindungan <i>public-facing application</i> PTK dari serangan <i>cyber</i> Protection of public-facing PTK applications from cyber attacks	Fungsi IT PTK PTK IT Function
5.	Implementasi <i>Privileged Access Management</i> (PAM) Implementation of Privileged Access Management (PAM)	Perlindungan dan <i>monitoring user privileges</i> di <i>server-server</i> PTK Protection and monitoring of user privileges on PTK servers	Fungsi IT PTK PTK IT Function
6.	Implementasi <i>Extended Detection Response</i> (XDR) Implementation of Extended Detection Response (XDR)	Perlindungan <i>end point</i> dan <i>network</i> PTK yang terhubung dalam satu <i>dashboard</i> untuk melindungi jaringan PTK Protection of endpoints and PTK networks connected in one dashboard to protect PTK networks	PTK
7.	Implementasi <i>Managed Service Printer</i> Implementation of Managed Service Printer	Layanan <i>Managed Service Printer</i> berupa Penyediaan perangkat printer, <i>Monitoring</i> penggunaan <i>print</i> , Pengisian dan penggantian bahan habis pakai, Perawatan dan perbaikan printer, Optimasi biaya cetak dan <i>Security printing</i> . Managed Printer Service in the form of Provision of printer devices, Monitoring of print usage, Refilling and replacing consumables, Printer maintenance and repair, Optimization of printing costs and Security printing.	PTK
8.	Perpanjangan Lisensi <i>Microsoft</i> dan <i>Azure Credit</i> Extension of Microsoft License and Azure Credit	Layanan perpanjangan lisensi <i>Microsoft</i> dan <i>Azure Credit</i> yang digunakan di PTK Extension of Microsoft license and Azure Credit services used in PTK	PTK
9.	Perpanjangan Lisensi <i>Adobe</i> dan <i>Thinkcell</i> Adobe and Thinkcell License Extension	Layanan perpanjangan lisensi <i>Adobe</i> dan <i>Thinkcell</i> yang digunakan di PTK Extension of Adobe and Thinkcell license services used in PTK	PTK
10.	Pengembangan aplikasi <i>MyPertamina Marine Service</i> (MMS) Development of MyPertamina Marine Service (MMS) application	Aplikasi terkait pengelolaan kegiatan <i>Agency</i> di PTK Application related to the management of Agency activities in PTK	Fungsi IT PTK PTK IT Function
11.	Pengembangan aplikasi <i>SUPERMOON</i> Development of SUPERMOON Application	Aplikasi terkait pengelolaan program <i>strategic initiative</i> di AP PTK Application related to strategic initiative program management in AP PTK	Fungsi IT PTK PTK IT Function
12.	Pengembangan aplikasi <i>PRAISE</i> Development of PRAISE Application	Aplikasi terkait <i>monitoring</i> kegiatan <i>bundling C&T</i> dan PTK Application related to C&T and PTK bundling activity monitoring	Fungsi IT PTK PTK IT Function

No.	Program atau Aplikasi Program or Application	Deskripsi Description	Fungsi Pemakai User Functions
13.	Pengembangan aplikasi Transkoboat Development of Transkoboat Application	Aplikasi Pemesanan Kapal-kapal ringan secara online Light ship booking online application	Fungsi IT PTK PTK IT Function
14.	Pengembangan aplikasi Funnel Marketing Development of Funnel Marketing application	Aplikasi terkait kegiatan <i>monitoring progress project</i> di lingkungan PTK Application related to monitoring project progress activities within PTK	Fungsi IT PTK PTK IT Function
15.	Pengembangan aplikasi LPSQ Development of LPSQ Application	Aplikasi terkait pengelolaan kegiatan <i>Loss Prevention Safety Quality (LPSQ)</i> di PTK Application related to management of Loss Prevention Safety Quality (LPSQ) activities in PTK	Fungsi IT PTK PTK IT Function
16.	<i>Enhancement</i> aplikasi Aksi Enhancement of Aksi application	Penambahan modul SSCL <i>Ship Shore Safety Checklist</i> Addition of SSCL Ship Shore Safety Checklist module	Fungsi IT PTK PTK IT Function

Pelaksanaan Sertifikasi ISO 27001

Implementation of ISO 27001 Certification

Pada tahun 2023, IT PTK telah melaksanakan sertifikasi ISO 27001 : 2013 yang dilaksanakan pada tanggal 25-26 Mei 2023. sertifikasi ini berlaku mulai tanggal 4 Juli 2023 hingga 31 Oktober 2025.

In 2023, IT PTK implemented ISO 27001: 2013 certification which was carried out on May 25-26, 2023. This certification is valid from July 4, 2023 to October 31, 2025.

ISO 27001:2013 VS ISO 27001:2022



ISO 27001:2013	ISO 27001:2022
- - Judul: Information technology – Security techniques – ISMS - Struktur Annex A - Control objectives and controls (114): - Security control - 14 - Main security - 35 - Control - 114 controls	- Perubahan kecil / klarifikasi pada beberapa pasal. - Judul: Information security, Cybersecurity dan Privacy protection - ISMS - Struktur Annex A - Information security controls (Total 93): - Organizational - 37 controls - People - 8 controls - Physical - 14 controls - Technological - 34 controls 11 new controls introduced (Reflects changes in the security landscape since 2013) 24 merged controls 58 renamed or reviewed controls
	11 New Controls: - A.5.7 Threat Intelligent - A.5.23 Information security for use of cloud services - A.5.30 ICT readiness for business continuity - A.7.4 Physical security monitoring - A.8.9 Configuration management - A.8.10 Information deletion - A.8.11 Data masking - A.8.12 Data leakage prevention - A.8.16 Monitoring activities - A.8.23 Web filtering - A.8.28 Secure coding



Investasi Bidang IT

IT Investment

Sebagai upaya memperkuat dukungan IT pada operasional Perusahaan, PTK menetapkan kebijakan terkait investasi di bidang IT pada tahun 2024 yang mencakup:

1. IT Operation

Pembelanaan di bidang operasional bisnis IT meliputi Sewa perangkat IT (Seat Management 5, Managed Service Printer, dan Perangkat Multimedia baik di kantor Pusat dan Region), Pengadaan Lisensi Microsoft, Azure Credit, Adobe dan Thinkcell PTK tahun 2024, dengan total nilai sebesar Rp30.106.626.416 .

2. IT Development

Pembelanaan bidang IT *application development* meliputi Biaya ChargeBack SS dan EIT, Pengembangan aplikasi Non-ERP secara *in house development* dengan total nilai sebesar Rp 21.507.200.000 .

3. IT Infrastructure

Pembelanaan bidang IT *infrastructure* meliputi implementasi WAF, PAM, End Point Protection, Hybrid Cloud, CCTV Snapshot Kapal dan Data Protection Tahap II dengan total nilai sebesar Rp34.110.000.000,-

As an effort to strengthen IT support for the Company's operations, PTK has established a policy related to IT investment in 2024 which includes the following:

1. IT Operation

Spending in the IT business operations sector includes IT equipment rental (Seat Management 5, Managed Service Printer, and Multimedia Devices both at the Head Office and Region), Procurement of Microsoft Licenses, Azure Credit, Adobe and Thinkcell PTK in 2024, with a total value of Rp30,106,626,416.

2. IT Development

Spending in the IT application development sector includes ChargeBack SS and EIT Costs, Development of Non-ERP applications through in-house development with a total value of Rp21,507,200,000.

3. IT Infrastructure

IT infrastructure spending includes the implementation of WAF, PAM, End Point Protection, Hybrid Cloud, CCTV Snapshot Ship and Data Protection Phase II with a total value of Rp34,110,000,000.





05



PERTAMINA
TRANS KONTINENTAL

Analisis dan Pembahasan Manajemen

Management Discussion and Analysis



Tinjauan Umum dan Industri

General and Industry Review

Kondisi Perekonomian Global

Global Economic Condition

Perekonomian global tetap stabil, meskipun tingkat pengaruhnya sangat bervariasi antar negara. Pertumbuhan PDB global pada kuartal ketiga tahun 2024 adalah 0,1 poin persentase di bawah perkiraan *World Economic Outlook* bulan Oktober 2024, setelah rilis data yang mengecewakan di beberapa perekonomian Asia dan Eropa.

Pertumbuhan di Tiongkok, sebesar 4,7 persen dari tahun ke tahun, berada di bawah ekspektasi. Pertumbuhan ekspor bersih yang lebih cepat dari perkiraan hanya mengimbangi sebagian perlambatan konsumsi yang lebih cepat dari perkiraan di tengah tertundanya stabilisasi pasar properti dan masih rendahnya kepercayaan konsumen. Pertumbuhan di India juga melambat lebih dari perkiraan, dipicu oleh perlambatan aktivitas industri yang lebih tajam dari perkiraan.

Pertumbuhan terus melemah di kawasan Eropa (dengan Kinerja Jerman tertinggal dibandingkan negara-negara kawasan Eropa lainnya), sebagian besar mencerminkan berlanjutnya pelemahan dalam ekspor manufaktur dan barang meskipun konsumsi meningkat sejalan dengan pemulihan pendapatan riil. Di Jepang, produksi mengalami sedikit kontraksi karena gangguan pasokan yang bersifat sementara. Sebaliknya, momentum perekonomian di Amerika Serikat tetap kuat meningkat sebesar 2,7 persen dari tahun ke tahun pada kuartal ketiga, didorong oleh konsumsi yang kuat.

Berdasarkan data *International Monetary Fund* (IMF) dalam *World Economic Outlook* (WEO) Update Januari 2025 mencatatkan pertumbuhan ekonomi global tahun 2024 diestimasikan mencapai 3,2% yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023.

The global economy remains stable, although the degree to which it is affected varies considerably across countries. Global GDP growth in the third quarter of 2024 was 0.1 percentage points below the October 2024 World Economic Outlook forecast following disappointing data releases in several Asian and European economies.

Growth in China, at 4.7 percent year-on-year, was below expectations. Faster-than-expected net export growth only partially offset a faster-than-expected slowdown in consumption amid delayed stabilization of the property market and still low consumer confidence. Growth in India also slowed more than expected, triggered by a sharper-than-expected slowdown in industrial activity.

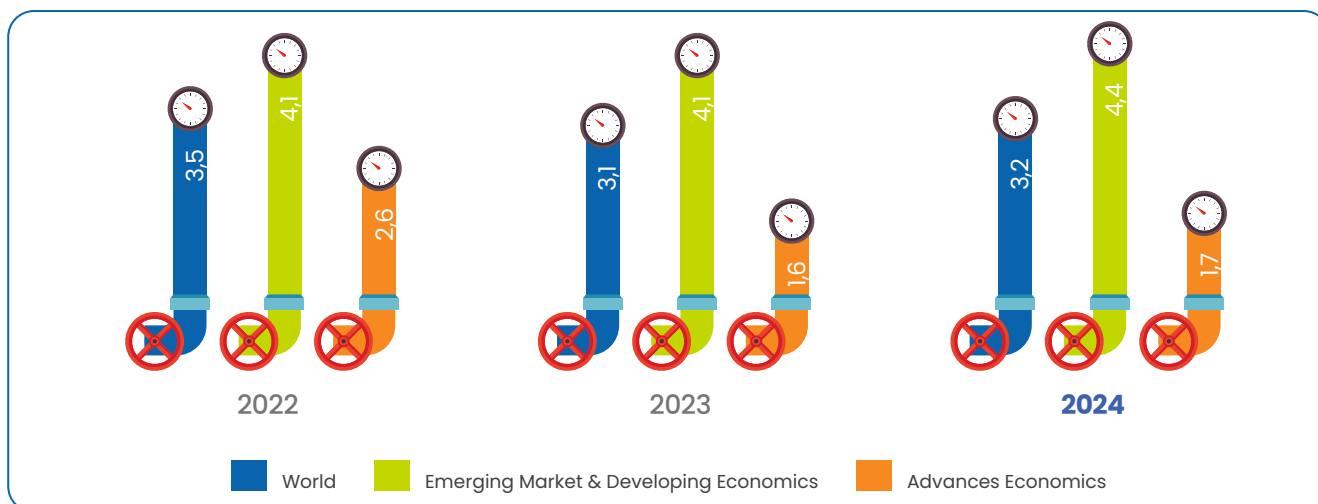
Growth continued to weaken in the euro area (with Germany's performance lagging that of other euro area countries), largely reflecting continued weakness in manufacturing and goods exports, although consumption picked up in line with the recovery in real incomes. In Japan, production contracted slightly due to temporary supply disruptions. In contrast, economic momentum in the United States remained strong, increasing by 2.7 percent year-on-year in the third quarter, driven by robust consumption.

Based on data from the International Monetary Fund (IMF) in the World Economic Outlook (WEO) Update January 2025, global economic growth in 2024 is estimated to reach 3.2%, which experienced an increase compared to 2023.

Tren Pertumbuhan Ekonomi Global

Global Economic Growth Trends

(dalam % | in percent)



*estimasi

Sumber: World Economic Outlook (WEO), International Monetary Fund (IMF), terbitan Januari 2025

*estimation

Source: World Economic Outlook (WEO), International Monetary Fund (IMF), January 2025 issue

Kondisi Perekonomian Nasional

National Economic Condition

Perekonomian Indonesia tahun 2024 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp22.139,0 triliun dan PDB per kapita mencapai Rp78,6 juta atau USD4.960,3. Ekonomi Indonesia tahun 2024 tumbuh sebesar 5,03 persen, melambat dibanding capaian tahun 2023 yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,05 persen (c-to-c). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Jasa Lainnya sebesar 9,80 persen. Sementara itu, pertumbuhan tertinggi dari sisi pengeluaran dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-profit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 12,48 persen.

Ekonomi Indonesia triwulan IV-2024 terhadap triwulan IV-2023 mengalami pertumbuhan sebesar 5,02 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Jasa Lainnya mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 11,36 persen. Sementara itu, Komponen Ekspor Barang dan Jasa pada sisi pengeluaran mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 7,63 persen.

The Indonesian economy in 2024, as measured by Gross Domestic Product (GDP) at current prices, reached Rp22,139.0 trillion, and GDP per capita reached Rp78.6 million or US\$4,960.3. Indonesia's economy in 2024 increased by 5.03 percent, slowing down compared to the achievement in 2023, which experienced growth of 5.05 percent (c-to-c). In terms of production, the highest increase occurred in the Other Services Business Field at 9.80 percent. Meanwhile, the highest growth in terms of expenditure was achieved by the Consumption Expenditure Component of Non-profit Institutions Serving Households (PK-LNPRT) by 12.48 percent.

Indonesia's economy in the fourth quarter of 2024 against the fourth quarter of 2023 experienced growth of 5.02 percent (y-on-y). In terms of production, the Other Services Business Field experienced the highest increase of 11.36 percent. Meanwhile, the Export of Goods and Services component on the expenditure side experienced the highest increase of 7.63 percent.

Tren Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Indonesia's Economic Growth Trends

(dalam % | in percent)



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), Berita Resmi Statistik

Source: Central Bureau of Statistics (BPS), Official Gazette of Statistics

Tingkat inflasi Indonesia bulan Desember 2024 tetap terkendali dalam rentang target sasaran nasional $2,5\% \pm 1\%$. Inflasi Desember 2024 tercatat sebesar 1,57% (yoy) dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,80, lebih rendah dibandingkan inflasi Desember 2023 (2,61%). Inflasi yang terkendali dan PMI yang ekspansif menunjukkan dunia usaha tetap optimis dengan kondisi perekonomian nasional ke depan.

Indonesia's December 2024 inflation rate remained under control within the national target range of $2.5\% \pm 1\%$. Inflation in December 2024 was recorded at 1.57% (yoy) with a Consumer Price Index (CPI) of 106.80, lower than inflation in December 2023 (2.61%). The manageable inflation and expansive PMI show that the business world remains optimistic about the condition of the national economy going forward.

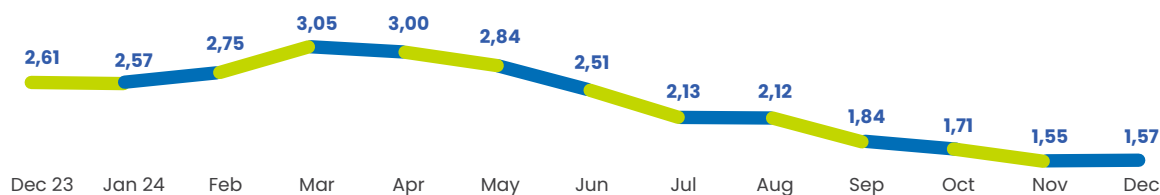
Perkembangan Inflasi Indonesia Tahun 2023

Indonesia's Inflation Development in 2024

(dalam % | in percent)

Tingkat Inflasi Year-on-Year (Y-on-Y) Nasional, Desember 2023–Desember 2024

National Year-on-Year (Y-on-Y) Inflation Rate, December 2023–December 2024



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), Berita Resmi Statistik

Source: Central Bureau of Statistics (BPS), Official Gazette of Statistics

Kondisi Industri Jasa Perkapalan, *Jasa Marine* dan Jasa Logistik

State of the Shipping, Marine, and Logistics Services Industry

Pada tahun 2024, PTK yang bergerak dalam bisnis jasa perkapalan, jasa *marine*, dan jasa logistik dihadapkan dengan berbagai faktor yang mempengaruhi operasional dan kinerja. Berikut adalah beberapa faktor kunci yang berdampak pada sektor-sektor tersebut:

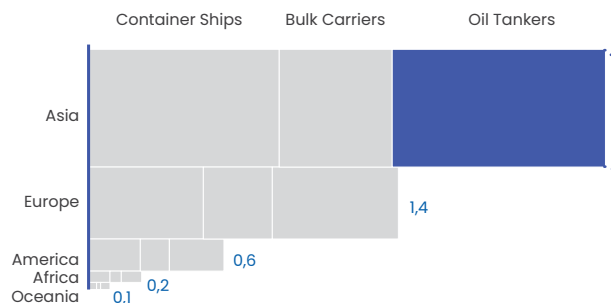
- a. Kebijakan Dekarbonisasi dan *Green Shipping*
Regulasi internasional seperti IMO 2020 dan roadmap IMO 2050 menuntut industri perkapalan untuk menurunkan emisi karbon. PTK perlu merespons dengan modernisasi armada dan penawaran layanan berbasis *green logistics*.
- b. Pengembangan Infrastruktur Maritim Nasional
Program pemerintah seperti Tol Laut dan pengembangan pelabuhan strategis nasional (Kuala Tanjung, Patimban, dll.) membuka peluang baru di sektor logistik dan *marine support*, yang dapat dioptimalkan oleh PTK.
- c. Digitalisasi dan *Smart Logistic*
Penerapan teknologi digital (IoT, big data, automation) dalam sistem logistik dan perkapalan mempercepat perubahan model bisnis. PTK memiliki peluang untuk bertransformasi menjadi penyedia layanan berbasis teknologi.
- d. Pemulihan dan Ekspansi Industri Migas
Pada tahun 2030, pemerintah menargetkan produksi sebesar 1 juta barel minyak per hari (BOPD) dan 12 miliar standar kaki kubik per hari (Bscfd) gas alam. Secara keseluruhan, target produksi energi nasional ditetapkan pada 500 juta ton setara minyak (MTOE) pada 2030 dan meningkat hingga 1.012 MTOE pada 2050. Peningkatan produksi ini tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan domestik tetapi juga sebagai langkah strategis dalam menjaga keseimbangan antara permintaan dan pasokan energi dalam jangka panjang.
- e. Peningkatan Jumlah *Port Call*
Kawasan Asia, yang menjadi titik distribusi utama energi global, diproyeksikan akan terus mendominasi lalu lintas maritim hingga 2030, didukung oleh meningkatnya permintaan energi dan pertumbuhan aktivitas pelabuhan. Setiap *port call* yang dilakukan oleh kapal-kapal tanker atau kapal pendukung menunjukkan tingginya intensitas aktivitas logistik, yang juga menandakan peluang bagi penyedia layanan untuk memperluas jaringan operasional dan meningkatkan kapabilitas pelabuhan mereka.

In 2024, PTK engaged in the shipping, marine, and logistics services business, was faced with a variety of factors affecting its operations and performance. Below are some of the key factors impacting these sectors:

- a. Decarbonization and Green Shipping Policy
International regulations such as IMO 2020 and IMO 2050 roadmap require the shipping industry to reduce carbon emissions. PTK needs to respond with fleet modernization and green logistics-based service offerings.
- b. National Maritime Infrastructure Development
Government programs such as Sea Toll and the development of national strategic ports (Kuala Tanjung, Patimban, etc.) open up new opportunities in the logistics and marine support sectors, which can be optimized by PTK.
- c. Digitalization and Smart Logistics
The application of digital technology (IoT, big data, automation) in logistics and shipping systems accelerates business model changes. PTK has the opportunity to transform into a technology-based service provider.
- d. Oil and Gas Industry Recovery and Expansion
By 2030, the government targets the production of 1 million barrels of oil per day (BOPD) and 12 billion standard cubic feet per day (Bscfd) of natural gas. Overall, the national energy production target is set at 500 million tons of oil equivalent (MTOE) by 2030 and will increase to 1,012 MTOE by 2050. This increase in production is not only to meet domestic needs but also as a strategic step in maintaining a balance between energy demand and supply in the long term.
- e. Increase in Number of Port Calls
Asia, the main distribution point for global energy, is projected to continue to dominate maritime traffic until 2030, supported by rising energy demand and growing port activity. Each port call made by tankers or support vessels indicates a high intensity of logistics activity, which also signals opportunities for service providers to expand their operational networks and enhance their port capabilities..

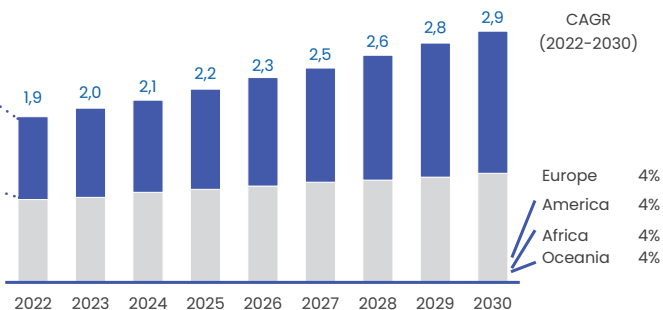


Number of Overall Port Calls as of 2022 (Mn Calls)



Sumber: S&P Global

Oil Tanker Port Calls Asia Forecast (Mn Calls)



Source: S&P Global

Tinjauan Operasional per Segmen

Operational Review by Segment

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir diubah berdasarkan Akta No. 104 tanggal 29 April 2021 dari Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta, Perusahaan menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang jasa *shipping activities*, *marine services*, dan *logistics services*, baik di dalam maupun luar negeri. Jasa Perusahaan juga termasuk kegiatan usaha lain terkait usaha di ketiga bidang tersebut.

Based on the Company's Articles of Association, which was most recently amended by Deed No. 104 dated April 29, 2021, from Aulia Taufani, S.H., notary in Jakarta, the Company runs business activities in the sectors of shipping activities, marine services, and logistics services, both at home and abroad. The Company's services also include other business activities related to the three fields.



Shipping Activities



Marine Services



Logistics Services

Kinerja Operasional per Segmen

Operational Performance by Segment

Berikut ini diuraikan kinerja operasional per segmen usaha Perusahaan.

The following describes the operational performance by the Company's business segments.

Kinerja Operasional Segmen *Shipping Activities*

Operational Performance of the Shipping Activities Segment

Kegiatan Usaha serta Produk dan Layanan *Shipping Activities*

Business Activities, and Products and Services of Shipping Activities

Perusahaan memiliki *core business* sebagai penyedia kapal dan memberikan jasa operasional kapal, seperti transportir BBM, produk olahan kimia, dan gas cair menggunakan tanker, *tug & barge*, dan SPOB. Kegiatan bisnis ini dilakukan menggunakan skema kontrak sewa kapal (*time charter* dan *spot charter*) dan *contract of affreightment* (COA). PTK juga turut membantu dalam kegiatan penunjang operasional sarana pelabuhan, masuk-keluar kapal tanker di area pelabuhan/TBBM, dan navigasi di area marine. Selain itu, PTK juga melakukan sewa dan memasarkan kapal milik pihak ketiga kepada Pelanggan PTK/pemberi kerja. Pekerjaan penyewaan kapal dan pengelolaan *Ship to Ship* (STS) untuk proyek *Fatty Acid Methyl Ester* (FAME) Balikpapan. Dalam segmen *shipping activities* terdapat kegiatan utilisasi kapal milik. Utilisasi kapal milik meliputi data armada kapal, *commission days*, dan *commercial days*.

The Company has a core business as a ship provider and provides ship operational services, such as transportation of fuel, chemical products, and liquefied gas using tankers, tug & barge, and SPOB. This business activity is carried out using a ship charter contract scheme (time charter and spot charter) and contract of affreightment (COA). PTK also assists in operational support activities for port facilities, entry and exit of tankers in the port/TBBM area, and navigation in the marine area. In addition, PTK also leases and markets vessels owned by third parties to PTK customers/employers. Ship chartering and Ship-to-ship (STS) management for the Balikpapan Fatty Acid Methyl Ester (FAME) project. Within the shipping activities segment, there is an owned vessel utilization activity. Utilization of owned vessels includes fleet data, commission days, and commercial days.



Produktivitas Segmen Shipping Activities

Productivity of the Shipping Activities Segment

Tabel Produktivitas Segmen Shipping Activities

Table of Productivity of the Shipping Activities Segment

Uraian Description	Satuan Unit	2024	2023	2022	Kenaikan (Penurunan) 2023-2024 Increase (Decrease)	
					Selisih Margin	Persentase Percentage
1. Armada Kapal Milik Owned Ships	unit	370	369	369	1	0,27%
a. Existing Vessel	unit	369	369	343	-	-
b. New Vessel	unit	1	-	26	1	100,00%
2. Commission Days Kapal Milik (Hari) Commission Days of Owned Ships (Day)	hari Day	119.841	118.344	112.270	1.497	1,26%
a. Existing Vessel	hari Day	119.592	118.344	111.529	1.248	1,05%
b. New Vessel	hari Day	249	-	741	249	100,00%
3. Commercial Days Kapal Milik (Hari) – termasuk 13 kapal BBTC Commercial Days of Owned Ships (Day) – including 12 BBTC ships	hari Day	119.220	117.423	116.661	1.797	1,53%
a. Existing Vessel	hari Day	118.973	117.423	116.661	1.550	1,32%
b. New Vessel	hari Day	247	-	-	247	100,00%

Jumlah armada kapal milik pada tahun 2024 meningkat dibandingkan tahun 2023 yaitu sebanyak 1 unit dengan adanya 1 kapal Accommodation Work Barge (AWB) baru.

The number of owned vessel fleets in 2024 increased compared to 2023 by 1 unit with 1 new Accommodation Work Barge (AWB) vessel.

Commission days adalah ketersediaan serta kelaiklautan kapal untuk dipasarkan. Jumlah Commission Days pada tahun 2024 meningkat 1,26% dibandingkan tahun 2023. Hal ini terutama disebabkan adanya penambahan 1 (satu) kapal baru jenis AWB yaitu AWB Transko Harmony.

Commission days are the availability and seaworthiness of ships to be marketed. The number of Commission Days in 2024 increased by 1.26% compared to 2023. It was mainly due to the addition of 1 (one) new AWB-type vessel, namely AWB Transko Harmony.

Commercial Days adalah realisasi kapal yang tersewa oleh pencharter. Jumlah Commercial Days pada tahun 2024 meningkat 1,53% dibandingkan tahun 2023. Hal ini terutama disebabkan oleh penambahan 1 unit kapal Accommodation Work Barge ("AWB").

Commercial Days is the realization of vessels chartered by the charterer. The number of Commercial Days in 2024 increased by 1.53% compared to 2023. It was mainly due to the addition of 1 Accommodation Work Barge ("AWB") vessel.

Kinerja Operasional Marine Services

Operational Performance of the Marine Services Segment

Kegiatan Usaha serta Produk dan Layanan Marine Services

Business Activities, and Products and Services of Marine Services

PTK menyediakan layanan jasa *marine* atau keagenan di seluruh pelabuhan di Indonesia, baik sebagai pelabuhan umum (keagenan umum), di pelabuhan khusus Pertamina (keagenan kapal-kapal *tanker charter*/milik Pertamina) maupun pihak ketiga.

Layanan yang disediakan mencakup:

1. Keagenan kapal tanker milik PTK dan tanker charter milik Pertamina;
2. Pengurusan perizinan (*inward & outward clearance*);
3. Menyiapkan kebutuhan kapal dan handling crew (*crew supply, bunker handling, water supply*);
4. Pengurusan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB);
5. Pengurusan administrasi pelabuhan khusus;
6. Kegiatan *Recognized Security Organization* dan ISPS code di pelabuhan.

PTK provides marine or agency services at all ports in Indonesia, both as a general port (general agency), at Pertamina's special port (agency for tanker charter/owned by Pertamina), and as a third party.

Services provided include:

1. Agency of PTK's tankers and Pertamina's charter tankers;
2. Licensing arrangement (*inward & outward clearance*);
3. Preparing vessel and handling crew needs (*crew supply, bunker handling, water supply*);
4. Processing of Goods Import Notification (PIB) and Goods Export Notification (PEB) documents;
5. Special port administration;
6. Recognized Security Organization and ISPS code activities at the port.

Produktivitas Segmen Marine Services

Productivity of the Marine Services Segment

Tabel Produktivitas Segmen Marine Services

Table of Productivity of the Marine Services Segment

Uraian Description	Satuan Unit	2024	2023	2022	Kenaikan (Penurunan) 2023-2024 Increase (Decrease)	
					Selisih Difference	Persentase Percentage
Keagenan <i>Tanker</i> Pihak Ketiga Third Party Tanker Agency	<i>call</i>	5.181	3.385	2.282	1.796	53,06%
Keagenan <i>Charter</i> Milik Pertamina Pertamina Chartered Agency	<i>call</i>	20.745	21.840	22.403	(1.095)	(5,01)%
Keagenan Umum General Agency	<i>call</i>	4.033	3.034	5.505	999	32,93%
Jumlah Total	<i>call</i>	29.959	28.259	30.231	1.700	6,02%

Segmen bisnis keagenan PTK terdiri dari tiga jenis yaitu keagenan pihak ketiga, keagenan *Charter* Milik Pertamina (CMP) dan keagenan umum. Pada tahun 2024 total *call* keagenan mencapai 29.959 *call*.

Layanan keagenan pihak ketiga adalah sebesar 5.181 *call* yaitu mengalami peningkatan 53,06% atau 1.796 *call*, menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan tahun

PTK's agency business segment consists of three types, namely third-party agency, Pertamina's Chartered Agency (CMP), and general agency. In 2024, the total agency calls reached 29,959 calls.

Third-party agency services were 5,181 calls, an increase of 53.06% or 1,796 calls, showing better performance compared

2023. Hal ini dipengaruhi oleh adanya kenaikan jumlah kapal tanker FOB di terminal atau pelabuhan Pertamina Group.

Layanan keagenan *Charter* Milik Pertamina pada tahun 2024 adalah sebesar 20.745 *call*, yaitu lebih rendah 5,01% atau 1.095 *call* dibandingkan tahun 2023. Hal ini terutama disebabkan oleh jenis keagenan ini mengikuti jumlah pengapalan kapal-kapal yang dioperasikan oleh PT Pertamina International Shipping. Pada periode 2024 terjadi penurunan jumlah tonase kapal dan *shipment* angkutan domestik Pertamina Group, seiring dengan dilakukannya optimalisasi tonase (adanya batasan minimum ELF di angkutan COA domestik PIS)

Layanan keagenan umum pada tahun 2024 adalah sebesar 4.033 *call*, yaitu mengalami peningkatan 32,93% atau 999 *call* dibandingkan tahun 2023. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya pertumbuhan *customer* baru di layanan kapal non-tanker.

to 2023. It was influenced by an increase in the number of FOB tankers at Pertamina Group terminals or ports.

Pertamina's Charter agency services in 2024 were 20,745 calls, which was 5.01% or 1,095 calls lower than in 2023. It was mainly due to this type of agency following the number of shipments of vessels operated by PT Pertamina International Shipping. In 2024, there was a decrease in the number of ship tonnage and shipments of Pertamina Group domestic transportation in line with tonnage optimization (there is a minimum ELF limit in PIS domestic COA transportation).

General agency services in 2024 were 4,033 calls, an increase of 32.93% or 999 calls compared to 2023. It was mainly due to the growth of new customers in non-tanker services.

Kinerja Operasional Segmen *Logistics Services*

Operational Performance of the Logistics Services Segment

Kegiatan Usaha serta Produk dan Layanan *Logistic Services*

Business Activities, and Products and Services of Logistic Services

Kegiatan operasi *logistic services* dengan PTK sebagai Badan Usaha Pelabuhan meliputi kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Jasa keagenan yang mengurus penerimaan, penyimpanan, pengepakan, pengukuran, penimbangan, pengurusan penyelesaian dokumen, penerbitan dokumen angkutan, perhitungan biaya angkutan, klaim asuransi atas pengiriman barang serta penyelesaian tagihan dan biaya-biaya lainnya berkenaan dengan pengiriman barang-barang tersebut sampai dengan diterima ke tangan penerima (*freight forwarding*) oleh PT Pertamina Port & Logistics (AP PTK).
2. Jasa membongkar barang dari kapal ke dermaga/tongkang/truk atau memuat barang dari dermaga/tongkang/ truk ke dalam kapal (*stevedoring*) oleh PT Pertamina Port & Logistics (AP PTK).
3. Jasa pemindahan barang setelah dibongkar dari kapal di dermaga ke gudang atau tempat penumpukan (*cargodoring*) oleh PT Pertamina Port & Logistics (AP PTK).
4. Sebagai Penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk labuh-tambat kapal, bongkar-muat barang & peti kemas, dan penundaan kapal.
5. *Bunker agent* dan *Bunker Handling*, Pengelolaan Logistic Terpadu.

Logistic services operations with PTK as a Port Business Entity include the following business activities:

1. Agency services that take care of receiving, storing, packing, measuring, weighing, managing document settlement, issuing transportation documents, calculating transportation costs, insurance claims for shipping goods, and settling bills and other costs related to the delivery of these goods until they are received into the hands of the recipient (*freight forwarding*) by PT Pertamina Port & Logistics (AP PTK).
2. Services for unloading goods from ships to docks/barges/trucks or loading goods from docks/barges/trucks into ships (*stevedoring*) by PT Pertamina Port & Logistics (AP PTK).
3. Goods transfer services after being unloaded from the ship at the dock to the warehouse or *cargodoring* by PT Pertamina Port & Logistics (AP PTK).
4. Provision and/or service of dock services for mooring of vessels, loading and unloading of goods & containers, and delaying of vessels.
5. Bunker agent and Bunker Handling, Integrated Logistics Management.

Produktivitas Segmen Logistic Services

Productivity of the Logistic Services Segment

Tabel Produktivitas Segmen Logistic Services

Table of Productivity of the Logistic Services Segment

Uraian Description	Satuan Unit	2024	2023	Kenaikan (Penurunan) 2023-2024 Increase (Decrease)	
				Selisih Difference	Persentase Percentage
Cargo Handling	ton	471.025	346.887	124.138	35,79%
Vessel Berthing	hours	10.524	10.797	(273)	(2,53)%
Cover Storage	m ²	372.074	395.410	(23.336)	(5,90)%
Open Storage	m ²	1.331.698	1.012.914	318.784	31,47%
Waste Management	ton	1.587	5.674	(4.087)	(72,03)%

Pendapatan dan Profitabilitas per Segmen

Revenue and Profitability by Segment

Kontribusi Pendapatan per Segmen pada Pendapatan Perusahaan

Contribution of Revenue by Segment to the Company's Revenue

Jumlah pendapatan usaha PTK mengalami peningkatan 12,04% atau sebesar Rp812,60 miliar dibandingkan tahun 2023, menjadi sebesar Rp7,56 triliun pada tahun 2024. Kontribusi pendapatan segmen *marine services* sebesar 52,38% atau Rp3,96 triliun, disusul pendapatan segmen *shipping activities* sebesar 43,01% atau Rp3,25 triliun, dan pendapatan segmen *logistic services* sebesar 4,62% atau Rp348,93 miliar.

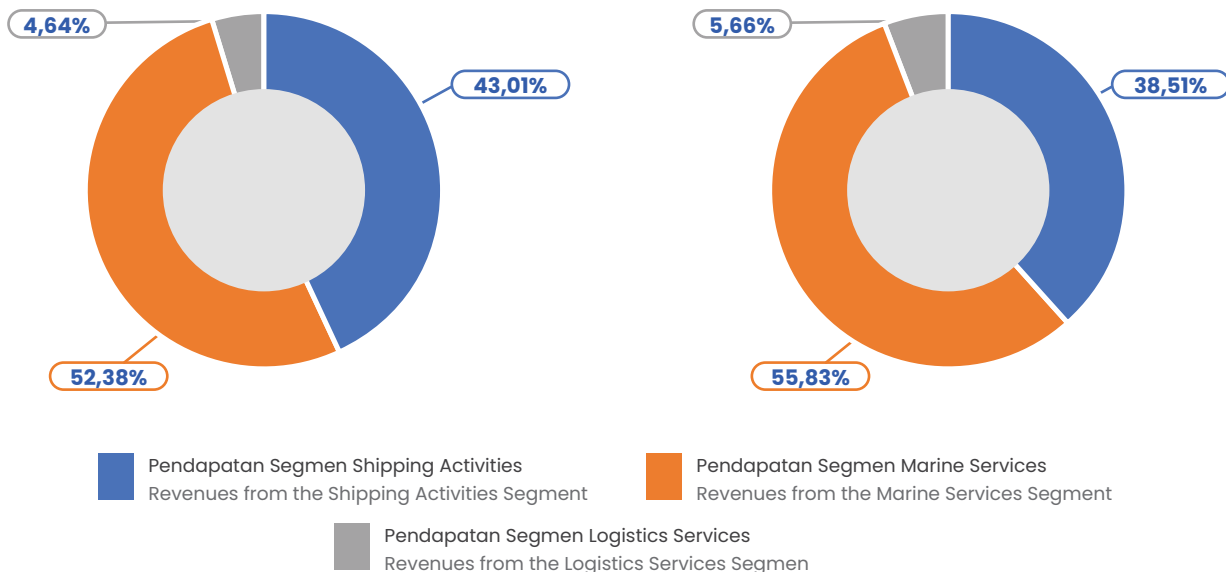
PTK's total revenue increased by 12.04% or Rp812.60 billion compared to 2023, to Rp7.56 trillion in 2024. The contribution of the marine services segment revenue was 52.38% or Rp3.96 trillion, followed by the shipping activities segment revenue of 43.01% or Rp3.25 trillion, and the logistic services segment revenue of 4.62% or Rp348.93 billion.

Tabel Kontribusi Pendapatan per Segmen pada Pendapatan Perusahaan

Table of Contribution of Revenue by Segment to the Company's Revenue

(dalam Rp juta, kecuali dinyatakan lain)
(in Rp million, unless otherwise state)

Pendapatan Segmen Segment Revenue	2024		2023		Kenaikan (Penurunan) 2023-2024 Increase (Decrease)	
	Nominal Nominal	Kontribusi Contribution	Nominal Nominal	Kontribusi Contribution	Selisih Difference	Persentase Percentage
Pendapatan Segmen <i>Shipping Activities</i> Revenues from the Shipping Activities Segment	3.250.916	43,01%	2.598.318	38,51%	652.598	25,12%
Pendapatan Segmen <i>Marine Services</i> Revenues from the Marine Services Segment	3.959.256	52,38%	3.766.450	55,83%	5,12%	4,04%
Pendapatan Segmen <i>Logistics Services</i> Revenues from the Logistics Services Segment	348.935	4,62%	381.740	5,66%	(32.805)	(8,59)%
Jumlah Pendapatan Total Revenues	7.559.108	100,00%	6.746.509	100,00%	812.599	11,44%



Kontribusi Laba Bruto per Segmen pada Laba Bruto Perusahaan

Contribution of Gross Profit by Segment to the Company's Gross Profit

Jumlah laba bruto PTK mengalami peningkatan 0,10% atau sebesar Rp2,63 miliar dibandingkan tahun 2023, menjadi sebesar Rp2,59 triliun pada tahun 2024. Kontribusi laba bruto segmen *marine services* sebesar 55,10% atau Rp1,43 triliun, disusul laba bruto segmen *shipping activities* sebesar 39,79% atau Rp1,03 triliun, dan laba bruto segmen *logistic services* sebesar 5,11% atau Rp136,68 miliar.

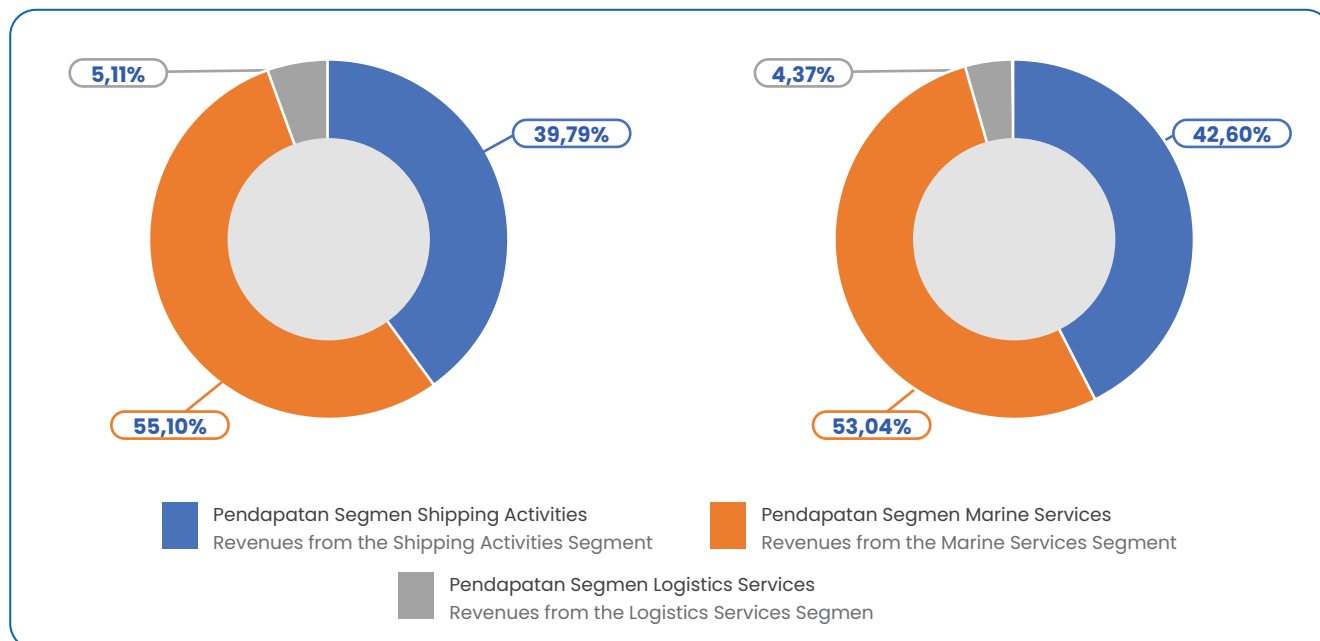
PTK's total gross profit increased by 0,10% or Rp2.63 billion compared to 2023, to Rp2.59 trillion in 2024. The contribution of the marine services segment gross profit was 55.10% or Rp1.43 trillion, followed by the shipping activities segment gross profit of 39.79% or Rp1.03 trillion, and the logistic services segment gross profit of 5.11% or Rp136.68 billion.

Tabel Kontribusi Laba Bruto per Segmen pada Laba Bruto Perusahaan

Table of Contribution of Gross Profit by Segment to the Company's Gross Profit

(dalam Rp juta, kecuali dinyatakan lain)
(in Rp million, unless otherwise stated)

Laba Bruto Segmen Segment Gross Profit	2024		2023		Kenaikan (Penurunan) 2023-2024 Increase (Decrease)	
	Nominal Nominal	Kontribusi Contribution	Nominal Nominal	Kontribusi Contribution	Selisih Difference	Persentase Percentage
Shipping Activities	1.032.710	39,79%	1.104.386	42,60%	(71.676)	(6,49)%
Marine Services	1.429.817	55,10%	1.374.953	53,04%	54.864	3,99%
Logistics Services	132.626	5,11%	113.178	4,37%	19.448	17,18%
Jumlah Laba Bruto Total Gross Profit	2.595.153	100,00%	2.592.516	100,00%	2.637	0,10%



Sinergi dengan Pertamina Group Synergy with Pertamina Group

Sinergi yang terbangun akan mendorong PTK dan seluruh anak usaha Pertamina dapat memanfaatkan fasilitas yang sama sehingga efisiensi dapat ditingkatkan. Efisiensi mendorong kinerja PTK dan Pertamina Group menjadi lebih baik, sehingga akan mengoptimalkan pencapaian pendapatan maupun laba usaha, serta mendukung pengembangan usaha.

The established synergy is going to encourage PTK and all Pertamina subsidiaries to utilize the same facilities so as to be able to increase the efficiency. Efficiency drives PTK and Pertamina Group's performance to be better, thus it will optimize the achievement of revenue and operating profits, as well as support the business development.

(dalam Rp juta, kecuali dinyatakan lain)
(in Rp million, unless otherwise stated)

Uraian Description	2024	2023	Kenaikan (Penurunan) 2023-2024 Increase (Decrease)	
			Selisih Difference	Persentase Percentage
PT Pertamina (Persero)	7.662	5.707	1.955	34,26%
PT Pertamina Hulu Energi	-	254.640	(254.640)	-
PT Pertamina Gas Negara	-	188.955	(188.955)	-
PT Pertamina Patra Niaga	2.028.757	2.178.552	(149.795)	
PT Pertamina EP	6.461	4.417	2.044	46,28%
PT Pertamina Drilling Services Indonesia	-	3.433	(3.433)	-
PT Tugu Pratama Indonesia	-	2.333	(2.333)	-



Uraian Description	2024	2023	Kenaikan (Penurunan) 2023-2024 Increase (Decrease)	
			Selisih Difference	Persentase Percentage
PT Pertamina Retail	275.691	245.053	30.638	12,50%
PT Pertamina International Shipping	2.075.862	1.356.306	719.556	53,05%
PT Pertamina Hulu Indonesia	-	256.768	(256.768)	(100,00)%
PT Nusantara Regas	29.577	30.855	(1.278)	(4,14)%
PT Kilang Pertamina International	1.204.464	982.642	221.822	22,57%
PT Peteka Karya Tirta - PET	76.555	88.150	(11.595)	(13,15)%
PT Peteka Karya Gapura	-	1.366	(1.366)	(100,00)%
PT Pertamina Hulu Rokan	36.484	31.652	4.832	15,27%
PT Kilang Pertamina Balikpapan	(5.584)	11.866	(17.450)	(147,06)%
PT Saka Energi Indonesia	1.884	-	1.884	100,00%
PT Pertamina Hulu Energi Jambi Merang	3.703	3.715	(12)	(0,32)%
PT Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore	2.278	4.674	(2.396)	(51,26)%
PT Pertamina Hulu Energi ONWJ	43.490	39.048	4.442	11,38%
PT Pertamina Hulu Mahakam	143.329	19.538	123.791	633,59%
PT Pertamina Hulu Energi OSES	181.133	204.278	(23.145)	(11,38)%
PT Pertamina Hulu Sanga Sanga	27.028	-	27.028	100,00%
PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur	63.776	10.597	53.179	501,83%
PT Pertamina Gas Negara LNG Indonesia	35.032	35.175	(143)	(0,41)%
PT Pertamina Arun Gas	151.334	153.012	(1.678)	(1,10)%
PT Badak Natural Gas Liq	460	-	460	100,00%
PT Pertamina Hulu Energi North Sumatera Offshore	-	3.860	(3.860)	(100,00)%
Lain-lain Others	-	1.663	(1.663)	(100,00)%
Jumlah Total	6.402.846	5.673.294	729.552	12,86%

Rencana Strategis

Strategic Plan

Rencana Strategis Jangka Panjang Tahun 2022–2027

Long-term Strategic Plan in 2022–2027

Strategi Korporat jangka panjang dimuat dalam rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) yang disahkan oleh Pemegang Saham. Periode RJPP PTK yang berlaku adalah periode tahun 2022–2027 dengan rencana strategis secara umum sebagai berikut:

1. Jasa Perkapalan
 - a. Meningkatkan *operational excellence* yang mengutamakan aspek Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lindungan Lingkungan (K3LL), kompetensi awak kapal, dan *standard Service Level Agreement* untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.
 - b. Penambahan jenis dan jumlah armada kapal milik untuk melayani segmen industri minyak & gas melalui sinergi grup Pertamina dan kemitraan strategis.
 - c. Diversifikasi basis pelanggan dalam lingkup grup Pertamina, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), dan pasar potensial di sektor migas dan maritim.
 - d. Efisiensi biaya operasi dan pemeliharaan kapal melalui program perawatan armada kapal secara terintegrasi antara pengawas (*superintendent*), awak kapal, galangan kapal, dan *vendor* dengan optimalisasi sistem informasi *digital Planned Maintenance System*.
 - e. Pemantauan dan pembaruan sertifikat laik laut kapal (*seaworthiness*) untuk menjaga serta mencapai target hari operasi kapal.
 - f. Divestasi kapal milik yang sudah tidak produktif dan fokus pada operasional kapal dengan
2. Jasa Marine
 - a. Meningkatkan kualitas jasa keagenan kapal agar lebih cepat, efektif, dan efisien dengan tarif kompetitif melalui optimalisasi sistem informasi pada aspek pelayanan administrasi, suplai kebutuhan logistik kapal, serta penyelesaian disbursement.
 - b. Mengembangkan kompetensi SDM dan menambah aset produksi dalam bisnis jasa *marine* seperti pengerukan alur pelayaran, pemeliharaan sarfas pelabuhan, teknik bawah air, suplai air baku untuk kapal & industri, penyediaan awak kapal, *ship management*, *waste management*, dan *bunker handling*.
 - c. Menambah jumlah pelabuhan dalam bisnis *port operation services* melalui kegiatan *Recognized Security Organization* dan penerapan *International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code*.

The long-term Corporate Strategy is contained in the Company's Long-term Plan (RJPP), which is authorized by the Shareholders. PTK's RJPP period is 2022–2027 with the following general strategic plan:

1. Jasa Perkapalan
 - a. Improving operational excellence by prioritizing Occupational Health, Safety, and Environment (OHSE) aspects, ship crew competencies, and standard Service Level Agreements to meet customer needs.
 - b. Adding the type and number of owned fleets to serve the oil & gas industry segment through Pertamina group synergy and strategic partnerships.
 - c. Diversification of the customer base within the Pertamina group, Contractors of Cooperation Contract (KKKS), and potential markets in the oil and gas and maritime sectors.
 - d. Efficiency of ship operation and maintenance costs through an integrated fleet maintenance program between superintendents, crew members, shipyards, and vendors by optimizing the Planned Maintenance System digital information system.
 - e. Monitoring and renewal of ship seaworthiness certificates to maintain and achieve target ship operating days.
 - f. Divestment of unproductive owned ships and focus on ship operations with more favorable market prospects.
2. Marine Services
 - a. Improving the quality of ship agency services to make them faster, more effective and efficient at competitive rates through optimizing information systems in the aspect of administrative services, supplying ship logistics needs, and disbursement settlement.
 - b. Developing HR competence and adding production assets in the marine services business, such as shipping channel dredging, port infrastructure maintenance, underwater engineering, raw water supply for ships & industry, crew provision, ship management, waste management, and bunker handling.
 - c. Increasing the number of ports in the port operation services business through Recognized Security Organization activities and implementing the International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code.



3. Jasa Logistik
 - a. Menambah area kerja bidang kepelabuhanan melalui kemitraan dengan pemilik pelabuhan, khususnya pelabuhan strategis dengan aktivitas perkapalan yang sibuk dan frekuensi bongkar-muat yang tinggi.
 - b. Membangun *logistic shorebase* yang berdekatan dengan wilayah eksplorasi blok migas lepas pantai Pertamina dan KKKS sebagai *one-stop services logistic shorebase* berstandar internasional.
 - c. Menambah infrastruktur, aset produksi, dan peningkatan kompetensi SDM untuk kegiatan badan usaha pelabuhan (*freight forwarding, cargodoring, stevedoring*).
4. Digitalisasi
 - a. Digitalisasi di seluruh mata rantai bisnis (*end to end*) untuk menunjang produktivitas dan kecepatan pengambilan keputusan.
 - b. Meningkatkan *maritime cyber security awareness* pada awak kapal dan operator untuk keamanan pertukaran informasi elektronik.
5. Finansial
 - a. Meningkatkan kelancaran arus kas perusahaan melalui restrukturisasi skema pinjaman dari eksternal.
 - b. Mendapatkan sumber pendanaan melalui mitra strategis untuk investasi kapal dan proyek lainnya melalui skema pembiayaan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang dengan tingkat suku bunga pinjaman yang terjangkau.
 - c. Percepatan perolehan piutang macet untuk menjaga arus kas perusahaan.
6. Organisasi dan Manajemen Portofolio
 - a. Transformasi budaya organisasi yang *agile* dan kompetitif guna menghadapi dunia persaingan yang *Volatility, Uncertainty, Complexity, and Ambiguity* (VUCA).
 - b. Mengembangkan organisasi serta *workforce planning* yang mendukung perkembangan bisnis yang selaras dengan arah bisnis induk perusahaan.
 - c. Meningkatkan *Strategic People Development & Management*.
 - d. Optimalisasi portofolio Anak Perusahaan.
7. Citra Perusahaan
 - a. Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) seluruh pekerja untuk komitmen integritas, kepatuhan terhadap hukum, hubungan & lingkungan kerja, serta konflik kepentingan sesuai Tata Nilai AKHLAK.
 - b. Memperluas *customer referral & social awareness* melalui penggunaan brand "Transko" sebagai identitas perusahaan dalam kegiatan bisnis korporat dan sosial perusahaan pada *platform* multimedia.

3. Logistic Services
 - a. Increasing the work area in the port sector through partnerships with port owners, especially strategic ports with busy shipping activities and high frequency of loading and unloading.
 - b. Building a shore base logistics adjacent to the Pertamina and PSC Contractors' shore oil and gas exploration areas as onestop shore base logistics services with international standards.
 - c. Adding infrastructure, production assets, and increasing HR competencies for port business entity activities (*freight forwarding, cargodoring, stevedoring*).
4. Digitalization
 - a. Digitalization throughout the business chain (*end-to-end*) to support productivity and speed of decision-making.
 - b. Increasing maritime cyber security awareness among ship crews and operators for the security of electronic information exchange.
5. Financial
 - a. Increasing the smoothness of the Company's cash flow through restructuring external loan schemes.
 - b. Obtaining funding sources through strategic partners for ship investment and other projects through short-term, mediumterm, and long-term financing schemes with aordable loan interest rates.
 - c. Accelerating the acquisition of bad debts to maintain the Company's cash flow.
6. Portfolio Organization and Management
 - a. Transformation of an agile and competitive organizational culture to face a Volatility, Uncertainty, Complexity, and Ambiguity (VUCA) world of competition.
 - b. Developing an organization and workforce planning that supports business development in line with the parent company's business direction.
 - c. Improving Strategic People Development & Management.
 - d. Optimizing the portfolio of Subsidiaries.
7. Corporate Image
 - a. Implementation of GCG by all employees for commitment to integrity, compliance with laws, relations & work environment, as well as conflicts of interest according to the AKHLAK Values.
 - b. Expanding customer referrals & social awareness by using the "Transko" brand as a corporate identity in the Company's corporate and social business activities on multimedia platforms.

- c. Berperan aktif dalam kegiatan pengembangan masyarakat dan komunitas melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan edukasi.

- c. Taking on an active role in social and community development activities through *Corporate Social Responsibility* (CSR) and education programs.

Rencana Strategis Tahun 2024

Strategic Plan in 2024

PTK bergerak dalam bisnis pelayaran dan jasa maritim, dengan tiga fokus utama yakni penyewaan kapal (*shipping activities*), jasa marine (*marine services*), dan logistik (*logistic services*). Berikut rencana kerja dan program strategis PTK Tahun 2024:

1. Shipping Activities

- a. Implementasi budaya HSSE dan keunggulan operasional untuk memastikan keandalan kapal
- b. Investasi pada *marine support* dan *offshore support vessel* untuk Pertamina Group dan KKKS
- c. Divestasi kapal-kapal yang telah melampaui umur ekonomis dan tidak produktif
- d. Peremajaan kapal yang sudah berumur >30 tahun
- e. Memperkuat sinergi dengan rekan-rekan entitas Pertamina Group dan entitas BUMN untuk menangkap peluang bisnis *charter* kapal melalui strategi paket pekerjaan (*bundling & unbundling*)
- f. Pengembangan bisnis untuk *Dockyard Sorong* dan *Bagus Kuning* melalui kemitraan strategis
- g. Pengembangan bisnis *ship vetting & inspection*
- h. Digitalisasi proses bisnis dalam memonitor operasional kapal dan evaluasi performa kapal untuk menjaga keandalan kapal dalam mencapai *full commission*

2. Marine Services

- a. Implementasi keunggulan *service* sesuai dengan komitmen *Service Level Agreement* dengan konsumen
- b. Mengembangkan manajemen bisnis transportasi *Fatty Acid Methyl Ester* (FAME) sesuai dengan arahan Holding dalam mendukung program biodiesel pemerintah
- c. Pengembangan bisnis *port management*, *port EPC & maintenance*, jasa pemanduan, *oil spill response*, serta peluang bisnis *marine service* lainnya melalui investasi dalam mendukung peralatan dan meningkatkan kompetensi pekerja

PTK is engaged in the shipping and maritime services business, with three main focuses: shipping activities, marine services, and logistics services. The following is PTK's work plan and strategic program in 2024:

1. Shipping Activities

- a. Implementation of HSSE culture and operational excellence to ensure vessel reliability
- b. Investment in marine support and offshore support vessels for Pertamina Group and PSCs
- c. Divestment of vessels that have exceeded economic age and are not productive
- d. Rejuvenation of vessels that are over 30 years old
- e. Strengthening synergy with fellow Pertamina Group entities and state-owned entities to capture ship charter business opportunities through a work package strategy (*bundling & unbundling*)
- f. Business development for *Sorong* and *Bagus Kuning Dockyards* through strategic partnerships
- g. Ship vetting & inspection business development
- h. Digitalization of business processes in monitoring ship operations and evaluating ship performance to maintain ship reliability in achieving *full commission*

2. Marine Services

- a. Implementation of service excellence in accordance with *Service Level Agreement* commitments with consumers.
- b. Developing *Fatty Acid Methyl Ester* (FAME) transportation business management in accordance with the Holding's direction in supporting the government's biodiesel program.
- c. Development of port management business, port EPC & maintenance, guiding services, oil spill response, and other marine service business opportunities through investment in supporting equipment and improving worker competencies



- d. Memperkuat sinergi dengan rekan-rekan entitas Pertamina Group dan entitas BUMN untuk menangkap peluang bisnis *charter* kapal melalui strategi paket pekerjaan (*bundling & unbundling*)
- e. Digitalisasi proses bisnis

3. Logistic Services

- a. Pemenuhan aspek HSSE dan keunggulan operasional dalam aktivitas operasional
- b. Penambahan area *shorebase logistic* serta bekerja sama dengan partner potensial untuk mengembangkan *existing shorebase*
- c. Mengoptimalkan bisnis *shorebase logistic* di Kabil dan Tanjung Batu, serta mencari potensi lokasi *shorebase* yang baru
- d. Pengembangan infrastruktur dengan menambahkan aset-aset produksi, mengembangkan SDM dan digitalisasi proses bisnis

- d. Strengthening synergies with fellow Pertamina Group entities and state-owned entities to capture ship charter business opportunities through a work package strategy (*bundling & unbundling*)
- e. Digitalization of business processes

3. Logistic Services

- a. Fulfillment of HSSE aspects and operational excellence in operational activities
- b. Addition of logistics shorebase areas and working with potential partners to develop existing shorebases
- c. Optimizing the shorebase logistics business in Kabil and Tanjung Batu and looking for potential new shorebase locations.
- d. Infrastructure development by adding production assets, developing human resources, and digitizing business processes

Aspek Pemasaran Marketing Aspect

Segmentasi Pasar Market Segmentation

Sejak dilakukannya restrukturisasi Pertamina pada Mei 2021 lalu, PTK mengelompokkan layanan bisnisnya kedalam tiga kategori utama yaitu *Shipping Activities*, *Marine Services*, dan *Logistics Services*. Pembagian ini bertujuan untuk mengoptimalkan potensi dan efisiensi operasional serta memperkuat daya saing PTK, baik domestik maupun internasional.

Pangsa pasar PTK terbagi menjadi dua segmen utama, yaitu Pertamina dan non-Pertamina. PTK terus menjaga hubungan baik dengan pelanggan eksisting, baik melalui pemenuhan kebutuhan, maupun melalui langkah-langkah strategis lainnya yang berfokus pada pertumbuhan dan pengembangan kapasitas operasional.

Beberapa langkah strategis yang diambil untuk mempertahankan dan meningkatkan pangsa pasar adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan utilisasi asset yang dimiliki khususnya yang digunakan dalam kontrak bundling untuk mendapatkan incremental revenue.
2. PTK berkomitmen untuk menyediakan armada kapal yang sesuai dengan kebutuhan industri hulu (Upstream),

Since Pertamina's restructuring in May 2021, PTK has grouped its business services into three main categories, namely Shipping Activities, Marine Services, and Logistics Services. This division aims to optimize potential and operational efficiency and strengthen PTK's competitiveness, both domestically and internationally.

PTK's market share is divided into two main segments, namely Pertamina and non-Pertamina. PTK continues to maintain good relations with existing customers, both through fulfillment of needs, as well as through other strategic steps that focus on growth and development of operational capacity.

Several strategic steps taken to maintain and increase market share are as follows:

1. Optimizing the utilization of assets owned, especially those used in bundling contracts, to obtain incremental revenue.
2. PTK is committed to providing a fleet of vessels that meet the needs of the Upstream industry, both

baik dari armada eksisting maupun dari investasi baru. Dengan penyediaan kapal yang tepat dan sesuai kebutuhan pelanggan, PTK dapat mendukung kelancaran operasi industri energi dan memperkuat posisinya.

3. PTK juga aktif melakukan sinergi dengan BUMN dan pemerintah dalam berbagai proyek strategis. Kolaborasi ini tidak hanya memberikan keuntungan dalam hal penguatan posisi di pasar, tetapi juga mendukung kebijakan pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi nasional. Sinergi ini memungkinkan PTK untuk mendapatkan akses lebih besar terhadap proyek-proyek besar dan sumber daya yang dapat meningkatkan operasional serta profitabilitas
4. PTK menjalin kemitraan strategis (strategic partnerships) dengan berbagai pihak, termasuk perusahaan internasional. Kemitraan ini memberikan peluang untuk masuk ke pasar global dan memperluas jaringan. Selain itu, PTK aktif dalam keikutsertaan tender internasional, yang memungkinkan perusahaan untuk bersaing secara global dalam menyediakan armada transportasi yang handal.

Salah satu program kerja utama tahun 2024 yaitu meningkatkan *market size* di pangsa pasar Pertamina Group serta memperluas skala bisnis di luar *captive market* untuk menangkap peluang pada segmen *Shipping Activities*, *Marine Services* dan *Logistic Services*.

from the existing fleet and from new investments. By providing the right vessels and according to customer needs, PTK can support the smooth operation of the energy industry and strengthen its position.

3. PTK also actively synergizes with SOEs and the government in various strategic projects. This collaboration not only provides benefits in terms of strengthening market position, but also supports government policies in strengthening national energy security. These synergies allow PTK to gain greater access to large projects and resources that can improve operations and profitability.
4. PTK established strategic partnerships with various parties, including international companies. These partnerships provide opportunities to enter global markets and expand networks. In addition, PTK is active in participating in international tenders, which allows the Company to compete globally in providing a reliable transportation fleet.

One of the main work programs in 2024 is to increase market size in Pertamina Group's market share and expand business scale outside the captive market to capture opportunities in the Shipping Activities, Marine Services, and Logistic Services segments.

Bisnis Port Management Bundling

Port Management Bundling Business

Bisnis *Port Management Bundling* adalah gabungan dari berbagai layanan bisnis *marine* yang ditawarkan menjadi satu paket bisnis dengan satu harga, yang mengacu kepada anggaran biaya operasi *routine marine*. Bisnis *Bundling* terdiri dari beberapa pekerjaan meliputi:

1. *Periodic Underwater Inspection*
2. Kapal-kapal ringan,
3. *Pilotage*,
4. *Oil Spill Response*,
5. *Port Operation*

The Port Management Bundling business is a combination of various marine business services offered into one business package at one price, which refers to the routine marine operating cost budget. The Bundling business consists of several jobs, including:

1. Periodic Underwater Inspection,
2. Light vessels,
3. Pilotage,
4. Oil Spill Response,
5. Port Operation.



Bisnis Port Management Unbundling

Port Management Unbundling Business

Bisnis *Port Management Unbundling* adalah suatu layanan marine di luar bisnis *bundling*, yang ditawarkan secara terpisah disesuaikan dengan kebutuhan pengguna (*user*) dengan harga/tarif yang telah disepakati dan mengacu kepada anggaran biaya operasi (ABO) khusus *marine*. Bisnis *Unbundling* terdiri dari beberapa pekerjaan meliputi:

1. *Dredging*,
2. *Hydro Oceanography*,
3. *Port Permit & Licenses*,
4. *Port Planned Maintenance*,
5. *Corrective Maintenance/Revitalization*,
6. *Engineering Procurement Construction*,
7. *Underwater Facilities Minor Maintenance*
8. *STS Support Provider*.

The Port Management Unbundling business is a marine service outside the bundling business, which is offered separately tailored to the needs of the user with an agreed price/tariff and refers to a marine-specific operating cost budget (ABO). The Unbundling business consists of several jobs, including:

1. *Dredging*,
2. *Hydro Oceanography*,
3. *Port Permit & Licenses*,
4. *Port Planned Maintenance*,
5. *Corrective Maintenance/Revitalization*,
6. *Engineering Procurement Construction*,
7. *Underwater Facilities Minor Maintenance*,
8. *STS Support Provider*.

Pangsa Pasar

Market Share

Dengan mengintegrasikan berbagai strategi ini, PTK tidak hanya berupaya untuk mempertahankan segmen pasar yang ada, tetapi juga berfokus pada pembentukan hubungan jangka panjang dengan pelanggan, memperluas armada, dan meningkatkan kapasitas layanan yang dapat memenuhi tuntutan pasar yang dinamis.

By integrating these strategies, PTK not only strives to retain existing market segments, but also focuses on establishing long-term relationships with customers, expanding its fleet, and increasing service capacity to meet dynamic market demands.

Pangsa Pasar Berdasarkan Segmen Jasa PTK Tahun 2024

Market Share by Service Segments of PTK in 2024

(dalam Rp juta)(in Rp)

Segmen Segment	YTD Desember 2024				Total Revenue PTK Konsolidasi Total Consolidated Revenue of PTK
	Revenue ke Internal SH IML (PT PIS & PET) Revenue to Internal SH IML (PT PIS & PET)	Revenue ke Pertamina Group Non IML Revenue to Non- IML Pertamina Group	Revenue ke Pihak Ketiga Revenue to Third Party	Revenue ke Relpar Revenue to Related Party	
Jasa Penunjang Operasi Marine Marine Operations Support Services	245.166	551.023	257.461	56.971	1.110.621
Jasa broker kapal, neto Charter broker services, net	-	93.680	143.191	-	236.871
Pendapatan Komisi Commission Income	-	-	-	-	-

Segmen Segment	YTD Desember 2024				Total Revenue PTK Konsolidasi Total Consolidated Revenue of PTK
	Revenue ke Internal SH IML (PT PIS & PET) Revenue to Internal SH IML (PT PIS & PET)	Revenue ke Pertamina Group Non IML Revenue to Non- IML Pertamina Group	Revenue ke Pihak Ketiga Revenue to Third Party	Revenue ke Relpar Revenue to Related Party	
Sewa kapal – time charter Vessel charter – time charter	258.795	1.423.521	52.009	-	1.749.324
Jasa Penyedia Tenaga Kerja Labor supply services	742.556	302.062	193.578	8.337	1.246.534
Keagenan Kapal dan Jasa Kepelabuhan Shipping Agency and Port Services	518.438	1.731.070	424.456	77.462	2.751.427
Perdagangan Umum General Trading	-	2.711.609	617	-	3.329
Pengerukan Dredging	-	78.588	-	-	78.588
Bongkar Muat Cargo Handling	-	-	15.064	-	15.064
Sewa Gudang Warehouse Leases	-	-	2.768	-	2.768
Lainnya Others	-	-	323.835	-	323.835
Total	1.764.956	4.197.655	(43.854)	142.770	7.518.362
Total Revenue Captive Market	5.962.611	79%			
Total Revenue Non Captile Market	1.555.750	21%			

Note : Berdasarkan pencatatan Keuangan Unaudited Ytd Des 2024

Note : Based on Unaudited Financial records Ytd December 2024

Strategi Pemasaran Tahun 2024

Marketing Strategy in 2024

Secara umum, strategi pemasaran yang diimplementasikan PTK sepanjang tahun 2024 antara lain:

1. Memperkuat Existing Business

Strategi ini mencakup dua fokus program strategis yaitu:

- a. *Revenue Optimization*
 - Memperkuat eksistensi di *captive market* melalui sinergi Pertamina Group,
 - Pertumbuhan pendapatan dan laba dengan tingkat kesehatan yang baik,

In general, the marketing strategies implemented by PTK throughout 2024 include:

1. Strengthening Existing Business

This strategy includes two strategic program focuses, namely:

- a. *Revenue Optimization*
 - Strengthening its existence in the captive market through Pertamina Group synergy,
 - Revenue and profit growth with a good level of soundness,



- Menyediakan Layanan Jasa *Maritime* Terintegrasi (*one-stop maritime services provider*) dengan standar layanan terbaik kelas global,
- Meningkatkan *cross selling* pada semua segmen bisnis PTK,
- *Alignment* dengan fungsi operasional dan *enabler* dalam rangka optimalisasi aset untuk peningkatan *margin*.

b. *Customer Focus*

- *Refocusing* segmen bisnis PTK dan Anak Perusahaan (AP) PTK,
- Meningkatkan *customer engagement* dengan memberikan layanan yang terbaik,
- *Customer Focus* dengan peningkatan *service mindset*,
- Implementasi keunggulan *service* sesuai dengan komitmen *Service Level Agreement* dengan konsumen.

2. Memperluas Pertumbuhan Bisnis

- Investasi pada *marine support* dan *offshore support vessel* untuk Pertamina Grup,
- Memperkuat sinergi dengan rekan-rekan entitas Pertamina Grup dan entitas BUMN untuk menangkap peluang bisnis *charter*,
- Pengembangan bisnis untuk *Dockyard* Sorong dan Bagus Kuning melalui kemitraan strategis,
- Pengembangan bisnis *ship vetting* dan *inspection*
- Pengembangan bisnis *port management*, *port EPC & maintenance*, jasa pemanduan, *oil spill response*, serta peluang bisnis *marine service* lainnya,
- Penambahan area *shorebase logistic* serta bekerja sama dengan partner potensial untuk mengembangkan *existing*.

- Providing Integrated Maritime Services (*one-stop maritime services provider*) with the best global service standards,
- Increasing cross-selling in all PTK business segments,
- Alignment with the operational and enabler functions to optimize assets for margin improvement.

b. *Customer Focus*

- Refocusing the business segments of PTK and PTK Subsidiaries (AP),
- Improving customer engagement by providing the best service,
- Customer Focus with an improved service mindset,
- Implementation of service excellence in accordance with Service Level Agreement commitments with consumers.

2. Expanding Business Growth

- Investment in marine support and offshore support vessels for Pertamina Group,
- Strengthening synergy with fellow Pertamina Group entities and state-owned entities to capture charter business opportunities,
- Business development for Sorong and Bagus Kuning Dockyards through strategic partnerships,
- Ship vetting and inspection business development
- Development of port management business, port EPC & maintenance, pilotage services, oil spill response, and other marine service business opportunities,
- Addition of shorebase logistics area and working with potential partners to develop existing.

Analisis Kinerja Keuangan

Analysis of Financial Performance

Uraian dan analisis kinerja keuangan disajikan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian PT Pertamina Trans Kontinental untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan tanggal 25 April 2025 dengan opini “wajar dalam semua hal yang material”. Laporan Keuangan Konsolidasian sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya, Laporan Keuangan Konsolidasian dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan Laporan Tahunan ini pada bagian tersendiri.

The description and analysis of financial performance are presented based on the Consolidated Financial Statements of PT Pertamina Trans Kontinental for the years ended December 31, 2024, and 2023, which have been audited by the Public Accounting Firm (KAP) Rintis, Jumadi, Rianto & Partner dated April 25, 2025, with the opinion “fair in all material respects”. The Consolidated Financial Statements comply with the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) applicable in Indonesia. Furthermore, the Consolidated Financial Statements are attached as an integral part of this Annual Report in a separate section.

Analisis Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

Analysis of the Consolidated Statements of Financial Position

Posisi keuangan PTK tahun 2024 terdiri dari jumlah aset sebesar Rp9,08 triliun, jumlah liabilitas sebesar Rp4,48 triliun, dan jumlah ekuitas sebesar Rp4,60 triliun.

PTK's financial position in 2024 consisted of total assets of Rp9.08 trillion, total liabilities of Rp4.48 trillion, and total equity of Rp4.60 trillion.

Tabel Posisi Keuangan
Table of Financial Position

(dalam Rp juta, kecuali dinyatakan lain)
(in Rp million, unless otherwise stated)

Uraian Description	2024	2023	2022	Kenaikan (Penurunan) 2023-2024 Increase (Decrease)	
				Selisih Difference	Persentase Percentage
Aset Assets					
Aset Lancar Current Asset	4.519.749	4.668.038	3.811.707	(148.289)	(3,18)%
Aset Tidak Lancar Non-Current Asset	4.560.692	4.356.761	4.390.864	203.931	4,68%
Jumlah Aset Total Assets	9.080.441	9.024.799	8.202.571	55.642	0,62%
Liabilitas dan Ekuitas Liabilities and Equity					
Liabilitas Liabilities					
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	3.739.072	3.548.308	3.613.513	190.764	5,38%
Liabilitas Jangka Panjang Liabilitas Jangka Panjang	737.504	836.106	981.479	(98.602)	(11,79)%
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	4.476.576	4.384.414	4.594.992	92.162	2,10%
Jumlah Ekuitas Total Equity	4.603.865	4.640.386	3.607.579	(36.521)	(0,79)%
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas Total Liabilities and Equity	9.080.441	9.024.799	8.202.571	55.642	0,62%

Aset

Assets

Jumlah aset PTK pada tahun 2024 adalah sebesar Rp9,08 triliun, yaitu mengalami peningkatan 0,62% atau sebesar Rp55,64 miliar dibandingkan tahun 2023. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh adanya peningkatan pada aset tidak lancar.

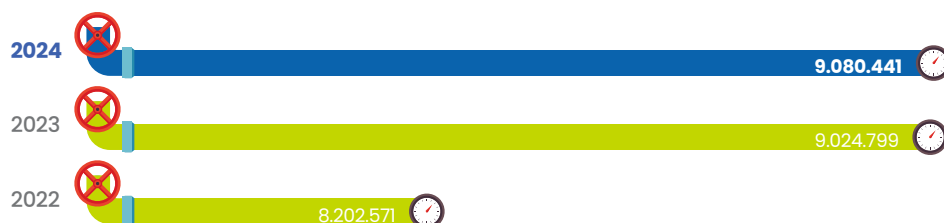
In 2024, PTK's total assets amounted to Rp9.08 trillion, an increase of 0.62% or Rp55.64 billion compared to 2023. The increase was mainly driven by an increase in non-current assets.



Grafik Jumlah Aset

Grafik Jumlah Aset

(dalam Rp Juta) (in Million Rp)



Aset Lancar

Current Asset

Jumlah aset lancar PTK pada tahun 2024 adalah sebesar Rp4,52 triliun, yaitu mengalami penurunan 3,18% atau sebesar Rp148,29 miliar dibandingkan tahun 2023. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh pembayaran dividen ke pemegang saham di tahun 2024, piutang sewa pembiayaan dan aset lancar lainnya. Namun, hal ini diimbangi oleh adanya kenaikan piutang usaha.

PTK's total current assets in 2024 amounted to Rp4.52 trillion, a decrease of 3.18% or Rp148.29 billion compared to 2023. The decrease was mainly due to dividend payments to shareholders in 2024, finance lease receivables and other current assets. However, this was offset by an increase in trade receivables.

Tabel Aset Lancar

Table of Current Assets

(dalam Rp juta, kecuali dinyatakan lain)
(in Rp million, unless otherwise stated)

Uraian Description	2024	2023	2022	Kenaikan (Penurunan) 2023-2024 Increase (Decrease)	
				Selisih Difference	Persentase Percentage
Kas dan setara kas Cash and cash equivalents	1.209.305	1.843.431	1.125.624	(634.126)	(34,40)%
Kas yang dibatasi penggunaannya Restricted cash	2.710	2.072	1.779	638	30,79%
Piutang usaha Trade receivables	1.485.069	962.842	1.284.773	522.227	54,24%
Aset kontrak Contract assets	1.574.840	1.555.024	1.277.205	19.816	1,27%
Piutang sewa pembiayaan Finance lease receivables	-	22.574	22.798	(22.574)	(100,00)%
Pajak dibayar dimuka - pajak lain-lain Finance lease receivables	165.052	124.444	24.076	40.608	32,63%
Aset lancar lainnya Other current assets	82.773	157.651	75.452	(74.878)	(47,50)%
Jumlah Aset Lancar Total Current Assets	4.519.749	4.668.038	3.811.707	(148.289)	(3,18)%

Aset Tidak Lancar

Non-Current Assets

Jumlah aset tidak lancar PTK pada tahun 2024 adalah sebesar Rp4,56 triliun, yaitu mengalami peningkatan 4,68% atau sebesar Rp203,93 miliar dibandingkan tahun 2023. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh peningkatan pada aset tetap, aset hak-guna, pajak dibayar dimuka - pajak penghasilan, aset pajak tangguhan, investasi pada ventura bersama dan aset tidak lancar lainnya.

PTK's total non-current assets in 2024 amounted to Rp4.56 trillion, an increase of 4.68% or Rp203.93 billion compared to 2023. The increase was mainly driven by increases in fixed assets, right-of-use assets, prepaid taxes - income taxes, deferred tax assets, investments in joint ventures and other non-current assets.

Tabel Aset Lancar

Table of Non-Current Assets

(dalam Rp juta, kecuali dinyatakan lain)
(in Rp million, unless otherwise stated)

Uraian Description	2024	2023	2022	Kenaikan (Penurunan) 2023-2024 Increase (Decrease)	
				Selisih Difference	Persentase Percentage
Aset tetap Fixed assets	3.753.640	3.652.243	3.861.943	101.397	2,78%
Aset hak-guna Right-of-use assets	522.480	485.284	309.975	37.196	7,66%
Aset pajak tangguhan Deferred tax assets	126.051	100.830	87.616	25.221	25,01%
Penyertaan saham Investment in shares	6.652	6.652	6.661	0	-
Investasi pada ventura bersama Investment in joint venture	105.962	98.132	87.607	7.830	7,98%
Pajak dibayar dimuka - pajak penghasilan Prepaid taxes - corporate income tax	31.898	4.933	-	26.965	546,62%
Aset tidak lancar lainnya Other non-current assets	14.009	8.687	37.062	5.322	61,26%
Jumlah Aset Tidak Lancar Total Non-Current Assets	4.560.692	4.356.761	4.390.864	203.931	4,68%

Liabilitas

Liabilities

Jumlah liabilitas PTK pada tahun 2024 adalah sebesar Rp4,48 triliun, yaitu mengalami peningkatan 2,10% atau sebesar Rp92,16 miliar dibandingkan tahun 2023. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh peningkatan liabilitas jangka pendek.

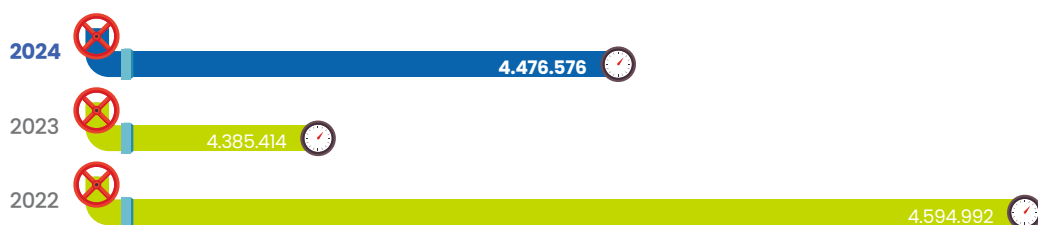
In 2024, PTK's total liabilities amounted to Rp4.48 trillion, an increase of 2.10% or Rp92.16 billion compared to 2023. The increase was mainly driven by an increase in current liabilities.



Grafik Jumlah Liabilitas

Chart of Total Liabilities

(dalam Rp Juta) (in Million Rp)



Liabilitas Jangka Pendek

Current Liabilities

Jumlah liabilitas jangka pendek PTK pada tahun 2024 adalah Rp3,74 triliun, yaitu mengalami peningkatan 5,38% atau sebesar Rp190,76 miliar dibandingkan tahun 2023. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh peningkatan utang usaha, biaya masih harus dibayar, liabilitas sewa dan bagian jangka pendek dari liabilitas imbalan pasca kerja. Namun, hal ini diimbangi dengan adanya penurunan dari bagian jangka pendek dari pinjaman jangka panjang, utang pajak dan liabilitas kontrak.

PTK's total current liabilities in 2024 were Rp3.74 trillion, an increase of 5.38% or Rp190.76 billion compared to 2023. The increase was primarily driven by an increase in accounts payable, accrued expenses, lease liabilities and the current portion of post-employment benefit liabilities. However, this was offset by a decrease in the current portion of long-term borrowings, taxes payable and contract liabilities.

Tabel Liabilitas Jangka Pendek

Table of Current Liabilities

(dalam Rp juta, kecuali dinyatakan lain)
(in Rp million, unless otherwise stated)

Uraian Description	2024	2023	2022	Kenaikan (Penurunan) 2023-2024 Increase (Decrease)	
				Selisih Difference	Persentase Percentage
Utang usaha Trade payables	1.287.943	1.027.112	1.027.562	260.831	25,39%
Biaya masih harus dibayar Accrued expenses	1.580.932	1.483.781	1.742.194	97.151	6,55%
Liabilitas kontrak Contract liabilities	204.034	233.535	107.220	(29.501)	(12,63)%
Utang pajak Taxes payable	97.816	163.478	150.256	(65.662)	(40,17)%
Liabilitas sewa Lease liabilities	365.298	335.390	354.455	29.908	8,92
Bagian jangka pendek dari pinjaman jangka panjang Current portion of long-term borrowings	175.300	305.012	231.826	(129.712)	(42,53)%
Bagian jangka pendek dari liabilitas imbalan pasca kerja Current portion of post-employment benefit obligation	27.749	-	-	27.749	100,00%
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek Total Current Liabilities	3.739.072	3.548.308	3.613.513	190.764	5,38%

Liabilitas Jangka Panjang

Non-Current Liabilities

Jumlah liabilitas jangka panjang PTK pada tahun 2024 adalah sebesar Rp737,50 miliar yaitu mengalami penurunan 11,79% atau sebesar Rp98,60 miliar dibandingkan tahun 2023. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh liabilitas sewa, pinjaman jangka panjang dan bagian jangka panjang dari liabilitas imbalan pasca kerja.

In 2024, PTK's total non-current liabilities amounted to Rp737.50 billion, a decrease of 11.79% or Rp98.60 billion compared to 2023. The decrease was mainly due to lease liabilities, long-term loans and the long-term portion of post-employment benefit liabilities.

Tabel Liabilitas Jangka Panjang
Table of Non-Current Liabilities

(dalam Rp juta, kecuali dinyatakan lain)
(in Rp million, unless otherwise stated)

Uraian Description	2024	2023	2022	Kenaikan (Penurunan) 2023-2024 Increase (Decrease)	
				Selisih Margin	Persentase Percentage
Liabilitas sewa Lease liabilities	141.905	187.498	81.930	(45.593)	(24,32)%
Pinjaman jangka panjang Long-term borrowings	386.220	426.950	722.993	(40.730)	(9,54)%
Bagian jangka panjang dari Liabilitas imbalan pasca kerja Non-current portion of post-employment benefit obligation	209.379	221.658	176.556	(12.279)	(5,54)%
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang Total Non-Current Liabilities	737.504	836.106	981.479	(98.602)	(11,79)%

Ekuitas

Equity

Jumlah ekuitas PTK pada tahun 2024 adalah sebesar Rp4,60 triliun, yaitu mengalami penurunan 0,79% atau sebesar Rp36,52 miliar dibandingkan tahun 2023. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan saldo laba ditahan.

PTK's total equity in 2024 amounted to Rp4.60 trillion, a decrease of 0.79% or Rp36.52 billion compared to 2023. The decrease was mainly due to a decrease in retained earnings.

Tabel Ekuitas

Table of Equity

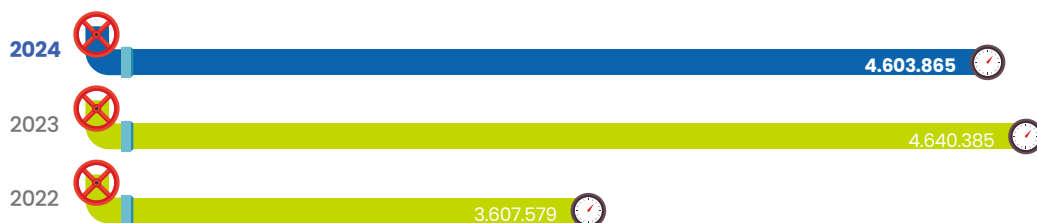
(dalam Rp juta, kecuali dinyatakan lain)
(in Rp million, unless otherwise stated)

Uraian Description	2024	2023	2022	Kenaikan (Penurunan) 2023-2024 Increase (Decrease)	
				Selisih Difference	Persentase Percentage
Modal saham Share capital	1.234.748	1.234.748	1.234.748	-	-
Tambahan modal disetor Additional paid-in capital	(76.051)	(76.051)	(76.051)	-	-
Rugi komprehensif lain Other comprehensive loss	(76.031)	(99.560)	(80.872)	23.529	(23,63)%
Saldo laba Retained earnings	3.520.619	3.580.727	2.529.358	(60.108)	(1,68)%
Kepentingan non-pengendali Non-controlling interest	580	521	396	59	11,32%
Jumlah Ekuitas Total Equity	4.603.865	4.640.386	3.607.579	(36.521)	(0,79)%

Grafik Jumlah Ekuitas

Chart of Total Equity

(dalam Rp Juta) (in Million Rp)



Analisis Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

Analysis of Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income

Pada tahun 2024, PTK berhasil membukukan laba tahun berjalan sebesar Rp1,08 triliun, yaitu mengalami peningkatan 2,26% atau Rp23,81 miliar dibandingkan tahun 2023. Peningkatan ini terutama didorong oleh peningkatan pendapatan usaha, pendapatan lain-lain, pendapatan keuangan, bagian atas laba bersih ventura bersama dan penurunan atas beban keuangan. Namun, hal ini diimbangi sebagian oleh adanya pengurangan laba tahun berjalan disebabkan adanya kenaikan pada beban pokok pendapatan dan beban umum dan administrasi.

In 2024, PTK managed to book a profit for the year of Rp1.08 trillion, an increase of 2.26% or Rp23.81 billion compared to 2023. The increase was primarily driven by an increase in operating revenues, other income, finance income, share of joint venture net income and a decrease in finance expenses. However, this was partially offset by a decrease in profit for the year due to an increase in cost of revenue and general and administrative expenses.

Tabel Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

Table of Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income

(dalam Rp juta, kecuali dinyatakan lain)
(in Rp million, unless otherwise stated)

Uraian Description	2024	2023	2022	Kenaikan (Penurunan) 2023-2024 Increase (Decrease)	
				Selisih Difference	Persentase Percentage
Pendapatan usaha Revenue	7.559.108	6.746.509	4.784.913	812.599	12,04%
Beban pokok pendapatan Cost of revenue	(4.963.954)	(4.153.993)	(3.136.987)	(809.961)	19,50%
Laba bruto Gross profit	2.595.154	2.592.516	1.647.926	2.638	0,10%
Beban umum dan administrasi General and administrative expenses	(1.255.901)	(1.161.113)	(649.316)	(94.788)	8,16%
(Beban)/pendapatan lain-lain, neto Other (expenses)/income, net	3.960	(53.526)	25.531	57.486	(107,40)%
Pendapatan keuangan Finance income	55.586	46.690	23.565	8.896	19,05%
Beban keuangan Finance costs	(89.898)	(97.270)	(99.799)	7.372	(7,58)%
Bagian atas laba bersih ventura bersama Share in profit of joint venture	32.565	30.925	25.446	1.640	5,30%
Beban pajak final Final tax expense	(13.551)	(11.894)	(18.499)	(1.657)	13,93%
Laba sebelum pajak penghasilan Profit before income tax	1.327.915	1.346.328	954.854	(18.413)	(1,37)%
Beban pajak penghasilan Income tax expense	(252.615)	(294.834)	(221.826)	42.219	(14,32)%
Laba tahun berjalan Profit for the year	1.075.300	1.051.494	733.028	23.806	2,26%
Jumlah (rugi)/penghasilan komprehensif lain Total other comprehensive (loss)/ income	23.530	(18.688)	20.683	42.218	(225,91)%
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan Total comprehensive income for the year	1.098.830	1.032.806	753.711	66.024	6,39%
Laba per saham (dalam Rp) Earnings per share (in Rp)	0,87	0,85	0,59	0,02	2,30%

Grafik Laba Tahun Berjalan
Chart of Profit for the Year

(dalam Rp Juta) (in Million Rp)





Pendapatan Usaha

Revenue

Jumlah pendapatan usaha PTK mengalami peningkatan 12,04% atau sebesar Rp812,60 miliar dibandingkan tahun 2023, menjadi sebesar Rp7,56 triliun pada tahun 2024. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh peningkatan pendapatan usaha atas aktivitas *Port Operation dan Ship Crew Marine & Tanker*.

PTK's total revenue increased by 12.04% or Rp812.60 billion compared to 2023, to Rp7.56 trillion in 2024. The increase was mainly due to an increase in revenue from *Port Operation and Ship Crew Marine & Tanker* activities.

Beban Pokok Pendapatan

Cost of Revenue

Jumlah beban pokok pendapatan PTK mengalami peningkatan 19,50% atau sebesar Rp809,96 miliar dibandingkan tahun 2023, menjadi sebesar Rp4,96 triliun pada tahun 2024. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh peningkatan beban pokok pada kegiatan *Port Operation dan Ship Crew Marine & Tanker*.

PTK's total cost of revenue increased by 19.50% or Rp809.96 billion compared to 2023, to Rp4.96 trillion in 2024. The increase was mainly driven by an increase in the cost of *Port Operation and Ship Crew Marine & Tanker* activities.

Laba Bruto

Gross Profit

Jumlah laba bruto PTK mengalami peningkatan 0,10% atau sebesar Rp2,64 miliar dibandingkan tahun 2023, menjadi sebesar Rp2,59 triliun pada tahun 2024. kontribusi laba bruto segmen marine services sebesar 55,21% atau Rp1,43 triliun, disusul laba bruto segmen shipping activities 39,77 % atau Rp1,03 triliun, dan laba bruto segmen logistic services sebesar 5,02% atau Rp132,62 miliar.

PTK's gross profit increased by 0.10% or Rp2.64 billion. The contribution of the marine services segment gross profit was 55.21% or Rp1.43 trillion, followed by the shipping activities segment gross profit of 39.77% or Rp1.03 trillion, and the logistic services segment gross profit of 5.02% or Rp132.62 billion.

Beban Umum dan Administrasi

General and Administrative Expenses

Jumlah beban umum dan administrasi PTK mengalami peningkatan 8,16% atau sebesar Rp94,79 miliar dibandingkan tahun 2023, menjadi sebesar Rp1,25 triliun pada tahun 2024. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh peningkatan beban umum atas biaya man power related.

PTK's total general and administrative expenses increased by 8.16% or Rp94.79 billion compared to 2023, to Rp1.25 trillion in 2024. The increase was mainly due to an increase in general expenses for man power-related costs.

Pendapatan/(Beban) Lain-lain, neto

Other Income/(Expenses), net

Jumlah pendapatan/beban lain-lain PTK pada tahun 2024 adalah sebesar Rp3,96 miliar, sedangkan untuk tahun 2023 merupakan beban lain-lain sebesar Rp(53,53) miliar. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh provisi atas kasus hukum yang telah dilakukan pada tahun 2023 .

Total other income/expense of PTK in 2024 amounted to Rp3.96 billion, while for 2023, it was other expenses of Rp(53.53) billion. The increase was mainly driven by provisions for legal cases that have been made in 2023.

Pendapatan Keuangan

Finance Income

Jumlah pendapatan keuangan PTK mengalami peningkatan/penurunan 19,05% atau sebesar Rp8,89 miliar dibandingkan tahun 2023, menjadi sebesar Rp55,58 miliar pada tahun 2024. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh pendapatan bunga atas *on call deposit*.

PTK's total finance income increased by 19.05% or Rp8.89 billion compared to 2023, to Rp55.58 billion in 2024. The increase was mainly due to interest income on on-call deposits.

Beban Keuangan

Finance Costs

Jumlah beban keuangan PTK mengalami penurunan 7,58% atau sebesar Rp7,37 miliar dibandingkan tahun 2023, menjadi sebesar Rp89,89 miliar pada tahun 2024. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan beban keuangan atas pinjaman jangka panjang .

PTK's total finance costs decreased by 7.58% or Rp7.37 billion compared to 2023, to Rp89.89 billion in 2024. The decrease was mainly due to a decrease in finance costs on long-term loans.

Bagian atas Laba Bersih Ventura Bersama

Share in Profit of Joint Venture

Jumlah bagian atas laba bersih ventura bersama PTK mengalami peningkatan 5,30% atau sebesar Rp1,64 miliar dibandingkan tahun 2024, menjadi sebesar Rp32,56 miliar pada tahun 2024. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh peningkatan laba atas entitas ventura bersama .

PTK's total share in net profit of joint ventures increased by 5.30% or Rp1.64 billion compared to 2024, to Rp32.56 billion in 2024. The increase was mainly driven by an increase in profit on joint venture entities.



Beban Pajak

Tax Expenses

Beban pajak PTK terdiri dari beban pajak final dan beban pajak penghasilan. Jumlah beban pajak final PTK mengalami peningkatan 13,93% atau sebesar Rp1,66 miliar dibandingkan tahun 2023, menjadi sebesar Rp13,55 miliar pada tahun 2024. Sedangkan untuk jumlah beban pajak penghasilan PTK mengalami penurunan 14,32% atau sebesar Rp42,22 miliar dibandingkan tahun 2023, menjadi sebesar Rp252,61 miliar pada tahun 2024.

PTK's tax expense consists of final tax expense and income tax expense. The amount of PTK final tax expense increased by 13.93% or Rp1.66 billion compared to 2023, to Rp13.55 billion in 2024. Meanwhile, the amount of PTK income tax expense decreased by 14.32% or Rp42.22 billion compared to 2023, to Rp252.61 billion in 2024.

Jumlah Penghasilan/(Rugi) Komprehensif Lain

Total Other Comprehensive Income/(Loss)

Pada tahun 2024, PTK memperoleh penghasilan komprehensif lain sebesar Rp23,53 miliar, sedangkan tahun 2023 jumlah rugi komprehensif lain sebesar Rp18,69 miliar. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh pendapatan komperhensif dari *employee benefit*.

In 2024, PTK earned other comprehensive income of Rp23.53 billion, while in 2023, PTK earned other comprehensive loss of Rp18.69 billion. The increase was mainly driven by comprehensive income from employee benefits.

Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan

Total Comprehensive Income for the Year

Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan PTK mengalami peningkatan 6,39% atau sebesar Rp66,02 miliar dibandingkan tahun 2023, menjadi sebesar Rp1,10 triliun pada tahun 2024. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh pendapatan komperhensif dari *employee benefit*.

PTK's total comprehensive income for the year increased by 6.39% or Rp66.02 billion compared to 2023, to Rp1.10 trillion in 2024. The increase was mainly due to comprehensive income from employee benefits.

Analisis Laporan Arus Kas Konsolidasian

Analysis of the Consolidated Statements of Cash Flows

Pada tahun 2024, jumlah kas dan setara kas PTK tercatat sebesar Rp1,21 triliun, yaitu mengalami sebabkan oleh

In 2024, PTK's cash and cash equivalents amounted to Rp1.21 trillion, a decrease caused by changes in exchange rates on cash and cash equivalents.

Tabel Laporan Arus Kas Konsolidasian

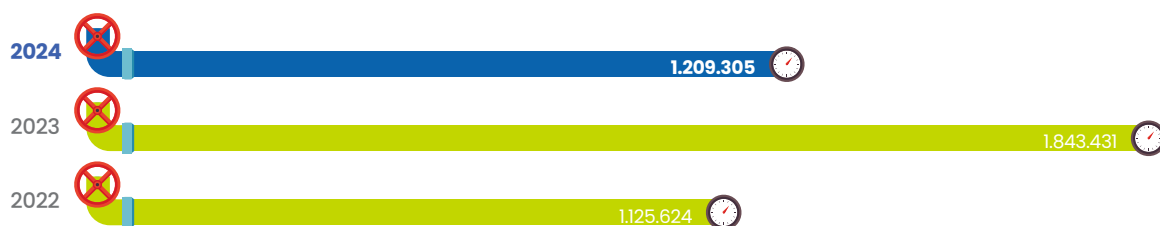
Table of the Consolidated Statements of Cash Flows

(dalam Rp juta, kecuali dinyatakan lain)
(in Rp million, unless otherwise stated)

Uraian Description	2024	2023	2022	Kenaikan (Penurunan) 2023-2024 Increase (Decrease)	
				Selisih Difference	Persentase Percentage
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi Net cash flows provided by operating activities	1.630.663	1.539.594	1.367.580	91.069	5,92%
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi Net cash flows used in investing activities	(441.691)	(101.859)	(219.767)	(339.832)	333,63%
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan Net cash flows used in financing activities	(1.812.721)	(727.361)	(1.290.043)	(1.085.360)	149,22%
Efek perubahan nilai kurs pada kas dan setara kas Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents	(10.377)	7.433	4.688	(17.810)	(239,61)%
(Penurunan)/kenaikan bersih kas dan setara kas Net (decrease)/increase in cash and cash equivalents	(634.126)	717.807	(137.542)	(1.351.933)	(188,34)%
Kas dan setara kas pada awal tahun Cash and cash equivalents at the beginning of the year	1.843.431	1.125.624	1.263.166	717.807	63,77%
Kas dan setara kas pada akhir tahun Cash and cash equivalents at the end of the year	1.209.305	1.843.431	1.125.624	(634.126)	(34,40)%

Grafik Jumlah Kas dan Setara Kas
Chart of Total Cash and Cash Equivalent

(dalam Rp Juta) (in Million Rp)





Arus Kas Aktivitas Operasi

Cash Flows from Operating Activities

Jumlah kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi PTK pada tahun 2024 adalah sebesar Rp1,63 triliun, yaitu mengalami peningkatan 5,92% atau sebesar Rp91,07 miliar dibandingkan tahun 2023. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh meningkatnya penerimaan kas dari pelanggan seiring dengan perbaikan efektivitas penagihan piutang usaha dari CnT, KPI, ICT Group dan Pihak ke 3 lainnya

Total net cash provided by PTK's operating activities in 2024 amounted to Rp1.63 trillion, an increase of 5.92% or Rp91.07 billion compared to 2023. The increase was mainly driven by increased cash receipts from customers in line with the improvement in the effectiveness of trade receivables collection from CnT, KPI, ICT Group and other 3rd parties.

Arus Kas Aktivitas Investasi

Cash Flows for Investing Activities

Jumlah kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi PTK pada tahun 2024 adalah sebesar Rp441,69 miliar, yaitu mengalami peningkatan 333.63% atau sebesar Rp339,83 miliar dibandingkan tahun 2023. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh peningkatan belanja modal (*capital expenditure*) untuk pengadaan Kapal AWB di Bulan April 2024 dan *docking* armada serta investasi strategis lainnya guna mendukung ekspansi bisnis dan peningkatan kapasitas operasional perusahaan.

In 2024, the total net cash used in PTK's investment activities amounted to Rp441.69 billion, an increase of 333.63% or Rp339.83 billion compared to 2023. The increase was mainly driven by an increase in capital expenditure for the procurement of AWB Vessels in April 2024 and fleet docking, as well as other strategic investments to support business expansion and increase the Company's operational capacity.

Arus Kas Aktivitas Pendanaan

Cash Flows for Financing Activities

Jumlah kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan PTK pada tahun 2024 adalah sebesar Rp1,81 triliun, yaitu mengalami peningkatan 149,22% atau sebesar Rp1,08 triliun dibandingkan tahun 2023. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh pembayaran utang jangka pendek dan jangka panjang, serta pembagian dividen kepada pemegang saham yang lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya yakni sebesar USD 75.000.000.

The total net cash used in PTK's financing activities in 2024 amounted to Rp1.81 trillion, an increase of 149.22% or Rp1.08 trillion compared to 2023. The increase was mainly driven by the payment of short-term and long-term debt, as well as the distribution of dividends to shareholders, which was more substantial than the previous year of US\$75,000,000.

Analisis Rasio Keuangan

Analysis of Financial Ratios

Kemampuan Membayar Utang

Solvency

Kemampuan Perusahaan dalam membayar utang dilihat dari rasio likuiditas untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya dan rasio solvabilitas untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menyelesaikan kewajiban jangka pendek dan panjang.

Secara umum, rasio likuiditas PTK pada tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023, hal ini disebabkan adanya pembayaran dividen kepada pemegang saham (PT. Pertamina International Shipping (PIS)) pada tahun 2024 senilai IDR 1,14 Triliun, sedangkan pada tahun 2023 tidak ada pembayaran dividen kepada PT. PIS. Untuk rasio solvabilitas, pada tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023, yang menunjukkan bahwa kondisi keuangan Perusahaan mampu untuk bisa menyelesaikan seluruh kewajibannya baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

The Company's ability to pay debts is seen from the liquidity ratio to measure the Company's ability to settle its current liabilities and the solvency ratio to measure the Company's ability to settle its current and non-current liabilities.

In general, the liquidity ratio of PTK in 2024 decreased compared to 2023. It was due to the dividend payment to shareholders (PT Pertamina International Shipping (PIS)) in 2024 of Rp1.14 trillion, while in 2023, there was no dividend payment to PT PIS. For the solvency ratio, in 2024, it increased compared to 2023, which shows that the Company's financial condition can settle all its obligations both in the short and long term.

Tabel Rasio Likuiditas dan Solvabilitas

Table of Liquidity and Solvency Ratios

(dalam % | in %)

Uraian Description	2024	2023	2022	Selisih 2024-2023 Margin 2024-2023
Rasio Likuiditas Liquidity Ratio				
Rasio kas Cash ratio	32,41	51,95	31,15	(19,54)
Rasio Lancar Current Ratio	120,88	131,56	105,48	(10,68)
Rasio Solvabilitas Solvency Ratio				
Jumlah modal sendiri terhadap total aset Total own capital to total assets	50,70	51,42	44,21	(0,72)
Rasio liabilitas terhadap ekuitas Debt to equity ratio	97,24	94,48	127,37	2,76
Rasio liabilitas terhadap jumlah aset Debt to assets ratio	49,30	48,58	56,02	0,72



Tingkat Kolektibilitas Piutang

Receivables Collectibility

Tingkat kolektibilitas piutang merupakan kemampuan Perusahaan dalam menagih piutangnya. Indikator yang digunakan Perusahaan adalah rata-rata periode penagihan piutang.

Rata-rata periode penagihan piutang pada tahun 2024 adalah 71 hari yaitu lebih lama dibandingkan tahun 2023 selama 58 hari.

The receivables collectibility is the Company's ability to collect its receivables. The indicator used by the Company is the average collection period of accounts receivable.

The average receivables collection period in 2024 was 71 days, which was longer than in 2023 of 58 days.

Kemampuan Menghasilkan Laba

Ability to Generate Profit

Kemampuan Perusahaan dalam menghasilkan laba pada tahun 2024 secara umum mengalami peningkatan. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan pada sebagian rasio profitabilitas yang digunakan Perusahaan. Peningkatan kemampuan Perusahaan dalam menghasilkan laba ini terutama didorong oleh peningkatan pendapatan usaha dan optimalisasi biaya usaha.

The Company's ability to generate profits in 2024 generally increased. It was proven by an increase in some of the profitability ratios used by the Company. The increase in the Company's ability to generate profits was mainly driven by an increase in revenue and optimization of operating costs.

Tabel Rasio Profitabilitas

Table of Profitability Ratio

(dalam % | in %)

Uraian Description	2024	2023	2022	Selisih 2024-2023 Margin 2024-2023
Rasio laba bersih terhadap aset Return on assets	11,84	11,65	8,94	0,19
Rasio laba bersih terhadap ekuitas Return on equity	30,47	22,66	20,32	7,81
Imbalan investasi Return on investment	24,52	19,90	14,59	4,62
Margin laba bruto Gross profit margin	34,33	38,43	34,44	(4,10)
Margin laba bersih Net profit margin	14,23	15,59	15,32	(8,72)%

Pencapaian Key Performance Indicator (KPI) Key Performance Indicator (KPI) Achievement

Key Performance Indikator (KPI) PTK tahun 2024 yang tertuang pada Kontrak Manajemen Tahunan yang memuat KPI Direksi secara Kolegial antara Direktur Utama PT Pertamina International Shipping dan Direksi PT Pertamina Trans Kontinental yang disepakati pada tanggal 18 Januari 2024.

PTK's Key Performance Indicators (KPIs) for 2023 as stated in the Annual Management Contract containing the KPIs of the Board of Directors Collegially between the President Director of PT Pertamina International Shipping and the Board of Directors of PT Pertamina Trans Kontinental agreed on January 18, 2024.

Pencapaian KPI tahun 2024 adalah sebesar 108,25% sebagaimana disampaikan dalam tabel berikut ini:

The KPI achievement in 2024 was 108.25%, as presented in the following table:

Tabel Pencapaian KPI 2024

Table of KPI Achievement in 2024

Perspektif Perspective	Persentase Pencapaian Percentage of Achievement
Financial	38,01
Customer Focus	15,80
Internal Process	35,92
Learning & Growth	16,03
Boundary KPI	2,50
Jumlah Total	108,25

Tingkat Kesehatan Perusahaan Company's Soundness Level

Total Nilai Kinerja Perusahaan pada tahun 2024 adalah sebesar 93,64 dengan klasifikasi "AA" (SEHAT). Perhitungan Tingkat Kesehatan Perusahaan dilakukan oleh Fungsi Finance Perusahaan sesuai dengan Pedoman Penilaian Kinerja Anak Perusahaan PT Pertamina (Persero) No. A6-002/H40000/2019-S9 Revisi Ke-0. Berikut adalah rincian pencapaian nilai Tingkat Kesehatan Perusahaan:

The total score of the Company's performance in 2024 was 93.64 with the classification "AA" (HEALTHY). The calculation of the Company's Soundness Level is carried out by the Corporate Finance Function in accordance with the Guidelines for Performance Assessment of Subsidiaries of PT Pertamina (Persero) No. A6-002/H40000/2019-S9 Revision 0. The following are details of the achievement of the Company's Soundness Level score:

Tabel Tingkat Kesehatan Perusahaan

Table of the Company's Soundness Level

Uraian Description	2024		2023	
	Pencapaian Achievement	Nilai Score	Pencapaian Achievement	Nilai Score
Kinerja Keuangan Financial Performance				
Imbalan kepada Pemegang Saham (ROE) Return on Equity (ROE)	30,47	15,00	29,30	15,00



Uraian Description	2024		2023	
	Pencapaian Achievement	Nilai Score	Pencapaian Achievement	Nilai Score
Imbalan Investasi (ROI) Return on Investment (ROI)	24,52	10,00	24,83	10,00
Marjin Laba Operasi (OPM) Operating Profit Margin (OPM)	17,72	5,00	21,22	5,00
Marjin Laba Bersih (NPM) Net Profit Margin (NPM)	-	-	-	-
Rasio Kas Cash Ratio	32,41	4,00	52,01	5,00
Rasio Lancar Current Ratio	120,88	3,50	131,56	4,00
Periode Penagihan Piutang Receivables Collection Period	71,71 hari days	3,50 hari days	52,09	4,00
Perputaran Persediaan Inventory Turnover	0,00 hari day	0,00 hari day	0 hari day	0,00
Perputaran Total Aset Total Assets Turnover	84,68	5,00	74,93	5,00
Rasio Total Modal Sendiri terhadap Total Aset Total Own Capital to Total Assets	50,70	5,00	51,42	5,00
Time Interest Earned Ratio (TIER)	24,49	3,00	22,91	3,00
Sales to Total Asset Growth (STAG)	11,36	5,00	28,15	5,00
Net Profit Growth (NPG)	2,26	1,00	43,44	5,00
Nilai Kinerja Keuangan (NKK) Financial Performance Score (FPS)	60,00		70,00	
Nilai Kinerja Keuangan (NKK) - diproporsionalkan Financial Performance Score (FPS) - proportional	63,64			
Klasifikasi Tingkat Kinerja Keuangan Classification of Financial Performance Level	SEHAT HEALTHY		SEHAT HEALTHY	
Kinerja Operasi Operational Performance				
Commission Days	105	10,00	100	10,00
HSSE	105	10,00	100	10,00
Nilai Kinerja Operasi (NKO) Operational Performance Score (OPS)	20,00		20,00	
Klasifikasi Tingkat Kinerja Operasi Classification of Operational Performance Level	SANGAT BAIK VERY GOOD		SANGAT BAIK VERY GOOD	

Uraian Description	2024		2023	
	Pencapaian Achievement	Nilai Score	Pencapaian Achievement	Nilai Score
Nilai Kinerja Administrasi Administrative Performance Score				
Laporan Keuangan Perusahaan Bulanan Monthly Company Financial Statements	7 hari days	0,00		
Laporan Periodik - Laporan Realisasi Triwulanan Periodic Report- Quarterly Realization Report	=16 hari =16 days	2,00	0<X<=30 Hari Days	1,50
Laporan Keuangan Tahunan <i>Audited</i> Audited Financial Statements	bulan 4 4 th Month	4,00	Maret March	4,00
Rancangan RKAP Rancangan RKAP	Bulan 7 7 th Month	4,00	Agustus August	4,00
Nilai Kinerja Administrasi (NKA) Administrative Performance Score (APS)	10,00		9,50	
Klasifikasi Tingkat Kinerja Administrasi Classification of Administrative Performance Level	TERTIB ORDERLY		TERTIB ORDERLY	
Penilaian Tingkat Kinerja Perusahaan Assessment of Company Performance Levels				
Kinerja Keuangan Financial Performance	63,64		70,00	
Kinerja Operasional Operational Performance	20,00		20,00	
Kinerja Administrasi Administrative Performance	10,00		9,50	
Jumlah Nilai Kinerja Perusahaan Total Company Performance Score	93,64		99,50	
Klasifikasi Tingkat Kinerja Perusahaan Classification of Company Performance Level	AA (SEHAT) AA (HEALTHY)		AA (SEHAT) AA (HEALTHY)	



Realisasi dan Pencapaian Target Tahun 2024

Target Realization and Achievement in 2024

Asumsi dalam Penetapan Target Tahun 2024

Assumption in Setting the 2024 Target

Target kinerja tahun 2024 ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2024. Dalam proses penyusunannya, RKAP Tahun 2024 menggunakan asumsi utama di antaranya sebagai berikut:

The 2024 performance targets are set out in the Company's 2024 Annual Budget and Operational Plan (ABOP). In the preparation process, the 2024 ABOP uses the following main assumptions:

Parameter Parameter	Satuan Unit	RKAP 2024 RKAP 2024
Kurs Exchange Rate	Rp to AS\$	IDR 15.000,00 Rp15,000.00
Suku Bunga Pinjaman Loan Interest Rate	%	- ...
Tenor Pinjaman Loan Tenor	Tahun Year	5-7 tahun 5-7 Years
Porsi Pinjaman Loan Portion	%	70% -100%
Collection Period	Hari Days	35 Hari 35 Days
Jumlah Kapal Milik Total Owned Ships	Unit	386
Commission Days Kapal Milik Commission Days of Owned Ships	Hari	112.471
Commercial Days Kapal Milik Commercial Days of Owned Ships	Hari Days	115.318
Jumlah Muatan BBM yang diangkut Number of fuel loads transported	Ribu KL Thousand KL	45
Jumlah Call Keagenan Tanker Total Tanker Agency Calls	Call	27.064
Jumlah Call Keagenan Umum Total General Agency Calls	Call	3.402

Sumber: Buku RKAP Tahun 2024

Source: 2024 ABOP Book

Realisasi dan Pencapaian Target Kinerja Operasional Tahun 2024

Realization and Achievement of Operational Performance Targets in 2024

Tabel Pencapaian Target Operasi Segmen Shipping Activities

Table of Achievement of Operating Targets of the Shipping Activities Segment

Uraian Description	Satuan Unit	Realisasi 2024 Realisasi 2024	Target 2024 2024 Target	Pencapaian Achievement
Jumlah Armada Kapal Total Fleet of Ships	unit	370	386	95,85%
- Kargo Vessel	unit	23	23	100,00%
- Offshore Support Vessel	unit	9	17	52,94%
- Harbour Tug	unit	50	55	90,91%
- Small Craft	unit	288	291	98,97%
Jumlah Commission Days Kapal Milik Total Commission Days of Owned Ships	hari days	119.841	112.471	106,55%
- Eksisting	hari days	119.592	111.048	107,69
- New Vessel	hari days	249	1.423	17,50
Jumlah Commercial Days Kapal Milik Total Commercial Days of Owned Ships	hari days	119.220	110.938	107,47%
- Eksisting	hari days	118.973	109.549	108,60
- New Vessel	hari days	247	1.389	17,78

Tabel Pencapaian Target Operasi Segmen Marine Services

Table of Achievement of Operating Targets of the Marine Services Segment

Uraian Description	Satuan Unit	Realisasi 2024 Realisasi 2024	Target 2024 2024 Target	Pencapaian Achievement
Keagenan Tanker Pihak Ketiga Third Party Tanker Agency	call	5.181	3.230	160,40%
Keagenan Charter Milik Pertamina Pertamina Chartered Agency	call	20.745	23.834	87,04%
Keagenan Umum General Agency	call	4.033	3.402	118,55%
Jumlah Total	call	29.959	30.466	98,34%



Tabel Pencapaian Target Operasi Segmen Logistic Services

Table of Achievement of Operating Targets of the Logistic Services Segment

Uraian Description	Satuan Unit	Realisasi 2024 Realisasi 2024	Target 2024 2024 Target	Pencapaian Achievement
Cover Storage	m ²	372.074	347.879	106,96%
Open Storage	m ²	1.331.698	786.170	169,39%
Jumlah Total	m²	1.703.772	1.134.049	150,24%

Realisasi *commission days* kapal milik pada tahun 2024 adalah selama 119.841 hari, yaitu tercapai 106,55% dari target RKAP 2024 selama 112.471 hari. Pencapaian ini terutama didorong oleh 13 unit kapal yang direncanakan *intermediate survey* dialihkan menjadi *underwater survey* (1 hari), dan 147 unit kapal *small craft* yang direncanakan *annual survey* telah dikomunikasikan dengan pihak Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) untuk melakukan optimalisasi waktu pelaksanaan *survey* (1 hari).

Realisasi *commercial days* kapal milik pada tahun 2024 adalah selama 119.220 hari, yaitu tercapai 107,47% dari target RKAP 2024 selama 110.938 hari. Pencapaian ini terutama didorong oleh optimalisasi pelaksanaan *underwater survey* sehingga kapal milik dapat beroperasi dengan normal, dan optimasi komersialisasi kapal milik untuk memastikan kapal milik dapat terutilisasi dengan maksimal.

Realisasi jumlah kapal pada tahun 2024 adalah sebesar 370 unit, yaitu tercapai 95,85% dari target RKAP 2024 sebesar 386 unit.

The realization of *commission days* of owned vessels in 2024 was 119,841 days, which achieved 106.55% of the 2024 ABOP target of 112,471 days. This achievement was mainly driven by 13 units of vessels planned for *intermediate surveys* being transferred to *underwater surveys* (1 day), and 147 units of *small craft* vessels planned for *annual surveys* have been communicated with the Harbor Master and Port Authority (KSOP) Office to optimize the *survey* implementation time (1 day).

The realization of *commercial days* for ships owned in 2024 was 119,220 days, which achieved 107.47% of the 2024 ABOP target of 110,938 days. This achievement was mainly driven by optimizing the implementation of *underwater surveys* so that owned vessels can operate normally and optimizing the commercialization of owned vessels to ensure that it can be maximally utilized.

The realization of the number of ships in 2024 was 370 units, which achieved 95.85% of the 2024 ABOP target of 386 units.

Realisasi dan Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun 2024

Realization and Achievement of Financial Performance Targets in 2024

Realisasi pendapatan usaha PTK pada tahun 2024 adalah sebesar Rp7,56 triliun, yaitu tercapai 98,11% dari target RKAP 2024 sebesar Rp7,70 triliun. Pencapaian ini terutama dipengaruhi oleh segmen *shipping activities* under Rp629,05 miliar, segmen *marine services* over Rp515,77 miliar, dan segmen *logistic services* under Rp31,97 miliar.

Realisasi laba tahun berjalan PTK pada tahun 2024 adalah sebesar Rp1,07 triliun, yaitu tercapai 153,54% dari target RKAP 2024 sebesar Rp700,33 miliar. Pencapaian yang jauh melampaui target ini terutama didorong oleh kenaikan kegiatan keagenan, *port operation* dan *labor service*, serta penyerapan beban pokok penjualan dan beban usaha yang masih lebih rendah dibandingkan RKAP 2024.

In 2024, PTK's realization of revenue amounted to Rp7.56 trillion, achieving 98.11% of the 2024 ABOP target of Rp7.70 trillion. This achievement was mainly influenced by the *shipping activities* segment under Rp629.05 billion, the *marine services* segment over Rp515.77 billion, and the *logistic services* segment under Rp31.97 billion.

PTK's realized profit for the year was Rp1.07 trillion, which achieved 153.54% of the 2024 ABOP target of Rp700.33 billion. This achievement, which far exceeded the target, was mainly driven by an increase in agency activities, port operations, and labor services, as well as the absorption of cost of goods sold and operating expenses, which were still lower than the 2024 ABOP.

Realisasi Beban Usaha PTK pada tahun 2024 adalah sebesar Rp6,22 triliun, yaitu tercapai 92,16% dari target RKAP 2024 sebesar Rp6,75 triliun.

The realization of PTK's operating expenses in 2024 was Rp6.22 trillion, which achieved 92.16% of the 2024 ABOP target of Rp6.75 trillion.

Tabel Pencapaian Target Pendapatan dan Laba
Table of Achievement of Revenue and Profit Target

(dalam Rp juta, kecuali dinyatakan lain)
(in Rp, unless stated otherwise)

Uraian Description	Realisasi 2024 Realisasi 2024	Target 2024 2024 Target	Pencapaian Achievement
Pendapatan usaha Revenue	7.559.108	7.704.350	98,11%
Beban pokok pendapatan Cost of revenue	(4.963.954)	(5.471.270)	90,73%
Laba bruto Gross profit	2.595.154	2.233.080	116,21%
Beban umum dan administrasi General and administrative expenses	(1.255.901)	(1.277.996)	98,27%
Beban Usaha Operating Expenses	(6.219.855)	(6.749.266)	92,16%
Laba Usaha Operating Profit	1.339.253	955.085	140,22%
Pendapatan/(Beban) lain-lain Other Income/(Expenses)	78.560	144.242	54,46
Bunga Investasi Investment Interest	(89.898)	(212.993)	42,21%
Laba/(Rugi) sebelum pajak Profit/(Loss) before tax	1.327.915	886.334	149,82%
Beban pajak penghasilan Income tax expense	(252.615)	(186.001)	135,81%
Laba tahun berjalan Profit for the year	1.075.300	700.333	153,54%

Sedangkan untuk realisasi posisi keuangan dijelaskan sebagai berikut.

Meanwhile, the realization of the financial position is explained as follows.

Realisasi jumlah aset PTK pada tahun 2024 adalah sebesar Rp9,08 triliun, yaitu tercapai 100,51% dari target RKAP 2024 sebesar Rp9,03 triliun. Pencapaian ini terutama didorong oleh kas & setara kas dan piutang usaha.

The realization of PTK's total assets in 2024 was Rp9.08 trillion, which achieved 100.51% of the 2024 ABOP target of Rp9.03 trillion. This achievement was mainly due to cash & cash equivalents and trade receivables.

Realisasi jumlah liabilitas PTK pada tahun 2024 adalah sebesar Rp4,48 triliun, yaitu tercapai 131,61% dari target RKAP 2024 sebesar Rp3,40 triliun. Pencapaian ini terutama didorong oleh hutang usaha.

In 2024, the realization of PTK's total liabilities amounted to Rp4.48 trillion, which achieved 131.61% of the 2024 ABOP target of Rp3.40 trillion. This achievement was mainly driven by trade payables.

Realisasi jumlah ekuitas PTK pada tahun 2024 adalah sebesar Rp4,60 triliun, yaitu tercapai 81,74% dari target RKAP 2024 sebesar Rp5,63 triliun. Pencapaian ini terutama didorong oleh modal saham *project* investasi yang tidak tercapai.

The realization of PTK's total equity in 2024 was Rp4.60 trillion, which achieved 81.74% of the 2024 ABOP target of Rp5.63 trillion. This achievement was mainly driven by investment project share capital, which was not achieved.

**Tabel Pencapaian Target Posisi Keuangan**

Table of Achievement of Financial Position Target

(dalam Rp juta, kecuali dinyatakan lain)
(in Rp, unless stated otherwise)

Uraian Description	Realisasi 2024 Realisasi 2024	Target 2024 2024 Target	Pencapaian Achievement
Jumlah Aset Total Assets	9.080.441	9.034.091	100,51%
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	4.476.576	3.401.442	131,61%
Jumlah Ekuitas Total Equity	4.603.865	5.632.649	81,74%

Realisasi dan Pencapaian Target Struktur Modal Tahun 2024

Realization and Achievement of Capital Structure Targets in 2024

Realisasi jumlah struktur modal pada tahun 2024 adalah sebesar Rp9,08 triliun, yaitu tercapai 100,51% dari target RKAP 2024 sebesar Rp9,03 triliun. Pencapaian ini terutama didorong oleh peningkatan hutang usaha dan modal saham *project* investasi yang tidak tercapai.

The realization of the total capital structure in 2024 was Rp9.08 trillion, which achieved 100.51% of the 2024 ABOP target of Rp9.03 trillion. This achievement was mainly due to the increase in trade payables and share capital of the unachieved investment project.

Realisasi dan Pencapaian Target Investasi Tahun 2024

Realization and Achievement of Investment Targets in 2024

Realisasi Anggaran Belanja Investasi (ABI) pada tahun 2024 adalah sebesar \$19,68 juta, yaitu tercapai 94,46% dari target RKAP 2024 sebesar \$20,83 miliar.

In 2024, the realization of the Investment Expenditure Budget (ABI) was \$19.68 million, achieving 94.46% of the 2024 ABOP target of \$20.83 billion.

Tabel Pencapaian Target Investasi

Table of Achievement of Investment Target

(dalam USD ribu)
(in thousand USD)

Uraian Description	Realisasi 2024 Realisasi 2024	Target 2024 2024 Target	Pencapaian Achievement
Kategori <i>Business Development</i> Business Development Category	15.747	16.551	95,14%
Kategori <i>Non-Business Development</i> Non-Business Development Category	3.934	4.285	91,81%
Kategori Anorganik Inorganic Category	-	-	-
Jumlah Total	19.681	20.836	94,46%

Realisasi dan Pencapaian Target Kinerja K3 Tahun 2024

Realization and Achievement of OHS Performance in 2024

Kinerja K3 pada tahun 2024 PTK mencapai target yaitu dengan tidak adanya insiden berkategori *Number of Accident* (NoA), dan *Total Recoverable Incident Rate* (TRIR).

In 2024, PTK's OHS performance achieved the target of having no incidents categorized as *Number of Accident* (NoA), and *Total Recoverable Incident Rate* (TRIR).

Kebijakan dan Pembagian Dividen

Dividend Policy and Distribution

Kebijakan Dividen

Dividend Policy

Kebijakan dividen PTK mengacu pada Anggaran Dasar Pasal 21 tentang Penggunaan Laba, dengan uraian sebagai berikut:

1. Penggunaan laba bersih termasuk jumlah penyisihan untuk cadangan kerugian diputuskan oleh RUPS.
2. Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen kecuali ditentukan lain oleh RUPS.
3. Selain penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini, RUPS dapat menetapkan penggunaan laba bersih untuk pembagian lain seperti tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris. Penempatan laba bersih tersebut dalam cadangan Perusahaan atau untuk penggunaan lainnya.
4. Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini hanya boleh dibagikan apabila Perusahaan mempunyai saldo laba yang positif.
5. Penggunaan laba bersih untuk tantiem sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, dilakukan sepanjang telah dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya dalam tahun berjalan.
6. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dalam pembukuan Perusahaan dan dalam tahun-tahun yang akan datang Perusahaan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat itu belum sama sekali tertutup, dengan tidak mengurangi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PTK's dividend policy refers to Article 21 of the Articles of Association on the Use of Profit, with the following description:

1. The appropriation of net profit, including the amount of provision for allowance for losses, is decided by the GMS.
2. The entire net profit after deducted by the provision for allowance, as referred to in paragraph 1 of this Article, is distributed to shareholders as dividends unless otherwise determined by the GMS.
3. In addition to the appropriation of net profit as referred to in paragraph 2 of this Article, the GMS can determine the appropriation of net profit for other distributions, such as bonuses for the Board of Directors and the Board of Commissioners. The placement of net profit in the Company's reserves or for other uses.
4. Dividends, as referred to in paragraph 2 of this Article, may only be distributed if the Company has a positive profit balance.
5. The appropriation of net profit for tantiem, as referred to in paragraph 3 of this Article, is executed as long as it has been budgeted and calculated as expenses in the current year.
6. If the calculation of profit or loss in a financial year shows a loss that cannot be covered with reserve funds, then the loss will still be recorded in the Company's books. The Company will be deemed not to have made a profit in future years as long as the recorded loss has not been covered at all, without prejudice to the provisions of the applicable laws and regulations.



7. Perusahaan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perusahaan berakhir, dengan memperhatikan proyeksi perolehan laba dan kemampuan keuangan Perusahaan.
 8. Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini, ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris
 9. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perusahaan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perusahaan.
 10. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perusahaan, dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat 9 Pasal ini.
7. The Company may distribute interim dividends before the financial year ends, taking into account its profit projection and financial capacity.
 8. Distribution of interim dividends, as referred to in paragraph 7 of this Article, is determined based on the decision of the Board of Directors after obtaining approval from the Board of Commissioners.
 9. If after the end of the financial year, it turns out that the Company suffers from a loss, the interim dividends that have been distributed must be returned by the shareholders to the Company.
 10. The Board of Directors and Board of Commissioners are jointly and severally responsible for the Company's losses if the shareholders are unable to return the interim dividends as referred to in paragraph 9 of this Article.

Kronologis Pembagian Dividen

Chronology of Dividend Distribution

Pembagian Dividen atas Laba Tahun Buku 2023

Dalam RUPS Tahunan pada tanggal 14 Juni 2024 para Pemegang Saham menyatakan Penetapan Penggunaan Laba Perseroan Tahun Buku 2023 akan ditentukan kemudian dan akan dilaksanakan dalam RUPS terpisah secara sirkuler.

RUPS terpisah secara sirkuler telah terlaksana. Adapun keputusan yang dihasilkan berdasarkan Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler PT Pertamina Trans Kontinental perihal Penggunaan Laba Tahun Buku 2023 tanggal 17 September 2024 sebagai berikut:

1. Menyetujui penetapan Saldo Cadangan Wajib Perseroan sebesar US\$15.995.181 atau IDR 246.949.599.459 dan sisa Saldo Laba setelah penetapan Cadangan Wajib (20%) ditetapkan sebagai Cadangan Lainnya sebesar US\$215.932.211 atau IDR 3.333.777.405.629 secara kumulatif hingga 31 Desember 2023.
2. Menyetujui besaran dividen yang wajib dibayarkan oleh Perseroan kepada Para Pemegang Saham Perseroan atas Laba Bersih Tahun Buku 2023 yaitu sebesar US\$75.000.000.

Dividend Distribution on Profit for the 2023 Financial Year

In the Annual GMS on June 14, 2024, the Shareholders stated that the Determination of the Use of the Company's Profit for the 2023 Financial Year will be determined later and will be held in a separate circular GMS.

A separate circular GMS has been held. The decisions made based on the Circular Shareholders' Resolution of PT Pertamina Trans Kontinental regarding the Use of Profit for the 2023 Financial Year dated September 17, 2024, are as follows:

1. Approved the determination of the Company's Mandatory Reserve Balance of US\$15,995,181 or Rp246,949,599,459 and the remaining Profit Balance after the determination of the Mandatory Reserve (20%) is designated as Other Reserves of US\$215,932,211 or Rp3,333,777,405,629 cumulatively until December 31, 2023.
2. Approved the amount of dividends that must be paid by the Company to the Company's Shareholders on the Net Profit for the 2023 Financial Year of US\$75,000,000.

3. Menyetujui pembagian dividen sesuai dengan susunan Pemegang Saham dan persentase kepemilikan saham merujuk pada Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 30 tanggal 29 November 2022 dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023 sebagai berikut:
3. Approved the distribution of dividends in accordance with the composition of the Shareholders and the percentage of share ownership referring to the Deed of Resolution of the Company's Shareholders No. 30 dated November 29, 2022, and the Company's Financial Statements for the 2023 Financial Year as follows:

Pemegang Saham Shareholders	Pemegang Saham Shareholders	Persentase Kepemilikan Saham Shareholding Percentage	Nilai Dividen Dividend Value
PT Pertamina International Shipping	Serie A	99,93%	US\$74.947.500
PT Pertamina Pedeve Indonesia	Serie A	0,01%	US\$7.500
PT Pertamina International Shipping	Serie B	0,066%	US\$45.000
Total		100%	US\$75.000.000

4. Menyetujui pelaksanaan tata waktu pembayaran dividen oleh Perseroan kepada PT Pertamina International Shipping dan PT Pertamina Pedeve Indonesia selaku Pemegang Saham Perseroan sebagai berikut: a. Dividen dapat dibayarkan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat (USD) dan/atau Rupiah (Jisdor H-1) secara bertahap, dengan mempertimbangkan kondisi keuangan perusahaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024. b. Dividen harus dilunasi sebelum pembayaran Tantiem Direksi dan Dewan Komisaris.
4. Approved the implementation of dividend payment procedures by the Company to PT Pertamina International Shipping and PT Pertamina Pedeve Indonesia as the Company's Shareholders as follows: a. Dividends can be paid in United States Dollars (USD) and/or Rupiah (Jisdor H-1) gradually, taking into account the Company's financial condition until December 31, 2024. b. Dividends must be paid before the payment of Tantiem of the Board of Directors and Board of Commissioners.
5. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan atau kuasanya untuk membuat dan menyatakan Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler ini dalam akta notaris dan melaksanakan tindakan hukum lainnya yang dipandang perlu sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Authorized the Company's Board of Directors or its proxy to make and state this Circular Shareholders' Resolution in a notarial deed and carry out other legal actions deemed necessary in accordance with applicable regulations.

Pembayaran telah dilakukan secara bertahap dengan mata uang rupiah ke PT Pertamina International Shipping dan PT Pertamina Pedeve Indonesia dengan rincian sebagai berikut:

Payment has been made in stages with rupiah currency to PT Pertamina International Shipping and PT Pertamina Pedeve Indonesia with the following details:

1. Pada tanggal 2 Oktober 2024 Pembayaran Angsuran Pertama ke PT Pertamina International Shipping sebesar Rp700.000.000.000, menggunakan kurs Jisdor H-1 Rp 15.204 dengan Nilai Konversi Currency USD 46.040.515,65
1. On October 2, 2024, the First Installment Payment to PT Pertamina International Shipping amounting to Rp700,000,000,000, using the Jisdor H-1 exchange rate of Rp15,204 with a Currency Conversion Value of US\$46,040,515.65.
2. Pada tanggal 4 Oktober 2024 pelunasan sisa angsuran Dividen ke PT Pertamina International Shipping sebesar Rp445.686.847.084, menggunakan kurs Jisdor H-1 Rp 15.394 dengan Nilai Konversi Currency USD 28.951.984,35
2. On October 4, 2024, repayment of the remaining installments of Dividends to PT Pertamina International Shipping of Rp445,686,847,084, using the Jisdor H-1 exchange rate of Rp15,394 with a Currency Conversion Value of US\$28,951,984.35
3. Pada tanggal 9 Oktober 2024 Pembayaran Dividen ke PT Pertamina Pedeve Indonesia sebesar Rp117.532.500, menggunakan kurs Jisdor H-1 Rp 15.671 dengan Nilai Konversi Currency USD 7.500
3. On October 9, 2024, a Dividend Payment to PT Pertamina Pedeve Indonesia of Rp117,532,500, using the Jisdor H-1 exchange rate of Rp15,671 with a Currency Conversion Value of US\$7,500.



Pembagian Dividen atas Laba Tahun Buku 2022

Pembagian dividen tahun buku 2022 ditetapkan dalam RUPS Tahunan pada tanggal 12 Juni 2023 dengan keputusan:

1. Menyetujui tidak dilakukan pembagian dividen kepada Pemegang Saham.
2. Menetapkan penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2022 sebesar AS\$47.479.154 (nilai penuh) atau setara dengan Rp733.030.665.813 sebagai cadangan, termasuk memperkuat struktur permodalan dan mendukung pertumbuhan Perusahaan yang berkelanjutan.

Dividend Distribution on Profit for the 2022 Financial Year

The distribution of dividends for the 2022 financial year was determined at the Annual GMS on June 12, 2023, by resolution:

1. Approved not to distribute dividends to Shareholders.
2. Determined the use of Net Profit for the 2022 Financial Year of US\$47,479,154 (the full amount) or equivalent to Rp733,030,665,813 as reserves, including strengthening the capital structure and supporting the Company's sustainable growth.

Tabel Pembagian Dividen Tahun Buku 2022-2023 (USD)

Table of Dividend Distribution for the 2022-2023 Financial Year (US\$)

	2023	2022
Dividen kas yang dibagikan (USD) Cash Dividend Distributed (US\$)	75.000.000	-
Dividen per saham (USD) Dividend per Share (US\$)	$75.000.000 / (1.234.737 + 10 + 819)$ =60,70	-
Rasio pembagian dividen (%) Dividend payout ratio (%)	$75.000.000 / 68.106.3567 = 110\%$	-
Tanggal Pengumuman Dividen Date of Dividend Announcement	September 2024	-
Tanggal Dibayarkan Dividen Date of Dividend Paid	Oktober 2024 October 2024	-

Prospek Usaha dan Rencana Strategis Tahun 2025

Business Prospects and Strategic Plans for 2025

Prospek Perekonomian Global

Global Economic Outlook

Pertumbuhan global diproyeksikan sebesar 3,3 persen pada tahun 2025 dan 2026, berada di bawah rata-rata historis (2000-2019) sebesar 3,7 persen. Inflasi global secara keseluruhan diperkirakan akan menurun menjadi 4,2 persen pada tahun 2025 dan menjadi 3,5 persen pada tahun 2026, dengan laju penurunan yang kembali ke target lebih cepat di negara-negara maju dibandingkan dengan negara-negara pasar berkembang dan berkembang.

Global growth is projected at 3.3 percent by 2025 and 2026, below the historical average (2000-2019) of 3.7 percent. Overall, global inflation is expected to decline to 4.2 percent in 2025 and to 3.5 percent in 2026, with the pace of decline returning to target faster in advanced economies than in emerging markets and developing economies.

Sedangkan perkiraan volume perdagangan dunia direvisi sedikit menurun untuk tahun 2025 dan 2026. Revisi ini disebabkan oleh peningkatan tajam ketidakpastian kebijakan perdagangan, yang kemungkinan besar akan berdampak negatif secara tidak proporsional terhadap investasi, terutama di perusahaan-perusahaan yang bergantung pada perdagangan.

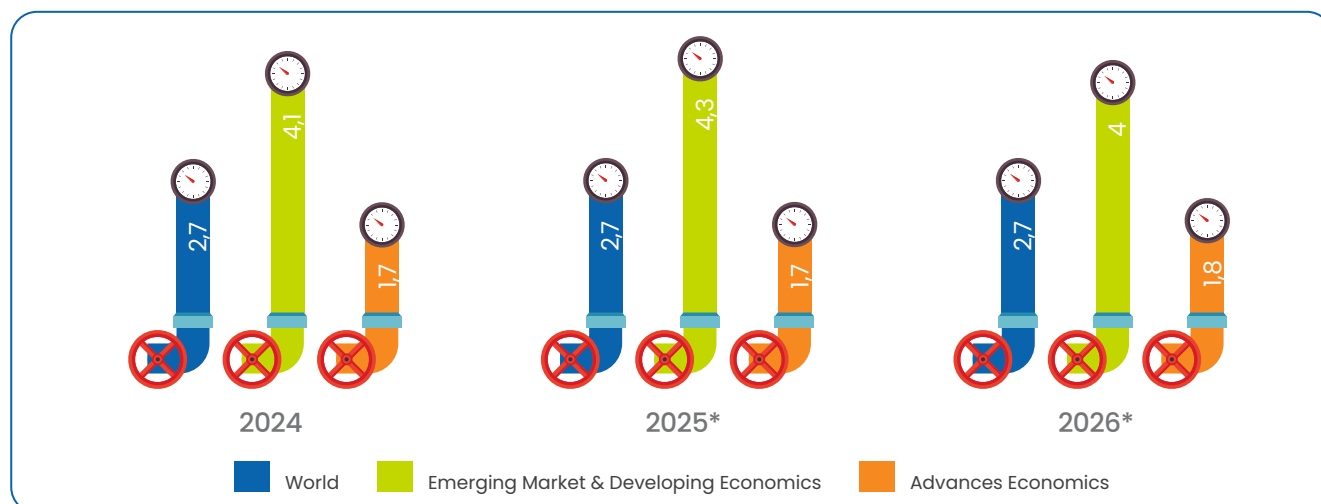
Meanwhile, the world trade volume forecast was revised down slightly for 2025 and 2026. This revision is due to a sharp increase in trade policy uncertainty, which is likely to have a disproportionately negative impact on investment, especially in trade-dependent companies.

Harga komoditas energi diperkirakan akan turun sebesar 2,6 persen pada tahun 2025, lebih besar dibandingkan asumsi dalam laporan bulan Oktober. Penurunan ini mencerminkan turunnya harga minyak akibat lemahnya permintaan dari Tiongkok dan pasokan yang kuat dari negara-negara di luar OPEC+ (Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak dan beberapa negara non-anggota, termasuk Rusia), yang sebagian diimbangi oleh kenaikan harga gas akibat cuaca yang lebih dingin dari perkiraan dan gangguan pasokan, termasuk konflik yang sedang berlangsung di Timur Tengah serta gangguan produksi di ladang gas.

Energy commodity prices are expected to decline by 2.6 percent in 2025, more than assumed in the October report. This decline reflects lower oil prices due to weak demand from China and robust supply from countries outside OPEC+ (Organization of the Petroleum Exporting Countries and some non-members, including Russia), partly offset by higher gas prices due to colder-than-expected weather and supply disruptions, including ongoing conflicts in the Middle East and production disruptions at gas fields.

Tren Prospek Pertumbuhan Ekonomi Dunia (%)

World Economic Growth Outlook Trends (%)



*estimasi

Sumber: World Economic Outlook (WEO), International Monetary Fund (IMF), terbitan Januari 2025

*estimation

Source: World Economic Outlook (WEO), International Monetary Fund (IMF), January 2025 issue

Kondisi global tersebut, tentu dapat memberikan dampak yang signifikan pada perekonomian Indonesia apabila Pemerintah, regulator, pelaku industri dan pemangku kepentingan lainnya tidak menyiapkan langkah antisipatif.

These global conditions can certainly have a significant impact on the Indonesian economy if the Government, regulators, industry players, and other stakeholders do not prepare anticipatory steps.



Prospek Perekonomian Nasional National Economic Outlook

Prospek Perekonomian Indonesia Indonesia's Economic Outlook

Memasuki tahun 2025, *World Bank* memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,1%. Potensi keuangan Indonesia pada tahun 2025 diperkirakan tetap menjanjikan, didorong oleh reformasi kebijakan, adopsi digitalisasi, serta investasi pada sektor-sektor strategis. Namun, perekonomian global diperkirakan masih dihadapkan pada sejumlah tantangan, termasuk pertumbuhan ekonomi global yang melambat. Adapun risiko yang memengaruhi kondisi global meliputi pelemahan ekonomi China dan Amerika Serikat, ketegangan geopolitik yang berlanjut, dampak perubahan iklim, serta ketidakpastian suku bunga global.

Meskipun di tengah ketidakpastian yang masih tinggi, pertumbuhan ekonomi Indonesia terjaga baik. Konsumsi rumah tangga tetap baik. Investasi swasta juga perlu makin ditingkatkan guna mengoptimalkan keyakinan produsen yang tercermin pada *Prompt Manufacturing Index* (PMI) Bank Indonesia yang ekspansif, terutama pada meningkatnya volume pesanan. Dari eksternal, ekspor nonmigas meningkat pada Februari 2025 ditopang terutama komoditas minyak kelapa sawit dan kendaraan bermotor. Dengan berbagai perkembangan tersebut, Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi 2025 tetap baik dalam kisaran 4,7-5,5%. Ke depan, Bank Indonesia terus mengoptimalkan bauran kebijakannya untuk tetap menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Stimulus kebijakan makroprudensial dan akselerasi digitalisasi transaksi pembayaran terus dioptimalkan sehingga bersinergi dengan stimulus fiskal Pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Tantangan yang dihadapi Indonesia pada 2025 diperkirakan akan memengaruhi keuangan negara, antara lain fluktuasi harga komoditas global dan ketidakpastian geopolitik yang dapat memperburuk ketegangan perdagangan internasional. Selain itu, resesi global yang mungkin terjadi, juga dapat memengaruhi aliran investasi dan stabilitas nilai tukar rupiah. Untuk menghadapi tantangan ini, perusahaan perlu menyiapkan strategi pengelolaan bisnis yang adaptif dan berbasis data. Wawasan yang mendalam terkait

Entering 2025, the *World Bank* projects Indonesia's economic growth to reach 5.1%. Indonesia's financial potential in 2025 is expected to remain promising, driven by policy reforms, adoption of digitalization, and investment in strategic sectors. However, the global economy is still expected to face several challenges, including slowing global economic growth. The risks affecting global conditions include the weakening of the Chinese and US economies, continued geopolitical tensions, the impact of climate change, and uncertainty over global interest rates.

Despite the high uncertainty, Indonesia's economic growth is well maintained. Household consumption remains good. Private investment also needs to be further enhanced to optimize producer confidence, reflected in Bank Indonesia's expansionary *Prompt Manufacturing Index* (PMI), especially in the increasing volume of orders. Externally, non-oil and gas exports increased in February 2025, supported mainly by palm oil commodities and motor vehicles. With these various developments, Bank Indonesia forecasts 2025 economic growth to remain good in the range of 4.7-5.5%. Going forward, Bank Indonesia continues to optimize its policy mix to maintain stability and promote sustainable economic growth. Macroprudential policy stimulus and acceleration of payment transaction digitization continue to be optimized to synergize with the Government's fiscal stimulus in driving economic growth.

Challenges facing Indonesia in 2025 are expected to affect the country's finances, including fluctuations in global commodity prices and geopolitical uncertainty that could exacerbate international trade tensions. In addition, a possible global recession could also affect investment flows and the stability of the rupiah exchange rate. To face these challenges, companies need to prepare adaptive and data-driven business management strategies. In-depth insights into economic growth projections, financial sector

proyeksi pertumbuhan ekonomi, dinamika sektor keuangan, serta tantangan dan peluang yang mungkin muncul sangat penting agar dapat menyusun langkah-langkah yang tepat guna menjaga stabilitas dan kinerja bisnis di tahun 2025.

Sumber: <https://institute.ojk.go.id/ojk-institute/id/capacitybuilding/upcoming/4588/outlook-ekonomi-dan-keuangan-di-tahun-2025>, https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_276325.aspx

dynamics, and the challenges and opportunities that may arise are essential to develop the right steps to maintain business stability and performance in 2025.

Source: <https://institute.ojk.go.id/ojk-institute/id/capacitybuilding/upcoming/4588/outlook-ekonomi-dan-keuangan-di-tahun-2025>, https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_276325.aspx

Prospek Industri Jasa Perkapalan, Jasa *Marine* dan Jasa Logistik Tahun 2025

Prospects for the Shipping, Marine, and Logistics Services Industry in 2025

Indonesia sebagai negara kepulauan menghadapi tantangan besar dalam menghubungkan wilayah-wilayah terpencil. Program Tol Laut, yang diluncurkan pemerintah untuk mengurangi disparitas harga antar wilayah, menjadi solusi strategis dalam meningkatkan konektivitas domestik. Program ini memperkuat jalur pelayaran reguler dan memudahkan distribusi logistik ke wilayah-wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau. Pada tahun 2025, Tol Laut diproyeksikan akan semakin berkembang dengan perluasan rute dan peningkatan jumlah kapal. Peningkatan konektivitas ini berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah terpencil, menciptakan rantai pasok yang lebih efisien dan mendorong permintaan terhadap kapal domestik. Hal ini akan menjadi peluang bagi industri perkapalan yang ada di Indonesia.

Di sisi lain *Fitch Ratings Global* sebagai lembaga pemeringkat kredit pada akhir 2024 merilis outlook yang menyatakan bahwa industri pengiriman dan perkapalan akan stabil. Hal ini mencerminkan dinamika pasar yang mulai kembali ke tingkat normal setelah periode puncak. Isu dekarbonisasi serta dampak geopolitik menjadi faktor yang mempengaruhi proyeksi ke depan. Perubahan lanskap politik global juga memberikan optimisme pada sektor pengangkutan minyak dan gas, menjaga daya tarik industri dalam jangka panjang. Proyeksi dari *Fitch* mengenai industri pengiriman dan perkapalan menambah optimisme pelaku industri dalam mengarungi bisnis di 2025.

Sedangkan industri logistik nasional di tahun 2025 diprediksi akan tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun 2024 hal ini ditopang geliat di industri pengolahan, perdagangan, pertanian, kehutanan, dan perikanan. Diperkirakan, subsektor transportasi dan pergudangan nasional berpeluang tumbuh 12,53% pada tahun 2025. Melonjak dari pertumbuhan tahun 2024 yang diproyeksikan bisa mencapai 9,52%..

Indonesia, as an archipelago, faces a major challenge in connecting remote areas. The Sea Toll Program, launched by the government to reduce price disparities between regions, is a strategic solution for improving domestic connectivity. The program strengthens regular shipping lines and eases logistics distribution to previously hard-to-reach areas. By 2025, the Sea Toll is projected to increase further with the expansion of routes and an increase in the number of ships. This improved connectivity contributes to the economic growth of remote areas, creating more efficient supply chains and driving demand for domestic vessels. It will be an opportunity for Indonesia's shipping industry.

On the other hand, *Fitch Ratings Global*, as a credit rating agency at the end of 2024, released an outlook stating that the freight forwarding and shipping industry will stabilize. It reflects market dynamics that are starting to return to normal levels after a peak period. The issue of decarbonization and the impact of geopolitics are factors that influence future projections. The changing global political landscape also provides optimism for the oil and gas transportation sector, maintaining the industry's attractiveness in the long term. *Fitch's* projection of the shipping and shipping industry adds to the optimism of industry players in navigating business in 2025.

Meanwhile, the national logistics industry in 2025 is predicted to increase more than in 2024, supported by the manufacturing, trade, agriculture, forestry, and fisheries industries. It is estimated that the national transportation and warehousing subsector has the opportunity to increase by 12.53% in 2025. Soaring from the growth in 2024 which is projected to reach 9.52%.



Perkembangan sektor logistik Indonesia juga dipengaruhi situasi dunia, hal ini tidak terlepas dari perang dagang AS-China. Serta konflik geopolitik Rusia-Ukraina dan Timur Tengah, yang berdampak terhadap ketidakpastian dan dinamika rantai pasok global. Meskipun demikian inovasi yang tepat adalah langkah bagi industri menjemput momentum bisnis yang akan semakin cerah di 2025.

Sumber : <https://Ingrisk.co.id/industri-perkapalan-2025-mengelola-risiko-menggapai-peluang/>, <https://www.dunia-energi.com/outlook-industri-positif-pis-proyeksikan-kinerja-2025-cerah/>, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20250108143249-4-601668/ada-kabar-baik-industri-logistik-ri-diramal-tumbuh-1253-tahun-2025>,

The development of Indonesia's logistics sector is also influenced by the world situation, this is inseparable from the US-China trade war. As well as the Russia-Ukraine and Middle East geopolitical conflicts, which have an impact on the uncertainty and dynamics of global supply chains. Nevertheless, the right innovation is a step for the industry to pick up business momentum that will be brighter in 2025.

Source : <https://Ingrisk.co.id/industri-perkapalan-2025-mengelola-risiko-menggapai-peluang/>, <https://www.dunia-energi.com/outlook-industri-positif-pis-proyeksikan-kinerja-2025-cerah/>, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20250108143249-4-601668/ada-kabar-baik-industri-logistik-ri-diramal-tumbuh-1253-tahun-2025>,

Faktor yang diprediksi berdampak pada Perusahaan dalam Bisnis tahun 2025

Factors Predicted to Affect Companies in the Business in 2025

Pengaruh kondisi Geopolitik dan Kebijakan di Indonesia

Pada tahun 2025, dinamika geopolitik dan kebijakan nasional diproyeksikan membawa dampak signifikan terhadap bisnis *support vessel*, *marine services*, *shorebase*, dan *port operation* di Indonesia.

Secara global, ketegangan di kawasan Laut Cina Selatan berpotensi meningkatkan risiko gangguan jalur pelayaran internasional yang strategis bagi Indonesia. Situasi ini mendorong peningkatan kebutuhan terhadap layanan keamanan maritim, *support vessel* berstandar tinggi, serta *shorebase* yang mampu mendukung operasi di wilayah offshore yang rawan konflik. Perubahan dalam hubungan dagang global, seperti potensi perang dagang atau pengaturan ulang rantai pasok, juga dapat mempengaruhi volume perdagangan dan aktivitas pelabuhan di Indonesia.

Di tingkat nasional, Pemerintah Indonesia berkomitmen kuat untuk melanjutkan agenda transisi energi bersih. Kebijakan modernisasi pelabuhan melalui program tol laut dan pengembangan *smart port* menuntut perusahaan untuk melakukan inovasi layanan dan adopsi teknologi baru demi meningkatkan daya saing.

Regulasi lingkungan yang semakin ketat, termasuk target nasional menuju *net zero emission*, memberikan tantangan tersendiri bagi operasional kapal dan *shorebase*, namun sekaligus mendorong inovasi untuk menciptakan solusi berkelanjutan yang menjadi nilai tambah di pasar untuk mensupport pentingnya keberlanjutan dalam bisnis. Oleh karena itu, perusahaan harus secara aktif mengadopsi prinsip *green logistics* dan mendukung inisiatif pengembangan pelabuhan berkelanjutan.

Influence of Geopolitical Conditions and Policies in Indonesia

By 2025, geopolitical dynamics and national policies are projected to have a significant impact on Indonesia's *support vessel*, *marine services*, *shorebase*, and *port operations* businesses.

Globally, tensions in the South China Sea region potentially increase the risk of disruption to strategic international shipping lanes for Indonesia. This situation drives an increased need for maritime security services, high-standard *support vessels*, and *shorebases* capable of supporting operations in conflict-prone offshore areas. Changes in global trade relations, such as potential trade wars or supply chain rearrangements, may also affect trade volumes and port activities in Indonesia.

At the national level, the Government of Indonesia is strongly committed to furthering the clean energy transition agenda. Port modernization policies through the sea toll program and *smart port* development require companies to innovate services and adopt new technologies to improve competitiveness.

Increasingly stringent environmental regulations, including national targets towards *net zero emissions*, pose challenges for ship and *shorebase* operations. However, at the same time, it encourages innovation to create sustainable solutions that add value to the market to support the importance of sustainability in business. Therefore, companies should actively adopt *green logistics* principles and support sustainable port development initiatives.

Market Disruption yang menuntut Transformasi Bisnis/Inovasi Marketing

Di tengah dinamika pasar global yang mengalami disrupsi signifikan, perusahaan menyadari bahwa untuk tetap relevan dan kompetitif, transformasi bisnis dan inovasi pemasaran menjadi sebuah keharusan.

Disrupsi terbesar berasal dari transisi energi menuju ekonomi rendah karbon. Tekanan regulasi lingkungan dan perubahan preferensi pelanggan terhadap solusi yang lebih berkelanjutan mendorong perusahaan untuk mempercepat adopsi teknologi ramah lingkungan dalam operasional kapal, *shorebase*, serta pengelolaan pelabuhan.

Kompetisi global yang semakin ketat, khususnya dari operator yang mengadopsi teknologi lebih cepat, mendorong PTK untuk memperkuat inisiatif digital serta memperkenalkan platform layanan terpadu berbasis teknologi. PTK melayani secara end-to-end sesuai kebutuhan pelanggan, sekaligus memperkuat branding sebagai *one-stop integrated maritime services provider*. Strategi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional tetapi juga sejalan dengan semangat PT Pertamina International Shipping sebagai SH IML yang memiliki peran penting dalam distribusi produk migas. PTK turut berkontribusi dalam menjaga kelancaran rantai pasok di sektor jasa maritim dan logistik, selain dari layanan perkapalan yang mereka sediakan. Dengan demikian, PTK dapat memberikan solusi terpadu dan menyeluruh, mencerminkan komitmen untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan mendukung stabilitas operasional di sektor jasa maritim, *port operation*, *shorebase*, di samping jasa *support vessel provider*.

Melalui transformasi yang berkelanjutan, inovasi pada produk dan layanan, serta pendekatan pemasaran yang lebih responsif terhadap perubahan pasar, perusahaan optimistis untuk mengukir pertumbuhan berkelanjutan di tengah tantangan disrupsi global.

Digitalisasi Proses Bisnis yang Berkelanjutan

Transformasi layanan ke arah digitalisasi dan automasi menjadi pilar utama strategi kami untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan daya saing. Implementasi digitalisasi yang telah dilakukan oleh PTK yaitu *Dashboard Laporan Keuangan*, *SIMONTANA*, pengembangan *Oil Spill Response System*, dan pengembangan digitalisasi lainnya yang mampu mengevaluasi informasi/data infrastruktur, lalu lintas, pergerakan kapal, serta perpindahan muatan/kargo. Sebagai upaya dalam menyederhanakan alur kerja, sumber pencarian informasi faktual tentang operasional PTK baik secara *real time* maupun berkala yang bertujuan memudahkan dalam analisis pendukung pengambilan

Market disruption that demands Business Transformation/Marketing Innovation

In the midst of global market dynamics that are experiencing significant disruption, companies realize that to remain relevant and competitive, business transformation and marketing innovation are a must.

The biggest disruption comes from the energy transition to a low-carbon economy. Environmental regulatory pressures and changing customer preferences for more sustainable solutions are driving companies to accelerate the adoption of green technologies in vessel operations, shorebase, and port management.

Increased global competition, especially from faster-adopting operators, has prompted PTK to strengthen its digital initiatives and introduce a technology-based integrated service platform. PTK provides end-to-end services according to customer needs while strengthening its branding as a one-stop integrated maritime services provider. This strategy not only improves operational efficiency but is also in line with the spirit of PT Pertamina International Shipping as SH IML, which has an important role in the oil and gas product distribution. PTK contributes to maintaining a smooth supply chain in the maritime and logistics services sector, in addition to the shipping services they provide. Thus, PTK can provide integrated and comprehensive solutions, reflecting a commitment to meeting customer needs and supporting operational stability in the maritime services sector, port operations, and shorebase, in addition to supporting vessel provider services.

Through continuous transformation, innovation in products and services, and a marketing approach that is more responsive to market changes, the Company is optimistic to carve out sustainable growth amidst the challenges of global disruption.

Continuous Digitalization of Business Processes

Service transformation towards digitalization and automation is the main pillar of our strategy to improve efficiency, transparency, and competitiveness. The implementation of digitalization that has been carried out by PTK is the Financial Report Dashboard, SIMONTANA, the development of the Oil Spill Response System, and other digitalization developments that can evaluate information/data on infrastructure, traffic, ship movements, and cargo movements. As an effort to simplify workflows, sources of factual information about PTK operations both in real-time and periodically, which aims to facilitate analysis to support faster and more targeted decision-making, digitalization



keputusan yang lebih cepat dan tepat sasaran digitalisasi harus mampu menjawab kebutuhan pekerja, perusahaan sebagai pelaku bisnis, serta pihak lain (regulator, pelanggan, Pertamina sebagai *holding*).

PTK telah menyusun roadmap digitalisasi menuju *system excellence* Tahun 2026, di mana pada Tahun 2025 ditargetkan *Sustainable Development* untuk pengembangan masing-masing lini IT seperti infrastruktur, operasional dan pengembangan aplikasi dapat berjalan seimbang dengan kebutuhan user namun tetap menjaga kualitas pelayanan ICT dalam hal mewujudkan pencapaian target bisnis perusahaan.

must be able to answer the needs of workers, companies as business actors, and other parties (regulators, customers, Pertamina as a holding).

PTK has developed a digitalization roadmap towards *system excellence* by 2026, where in 2025, it is targeted that *Sustainable Development* for the development of each IT line, such as infrastructure, operations, and application development, can run in balance with user needs but still maintain the quality of ICT services in terms of realizing the achievement of the Company.

Rencana Strategis Perusahaan Tahun 2025

Company's Strategic Plan for 2025

PTK bergerak dalam bisnis pelayaran dan jasa maritim, dengan 4 fokus utama yakni *Support Vessel Provider*, *Marine Services*, *Shorebase* dan *Port Operation*, berikut rencana kerja dan program strategis PTK pada Tahun 2025:

1. *Support Vessel Provider*.

- Implementasi budaya HSSE dan keunggulan operasional untuk memastikan keandalan kapal.
- Investasi pada *marine support* dan *offshore support vessel* untuk Pertamina Group dan KKKS.
- Divestasi kapal-kapal yang telah melampaui umur ekonomis dan tidak produktif.
- Peremajaan kapal yang sudah berumur >30 tahun.
- Memperkuat sinergi dengan rekan-rekan entitas Pertamina Group dan entitas BUMN untuk pengembangan peluang bisnis charter kapal.
- Digitalisasi proses bisnis dalam memonitor operasional kapal dan evaluasi performa kapal untuk menjaga keandalan kapal dalam mencapai full commission.
- Pengembangan manajemen bisnis transportasi *Fatty Acid Methyl Ester (FAME)* sesuai dengan arahan *Holding* dalam mendukung program biodiesel pemerintah.
- Meningkatkan efisiensi operasional, mempertahankan pelanggan dengan standar layanan yang unggul, menerapkan strategi harga yang kompetitif, serta memperkuat pemasaran dan branding layanan agar lebih transparan dan proaktif.

2. *Marine Services*.

- Implementasi keunggulan service sesuai dengan komitmen *Service Level Agreement* dengan konsumen.
- Memperkuat sinergi dengan rekan-rekan entitas Pertamina Group dan entitas BUMN untuk pengembangan peluang bisnis.

PTK is engaged in the shipping and maritime services business, with four main focuses, namely *Support Vessel Provider*, *Marine Services*, *Shorebase*, and *Port Operation*. The following is PTK's work plan and strategic program for 2025:

1. *Support Vessel Provider*.

- Implementation of HSSE culture and operational excellence to ensure vessel reliability.
- Investment in marine support and offshore support vessels for Pertamina Group and KKKS.
- Divestment of vessels that have exceeded their economic age and are not productive.
- Rejuvenation of vessels that are more than 30 years old.
- Strengthening synergy with fellow Pertamina Group entities and state-owned entities to develop ship charter business opportunities.
- Digitalization of business processes in monitoring ship operations and evaluating ship performance to maintain ship reliability in achieving full commission.
- Development of *Fatty Acid Methyl Ester (FAME)* transportation business management in accordance with the Holding's direction in supporting the government's biodiesel program.
- Improving operational efficiency, retaining customers with superior service standards, implementing competitive pricing strategies, and strengthening marketing and branding services to be more transparent and proactive.

2. *Marine Services*.

- Implementation of service excellence in accordance with *Service Level Agreement* commitments with consumers.
- Strengthening synergy with fellow Pertamina Group entities and state-owned entities to develop business opportunities.

- c) Strategi pengembangan bisnis keagenan melalui penyesuaian harga (*price adjustment*) untuk meningkatkan daya saing dan memperluas pangsa pasar.
 - d) Pengembangan bisnis *port engineering & maintenance, ship repair, ship inspection*, jasa pemanduan, *oil spill response*, serta peluang bisnis *marine service* lainnya melalui investasi dalam mendukung peralatan dan meningkatkan kompetensi pekerja.
 - e) Manajemen awak kapal yang berkualitas guna mendukung kelancaran operasional kapal.
3. *Shorebase*
- a) Pemenuhan aspek HSSE dan keunggulan operasional dalam aktivitas operasional.
 - b) Penambahan area *shorebase logistic* serta bekerja sama dengan *partner* potensial untuk mengembangkan *existing shorebase*.
 - c) Mengoptimalkan bisnis *shorebase logistic* di Kabil dan Tanjung Batu, serta mencari potensi lokasi *shorebase* yang baru.
 - d) Pengembangan infrastruktur dengan menambahkan aset-aset produksi, mengembangkan SDM dan digitalisasi proses bisnis.
4. *Port Operation*
- a) Pengembangan bisnis *port Management, Operation and Services; Port Permits, License and RSO Services, STS Support Provider* dengan berfokus pada peningkatan operasional serta optimalisasi layanan guna memperkuat pertumbuhan bisnis pelabuhan secara berkelanjutan.
 - b) Strategi pengembangan bisnis *port operation* melalui penyesuaian harga (*price adjustment*) untuk meningkatkan daya saing dan perbaikan pelayanan.
 - c) Memanfaatkan peluang *cross-selling* melalui kapabilitas STS (*Ship-to-Ship*) Support dan *Port Permit*, yang dapat memberikan kontribusi tambahan terhadap pertumbuhan pendapatan di segmen ini.
- c) Agency business development strategy through price adjustment to improve competitiveness and expand market share.
 - d) Development of port engineering & maintenance business, ship repair, ship inspection, guiding services, oil spill response, and other marine service business opportunities through investment in supporting equipment and improving worker competencies.
 - e) Quality crew management to support smooth ship operations.
3. *Shorebase*
- a) Fulfillment of HSSE aspects and operational excellence in operational activities.
 - b) Adding logistics shorebase areas and working with potential partners to develop existing shorebases.
 - c) Optimizing the shorebase logistics business in Kabil and Tanjung Batu and looking for potential new shorebase locations.
 - d) Infrastructure development by adding production assets, developing human resources, and digitizing business processes.
4. *Port Operation*
- a) Development of port Management, Operation and Services business; Port Permits, License and RSO Services, STS Support Provider by focusing on operational improvement and service optimization to strengthen sustainable port business growth.
 - b) Port operation business development strategy through price adjustment to increase competitiveness and service improvement.
 - c) Capitalizing on cross-selling opportunities through STS (*Ship-to-Ship*) Support and Port Permit capabilities, which can contribute additionally to revenue growth in this segment.



Target atau Proyeksi Tahun 2025

Target and Projection for 2025

Asumsi dalam Penetapan Target Tahun 2025

Assumption in Setting the 2025 Target

Dalam proses penyusunan RKAP Tahun 2025 menggunakan asumsi utama di antaranya sebagai berikut:

In the process of preparing the 2025 ABOP, the following main assumptions were used:

Parameter Parameter	Satuan Unit	RKAP 2025 2025 ABOP
Kurs Exchange Rate	Rp to USD	16.000
Commission Days Kapal Milik Commission Days of Owned Ships	Hari Days	117.064
Commercial Days Kapal Milik Commercial Days of Owned Ships	Hari Days	117.658
Jumlah Muatan BBM yang diangkut Number of fuel loads transported	Ribu KL Thousand KL	37
Jumlah Call Keagenan Tanker Total Tanker Agency Calls	Call	25.720
Jumlah Call Keagenan Umum Total General Agency Calls	Call	4.705

Sumber: Buku RKAP Tahun 2025

Source: 2025 ABOP Book

Target atau Proyeksi Kinerja Operasional Tahun 2025

2025 Operational Performance Target or Projection

Target *commission days* kapal milik pada tahun 2025 mengalami peningkatan, yaitu menjadi selama 4.593 hari dan target *commercial days* kapal milik pada tahun 2025 mengalami peningkatan, yaitu menjadi selama 2.340 hari. Sedangkan target jumlah armada kapal pada tahun 2025 mengalami peningkatan, yaitu menjadi sebanyak 370 unit.

The *commission day* target for owned ships in 2025 experienced an increase, namely 4,593 days, and the *commercial day* target for owned ships in 2025 experienced an increase, namely 2,340 days. Meanwhile, the total fleet of ships target in 2025 experienced an increase, namely 370 calls.

Tabel Target atau Proyeksi Operasi Segmen Shipping Activities

Table of Operating Target or Projection of the Shipping Activities Segment

Uraian Description	Satuan Unit	Target 2025 Target for 2025
Jumlah Armada Kapal Total Fleet of Ships	unit	370
- Tanker	unit	13
- Kargo Vessel - Vessel Cargo	unit	9
- Offshore Support Vessel	unit	17
- Harbour Tug	unit	38
- Small Craft	unit	293
Jumlah Commission Days Kapal Milik Total Commission Days of Owned Ships	hari days	117.064
- Eksisting - Existing	hari days	2364
- New Vessel	hari days	1
Jumlah Commercial Days Kapal Milik Total Commercial Days of Owned Ships*	hari days	117.658
- Eksisting	hari days	114.656
- New Vessel	hari days	3002

note : * termasuk kapal BBTC

note : * including BBTC ships

Tabel Target atau Proyeksi Operasi Segmen Marine Services

Table of Operating Target or Projection of the Marine Services Segment

Uraian Description	Satuan Unit	Target 2025 Target for 2025
Keagenan Tanker Pihak Ketiga Third Party Tanker Agency	call	5.078
Keagenan Charter Milik Pertamina Pertamina Chartered Agency	call	20.642
Keagenan Umum General Agency	call	4.705
Jumlah Total	call	30.425

Tabel Target atau Proyeksi Operasi Segmen Marine Services

Table of Operating Target or Projection of the Logistic Services Segment

Uraian Description	Satuan Unit	Target 2025 Target for 2025
Cover Storage	m ²	347.879
Open Storage	m ²	786.170
Jumlah Total	m²	1.134.049



Target atau Proyeksi Kinerja Keuangan Tahun 2025

2025 Financial Performance Target or Projection

Target pendapatan usaha PTK pada tahun 2025 adalah mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp8,00 triliun dan untuk laba tahun berjalan ditargetkan sebesar Rp770,84 miliar.

PTK's revenue target in 2025 experiences an increase to Rp8.00 trillion, and profit for the year is targeted at Rp770.84 billion.

Tabel Target atau Proyeksi Pendapatan dan Laba

Table of Revenue and Profit Target or Projection

(dalam Rp Juta)
(in million Rp)

Uraian Description	Target 2025 Target for 2025
Pendapatan usaha Revenue	8.001.000
Beban pokok pendapatan Cost of revenue	5.304.063
Laba bruto Gross profit	2.696.937
Laba sebelum pajak penghasilan Profit before income tax	1.001.097
Laba tahun berjalan Profit for the year	770.844
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan Total comprehensive income for the year	770.844

Target posisi keuangan PTK pada tahun 2025 adalah jumlah aset sebesar Rp 10,92 triliun, jumlah liabilitas sebesar Rp 6,05 triliun, dan jumlah ekuitas sebesar Rp 4,87 triliun.

PTK's financial position target in 2025 is total assets of Rp10.92 trillion, total liabilities of Rp6.05 trillion, and total equity of Rp4.87 trillion.

Tabel Target atau Proyeksi Posisi Keuangan

Table of Financial Position Target or Projection

(dalam Rp Juta)
(in million Rp)

Uraian Description	Target 2025 Target for 2025
Jumlah Aset Total Assets	10.923.441
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	6.056.436
Jumlah Ekuitas Total Equity	4.867.004

Target atau Proyeksi Struktur Modal Tahun 2025

2025 Capital Structure Target or Projection

Manajemen mengelola struktur modal pada tahun 2025 dengan memantau jumlah liabilitas terhadap jumlah ekuitas. Jumlah liabilitas tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp 6,05 triliun dan jumlah ekuitas sebesar Rp 4,87 triliun.

Management manages the capital structure for 2025 by monitoring total liabilities against total equity. Total liabilities in 2025 are targeted at Rp6.05 trillion, and total equity at Rp4.87 trillion.

Target atau Proyeksi Kebijakan Dividen Tahun 2025

2025 Dividend Policy Target or Projection

Kebijakan dividen pada tahun 2025 ditetapkan melalui mekanisme Rapat Umum pemegang Saham (RUPS) dengan mempertimbangkan pertumbuhan kinerja Perusahaan.

The dividend policy for 2025 is determined through the mechanism of the General Meeting of Shareholders (GMS) by considering the Company's performance growth.

Target atau Proyeksi Investasi Tahun 2025

2025 Investment Target or Projection

Target Anggaran Belanja Investasi (ABI) pada tahun 2025 adalah sebesar Rp1,560 miliar yang terdiri dari Kategori *Business Development* sebesar Rp 1,289 miliar, Kategori *Non-Business Development* sebesar Rp63 miliar, dan Kategori Anorganik sebesar Rp 208 miliar.

The Investment Expenditure Budget (ABI) target for 2025 is Rp1,560 billion, consisting of a Business Development Category of Rp1,289 billion, a Non-Business Development Category of Rp63 billion, and an Inorganic Category of Rp 208 billion.

Target atau Proyeksi Kinerja K3 Tahun 2025

2025 OHS Performance Target or Projection

Target kinerja K3 pada tahun 2025 adalah tidak adanya insiden berkategori NoA.

The OHS performance target by 2025 is to have no incidents categorized as NoA.



Ikatan Material untuk Investasi Barang Modal

Material Commitment for Capital Goods Investment

Pada tahun 2024, tidak melakukan ikatan yang material atas investasi barang modal yang dilakukan, sehingga tidak ada pengungkapan yang diperlukan.

In 2024, there were no material commitments for the investment in capital goods made, so no disclosure is required.

Realisasi Investasi Barang Modal

Realization of Capital Goods Investment

Realisasi investasi barang modal PTK tercermin pada realisasi Anggaran Belanja Investasi (ABI) pada tahun berjalan. Nilai realisasi ABI pada tahun 2024 adalah sebesar AS\$19,68 juta yaitu tercapai 94,46% dibandingkan dengan target 2024.

The realization of PTK's capital goods investment is reflected in the realization of the Investment Expenditure Budget (ABI) in the current year. The value of ABI realization in 2024 was US\$19.68 million, which achieved 94.46% compared to the 2024 target.

Plan/Target Tahun 2024 Plan/Target of 2024	Realisasi Tahun 2024 2024 Realization	Pencapaian Achievement
AS\$20,84 million	AS\$19,68 million	94,43%

Keterangan:

Realisasi ABI adalah total drawdown ABI hasil konversi dari Rp ke AS\$ menggunakan kurs closing bulanan dari korporat (holding) dimana kurs yang ditetapkan tiap bulannya berbeda-beda.

Information:

The realization of ABI is the total ABI drawdown resulting from the conversion from Rp to USD using the monthly closing rate from the corporate (holding), where the rate set each month is different.

Investasi barang modal tahun 2024 bertujuan untuk mendukung kelancaran operasional perusahaan. Realisasi penyerapan Anggaran Investasi Perusahaan pada tahun 2024 terdiri atas *Business Development* sebesar AS\$15,75 million dan *Non-Business Development* sebesar AS\$3,93 million, sehingga total investasi dalam RKAP 2024 mencapai AS\$20,84 million atau setara dengan Rp332 miliar. Adapun rincian realisasi investasinya dijelaskan sebagai berikut:

1. Kategori *Business Development*

- Pembangunan Fasilitas *Sea Water Reverse Osmosis* (SWRO) PSTB,
- Pengadaan Peralatan *Oil Spill Response* (OSR),
- Peralatan untuk support kegiatan STS,
- Pembelian *Accommodation Work Barge* (AWB) - Superior.

2. Kategori *Non-Business Development*

- Data Protection Phase II*,
- Pengadaan Peralatan Kerja Operasional *Shorebase* Kabil Batam,
- Hybrid Cloud*,
- Revitalisasi Sarana dan Fasilitas LLP Semarang,
- Implementasi *CCTV Snapshot & Storage Phase II*,
- Pengadaan Kompresor *sandblast* Dok Bagus Kuning,
- Perbaikan SBNP Port Teluk Kabung,
- Pengadaan Sarana *Handling* - PSTB,
- Pembangunan Pangkalan LLP Bitumen *Plant* Gresik,

Investment in capital goods in 2024 aims to support the smooth operation of the Company. The realization of the absorption of the Company's Investment Budget in 2024 consisted of Business Development of US\$15.75 million and Non-Business Development of US\$3.93 million so that the total investment in the 2024 ABOP reached US\$20.84 million or equivalent to Rp332 billion. The details of the investment realization are explained as follows:

1. Business Development Category

- Construction of PSTB Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) Facility,
- Procurement of Oil Spill Response (OSR) Equipment,
- Equipment to support STS activities,
- Purchase of Accommodation Work Barge (AWB) - Superior.

2. Non-Business Development Category

- Data Protection Phase II,
- Procurement of Operational Work Equipment for Kabil Batam Shorebase,
- Hybrid Cloud,
- Revitalization of LLP Semarang Facilities,
- CCTV Snapshot & Storage Phase II Implementation,
- Procurement of sandblast compressor at Dok Bagus Kuning,
- SBNP repair of Teluk Kabung Port,
- Procurement of Handling Facilities - PSTB,
- Construction of Bitumen Plant Gresik LLP Base,

- j. Perbaikan LLP Wayame,
- k. Perbaikan Sarana dan Fasilitas *dockyard* sorong,
- l. Pembangunan Gudang di Utan Kayu,
- m. Perluasan Pangkalan LLP di TBBM Kendari.

- j. Repair of LLP Wayame,
- k. Improvement of Sorong dockyard facilities,
- l. Construction of Warehouse in Utan Kayu,
- m. Expansion of LLP Base at TBBM Kendari.

Adapun justifikasi atas beberapa mata anggaran investasi yang tidak terealisasi pada tahun 2024 disebabkan oleh proyek berikut:

- a. Pembelian 1 unit AWB_1
Proyek telah tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2024. Namun demikian, proyek tersebut belum memperoleh *Final Investment Decision* (FID) yang merupakan salah satu persyaratan utama untuk eksekusi investasi, sehingga tidak dapat dilaksanakan. Selain itu, proyek ini juga telah dibatalkan.
- b. Revitalisasi Dermaga Sandar KKR (*Small Craft*) Port Sei Pakning
Proyek masih dalam proses pengadaan ulang hingga akhir tahun 2024. Dengan demikian, transaksi finansial belum dapat dilakukan pada tahun berjalan.
- c. Revitalisasi Sarana dan Fasilitas LLP Maumere
Proyek ini masih dalam tahap pengerjaan hingga akhir tahun 2024. Pelaksanaan proyek mengalami kendala akibat bencana alam berupa erupsi Gunung Lewotobi, yang mengakibatkan terbatasnya jam kerja di lapangan, kondisi kerja yang tidak kondusif, serta keterlambatan pengiriman material akibat prioritas pengapalan untuk keperluan bantuan erupsi.

The justification for several investment budget items that were not realized in 2024 was due to the following projects:

- a. Purchase of 1 unit AWB_1
The project has been listed in the Company's Annual Budget and Operational Plan (ABOP) for 2024. However, the project has not yet obtained the Final Investment Decision (FID) which is one of the main requirements for investment execution, so it cannot be implemented. In addition, this project has also been canceled.
- b. Sei Pakning Port KKR (Small Craft) Dock Revitalization
The project is still in the process of re-procurement until the end of 2024. Thus, financial transactions cannot be made in the current year.
- c. Revitalization of LLP Maumere's Facilities and Infrastructure
This project is still under construction until the end of 2024. The project implementation experienced obstacles due to natural disasters in the form of Mount Lewotobi eruption, which resulted in limited working hours in the field, unfavorable working conditions, and delays in material delivery due to shipping priorities for eruption relief purposes.

Kontribusi kepada Negara

Contribution to the State

Pengelolaan dan Pengendalian Aspek Perpajakan

Management and Control of Tax Aspect

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan, Pajak diakui pada laporan laba rugi, kecuali untuk pajak atas transaksi yang diakui di pendapatan komprehensif lain atau langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam pendapatan komprehensif lain atau ekuitas.

The tax expense comprises current and deferred tax. Tax is recognized in the profit or loss, except to the extent that it relates to items recognized in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax is also recognized in other comprehensive income or directly in equity, respectively.

Beban pajak kini dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku atau yang secara substansial telah berlaku pada tanggal pelaporan. Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang dilaporkan di

The current income tax charge is calculated using tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted at the reporting date. Management periodically evaluates positions taken in tax returns in relation to



Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sehubungan dengan situasi dimana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi. Jika perlu, Manajemen menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar kepada otoritas pajak.

Pendapatan usaha PTK dan Entitas Anak (Grup PTK) atas pendapatan jasa perkapalan yang diberikan kepada perusahaan domestik dikenakan pajak penghasilan final dengan tarif 1,20% sesuai dengan Undang-undang Perpajakan di Indonesia.

situations in which applicable tax regulations are subject to interpretation. It establishes provisions, where appropriate, based on the amounts expected to be paid to the tax authorities.

Revenues of PTK and its Subsidiaries (PTK Group) from revenue of shipping services provided to domestic companies is subject to a final tax at a rate of 1.20% and under the Taxation Laws of Indonesia.

Setoran Pajak Tax Deposits

Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak merupakan pencerminan kenegaraan di bidang perpajakan dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu, PTK berkomitmen dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak, sebagai Wajib Pajak dan sebagai Pemotong Pajak. Tahun 2024, PTK sebagai Wajib Pajak telah memberikan kontribusi Perusahaan dalam pemenuhan kewajiban PPh Badan.

Responsibility for the obligation to pay taxes reflects the statehood in taxation for national development. Therefore, PTK is committed to fulfilling the obligation to pay taxes as a Taxpayer and Tax Withholder. In 2024, PTK as a Taxpayer made the Company's contribution in fulfilling Corporate Income Tax obligations.

Tabel Setoran Pajak
Table of Tax Deposits

(dalam Rp juta, kecuali dinyatakan lain)
(in Rp million, unless otherwise stated)

Uraian Description	2024	2023	2022	Kenaikan (Penurunan) 2023-2024 Increase (Decrease)	
				Selisih Difference	Persentase Percentage
Pajak Penghasilan (PPh) Income Tax (PPh)	252.615	294.834	97.288	38.937	(14,32)%
Jumlah Setoran Pajak Total Tax Deposits	252.615	294.834	97.288	38.937	(14,32)%

Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Realization of the Use of Public Offering Proceeds

Sampai dengan akhir tahun 2024, PTK tidak melakukan penawaran umum saham dan tidak menerbitkan efek di bursa efek manapun. Sehingga, PTK tidak memiliki kewajiban menyampaikan informasi terkait realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum.

As of the end of 2024, PTK did not conduct a public offering of shares and did not issue securities on any stock exchange. Thus, PTK has no obligation to convey information related to the realization of the use of proceeds from a public offering.

Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Penggabungan Usaha, Akuisisi, dan/ atau Restrukturisasi Utang/Modal

Material Information Regarding Investment, Expansion, Divestment, Business Merger, Acquisition, and/or Debt/Capital Restructuring

Sepanjang tahun 2024, tidak terdapat informasi material terkait investasi, ekspansi, divestasi, akuisisi, restrukturisasi utang/modal, dan penggabungan usaha/merger oleh Perusahaan, sehingga tidak terdapat informasi yang dapat disajikan terkait hal tersebut.

Throughout 2024, there was no material information related to investment, expansion, divestment, acquisition, debt/capital restructuring, and business combination/merger by the Company, so there is no information that can be presented regarding this matter.

Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/ atau dengan Pihak Afiliasi/Berelasi

Material Information Regarding Transactions Containing Conflicts of Interest and/or with Affiliated/Related Parties

Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan

Material Transactions Containing Conflicts of Interest

Selama tahun 2024, tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan, sehingga tidak terdapat informasi yang diungkapkan.

During 2024, there were no transactions containing conflicts of interest, so there is no information to be disclosed.

Transaksi Material dengan Pihak Afiliasi/Berelasi

Material Transactions with Affiliated/Related Parties

Dalam kegiatan usaha normal, Grup melakukan transaksi usaha dan bukan usaha dengan pihak-pihak berelasi, yang terafiliasi dengan Grup melalui kepemilikan langsung dan tak langsung, dan/atau di bawah kendali pihak yang sama ataupun entitas berelasi dengan Pemerintah. Harga jual atau beli antara pihak-pihak berelasi ditentukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, yang mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak ketiga.

In the normal course of business, the Group enters into business and non-business transactions with related parties, which are affiliated with the Group through direct and indirect ownership and/or under the control of the same party or entity related to the Government. The selling or buying price between related parties is determined based on the terms agreed by both parties, which may not be the same as other transactions conducted with third parties.



Transaksi dengan pihak-pihak berelasi dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, yang mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi. Transaksi ini merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan.

Transactions with related parties are conducted based on terms agreed by both parties, which may not be the same as other transactions conducted with unrelated parties. These transactions are business activities carried out to generate business income and are carried out on a regular, recurring, and/or ongoing basis.

Kebijakan dan Mekanisme Persetujuan Transaksi Pihak Berelasi

Related Party Transactions Approval Policy and Mechanism

Kebijakan Penelaahan dan Persetujuan Transaksi Pihak Berelasi

Ketentuan dan kebijakan penelaahan serta persetujuan transaksi pihak berelasi diatur dalam Anggaran Dasar.

Related Party Transaction Review and Approval Policy

The provisions and policies for the review and approval of related party transactions are set out in the Articles of Association.

Keterlibatan Organ Perusahaan dalam Proses Reviu atas Transaksi Pihak Berelasi

Mekanisme reviu atas transaksi dengan pihak berelasi dilakukan melalui proses audit, baik oleh auditor internal maupun auditor eksternal. Dalam proses audit tersebut, Perusahaan melibatkan Organ Perusahaan diantaranya Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit dan beberapa Divisi yang terkait.

Involvement of Company Organs in the Review Process of Related Party Transactions

The review mechanism for transactions with related parties is carried out through an audit process, both by internal and external auditors. In the audit process, the Company involves its Organs, including the Board of Commissioners, Board of Directors, Audit Committee, and several related Divisions.

Dewan Komisaris memiliki peran pengawasan terhadap transaksi dengan pihak berelasi. Komite Audit akan melakukan evaluasi atas kelayakan dan kewajaran transaksi. Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan oleh Komite Audit, selanjutnya peran Dewan Komisaris adalah memberikan arahan dan masukan kepada Direksi agar transaksi dengan pihak berelasi dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip transaksi yang wajar (*arm's-length principle*). Direksi bertanggung jawab atas pelaksanaan operasional perusahaan dan memiliki peran penting dalam mengusulkan dan mengeksekusi transaksi. Namun, untuk transaksi dengan pihak berelasi, Direksi wajib mengungkapkan dan meminta persetujuan dari Dewan Komisaris, bahkan Pemegang Saham/RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) sesuai ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar.

The Board of Commissioners has a supervisory role over transactions with related parties. The Audit Committee will evaluate the appropriateness and fairness of the transaction. Based on the results of the study conducted by the Audit Committee, the next role of the Board of Commissioners is to provide direction and input to the Board of Directors so that transactions with related parties can be carried out in accordance with the arm's-length principle. The Board of Directors is responsible for the implementation of the Company's operations and has a crucial role in proposing and executing transactions. However, for transactions with related parties, the Board of Directors is required to disclose and seek approval from the Board of Commissioners, even Shareholders/GMS (General Meeting of Shareholders), in accordance with the provisions stipulated in the Articles of Association.

Direksi memastikan seluruh transaksi dengan pihak berelasi di sepanjang tahun 2024 telah melalui prosedur yang memadai dan telah dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum dan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*arm's-length principle*). Informasi lebih rinci terkait transaksi pihak berelasi telah diungkapkan dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan pada Catatan 25.

The Board of Directors ensures that all transactions with related parties throughout 2024 have gone through adequate procedures and have been carried out in accordance with generally accepted business practices and fulfill the arm's-length principle. More detailed information regarding related party transactions has been disclosed in the Company's Consolidated Financial Statements in Note 25.

Tujuan Transaksi Pihak Berelasi

Objective of Related Party Transactions

Tujuan utama dilakukannya transaksi dengan pihak berelasi secara umum adalah salah satu bentuk dukungan kepada kelancaran dan keberlanjutan bisnis Perusahaan.

In general, the main objective of transactions with related parties is to support the smooth running and sustainability of the Company's business.

Kewajaran Transaksi Pihak Berelasi

Fairness of Related Party Transactions

Kewajaran seluruh transaksi yang dilakukan dengan pihak-pihak berelasi, baik dilakukan dengan kondisi dan persyaratan dengan pihak ketiga maupun tidak, diungkapkan pada laporan keuangan, telah sesuai dengan standar PSAK 224: Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi. Selain itu, penilaian kewajaran transaksi dengan pihak berelasi didasarkan pada *the arm's length principle*.

The fairness of all transactions carried out with related parties, either carried out under conditions and terms with third parties or not, is disclosed in the financial statements in accordance with the standards of PSAK 224: Disclosure of Related Parties. In addition, the assessment of the fairness of transactions with related parties is based on the arm's length principle.

Nama, Sifat Hubungan dan Sifat Transaksi Pihak Berelasi

Name, Nature of Relationship and Nature of Related Party Transactions

Sifat hubungan dan transaksi dengan pihak yang berelasi adalah sebagai berikut:

The nature of transactions and relationships with related parties are as follows:

Tabel Nama, Sifat Hubungan dan Sifat Transaksi Pihak Berelasi Tahun 2024

Table of Name, Nature of Relationship and Nature of Related Party Transactions in 2024

Pihak berelasi dan entitas berelasi dengan pemerintah Related parties and government-related entities	Sifat Hubungan Nature of Relationships	Saldo dan Sifat Transaksi Balance and Nature of Transactions
PT Pertamina (Persero) ("Pertamina")	Perusahaan induk utama Ultimate parent company	Beban pokok pendapatan, piutang usaha, kontrak aset dan utang usaha Cost of revenue, trade receivables, contract assets, and trade payables
PT Pertamina International Shipping ("PIS")	Pemegang saham mayoritas Majority Shareholder	Pendapatan, beban pokok pendapatan, piutang usaha, kontrak aset, utang usaha dan liabilitas kontrak Revenue, cost of revenue, trade receivables, contract assets, trade payables, and contract liability
PT Pertamina Energy Terminal ("PET")	Entitas sepengendali Entity under common control	Pendapatan, beban pokok pendapatan, piutang usaha, kontrak aset, utang usaha dan penyertaan saham Revenue, cost of revenue, trade receivables, contract assets, trade payables, and investment in shares



Pihak berelasi dan entitas berelasi dengan pemerintah Related parties and government-related entities	Sifat Hubungan Nature of Relationships	Saldo dan Sifat Transaksi Balance and Nature of Transactions
PT Kilang Pertamina International ("KPI")	Entitas sepengendali Entity under common control	Pendapatan, beban pokok pendapatan, piutang usaha, kontrak aset, dan utang usaha Revenue, cost of revenue, trade receivables, contract assets, trade payables
PT Pertamina Patra Niaga ("Patra Niaga")	Entitas sepengendali Entity under common control	Pendapatan, beban pokok pendapatan, piutang usaha, kontrak aset, utang usaha dan penyertaan saham Revenue, cost of revenue, trade receivables, contract assets, trade payables, and investment in shares
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI")	Entitas yang berelasi dengan Pemerintah Government-related entity	Penempatan kas dan setara kas Placement of cash and cash equivalents
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI")	Entitas yang berelasi dengan Pemerintah Government-related entity	Penempatan kas dan setara kas Placement of cash and cash equivalents
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Mandiri")	Entitas yang berelasi dengan Pemerintah Government-related entity	Penempatan kas dan setara kas, pinjaman jangka panjang dan beban keuangan Placement of cash and cash equivalents, long-term borrowings, and finance cost
PT Bank Syariah Indonesia Tbk ("BSI")	Entitas yang berelasi dengan Pemerintah Government-related entity	Penempatan kas dan setara kas, pinjaman jangka panjang dan beban keuangan Placement of cash and cash equivalents, long-term borrowings, and finance cost
PT Perta Arun Gas ("PAG")	Entitas sepengendali Entity under common control	Pendapatan, beban pokok pendapatan, piutang usaha, kontrak aset dan utang usaha Revenue, cost of revenue, trade receivables, contract assets, and trade payables
PT Pertamina Retail ("PTPR")	Entitas sepengendali Entity under common control	Pendapatan, beban pokok pendapatan, piutang usaha dan kontrak aset Revenue, cost of revenue, trade receivables, and contract assets
PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur ("PHKT")	Entitas sepengendali Entity under common control	Pendapatan, piutang usaha dan kontrak aset Revenue, trade receivables, and contract assets
PT Pertamina Hulu Mahakam ("PHM")	Entitas sepengendali Entity under common control	Pendapatan, piutang usaha dan kontrak aset Revenue, trade receivables, and contract assets
PT Pertamina Hulu Energi Offshore North-West Java ("PHE ONWJ")	Entitas sepengendali Entity under common control	Pendapatan, piutang usaha dan kontrak aset Revenue, trade receivables, and contract assets
PT Pertamina Hulu Sanga Sanga ("PHSS")	Entitas sepengendali Entity under common control	Pendapatan, piutang usaha dan kontrak aset Revenue, trade receivables, and contract assets
PT Pertamina Lubricants ("PTPL")	Entitas sepengendali Entity under common control	Pendapatan, beban pokok pendapatan, piutang usaha, kontrak aset dan utang usaha Revenue, cost of revenue, trade receivables, contract assets, and trade payables
PT PGN LNG Indonesia ("PGN LNG")	Entitas sepengendali Entity under common control	Pendapatan, piutang usaha, dan kontrak aset Revenue, trade receivables, and contract assets

Pihak berelasi dan entitas berelasi dengan pemerintah Related parties and government-related entities	Sifat Hubungan Nature of Relationships	Saldo dan Sifat Transaksi Balance and Nature of Transactions
PT Pertamina EP ("PEP")	Entitas sepengendali Entity under common control	Pendapatan, piutang usaha dan kontrak aset Revenue, trade receivables, and contract assets
PT Pertamina Drilling Service ("PDSI")	Entitas sepengendali Entity under common control	Pendapatan dan piutang usaha Revenue and trade receivables
PT Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore ("PHE WMO")	Entitas sepengendali Entity under common control	Pendapatan, piutang usaha dan kontrak aset Revenue, trade receivables, and contract assets
PT Pertamina Bina Medika ("Pertamedika")	Entitas sepengendali Entity under common control	Beban umum dan administrasi dan utang usaha General and administrative expenses and trade payables
PT Patra Logistik ("Patra Logistik")	Entitas sepengendali Entity under common control	Beban pokok pendapatan dan utang usaha Cost of Revenue and trade payables
PT Nusantara Regas ("Nusantara Regas")	Entitas sepengendali Entity under common control	Pendapatan, piutang usaha dan kontrak aset Revenue, trade receivables, and contract assets
PT Pertamina Hulu Energi Offshore Southeast Sumatra ("PHE OSES")	Entitas sepengendali Entity under common control	Pendapatan, piutang usaha dan kontrak aset Revenue, trade receivables, and contract assets
PT Kilang Pertamina Balikpapan ("KPB")	Entitas sepengendali Entity under common control	Pendapatan, piutang usaha dan kontrak aset Revenue, trade receivables, and contract assets
PT Pertamina Hulu Energi North Sumatra Offshore ("PHE NSO")	Entitas sepengendali Entity under common control	Pendapatan dan kontrak aset Revenue and contract assets
PT Prima Armada Raya ("PAR")	Entitas sepengendali Entity under common control	Beban umum dan administrasi dan utang usaha General and administrative expenses and trade payables
PT Pertamina Training & Consulting ("PTC")	Entitas sepengendali Entity under common control	Beban umum dan administrasi dan utang usaha General and administrative expenses and trade payables
PT Mitra Tours & Travel ("MTT")	Entitas sepengendali Entity under common control	Beban umum dan administrasi dan utang usaha General and administrative expenses and trade payables
PT Pertamina International Marketing & Distribution Pte, Ltd ("PIMD")	Entitas sepengendali Entity under common control	Liabilitas kontrak Contract liabilities
PT Pertamina Hulu Rokan ("PHR")	Entitas sepengendali Entity under common control	Pendapatan, piutang usaha dan kontrak aset Revenue, trade receivables, and contract assets
PT Pertamina Hulu Energi Jambi Merang ("PHE JM")	Entitas sepengendali Entity under common control	Pendapatan dan kontrak aset Revenue and contract assets
PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia ("ATPI")	Entitas sepengendali Entity under common control	Beban umum dan administrasi dan utang usaha General and administrative expenses and trade payables
PT Benggala Laju Abadi ("Benggala" atau "SPV PIS")	Entitas sepengendali Entity under common control	Penyertaan saham Investment in shares
PT Banggai Bahtera Laju Abadi ("Banggai" atau "SPV PIS")	Entitas sepengendali Entity under common control	Penyertaan saham Investment in shares
PT Ararkula Bahtera Laju Abadi ("Ararkula" atau "SPV PIS")	Entitas sepengendali Entity under common control	Penyertaan saham Investment in shares



Pihak berelasi dan entitas berelasi dengan pemerintah Related parties and government-related entities	Sifat Hubungan Nature of Relationships	Saldo dan Sifat Transaksi Balance and Nature of Transactions
PT Alor Bahtera Laju Abadi ("Alor" atau "SPV PIS")	Entitas sepengendali Entity under common control	Penyertaan saham Investment in shares
PT Arakulka Bahtera Laju Abadi ("Arakulka" atau "SPV PIS")	Entitas sepengendali Entity under common control	Penyertaan saham Investment in shares
PT Bangkit Bahtera Laju Abadi ("Bangkit" atau "SPV PIS")	Entitas sepengendali Entity under common control	Penyertaan saham Investment in shares
PT Liran Bahtera Laju Abadi ("Liran" atau "SPV PIS")	Entitas sepengendali Entity under common control	Penyertaan saham Investment in shares
PT Barung Bahtera Laju Abadi ("Barung" atau "SPV PIS")	Entitas sepengendali Entity under common control	Penyertaan saham Investment in shares
PT Miangas Bahtera Laju Abadi ("Miangas" atau "SPV PIS")	Entitas sepengendali Entity under common control	Penyertaan saham Investment in shares
PT Brass Bahtera Laju Abadi ("Brass" atau "SPV PIS")	Entitas sepengendali Entity under common control	Penyertaan saham Investment in shares
PT Damar Bahtera Laju Abadi ("Damar" atau "SPV PIS")	Entitas sepengendali Entity under common control	Penyertaan saham Investment in shares
PT Damanusa Bahtera Laju Abadi ("Damanusa" atau "SPV PIS")	Entitas sepengendali Entity under common control	Penyertaan saham Investment in shares
PT Bepondi Bahtera Laju Abadi ("Bepondi" atau "SPV PIS")	Entitas sepengendali Entity under common control	Penyertaan saham Investment in shares
PT Trans Yeong Maritime ("TYM")	Entitas ventura bersama Joint venture entity	Pendapatan, beban pokok pendapatan, piutang usaha dan utang usaha Revenue, cost of revenue, trade receivables, and trade payables
PT Pelabuhan Indonesia (Persero) ("Pelindo")	Entitas yang berelasi dengan Pemerintah Government-related entity	Pendapatan, beban pokok pendapatan, piutang usaha, kontrak aset dan utang usaha Revenue, cost of revenue, trade receivables, contract assets, trade payables
PT Pelindo Marine Service ("Pelindo MS")	Entitas yang berelasi dengan Pemerintah Government-related entity	Pendapatan dan piutang usaha Revenue and trade receivables
PT Administrasi Medika ("Admedika")	Entitas yang berelasi dengan Pemerintah Government-related entity	Beban umum dan administrasi dan utang usaha General and administrative expenses and trade payables
PT Patraima Mitra Sejati ("PMS")	Entitas yang berelasi dengan Pemerintah Government-related entity	Beban umum dan administrasi dan utang usaha General and administrative expenses and trade payables
PT Sigma Cipta Utama ("SCU")	Entitas yang berelasi dengan Pemerintah Government-related entity	Beban pokok pendapatan dan utang usaha Cost of revenue and trade payables

Pihak berelasi dan entitas berelasi dengan pemerintah Related parties and government-related entities	Sifat Hubungan Nature of Relationships	Saldo dan Sifat Transaksi Balance and Nature of Transactions
PT Jawa Satu Power ("JSP")	Entitas yang berelasi dengan Pemerintah Government-related entity	Piutang usaha dan kontrak aset Trade receivables and contract assets
PT Trans Pacific Petrochemical Indotama ("TPPI")	Entitas yang berelasi dengan Pemerintah Government-related entity	Beban pokok, pendapatan dan utang usaha Cost of revenue, revenue, and trade payables
PT Peralife Insurance ("Peralife")	Entitas yang berelasi dengan Pemerintah Government-related entity	Beban umum dan administrasi dan utang usaha Cost of revenue, revenue, and trade payables
PT Surveyor Indonesia (Persero) ("Surveyor Indonesia")	Entitas yang berelasi dengan Pemerintah Government-related entity	Beban umum dan administrasi dan utang usaha Cost of revenue, revenue, and trade payables
PT Telkom Satelit Indonesia ("Telkomsat")	Entitas yang berelasi dengan Pemerintah Government-related entity	Beban umum dan administrasi dan utang usaha Cost of revenue, revenue, and trade payables
PT Biro Klasifikasi Indonesia ("BKI")	Entitas yang berelasi dengan Pemerintah Government-related entity	Beban pokok, pendapatan dan utang usaha Cost of revenue, revenue, and trade payables
PT PAL Indonesia ("PAL")	Entitas yang berelasi dengan Pemerintah Government-related entity	Utang usaha Trade payables
PT Jasa Armada Indonesia ("IPCM")	Entitas anak dari BUMN yang dikendalikan pemerintah Subsidiaries of SOEs controlled by the Government	Beban pokok, pendapatan dan utang usaha Cost of revenue, revenue, and trade payables
PT Pelindo Jasa Maritim ("PJM")	Entitas anak dari BUMN yang dikendalikan pemerintah Subsidiaries of SOEs controlled by the Government	Beban pokok, pendapatan dan utang usaha Cost of revenue, revenue, and trade payables
PT Superintending Company of Indonesia ("SUCOFINDO")	Entitas anak dari BUMN yang dikendalikan pemerintah Subsidiaries of SOEs controlled by the Government	Beban umum dan administrasi, dan utang usaha General and administrative expenses and trade payables
PT Jasamarga Related Business ("JRB")	Entitas anak dari BUMN yang dikendalikan pemerintah Subsidiaries of SOEs controlled by the Government	Piutang usaha Trade receivables



Saldo Transaksi Pihak Berelasi

Balance of Related Party Transactions

Saldo dan transaksi yang material antara Grup dengan Pemerintah Negara Republik Indonesia dan entitas berelasi dengan Pemerintah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang relevan. Grup memilih untuk mengungkapkan transaksi dengan entitas berelasi dengan Pemerintah dengan menggunakan pengecualian dari persyaratan pengungkapan pihak berelasi.

Berikut adalah saldo transaksi dengan pihak berelasi pada tahun 2023 dan 2024:

Material balances and transactions between the Group and the Government of the Republic of Indonesia and entities related to the Government are disclosed in the relevant notes to the consolidated financial statements. The Group chooses to disclose transactions with entities related to the Government using the exemption from related party disclosure requirements.

The following are the balances of transactions with related parties in 2023 and 2024:

Tabel-tabel Saldo Transaksi Pihak Berelasi

Table of Balance of Related Party Transactions

(dalam Rp juta | in Million Rp)

Saldo Pihak Berelasi dalam Aset Balance of Related Parties in Assets	Saldo Pihak Berelasi Balance of Related Parties		Persentase terhadap Jumlah Aset Percentage to Total Assets	
	2024	2023	2024	2023
Kas dan setara kas Cash and cash equivalent	803.847	1.764.132	8,85%	19,32%
Piutang usaha Trade receivables	1.285.772	881.215	14,16%	9,76%
Kontrak aset Contract assets	1.309.213	1.226.058	14,42%	13,59%
Penyertaan saham Investment in shares	6.652	6.652	0,07%	0,07%
Jumlah Aset – Pihak Berelasi Total Assets – Related Parties	3.405.484	3.878.057	37,50%	42,97%
Jumlah Aset – Konsolidasian Total Assets – Consolidated	9.080.441	9.024.799	100,00%	100,00%

Saldo Pihak Berelasi dalam Liabilitas Balance of Related Parties in Liabilities	Saldo Pihak Berelasi Balance of Related Parties		Persentase terhadap Jumlah Aset Percentage to Total Assets	
	2024	2023	2024	2023
Utang usaha Trade payables	1.115.210	935.385	24,91%	21,33%
Liabilitas kontrak Liabilitas kontrak	20.307	41.153	0,45%	0,94%
Pinjaman jangka panjang Long-term borrowings	532.052	482.037	11,89%	10,99%
Jumlah Liabilitas – Pihak Berelasi Total Liabilities – Related Parties	1.667.569	1.458.575	37,25%	33,27%
Jumlah Liabilitas – Konsolidasian Total Liabilities – Consolidated	4.476.576	4.384.414	100,00%	100,00%

Saldo Pihak Berelasi dalam Pendapatan Usaha Balance of Related Parties in Revenue	Saldo Pihak Berelasi Balance of Related Parties		Persentase terhadap Jumlah Pendapatan Usaha Percentage to Total Revenues	
	2024	2023	2024	2023
Pendapatan usaha – pihak berelasi Revenue – related parties	6.539.295	5.691.003	86,51%	84,35%
Pendapatan Usaha – Konsolidasian Revenue – Consolidated	7.559.108	6.746.509	100,00%	100,00%

Saldo Pihak Berelasi dalam Beban Pokok Pendapatan Balance of Related Parties in Cost of Revenue	Saldo Pihak Berelasi Balance of Related Parties		Persentase terhadap Beban Pokok Pendapatan Percentage to Cost of Revenue	
	2024	2023	2024	2023
Beban pokok pendapatan – pihak berelasi Cost of revenue – related parties	1.836.964	1.419.256	37,01%	34,17%
Beban Pokok Pendapatan – Konsolidasian Cost of Revenue – Consolidated	4.963.954	4.153.993	100,00%	100,00%

Saldo Pihak Berelasi dalam Beban Umum dan Administrasi Balance of Related Parties in General and Administrative Expenses	Saldo Pihak Berelasi Balance of Related Parties		Persentase terhadap Beban Umum dan Administrasi Percentage to General and Administrative Expenses	
	2024	2023	2024	2023
Beban umum dan administrasi General and administrative expenses	138.098	79.536	11,00%	6,85%
Kompensasi dan imbalan lain General and Administrative Expenses – Related Parties	53.502	39.889	4,26%	3,44%
Beban Umum dan Administrasi – Pihak Berelasi General and Administrative Expenses – Related Parties	191.600	119.425	15,26%	10,29%
Beban Umum dan Administrasi – Konsolidasian General and Administrative Expenses – Consolidated	1.255.901	1.161.113	100,00%	100,00%



Informasi Keuangan yang Mengandung Kejadian Bersifat Luar Biasa dan Jarang Terjadi

Financial Information Containing Extraordinary and Rare Events

Tidak terdapat peristiwa keuangan yang mengandung kejadian bersifat luar biasa dan jarang yang terjadi di tahun 2024.

There were no financial events containing extraordinary and rare events that occurred in 2024.

Informasi dan Fakta Material yang Terjadi setelah Tanggal Laporan Akuntan

Material Information and Facts Occurring After the Reporting Date

Tidak terdapat informasi dan fakta material yang terjadi antara tanggal laporan akuntan tertanggal 25 April 2025 hingga dipublikasikannya Laporan Tahunan ini.

There was no material information and facts that occurred between the date of the accountant's report April 25th, 2025, until the publication of this annual report.

Perubahan Kebijakan Akuntansi yang Berdampak Signifikan terhadap Perusahaan

Changes in Accounting Policies Significantly Affecting the Company

Perubahan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (ISAK)

Mulai dari 1 Januari 2024, referensi terhadap masing-masing PSAK dan ISAK diubah sesuai dengan penerbitan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK-IAI").

Penerapan dari revisi standar berikut yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2024, tidak menimbulkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Grup dan pengaruh yang material atas jumlah yang dilaporkan atas tahun berjalan atau tahun sebelumnya:

Changes to Statements of Financial Accounting Standards (SFAS) and Interpretations of Statements of Financial Accounting Standards (IFAS)

Effective from January 1, 2024, references to each PSAK and ISAK are amended in accordance with the issuance by the Financial Accounting Standards Board of the Institute of Indonesia Chartered Accountants ("DSAK-IAI").

The adoption of the following revised standards, effective from January 1, 2024, did not result in any substantial changes to the Group's accounting policies and a material effect on the amounts reported for the current or prior year :

- Amendemen PSAK 201 "Penyajian Laporan Keuangan" tentang liabilitas jangka panjang dengan kovenan;
- Amendemen PSAK 116 "Sewa" tentang liabilitas sewa pada transaksi jual dan sewa balik;
- Amendemen PSAK 207 "Laporan Arus Kas" dan
- Amendemen PSAK 107 "Instrumen Keuangan: Pengungkapan" tentang pengaturan pembiayaan pemasok
- Amendment to PSAK 201 "Presentation of Financial Statements" regarding non-current liabilities with covenants;
- Amendment to PSAK 116 "Leases" regarding lease liabilities in sale and leaseback transactions;
- Amendment to PSAK 207 "Statement of Cash Flows" and
- Amendment to PSAK 107 "Financial Instruments: Disclosures" on supplier financing arrangements

Standar baru, amendemen dan interpretasi yang telah diterbitkan, namun berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2025, tapi penerapan dini diperkenankan, adalah sebagai berikut:

- PSAK 117 "Kontrak Asuransi";
- Amendemen PSAK 221 "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing – Kekurangan Ketertukaran".

Dampak terhadap Laporan Keuangan Perusahaan

Penerapan dari revisi standar yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2024, tidak menimbulkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Grup dan pengaruh yang material atas jumlah yang dilaporkan atas tahun berjalan atau tahun sebelumnya.

untuk standar baru, amendemen dan interpretasi yang telah diterbitkan, namun berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2025 pada tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, Grup sedang mempelajari dampak yang mungkin timbul terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup dari penerapan standar baru dan amendemen ini, yang tidak diadopsi dini oleh Grup.

New standards, amendments, and interpretations that have been issued, but are effective for financial years beginning on or after January 1, 2025, but early adoption is permitted, are as follows:

- PSAK 117 "Insurance Contracts";
- Amendments to PSAK 221 "The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates – Lack of Exchangeability".

Impact on the Company's Financial Statements

The adoption of the revised standard, which is effective from January 1, 2024, has not resulted in substantial changes to the Group's accounting policies and a material effect on the amounts reported for the current or prior year.

For new standards, amendments, and interpretations that have been issued, but are effective for financial years beginning on or after January 1, 2025. As at the issuance date of these consolidated financial statements, the Group is evaluating the potential impact of these new standards and amendments which have not been early adopted by the Group, on the Group's consolidated financial statements.

Perubahan Peraturan Perundang-undangan yang Berpengaruh Signifikan terhadap Perusahaan

Changes in Laws and Regulations that Have Significant Effects on the Company

PTK berkomitmen untuk selalu patuh terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan terhadap Perusahaan. Sepanjang tahun 2024 terdapat beberapa peraturan yang baru berlaku dan perubahan peraturan perundang-undangan yang berdampak signifikan terhadap Perusahaan sebagaimana dalam tabel berikut:

PTK is committed to always complying with all laws and regulations relevant to the Company. Throughout 2024, several newly enacted regulations and changes in laws and regulations had a significant impact on the Company, as in the following table:



Tabel-tabel Saldo Transaksi Pihak Berelasi

Table of Changes in Regulations and Newly Enacted Regulations in 2024

No	Nama Peraturan Name of Regulation	Keterangan Perubahan Description of Changes	Dampak terhadap Perusahaan Impact on the Company	
			Kualitatif Qualitative	Kuantitatif Quantitative
1.	Undang-Undang (UU) Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Law (UU) No. 66 of 2024 on the Third Amendment to Law No. 17 of 2008 on Shipping	Ketentuan Pasal 29 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: <i>"Badan Usaha yang khusus didirikan untuk melaksanakan kegiatan Angkutan di Perairan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia dapat melakukan kerja sama dengan perusahaan angkutan laut asing dan membentuk usaha patungan (joint venture) perusahaan Angkutan di Perairan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Badan Usaha yang khusus didirikan untuk melaksanakan kegiatan Angkutan di Perairan serta harus memiliki dan mengoperasikan Kapal berbendera Indonesia dengan ukuran paling rendah GT 50.000 (lima puluh ribu gross tonnage) per Kapal dan diawaki oleh awak berkewarganegaraan Indonesia."</i> The provisions of Article 29 paragraph (2) are amended to read as follows: <i>"Business Entities specifically established to carry out Water Transportation activities whose shares are wholly owned by Indonesian citizens may cooperate with foreign sea transportation companies and form joint ventures of Water Transportation companies whose majority shares are owned by Business Entities specifically established to carry out Water Transportation activities and must own and operate Indonesian flagged vessels with a minimum size of GT 50,000 (fifty thousand gross tonnage) per vessel and manned by Indonesian national crew."</i>	Perusahaan telah <i>comply</i> terhadap peraturan perundang-undangan. The Company has complied with the laws and regulations.	Tidak terdapat dampak kuantitatif terhadap Perusahaan. There is no quantitative impact on the Company.

No	Nama Peraturan Name of Regulation	Keterangan Perubahan Description of Changes	Dampak terhadap Perusahaan Impact on the Company	
			Kualitatif Qualitative	Kuantitatif Quantitative
2.	Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Regulation of the Corruption Eradication Commission Number 3 of 2024 on the Second Amendment to Regulation of the Corruption Eradication Commission Number 07 of 2016 on Procedures for Registration, Announcement, and Examination of State Officials' Wealth	Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah sehingga berbunyi: "LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak: a. saat pengangkatan pertama; b. berakhirnya jabatan atau pensiun; atau c. pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun, sebagai Penyelenggara Negara." The provisions of Article 4 paragraph (2) are amended to read: "LHKPN as referred to in paragraph (1) letters a through c must be submitted within a period of no later than 2 (two) months as of: a. the time of first appointment; b. the end of office or retirement; or c. reappointment after the end of the term of office or retirement, as a State Official."	Perusahaan telah <i>comply</i> terhadap peraturan perundang-undangan. The Company has complied with the laws and regulations.	Tidak memiliki dampak kuantitatif terhadap Perusahaan. Kebijakan penyampaian harta kekayaan penyelenggara negara telah memenuhi standar dan batas waktu yang ditetapkan peraturan perundang-undangan terkait. Has no quantitative impact on the Company. The policy of submitting the assets of state administrators has met the standards and time limits set by the relevant laws and regulations.
3.		Ketentuan Pasal 21 ayat (1) diubah sehingga berbunyi: "Dalam hal Penyelenggara Negara: a. Terlambat melaporkan LHKPN; b. Tidak melaporkan harta dalam LHKPN secara lengkap dan benar; c. Tidak memenuhi undangan klarifikasi dalam rangka pemeriksaan LHKPN; d. Tidak melakukan perbaikan LHKPN atas hasil konfirmasi/klarifikasi sesuai dengan ketentuan pelaporan LHKPN; dan/atau; tidak melaporkan LHKPN, Komisi menyampaikan rekomendasi kepada pimpinan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, anak perusahaan badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah tempat Penyelenggara Negara berdinasi untuk memberikan sanksi kepada Penyelenggara Negara."	Perusahaan telah <i>comply</i> terhadap peraturan perundang-undangan.	Tidak memiliki dampak kuantitatif terhadap Perusahaan. Kebijakan penyampaian harta kekayaan penyelenggara negara yang ditetapkan Perusahaan telah memiliki proses pengawasan dan evaluasi yang memadai untuk mengakomodir ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



No	Nama Peraturan Name of Regulation	Keterangan Perubahan Description of Changes	Dampak terhadap Perusahaan Impact on the Company	
			Kualitatif Qualitative	Kuantitatif Quantitative
		The provisions of Article 21 paragraph (1) are amended to read: "If State Officials: a. Late in reporting LHKPN; b. Do not report assets in the LHKPN completely and correctly; c. Not fulfilling the clarification invitation in the context of the LHKPN examination; d. Not making improvements to the LHKPN on the results of confirmation/clarification in accordance with the provisions of LHKPN reporting; and/or; not reporting LHKPN, <i>The Commission submits recommendations to the heads of ministries/institutions, local governments, state-owned enterprises, regional-owned enterprises, subsidiaries of state-owned enterprises, and regional-owned enterprises where the State Organizer serves to impose sanctions on the State Official."</i>	The Company has complied with the laws and regulations.	Has no quantitative impact on the Company. The policy of submitting the assets of state administrators established by the Company has an adequate supervision and evaluation process to accommodate the provisions of the applicable laws and regulations

Informasi Kelangsungan Usaha

Information on Business Continuity

Hal-hal yang Berpengaruh terhadap Kelangsungan Usaha Perusahaan di Tahun 2024

Sepanjang tahun 2024, tidak terdapat kendala yang signifikan berpengaruh terhadap kinerja Perusahaan. Hal ini diperkuat dengan pencapaian KPI Perusahaan sebesar **108,25%** dengan Tingkat Kesehatan sebesar **90,00** dengan klasifikasi **"AA" (SEHAT)**.

Asesmen Manajemen atas Hal-hal Berpotensi Berpengaruh Signifikan terhadap Kelangsungan Usaha Perusahaan

Manajemen menilai bahwa pada tahun 2024, PTK berhasil mempertahankan tren positif kinerja keuangan sekaligus meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Dengan terus mendorong inovasi, optimalisasi fungsi pendukung bisnis, serta penerapan strategi yang adaptif, PTK yakin dapat memperkuat daya saing perusahaan dan memberikan kontribusi yang lebih besar kepada PT Pertamina (Persero).

Asumsi yang Digunakan Manajemen dalam Melakukan Asesmen

Asumsi yang menjadi dasar manajemen dalam meyakini kelangsungan usaha PTK di antaranya adalah kinerja dan kondisi keuangan PTK yang sehat; kepuasan pelanggan masih dipertahankan; terkait perkara pengadilan, gugatan hukum, atau masalah serupa dikelola dapat diselesaikan dengan baik; serta opini audit dari auditor independen yang memiliki reputasi.

Matters Affecting the Continuity of the Company's Business in 2024

Throughout 2024, no significant constraints were affecting the Company's performance. This is confirmed by the Company's KPI achievement of **108,25%** with a Soundness Level of **90.00** and a classification of **"AA" (HEALTHY)**.

Management's Assessment of Matters with the Potential to Significantly Affect the Company's Business Continuity

Management considers that in 2024, PTK managed to maintain a positive trend in financial performance while improving operational efficiency and the quality of Human Resources (HR). By continuing to encourage innovation, optimizing business support functions, and implementing adaptive strategies, PTK believes it can strengthen the Company's competitiveness and make a greater contribution to PT Pertamina (Persero).

Assumptions Used by Management in Conducting Assessment

The assumptions that form the basis of management in believing in the continuity of PTK's business include the sound performance and financial condition of PTK; customer satisfaction is still maintained; related to court cases, lawsuits, or similar issues managed to be resolved properly; as well as an audit opinion from a reputable independent auditor.

Struktur Modal dan Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal

Capital Structure and Management Policy on Capital Structure

Struktur modal menggambarkan pembiayaan permanen PTK yang terdiri atas utang berbasis bunga dan modal sendiri. PTK berupaya memiliki alternatif pendanaan yang efisien, salah satunya dengan memiliki struktur modal yang optimal yaitu dengan bauran antara liabilitas dan modal sendiri yang sesuai. PTK mengelola struktur modal untuk menjamin keberlanjutan bisnis dan memaksimalkan imbalan bagi Pemegang Saham.

The capital structure reflects PTK's permanent financing, which consists of interest-based debt and equity capital. PTK strives to have efficient funding alternatives, one of which is having an optimal capital structure with an appropriate mix of liabilities and equity capital. PTK manages its capital structure to ensure business sustainability and maximize shareholder returns.

Komposisi struktur modal Perusahaan didominasi oleh ekuitas dalam dua tahun terakhir. Berikut komposisi struktur modal Perusahaan dalam tiga tahun terakhir.

The composition of the Company's capital structure is dominated by equity in the last two years. The following is the composition of the Company's capital structure in the last three years.

Tabel Struktur Modal
Table of Capital Structure

Uraian Description	2024		2023		2022	
	Nominal (Rupiah) Nominal (Rupiah)	Komposisi Composition (%)	Nominal (Rupiah) Nominal (Rupiah)	Komposisi Composition (%)	Nominal (Rupiah) Nominal (Rupiah)	Komposisi Composition (%)
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	4.476.576	49,30	4.384.414	48,58	4.594.992	56,02
Jumlah Ekuitas Total Equity	4.603.865	50,70	4.640.385	51,42	3.607.579	43,98
Jumlah Total	9.080.441	100,00	9.024.799	100,00	8.202.571	100,00

Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal

Management Policy on Capital Structure

Perusahaan secara berkala meninjau dan menjaga struktur modal untuk memastikan kemampuan dan kelayakan yang dimiliki. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan modal di masa mendatang dan efisiensi modal Perusahaan, meliputi profitabilitas saat ini dan proyeksi ke depan, serta proyeksi arus kas operasional. Manajemen mengelola struktur permodalan dan mempertahankan rasio modal yang sehat dalam rangka mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi Pemegang Saham. Manajemen memastikan adanya tingkat pengembalian modal dan tingkat dividen yang dibagikan, dengan menjaga kebijakan modal yang terdiri dari modal saham biasa, laba ditahan, kepentingan non-pengendali dan komponen ekuitas lainnya. Pengawasan struktur modal dilakukan dengan menggunakan rasio liabilitas terhadap ekuitas, yang tercatat sebesar 49,30% pada periode pelaporan.

The Company regularly reviews and maintains its capital structure to ensure its ability and appropriateness. It is conducted by considering the Company's future capital requirements and capital efficiency, including current and projected future profitability, as well as projected operating cash flows. Management manages the capital structure and maintains sound capital ratios in order to support the business and maximize shareholder returns. Management ensures the return on capital and the level of dividends distributed by maintaining a capital policy consisting of ordinary share capital, retained earnings, non-controlling interests, and other equity components. The capital structure is monitored using the liabilities-to-equity ratio, which stood at 49.30% for the reporting period.



06



Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance



Komitmen Berkelanjutan Dalam Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Sustainable Commitment to the Implementation of Corporate Governance

PTK berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja dan menciptakan nilai jangka panjang melalui penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*). Perusahaan menyadari bahwa implementasi GCG yang efektif bukan hanya sebagai kewajiban yang harus dipenuhi, melainkan sebagai kerangka kerja strategis yang bertujuan untuk menciptakan nilai yang berkelanjutan dan memperkuat fondasi transparansi, akuntabilitas, serta praktik bisnis yang beretika. Penerapan prinsip GCG ini menjadi faktor yang sangat penting untuk menjamin pertumbuhan yang berkelanjutan, sekaligus membangun dan memperkuat kepercayaan seluruh pemangku kepentingan terhadap kinerja perusahaan. Kepercayaan ini akan menjadi modal utama bagi PTK dalam menjalankan operasional dan mencapai tujuan jangka panjang yang telah ditetapkan.

Sebagai bagian dari komitmen berkelanjutan, PTK senantiasa berupaya untuk mengutamakan pengelolaan yang profesional dan beretika dalam seluruh aspek operasionalnya. Perusahaan memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil dan aktivitas yang dilaksanakan sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku, guna menjaga integritas dan akuntabilitas dalam seluruh lini bisnis.

Dalam upaya mencapai keberlanjutan, PTK juga mulai mengintegrasikan prinsip-prinsip *Environmental, Social and Governance* (ESG) ke dalam perencanaan dan pengelolaan bisnis yang dijalankan. Integrasi prinsip ESG ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dalam setiap aktivitas operasional sekaligus memperkuat pengawasan terhadap kegiatan usaha yang dilakukan Perusahaan. Melalui upaya ini, PTK tidak hanya berfokus pada pencapaian keuntungan Perusahaan, tetapi juga berkontribusi pada penciptaan nilai tambah yang berkelanjutan, yang mencakup tidak hanya aspek finansial, tetapi juga dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan, serta memastikan bahwa kepentingan seluruh pemangku kepentingan tetap terjaga dengan baik.

PTK is committed to continuously improving performance and creating long-term value through the implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles. The Company realizes that effective GCG implementation is not only an obligation that must be fulfilled, but also a strategic framework that aims to create sustainable value and strengthen the foundation of transparency, accountability, and ethical business practices. The implementation of GCG principles is a crucial factor in ensuring sustainable growth while building and strengthening the trust of all stakeholders in the Company's performance. This trust will be the main capital for PTK in carrying out operations and achieving the predetermined long-term goals.

As part of its ongoing commitment, PTK always strives to prioritize professional and ethical management in all aspects of its operations. The Company ensures that every decision made and activity carried out is in accordance with applicable standards and regulations to maintain integrity and accountability in all lines of business.

In an effort to achieve sustainability, PTK also began to integrate Environmental, Social, and Governance (ESG) principles into the planning and management of its business. The integration of ESG principles aims to increase transparency in every operational activity while strengthening supervision of business activities carried out by the Company. Through these efforts, PTK not only focuses on achieving the Company's profits, but also contributes to the creation of sustainable added value, which includes not only financial aspects, but also positive impacts on society and the environment and ensuring that the interests of all stakeholders are well maintained.

Landasan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Basis of Implementing Corporate Governance

Sistem Tata Kelola yang diterapkan PTK didasarkan pada komitmen terhadap prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran dalam penerapan praktik terbaik dalam tata kelola perusahaan yang baik. Selanjutnya, penerapan tata kelola di Perusahaan senantiasa dipantau dan ditingkatkan kualitas penerapannya dengan mengacu pada standar terbaik penerapan tata kelola yang ada, baik di tingkat lokal maupun global.

Landasan hukum penerapan tata kelola perusahaan di Perusahaan mengacu pada Peraturan Perundang-undangan dan pedoman-pedoman implementasi tata kelola sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
3. Prinsip-prinsip *Corporate Governance* yang dikembangkan oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD);
4. Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) yang dikembangkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG);
5. Surat Kementerian BUMN No. S-17/S.MBU/02/2020 Tentang Sertifikasi ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di BUMN;
6. Anggaran Dasar Perusahaan;
7. Pedoman Tata Kelola PT Pertamina Trans Kontinental No. A-002/PTK0300/2022-S9 yang diterbitkan tahun 2022.

PTK's Governance System is based on a commitment to the principles of transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness in the implementation of best practices in good corporate governance. Furthermore, governance implementation in the Company is continuously monitored and improved by referring to the best standards of governance implementation, both locally and globally.

The legal basis for implementing corporate governance in the Company refers to the Legislative Regulations and governance implementation guidelines as follows:

1. Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies as amended by Government Regulation in Lieu of Law no. 2 of 2022 concerning Job Creation as stipulated into law based on Law no. 6 of 2023 concerning Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law no. 2 of 2022 concerning Job Creation Becoming Law;
2. BUMN Ministerial Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises;
3. Corporate Governance principles developed by the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD);
4. General Guidelines for Indonesian Corporate Governance (PUGKI) developed by the National Committee for Governance Policy (KNKG);
5. Letter from the Ministry of BUMN No. S-17/S.MBU/02/2020 Concerning ISO 37001 Anti-Bribery Management System (SMAP) Certification in SOE;
6. Company's Articles of Association;
7. Guidelines for Governance of PT Pertamina Trans Kontinental No. A-002/PTK0300/2022-S9 issued in 2022.

Penerapan Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik Implementation of Good Corporate Governance Principles

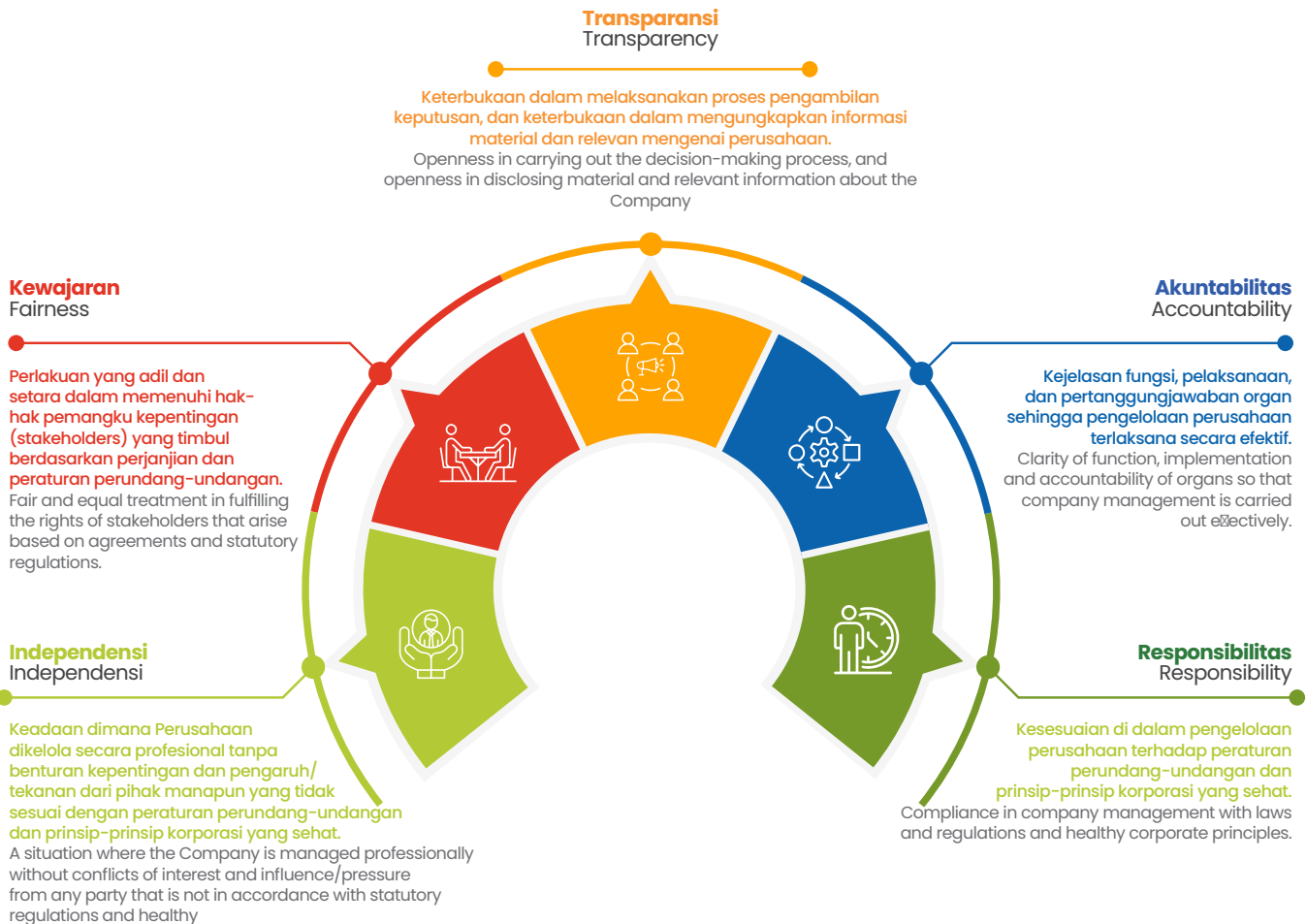
Prinsip-prinsip GCG merupakan fondasi penting dalam membangun kerangka kerja tata kelola yang kokoh dan efektif. Penerapan prinsip-prinsip GCG yang konsisten dan berkelanjutan tidak hanya mendukung transparansi dan keadilan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap kinerja Perusahaan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, PTK berpegang teguh pada lima prinsip utama GCG, yang meliputi transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan.

GCG principles are a crucial foundation in building a solid and effective governance framework. Consistent and sustainable implementation of GCG principles not only supports transparency and fairness, but also increases stakeholder confidence in the Company's performance. To realize this goal, PTK adheres to five key GCG principles, which include transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness. These principles are adopted to ensure that



Prinsip-prinsip ini diadopsi dengan tujuan untuk memastikan bahwa setiap keputusan dan tindakan yang diambil Perusahaan berlandaskan pada pertimbangan yang adil, jelas, dan terbuka.

every decision and action taken by the Company is based on fair, clear, and open considerations.



Selain itu, sebagai acuan dalam penerapan GCG, PTK mengikuti Pedoman Umum Tata Kelola Perusahaan Indonesia (PUGKI) 2021, yang telah dimutakhirkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), dan mencakup prinsip-prinsip ETAK (Etika, Transparansi, Akuntabilitas, Keberlanjutan). Prinsip-prinsip ini diterapkan secara terintegrasi untuk memastikan bahwa Perusahaan tidak hanya beroperasi dengan standar tinggi, tetapi juga memberikan dampak positif dan berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan.

In addition, as a reference in the GCG implementation, PTK follows the General Guidelines for Indonesian Corporate Governance (PUGKI) 2021, which has been updated by the National Committee on Governance Policy (KNKG), and includes the principles of ETAK (Ethics, Transparency, Accountability, Sustainability). These principles are applied in an integrated manner to ensure that the Company not only operates to a high standard, but also provides a positive and sustainable impact for all stakeholders.

Prinsip-prinsip ETAK (Etika, Transparansi, Akuntabilitas, Keberlanjutan)
Principles of ETAK (Ethics, Transparency, Accountability, Sustainability)



Perilaku Etis
Ethical Behavior

Dalam menjalankan aktivitasnya, Perusahaan selalu mengutamakan kejujuran, memperlakukan semua pihak dengan hormat, memenuhi komitmen, membangun dan memelihara nilai-nilai moral dan keyakinan secara konsisten. Perusahaan memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan dikelola secara independen sehingga masing-masing organ Perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

In carrying out its activities, the Company consistently prioritizes honesty, treats all parties with respect, fulfills commitments, and builds and maintains moral values and beliefs. The Company considers the interests of shareholders and other stakeholders based on the principle of fairness and is managed independently so that each organ of the Company does not dominate the other and cannot be intervened by other parties.

Akuntabilitas
Accountability

Perusahaan dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Dengan demikian, perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkelanjutan.

The Company is accountable for its performance transparently and fairly. Thus, the Company must be managed properly, measurably, and in accordance with the interests of the Company while taking into account the interests of shareholders and stakeholders. Accountability is a necessary prerequisite for achieving sustainable performance.

Transparansi
Transparency

Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, Perusahaan menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh para pemangku kepentingan. Perusahaan mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya hal-hal yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal-hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

To maintain objectivity in conducting business, the Company provides material and relevant information in a manner that is easily accessible and understood by stakeholders. The Company takes the initiative to disclose not only matters required by laws and regulations, but also matters that are essential for decision-making by shareholders, creditors, and other stakeholders.

Keberlanjutan
Sustainability

Perusahaan mematuhi peraturan perundang-undangan dan berkomitmen untuk melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan dalam rangka memberikan kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan melalui kerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang sejalan dengan kepentingan bisnis dan agenda pembangunan berkelanjutan.

The Company complies with laws and regulations and is committed to carrying out its responsibilities towards society and the environment in order to contribute to sustainable development through cooperation with all stakeholders to improve people's lives in line with business interests and the sustainable development agenda.

Penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang telah dijalankan dengan konsisten oleh PTK hingga saat ini mencerminkan komitmen Perusahaan untuk terus berkembang dan bertransformasi dalam menghadapi tantangan global. Implementasi tata kelola ini juga sekaligus menjadi fondasi yang kokoh dalam mewujudkan visi Perusahaan untuk menjadi *Leading Integral Shipping and Port Operation Provider* di tingkat regional dan global.

The implementation of governance principles that have been consistently implemented by PTK to date reflects the Company's commitment to continuously developing and transforming in dealing with global challenges. The implementation of this governance is also a solid foundation for realizing the Company's vision to become a *Leading Integral Shipping and Port Operation Provider* at the regional and global levels.



Peningkatan Kualitas Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Improving the Quality of Corporate Governance Implementation

Sepanjang tahun 2024, PTK terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kualitas penerapan tata kelola perusahaan melalui berbagai program dan aktivitas yang terencana dengan baik. Langkah-langkah ini menunjukkan dedikasi PTK untuk memastikan tata kelola telah diterapkan secara efektif dan konsisten sekaligus memberikan dampak positif bagi seluruh pemangku kepentingan.

Throughout 2024, PTK continued to strengthen its commitment to improving the quality of corporate governance implementation through various well-planned programs and activities. These steps demonstrate PTK's dedication to ensuring governance is implemented effectively and consistently while providing a positive impact for all stakeholders.

Kelengkapan Infrastruktur Tata Kelola Perusahaan

Completeness of Corporate Governance Infrastructure

Sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas tata kelola, PTK telah memperkuat infrastruktur tata kelola Perusahaan yang mencakup kebijakan-kebijakan internal yang mendukung penerapan prinsip-prinsip GCG. Kebijakan-kebijakan tersebut menjadi pedoman penting yang mengatur seluruh aktivitas dan hubungan antar organ tata kelola di perusahaan, serta memastikan bahwa perusahaan beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.

As part of an effort to improve the quality of governance, PTK has strengthened the Company's governance infrastructure, which includes internal policies that support the implementation of GCG principles. These policies are important guidelines that regulate all activities and relationships between governance organs in the Company, and ensure that the Company operates in accordance with GCG principles.

Berikut adalah berbagai kebijakan tata kelola yang dimiliki PTK:

The following are the various governance policies that PTK has:

1. *Code of Corporate Governance* yang ditetapkan berdasarkan No. A-002/PTK0300/2022-S9;
2. Pedoman Etika Usaha & Tata Perilaku (*Code of Conduct*) yang ditetapkan berdasarkan No. A-003/PTK0300/2022-S9;
3. *Board Manual* yang ditetapkan berdasarkan Kesepakatan bersama Dewan Komisaris dan Direksi tanggal 25 Juni 2018;
4. Kebijakan Tata Cara Kerja Komite meliputi Piagam Komite Audit, Piagam Komite Nominasi, Remunerasi & Manajemen Risiko, dan Piagam Komite Investasi;
5. Pedoman Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*) yang ditetapkan berdasarkan No. Pdm-004/F0000/2016-S0;
6. Pedoman Pengendalian Gratifikasi yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi No. PDM-004/PTK0300/2022-S9;
7. Prosedur Pengelolaan *Whistleblowing System* (WBS) yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi No. B-008/F1000/2019-S0;
8. Pedoman Pelaporan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan No. Kpts-547/C0000/2021-C0; serta
9. Pedoman Pengelolaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang ditetapkan berdasarkan No. A-001/PTK0320/2021-S0.

1. The Code of Corporate Governance is determined based on No. A-002/PTK0300/2022-S9;
2. Business Ethics & Code of Conduct Guidelines are established based on No. A-003/PTK0300/2022-S9;
3. Board Manual stipulated based on the joint agreement of the Board of Commissioners and the Board of Directors dated June 25, 2018;
4. Committee Charter Policy covering the Audit Committee Charter, Nomination, Remuneration & Risk Management Committee Charter, and Investment Committee Charter;
5. Guidelines for Conflict of Interest established based on No. Pdm-004/F0000/2016-S0;
6. Guidelines for Gratification Control established based on Decree of the Board of Directors No. PDM-004/PTK0300/2022-S9;
7. Whistleblowing System (WBS) Management Procedures established based on the Decree of the Board of Directors No. B-008/F1000/2019-S0;
8. Guidelines for Reporting the State Officials' Wealth Report (LHKPN), which is stipulated based on Decree No. Kpts-547/C0000/2021-C0; and
9. Guidelines for the Management of the Anti-Bribery Management System established based on Decree No. A-001/PTK0320/2021-S0.

Penandatanganan Komitmen Implementasi GCG

Signing the GCG Implementation Commitment

Sebagai bagian dari komitmen terhadap penerapan GCG di Perusahaan, Dewan Komisaris dan Direksi, serta jajarannya, secara aktif berpartisipasi dalam mendeklarasikan komitmen untuk senantiasa melaksanakan GCG dalam setiap aspek operasional Perusahaan. Komitmen ini diwujudkan melalui penandatanganan pernyataan Pakta Integritas yang menegaskan tekad setiap individu untuk berperilaku sesuai dengan standar etika dan tanggung jawab yang tinggi. Selain itu, seluruh jajaran manajemen dan karyawan juga menandatangani kepatuhan terhadap *Code of Conduct* dan pernyataan bebas benturan kepentingan, yang diperbarui secara berkala.

As part of the commitment to GCG implementation in the Company, the Board of Commissioners and Board of Directors, as well as their staff, actively participated in declaring a commitment to implementing GCG in every aspect of the Company's operations. This commitment is realized through the signing of an Integrity Pact statement that affirms the determination of each individual to behave in accordance with high ethical standards and responsibility. In addition, all levels of management and employees also sign compliance with the Code of Conduct and conflict of interest-free statements, which are updated regularly.

Pencapaian *Roadmap* Kelola Perusahaan

Achievement of the Corporate Governance Roadmap

Perusahaan telah menetapkan Peta Jalan Tata Kelola Perusahaan yang diselaraskan dengan perencanaan strategis dalam implementasi GCG secara berkelanjutan.

The Company has established a Corporate Governance Roadmap which is aligned with strategic planning in implementing GCG continuously.

Persiapan Penerapan GCG

Preparation for GCG Implementation

Mempersiapkan pelaksanaan GCG yang sistematis dan terstruktur sehingga pelaksanaannya dapat berjalan dengan mulus, efisien dan efektif.

Preparing systematic and structured GCG implementation so that implementation can run smoothly, efficiently, and effectively

Good Corporate Governance

Memenuhi ketentuan dan peraturan (*Mandatory* maupun *Voluntary*) dalam tata kelola perusahaan.

Fulfilling the rules and regulations (*Mandatory* and *Voluntary*) in corporate governance.

Good Governance Company

Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG pada semua proses bisnis dengan di dukung oleh tersedianya pedoman perusahaan dari tingkat manajemen puncak hingga tingkat operasional.

Implementation of GCG principles in all business processes is supported by the availability of company guidelines from top management level to operational level.

Good Governed Company

Menjadikan prinsip-prinsip GCG menjadi bagian dari budaya perusahaan dan menjadi warga industri maupun masyarakat sosial yang beretika dan bertanggung jawab

Making GCG principles part of the Company culture and becoming an ethical and responsible citizen of industry and social society



Sejalan dengan tahapan dalam peta jalan tata kelola perusahaan yang telah disusun, sepanjang tahun 2024, PTK telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis yang bertujuan untuk membawa Perusahaan ke dalam tahapan *Good Governed Company*. Kegiatan ini mencakup penguatan dan penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, peningkatan kualitas pengawasan, serta penguatan sistem manajemen risiko yang lebih transparan dan akuntabel. Selain itu, PTK juga terus berupaya memperkuat komitmen seluruh jajaran organisasi untuk menerapkan tata kelola yang beretika dan berkelanjutan.

In line with the stages in the prepared corporate governance roadmap, throughout 2024, PTK carried out various strategic activities aimed at bringing the Company into the *Good Governed Company* stage. These activities include strengthening and implementing the principles of good governance, improving the quality of supervision, and strengthening a more transparent and accountable risk management system. In addition, PTK continues to strengthen the commitment of all levels of the organization to implement ethical and sustainable governance.

Sosialisasi Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Socialization of the Implementation of Corporate Governance

Untuk terus meningkatkan kualitas dan efektivitas penerapan GCG, PTK secara rutin melakukan sosialisasi terhadap prinsip-prinsip GCG kepada seluruh karyawan di berbagai jenjang organisasi. Sosialisasi ini tidak hanya mencakup pengenalan prinsip-prinsip GCG kepada pekerja baru, tetapi juga melibatkan kegiatan penyegaran bagi seluruh karyawan secara berkala. Selain itu, Perusahaan memberikan materi terkait GCG dan melakukan sosialisasi melalui berbagai saluran komunikasi internal agar seluruh karyawan memiliki pemahaman yang baik tentang kebijakan-kebijakan dan prosedur GCG yang berlaku.

To continuously enhance the quality and effectiveness of GCG implementation, PTK regularly conducts socialization of GCG principles to all employees at various levels of the organization. This socialization not only includes the introduction of GCG principles to new workers, but also involves refresher activities for all employees regularly. In addition, the Company provides GCG-related materials and conducts socialization through various internal communication channels so that all employees have a thorough understanding of the applicable GCG policies and procedures.

Evaluasi Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Evaluation of the Corporate Governance Implementation

Untuk memastikan penerapan GCG yang efektif dan berkelanjutan, PTK secara rutin melakukan evaluasi terhadap kualitas implementasi GCG di seluruh aspek operasional Perusahaan. Pada tahun 2024, penilaian penerapan GCG di Perusahaan menggunakan parameter yang disepakati, yaitu Sekretaris BUMN Nomor 16 Tahun 2012, yang menjadi acuan utama. Meskipun saat asesmen berlangsung, acuan penilaian tata kelola Badan Usaha Milik Negara berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor 02 Tahun 2023 masih dalam tahap penyusunan dan belum diterbitkan secara resmi, Perusahaan masih menimbang bahwa Pedoman Sekretaris BUMN yang ada tetap dapat digunakan sebagai landasan untuk menilai kualitas GCG Perusahaan.

To ensure effective and sustainable GCG implementation, PTK regularly evaluates the quality of GCG implementation in all aspects of the Company's operations. In 2024, the assessment of GCG implementation in the Company uses the agreed parameters, namely the Secretary of SOEs Number 16 of 2012, as the key reference. Although at the time of the assessment, the reference for assessing the governance of State-Owned Enterprises based on the Regulation of the Minister of SOEs Number 02 of 2023 was still in the preparation stage and had not yet been officially issued, the Company still considered that the existing SOE Secretary Guidelines could still be used as a basis for assessing the quality of the Company's GCG.

Berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan, pencapaian skor penerapan GCG tahun 2024 menunjukkan hasil dengan skor sebesar 88,886%, yang mendapatkan kualifikasi "Baik". Sebagai bentuk komitmen terhadap peningkatan kualitas tata kelola perusahaan, PTK berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap rekomendasi yang diberikan dalam hasil asesmen yang telah dilakukan.

Based on the results of the assessment conducted, the achievement of the GCG implementation score in 2024 showed a score of 88.886%, which received a qualification of "Good". As a form of commitment to improving the quality of corporate governance, PTK is committed to following up on any recommendations provided in the assessment results that have been carried out.

Struktur dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance Structure and Mechanism

PTK telah memiliki struktur dan mekanisme tata kelola Perusahaan guna memastikan penerapan GCG dapat berjalan efektif melalui pembagian peran, tugas dan tanggung jawab secara jelas. Pelaksanaan tata kelola perusahaan dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan sehingga prinsip-prinsip GCG menjadi acuan dalam setiap aktivitas bisnis Perusahaan.

Sesuai dengan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, struktur tata kelola Perusahaan terdiri dari organ utama, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi. Dewan Komisaris juga telah membentuk organ pendukung dalam melaksanakan tugasnya, yang terdiri dari Sekretaris Dewan Komisaris dan Komite. Dalam rangka penerapan prinsip-prinsip GCG dan penyesuaian terhadap peraturan terbaru mengenai Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN, Dewan Komisaris telah melakukan penyesuaian struktur komite untuk menunjang efektivitas pengawasan serta meningkatkan kualitas kinerja. Penyesuaian tersebut adalah sebagai berikut:

PTK has a corporate governance structure and mechanism to ensure the implementation of GCG can run effectively through a clear division of roles, duties, and responsibilities. The corporate governance implementation is carried out systematically and continuously so that GCG principles become a reference in every business activity of the Company.

In accordance with Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies, the Company's governance structure consists of the main organs, namely the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Commissioners, and the Board of Directors. The Board of Commissioners has also established supporting organs in carrying out its duties, consisting of the Secretary to the Board of Commissioners and Committees. In the context of implementing GCG principles and adjusting to the latest regulations regarding the Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of SOEs, the Board of Commissioners made adjustments to the committee structure to support the effectiveness of supervision and improve performance quality. The adjustments are as follows:

Sebelum Penyesuaian Before the adjustment	Setelah Penyesuaian Following the adjustment
Komite Audit Audit Committee	Komite Audit Audit Committee
Komite Nominasi, Remunerasi dan Manajemen Risiko Nomination, Remuneration, and Risk Management Committee	Komite Nominasi & Remunerasi Nomination & Remuneration Committee
Komite Investasi Investment Committee	Komite Pemantau Risiko & Investasi Risk Monitoring & Investment Committee

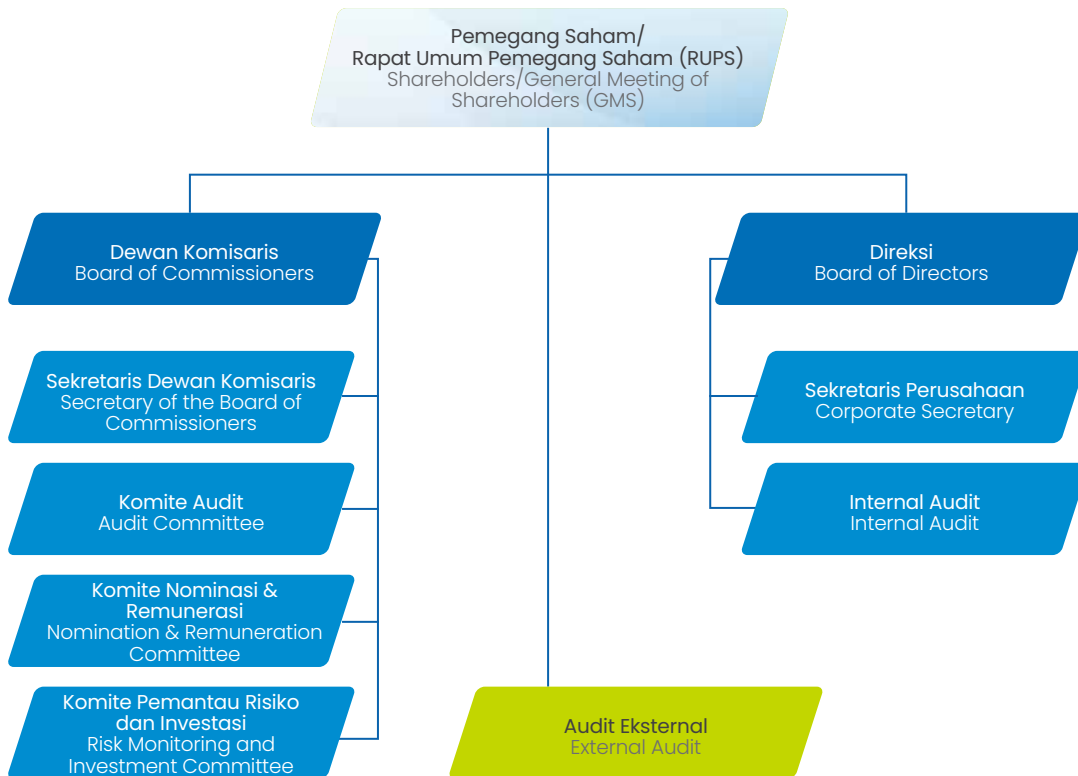
Sementara itu, pelaksanaan tugas Direksi didukung oleh berbagai unit kerja dan fungsi pendukung, seperti Sekretaris Perusahaan, Internal Audit, serta unit kerja lainnya yang memiliki peran strategis dalam mendukung operasional dan pengendalian internal Perusahaan.

Meanwhile, the implementation of the Board of Directors' duties is supported by various work units and supporting functions, such as the Corporate Secretary, Internal Audit, and other work units that have a strategic role in supporting the Company's operations and internal control.



Struktur Organ Tata Kelola Perusahaan

Structure of Corporate Governance Organs



Untuk memastikan sinergi yang optimal antara berbagai organ tata kelola, PTK menerapkan mekanisme tata kelola yang didukung oleh struktur dan infrastruktur yang memadai. Mekanisme ini dirancang agar selaras dengan harapan Pemegang Saham serta kepentingan para pemangku kepentingan lainnya. Mekanisme tata kelola di PTK diperkuat oleh 3 (tiga) organ utama Perusahaan, yaitu Pemegang Saham/RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi yang memiliki tugas dan wewenangnya masing-masing dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, untuk menjaga transparansi dalam pelaporan keuangan, PTK menunjuk Kantor Akuntan Publik sebagai auditor independen guna memastikan akurasi dan kredibilitas laporan keuangan Perusahaan.

Dengan sistem tata kelola yang kuat dan terstruktur, PTK berkomitmen untuk menjalankan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran, guna menciptakan tata kelola perusahaan yang profesional dan berkelanjutan.

To ensure optimal synergy between the various governance organs, PTK implements a governance mechanism supported by adequate structure and infrastructure. These mechanisms are designed to align with the expectations of Shareholders as well as the interests of other stakeholders. The governance mechanism at PTK is strengthened by 3 (three) main organs of the Company, namely the Shareholders/GMS, the Board of Commissioners, and the Board of Directors, who have their respective duties and authorities in carrying out their duties and responsibilities in accordance with the Company's Articles of Association and applicable laws and regulations. In addition, to maintain transparency in financial reporting, PTK appoints a Public Accounting Firm as an independent auditor to ensure the accuracy and credibility of the Company's financial statements.

With a robust and structured governance system, PTK is committed to implementing the principles of transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness to create professional and sustainable corporate governance.

Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ Perusahaan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris atau Direksi dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perusahaan. Sebagai perwujudan akuntabilitas, RUPS menjadi forum bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk menyampaikan laporan kinerja serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas selama tahun berjalan.

Dalam RUPS, setiap Pemegang Saham memiliki hak yang setara dalam menentukan keputusan strategis yang berpengaruh terhadap keberlanjutan usaha Perusahaan. Melalui RUPS, Pemegang Saham berhak menjalankan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, termasuk meminta pertanggungjawaban atas pengelolaan Perusahaan, melakukan perubahan Anggaran Dasar, mengangkat dan memberhentikan Direksi dan/atau Dewan Komisaris, menetapkan pembagian tugas dan wewenang di antara Direksi, serta hal-hal penting lainnya yang berkaitan dengan operasional dan arah strategis Perusahaan.

The General Meeting of Shareholders (GMS) is the Company's organ that has authority not granted to the Board of Commissioners or the Board of Directors within the limits outlined in laws and regulations and the Company's Articles of Association. As a manifestation of accountability, the GMS is a forum for the Board of Commissioners and Board of Directors to submit performance reports and account for the implementation of duties during the year.

In the GMS, each Shareholder has equal rights in determining strategic decisions that affect the sustainability of the Company's business. Through the GMS, Shareholders have the right to exercise their authority as stipulated in the Articles of Association, including holding the Company accountable for its management, amending the Articles of Association, appointing and dismissing the Board of Directors and/or Board of Commissioners, determining the division of duties and authority among the Board of Directors, as well as other important matters relating to the Company's operations and strategic direction.

Jenis-Jenis Penyelenggaraan RUPS Types of GMS Organizing

Sesuai dengan penyelenggaraannya, RUPS terdiri dari RUPS Tahunan yang diselenggarakan minimal sekali dalam setahun selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir, dan RUPS Lainnya yang disebut RUPS Luar Biasa yang waktu penyelenggaraannya dapat dilakukan sewaktu-waktu apabila diperlukan oleh Pemegang Saham atau atas usulan Komisaris dan/atau Direksi. Pemegang Saham juga dapat menyelenggarakan pengambilan Keputusan Sirkuler (RUPS Sirkuler), yakni pengambilan keputusan di luar RUPS (tanpa kehadiran fisik). Keputusan RUPS Sirkuler memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Keputusan RUPS yang dilakukan secara fisik, dengan syarat seluruh Pemegang Saham dengan hak suara memberikan persetujuan tertulis atas usul RUPS yang akan diputuskan.

In accordance with its implementation, the GMS consists of the Annual GMS, which is held at least once a year no later than 6 (six) months after the financial year ends, and the Other GMS called Extraordinary GMS, which can be held at any time if needed by the Shareholders or at the proposal of the Commissioners and/or Board of Directors. The Shareholders may also organize the making of Circular Resolutions (Circular GMS), which is decision-making outside the GMS (without physical presence). Circular GMS resolutions have the same legal force as physical GMS resolutions, provided that all Shareholders with voting rights provide written approval for the GMS proposal to be decided.



Penyelenggaraan RUPS Tahunan Tahun Buku 2023

2023 Fiscal Year AGMS

Di sepanjang tahun 2024, Perusahaan telah menyelenggarakan satu kali RUPS Tahunan dan satu kali RUPS Luar Biasa untuk tahun buku 2023 yang diselenggarakan pada tanggal 14 Juni 2024. Tahapan penyelenggaraan RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 dilakukan dengan mengacu pada ketentuan dalam Anggaran Dasar Perusahaan, sebagaimana berikut.

Throughout 2024, the Company held one Annual GMS and one Extraordinary GMS for the 2023 fiscal year held on June 14, 2024. The stages of organizing the Annual GMS for the 2023 Financial Year were carried out with reference to the provisions in the Company's Articles of Association, as follows.

Tahapan Penyelenggaraan RUPS Tahunan Tahun Buku 2023:

Stages of the Annual GMS for the 2023 Financial Year:

Pemanggilan RUPS Invitation to the GMS

Pemanggilan RUPST kepada Pemegang Saham dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan. Pemanggilan RUPS Tahunan Perusahaan dilakukan pada tanggal 31 Mei 2024 melalui surat tercatat No. 185/PTK0000/2024-S9 perihal Undangan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2023 PT Pertamina Trans Kontinental ("PTK"). The invitation of the AGMS to the Shareholders is made at the latest 14 (fourteen) days before the GMS is held by not taking into account the date of the invitation and the date of the GMS. The invitation to the Company's Annual GMS was made on May 31, 2024, through registered letter No. 185/PTK0000/2024-S9 regarding the Invitation to the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) for the 2023 Financial Year of PT Pertamina Trans Kontinental ("PTK").

Penyelenggaraan RUPS Organizing GMS

Penyelenggaraan RUPST dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan selambat-lambatnya dalam enam bulan setelah tahun buku berakhir. RUPST tahun 2024 diselenggarakan pada tanggal 14 Juni 2024 secara fisik di Ruang Rapat Aula Gedung Transko PT Pertamina Trans Kontinental, Jakarta. The AGMS is held in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association no later than six months after the financial year ends. The 2024 AGMS was held on June 14, 2024, physically in the Meeting Room of the Transko Building Hall of PT Pertamina Trans Kontinental, Jakarta.

Hasil RUPS GMS Results

Hasil Keputusan RUPST telah dituangkan melalui Akta No. 24 tanggal 14 Juni 2024 yang dibuat dihadapan Notaris Fessy Farizqoh Alwi, SH. M.Kn., Notaris di Jakarta. The resolution of the AGMS has been outlined in Deed No. 24 dated June 14, 2024, made before Notary Fessy Farizqoh Alwi, S.H. M.Kn., Notary in Jakarta.

RUPS Tahunan tahun buku 2023 dihadiri oleh perwakilan pemegang saham, seluruh Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan serta Notaris Fessy Farizqoh Alwi, SH. M.Kn., Notaris di Jakarta, selaku pihak independen yang bertindak dalam validasi/perhitungan suara. Seluruh Keputusan RUPST tahun 2024 telah disetujui oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara musyawarah untuk mufakat.

The Annual GMS for the 2023 fiscal year was attended by shareholder representatives, the entire Company's Board of Commissioners and Board of Directors as well as Notary Fessy Farizqoh Alwi, SH. M.Kn., Notary in Jakarta, as an independent party acting in the validation/counting of votes. All resolutions of the AGMS 2024 were approved by the Shareholders and/or Proxies of Shareholders present by deliberation for consensus.

Mata Acara, Keputusan dan Realisasi RUPS Tahunan Tahun Buku 2023

Agenda, Resolutions, and Realization of the 2023 Fiscal Year AGMS:

No.	Mata Acara Rapat Meeting Agenda	Keputusan Rapat Meeting Resolutions	Realisasi Realization
1.	Mata Acara I: Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Disertai Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Agenda I: Approval of the Annual Report including Ratification of the Company's Financial Report accompanied by the Provision of Full Repayment and Release of Responsibility (<i>Volledig Acquit Et De Charge</i>) to the Directors and Board of Commissioners.	Keputusan Agenda I: - Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023 serta mengesahkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 beserta penjelasannya; - Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya dari tanggung jawab (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sepanjang: - Tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan (termasuk laporan keuangan) Tahun Buku yang berakhir pada tanggal tanggal 31 Desember 2023 - Tindakan-tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan/atau perbuatan melawan hukum. Agenda I Resolutions: - Approved the Company's Annual Report for the 2023 (two thousand twenty-three) Fiscal Year and ratified the Company's Financial Report for the Fiscal Year ending December 31, 2023, along with its explanation; - Providing full repayment and release from liability (<i>Volledig Acquit Et De Charge</i>) to the Board of Directors for management actions and to the Board of Commissioners for supervisory actions carried out in the Financial Year ending December 31, 2023, as long as: - These actions are reflected in the Company's Annual Report (including Financial Reports) for the Financial Year ending 31 December 2022; - These actions do not constitute criminal acts and/or unlawful acts.	Telah terealisasi. Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan telah disahkan dalam rapat. It has been realized. The Annual Report and Financial Report have been approved at the meeting.
2.	Mata Acara II: Pengusulan dan Penetapan Penggunaan Laba Tahun Buku 2023 Agenda II: Proposing and Determining the Use of Profits for the 2023 Fiscal Year	Keputusan Agenda II: Penetapan Penggunaan Laba Perseroan Tahun Buku 2023 akan ditentukan kemudian dan akan dilaksanakan dalam RUPS terpisah secara sirkuler. Agenda II Resolutions: Determination of the Use of the Company's Profit for the 2023 Financial Year will be determined later and will be carried out in a separate GMS circularly.	Telah terealisasi sesuai dengan keputusan rapat. It has been realized in accordance with the meeting decision.



No.	Mata Acara Rapat Meeting Agenda	Keputusan Rapat Meeting Resolutions	Realisasi Realization
3.	Mata Acara III: Pengusulan dan Penetapan Kembali Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Tahun Buku 2024 Mata Acara III: Pengusulan dan Penetapan Kembali Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Tahun Buku 2024	Keputusan Agenda III: Menyetujui Penunjukan dan penetapan kembali Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (<i>Price Waterhouse Coopers</i>) yang berubah nama menjadi KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan pada tahun 2024 dalam melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sesuai dengan hasil evaluasi dan usulan Dewan Komisaris Perseroan. Agenda III Resolutions: Approved the Appointment and re-determination of Public Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners (<i>Price Waterhouse Coopers</i>) which changed its name to KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Partners in 2024 in conducting an audit of the Company's Financial Statements for the fiscal year ending December 31, 2024, in accordance with the evaluation results and proposals of the Company's Board of Commissioners.	Telah terealisasi. Pemegang Saham telah menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan. It has been realized. Shareholders have appointed the Public Accounting Firm (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis, and Partners.
4.	Mata Acara IV: Pengusulan dan Penetapan Penghargaan atas Kinerja (Tantiem) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Tahun Buku 2023 Agenda IV: Proposing and Determining Rewards for Performance (Tantiem) to the Board of Directors and Board of Commissioners for the 2023 Financial Year	Keputusan Agenda IV: Penghargaan atas Kinerja (<i>Tantiem</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2023 akan ditentukan kemudian dan akan dilaksanakan dalam RUPS terpisah secara sirkuler. Agenda IV Resolutions: Rewards for performance (<i>tantiem</i>) to the Company's Directors and Board of Commissioners for the 2023 financial year will be determined later and determined in a separate Circular GMS.	Telah terealisasi. Penetapan tantiem Direksi dan Dewan Komisaris tertuang dalam KPSSS tanggal 22 Oktober 2024 tentang Penetapan Penghargaan Atas Kinerja Tahun Buku 2023 dan Penetapan Remunerasi Tahun 2024 Direksi dan Dewan Komisaris. The determination of the <i>tantiem</i> of the Board of Directors and the Board of Commissioners is contained in the KPSSS dated October 22, 2024, concerning the Determination of Awards for Performance in the 2023 Financial Year and Determination of Remuneration in 2024 for the Board of Directors and the Board of Commissioners.
5.	Mata Acara V: Pengusulan dan Penetapan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Tahun Buku 2024 Agenda V: Proposing and Determining the Remuneration of the Board of Directors and the Board of Commissioners for the 2024 Financial Year	Keputusan Agenda V: Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2023 akan ditentukan kemudian dan akan dilaksanakan dalam RUPS terpisah secara sirkuler. Agenda V Resolutions: The remuneration of the Company's Directors and Board of Commissioners for the 2023 financial year will be determined later and determined in a separate Circular GMS.	Telah terealisasi. Penetapan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris tertuang dalam KPSSS tanggal 22 Oktober 2024 tentang Penetapan Penghargaan Atas Kinerja Tahun Buku 2023 dan Penetapan Remunerasi Tahun 2024 Direksi dan Dewan Komisaris. It has been realized. The determination of the remuneration of the Board of Directors and the Board of Commissioners is contained in the KPSSS dated October 22, 2024, concerning the Determination of Rewards for Performance for the 2023 Financial Year and the Determination of Remuneration for 2024 for the Board of Directors and Board of Commissioners.

Mata Acara, Keputusan dan Realisasi RUPS Luar Biasa Tahun 2024: Agenda, Resolutions, and Implementation of the 2024 Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS):

Pada tahun 2024, Perusahaan telah menyelenggarakan RUPS Luar Biasa (RUPSLB) yang dilaksanakan secara fisik pada tanggal 14 Juni 2024 dengan agenda Pengusulan Perubahan Tempat Kedudukan Perseroan pada Anggaran Dasar Perseroan, sebagai berikut:

In 2024, the Company held an Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS), which was conducted physically on June 14, 2024, with the agenda of proposing an amendment to the Company's Articles of Association regarding the Company's domicile, as follows:

No.	Mata Acara Rapat Meeting Agenda	Keputusan Rapat Meeting Resolutions	Realisasi Realization
1.	Mata Acara I: Pengusulan Perubahan Tempat Kedudukan Perseroan pada Anggaran Dasar Perseroan. Agenda I: Proposal to Change the Company's Place of Residence in the Company's Articles of Association.	Keputusan Agenda I: Menyetujui Perubahan Tempat Kedudukan Perseroan yang berada di Gedung Pertamina, Jalan Kramat Raya Nomor 29, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan Kramat, Kecamatan Senen, Kota Administratif Jakarta Pusat menjadi Gedung ex-Shipping PT Pertamina (Persero) yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Nomor 32-34, Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administratif, Jakarta Utara. Agenda I Resolutions: Approved the Change of the Company's Place of Residence located at Pertamina Building, Jalan Kramat Raya Number 29, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kramat Sub-district, Senen District, Central Jakarta Administrative City to PT Pertamina (Persero) ex-Shipping Building located at Jalan Yos Sudarso Number 32-34, Kebon Bawang Sub-district, Tanjung Priok District, Administrative City, North Jakarta.	Telah terealisasi. It has been realized.

Mata Acara, Keputusan dan Realisasi RUPS Sirkuler Tahun 2024: Agenda, Resolutions, and Realization of the 2024 Circular GMS:

Pada tahun 2024, Pemegang Saham telah mengambil keputusan melalui mekanisme RUPS Sirkuler tanpa menyelenggarakan rapat secara fisik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Beberapa Keputusan sirkuler tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut:

In 2024, Shareholders made resolutions through the Circular GMS mechanism without holding a physical meeting in accordance with the provisions of the prevailing laws and regulations. Several circular resolutions include the following matters:



No.	Tanggal dan Mata Acara RUPS Sirkuler Date and Agenda of Circular GMS	Keputusan Resolutions	Realisasi Realization
1.	Keputusan Pemegang Saham secara Sirkuler (KPSSS) Tanggal 12 Januari 2024 Tentang Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Circular Shareholders' Resolution (KPSSS) dated January 12, 2024, on the Appointment of Members of the Board of Commissioners	Mengangkat Bapak Hartanto sebagai Komisaris Perseroan berlaku efektif terhitung mulai tanggal 12 Januari 2024 untuk jangka waktu 1 (satu) periode masa jabatan Appointing Mr. Hartanto as the Company's Commissioner, effective as of January 12, 2024, for a period of 1 (one) term of office.	Telah terealisasi. It has been realized.
2.	Keputusan Pemegang Saham secara Sirkuler (KPSSS) Tanggal 12 Februari 2024 Tentang Pengangkatan Anggota Komisaris Independen Circular Shareholders' Resolution (KPSSS) dated February 12, 2024, on the Appointment of Independent Commissioners	Mengangkat Bapak Agustinus Ico Tri Prasetyantoko sebagai Komisaris Independen Perseroan berlaku efektif terhitung mulai tanggal 12 Februari 2024 untuk jangka waktu 1 (satu) periode masa jabatan. Appointing Mr. Agustinus Ico Tri Prasetyantoko as the Company's Independent Commissioner, effective as of February 12, 2024, for a period of 1 (one) term of office.	Telah terealisasi. It has been realized.
3.	Keputusan Pemegang Saham secara Sirkuler (KPSSS) Tanggal 10 Juli 2024 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Komisaris Circular Shareholders' Resolution (KPSSS) dated July 10, 2024, on the Appointment and Dismissal of the Board of Commissioners	- Mengangkat Bapak Insinyur Subagjo Hari Moeljanto sebagai Komisaris Utama Perseroan berlaku efektif terhitung mulai tanggal 10 Juli 2024 untuk jangka waktu 1 (satu) periode masa jabatan. - Memberhentikan Bapak Khalid Zabidi sebagai Komisaris Perseroan - Mengangkat Kembali Bapak Insinyur Amir Hamzah sebagai Komisaris Perseroan (Periode Jabatan Kedua) berlaku efektif terhitung mulai tanggal 10 Juli 2024 untuk jangka waktu 1 (satu) periode masa jabatan - Appointing Mr. Ir. Subagjo Hari Moeljanto as the Company's President Commissioner, effective as of July 10, 2024, for a period of 1 (one) term of office. - Dismissing Mr. Khalid Zabidi as the Company's Commissioner. - Reappointing Mr. Ir. Amir Hamzah as the Company's Commissioner (Second Term of Office) effective as of July 10, 2024, for a period of 1 (one) term of office.	Telah terealisasi. It has been realized.
4.	Keputusan Pemegang Saham secara Sirkuler (KPSSS) Tanggal 30 Agustus 2024 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Persroan Tahun 2024 Circular Shareholders' Resolution (KPSSS) dated August 30, 2024, on the Company's Work Plan and Budget (RKAP) for 2024	Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Persroan Tahun 2024 dan menyetujui Key Performance Indicator (KPI) Tahun 2024 setelah ditetapkan dan ditandatangani oleh Direktur Utama PT Pertamina International Shipping sebagai Subholding Integrated Marine Logistics. Ratifying the Company's 2024 Work Plan and Budget (RKAP) and approving the 2024 Key Performance Indicator (KPI) after it is determined and signed by the President Director of PT Pertamina International Shipping as the Integrated Marine Logistics Subholding.	Telah terealisasi. It has been realized.

No.	Tanggal dan Mata Acara RUPS Sirkuler Date and Agenda of Circular GMS	Keputusan Resolutions	Realisasi Realization
5..	Keputusan Pemegang Saham secara Sirkuler (KPSSS) Tanggal 15 Oktober 2024 Tentang Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota Direksi Keputusan Pemegang Saham secara Sirkuler (KPSSS) Tanggal 15 Oktober 2024 Tentang Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota Direksi	- Mengalihkan tugas Bapak Slamet Harianto yang semula menjabat sebagai Direktur Operasi menjadi Direktur Armada Perseroan, berlaku efektif terhitung mulai tanggal 15 Oktober 2024 dengan melanjutkan masa jabatan sebelumnya. - Mengangkat Bapak Yudi Wibisono sebagai Direktur Operasi berlaku efektif terhitung mulai tanggal 15 Oktober 2024 untuk jangka waktu 1 (satu) periode masa jabatan. - Mengangkat Kembali Afan Aftory sebagai Direktur Keuangan dan SDM (Periode jabatan kedua) berlaku efektif terhitung mulai tanggal 15 Oktober 2024 untuk jangka waktu 1 (satu) periode masa jabatan. - Transferring the duties of Mr. Slamet Harianto, who originally served as Director of Operations, to become the Company's Director of Fleet, effective as of October 15, 2024, by continuing the previous term of office. - Appointing Mr. Yudi Wibisono as Director of Operations, effective as of October 15, 2024, for a period of 1 (one) term of office. - Reappointing Mr. Afan Aftory as Director of Finance and HR (Second term), effective as of October 15, 2024, for a period of 1 (one) term of office.	Telah terealisasi. It has been realized.

Informasi Hasil Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022

Informasi Hasil Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022

Pada tahun 2023, Perusahaan menyelenggarakan RUPST untuk tahun buku 2022 pada tanggal 12 Juni 2023, dengan agenda dan realisasi keputusan RUPST sebagai berikut:

In 2023, the Company held the AGMS for the 2022 financial year on June 12, 2023, with the agenda and realization of the AGMS resolutions as follows:



Mata Acara, Keputusan dan Realisasi RUPST Tahun Buku 2022:

Agenda, Resolutions, and Realization of the 2022 Fiscal Year AGMS:

Mata Acara Rapat Pertama First Meeting Agenda	Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan Perusahaan Tahun Buku 2022 disertai Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab sepenuhnya (<i>Volledig Acquit Et De Charge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Approval of the Annual Report including Ratification of the Company's Financial Report for the 2022 Fiscal Year accompanied by the Provision of Full Repayment and Release of Responsibility (<i>Volledig Acquit Et De Charge</i>) to the Directors and Board of Commissioners.
Keputusan Rapat Meeting Resolutions	Menyetujui Laporan Tahunan Perusahaan Tahun Buku 2022 serta mengesahkan Laporan Keuangan Perusahaan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 beserta penjelasannya yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) TANUDIREDA, WIBISANA, RINTIS & REKAN, sebagaimana termuat dalam Laporan Nomor: 00284/2.1025/AU.1/06/1130-5/1/III/2023 tertanggal 13 Maret 2022 dengan pendapat "Wajar Dalam Semua Hal yang Material" serta memberikan Pelunasan dan Pembebasan sepenuhnya dari Tanggung Jawab (<i>Volledig Acquit Et De Charge</i>) kepada Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang dilakukan dalam Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 sepanjang: - Tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perusahaan (termasuk Laporan Keuangan) Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2022; - Tindakan-tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan/atau perbuatan melawan hukum. Approved the Company's Annual Report for the 2022 Fiscal Year and ratified the Company's Financial Report for the Fiscal Year ending December 31, 2022, along with its explanation which has been audited by the Public Accounting Firm (KAP) TANUDIREDA, WIBISANA, RINTIS & PARTNERS, as contained in Report Number: 00284/2.1025/AU.1/06/1130-5/1/III/2023 dated March 13, 2022, with the opinion "Fair in All Material Matters" and providing full repayment and release from liability (<i>Volledig Acquit Et De Charge</i>) to the Board of Directors for management actions and to the Board of Commissioners for supervisory actions carried out in the Financial Year ending December 31, 2022, as long as: - These actions are reflected in the Company's Annual Report (including Financial Reports) for the Financial Year ending December 31, 2022; - These actions do not constitute criminal acts and/or unlawful acts.
Mata Acara Rapat Kedua Second Meeting Agenda	Pengusulan dan Penetapan Penggunaan Laba Tahun Buku 2022 Proposing and Determining the Use of Profits for the 2022 Fiscal Year
Keputusan Rapat Meeting Resolutions	1. Menyetujui tidak dilakukan pembagian dividen tahun buku 2022 2. Menetapkan penggunaan laba tahun buku 2022 sebesar Rp733.030.665.813,00 atau 100% dari laba bersih sebagai cadangan, termasuk mendukung kegiatan operasional dan pengembangan Perusahaan. 1. Approved that no dividend will be paid for the 2022 financial year. 2. Determined the use of profit for the 2022 financial year amounting to Rp733,030,665,813.00 or 100% of net profit as reserves, including supporting the Company's operational and development activities.
Mata Acara Rapat Ketiga Third Meeting Agenda	Pengusulan Penunjukan Kantor Akuntan Publik ("KAP") untuk Tahun Buku 2023 Proposed Appointment of a Public Accounting Firm ("KAP") for the 2023 Financial Year

Keputusan Rapat Meeting Resolutions	Menetapkan kembali Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan dalam melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sesuai dengan hasil evaluasi dan usulan Dewan Komisaris. Reappointed Public Accounting Firm (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis, and Partners to audit the Company's Financial Statements for the fiscal year ending December 31, 2023, in accordance with the evaluation results and proposals of the Board of Commissioners.
Mata Acara Rapat Keempat Fourth Meeting Agenda	Pengusulan dan Penetapan Penghargaan atas Kinerja (Tantiem) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Tahun Buku 2022 Proposing Performance Awards (Tantiem) to the Board of Directors and Board of Commissioners for the 2022 Financial Year
Keputusan Rapat Meeting Resolutions	Penghargaan atas kinerja (tantiem) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun buku 2022 akan ditentukan kemudian dan ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham terpisah secara Sirkuler. The performance reward (tantiem) to the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for the 2022 financial year will be determined later and stipulated in a separate Circular General Meeting of Shareholders.
Mata Acara Rapat Kelima Fifth Meeting Agenda	Pengusulan dan Penetapan Remunerasi kepada Direksi dan Dewan Komisaris Tahun Buku 2023 Proposing and Determining Remuneration to the Board of Directors and Board of Commissioners for the 2023 Financial Year
Keputusan Rapat Meeting Resolutions	Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun buku 2022 akan ditentukan kemudian dan ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham terpisah secara Sirkuler. The remuneration of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for the 2022 financial year will be determined later and stipulated in a separate Circular General Meeting of Shareholders.

Seluruh Keputusan RUPST Tahun Buku 2022 telah direalisasikan sepenuhnya oleh Perusahaan dan tidak ada keputusan yang tidak terealisasi atau tertunda realisasinya. Informasi mengenai seluruh keputusan dan realisasi RUPS yang diselenggarakan Perusahaan dapat dilihat pada Laporan Tahunan Perusahaan Tahun Buku 2023 yang telah tersedia pada situs web Perusahaan di www.pertamina-ptk.com.

All resolutions of the AGMS of the 2022 Financial Year have been fully realized by the Company, and there are no unrealized or delayed resolutions. Information regarding all decisions and realization of the GMS held by the Company can be seen in the Company's Annual Report for the 2023 Financial Year, which is available on the Company's website at www.pertamina-ptk.com.



Dewan Komisaris Board of Commissioners

Dewan Komisaris sebagai organ utama Perusahaan bertanggungjawab dalam mengawasi pengelolaan Perusahaan yang dilakukan Direksi untuk memastikan setiap kebijakan dan keputusan selaras dengan visi dan misi Perusahaan. Dalam penerapan tata kelola, Dewan Komisaris bertanggung jawab memastikan prinsip-prinsip GCG senantiasa diterapkan oleh Perusahaan secara konsisten dan berkelanjutan.

The Board of Commissioners, as the main organ of the Company, is responsible for overseeing the management of the Company by the Board of Directors to ensure that every policy and decision aligns with the Company's vision and mission. In the implementation of governance, the Board of Commissioners is responsible for ensuring that GCG principles are consistently and sustainably applied by the Company.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris Board of Commissioners Work Guidelines and Regulations

Dewan Komisaris telah dilengkapi dengan pedoman kerja (*Board Manual*) yang berisi petunjuk tata laksana kerja Komisaris sebagai acuan Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas untuk mencapai visi dan misi Perusahaan. *Board Manual* telah disahkan melalui Kesepakatan bersama Dewan Komisaris dan Direksi tanggal 25 Juni 2018. Hal-hal yang diatur dalam *Board Manual* diantaranya mencakup:

1. Tugas, wewenang, dan kewajiban Dewan Komisaris
2. Rapat Dewan Komisaris
3. Organ pendukung Dewan Komisaris
4. Struktur organisasi
5. Prinsip dasar hubungan kerja Direksi dan Dewan Komisaris
6. Tata laksana hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi yang mencakup di dalamnya komunikasi formal serta komunikasi dan pertemuan informal, dan penggunaan waktu, sarana, dan fasilitas.

The Board of Commissioners has been equipped with a Board Manual that contains instructions for the work procedures of the Commissioners as a reference for the Board of Commissioners in carrying out its duties to achieve the Company's vision and mission. The Board Manual has been ratified through a joint agreement of the Board of Commissioners and the Board of Directors dated June 25, 2018. Matters regulated in the Board Manual include:

1. Duties, authorities, and obligations of the Board of Commissioners
2. Board of Commissioners Meeting
3. Supporting organs of the Board of Commissioners
4. Organizational structure
5. Basic principles of the working relationship between the Board of Directors and the Board of Commissioners
6. Management of the working relationship between the Board of Commissioners and the Board of Directors which includes formal communication as well as informal communication and meetings, and the use of time, facilities and amenities.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners

Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris berpedoman pada Anggaran Dasar dan *Board Manual*, yaitu melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan jalannya pengurusan perusahaan oleh Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya, setiap anggota Dewan Komisaris wajib:

In carrying out its duties, the Board of Commissioners is guided by the Articles of Association and the Board Manual, which supervises the policies and management of the Company by the Board of Directors and provides advice to the Board of Directors. In carrying out their duties and responsibilities, each member of the Board of Commissioners shall:

1. Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajiban;
2. Beritikad baik, penuh kehati-hatian dan bertanggung jawab kepada Persero dalam hal ini diwakili oleh RUPS dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan;
3. Dilarang melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dan mengambil kepentingan Perusahaan selain honorarium dan fasilitas yang ditentukan oleh RUPS.

Selain tugas dan tanggung jawab di atas, Dewan Komisaris juga memiliki kewajiban antara lain:

1. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang diusulkan Direksi;
2. Mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perusahaan;
3. Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perusahaan;
4. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan;
5. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau Keputusan RUPS;
6. Mematuhi ketentuan-ketentuan lainnya yang berlaku di Induk Perusahaan dan dinyatakan berlaku bagi Perusahaan dan/atau ketentuan lain yang ditetapkan dan disetujui oleh RUPS.

1. Comply with the Articles of Association and statutory regulations as well as the principles of professionalism, efficiency, transparency, independence, accountability, responsibility, and fairness;
2. Have good faith, be careful, and be responsible to the Company, in this case represented by the GMS, in carrying out its duties of supervision and providing advice to the Board of Directors in the interests of the Company and in accordance with the aims and objectives of the Company;
3. It is prohibited to carry out transactions that have a conflict of interest and take the interests of the Company other than the honorarium and facilities determined by the GMS.

In addition to the above duties and responsibilities, the Board of Commissioners also has obligations, among others:

1. Provide opinions and suggestions to the GMS regarding the Company's Long Term Plan and the Company's Work Plan and Budget proposed by the Board of Directors;
2. Follow developments in the Company's activities, provide opinions and suggestions to the GMS regarding any issues deemed important for the management of the Company;
3. Report immediately to the GMS if there are symptoms of declining Company performance;
4. Examine and review periodic reports and annual reports prepared by the Board of Directors and sign the annual report;
5. Carry out other obligations in the context of supervisory duties and providing advice as long as they do not conflict with legislation, the Articles of Association, and/or GMS Decisions;
6. Comply with other provisions that apply in the Parent Company and are declared to apply to the Company and/or other provisions determined and approved by the GMS.

Susunan dan Komposisi Dewan Komisaris

Composition and Composition of the Board of Commissioners

Susunan dan komposisi Dewan Komisaris tahun 2024 mengalami perubahan sebagaimana ditetapkan melalui Pernyataan Keputusan Pemegang Saham secara Sirkuler. Dengan demikian susunan dan komposisi Dewan Komisaris Perusahaan hingga akhir tahun 2024 adalah sebagai berikut:

The composition of the Board of Commissioners in 2024 has changed as stipulated in the Circular Shareholders' Resolution. Thus, the composition of the Company's Board of Commissioners until the end of 2024 is as follows:



Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Periode dan Masa Jabatan Period and Term of Office
Subagjo Hari Moeljanto	Komisaris Utama President Commissioner	Keputusan Pemegang Saham secara Sirkuler (KPSSS) Tanggal 10 Juli 2024 Circular Resolution of the Shareholders dated July 10, 2024	Periode ke 1, 10 Juli 2024 s.d. 9 Juli 2027 1 st Period, July 10, 2024 up to July 9, 2027
Amir Hamzah	Komisaris Commissioner	Keputusan Pemegang Saham secara Sirkuler (KPSSS) Tanggal 10 Juli 2024 Circular Resolution of the Shareholders dated July 10, 2024	Periode ke 2, 10 Juli 2024 s.d. 9 Juli 2027 2 nd Period, July 10, 2024 up to July 9, 2027
Andi Saiful Haq	Komisaris Commissioner	Keputusan Pemegang Saham secara Sirkuler (KPSSS) Tanggal 11 Oktober 2023 Circular Resolution of the Shareholders dated October 11, 2023	Periode ke 2, 11 Oktober 2023 s.d. 10 Oktober 2026 2 nd Period, October 11, 2023 up to October 10, 2026
Hartanto	Komisaris Commissioner	Keputusan Pemegang Saham secara Sirkuler (KPSSS) Tanggal 12 Januari 2024 Circular Resolution of the Shareholders dated January 12, 2024	Periode ke 1, 12 Januari 2024 s.d. 11 Januari 2027 1 st Period, January 12, 2024 up to January 11, 2027
Agustinus I. T. Prasetyantoko	Komisaris Independen Independent Commissioner	Keputusan Pemegang Saham secara Sirkuler (KPSSS) Tanggal 12 Februari 2024 Circular Resolution of the Shareholders dated February 12, 2024	Periode ke 1, 12 Februari 2024 s.d. 11 Februari 2027 1 st Period, February 12, 2024 up to February 11, 2027

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan pada pasal 15 ayat 8, Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) tahun untuk satu periode masa jabatan terhitung sejak ditetapkan oleh RUPS dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris dilaksanakan berdasarkan hasil keputusan RUPS.

In accordance with the Company's Articles of Association in Article 15, paragraph 8, Members of the Board of Commissioners are appointed for a maximum term of office of 3 (three) years for one term of office as of the determination by the GMS and may be reappointed for 1 (one) term of office. The appointment and dismissal of the Board of Commissioners is carried out based on the results of the GMS resolution.

Komisaris Independen Independent Commissioner

Penetapan Komisaris Independen Perusahaan didasarkan pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 mengenai Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN. Penunjukan Komisaris Independen harus memenuhi kriteria tertentu, yakni tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali. Selain itu, Komisaris Independen juga tidak boleh memiliki keterkaitan yang dapat memengaruhi objektivitas dan independensinya dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap Perusahaan.

The appointment of the Company's Independent Commissioner is based on Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and Regulation of the Minister of SOEs No. PER2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of SOEs. The appointment of Independent Commissioners must meet particular criteria, namely not having financial, management, share ownership, or family relationships with other members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and/or Controlling Shareholders. In addition, Independent Commissioners must also not have relationships that could affect their objectivity and independence in carrying out their supervisory duties to the Company.

Per 31 Desember 2024, Komisaris Independen PTK berjumlah 1 (satu) orang. Komposisi ini mewakili 20% atas keseluruhan anggota Dewan Komisaris Perusahaan yang berjumlah 5 (lima) orang dan telah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.

Komisaris Independen Perusahaan saat ini dijabat oleh Sdr. Agustinus I. T. Prasetyantoko yang telah memenuhi kriteria yang harus dimiliki oleh Komisaris Independen dan menyatakan independensinya sebagai berikut:

1. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perusahaan dalam waktu enam bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perusahaan pada periode berikutnya.
2. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan.
3. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perusahaan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pemegang Saham Utama Perusahaan.
4. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan.

As of December 31, 2024, PTK's Independent Commissioner was 1 (one) person. This composition represents 20% of the total 5 (five) members of the Company's Board of Commissioners and is in accordance with the provisions of the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises.

The Company's Independent Commissioner is currently held by Mr. Agustinus I. T. Prasetyantoko, who has met the criteria that must be owned by an Independent Commissioner and declares his independence as follows:

1. Not a person who works or has the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the activities of the Company within the last six months, except for reappointment as Independent Commissioner of the Company in the following period.
2. Has no direct or indirect shares in the Company.
3. Has no affiliation with the Company, members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or Major Shareholders of the Company.
4. Has no direct or indirect business relationship related to the Company's business activities.

Pembagian Lingkup Tugas dan Tanggung Jawab Antar Dewan Komisaris

Division of Scope of Duties and Responsibilities Between the Board of Commissioners

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris telah menetapkan pembagian tugas di antara anggotanya. Pembagian ini dilakukan berdasarkan fokus bidang pengawasan masing-masing anggota, guna memastikan pengawasan berjalan lebih terarah dan optimal. Ketentuan mengenai pembagian tugas tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. Kpts-045/DEKOM.PTK/2024-S0. Selanjutnya, dilakukan penyesuaian nomenklatur organ komite yang diatur melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. Kpts-088/DEKOM.PTK/2024-S0 tentang Pembagian Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.

Berikut rincian pembagian tugas masing-masing anggota Dewan Komisaris tahun 2024:

In order to improve the effectiveness of its supervisory function, the Board of Commissioners has established a division of duties among its members. This division is based on the focus of each member's supervisory field to ensure that supervision is more focused and optimal. The provisions regarding the division of duties are contained in Board of Commissioners Decree No. Kpts-045/DEKOM.PTK/2024-S0. Furthermore, adjustments were made to the nomenclature of committee organs as regulated in Board of Commissioners Decree No. Kpts088/DEKOM.PTK/2024-S0 concerning the Division of Supervisory Duties of the Board of Commissioners.

The following are the details of the division of duties of each member of the Board of Commissioners in 2024:



Tabel Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Table of Division of Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners

Nama dan Jabatan Name and Position	Jabatan Position	Lingkup Pembagian Tugas Scope of Duties
Subagjo Hari Moeljanto	Komisaris Utama President Commissioner	Bertanggung jawab keseluruhan Bidang Pengawasan/ Korporasi Responsible for the entire Supervisory/Corporate Sector
Amir Hamzah	- Komisaris - Ketua Komite Pemantau Risiko & Investasi - Commissioner - Chairman of the Risk Monitoring & Investment Committee	Bidang pengawasan: - Pengelolaan manajemen risiko - Perencanaan dan pelaksanaan investasi Field of supervision: - Risk management - Investment planning and implementation
Andi Saiful Haq	Komisaris Commissioner	Pemberian usul/nasihat kepada Direksi Providing suggestions/advice to the Board of Directors
Hartanto	- Komisaris - Ketua Komite Nominasi & Remunerasi - Commissioner - Chairman of the Nomination & Remuneration Committee	Bidang pengawasan: - Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) - Remunerasi Field of supervision: - Human Resources (HR) Management - Remuneration
Agustinus I. T. Prasetyantoko	- Komisaris Independen - Ketua Komite Audit - Independent Commissioner - Chairman of the Audit Committee	Bidang pengawasan: - Operasional, Tata Kelola Perusahaan dan HSSE - Informasi laporan keuangan Field of supervision: - Operational, Corporate Governance, and HSSE - Information on financial statements

Independensi Dewan Komisaris

Independence of the Board of Commissioners

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris bertindak secara independen dan terbebas dari berbagai kepentingan. Oleh karena itu, PTK telah mengatur tentang independensi Dewan Komisaris melalui kewajiban untuk membuat Pernyataan Independensi dan Tidak Memiliki Benturan Kepentingan yang diperbarui setiap tahun. Pada tahun 2024, seluruh anggota Dewan Komisaris PTK telah bertindak independen dan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham. Selain itu, masing-masing anggota Dewan Komisaris juga telah menandatangani Pernyataan Independensi dan Pernyataan Tidak Memiliki Benturan Kepentingan yang dilakukan pada saat awal pengangkatan dan diperbaharui setiap awal tahun.

In carrying out its duties and responsibilities, the Board of Commissioners acts independently and free from various interests. Therefore, PTK has regulated the independence of the Board of Commissioners through the obligation to make a Statement of Independence and No Conflict of Interest, which is updated annually. In 2024, all members of the Board of Commissioners of PTK had acted independently and had no affiliation with shareholders. In addition, each member of the Board of Commissioners has also signed a Statement of Independence and Declaration of No Conflict of Interest made at the beginning of the appointment and updated at the beginning of each year.

Pengenalan Perusahaan Bagi Anggota Dewan Komisaris Baru

Company Introduction for New Board of Commissioners Members

PTK telah menetapkan kebijakan pelaksanaan orientasi bagi anggota Dewan Komisaris Perusahaan yang baru diangkat sebagaimana ditetapkan dalam *Board Manual*. Melalui program tersebut, anggota Dewan Komisaris dapat saling mengenal dan menjalin kerja sama sebagai satu tim yang solid, sekaligus efektif untuk memberikan pengenalan mengenai kondisi PTK secara umum.

Pada tahun 2024, seluruh anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat telah mengikuti program pengenalan. Program ini dilaksanakan pada tanggal 8 Maret 2024 untuk Sdr. Hartanto dan Sdr. Agustinus I.T. Prasetyantoko, serta pada tanggal 21 Agustus 2024 untuk Sdr. Subagjo Hari Moeljanto. Materi yang disampaikan dalam program tersebut mencakup pemaparan profil perusahaan, penyerahan dokumen pendukung seperti Laporan Tahunan, RKAP, RJPP, Anggaran Dasar, *Board Manual*, Pedoman GCG, Kode Etik, serta *Charter* dan program kerja Dewan Komisaris beserta komite-komite penunjangnya. Selain itu, program ini juga mencakup kunjungan langsung ke unit bisnis untuk memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai proses operasional Perusahaan.

PTK has established a policy for the implementation of orientation for newly appointed members of the Company's Board of Commissioners as stipulated in the Board Manual. Through the program, members of the Board of Commissioners can get to know each other and work together as a solid team, as well as effectively provide an introduction to the general condition of PTK.

In 2024, all newly appointed members of the Board of Commissioners participated in an induction program. This program was held on March 8, 2024, for Mr. Hartanto and Mr. Agustinus I.T. Prasetyantoko and on August 21, 2024, for Mr. Subagjo Hari Moeljanto. The material presented in the program includes the presentation of the company profile, submission of supporting documents such as the Annual Report, ABOP, RJPP, Articles of Association, Board Manual, GCG Guidelines, Code of Ethics, as well as the Charter and work program of the Board of Commissioners and its supporting committees. In addition, the program includes direct visits to business units to provide a more thorough understanding of the Company's operational processes.

Program Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris

Program Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris

PTK memfasilitasi anggota Dewan Komisaris untuk mengikuti program pengembangan kompetensi dalam bentuk pelatihan, seminar, ataupun workshop. Kebijakan pengembangan kompetensi bagi Dewan Komisaris telah diatur dalam Board Manual Perusahaan yang kemudian dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Pelatihan Dewan Komisaris.

Sepanjang tahun 2024, Dewan Komisaris telah mengikuti berbagai pelatihan antara lain sebagai berikut:

PTK memfasilitasi anggota Dewan Komisaris untuk mengikuti program pengembangan kompetensi dalam bentuk pelatihan, seminar, ataupun workshop. Kebijakan pengembangan kompetensi bagi Dewan Komisaris telah diatur dalam Board Manual Perusahaan yang kemudian dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Pelatihan Dewan Komisaris.

Sepanjang tahun 2024, Dewan Komisaris telah mengikuti berbagai pelatihan antara lain sebagai berikut:

Nama dan Jabatan Name and Position	Topik Pelatihan Training Topics	Tanggal Pelaksanaan Date of Implementation	Penyelenggara Organizer
Subagjo Hari Moeljanto (Komisaris Utama) (President Commissioner)	<i>Inhouse Training Certification in Audit Committee Practices (CACP)</i>	2 Oktober 2024 October 2, 2024	PT Pertamina Internasional Shipping
	<i>The Art of Risk Management</i>	26 November 2024 November 26, 2024	Internal Perusahaan Company Internal
Hartanto (Komisaris)	<i>Inhouse Training Certification in Audit Committee Practices (CACP)</i>	2 Oktober 2024 October 2, 2024	PT Pertamina Internasional Shipping
Amir Hamzah (Komisaris) (Commissioner)	<i>The Art of Risk Management</i>	26 November 2024 November 26, 2024	Internal Perusahaan Company Internal
Agustinus I. T. Prasetyantoko – Komisaris (Commissioner)	<i>The Art of Risk Management</i>	26 November 2024 November 26, 2024	Internal Perusahaan Company Internal
Khalid Zabidi (Komisaris) (Commissioner)	<i>Certification in Audit Committee Practices (CACP) 2024</i>	4 – 6 & 10 Juni 2024 June 4–6 & 10, 2024	Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) Indonesian Audit Committee Association (IKAI)
	<i>Environmental, Social & Governance (“ESG”)</i>	28 –29 Juni 2024 June 28–29, 2024	PT Pertamina Internasional Shipping
	<i>Elevating Internal Audit as a Value Driver</i>	10 – 11 Juli 2024 July 10–11, 2024	Yayasan Pendidikan Internal Audit Internal Audit Education Foundation

Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris

Policy and Implementation of Board of Commissioners Meetings

Penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan *Board Manual* Perusahaan. Dewan Komisaris dapat menyelenggarakan rapat internal yang merupakan rapat yang bersifat segera dan strategis, serta rapat gabungan dengan Direksi yang dilaksanakan sekali dalam satu bulan dengan agenda tetap konsultasi. Dewan Komisaris juga dapat mengadakan rapat sewaktu-waktu di luar rapat berkala untuk membahas hal-hal yang bersifat mendesak ataupun hal-hal yang perlu segera mendapatkan keputusan Dewan Komisaris.

Pada tahun 2024, Dewan Komisaris PTK telah menyelenggarakan rapat internal Dewan Komisaris sebanyak 24 kali rapat dan rapat gabungan bersama Direksi sebanyak 12 kali rapat dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota Dewan Komisaris sebagai berikut:

The holding of Board of Commissioners meetings refers to the provisions regulated in the Company's Articles of Association as well as the meeting rules as regulated in the Board Manual. The Board of Commissioners can hold internal meetings, which are immediate and strategic meetings, as well as joint meetings with the Board of Directors, which are held once a month with a fixed agenda of consultation. The Board of Commissioners can also hold meetings at any time outside of regular meetings to discuss urgent matters or matters that require an immediate decision from the Board of Commissioners.

In 2024, the Board of Commissioners of PTK held 24 internal meetings of the Board of Commissioners and 12 joint meetings with the Board of Directors, with the attendance rate of each member of the Board of Commissioners as follows:

Tabel Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Dewan Komisaris dalam Rapat:

Table of Frequency of Meetings and Attendance Rate of the Board of Commissioners in Meetings:

Nama Name	Jabatan Position	Kehadiran dalam Rapat Internal Dewan Komisaris Attendance at Internal Meetings of the Board of Commissioners			Kehadiran dalam Rapat Gabungan bersama Direksi Attendance at Joint Meetings with the Board of Directors		
		Jumlah Wajib Hadir Total Required Attendance	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Tingkat Kehadiran Attendance Rate	Jumlah Wajib Hadir Total Required Attendance	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Tingkat Kehadiran Attendance Rate
Subagjo Hari Moeljanto *	Komisaris Utama President Commissioner	15	15	100%	6	6	100%
Amir Hamzah	Komisaris Commissioner	23	24	100%	12	10	83%
Andi Saiful Haq	Komisaris Commissioner	23	13	57%	12	9	75%
Hartanto **	Komisaris Commissioner	23	17	74%	12	11	92%
Agustinus I. T. Prasetyantoko ***	Komisaris Independen Independent Commissioner	22	17	77%	11	10	91%

Keterangan: *) Baru menjabat sebagai Komisaris Utama pada 10 Juli 2024; **) Baru menjabat sebagai Komisaris pada 12 Januari 2024; ***) Baru menjabat sebagai Komisaris Independen pada 12 Februari 2024.

Remarks: *) Newly appointed as President Commissioner on July 10, 2024; **) Newly appointed as Commissioner on January 12, 2024; ***) Newly appointed as Independent Commissioner on February 12, 2024.

Selain rapat di atas, pada tahun 2024 Dewan Komisaris juga telah menghadiri penyelenggaraan RUPS Tahunan yang dilakukan pada tanggal 12 Juni 2024, sebagaimana tabel berikut:

In addition to the above meetings, in 2024 the Board of Commissioners also attended the Annual GMS held on June 14, 2024, as shown in the following table:

Kehadiran Dewan Komisaris dalam RUPS Tahunan Tahun Buku 2024

Attendance of the Board of Commissioners at the 2024 Annual GMS

Nama Name	Jabatan Position	Kehadiran Dalam RUPST Attendance at the AGMS
Subagjo Hari Moeljanto *	Komisaris Utama President Commissioner	X
Amir Hamzah **	Komisaris Commissioner	X
Andi Saiful Haq	Komisaris Commissioner	✓
Hartanto	Komisaris Commissioner	✓
Agustinus I. T. Prasetyantoko	Komisaris Independen Independent Commissioner	✓

Keterangan: (✓) Hadir; *) Sdr. Subagjo Hari Moeljanto Baru menjabat sebagai Komisaris Utama pada 10 Juli 2024.

Remarks: (✓) Present; *) Mr. Subagjo Hari Moeljanto Newly appointed as President Commissioner on July 10, 2024.

**) Sdr. Amir Hamzah baru menjabat sebagai Komisaris pada 10 Juli 2024.

**) Mr. Amir Hamzah newly appointed as Commissioner on July 10, 2024



Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris Tahun 2024

Implementation of Duties of the Board of Commissioners in 2024

Sepanjang tahun 2024, Dewan Komisaris telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dalam mengawasi jalannya Perusahaan, sesuai dengan Rencana Kerja yang telah ditetapkan. Adapun tugas-tugas yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris meliputi:

1. Penguatan dan peningkatan upaya implementasi AKHLAK dan GCG;
2. Mengawal pelaksanaan RJPP 2021 - 2026 sesuai Arahan Pemegang Saham;
3. Pemberian nasehat dalam penguatan peningkatan kualitas dan kompetensi SDM;
4. Penguatan dan perbaikan implementasi program RKAP 2024 berdasarkan situasi bisnis terkini dan kapabilitas yang ada;
5. Pemantapan dan peningkatan upaya pemasaran, baik pasar *Captive* maupun *Non Captive* ditingkat Nasional, terutama terhadap kegiatan usaha Hulu Migas;
6. Pengawasan eksekusi rencana investasi serta penyelesaian permasalahan atau hambatan yang terjadi di tahun 2024;
7. Pengawasan perkembangan pelaksanaan Digitalisasi;
8. Strategi *recovery plan* dan efisiensi biaya, dengan mencari dan menangkap peluang bisnis baru di luar program RKAP 2024;
9. Pengendalian upaya operasi bisnis yang berwawasan lingkungan, berorientasi terhadap aspek keselamatan kerja dan sekuriti serta aspek sosial (HSSE, ESG dan ICT);
10. Pelaksanaan GCG, pengembangan digitalisasi dan penyusunan beragam pedoman (STK, TKO & TKI) sebagai pendukung proses bisnis;
11. Tindak lanjut hasil-hasil temuan (*fact finding*) dan tindak lanjutnya terutama terkait dengan kinerja keuangan;
12. Penilaian terhadap upaya meminimalisasi risiko-risiko bisnis serta memanfaatkan peluang-peluang sebagai peningkatan kinerja bisnis PTK;
13. Pemberian pendapat/saran terhadap RKAP tahun 2024 dan aspirasi Pemegang Saham; serta
14. Pemberian saran Strategic Issue dan Audit Committee Concern untuk Review Annual Audit Plan Tahun 2024.

Pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Dewan Komisaris juga diwujudkan melalui kunjungan secara aktif (*Management Walk Through*) ke lokasi kerja/ terminal/ pelabuhan/kapal/shorebase/dockyard serta *stakeholder* (*end user*) terkait, guna memastikan kesesuaian tata kelola pekerjaan lapangan, masalah yang dihadapi serta perkembangan lapangan terkini.

Throughout 2024, the Board of Commissioners optimally carried out its duties and responsibilities in overseeing the running of the Company, in accordance with the established Work Plan. The tasks that have been carried out by the Board of Commissioners include:

1. Strengthening and improving AKHLAK and GCG implementation efforts;
2. Oversee the implementation of RJPP 2021 - 2026 in accordance with Shareholder Directives;
3. Providing advice on strengthening the quality and competence of human resources;
4. Strengthening and improving the implementation of the 2024 ABOP program based on the current business situation and existing capabilities;
5. Strengthening and increasing marketing efforts, both *Captive* and *Non Captive* markets at the National level, especially for Upstream Oil and Gas business activities;
6. Supervision of the execution of investment plans and resolution of problems or obstacles that occur in 2024;
7. Monitoring the progress of Digitalization implementation;
8. Recovery plan strategy and cost efficiency by seeking and capturing new business opportunities outside the 2024 RKAP program;
9. Controlling business operations efforts that are environmentally sound, oriented towards work safety and security aspects and social aspects (HSSE, ESG, and ICT);
10. GCG implementation, digitalization development, and preparation of various guidelines (STK, TKO & TKI) to support business processes;
11. Follow-up of fact-finding results and their follow-up, especially related to financial performance;
12. Assessment of efforts to minimize business risks and take advantage of opportunities to improve PTK's business performance;
13. Providing opinions/suggestions on the 2024 RKAP and Shareholders' aspirations; and
14. Provision of Strategic Issue and Audit Committee Concern advice for the Annual Audit Plan Review Year 2024.

The implementation of the duties and functions of supervision of the Board of Commissioners is also realized through active visits (*Management Walk Through*) to the work site/terminal/port/ship/shorebase/dockyard and related stakeholders (*end users*), in order to ensure the suitability of field work governance, problems faced and the latest field developments.

Jenis Keputusan yang Memerlukan Persetujuan Dewan Komisaris

Types of Decisions Requiring Board of Commissioners Approval

Sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan dan pengambilan keputusan strategis, Dewan Komisaris memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan terhadap keputusan-keputusan tertentu yang bersifat signifikan bagi Perusahaan. Sesuai dengan Pasal 6 Anggaran Dasar Perusahaan, terdapat tindakan-tindakan yang hanya dapat dilakukan oleh Direksi setelah memperoleh persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris. Tindakan-tindakan tersebut antara lain mencakup:

1. Menerima pinjaman jangka pendek dan jangka menengah, kecuali pinjaman dari pemegang saham mayoritas;
2. Memberikan pinjaman jangka pendek/menengah;
3. Mengagunkan aktiva tetap yang diperlukan dalam melaksanakan penarikan kredit jangka pendek;
4. Melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun;
5. Menghapuskan dari pembukuan terhadap piutang macet dan persediaan barang mati;
6. Mengadakan kerjasama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, kerjasama operasi dan perjanjian kerjasama lainnya yang dalam bidang usaha Perseroan yang melebihi nilai tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
7. Mengadakan kerjasama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, kerjasama operasi dan kerjasama lainnya yang tidak dalam bidang usaha Perseroan untuk jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun atau yang melebihi nilai tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris; dan
8. Menetapkan dan menyesuaikan struktur organisasi sampai dengan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi.

Sepanjang tahun 2024, Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasi atau persetujuan atas usulan korporasi Direksi antara lain terkait:

1. Pengukuran Penetapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Perusahaan tahun 2023
2. Persetujuan Penggantian Anggota Komite Audit PT Pertamina Trans Kontinental
3. Persetujuan Konsorsium Tender Towing, Tank Cleaning, dan Lay-Up FSO Arco Ardjuna
4. Persetujuan Pengisian Jabatan Chief Audit Executive Perusahaan
5. Persetujuan Laporan Manajemen 2023 Unaudited
6. Penyampaian *Annual Audit Plan* (AAP) Tahun 2024 Fungsi Internal Audit PT Pertamina Trans Kontinental

As part of its supervisory and strategic decision-making functions, the Board of Commissioners has the authority to approve certain decisions that are significant to the Company. In accordance with Article 6 of the Company's Articles of Association, some actions can only be taken by the Board of Directors after obtaining written approval from the Board of Commissioners. These actions include, among others:

1. Receiving short-term and medium-term loans, except loans from majority shareholders;
2. Providing short/medium term loans;
3. Pledging fixed assets required in executing short-term loan drawdowns;
4. Releasing and writing off movable fixed assets with an economic life commonly applicable in the industry in general up to 5 (five) years;
5. Writing off bad debts and dead inventory;
6. Entering into license cooperation, management contracts, leasing assets, operating cooperation, and other cooperation agreements in the field of the Company's business that exceed a particular value determined by the Board of Commissioners;
7. Entering into licensing cooperation, management contracts, leasing assets, operating cooperation, and other cooperation that is not in the Company's line of business for a period of no more than 1 (one) year or which exceeds a certain value determined by the Board of Commissioners; and
8. Establishing and adjusting the organizational structure up to 1 (one) level below the Board of Directors.

Throughout 2024, the Board of Commissioners has provided recommendations or approvals on the Board of Directors' corporate proposals, among others related to:

1. Measurement of Good Corporate Governance Establishment in the Company in 2023
2. Approval of Replacement of Audit Committee Members of PT Pertamina Trans Kontinental
3. Consortium Approval of Towing, Tank Cleaning, and Lay-Up Tender for FSO Arco Ardjuna
4. Approval to fill the position of Chief Audit Executive of the Company
5. Approval of the 2023 Unaudited Management Report
6. Submission of Annual Audit Plan (AAP) Year 2024 of the Internal Audit Function of PT Pertamina Trans Kontinental



7. Pelaksanaan Penandatanganan <i>Memorandum of Agreement</i> antara PT Pertamina Trans Kontinental dengan NKA Energy Ventures Sdn. Bhd sebagai Afiliasi dari PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari (ELPI) 8. Penetapan Penggunaan Laba Tahun Buku 2023 PT Pertamina Trans Kontinental 9. Penghargaan Kinerja Atas Tahun Buku 2023 10. Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris PT PTK Tahun 2024 11. Perubahan Tempat Kedudukan pada Anggaran Dasar Perseroan PT Pertamina Trans Kontinental 12. Penempatan Wakil Perseroan pada Anak Perusahaan PT Pertamina Trans Kontinental 13. Penambahan Direktorat dan Formasi Direksi pada Struktur Organisasi PT Pertamina Trans Kontinental 14. Persetujuan Tertulis Dewan Komisaris atas Rencana Penunjukan Mitra Strategis dan Pelaksanaan Kerja Sama Operasi Tahun 2024 15. Persetujuan Buku RKAP Tahun 2024 PT Pertamina Trans Kontinental 16. Penghapusan dan Pelepasan Aktiva Tetap Bergerak dan Aset milik PT Pertamina Trans Kontinental 17. Penandatanganan Dokumen Kontrak Manajemen Perusahaan Tahun 2024 yang memuat KPI Direksi secara kolegal 18. Surat Penunjukan Pelaksanaan Tugas Direktur Armada 19. <i>Strategic Issue</i> dan <i>Audit Committee Concern</i> untuk <i>Annual Audit Plan</i> Fungsi Internal Audit Perusahaan Tahun 2025.	7. The signing of the Memorandum of Agreement between PT Pertamina Trans Kontinental and NKA Energy Ventures Sdn. Bhd as an Affiliate of PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari (ELPI) 8. Determination on the use of profit of the 2023 financial year of PT Pertamina Trans Kontinental 9. Performance Reward for the 2023 Financial Year 10. Remuneration of the Board of Directors and Board of Commissioners of PT PTK in 2024 11. Change of Place of Residence in the Articles of Association of PT Pertamina Trans Kontinental 12. Placement of Company's Representative in Subsidiary of PT Pertamina Trans Kontinental 13. Addition of Directorate and Board of Directors Formation to the Organizational Structure of PT Pertamina Trans Kontinental 14. Written Approval of the Board of Commissioners on the Plan to Appoint a Strategic Partner and Implement an Operating Cooperation Year 2024 15. Approval of ABOP Book Year 2024 of PT Pertamina Trans Kontinental 16. Deletion and Disposal of Movable Fixed Assets and Assets owned by PT Pertamina Trans Kontinental 17. The signing of the 2024 Company Management Contract Document, which contains the KPIs of the Board of Directors collegially 18. Letter of Appointment of the Fleet Director 19. Strategic Issue and Audit Committee Concern for the Annual Audit Plan of the Company's Internal Audit Function in 2025.

Penilaian atas Kinerja Komite di Bawah Dewan Komisaris

Assessment of the Performance of Committees Under the Board of Commissioners

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dewan Komisaris dibantu oleh organ Komite dibawah Dewan Komisaris yang terdiri dari Komite Audit, Komite Nominasi & Remunerasi, serta Komite Pemantau Risiko & Investasi. Kinerja masing-masing komite dievaluasi berdasarkan indikator penilaian yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris, yang mencakup aspek berikut:

1. Tingkat kehadiran dalam rapat internal Komite dan rapat internal Dewan Komisaris.
2. Kontribusi tertulis yang diberikan kepada Komite.
3. Akurasi rekomendasi, baik dalam bentuk tertulis maupun lisan.
4. Peran aktif, inisiatif, dan inovasi dalam memberikan masukan strategis.

In carrying out its duties and functions, the Board of Commissioners is assisted by Committees under the Board of Commissioners consisting of the Audit Committee, Nomination & Remuneration Committee and Risk Monitoring & Investment Committee. The performance of each committee is evaluated based on the assessment indicators set by the Board of Commissioners, which include the following aspects:

1. Attendance rate at internal Committee meetings and internal Board of Commissioners meetings.
2. Written contributions provided to the Committee.
3. Accuracy of recommendations, both in written and verbal form.
4. Active role, initiative and innovation in providing strategic input.

This Committee Assessment is conducted to measure

Penilaian Komite ini dilakukan untuk mengukur efektivitas kinerja Komite, baik secara kolektif maupun secara individu bagi setiap anggota Komite. Hasil penilaian masing-masing anggota Komite telah diuraikan pada Bagian Organ Pendukung Dewan Komisaris terkait Penilaian Kinerja Komite.

the effectiveness of the Committee's performance, both collectively and individually, for each Committee member. The results of the assessment of each Committee member have been described in the Supporting Organ of the Board of Commissioners Section related to Committee Performance Assessment.

Direksi

Board of Directors

Direksi merupakan organ utama dalam struktur tata kelola yang memegang peranan sentral dalam memastikan implementasi prinsip-prinsip GCG di seluruh lini organisasi. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Direksi membangun hubungan kerja yang sinergis, komunikatif, dan konstruktif dengan Dewan Komisaris sebagai organ pengawas, guna memastikan bahwa setiap kebijakan dan keputusan strategis yang diambil selaras dengan prinsip dan praktik terbaik penerapan tata kelola. Sinergi ini menjadi fondasi utama dalam mendorong efektivitas penerapan tata kelola yang berkelanjutan dan berorientasi pada penciptaan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan.

The Board of Directors is the main organ in the governance structure that plays a central role in ensuring the implementation of GCG principles throughout the organization. In carrying out its duties and functions, the Board of Directors builds a synergistic, communicative and constructive working relationship with the Board of Commissioners as the supervisory organ to ensure that every policy and strategic decision taken is in line with the principles and best practices of governance implementation. This synergy is the main foundation in encouraging the effectiveness of sustainable governance implementation oriented towards long-term value creation for all stakeholders.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi

Guidelines and Code of Conduct for the Board of Directors

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi berpedoman pada *Board Manual* yang telah disahkan melalui Kesepakatan Bersama Direksi tanggal 25 Juni 2018. Pedoman ini menjadi panduan kerja yang mengatur tugas, wewenang, dan kewajiban Direksi; mekanisme rapat; peran organ pendukung seperti Corporate Secretary dan Internal Audit; serta struktur organisasi. *Board Manual* juga mengatur prinsip dasar hubungan kerja antara Direksi dan Dewan Komisaris, termasuk etika jabatan, penanganan benturan kepentingan, pola komunikasi formal dan informal, serta penggunaan waktu dan fasilitas. Pedoman ini mendukung penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

In carrying out its duties and responsibilities, the Board of Directors is guided by the Board Manual that has been ratified through a Joint Board of Directors Agreement dated June 25, 2018. This manual serves as a working guide that regulates the duties, authorities, and obligations of the Board of Directors, meeting mechanisms, the role of supporting organs such as Corporate Secretary and Internal Audit, and organizational structure. The Board Manual also regulates the basic principles of the working relationship between the Board of Directors and the Board of Commissioners, including ethics of office, handling conflicts of interest, formal and informal communication patterns, and the use of time and facilities. This manual supports the implementation of good corporate governance.



Tugas dan Tanggung Jawab Duties and Responsibilities

Tugas dan tanggung jawab Direksi diatur dalam Anggaran Dasar dan *Board Manual* antara lain sebagai berikut:

1. Memimpin dan mengurus Perusahaan sesuai dengan kepentingan dan tujuan Perusahaan;
2. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perusahaan;
3. Mewujudkan pelaksanaan RJPP dan RKAP, termasuk pencapaian target keuangan dan non keuangan;
4. Memenuhi ukuran kinerja yang jelas lengkap dan berimbang, baik dari aspek keuangan maupun non keuangan untuk menentukan pencapaian misi dan tujuan Perusahaan;
5. Menyelenggarakan sistem pengendalian intern yang efektif dan memberikan asersi mengenai pengendalian internal;
6. Melaksanakan manajemen risiko;
7. Membangun dan memanfaatkan teknologi informasi;
8. Menindaklanjuti temuan-temuan audit yang dilakukan oleh Fungsi Internal Audit dan Auditor Eksternal serta melaporkannya kepada Komisaris;
9. Melaporkan informasi-informasi yang relevan kepada Komisaris, antara lain mengenai suksesi/ mutasi/promosi manajer kunci (senior), program pengembangan SDM, pertanggungjawaban manajemen risiko, penanganan HSSE dan kinerja pemanfaatan teknologi informasi;
10. Menyelenggarakan RUPS dan membuat risalah RUPS;
11. Memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan sesuai dengan nilai-nilai etika dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

The duties and responsibilities of the Board of Directors are outlined in the Articles of Association and the Board Manual, including but not limited to the following:

1. Leading and managing the Company in accordance with its interests and objectives.
2. Managing, maintaining, and overseeing the Company's assets.
3. Implementing the Long-Term Corporate Plan (RJPP) and the Corporate Budget and Work Plan (RKAP), including achieving financial and non-financial targets.
4. Meeting clear, comprehensive, and balanced performance measures, both financial and non-financial, to determine the achievement of the Company's mission and objectives.
5. Establishing an effective internal control system and providing assertions regarding internal control.
6. Implementing risk management.
7. Developing and utilizing information technology.
8. Following up on findings from Internal Audit and External Auditors and reporting them to the Board of Commissioners.
9. Reporting relevant information to the Board of Commissioners, including succession/mutation/promotion of key (senior) managers, human resource development programs, risk management accountability, HSSE handling, and information technology utilization performance.
10. Organizing General Meetings of Shareholders (RUPS) and preparing minutes of RUPS.
11. Considering the interests of stakeholders in accordance with ethical values and applicable laws and regulations.

Hak, Kewajiban, dan Wewenang Direksi Rights, Obligations, and Authorities of the Board of Directors

Dalam melakukan tindakan pengurusan Perusahaan, Direksi memiliki kewenangan sebagai berikut:

1. Menetapkan kebijakan-kebijakan berkaitan dengan pengelolaan Perusahaan, termasuk kebijakan di bidang ketenagakerjaan;
2. Mengangkat dan memberhentikan pekerja berdasarkan aturan internal Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

In managing the Company, the Board of Directors has the authority to:

1. Establish policies related to the management of the Company, including labor policies.
2. Hire and terminate employees in accordance with the Company's internal regulations and applicable laws.

3. Mengatur masalah pendelegasian wewenang/pemberian kuasa Direksi untuk mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan. Menyiapkan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP);
 4. Mengidentifikasi peluang bisnis;
 5. Menyusun dan mengimplementasikan sistem akuntansi yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan;
 6. Menyelenggarakan program pengenalan bagi Direksi baru yang relevan kepada Komisaris, antara lain mengenai suksesi/mutasi/promosi manajer kunci (senior), program pengembangan SDM, pertanggungjawaban Manajemen Risiko, pelaksanaan L2K3, dan kinerja pemanfaatan teknologi informasi;
 7. Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan membuat risalah RUPS;
 8. Memperhatikan kepentingan *Stakeholders* sesuai dengan nilai-nilai etika dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 9. Menyusun dan menyelenggarakan program pembelajaran (*knowledge skill*) bagi Direksi;
 10. Memberikan pertanggungjawaban dan segala keterangan tentang keadaan dan jalannya Perusahaan;
 11. Menandatangani pernyataan tidak memiliki benturan kepentingan;
 12. Menetapkan secara jelas tugas, tanggung jawab dan wewenang Manajemen serta ukuran kinerja pada setiap tingkatan/level;
 13. Menandatangani kontrak Manajemen setiap tahun yang memuat janji atau pernyataan Direksi untuk memenuhi segala target-target yang telah ditetapkan;
 14. Menyusun dan mempublikasikan Laporan Tahunan Perusahaan;
 15. Mencantumkan kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perusahaan lain, dalam Laporan Tahunan Perusahaan.
3. Regulate the delegation of authority/issuance of powers of attorney for the Directors to represent the Company in and out of court. Prepare the Company's Long-Term Plan (RJPP) and the Company's Work Plan and Budget (RKAP).
 4. Identify business opportunities.
 5. Develop and implement an accounting system that complies with Financial Accounting Standards.
 6. Organize orientation programs for new Directors, relevant to the Board of Commissioners, including succession/mutation/promotion of key (senior) managers, human resource development programs, risk management accountability, HSSE implementation, and information technology utilization performance.
 7. Hold General Meetings of Shareholders (GMS) and prepare minutes of these meetings.
 8. Consider the interests of stakeholders in accordance with ethical values and applicable laws and regulations.
 9. Develop and implement learning programs (knowledge and skills) for the Board of Directors.
 10. Provide accountability and all information about the Company's condition and operations.
 11. Sign statements of no conflict of interest.
 12. Clearly define the duties, responsibilities, and authorities of Management as well as performance metrics at each level.
 13. Annually sign Management contracts that include the Directors' commitment to meet all established targets.
 14. Compile and publish the Company's Annual Report.
 15. Disclose their share ownership and/or that of their family in other companies in the Company's Annual Report.

Susunan dan Komposisi Composition

Susunan dan komposisi Direksi pada tahun 2024 mengalami perubahan berdasarkan Keputusan Sirkuler (RUPS Sirkuler) tanggal 15 Oktober 2024 tentang Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota Direksi yang dituangkan dalam Akta Notaris No. 38 tanggal 23 Oktober 2024. Dengan demikian susunan dan komposisi Direksi Perusahaan per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

The composition of the Board of Directors in 2024 underwent changes based on the Circular Resolution (Circular GMS) dated October 15, 2024 on the Transfer of Duties and Appointment of Members of the Board of Directors as set forth in Notarial Deed No. 38 dated October 23, 2024. Therefore, the composition of the Company's Board of Directors as of December 31, 2024, is as follows:



Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Periode dan Masa Jabatan Period and Term of Office
I Ketut Laba	Direktur Utama President Director	Keputusan Pemegang Saham secara Sirkuler (KPSSS) Tanggal 2 Juli 2023 Circular Resolution of the Shareholders dated July 2, 2023	Periode ke 1, 3 Juli 2023 s.d 2 Juli 2026 1 st Period, July 3, 2023 up to July 2, 2026
Andy Arvianto	Direktur Pemasaran Director of Marketing	Keputusan Pemegang Saham secara Sirkuler (KPSSS) Tanggal 21 Juli 2023 Circular Resolution of the Shareholders dated July 21, 2023	Periode ke 1, 21 Juli 2023 s.d 20 Juli 2026 1 st Period, July 21, 2023 up to July 20, 2026
Afan Aftory	Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia Director of Finance and Human Resource	Keputusan Pemegang Saham secara Sirkuler (KPSSS) Tanggal 15 Oktober 2024 Circular Resolution of the Shareholders dated October 15, 2024	Periode ke 2, 15 Oktober 2024 s.d 14 Oktober 2027 2 nd Period, October 15, 2024 up to October 14, 2027
Slamet Harianto*	Direktur Armada Perseroan Director of Corporate Fleet	Keputusan Pemegang Saham secara Sirkuler (KPSSS) Tanggal 15 Oktober 2024 Circular Resolution of the Shareholders dated October 15, 2024	Periode ke 1, 15 Oktober 2024 s.d 4 Agustus 2025 1 st Period, October 15, 2024 up to August 4, 2025.
Yudi Wibisono	Direktur Operasi Director of Operations	Keputusan Pemegang Saham secara Sirkuler (KPSSS) Tanggal 21 Juli 2023 Circular Resolution of the Shareholders dated July 21, 2023	Periode 1, 21 Juli 2023 s.d 20 Juli 2026 1 st Period, July 21, 2023 up to July 20, 2026

Keterangan: *) Terdapat pengalihan tugas Sdr. Slamet Harianto yang semula menjabat sebagai Direktur Operasi sejak 5 Agustus 2022 menjadi Direktur Armada Perseroan pada 15 Oktober 2024.

*Note:) Mr. Slamet Harianto was reassigned from Director of Operations (since August 5, 2022) to Director of Corporate Fleet as of October 15, 2024.

Seluruh anggota Direksi yang menjabat saat ini telah melalui serangkaian prosedur pengangkatan calon anggota Direksi Perusahaan melalui tahap evaluasi, proses penjurangan, dan proses penilaian serta telah dinyatakan lulus dalam uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*). Penetapan komposisi Direksi saat ini telah mewakili keberagaman keahlian, kompetensi, pengetahuan, dan pengalaman yang diperlukan untuk menjalankan dan mengelola Perusahaan sesuai kebutuhan dan kompleksitasnya.

All current members of the Board of Directors have gone through a series of procedures to appoint candidates for the Company's Board of Directors through the evaluation stage, screening process, and assessment process and have passed the fit and proper test. The current composition of the Board of Directors represents the diversity of expertise, competence, knowledge and experience required to run and manage the Company according to its needs and complexity.

Pembagian Lingkup Tugas dan Tanggung Jawab antar Direksi

Division of Scope of Duties and Responsibilities Between the Board of Directors

Setiap anggota Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab secara individu yang melekat pada jabatan dan fungsinya sesuai dengan bidang kerjanya masing-masing, sebagaimana tabel berikut:

Each member of the Board of Directors has individual duties and responsibilities attached to their positions and functions in accordance with their respective fields of work, as shown in the following table:

Jabatan Position	Lingkup Pembagian Tugas Scope of Duties Division
Direktur Utama President Director	Menentukan, memutuskan dan menetapkan penyusunan strategi, perencanaan serta pelaksanaan seluruh kegiatan pengoperasian kapal-kapal milik perusahaan pelayaran dan pihak-pihak pengguna jasa yang membutuhkan/ mempergunakan jasa Perusahaan, baik yang bergerak dibidang pencarian minyak lepas pantai maupun sektor lain yang bersifat khusus dalam bidang angkutan laut maupun jasa kepelabuhan, agar memperoleh profit optimal dan mengembangkan saham pemilik dengan memperhatikan etika bisnis dan berpedoman kepada garis kebijakan yang ditetapkan Dewan Komisaris Perusahaan. Determining, deciding, and establishing the strategy, planning, and execution of all operational activities of the Company's fleet and services for clients, including those in offshore oil exploration and other specialized maritime and port services sectors, to achieve optimal profits and expand owner share while adhering to business ethics and the policies set by the Company's Board of Commissioners.
Direktur Pemasaran Director of Marketing	Memutuskan, mengendalikan dan mengarahkan dalam penyusunan strategi, pengembangan usaha kegiatan perusahaan melalui pemasaran jasa sewa kapal dan jasa marine pada customer dari segmen perusahaan oil & gas dan perusahaan non oil & gas, untuk memperoleh profit optimal bagi Perusahaan, dengan memperhatikan etika bisnis dan berpedoman kepada garis kebijakan yang ditetapkan Perusahaan. Deciding, controlling and directing in the preparation of strategies, business development of company activities through marketing ship rental services and marine services to customers from the segment of oil & gas companies and non-oil & gas companies, to obtain optimal profits for the company, while adhering to business ethics and the policies set by the Company.
Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia Director of Finance and Human Resource	Memutuskan, mengendalikan dan mengarahkan atas kelancaran dalam mengelola dana Perusahaan sehingga dapat menjamin likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas dalam menetapkan kebijakan dengan manajemen akuntansi dan perbendaharaan serta penyajian laporan/data keuangan yang akurat dan tepat waktu. Deciding, controlling, and directing the smooth management of the Company's funds to ensure liquidity, solvency, and profitability, by setting policies for accounting and treasury management and preparing accurate and timely financial reports/data.
Direktur Armada Perseroan Director of Corporate Fleet	Mengelola rencana <i>asset lifecycle</i> management untuk kapal dalam kegiatan bisnis perusahaan, bertanggung jawab atas kesiapan operasional kapal milik, pengawakan, perawatan, perbaikan dan operasional seluruh kapal milik (<i>ship management</i>), anggaran dan biaya pengawakan, perawatan dan perbaikan kapal milik, aspek teknis terkait kegiatan pengembangan bisnis perusahaan, anggaran bunker kapal milik di luar <i>bundling</i> dan melakukan pengawasan pemakaian <i>bunker</i> , mengelola peremajaan kapal milik termasuk pengawasan sampai <i>delivery</i> kapal dari galangan, aset integrity di kapal milik dan digitalisasi khusus untuk kapal milik, standarisasi kapal milik (TMSA/OVMSA),kepatuhan kapal terhadap aturan nasional dan internasional serta sertifikasi kapal milik, asuransi dan klaim terkait kapal milik, dan kegiatan <i>Recognized Security Organization</i> (RSO). Managing asset lifecycle management plans for vessels in the Company business activities, responsible for the operational readiness of owned ships, manning, maintenance, repair and operation of all owned ships (<i>ship management</i>), budget and costs for manning, maintenance and repair of owned ships, technical aspects related to the Company business development activities, bunker budget for owned ships outside of bundling and supervising bunker usage, manage rejuvenation of owned ships including supervision until delivery of ships from the shipyard, asset integrity on owned ships and digitization specifically for owned ships, standardization of owned ships (TMSA/OVMSA), ship compliance with national and international regulations and certification of owned ships, insurance and claims related to owned ships, and Recognized Security Organization (RSO) activities.
Direktur Operasi Director of Operations	Memutuskan, mengendalikan dan mengarahkan dalam penyusunan strategi, pengembangan usaha kegiatan perusahaan melalui pelaksanaan operasional perusahaan sehingga dapat mendukung pelaksanaan bisnis di perusahaan agar memperoleh profit optimal dan mengembangkan saham milik (Pertamina) dengan memperhatikan etika bisnis dan berpedoman kepada garis kebijakan yang ditetapkan Dewan Komisaris Perusahaan. Deciding, controlling and directing in the preparation of strategies, business development of company activities through the implementation of company operations so that they can support the implementation of business in the company in order to obtain optimal profit and develop shares owned by (Pertamina) with due regard to business ethics and guided by the policy lines set by the Company's Board of Commissioners.



Pengenalan Perusahaan Bagi Anggota Direksi Baru

Introduction to the Company for New Board of Directors Members

Pada tahun 2024, Perusahaan telah melaksanakan program pengenalan bagi anggota Direksi yang baru diangkat, yaitu Sdr. Yudi Wibisono, yang diselenggarakan pada tanggal 23 Oktober 2024. Program ini merupakan bagian dari komitmen Perusahaan dalam memastikan kesiapan dan pemahaman yang memadai bagi setiap anggota Direksi baru, sebagaimana diatur dalam *Board Manual*. Program pengenalan ini dilakukan melalui presentasi, pertemuan, kunjungan ke Perusahaan/Anak Perusahaan, pengkajian dokumen, serta kegiatan lain yang dianggap sesuai. Adapun materi yang disampaikan dalam program ini mencakup pemahaman menyeluruh mengenai profil dan kegiatan operasional Perusahaan, tugas dan tanggung jawab Direksi, pemetaan pemangku kepentingan (*stakeholders*), serta aspek-aspek penting dalam tata kelola perusahaan (*corporate governance*).

In 2024, the Company conducted an induction program for the newly appointed member of the Board of Directors, Mr. Yudi Wibisono, which was held on October 23, 2024. This program is part of the Company's commitment in ensuring adequate readiness and understanding for each new member of the Board of Directors, as stipulated in the Board Manual. This introduction program is conducted through presentations, meetings, visits to the Company/Subsidiaries, document review, and other activities deemed appropriate. The material presented in this program includes a thorough understanding of the Company's profile and operations, duties and responsibilities of the Board of Directors, stakeholder mapping, and important aspects of corporate governance.

Program Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris

Competency Development Program of the Board of Directors

Perseroan berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas kepemimpinan dan kompetensi profesional Direksi melalui penyelenggaraan program pelatihan dan pengembangan berkelanjutan. Setiap anggota Direksi difasilitasi untuk mengikuti pelatihan sesuai dengan kebijakan yang tercantum dalam *Board Manual*, guna memastikan bahwa wawasan, keterampilan, serta kapabilitas mereka selalu selaras dengan perkembangan industri, teknologi, dan praktik tata kelola perusahaan terkini.

The Company is committed to continuously improving the leadership quality and professional competence of the Board of Directors through the implementation of continuous training and development programs. Each member of the Board of Directors is facilitated to attend training in accordance with the policies stated in the Board Manual to ensure that their insights, skills and capabilities are always aligned with the latest industry developments, technology and corporate governance practices.

Sepanjang tahun 2024, Direksi telah mengikuti berbagai pelatihan antara lain sebagai berikut:

Throughout 2024, the Board of Directors participated in various trainings as follows:

Nama dan Jabatan Name and Position	Topik Pelatihan Training Topics	Tanggal Pelaksanaan Date of Implementation	Penyelenggara Organizer
I Ketut Laba Direktur Utama President Director	<i>Advance Maritime English</i>	23 Juli 2024 July 23, 2024	Internal Perusahaan Internal Corporate
	<i>Fraud Awareness</i>	31 Agustus 2024 August 31, 2024	Pertamina Corporate University
	Executive Leader Competencies	8-11 Juli 2024 July 8-11, 2024	Internal Perusahaan Internal Corporate
	Basic HSSE Mandatory Training	31 Oktober 2024 October 31, 2024	Pertamina Corporate University
	Mini Magister Hukum Pertamina Pertamina Mini Master of Law Program	14 Oktober 2024 October 14, 2024	Pertamina Corporate University

Nama dan Jabatan Name and Position	Topik Pelatihan Training Topics	Tanggal Pelaksanaan Date of Implementation	Penyelenggara Organizer
	Fundamental Behaviour Based Safety (BBS)	1 November 2024 November 1, 2024	Pertamina Corporate University
	Perilaku Hidup Sehat Healthy Lifestyle Behavior	12 November 2024 November 12, 2024	Pertamina Corporate University
	Respectful Workplace	30 November 2024 November 30, 2024	Pertamina Corporate University
Andy Arvianto Direktur Pemasaran Director of Marketing	Basic HSSE Mandatory Training	31 Oktober 2024 October 31, 2024	Pertamina Corporate University
	Perilaku Hidup Sehat Healthy Lifestyle Behavior	31 Desember 2024 December 31, 2024	Pertamina Corporate University
	Fundamental Behaviour Based Safety (BBS)	31 Desember 2024 December 31, 2024	Pertamina Corporate University
Slamet Harianto Direktur Operasi Director of Operations	GRC (Governance Risk Compliance) Master	19 Januari 2024 January 19, 2024	GRC
	Advance Maritime English	23 Juli 2024 July 23, 2024	Internal Perusahaan Internal Corporate
Afan Aftory Direktur Keuangan & SDM Director of Finance & HR	ASEAN Chartered Professional Accountant	30 Januari 2024 January 30, 2024	Ikatan Akuntan Indonesia Indonesian Institute of Accountants
	Chartered Accountant (CA)	31 Januari 2024 January 31, 2024	Ikatan Akuntan Indonesia Indonesian Institute of Accountants
	Fraud Awareness	31 Juli 2024 July 31, 2024	Pertamina Corporate University
	Sustainability Reporting Standards & Implementasinya Sustainability Reporting Standards & Implementation Training	8 Agustus 2024 August 8, 2024	PT Pertamina Internasional Shipping
	Respectful Workplace	30 November 2024 November 30, 2024	Pertamina Corporate University



Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat Direksi

Policies and Implementation of Board of Directors Meetings

Rapat Direksi dilaksanakan untuk membahas permasalahan operasional atau untuk mengambil keputusan atas kebijakan-kebijakan Perusahaan. Berdasarkan *Board Manual* Perusahaan, Rapat Direksi wajib diselenggarakan secara berkala dan wajib dihadiri seluruh anggota Direksi secara fisik. Rapat Direksi diselenggarakan secara berkala minimum 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan dapat setiap waktu apabila dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi, atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau Pemegang saham yang memiliki jumlah saham terbesar dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.

Sepanjang tahun 2024, Direksi telah menyelenggarakan rapat internal sebanyak 41 kali rapat dan rapat gabungan bersama Dewan Komisaris sebanyak 19 kali rapat dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota Direksi sebagaimana tabel berikut:

Board of Directors meetings are held to discuss operational issues or to make decisions regarding Company policies. According to the Company's Board Manual, Board of Directors meetings must be held regularly and attended physically by all members. These meetings are conducted at least once a month and can be convened at any time if deemed necessary by one or more Directors, upon the written request of one or more members of the Board of Commissioners, or by the largest shareholder, specifying the matters to be discussed.

Throughout 2024, the Board of Directors held 41 internal meetings and 19 joint meetings with the Board of Commissioners, with the attendance rate of each member of the Board of Directors as shown in the following table:

Tabel Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Direksi dalam Rapat:

Table of Frequency of Meetings and Attendance Rate of the Board of Directors:

Nama Name	Kehadiran dalam Rapat Internal Direksi Attendance at Board of Directors Internal Meetings			Kehadiran dalam Rapat Gabungan bersama Dewan Komisaris Attendance at Joint Meetings with the Board of Commissioners		
	Jumlah Wajib Hadir Total Mandatory Attendance	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Tingkat Kehadiran Attendance Rate	Jumlah Wajib Hadir Total Mandatory Attendance	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Tingkat Kehadiran Attendance Rate
I Ketut Laba	41	41	100%	19	19	100%
Andy Arvianto	41	41	100%	19	19	100%
Afan Aftory	41	41	100%	19	19	100%
Slamet Harianto	41	41	100%	19	19	100%
Yudi Wibisono*	7	7	100%	2	2	100%
Rata-rata kehadiran Average attendance			100%			100%

Keterangan: *)Baru menjabat sebagai Direktur Operasi pada 15 Oktober 2024.

Remarks: *)Newly appointed as Director of Operations on October 15, 2024.

Selain rapat di atas, seluruh anggota Direksi juga telah menghadiri penyelenggaraan RUPS Tahunan yang dilakukan pada tanggal 14 Juni 2024.

Besides the above meetings, all members of the Board of Directors also attended the Annual General Meeting of Shareholders held on June 14, 2024.

Pelaksanaan Tugas Direksi Tahun 2024

Implementation of Duties by the Board of Directors in 2024

Selama tahun 2024, Direksi telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di bidang operasional, keuangan, dan penunjang usaha lainnya dengan optimal. Setiap kebijakan dan keputusan yang dikeluarkan Direksi pada tahun 2024 tertuang dalam Keputusan Direksi, Surat Edaran, dan Instruksi Direksi.

Throughout 2024, the Board of Directors performed their duties and responsibilities in operational, financial, and other business support areas effectively. All policies and decisions made by the Board in 2024 are documented in Board of Directors Decisions, Circular Letters, and Instructions.

Pada tahun 2024, beberapa kebijakan strategis yang telah dilakukan Direksi meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2024;
2. Menyelenggarakan RUPS Tahunan Tahun Buku 2024;
3. Penyesuaian Struktur Organisasi Perusahaan;
4. Pengembangan rencana strategis Perusahaan maupun Anak Perusahaan;
5. Penyusunan Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Tahun Buku 2024;
6. Optimalisasi kinerja HSSE Perusahaan;
7. Melakukan pengawasan atas kinerja Anak Perusahaan;
8. Melakukan evaluasi atas penerapan GCG di Perusahaan dan mengimplementasikan peningkatan kualitas atas penerapan GCG.

The strategic policies implemented by the Board in 2024 include:

1. Preparation of the 2024 Work Budget and Operational Plan (ABOP);
2. Conducting the Annual GMS for the 2024 Fiscal Year;
3. Adjustment of the Company's Organizational Structure;
4. Development of strategic plans for the Company and its Subsidiaries;
5. Compilation of the Annual Report and Sustainability Report for Fiscal Year 2024;
6. Optimization of the Company's HSSE performance;
7. Oversight of Subsidiary performance;
8. Evaluation and improvement of GCG implementation in the Company.

Penilaian atas Kinerja Komite di Bawah Direksi

Assessment of the Performance of Committees Under the Board of Directors

Hingga akhir tahun 2024, Direksi belum membentuk organ komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi. Adapun pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dalam struktur Tata Kelola Perusahaan didukung oleh organ pendukung yakni Sekretaris Perusahaan dan Internal Audit. Kinerja masing-masing organ pendukung dievaluasi secara berkala oleh Direksi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Penilaian tersebut dilakukan dengan berlandaskan pada pencapaian target yang tercantum dalam *Key Performance Indicator* (KPI).

Until the end of 2024, the Board of Directors not established a committee organ supporting the implementation of the duties of the Board of Directors. The implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors in the Corporate Governance structure is supported by supporting organs, namely the Corporate Secretary and Internal Audit. The performance of each supporting organ is periodically evaluated by the Board of Directors in accordance with its duties and responsibilities. The assessment is carried out based on the achievement of targets listed in the *Key Performance Indicator* (KPI).



Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi

Performance Assessment of the Board of Commissioners and Board of Directors

Penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris dan Direksi dilaksanakan secara berkala setiap tahun sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab mereka. Proses evaluasi ini mengacu pada ketentuan yang tertuang dalam *Board Manual* serta Anggaran Dasar Perusahaan.

The performance of the Board of Commissioners and Board of Directors is assessed periodically each year as a form of accountability and transparency in the performance of their duties and responsibilities. This evaluation process refers to the provisions outlined in the Board Manual and the Company's Articles of Association.

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Performance Assessment of the Board of Commissioners

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan oleh Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan. Evaluasi ini dilakukan seiring dengan penyampaian Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris atas kinerja selama tahun 2024. Penilaian dilakukan secara menyeluruh, baik secara kolegal maupun individual, guna menilai efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan. Hasil dari evaluasi ini digunakan sebagai dasar untuk memberikan arahan perbaikan serta penguatan peran Dewan Komisaris dalam mendukung tata kelola perusahaan yang baik.

The performance of the Board of Commissioners is assessed by the Shareholders at the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS). This evaluation is conducted in conjunction with the submission of the Board of Commissioners' Supervisory Report on its performance during 2024. It is evaluated comprehensively, both collectively and individually, to assess the effectiveness of the supervisory function. The results of this evaluation become a basis for providing guidance on improvements and strengthening the role of the Board of Commissioners in supporting good corporate governance.

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan dengan mengacu pada ketentuan dalam *Board Manual*, yang mencakup aspek kuantitatif dan kualitatif. Penilaian tersebut bertujuan untuk menilai efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan serta kontribusi masing-masing anggota Dewan Komisaris secara individual maupun kolegal. Secara umum, kinerja Dewan Komisaris dinilai berdasarkan kehadiran dalam berbagai forum penting, antara lain:

The performance evaluation of the Board of Commissioners is conducted in accordance with the provisions in the Board Manual, which covers both quantitative and qualitative aspects. The evaluation aims to assess the effectiveness of the oversight function and the contributions of each member of the Board of Commissioners, both individually and collectively. In general, the performance of the Board of Commissioners is evaluated based on their attendance at various essential forums, including:

1. Kehadiran dalam rapat internal Dewan Komisaris;
2. Kehadiran dalam rapat bersama Direksi;
3. Kehadiran dalam rapat dengan Pemegang Saham;
4. Kehadiran dalam rapat Dewan Komisaris atau Komite dengan unit kerja lainnya.

1. Attendance at internal meetings of the Board of Commissioners;
2. Attendance at meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors;
3. Attendance at meetings of the Board of Commissioners with shareholders;
4. Attendance at meetings of the Board of Commissioners or Committees with other work units.

Selain aspek kehadiran, penilaian juga dilakukan berdasarkan kriteria lainnya yang lebih kualitatif, meliputi:

In addition to attendance, assessments are also based on other, more qualitative criteria, including:

1. Integritas, termasuk penanganan potensi benturan kepentingan yang muncul selama menjalankan tugas;
2. Pengetahuan dan pemahaman Dewan Komisaris atas nilai-nilai misi, rencana jangka panjang Perusahaan, dan merefleksikan pemahaman ini kepada isu-isu penting sepanjang tahun;

1. Integrity, including handling potential conflicts of interest that arise during the course of duties;
2. The BOC's knowledge and understanding of the Company's mission values, long-term plans, and reflecting this understanding on key issues throughout the year;

3. Partisipasi Dewan Komisaris dalam rapat-rapat, termasuk kemampuan mereka untuk menyampaikan, memberikan argumentasi dan memberikan solusi mengenai isu-isu strategis Perusahaan;
 4. Kemampuan Dewan Komisaris dalam mengikuti isu-isu dan tren yang berpengaruh terhadap Perusahaan dan menggunakan informasi tersebut untuk menilai dan mengarahkan kinerja Perusahaan, bukan hanya dari tahun ke tahun, akan tetapi juga dalam jangka panjang;
 5. Hubungan anggota Dewan Komisaris dengan sesama anggota Komisaris, dengan Direksi, dan pihak-pihak lain yang diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.
3. The participation of the BOC in meetings, including their ability to present, argue, and provide solutions to the Company's strategic issues;
 4. The ability of the BOC to keep abreast of issues and trends affecting the Company and to use this information to assess and guide the Company's performance, not only from year to year, but also over the long term;
 5. The relationship of members of the Board of Commissioners with fellow members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, and other parties as stipulated in the Articles of Association and laws and regulations.

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris Berdasarkan Key Performance Indicator (KPI)

Performance Assessment of the Board of Commissioners by Key Performance Indicator (KPI)

Penilaian kinerja Dewan Komisaris oleh Pemegang Saham salah satunya dilihat berdasarkan pada pencapaian target-target dalam KPI Dewan Komisaris. Hasil penilaian kinerja Dewan Komisaris berdasarkan KPI Dewan Komisaris pada tahun 2024 tercapai sebesar 100%. Selain secara kolegal, evaluasi kinerja Dewan Komisaris juga dilakukan secara individu terhadap masing-masing anggota Komisaris berdasarkan beberapa aspek sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Pada tahun 2024, penilaian kinerja masing-masing anggota Dewan Komisaris mencapai skor 97,7 berada pada kategori High.

The performance assessment of the Board of Commissioners by the Shareholders is based on the achievement of targets in the KPIs of the Board of Commissioners. The results of the performance assessment of the Board of Commissioners based on the KPI of the Board of Commissioners in 2024 were achieved by 100%. In addition to collegially, the performance evaluation of the Board of Commissioners is carried out individually against each member of the Board of Commissioners based on several aspects in accordance with their respective duties and responsibilities. In 2024, the performance assessment of each member of the Board of Commissioners reached a score of 97.7 in the High category.

Penilaian Kinerja Direksi

Performance Assessment of the Board of Directors

Penilaian kinerja Direksi juga dilakukan secara tahunan oleh Pemegang Saham dalam forum RUPS sebagai bagian dari evaluasi dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas Direksi. Selain itu, Dewan Komisaris turut melakukan penilaian atas kinerja Direksi dalam menjalankan fungsi pengelolaan perusahaan. Penilaian ini mengacu pada *Key Performance Indicators* (KPI) yang meliputi KPI kolegal Direksi yang telah disetujui oleh Pemegang Saham, serta KPI individu yang ditetapkan bagi masing-masing anggota Direksi. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anggota Direksi berkontribusi secara optimal terhadap pencapaian sasaran strategis Perusahaan.

The performance assessment of the Board of Directors is also conducted annually by the Shareholders in the GMS forum as part of the evaluation and accountability for the implementation of the duties of the Board of Directors. In addition, the Board of Commissioners also assesses the performance of the Board of Directors in carrying out the function of managing the Company. This assessment refers to Key Performance Indicators (KPIs), which include the collegial KPIs of the Board of Directors that have been approved by the Shareholders, as well as individual KPIs set for each member of the Board of Directors. This process aims to ensure that each member of the BOD contributes optimally to the achievement of the Company's strategic goals.



Adapun kriteria penilaian kinerja Direksi mencakup hal-hal berikut:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan.
2. Pelaksanaan hasil keputusan RUPS.
3. Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan yang mencakup 3 (tiga) aspek utama yaitu:
 - a. Aspek Keuangan
 - b. Aspek Operasional
 - c. Aspek Administrasi
4. Indikator Kinerja Pendukung Lainnya.

The Board of Directors performance assessment criteria include the following matters:

1. Implementation of duties and responsibilities of each member of the Board of Directors in accordance with the Company's Articles of Association.
2. Implementation of the resolutions of the GMS.
3. Assessment of the Soundness of the Company which includes 3 (three) main aspects, namely:
 - a. Financial aspect
 - b. Operational Aspect
 - c. Administrative Aspect
4. Other Supporting Performance Indicators.

Penilaian Kinerja Direksi Berdasarkan *Key Performance Indicator* (KPI)

Board of Directors's Performance Assessment Based on Key Performance Indicators (KPI)

Setiap tahun, penilaian kinerja Direksi dilakukan berdasarkan pada pencapaian target-target yang tertuang dalam KPI Direksi, baik secara kolegal maupun individu. Penilaian terhadap kinerja Direksi berdasarkan KPI dilaksanakan oleh pemegang saham Perseroan dengan mempertimbangkan capaian KPI yang disampaikan oleh Direksi untuk kemudian ditetapkan di dalam RUPS.

Hasil penilaian kinerja Direksi berdasarkan KPI Direksi secara kolegal di tahun 2024 mencapai skor sebesar 108,25%. Rincian capaian KPI Direksi secara kolegal dapat dilihat pada Bab Analisis Pembahasan Manajemen bagian KPI Perusahaan.

Annually, the performance assessment of the Board of Directors is conducted based on the achievement of targets set out in the KPIs of the Board of Directors, both collegially and individually. The assessment of the Board of Directors' performance based on KPIs is carried out by the Company's shareholders by considering the KPI achievements submitted by the Board of Directors to be determined in the GMS.

The results of the performance assessment of the Board of Directors based on the KPIs of the Board of Directors collegially in 2024 showed a score of 108.25%. Details of the KPI achievements of the Board of Directors on a collegial basis can be seen in the Management Discussion and Analysis Chapter of the Company's KPI section.

Penilaian Kinerja Masing-masing Direksi Berdasarkan KPI Individual

Performance Assessment of Each Board of Directors Based on Individual KPI

Selain secara kolegal, evaluasi kinerja Direksi juga dilakukan secara individu terhadap masing-masing anggota Direksi berdasarkan beberapa aspek sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing Direksi. Berikut realisasi KPI masing-masing anggota Direksi tahun 2024:

Besides collegially, the performance evaluation of the Board of Directors is also conducted individually for each member of the Board of Directors based on several aspects in accordance with the duties and responsibilities of each member of the Board of Directors. The following is the realization of KPI for each member of the Board of Directors in 2024:

Direktorat Directorate	Realisasi KPI KPI realization
Direktur Utama President Director	108.25
Direktur Pemasaran Director of Marketing	109.41
Direktur Operasi Director of Operations	110.4
Direktur Armada Director of Fleet	106.95
Direktur Keuangan dan SDM Director of Finance and HR	110.53

Penilaian Kinerja oleh Dewan Komisaris

Performance Assessment by the Board of Commissioners

Dewan Komisaris menilai Direksi telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan sangat baik selama tahun 2024. Hal ini terefleksi antara lain dari hasil penilaian kinerja Direksi yang secara keseluruhan telah menunjukkan upaya positif didalam mengejar target RKAP tahun buku 2024, baik dengan cara memperkuat implementasi program RKAP 2024 maupun *strategy recovery plan* dan efisiensi biaya.

The Board of Commissioners considers that the Board of Directors has carried out its duties and responsibilities excellently during 2024. It is reflected, among others, in the results of the Board of Directors' performance assessment, which overall has shown positive efforts in pursuing the 2024 ABOP target, both by strengthening the implementation of the 2024 ABOP program as well as the strategy recovery plan and cost efficiency.

Kebijakan Nominasi dan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Nomination and Remuneration Policy for the Board of Commissioners and the Board of Directors

Kebijakan Nominasi Dewan Komisaris dan Direksi

Nomination Policy of the Board of Commissioners and Board of Directors

Kebijakan nominasi dan suksesi kepemimpinan di lingkungan PTK disusun dengan mengacu pada kebijakan induk yang ditetapkan oleh PT Pertamina International Shipping selaku pemegang saham pengendali. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan keberlanjutan kepemimpinan yang profesional dan berintegritas, serta selaras dengan arah strategis perusahaan. Proses suksesi kepemimpinan dapat berasal dari internal PTK maupun eksternal, mencakup sumber daya dari PT Pertamina International Shipping, PT Pertamina (Persero), serta anak perusahaan Pertamina lainnya.

The nomination and leadership succession policy within PTK is prepared with reference to the master policy set by PT Pertamina International Shipping as the controlling shareholder. This policy aims to ensure the continuity of professional leadership with integrity, and in line with the Company's strategic direction. The leadership succession process can be internal to PTK or external, including resources from PT Pertamina International Shipping, PT Pertamina (Persero), and other Pertamina subsidiaries.



Penetapan nominasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi sepenuhnya berada dalam kewenangan pemegang saham, yakni PT Pertamina International Shipping dan PT Pertamina Pedeve Indonesia. Pemegang saham memiliki peran strategis dalam memilih dan menetapkan individu yang dinilai mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dalam mendukung pencapaian tujuan Perusahaan.

The determination of nominations for members of the Board of Commissioners and Board of Directors is fully within the authority of the shareholders, namely PT Pertamina International Shipping and PT Pertamina Pedeve Indonesia. Shareholders have a strategic role in selecting and determining individuals who are considered capable of carrying out their duties and responsibilities optimally in supporting the achievement of the Company's goals.

Prosedur Nominasi Dewan Komisaris

Nomination Procedure of the Board of Commissioners

RUPS memiliki kewenangan dalam pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris telah mempertimbangkan aspek integritas serta kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan bisnis Perusahaan. Calon anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan formal dan persyaratan materiil untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris PTK, sebagai berikut:

1. Memiliki integritas, dedikasi dan iktikad baik serta rasa tanggung jawab;
2. Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perusahaan;
3. Memiliki waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
4. Memiliki kemampuan melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah, menyebabkan suatu perusahaan pailit atau pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam kurun waktu lima tahun sebelum pengangkatannya;
5. Memiliki hubungan yang luas dan bermanfaat bagi Perusahaan;
6. Tidak mewakili kepentingan partai politik tertentu.

Sedangkan dalam proses pemberhentian, anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh RUPS. Hal tersebut terjadi jika terbukti bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar atau terdapat indikasi memberikan kerugian bagi Perusahaan atau melalaikan kewajibannya. RUPS juga memiliki wewenang untuk pemberhentian anggota Dewan Komisaris yang terbukti melanggar.

The GMS has the authority to appoint and dismiss members of the Board of Commissioners. The appointment and dismissal of members of the Board of Commissioners have taken into account aspects of integrity and competence in accordance with the Company's business needs. Prospective members of the Board of Commissioners must fulfill the formal and material requirements to be appointed as a member of the Board of Commissioners of PTK, as follows:

1. Have integrity, dedication, and good faith, as well as a sense of responsibility;
2. Having adequate knowledge of the Company's business sector;
3. Have sufficient time to perform their duties;
4. Can carry out legal actions and has never been declared bankrupt or been a member of the Board of Directors or Commissioners who have been found guilty of causing a company to go bankrupt or has been convicted of a crime that is detrimental to state finances within five years before his appointment;
5. Having extensive and beneficial relationships for the Company;
6. Does not represent the interests of certain political parties.

Meanwhile, in the dismissal process, members of the Board of Commissioners may be temporarily dismissed by the GMS. This happens if it is proven to have acted contrary to the Articles of Association or there are indications of causing losses to the Company or neglecting its obligations. The GMS also has the authority to dismiss members of the Board of Commissioners who are proven to have violated it.

Prosedur Nominasi dan Sukseksi Direksi

Nomination and Succession Procedures of the Board of Directors

Sebagaimana Dewan Komisaris, Anggota Direksi juga diangkat dan diberhentikan atas persetujuan RUPS dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perusahaan dan ketentuan yang berlaku. Calon Direksi Perusahaan harus melalui beberapa tahapan seleksi sebelum diusulkan oleh Pemegang Saham yang berwenang, sebagaimana berikut.

Similarly to the Board of Commissioners, Members of the Board of Directors are also appointed and dismissed upon the approval of the GMS with due observance of the Company's Articles of Association and applicable provisions. Candidates for the Company's Board of Directors must go through several stages of selection before being proposed by the authorized Shareholders, as follows.

Tahap pertama adalah pengajuan usulan calon Direksi Anak Perusahaan oleh Direksi PT Pertamina International Shipping selaku Pemegang Saham dengan meminta persetujuan tertulis dari Direksi PT Pertamina International Shipping dan disetujui oleh RUPS PT Pertamina International Shipping sebelum ditetapkan dalam RUPS Anak Perusahaan.

The first stage is the submission of proposals for candidates for the Directors of the Subsidiary by the Directors of PT Pertamina International Shipping as Shareholders by requesting written approval from the Directors of PT Pertamina International Shipping and approved by the GMS of PT Pertamina International Shipping before being determined in the GMS of the Subsidiary.

Prosedur pengangkatan calon anggota Direksi Perusahaan melalui tahap evaluasi, proses penjangkaran, proses penilaian melalui uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) serta dan ketentuan-ketentuan perihal formulasi penilaian, dengan tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/ atau pedoman yang berlaku di PT Pertamina International Shipping.

The procedure for appointing candidates for members of the Company's Board of Directors goes through the evaluation stage, the selection process, the assessment process through the fit and proper test, and the provisions regarding the formulation of the assessment while still referring to the applicable laws and regulations and/or guidelines that apply at PT Pertamina International Shipping.

Sebelum meminta Persetujuan RUPS, Direksi PT Pertamina International Shipping akan meminta persetujuan dan pendapat Direksi PT Pertamina International Shipping terkait rekomendasi calon Direksi Anak Perusahaan.

Before requesting the approval of the GMS, the Directors of PT Pertamina International Shipping will seek the approval and opinion of the Directors of PT Pertamina International Shipping regarding the recommendations for candidates for the Directors of a Subsidiary.



Dalam mekanisme suksesi Direksi, PTK mengadakan pelatihan, baik internal maupun eksternal serta pengembangan kompetensi khususnya kompetensi *leadership* dan kompetensi pejabat perusahaan yang memenuhi persyaratan untuk dipromosikan. Hal tersebut guna mempersiapkan bakal calon anggota Direksi yang selanjutnya akan diajukan kepada pemegang saham dalam RUPS serta mengikuti *fit and proper test*.

Penunjukan anggota Direksi Perusahaan harus memenuhi kriteria antara lain: tidak pernah dinyatakan pailit atau bersalah yang menyebabkan suatu Perusahaan dinyatakan pailit; tidak pernah melakukan tindakan tercela, tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan, tidak memiliki jabatan rangkap sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada perusahaan sejenis, dan atau lembaga lain; dan tidak memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau Pemegang Saham Perusahaan.

Anggota Direksi PTK wajib memenuhi seluruh persyaratan kemampuan dan kepatutan, yang telah diatur dalam Anggaran Dasar, *Board Manual* dan CoCG Perusahaan, yaitu:

1. Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur dan perilaku yang baik serta dedikasi tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perusahaan;
2. Mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit serta tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perusahaan dinyatakan pailit;
3. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam waktu lima tahun sebelum pengangkatannya;
4. Tidak diperkenankan memiliki hubungan keluarga antara Anggota Direksi dan antara Anggota Direksi dengan Anggota Dewan Komisaris;
5. Tidak mewakili kepentingan partai politik tertentu.

Sementara itu, RUPS juga memiliki kewenangan dalam pemberhentian Direksi yang disesuaikan dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan. Pemberhentian tersebut dapat disebabkan antara lain:

1. Masa jabatannya berakhir;
2. Mengundurkan diri;
3. Kehilangan kewarganegaraan Indonesia;
4. Meninggal dunia;
5. Diberhentikan berdasarkan Keputusan RUPS.

In the Board of Directors succession mechanism, PTK conducts internal and external training and competency development, especially leadership competencies and competencies of company officials who meet the requirements for promotion. This is to prepare prospective members of the Board of Directors, which will then be submitted to shareholders at the GMS, and to take a fit and proper test.

Appointment of members of the Company's Board of Directors must meet the following criteria, including never having been declared bankrupt or guilty of causing a company to be declared bankrupt; has never committed a disgraceful act, has never been punished for committing a crime; does not have a dual position as Commissioner, Director or Executive Officer in a similar company, and or other institution; and has no financial and family relationships with members of the Board of Commissioners, other members of the Board of Directors and/or the Company's Shareholders.

PTK Board of Directors members must fulfill all fit and proper requirements, which have been regulated in the Company's Articles of Association, Board Manual, and CoCG, namely:

1. Have expertise, integrity, leadership, experience, honesty, good behavior, and high dedication to advancing and developing the Company;
2. Able to carry out legal actions and have never been declared bankrupt and have never been a member of the Board of Directors or Commissioner who was found guilty of causing a company to be declared bankrupt;
3. Has never been punished for committing a crime that is detrimental to state finances within five years before his appointment;
4. Not allowed to have family relationships between members of the Board of Directors and between members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners;
5. Does not represent the interests of certain political parties.

Meanwhile, the GMS also has the authority to dismiss the Board of Directors in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association. The dismissal can be caused by, among others:

1. The term of office ends;
2. Resigned;
3. Losing Indonesian citizenship;
4. Passed away;
5. Dismissed based on GM's decision.

Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Remuneration Policy of the Board of Commissioners and Board of Directors

PTK telah menetapkan kebijakan dalam menentukan jumlah dan metode perhitungan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi yang dikaitkan dengan kinerja dan nilai pemegang saham. Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi PTK merujuk pada ketentuan yang berlaku, baik di internal PT Pertamina International Shipping maupun ketentuan yang berlaku di lingkup PT Pertamina (Persero) sebagai BUMN yang didasarkan pada Peraturan Menteri BUMN Republik Indonesia No. PER-3/MBU/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia BUMN tanggal 23 Maret 2023.

The Company has established a policy in determining the amount and method of calculating remuneration for the Board of Commissioners and Board of Directors, which is associated with performance and shareholder value. The remuneration policy for the Board of Commissioners and Board of Directors of PTK refers to the applicable provisions, both within PT Pertamina International Shipping and PT Pertamina (Persero) as a SOE based on the Regulation of the Minister of SOEs of the Republic of Indonesia No. PER-3/MBU/2023 concerning Organs and Human Capital of SOEs dated March 23, 2023.

Prosedur Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Procedure for Determining the Remuneration of the Board of Commissioners and Board of Directors

Besaran remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan melalui RUPS dengan memperhatikan hasil kajian yang dilakukan oleh Perusahaan dan pemegang saham. Secara garis besar prosedur penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan melalui tahapan berikut:

The amount of remuneration for the Board of Commissioners and Board of Directors is determined through the GMS by considering the results of studies conducted by the Company and shareholders. Broadly speaking, the procedure for determining the remuneration of the Board of Commissioners and Board of Directors is carried out through the following stages:



Manajemen mengajukan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi dengan mempertimbangkan kompleksitas usaha dan industri, pencapaian kinerja Perusahaan yang signifikan, tantangan dan/atau penugasan-penugasan spesifik yang diberikan. Pengajuan tersebut diberikan kepada pemegang saham melalui Vice President Subsidiary Joint Venture (SJV) PT Pertamina International Shipping. Management proposes remuneration for the Board of Commissioners and Board of Directors, considering the complexity of the business and industry, significant Company performance achievements, challenges, and/or specific assignments given. The proposal was presented to shareholders through the Vice President Subsidiary Joint Venture (SJV) of PT Pertamina International Shipping.

VP SJV PT Pertamina International Shipping melakukan kajian dan menyusun rekomendasi kepada Human Resource (HR) PT Pertamina International Shipping untuk menentukan jumlah remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

VP of SJV of PT Pertamina International Shipping conducted a study and compiled recommendations to the Human Resources (HR) of PT Pertamina International Shipping to determine the amount of remuneration for members of the Board of Commissioners and Board of Directors.

(HR) PT Pertamina International Shipping melakukan kajian dan penyusunan rekomendasi kepada Direksi PT Pertamina International Shipping dalam bentuk risalah rapat Direksi secara sirkuler.

Human Resource (HR) of PT Pertamina International Shipping conducts studies and prepares recommendations to the Board of Directors of PT Pertamina International Shipping in the form of minutes of meetings of the Board of Directors circularly.

Setelah mendapatkan persetujuan dari Direksi PT Pertamina International Shipping, HR PT Pertamina (Persero) menyampaikan kepada SJV Pertamina (Persero) untuk menyelenggarakan RUPS secara sirkuler guna menetapkan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi PTK.

After obtaining approval from the Directors of PT Pertamina International Shipping, HR of PT Pertamina (Persero) informed SJV Pertamina (Persero) to hold a circular GMS to determine the remuneration for members of the PTK Board of Commissioners and Board of Directors.

Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris PTK tahun 2024 ditetapkan dan disetujui oleh Pemegang Saham pada RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 14 Juni 2024. Selanjutnya, besaran remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris PTK ditetapkan dalam Keputusan Pemegang Saham secara Sirkuler (KPSSS) tanggal 22 Oktober 2024 tentang Penetapan Penghargaan Atas Kinerja Tahun Buku 2023 dan Penetapan Remunerasi Tahun 2024 Direksi dan Dewan Komisaris.

The remuneration of PTK's Board of Directors and Board of Commissioners for 2024 was determined and approved by the Shareholders at the Annual GMS held on June 14, 2024. Furthermore, the amount of remuneration for PTK's Board of Directors and Board of Commissioners is stipulated in the Circular Shareholders' Resolution (KPSSS) dated October 22, 2024, on the Determination of Awards for the Performance of the 2023 Financial Year and Determination of the 2024 Remuneration of the Board of Directors and Board of Commissioners.

Indikator Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Indicators for Determining Remuneration of the Board of Commissioners and Board of Directors

Penetapan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan dengan memperhatikan prinsip kewajaran, transparansi, dan akuntabilitas. Dalam prosesnya, Perusahaan melakukan tinjauan menyeluruh atas rancangan rencana remunerasi yang diajukan, dengan memastikan kesesuaiannya terhadap Kebijakan Remunerasi yang berlaku serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Beberapa indikator utama yang digunakan dalam menetapkan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi antara lain: Pencapaian KPI dan tingkat kesehatan Perusahaan, skala dan kompleksitas usaha, pendapatan dan kemampuan keuangan Perusahaan, kondisi ekonomi makro, termasuk tingkat inflasi dan dinamika pasar, serta faktor relevan lainnya. Selanjutnya penetapan akhir remunerasi dilakukan oleh Pemegang Saham dalam RUPS, berdasarkan rekomendasi dari Dewan Komisaris.

The determination of remuneration for the Board of Commissioners and Board of Directors is carried out with due regard to the principles of fairness, transparency, and accountability. In the process, the Company conducts a thorough review of the draft remuneration plan submitted by ensuring its compliance with the applicable Remuneration Policy and does not conflict with applicable regulatory provisions. Several key indicators used in determining remuneration for the Board of Commissioners and Board of Directors cover KPI achievement and the Company's health level, business scale and complexity, the Company's income and financial capability, macroeconomic conditions, including inflation rates and market dynamics, as well as other relevant factors. Furthermore, the final determination of remuneration is made by the Shareholders in the GMS based on recommendations from the Board of Commissioners.

Komponen dan Struktur Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Remuneration Components and Structure for the Board of Commissioners and Board of Directors

Paket remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi terdiri atas honorarium/gaji, tunjangan, dan fasilitas lainnya yang dibayarkan/diberikan bulanan, serta tantiem sebagai insentif kinerja tahunan. Komponen remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi terdiri dari:

The remuneration package of the Board of Commissioners and Board of Directors consists of honorarium/salary, allowances, and other facilities paid/provided monthly, as well as a tantiem as an annual performance incentive. The components of the remuneration of the Board of Commissioners and Board of Directors consist of:

Remunerasi Dewan Komisaris Remuneration of the Board of Commissioners	Remunerasi Direksi Remuneration of the Board of Directors
Honorarium	Gaji Salary
Tunjangan Hari Raya Keagamaan, Tunjangan Transportasi, Asuransi Purna Jabatan. Religious Holiday Allowance, Transportation Allowance, Retirement Insurance	Tunjangan Hari Raya Keagamaan, Asuransi purna Jabatan. Religious Holiday Allowance, Retirement Insurance
Fasilitas Kesehatan, Fasilitas Bantuan Hukum, serta Fasilitas Komunikasi dan Sarana Teknologi Health Facility, Legal Aid Facility, Communication and Technology Facilities	Fasilitas Kendaraan Ringan, Fasilitas Kesehatan, Fasilitas Komunikasi dan Sarana Teknologi Informasi, Fasilitas Bantuan Hukum. Light Vehicle Facility, Health Facility, Communication and Information Technology Facilities, Legal Aid Facility
Tantiem	Tantiem



Struktur remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi terdiri dari:

The remuneration structure of the Board of Commissioners and Board of Directors consists of:

Jabatan Position	Struktur Remunerasi Remuneration Structure
Dewan Komisaris Board of Commissioners	- Honorarium Komisaris Utama ditetapkan sebesar 45% dari Direktur Utama sedangkan Honorarium anggota Dewan Komisaris ditetapkan sebesar 90% dari honorarium Komisaris Utama. - Tunjangan yang terdiri dari: - Tunjangan Transportasi sebesar 20% dari Honorarium. - Tunjangan Hari Raya sebesar 1 (satu) kali Honorarium. - Asuransi Purna Jabatan sebesar maksimal 25% dari Honorarium dalam 1 (satu) tahun. - Fasilitas yang terdiri dari: - Fasilitas Kesehatan, yang meliputi fasilitas kesehatan dasar dan fasilitas kesehatan tambahan bagi Dewan Komisaris beserta anggota keluarga, serta kesehatan berkala (<i>medical check up</i>) sebanyak 1 (satu) kali setahun. - Fasilitas Bantuan Hukum (termasuk Asuransi Director's & Officer's Liability) sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan PT Pertamina (Persero) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan Menteri BUMN terkait. - Tantiem yang besarnya ditetapkan oleh Pemegang Saham. - The honorarium of the President Commissioner is set at 45% of the President Director, while the Honorarium of members of the Board of Commissioners is set at 90% of the honorarium of the President Commissioner. - Allowances consisting of: - Transportation Allowance is 20% of Honorarium. - Holiday Allowance is 1 (one) time of Honorarium. - Retirement Insurance is at a maximum of 25% of the Honorarium in 1 (one) year. - Facilities consisting of: - Health Facilities, including basic and additional health facilities for the Board of Commissioners and family members, as well as periodic medical check-ups 1 (one) time per year. - Legal Aid Facilities (including Director's & Officer's Liability Insurance) in accordance with the prevailing regulations within PT Pertamina (Persero) and the prevailing laws and regulations, including the relevant Regulation of the Minister of SOEs. - Tantiem, the amount of which is determined by the Shareholders
Direksi Board of Directors	- Gaji Direktur Utama ditetapkan sesuai dengan keputusan Pemegang Saham dalam RUPS Tahunan. Gaji Anggota Direktur Lainnya sebesar 85% dari gaji Direktur Utama. - Tunjangan, terdiri dari: - Tunjangan Perumahan (termasuk utilitas) bagi anggota Direksi sebesar 40% dari gaji - Tunjangan Hari Raya sebesar 1 (satu) kali gaji (terdapat pengalihan THRK menjadi CSR) - Asuransi Purna Jabatan sebesar Maksimal 25% dari gaji dalam satu tahun - Fasilitas, terdiri dari: - Fasilitas Kesehatan, yang meliputi fasilitas kesehatan dasar dan fasilitas kesehatan tambahan bagi Dewan Komisaris beserta anggota keluarga, serta kesehatan berkala (<i>medical check up</i>) sebanyak 1 (satu) kali setahun. - Fasilitas Kendaraan Ringan (KRP) yang mengacu pada Pedoman PT Pertamina (Persero) No. A-001/I20000/2017-S0 tanggal 05 Desember 2017 tentang Pengelolaan Kendaraan Ringan Penumpang dan/atau perubahannya serta memperhatikan level kesetaraan Pertamina Reference Level (PRL) Direksi. - Fasilitas komunikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan PT Pertamina (Persero), termasuk Surat Keputusan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) No. Kpts-45/C00000/2020-S0 tanggal 10 Desember 2020 tentang Standarisasi Sarana Teknologi Informasi dan/atau perubahannya. - Fasilitas Bantuan Hukum (termasuk Asuransi Director's & Officer's Liability) sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan PT Pertamina (Persero) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan Menteri BUMN terkait. Tantiem yang besarnya ditetapkan oleh Pemegang Saham.

Jabatan Position	Struktur Remunerasi Remuneration Structure
	- The salary of the President Director is determined in accordance with the Shareholders' decision in the Annual GMS. Other Director's salary is 85% of the President Director's salary. - Allowances, consisting of: - Housing Allowance (including utilities) for members of the Board of Directors is 40% of salary - Holiday Allowance is 1 (one) times salary (there is a transfer of THRK to CSR) - Retirement Insurance is a maximum of 25% of salary in one year - Facilities, consisting of: - Health Facilities, including basic and additional health facilities for the Board of Commissioners and family members, as well as periodic health (medical check-ups) once a year. - Light Vehicle Facilities (KRP) referring to the Guidelines of PT Pertamina (Persero) No. A-001/I20000/2017-S0 dated December 5, 2017, concerning Light Passenger Vehicle Management and/or its amendments and paying attention to the level of equality of Pertamina Reference Level (PRL) of the Board of Directors. - Communication facilities in accordance with applicable provisions within PT Pertamina (Persero), including the Decree of the President Director of PT Pertamina (Persero) No. Kpts-45/C00000/2020-S0 dated December 10, 2020, concerning Standardization of Information Technology Facilities and/or its amendments. - Legal Aid Facilities (including Director's & Officer's Liability Insurance) in accordance with applicable provisions within PT Pertamina (Persero) and applicable laws and regulations, including relevant Minister of SOE Regulations. - Tantiem, the amount of which is determined by the Shareholders.

Selain struktur dan komponen di atas, PTK tidak memberikan remunerasi dalam bentuk lainnya. PTK juga belum menerapkan skema kompensasi kepada Direksi Perusahaan dalam jangka Panjang dan tidak memiliki kebijakan opsi saham bagi Dewan Komisaris dan Direksi.

In addition to the above structure and components, PTK does not provide remuneration in other forms. PTK also has not implemented a long-term compensation scheme for the Company's Directors and does not have a stock option policy for the Board of Commissioners and Board of Directors.

Besaran Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Amount of Remuneration for the Board of Commissioners and Board of Directors

Berikut adalah rincian dan jumlah remunerasi masing-masing Dewan Komisaris dan Direksi yang menjabat di tahun 2024.

The following are details and amounts of remuneration for each of the Board of Commissioners and Board of Directors who served in 2024.

Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2024 (dalam Rupiah)

Total remuneration of the Board of Commissioners and Board of Directors in 2024 (in Rupiah):

Keterangan Description	Tahun Year	
	2024	2023
Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris Total Remuneration for the Board of Commissioners	16.899.008.297	9.563.849.444
Jumlah Remunerasi Direksi Total Remuneration for the Board of Directors	34.014.393.393	15.610.962.169
Total Remunerasi Total Remuneration	50.913.481.690	25.174.811.613



Sampai dengan akhir tahun 2024, tidak ada remunerasi Dewan Komisaris maupun Direksi PTK yang ditangguhkan atau ditarik kembali.

Until the end of the 2024, no remuneration of PTK's Board of Commissioners or Board of Directors has been deferred or withdrawn.

Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi

Share Ownership by the Board of Commissioners and Board of Directors

PTK menerapkan kebijakan terkait kewajiban anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk menyampaikan informasi kepada Perusahaan mengenai kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham di perusahaan lain. Penyampaian informasi tersebut dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan atas saham Perusahaan. Kepemilikan saham anggota Direksi senantiasa diungkapkan secara berkala melalui Daftar Khusus yang diadministrasikan oleh Sekretaris Perusahaan.

PTK implements a policy regarding the obligation of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners to submit information to the Company regarding ownership and any changes in their ownership of shares in other companies. The submission of such information is made no later than 3 (three) business days after the occurrence of ownership or any change in ownership of the Company's shares. The share ownership of members of the Board of Directors is regularly disclosed through the Special Register administered by the Corporate Secretary.

Pada tahun 2024, tidak terdapat anggota Dewan Komisaris dan Direksi PTK yang memiliki saham di perusahaan lain.

In 2024, there were no members of PTK's Board of Commissioners and Board of Directors who owned shares in other companies.

Organ Pendukung Dewan Komisaris

Supporting Organs of the Board of Commissioners

Sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 dan Anggaran Dasar Perusahaan tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN, Dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dan menyesuakannya dengan peraturan terbaru Dewan Komisaris membentuk komite-komite pendukung. Hingga akhir tahun 2024, Dewan Komisaris telah membentuk organ pendukung, yaitu Sekretaris Dewan Komisaris, Komite Audit, Komite Pemantau Risiko & Investasi, serta Komite Nominasi & Remunerasi.

In accordance with the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-2/MBU/03/2023 and the Company's Articles of Association on Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of SOEs, in implementing good corporate governance and adjusting to the latest regulations, the Board of Commissioners formed supporting committees. Until the end of 2024, the Board of Commissioners established supporting organs, namely the Secretary of the Board of Commissioners, Audit Committee, Risk & Investment Monitoring Committee, and Nomination & Remuneration Committee.

Sekretaris Dewan Komisaris

Secretary of the Board of Commissioners

Sebagai bagian dari struktur tata kelola perusahaan, Sekretaris Dewan Komisaris bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris dan memiliki peran strategis dalam memastikan kelancaran komunikasi antara Dewan Komisaris, Direksi, serta pemangku kepentingan lainnya. Dalam menjalankan tugasnya, Sekretaris Dewan Komisaris memastikan bahwa seluruh aktivitas pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris sejalan dengan standar Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) serta praktik terbaik dalam pengelolaan Perusahaan.

As part of the corporate governance structure, the Secretary of the Board of Commissioners reports directly to the Board of Commissioners and plays a strategic role in ensuring smooth communication between the Board of Commissioners, the Board of Directors, and other stakeholders. In carrying out its duties, the Secretary of the Board of Commissioners ensures that all supervisory and advisory activities of the Board of Commissioners are in line with Good Corporate Governance (GCG) standards and best practices in the management of the Company.

Masa Jabatan Sekretaris Dewan Komisaris

Tenure of the Secretary of the Board of Commissioners

Masa jabatan Sekretaris Dewan Komisaris mengacu pada Board Manual, dan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Di mana masa Sekretaris Dewan Komisaris ditetapkan oleh Dewan Komisaris maksimum 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk paling lama 2 (dua) tahun dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

The tenure of the Secretary of the Board of Commissioners is defined in the Board Manual and the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-3/MBU/03/2023 regarding the Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises. The tenure is set by the Board of Commissioners for a maximum of three years and may be extended for up to two years, without prejudice to the Board's right to terminate the appointment at any time.

Profil Sekretaris Dewan Komisaris

Profile of the Secretary of the Board of Commissioners

Perusahaan telah menetapkan Sdr. Venny Veranica sebagai Sekretaris Dewan Komisaris yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. SK-145/DEKOM.PTK/2023 tanggal 17 Oktober 2023. Pengangkatan Sekretaris Dewan Komisaris telah berdasarkan pada latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja yang dipersyaratkan Perusahaan.

The Company appointed Ms. Venny Veranica as the Secretary of the Board of Commissioners based on the Decree of the Board of Commissioners No. SK-145/DEKOM.PTK/2023 dated October 17, 2023. The appointment of the Secretary of the Board of Commissioners has been based on the educational background and work experience required by the Company.



Venny Veranica

Sekretaris Dewan Komisaris
Secretary of the Board of Commissioners

Domisili Domicile
Jakarta

Kewarganegaraan Citizenship
Indonesia Indonesian

Usia/Tempat & Tanggal Lahir Age/Place & Date of Birth
40 tahun / Jakarta, 13 Februari 1985
40 years old, born in Jakarta on February 13, 1985

Dasar Hukum Penunjukan Basis of Appointment	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. SK- 145/DEKOM.PTK/2023 tanggal 17 Oktober 2023 Decree of the Board of Commissioners No. SK- 145/DEKOM.PTK/2023 dated October 17, 2023
Educational Background and Certifications: Riwayat Pendidikan dan Sertifikasi	Lulusan Sarjana Ekonomi, Universitas Budi Luhur – Jakarta (2009) Lulusan Sarjana Ekonomi, Universitas Budi Luhur – Jakarta (2009)
Pengalaman Kerja: Work Experience:	Sebelumnya pernah menjabat sebagai Personal Assistant – DPR RI (2009 – 2014), Staff Administrasi PT Pertamina (Persero)(2014 – 2018) dan Sekretaris VP Dev. & Product Evaluation PT Pertamina (Persero)(2021). Previously served as Personal Assistant – House of Representatives of the Republic of Indonesia (2009 – 2014), Administrative Staff of PT Pertamina (Persero) (2014 – 2018), and Secretary to VP of Dev. & Product Evaluation of PT Pertamina (Persero) (2021).
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham utama, anggota Direksi dan anggota Komisaris lainnya. Has no affiliation with major shareholders, members of the Board of Directors, and other members of the Board of Commissioners.

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Dewan Komisaris

Duties and Responsibilities of the Secretary of the Board of Commissioners

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Sekretaris Dewan Komisaris melakukan kegiatan untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya berupa:
 - a. Mempersiapkan rapat termasuk bahan rapat (*briefing sheet*) Dewan Komisaris;
 - b. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perusahaan
 - c. Mengadministrasikan dokumen Dewan Komisaris, baik surat masuk, surat keluar, risalah rapat maupun dokumen lainnya
 - d. Menyusun Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris
 - e. Menyusun Rancangan Laporan-Laporan Dewan Komisaris
 - f. Melaksanakan tugas lain dari Dewan Komisaris.

The duties and responsibilities of the Secretary of the Board of Commissioners are as follows:

1. Assisting the Board of Commissioners by:
 - a. Preparing meetings, including briefing sheets for the Board of Commissioners meetings;
 - b. Creating minutes of the Board of Commissioners meetings in accordance with the Company's Articles of Association;
 - c. Administering documents for the Board of Commissioners, including incoming and outgoing letters, minutes of meetings, and other documents;
 - d. Drafting the Board of Commissioners' Work Plan and Budget;
 - e. Drafting the Board of Commissioners' Reports;
 - f. Performing other tasks assigned by the Board of Commissioners.

2. Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sekretaris Dewan Komisaris selaku pimpinan Sekretariat melaksanakan tugas lain berupa:
 - a. Memastikan bahwa Dewan Komisaris mematuhi peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip-prinsip GCG
 - b. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta
 - c. Mengkoordinasikan anggota Komite, jika diperlukan dalam rangka memperlancar tugas Dewan Komisaris
 - d. Sebagai penghubung (*liaison officer*) Dewan Komisaris dengan pihak lain.
2. Additionally, as the head of the Secretariat, the Secretary of the Board of Commissioners performs tasks such as:
 - a. Ensuring compliance of the Board of Commissioners with laws and regulations and the application of GCG principles;
 - b. Providing the Board of Commissioners with necessary information regularly or upon request;
 - c. Coordinating with committee members, if required, to facilitate the Board of Commissioners' tasks;
 - d. Acting as a liaison officer between the Board of Commissioners and other parties.

Pengembangan Kompetensi Sekretaris Dewan Komisaris

Competency Development of Secretary of the Board of Commissioners

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Sekretaris Dewan Komisaris terus berupaya meningkatkan kompetensinya, diantaranya dengan mengikuti pelatihan, *workshop*, ataupun seminar. Pada tahun 2024, Sekretaris Dewan Komisaris telah mengikuti pelatihan sebagai berikut:

In order to support the implementation of its duties and responsibilities, the Secretary of the Board of Commissioners continues to improve its competence, including by attending training, workshops, or seminars. In 2024, the Secretary of the Board of Commissioners participated in training, as follows:

Topik Pelatihan Topics of Training	Tanggal Pelaksanaan Date of Implementation
<i>The Art of Risk Management</i>	26 November 2024 November 26, 2024

Pelaksanaan Tugas Sekretaris Dewan Komisaris Tahun 2024

Execution of Duties by the Secretary of the Board of Commissioners in 2024

Sepanjang tahun 2024 Sekretaris Dewan Komisaris telah melaksanakan fungsi dan tugasnya membantu dan mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi melalui pemberian informasi, review, kajian, dan laporan kepada Dewan Komisaris agar fungsi pengawasan Dewan Komisaris berjalan efektif, yang secara umum meliputi hal-hal sebagai berikut:

Throughout 2024, the Secretary of the Board of Commissioners fulfilled their role in supporting the Board's supervision of the Directors' duties and responsibilities by providing information, reviews, studies, and reports to the Board of Commissioners, ensuring effective oversight. This included:

1. Membantu menyusun Realisasi Rencana Kerja Dewan Komisaris tahun 2024 dan Rencana Kerja Dewan Komisaris tahun 2025.
2. Memantau, melakukan review dan menginformasikan perkembangan peraturan perundang-undangan terbaru untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris, termasuk pembuatan, pembaruan/penyesuaian Surat Keputusan Dewan Komisaris serta piagam komite-komite di bawah Dewan Komisaris berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
1. Assisting in drafting the Realization of the Board of Commissioners' Work Plan for 2023 and the Work Plan for 2024;
2. Monitoring, reviewing, and informing the Board of Commissioners of the latest regulations, including creating, updating, or adjusting the Board of Commissioners' Decrees and committee charters as per applicable laws;



3. Mengoordinasikan dan menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris termasuk mempersiapkan jadwal rapat, materi rapat, menyusun dan mengadministrasikan risalah rapat Dewan Komisaris, menyampaikan saran dan pendapat Dewan Komisaris berdasarkan hasil rapat Dewan Komisaris kepada Direksi serta melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut saran dan pendapat Dewan Komisaris tersebut.
4. Membantu dan mendukung pelaksanaan tugas Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris sebagai bagian dari tugas Dewan Komisaris berdasarkan peraturan yang berlaku, antara lain: Melaksanakan tugas administratif terkait kelancaran tugas komisaris, yaitu pengelolaan, penyimpanan dan administrasi dokumen/surat menyurat Komisaris termasuk mempersiapkan surat-surat persetujuan serta masukan/saran Dewan Komisaris yang bersifat strategis yang disampaikan kepada Direksi.
5. Mengoordinasikan dan menyelenggarakan kunjungan kerja Dewan Komisaris dan komite-komite termasuk mempersiapkan jadwal kunjungan kerja, materi kunjungan kerja, menyusun dan mengadministrasikan laporan kunjungan kerja Dewan Komisaris serta komite, menyampaikan laporan kunjungan kerja dan pendapat Dewan Komisaris berdasarkan hasil kunjungan kerja Dewan Komisaris kepada Direksi.
6. Menyiapkan data dan mengkoordinasikan serta mendukung dalam pelaksanaan *assessment Good Corporate Governance* (GCG) untuk tahun buku 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan perusahaan.
3. Coordinating and organizing Board of Commissioners meetings, including scheduling, preparing materials, drafting and administering meeting minutes, providing recommendations from the Board of Commissioners to the Directors, and monitoring follow-up actions on these recommendations;
4. Supporting the tasks of the committees under the Board of Commissioners, including administrative tasks related to the smooth execution of the commissioners' duties, managing, storing, and administering documents/ correspondence, and preparing approval letters and strategic suggestions from the Board of Commissioners to the Directors.
5. Coordinating and organizing work visits of the Board of Commissioners and committees, including preparing work visit schedules and work visit materials, compiling and administering work visit reports of the Board of Commissioners and committees, submitting work visit reports and opinions of the Board of Commissioners based on the results of work visits of the Board of Commissioners to the Board of Directors.
6. Preparing data and coordinating and supporting the implementation of the Good Corporate Governance (GCG) assessment for the 2024 financial year in accordance with laws and regulations and company provisions.

Komite Audit

Audit Committee

Komite Audit adalah komite independen yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dengan tujuan untuk memperkuat fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris. Sebagai bagian dari mekanisme tata kelola perusahaan, Komite Audit memiliki peran strategis dalam mendorong implementasi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG). Hal ini mencakup pemantauan terhadap sistem pengendalian internal, pelaporan keuangan, efektivitas audit internal dan eksternal, serta kepatuhan terhadap regulasi atau peraturan yang berlaku.

The Audit Committee is an independent committee formed by the Board of Commissioners to strengthen the supervisory function carried out by the Board of Commissioners. As part of the corporate governance mechanism, the Audit Committee has a strategic role in encouraging the implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles. This includes monitoring the internal control system, financial reporting, effectiveness of internal and external audits, and compliance with applicable regulations.

Piagam Komite Audit

Audit Committee Charter

Komite Audit memiliki Piagam Komite Audit sebagai pedoman kerja dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengawasan serta pemberian nasihat kepada Dewan Komisaris. Piagam Komite Audit PTK ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No. PK-113/DEKOM.PTK/2024-S0 tanggal 30 Desember 2024. Piagam Komite Audit tersebut mengatur berbagai hal terkait pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan kewajiban Ketua dan Anggota Komite Audit.

The Audit Committee has a Charter that serves as a guideline for carrying out its duties and responsibilities in supervising and advising the Board of Commissioners. The Audit Committee Charter of PTK was established by the Board of Commissioners Decree No. PK-113/DEKOM.PTK/2024-S0 on December 30, 2024. The Charter outlines various aspects related to the duties, responsibilities, and obligations of the Chair and Members of the Audit Committee.

Ketentuan Masa Jabatan Komite Audit

Provisions of Tenure of the Audit Committee

Sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, masa jabatan anggota Komite yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris Perusahaan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. Sementara untuk masa jabatan anggota Komite yang merupakan anggota Dewan Komisaris Perusahaan berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris berakhir.

In accordance with the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-3/MBU/03/2023 on Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises, the tenure of Audit Committee members who are not members of the Company's Board of Commissioners is a maximum of 3 (three) years and can be extended once for a period of 2 (two) years, without prejudice to the right of the Board of Commissioners to dismiss them at any time. The tenure of Audit Committee members who are members of the Company's Board of Commissioners ends automatically when their term as a member of the Board of Commissioners ends.

Susunan dan Komposisi Komite Audit

Composition of the Audit Committee

Pada tahun 2024, Komite Audit Perusahaan terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, termasuk satu orang berasal dari unsur Dewan Komisaris yang ditunjuk sebagai Ketua Komite. Sepanjang tahun 2024, terdapat perubahan dalam susunan Komite Audit, dimana Sdr. Khalid Zabidi yang menjabat sebagai Ketua Komite Audit telah menyelesaikan masa jabatannya pada 19 Juli 2024. Selanjutnya Dewan Komisaris mengangkat dan menetapkan Sdr. Agustinus I. T. Prasetyantoko, yang juga menjabat sebagai Komisaris Independen Perusahaan sebagai Ketua Komite Audit. Dengan demikian, susunan dan komposisi Komite Audit per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

In 2024, the Company's Audit Committee consisted of 3 (three) members, including one member from the Board of Commissioners appointed as Chairman of the Committee. Throughout 2024, there were changes in the composition of the Audit Committee, where Mr. Khalid Zabidi, who served as Chairman of the Audit Committee, completed his term of office on July 19, 2024. Furthermore, the Board of Commissioners appointed and appointed Mr. Agustinus I. T. Prasetyantoko, who also serves as the Company's Independent Commissioner as Chairman of the Audit Committee. Thus, the composition of the Audit Committee as of December 31, 2024, is as follows:



Tabel Susunan dan Komposisi Komite Audit Tahun 2024

Table of Composition of the Audit Committee in 2024

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Periode dan Masa Jabatan Period and Term of Office
Agustinus I. T. Prasetyantoko	Ketua/Komisaris Independen Chairman/ Independent Commissioner	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. Kpts-079/DEKOM.PTK/2024 tanggal 19 Juli 2024 Decree of the Board of Commissioners No. Kpts-079/ DEKOM.PTK/2024 dated July 19, 2024	Mengikuti masa jabatan Komisaris/ keputusan lain Komisaris Following Commissioner's term of office/other decisions of Commissioner
Harry Mulia	Anggota Member	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. SK- 159/DEKOM.PTK/2023 tanggal 24 Oktober 2023 Decree of the Board of Commissioners No. SK- 159/DEKOM. PTK/2023 dated October 24, 2023	Periode ke 2, 1 November 2023 s.d 31 Oktober 2025 2 nd Period, November 1, 2023 up to October 31, 2025
Suharti	Anggota Member	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. Kpts-014/DEKOM.PTK/2024-S8 tgl. 16 Januari 2024 Decree of the Board of Commissioners No. Kpts-014/DEKOM. PTK/2024-S8 dated January 16, 2024	Periode ke 2, 1 Februari 2025 s.d 31 Januari 2027 2 nd Period, February 1, 2025 up to January 31, 2027

Seluruh anggota Komite Audit memiliki komitmen dan integritas yang tinggi, latar belakang pendidikan di bidang akuntansi atau keuangan, serta pengetahuan yang memadai dalam membaca dan memahami laporan keuangan.

All members of the Audit Committee have high commitment and integrity, educational background in accounting or finance, and sufficient knowledge in reading and understanding financial statements.

Profil Anggota Komite Audit

Profile of Member of the Audit Committee



Agustinus I. T. Prasetyantoko

Ketua Komite Audit/Komisaris Independen
Chairman of the Audit Committee/Independent
Commissioner

Diangkat sebagai Ketua Komite Audit pada tanggal 19 Juli 2024 untuk periode pertama kalinya. Profil Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.

Appointed as Chairman of the Audit Committee on July 19, 2024, for the first period. His profile can be found in the Board of Commissioners Profile section of this Annual Report.



Harry Mulia

Anggota Komite Audit
Member of the Audit Committee

Domisili Domicile
Jakarta

Kewarganegaraan Citizenship
Indonesia Indonesian

Usia/Tempat & Tanggal Lahir Age/Place & Date of Birth
60 tahun / Palembang, 20 Mei 1964
60 years old, born in Palembang on May 20, 1964.
Domicile: Jakarta

Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment:	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. SK- 159/DEKOM.PTK/2023 tanggal 24 Oktober 2023. Decree of the Board of Commissioners No. SK- 159/DEKOM.PTK/2023 dated October 24, 2023.
Riwayat Pendidikan Education History:	Meraih gelar Sarjana Teknik Sipil di Universitas Sriwijaya (1988). Bachelor's degree in Civil Engineering at Universitas Sriwijaya (1988).
Sertifikasi Profesi yang Dimiliki Professional Certifications:	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham utama, anggota Direksi dan anggota Komisaris lainnya. Qualified Internal Auditor (QIA)
Pengalaman Kerja Work Experience:	Beliau pernah menjabat sebagai Manager IA RU V Balikpapan (2013) mencakup Internal Audit RU V Balikpapan, Manager IA Jakarta (2013-2014) mencakup pengawasan Pertamina Pengolahan Pusat, Ka SPI PT PDSI (2014-2017), Manager JBB PT. Pertamina (Persero) (2017-2018) mencakup IA RU VI Balongan & MOR 3 Jakarta, Chief Internal Audit PT Pertamina Gas (2018-2020) s.d Purna Bakti 1 Juni 2020. He has served as Manager IA RU V Balikpapan (2013) covering Internal Audit RU V Balikpapan, Manager IA Jakarta (2013-2014) covering supervision of Pertamina Processing Center, Head of SPI PT PDSI (2014-2017), Manager JBB PT Pertamina (Persero) (2017-2018) covering IA RU VI Balongan & MOR 3 Jakarta, Chief Internal Audit PT Pertamina Gas (2018-2020) until June 1, 2020.
Rangkap Jabatan Concurrent Position:	Tidak memiliki rangkap jabatan. Does not have any concurrent positions
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan Anggota Komite lainnya, Dewan Komisaris dan Direksi, maupun Pemegang Saham Utama dan Pengendali. Has no affiliation with other Committee Members, Board of Commissioners and Board of Directors, as well as Major and Controlling Shareholders.



Suharti

Anggota Komite Audit
Member of the Audit Committee

Domisili Domicile
Jakarta

Kewarganegaraan Citizenship
Indonesia Indonesian

Usia/Tempat & Tanggal Lahir Age/Place & Date of Birth
46 tahun / Sumedang, 10 Januari 1979
46 years old, born in Sumedang on January 10, 1979

Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis for Appointment	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. Kpts-014/DEKOM.PTK/2024-S8 tgl. 16 Januari 2025 Decree of the Board of Commissioners No. Kpts-014/DEKOM.PTK/2024-S8 dated January 16, 2025
Riwayat Pendidikan Educational Background	- Pasca Sarjana Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada (2017) - Sarjana Akuntansi Universitas Padjadjaran (2001) - Postgraduate Master's Degree in Management, Universitas Gadjah Mada (2017) - Bachelor's Degree in Accounting, Universitas Padjadjaran (2001)
Sertifikasi Profesi yang Dimiliki Professional Certifications	Qualified Internal Auditor, Certified Fraud Examiner, Chartered Accountant, Certified Internal Audit Executive. Qualified Internal Auditor, Certified Fraud Examiner, Chartered Accountant, and Certified Internal Audit Executive.
Pengalaman Kerja Work Experience	Pernah bekerja sebagai Manager Operation & Business Development Audit (2018 – 2020), Chief of Internal Audit PT Pertamina Gas (2020), Senior Auditor III Refinery ISC Internal Audit (2017 – 2018), Senior Auditor II Marketing Internal Audit (2015 – 2017), Senior Auditor Business Group Marketing & Trading (2015) She has worked as Manager Operation & Business Development Audit (2018 – 2020), Chief of Internal Audit PT Pertamina Gas (2020), Senior Auditor III Refinery ISC Internal Audit (2017 – 2018), Senior Auditor II Marketing Internal Audit (2015 – 2017), and Senior Auditor Business Group Marketing & Trading (2015).
Rangkap Jabatan Concurrent Position	VP Revenue Assurance – PT Pertamina (Persero) VP of Revenue Assurance – PT Pertamina (Persero)
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan Anggota Komite lainnya, Dewan Komisaris dan Direksi, maupun Pemegang Saham Utama dan Pengendali. Has no affiliation with other Committee Members, Board of Commissioners and Board of Directors, as well as Major and Controlling Shareholders.

Independensi Anggota Komite Audit

Independence of Audit Committee Members

Seluruh Anggota Komite Audit yang berasal dari pihak independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Perusahaan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya bertindak independen. Anggota Komite Audit Perusahaan telah menyatakan independensinya untuk senantiasa bekerja secara profesional, independen dan objektif serta terbebas dari intervensi atau hal-hal yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dengan memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

All Members of the Audit Committee who come from independent parties do not have financial, management, share ownership, and/or family relationships with the Board of Commissioners, Board of Directors, and/or Controlling Shareholders or relationships with the Company, which may affect their ability to act independently. Members of the Company's Audit Committee have declared their independence to always work professionally, independently, and objectively and free from intervention or matters that could potentially lead to conflicts of interest by meeting the following criteria:

Kriteria Independensi Independence Criteria	Agustinus I. T. Prasetyantoko	Harry Mulia	Suharti
Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik yang memberikan jasa audit non audit pada PTK dalam 1 (satu) tahun terakhir sebelum diangkat oleh Komisaris. Not a person in a Public Accounting Firm who provided non-audit audit services to PTK in the last 1 (one) year before being appointed by the Commissioner.	✓	✓	✓
Tidak memiliki kepentingan/keterikatan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan konflik kepentingan terhadap BUMN yang bersangkutan. Has no personal interests/attachments that could have a negative impact and conflict of interest on the SOE in question.	✓	✓	✓
Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan PTK Direksi dan Komisaris. Has no affiliation with PTK Directors and Commissioners.	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha PTK. Does not have any direct or indirect business relationships related to PTK business activities.	✓	✓	✓
Keterangan: ✓ : Independen ✕: Tidak Independen Note: ✓ Independent ✕ Not Independent			

Tugas dan Tanggung Jawab serta Wewenang Komite Audit

Duties, Responsibilities, and Authority of the Audit Committee

Tugas Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terkait fungsi pengawasan, meliputi:

1. Menjaga kepatuhan terhadap Anggaran Dasar, Undang-Undang, dan ketentuan hukum serta kebijakan Perusahaan yang berlaku;
2. Menegakkan disiplin organisasi dan pengendalian internal untuk mencegah kecurangan (*fraud*) dan penyimpangan (*abuse*);
3. Meningkatkan kualitas pengungkapan hal-hal yang bersifat pelaporan keuangan, sistem akuntansi dan kebijakan manajemen risiko;
4. Mempelajari ruang lingkup, keakuratan, kemandirian dan objektivitas Auditor Eksternal dan Fungsi Internal Audit serta efektivitas biaya Audit Eksternal;
5. Komite Audit menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional dan independen, tanpa campur tangan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
6. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dipublikasikan seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya;
7. Melakukan evaluasi untuk memberikan persetujuan awal (*pre-approval*) terhadap jasa non audit yang ditugaskan kepada Auditor Independen;

The duties of the Audit Committee are to assist the Board of Commissioners in carrying out its supervisory functions, including:

1. Ensuring compliance with the Articles of Association, laws, regulations, and the Company's prevailing policies;
2. Enforcing organizational discipline and internal controls to prevent fraud and abuse;
3. Improving the quality of disclosures related to financial reporting, accounting systems, and risk management policies;
4. Reviewing the scope, accuracy, independence, and objectivity of External and Internal Auditors, as well as the cost-effectiveness of External Audits;
5. Performing its duties and responsibilities professionally and independently, without interference from any party not in accordance with regulations;
6. Reviewing financial information to be published, such as financial statements, projections, and other financial information;
7. Evaluating and providing pre-approval for non-audit services assigned to the Independent Auditor;



8. Melakukan penelaahan atas efektivitas pengendalian internal Perusahaan;
9. Melaporkan kepada Dewan Komisaris perihal risiko yang dihadapi Perusahaan dan pelaksanaan Manajemen Risiko oleh Direksi;
10. Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan adanya kesalahan dalam keputusan rapat Direksi atau penyimpangan dalam pelaksanaan hasil keputusan rapat Direksi;
11. Menerima, menelaah dan meneruskan kepada pihak yang berkepentingan dan memantau tindak lanjut pengaduan yang berkaitan dengan Perusahaan;
12. Melakukan *self-evaluation* terhadap efektivitas pelaksanaan tugas dan memutakhirkan secara periodik Pedoman Kerja Komite Audit;
13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
14. Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit juga berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Selain tugas di atas, Komite Audit juga bertugas untuk:

1. Penelaahan atas informasi keuangan, mencakup review atas hasil pemeriksaan Auditor Independen atau Auditor Internal, serta *review* dalam atau selama proses penyiapan informasi keuangan yang akan dipublikasikan;
2. Seleksi, penunjukan dan pengawasan pekerjaan Auditor Independen;
3. Pengawasan pekerjaan Auditor Independen dalam pelaksanaan audit umum atas laporan keuangan oleh Auditor Independen;
4. Memastikan konsep laporan keuangan audit diterima 10 hari sebelum diterbitkan oleh Perusahaan untuk dibicarakan dengan Auditor dan manajemen untuk menilai apakah Auditor sesuai dengan temuan Audit dan pengungkapannya telah memadai;
5. Memastikan bahwa Auditor menyampaikan representasi tertulis yang menyatakan penilaiannya tentang hal-hal yang berkaitan dengan kepatuhan Perusahaan dan Manajemen terhadap peraturan perundangan dan efektivitas pengendalian internal;
6. Mengusulkan pemutusan hubungan kerja dengan Auditor Independen kepada Dewan Komisaris, jika terbukti kuat bahwa independensi Auditor dapat terganggu atau terbukti bahwa Auditor tidak melakukan pemeriksaan sesuai dengan standar akuntan publik;
7. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh Dewan Komisaris mencakup tetapi tidak terbatas pada pemeriksaan terhadap dugaan adanya kesalahan dalam keputusan rapat Direksi atau penyimpangan dalam pelaksanaan hasil keputusan rapat Direksi.

8. Reviewing the effectiveness of the Company's internal controls;
9. Reporting to the Board of Commissioners on the risks faced by the Company and the implementation of Risk Management by the Directors;
10. Investigating suspected errors in Directors' meeting decisions or deviations in the implementation of Directors' meeting decisions;
11. Receiving, reviewing, forwarding to relevant parties, and monitoring follow-ups on complaints related to the Company;
12. Conducting self-evaluation on the effectiveness of its duties and periodically updating the Audit Committee Work Guidelines;
13. Performing other duties assigned by the Board of Commissioners based on applicable regulations;
14. In performing its duties, the Audit Committee also adheres to applicable laws and regulations.

In addition to the above tasks, the Audit Committee is also responsible for:

1. Reviewing financial information, including the results of the Independent Auditor's or Internal Auditor's examinations, and reviews during or throughout the preparation process of financial information to be published;
2. Selecting, appointing, and supervising the work of the Independent Auditor;
3. Supervising the work of the Independent Auditor in conducting the general audit of the financial statements by the Independent Auditor;
4. Ensuring that the audited financial statements' drafts are received 10 days before publication by the Company to discuss with the Auditor and management to assess if the Auditor's findings and disclosures are adequate;
5. Ensuring that the Auditor submits a written representation stating their assessment of the Company's and Management's compliance with regulations and the effectiveness of internal controls;
6. Proposing the termination of the Independent Auditor's services to the Board of Commissioners if there is strong evidence that the Auditor's independence is compromised or the Auditor did not conduct the audit per public accountant standards;
7. Performing special duties assigned by the Board of Commissioners, including but not limited to investigating suspected errors in Directors' meeting decisions or deviations in implementing Directors' meeting decisions.

Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dan pertanggungjawaban Komite Audit disampaikan kepada Dewan Komisaris dalam bentuk laporan-laporan sebagai berikut:

1. Laporan Tahunan pelaksanaan tugas kegiatan Komite Audit;
2. Laporan untuk setiap pelaksanaan tugas Komite Audit yang antara lain berisi fakta lapangan, analisis kesimpulan dan saran.

The Audit Committee is accountable to the Board of Commissioners and reports its responsibilities to the Board of Commissioners in the form of the following reports:

1. Annual Report on the activities of the Audit Committee;
2. Reports on each task performed by the Audit Committee, including field facts, analysis, conclusions, and recommendations.

Pengembangan Kompetensi Komite Audit

Competency Development of the Audit Committee

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit terus berupaya meningkatkan kompetensinya, di antaranya dengan mengikuti pelatihan, *workshop*, ataupun seminar.

In order to support the implementation of its duties and responsibilities, the Audit Committee continues to improve its competence, including by attending training, workshops, or seminars.

Berikut program pengembangan kompetensi yang telah diikuti oleh Komite Audit selama tahun 2024.

The following competency development programs have been attended by the Audit Committee during 2024.

Nama Peserta Name of Participants	Topik Pelatihan Topics of Training	Tanggal Pelaksanaan Date of Implementation
Agustinus I. T. Prasetyantoko	<i>The Art of Risk Management</i>	26 November 2024 November 26, 2024
Harry Mulia	<i>Certification in Audit Committee Practices</i>	4 - 6 & 10 Juni 2024 June 4-6 & 10, 2024
	<i>Environmental, Social & Governance (ESG)</i>	28 - 29 Juni 2024 June 28-29, 2024
	<i>Wisuda dan Seminar Certification in Audit Committee Practices (CACP)</i>	01 Agustus 2024 August 1, 2024
	<i>The Art of Risk Management</i>	26 November 2024 November 26, 2024
Suharti	<i>Certification in Audit Committee Practices</i>	4 - 6 & 10 Juni 2024 June 4-6 & 10, 2024
	<i>Environmental, Social & Governance (ESG)</i>	28 - 29 Juni 2024 June 28-29, 2024
	<i>Wisuda dan Seminar Certification in Audit Committee Practices (CACP)</i>	01 Agustus 2024 August 1, 2024
	<i>The Art of Risk Management</i>	26 November 2024 November 26, 2024
Khalid Zabidi*	<i>Certification in Audit Committee Practices</i>	4 - 6 & 10 Juni 2024 June 4-6 & 10, 2024
	<i>Environmental, Social & Governance (ESG)</i>	28 - 29 Juni 2024 June 28-29, 2024
	<i>Elevating Internal Audit as a Value Driver</i>	10 - 11 Juli 2024 July 10-11, 2024

Keterangan: *) Berhenti menjabat pada 19 Juli 2024.
Remarks: *) Retired on July 19, 2024.



Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Audit Tahun 2024

Report on the Activities of the Audit Committee in 2024

Selama tahun 2024, Komite audit telah melaksanakan tugas sesuai dengan rencana kerja komite. Tugas-tugas tersebut mencakup berbagai aspek pengawasan terhadap kinerja keuangan, operasional, kepatuhan, serta efektivitas sistem pengendalian internal. Adapun kegiatan utama yang dilakukan oleh Komite Audit selama tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi terhadap laporan keuangan Perusahaan guna memastikan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku;
2. Meninjau penerapan kebijakan kesehatan, keselamatan, keamanan, dan lingkungan (HSSE). Komite Audit memberikan rekomendasi kepada manajemen untuk meningkatkan pelatihan dan kesadaran HSSE di seluruh lini kerja;
3. Melakukan peninjauan terhadap efektivitas operasional perusahaan, termasuk efisiensi pengelolaan sumber daya, optimalisasi penggunaan aset, serta produktivitas unit operasional;
4. Meninjau pelaksanaan *Annual Audit Plan* (AAP) yang disusun oleh Fungsi Internal Audit;
5. Melakukan review atas efektivitas pengendalian Manajemen;
6. Meninjau hasil audit yang dilakukan oleh Auditor Eksternal;
7. Melakukan pemantauan atas tindak lanjut terhadap berbagai temuan audit;
8. Menyampaikan masukan dalam bentuk Rekomendasi terkait dengan hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris berdasarkan hasil analisis dan telaah atas Laporan Manajemen maupun Laporan Keuangan yang diterbitkan setiap bulan.

During 2024, the audit committee performed its duties in accordance with the committee's work plan. These tasks cover various aspects of supervision of financial performance, operations, compliance, and the effectiveness of the internal control system. The main activities carried out by the Audit Committee during 2024 are as follows:

1. Evaluating the Company's financial statements to ensure that they have been prepared in accordance with applicable accounting standards;
2. Reviewing the implementation of health, safety, security, and environment (HSSE) policies. The Audit Committee provided recommendations to management to improve HSSE training and awareness across all lines of work;
3. Reviewing the effectiveness of the Company's operations, including the efficiency of resource management, optimization of asset use, and productivity of operational units;
4. Reviewing the implementation of the Annual Audit Plan (AAP) prepared by the Internal Audit Unit;
5. Reviewing the effectiveness of Management control;
6. Reviewing the results of audits conducted by external auditors;
7. Monitoring the follow-up of various audit findings;
8. Delivering input in the form of recommendations related to matters that require the attention of the Board of Commissioners based on the results of analysis and review of Management Reports and Financial Statements published monthly.

Rapat Komite Audit

Audit Committee Meetings

Dalam Piagam Komite Audit telah diatur bahwa rapat Komite Audit dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan. Jika dipandang perlu, Komite Audit dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan materi rapat untuk hadir dalam rapat Komite Audit. Rapat Komite Audit dapat mengambil keputusan apabila sekurang-kurangnya dihadiri $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota. Jika dipandang perlu, Komite Audit dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan materi rapat untuk hadir dalam rapat Komite Audit.

The Audit Committee Charter stipulates that Audit Committee meetings are held at least once a month. If deemed necessary, the Audit Committee may invite other parties related to the meeting material to attend the Audit Committee meeting. Audit Committee meetings can make decisions if at least $\frac{2}{3}$ of the members are present. If deemed necessary, the Audit Committee may invite other parties related to the meeting material to attend the Audit Committee meeting.

Pada tahun 2024, Komite Audit telah melaksanakan rapat sebanyak 10 kali rapat dengan frekuensi kehadiran masing-masing anggota Komite sebagai berikut:

In 2024, the Audit Committee held 10 meetings with the frequency of attendance of each Committee member as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Wajib Rapat Total Mandatory Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Tingkat Kehadiran (%) Attendance Rate (%)
Agustinus I. T. Prasetyantoko*	Ketua Chairman	5	5	100%
Harry Mulia	Anggota Member	10	9	90%
Suharti	Anggota Member	10	9	90%

Keterangan: *) Baru menjabat sebagai Ketua Komite pada Februari 2024.
Remarks: *) Newly appointed as Chairman of the Committee in February 2024.

Penilaian Kinerja Komite Audit

Performance Assessment of the Audit Committee

Penilaian kinerja Komite Audit dilakukan berdasarkan realisasi dan penyelesaian program kerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Komite Audit dan dilaporkan kepada Dewan Komisaris dalam laporan Komite yang meliputi pelaksanaan tugas komite di bidang audit, kecukupan proses pengendalian internal dan penyusunan laporan keuangan. Hasil penilaian tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi Dewan Komisaris untuk mengangkat kembali dan/atau memberhentikan anggota Komite Audit untuk periode jabatan berikutnya.

Pada tahun 2024, penilaian anggota Komite Audit dilakukan dengan menggunakan metode 360 derajat dan AKHLAK Behavioural Survey (ABS), dengan capaian nilai sebagai berikut:

The performance assessment of the Audit Committee is based on the realization and completion of the work programs listed in the Audit Committee Work Plan and reported to the Board of Commissioners in the Audit Committee's report, covering the committee's duties in auditing, the adequacy of the internal control process, and financial statement preparation. The assessment results are considered by the Board of Commissioners for reappointing and/or dismissing Audit Committee members for the next term.

In 2024, the performance assessment of Audit Committee members was conducted using the 360-degree method and the AKHLAK Behavioural Survey (ABS), with the following scores achieved:

No.	Nama Anggota Komite Name of Committee Member	Skor Nilai Score	Predikat Predicate
1.	Harry Mulia	93,3	High
2.	Suharti	95,3	High



Komite Nominasi & Remunerasi

Nomination and Remuneration Committee

Awal mula pembentukan Komite Nominasi & Remunerasi, (KNR) didasari oleh Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 042/DEKOM.PTK/2022 tanggal 21 Maret 2022 dengan nomenklatur Komite Nominasi, Remunerasi dan Manajemen Risiko (KNRM) namun pada 30 Agustus 2024 melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. Kpts 088/DEKOM.PTK/2024-S8 diubah menjadi Komite Nominasi & Remunerasi (KNR) sebagai bagian dari penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Komite ini berperan dalam mendukung Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya, khususnya terkait kebijakan nominasi & remunerasi. KNR secara aktif melakukan pengawasan dan memberikan rekomendasi strategis dalam pengelolaan serta pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), termasuk proses nominasi dan remunerasi bagi Dewan Komisaris serta Direksi PTK. Selain itu, komite ini bertanggung jawab memastikan bahwa manajemen risiko di Perusahaan diterapkan secara efektif untuk mendukung pencapaian tujuan bisnis yang berkelanjutan.

The initial establishment of the Nomination & Remuneration Committee (NRC) was based on the Decree of the Board of Commissioners No. 042/DEKOM.PTK/2022 dated March 21, 2022, with the nomenclature of the Nomination, Remuneration, and Risk Management Committee (KNRM), but on August 30, 2024, through the Decree of the Board of Commissioners No. Kpts 088/DEKOM.PTK/2024-S8 changed to the Nomination & Remuneration Committee (NRC) as part of the implementation of the principles of good corporate governance. This committee plays a role in supporting the Board of Commissioners in carrying out its duties, particularly regarding nomination & remuneration policies. The NRC actively supervises and provides strategic recommendations in the management and development of Human Resources (HR), including the nomination and remuneration process for PTK's Board of Commissioners and Board of Directors. In addition, this committee is responsible for ensuring that risk management in the Company is effectively implemented to support the achievement of sustainable business objectives.

Piagam Komite Nominasi & Remunerasi

Charter of the Nomination and Remuneration Committee

Pelaksanaan tugas KNR didasarkan pada Piagam KNR, yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. PK-115/DEKOM.PTK/2024-S0 tanggal 30 Desember 2024. Piagam ini menjadi pedoman utama dalam menjalankan peran dan tanggung jawab KNR, termasuk mengatur tugas, kewajiban, serta wewenang Ketua dan anggota komite. Dengan adanya piagam ini, KNR dapat berfungsi secara efektif dalam mendukung Dewan Komisaris dalam aspek nominasi & remunerasi di Perusahaan.

The implementation of the NRC's duties is based on the NRC Charter, which is stipulated through the Decree of the Board of Commissioners No. PK-115/DEKOM.PTK/2024-S0 dated December 30, 2024. This charter serves as the main guideline in carrying out the roles and responsibilities of the NRC, including regulating the duties, obligations, and authorities of the Chairman and committee members. With this charter, the NRC can function effectively in supporting the Board of Commissioners in the nomination & remuneration aspects of the Company.

Masa Jabatan Komite Nominasi & Remunerasi

Term of Office of the Nomination and Remuneration Committee

Sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, masa jabatan anggota Komite yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris Perusahaan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. Sementara untuk masa jabatan anggota Komite yang merupakan anggota Dewan Komisaris Perusahaan berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris berakhir.

In accordance with the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-3/MBU/03/2023 on Organs and Human Capital of State-Owned Enterprises, the term of office of Committee members who are not members of the Board of Commissioners of the Company shall not exceed 3 (three) years and may be extended once for 2 (two) years, without prejudice to the right of the Board of Commissioners to dismiss them at any time. Meanwhile, the term of office of Committee members who are members of the Company's Board of Commissioners ceases automatically when their term of office as members of the Board of Commissioners ends.

Susunan dan Komposisi Komite Nominasi & Remunerasi

Composition of the Nomination and Remuneration Committee

Pada tahun 2024, terjadi perubahan dalam komposisi KNR sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris. Perubahan tersebut mencakup pengangkatan Sdr. Hartanto sebagai Ketua Komite menggantikan Sdr. Khalid Zabidi. Sehingga keanggotaan Komite Nominasi & Remunerasi terdiri dari 3 (tiga) orang yang salah satu diantaranya berasal dari Komisaris Perusahaan yang merangkap sebagai ketua KNR. Berikut komposisi KNR per 31 Desember 2024:

In 2024, there was a change in the composition of the NRC in accordance with the Decree of the Board of Commissioners. The changes include the appointment of Mr. Hartanto as Chairman of the Committee, replacing Mr. Khalid Zabidi. Thus, the membership of the Nomination & Remuneration Committee consists of 3 (three) people, one of whom is a Commissioner of the Company who doubles as the chairman of the NRC. The following is the composition of the NRC as of December 31, 2024:

Tabel Komposisi Komite Nominasi & Remunerasi Tahun 2024

Table of the Composition of the Nomination & Remuneration Committee in 2024

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Periode dan Masa Jabatan Period and Term of Office
Hartanto	Ketua/Komisaris Chairman/ Commissioner	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. Kpts-018/DEKOM.PTK/2024-S8 Decree of the Board of Commissioners No. Kpts-018/DEKOM.PTK/2024-S8	Mengikuti masa jabatan Komisaris/ keputusan lain Komisaris Following the term of office of the Commissioner/other decisions of the Commissioner
Hamdi Zainal	Anggota Member	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. Kpts-027/DEKOM.PTK/ 2024-S8 tanggal 07 Februari 2024 Decree of the Board of Commissioners No. Kpts-027/DEKOM.PTK/ 2024-S8 dated February 07, 2024	Periode II, 01 Maret 2024 s.d 31 Desember 2024 2 nd Period, March 1, 2024, up to December 31, 2024
Ahmad Sofyan	Anggota Member	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 210/DEKOM.PTK/2023 tanggal 28 Desember 2023 Decree of the Board of Commissioners No. 210/DEKOM.PTK/2023 dated December 28, 2023	Periode II, 11 Januari 2024 s.d 10 Januari 2026 2 nd Period, January 11, 2024, up to January 10, 2024

Profil Anggota Komite Nominasi & Remunerasi

Profile of Members of the Nomination & Remuneration Committee



Hartanto

Ketua Komite KNR/Komisaris
Chairman of the NRC Committee/Commissioner

Diangkat sebagai Ketua KNR pada tanggal 22 Januari 2024 untuk periode pertama kalinya. Profil Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.

Appointed as Chairman of the NRC on January 22, 2024, for the first period. His profile can be found in the Board of Commissioners Profile section of this Annual Report.



Ahmad Sofyan

Anggota Komite KNR
Member of the NRC Committee

Domisili Domicile

Tangerang Selatan South Tangerang

Kewarganegaraan Citizenship

Indonesia Indonesian

Usia/Tempat & Tanggal Lahir Age/Place & Date of Birth

43 tahun / Rantau Prapat, 10 Oktober 1981

43 years old, born in Rantau Prapat on October 10, 1981

Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 210/DEKOM.PTK/2023 tanggal 28 Desember 2023. Decree of the Board of Commissioners No. 210/DEKOM.PTK/2023 dated December 28, 2023.
Riwayat Pendidikan Educational Background	Meraih gelar Sarjana Jurusan Teknik Kelautan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember Bachelor's degree in Marine Engineering, Sepuluh Nopember Institute of Technology.
Sertifikasi Profesi yang Dimiliki Professional Certifications	Enterprise Risk Management (2021), People Leader Development Program (2020), Fundamental Project Management (2020) Enterprise Risk Management (2021), People Leader Development Program (2020), Fundamental Project Management (2020)
Pengalaman Kerja Work Experience:	Sebelum menjabat sebagai anggota Komite, Beliau memulai karier di PT Alstom Power pada tahun 2016 – 2018. Selanjutnya, pada tahun 2018 – 2019 bergabung dengan PT Tripatra EPC. Pada 2019 melanjutkan perjalanan profesionalnya di PT Pertamina (Persero), dan pada sejak tahun 2021 ditugaskan di PT Pertamina International Shipping. Prior to serving as a member of the Committee, he started his career at PT Alstom Power in 2016 – 2018. Furthermore, in 2018 – 2019, he joined PT Tripatra EPC. In 2019, he continued his professional journey at PT Pertamina (Persero) and has been assigned to PT Pertamina International Shipping since 2021.
Rangkap Jabatan Concurrent Position	Manager Bunker, Agency & Performance PT Pertamina International Shipping Bunker, Agency & Performance Manager of PT Pertamina International Shipping
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan sesama anggota Komite, anggota Direksi, Dewan Komisaris. Namun memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Utama/Pengendali atas jabatan rangkapnya. Has no affiliation with fellow Committee members, members of the Board of Directors, or Board of Commissioners. However, he has an affiliation with the Major/Controlling Shareholder for his concurrent position.

Independensi Komite Nominasi & Remunerasi

Independence of the Nomination & Remuneration Committee

Seluruh anggota KNR tidak memiliki hubungan afiliasi dengan manajemen Perusahaan, termasuk menjabat salah satu jabatan dalam struktur organisasi Perusahaan maupun Anak Perusahaan.

All members of the NRC have no affiliation with the Company's management, including holding one of the positions in the organizational structure of the Company and its Subsidiaries.

Kriteria Independensi Independence Criteria	Hartanto	Hamdi Zainal	Ahmad Sofyan
Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik yang memberikan jasa audit non audit pada Perusahaan dalam 1 (satu) tahun terakhir sebelum diangkat oleh Komisaris. Not an insider of a Public Accounting Firm that provides non-audit audit services to the Company in the last 1 (one) year before being appointed by the Commissioner.	✓	✓	✓

Kriteria Independensi Independence Criteria	Hartanto	Hamdi Zainal	Ahmad Sofyan
Tidak memiliki kepentingan/keterikatan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan konflik kepentingan terhadap Perusahaan Has no personal interest/attachment that may have a negative impact and conflict of interest on the Company.	✓	✓	✓
Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan sesama anggota Direksi dan Komisaris. Has no affiliation with fellow members of the Board of Directors and Commissioners.	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan. Has no direct or indirect business relationship related to the Company's business activities.	✓	✓	✓

Tugas dan Tanggung Jawab serta Wewenang Komite Nominasi & Remunerasi

Duties, Responsibilities, and Authority of the Nomination & Remuneration Committee

KNR dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 042/DEKOM.PTK/2022 tanggal 21 Maret 2022 beserta perubahan nomenklatur pada Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 088/DEKOM.PTK/2025-S0, dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan SDM yang disampaikan Direksi melalui laporan kinerja manajemen.
2. Memberikan masukan dan pendapat bagi Dewan komisaris atas efektivitas kebijakan pengelolaan pengurusan perusahaan dari aspek pengelolaan SDM dan Remunerasi.
3. Melakukan evaluasi terhadap Calon Wakil Perseroan yang akan diusulkan sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris di perusahaan anak dan/atau perusahaan patungan, sebelum diajukan kepada RUPS.
4. Melakukan evaluasi usulan *Key Performance Indicator* individu anggota Direksi serta melakukan monitoring secara periodik atas realisasinya.
5. Membuat rekomendasi terkait remunerasi dan tantiem/ insentif kinerja untuk Direksi PTK berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Direksi. KNR akan melakukan telaah untuk kemudian menyusun rekomendasi atas usulan yang diajukan tersebut kepada Dewan Komisaris sebelum kemudian disampaikan kepada Pemegang Saham sebagai rekomendasi dari Dewan Komisaris.
6. Melakukan evaluasi / telaah atas usulan Direksi mengenai struktur organisasi perusahaan.
7. Kunjungan langsung (*site visit*) ke region maupun wilayah kerja PTK sebagai bagian dari tahapan close monitoring.

The NRC was established based on the Decree of the Board of Commissioners No. 042/DEKOM.PTK/2022 dated March 21, 2022, and its nomenclature change in the Decree of the Board of Commissioners No. 088/DEKOM.PTK/2025-S0, with the following duties and responsibilities:

1. Monitoring and evaluation of HR management submitted by the Board of Directors through management performance reports.
2. Providing input and opinions for the Board of Commissioners on the effectiveness of the Company's management policy from the aspect of HR management and Remuneration.
3. Evaluating prospective representatives of the Company who will be proposed as members of the Board of Directors or members of the Board of Commissioners in subsidiaries and/or joint ventures before being submitted to the GMS.
4. Evaluating the proposed *Key Performance Indicator* of individual members of the Board of Directors and conducting periodic monitoring of its realization.
5. Making recommendations related to remuneration and tantiem/performance incentives for PTK's Board of Directors based on proposals submitted by the Board of Directors. The NRC will conduct a review and then make recommendations on the proposal submitted to the Board of Commissioners before being submitted to the Shareholders as a recommendation from the Board of Commissioners.
6. Evaluating/reviewing the Board of Directors' proposal regarding the Company's organizational structure.
7. Site visits to PTK's regions and working areas as part of the close monitoring stage.



Sementara itu, KNR memiliki wewenang sebagai berikut:

1. Komite bekerja secara kolektif dan bersifat mandiri dalam melaksanakan tugasnya dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
2. Komite mempunyai wewenang untuk mendapatkan informasi Perusahaan tentang pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Remunerasi Perusahaan, serta informasi lainnya yang terkait dengan pelaksanaan tugas Komite NR.
3. Meminta dan/atau mendapatkan kerja sama dari rekan kerja antara lain Sekretariat Dewan Komisaris dan Komite lain, fungsi Human Capital, dan atau fungsi-fungsi operasional Perseroan, termasuk Anak Perusahaan.
4. Menyusun, mengevaluasi, mengubah dan melaksanakan Piagam (*Charter*) termasuk menentukan prosedur dan lingkup pelaksanaan pekerjaan Komite Nominasi & Remunerasi dengan persetujuan Dewan Komisaris
5. Apabila diperlukan komite dapat mempekerjakan tenaga ahli dan atau konsultan untuk membantu komite dalam rangka pengawasan pelaksanaan nominasi dan remunerasi.

Meanwhile, the NRC has the following authorities:

1. The Committee works collectively and independently in carrying out its duties and is responsible to the Board of Commissioners.
2. The Committee has the authority to obtain Company information on the management of the Company's Human Resources and Remuneration, as well as other information related to the implementation of the NR Committee's duties.
3. Asking and/or obtaining cooperation from colleagues, among others, the Secretariat of the Board of Commissioners and other Committees, the Human Capital function, and or the Company's operational functions, including Subsidiaries.
4. Preparing, evaluating, amending, and implementing the Charter, including determining the procedures and scope of work of the Nomination & Remuneration Committee with the approval of the Board of Commissioners.
5. If necessary, the Committee may employ experts and/or consultants to assist the Committee in monitoring the implementation of nomination and remuneration.

Pengembangan Kompetensi Komite Nominasi & Remunerasi

Competency Development of the Nomination & Remuneration Committee

Sepanjang tahun 2024, KNR telah mengikuti berbagai pelatihan sebagaimana tabel berikut:

Throughout 2024, the NRC participated in various trainings as shown in the following table:

Nama Peserta Name of Participants	Topik Pelatihan Topics of Training	Tanggal Pelaksanaan Date of Implementation
Hartanto	<i>Inhouse Training Certification in Audit Committee Practices (CACP)</i>	02 Oktober 2024 October 2, 2024
Ahmad Sofyan	<i>Environmental, Social & Governance (ESG)</i>	28 - 29 Juni 2024 June 28-29, 2024
	<i>The Art of Risk Management</i>	26 November 2024 November 26, 2024

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Nominasi & Remunerasi Tahun 2024

Report on the Activities of the Nomination & Remuneration Committee in 2024

Sepanjang tahun 2024, KNR telah menjalankan tugas dan berbagai kegiatan, antara lain sebagai berikut:

1. Pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan SDM yang disampaikan Direksi melalui laporan kinerja manajemen
2. Memberikan masukan dan pendapat bagi Dewan komisaris atas efektivitas kebijakan pengelolaan SDM dan Remunerasi perusahaan

Throughout 2024, the NRC carried out various tasks and activities, among others as follows:

1. Monitoring and evaluation of HR management submitted by the Board of Directors through management performance reports.
2. Providing input and opinions for the Board of Commissioners on the effectiveness of the Company's HR management and remuneration policies.

- Melakukan evaluasi terhadap Calon Wakil Perseroan yang akan diusulkan sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris di perusahaan anak dan/atau perusahaan patungan, sebelum diajukan kepada RUPS
- Melakukan evaluasi usulan *Key Performance Indicator* individu anggota Direksi serta melakukan *monitoring* secara periodik atas realisasinya
- Membuat rekomendasi terkait remunerasi dan tantiem/insentif kinerja untuk Direksi PTK berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Direksi. KNR akan melakukan telaah untuk kemudian menyusun rekomendasi atas usulan yang diajukan tersebut kepada Dewan Komisaris sebelum kemudian disampaikan kepada Pemegang Saham sebagai rekomendasi dari Dewan Komisaris
- Melakukan evaluasi/telaah atas usulan Direksi mengenai struktur organisasi perusahaan.
- Kunjungan langsung (*site visit*) ke region maupun wilayah kerja PTK sebagai bagian dari tahapan *close monitoring*.
- Evaluating prospective representatives of the Company who will be proposed as members of the Board of Directors or members of the Board of Commissioners in subsidiaries and/or joint venture companies before being submitted to the GMS.
- Evaluating the proposed Key Performance Indicator of individual members of the Board of Directors and conducting periodic monitoring of its realization.
- Making recommendations related to remuneration and tantiem/performance incentives for PTK's Board of Directors based on proposals submitted by the Board of Directors. The NRC will conduct a review and then make recommendations on the proposal submitted to the Board of Commissioners before being submitted to the Shareholders as a recommendation from the Board of Commissioners.
- Evaluating/reviewing the proposal of the Board of Directors regarding the Company's organizational structure.
- Site visits to PTK's regions and working areas as part of the close monitoring stage.

Rapat Komite Nominasi & Remunerasi

Nomination & Remuneration Committee Meetings

Kebijakan rapat KNR telah diatur dalam Piagam KNR yang mengatur pelaksanaan rapat KNR dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau triwulanan untuk membahas Program Kerja Komite serta hasil analisis dalam rangka pemberian saran dan rekomendasi guna membantu tugas Dewan Komisaris melaksanakan kegiatan pengawasan dan pemberian nasehat.

Pada tahun 2024, KNR telah melaksanakan rapat sebanyak 9 (sembilan) kali rapat dengan frekuensi kehadiran masing-masing anggota Komite sebagai berikut:

The NRC meeting policy has been regulated in the NRC Charter, which regulates the implementation of NRC meetings at least once in 3 (three) months or quarterly to discuss the Committee Work Program and the results of the analysis to provide advice and recommendations to assist the duties of the Board of Commissioners in carrying out supervisory and advisory activities.

In 2024, the NRC held 9 (nine) meetings with the frequency of attendance of each Committee member as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Wajib Rapat Total Mandatory Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Tingkat Kehadiran Attendance Rate (%)
Hartanto	Ketua Chairman	5	5	100%
Hamdi Zainal	Anggota Member	9	8	89%
Ahmad Sofyan	Anggota Member	9	9	100%



Penilaian Kinerja Komite Nominasi & Remunerasi

Performance Assessment of the Nomination & Remuneration Committee

Penilaian kinerja KNR dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali. Penilaian kinerja dilakukan untuk menilai kinerja KNR selaku kelompok maupun anggotanya selaku individu. Penilaian kinerja KNR dilakukan berdasarkan realisasi dan penyelesaian program kerja yang tercantum dalam Rencana Kerja KNR dan dilaporkan kepada Dewan Komisaris dalam laporan KNR yang meliputi pelaksanaan tugas komite di bidang nominasi & remunerasi. Hasil penilaian tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi Dewan Komisaris untuk mengangkat kembali dan/ atau memberhentikan anggota KNR untuk periode jabatan berikutnya.

Pada tahun 2024, penilaian anggota KNR dilakukan dengan menggunakan metode 360 derajat dan AKHLAK *Behavioural Survey* (ABS), dengan capaian nilai sebagai berikut:

The NRC performance is assessed at least once a year. The performance assessment is carried out to assess the performance of the NRC as a group and its members as individuals. The NRC performance assessment is carried out based on the realization and completion of the work program stated in the NRC Work Plan and reported to the Board of Commissioners in the NRC report, which includes the implementation of committee duties in the field of nomination & remuneration. The results of the assessment are taken into consideration for the Board of Commissioners to reappoint and/or dismiss members of the NRC for the next term of office.

In 2024, the assessment of NRC members was carried out using the 360-degree method and AKHLAK *Behavioural Survey* (ABS), with the following score achievements:

Nama Anggota Komite Name of Committee Member	Skor Nilai Score	Predikat Predicate
Ahmad Sofyan	95,2	High

Komite Pemantau Risiko & Investasi

Risk Monitoring & Investment Committee

Komite Pemantau Risiko & Investasi dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat terkait dengan aktivitas dan inisiatif investasi Perusahaan yang termasuk dalam lingkup kewenangan Dewan Komisaris.

The Risk Monitoring & Investment Committee is established to assist the Board of Commissioners in performing its supervisory and advisory functions related to the Company's investment activities and initiatives that fall within the Board's authority.

Piagam Komite Pemantau Risiko & Investasi

Charter of the Risk Monitoring & Investment Committee

Komite Pemantau Risiko & Investasi memiliki Piagam sebagai pedoman kerja dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengawasan serta pemberian nasihat kepada Dewan Komisaris. Piagam Komite Pemantau Risiko & Investasi PTK ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No. PK-114/DEKOM.PTK/2024-S0 tanggal 30 Desember 2024. Piagam Komite Pemantau Risiko & Investasi tersebut mengatur berbagai hal terkait pembentukan dan keanggotaan KPRI, pelaksanaan tugas, tanggung jawab, kewajiban Ketua dan Anggota serta pelaporan/evaluasi kinerja dan kode etik.

The Risk Monitoring & Investment Committee has a Charter as a working guideline in carrying out its duties and responsibilities in supervising and advising the Board of Commissioners. PTK's Risk Monitoring & Investment Committee Charter is stipulated based on the Decision of the Board of Commissioners No. PK-114/DEKOM.PTK/2024-S0 dated December 30, 2024. The Risk Monitoring & Investment Committee Charter regulates various matters related to the establishment and membership of the RMIC, the implementation of duties, responsibilities, and obligations of the Chairman and Members as well as performance reporting/evaluation and code of conduct.

Masa Jabatan Komite Pemantau Risiko & Investasi

Term of Office of the Risk Monitoring & Investment Committee

Dalam Piagam Komite Pemantau Risiko & Investasi diatur bahwa masa jabatan anggota Komite paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali selama 2 (dua) tahun. Keanggotaan anggota Komite Pemantau Risiko & Investasi dapat berakhir sewaktu-waktu sebelum masa jabatan berakhir sesuai keputusan Dewan Komisaris.

The Risk Monitoring & Investment Committee Charter stipulates that the term of office for Investment Committee members is a maximum of 3 (three) years and may be extended once for 2 (two) years. Membership in the Investment Committee can be terminated at any time before the term expires according to the decision of the Board of Commissioners.

Susunan dan Komposisi Komite Pemantau Risiko & Investasi

Composition of the Risk Monitoring & Investment Committee

Pada tahun 2024 terdapat perubahan komposisi keanggotaan Komite Pemantau Risiko & Investasi sehubungan dengan adanya pengangkatan Sdr. Amir Hamzah sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko & Investasi. Dengan demikian, susunan dan komposisi anggota Komite Pemantau Risiko & Investasi per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

In 2024, there was a change in the composition of the Risk Monitoring & Investment Committee membership due to the appointment of Mr. Amir Hamzah as Chairman of the Risk Monitoring & Investment Committee. Thus, the composition of the Risk Monitoring & Investment Committee as of December 31, 2024, is as follows:

Tabel Komposisi Komite Pemantau Risiko & Investasi Tahun 2024

Table of the Composition of the Risk Monitoring & Investment Committee in 2024

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Periode dan Masa Jabatan Period and Term of Office
Amir Hamzah	Ketua/Komisaris Chairman/ Commissioner	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. Kpts-089/DEKOM.PTK/2024-S8 Tanggal 01 September 2024 Decree of the Board of Commissioners No. Kpts-089/DEKOM.PTK/2024-S8 Dated September 1, 2024	Mengikuti masa jabatan Komisaris Following the Commissioner's term of office
Edy Ariawan	Anggota Member	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. Kpts-066/DEKOM.PTK/2024-S8 Tanggal 27 Mei 2024 Decree of the Board of Commissioners No. Kpts-066/DEKOM.PTK/2024-S8 Dated May 27, 2024	Periode 2, 5 Juli 2024 s.d 5 Juli 2026 2 nd Period, July 5, 2024 up to July 5, 2026
Dian Vita Alpha Suandi	Anggota Member	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. SK-160 /DEKOM.PTK/2023 Tanggal 24 Oktober 2023 Decree of the Board of Commissioners No. SK- 160/DEKOM.PTK/2023 Dated October 24, 2023	Periode 1, 01 November 2023 s.d 31 Oktober 2025 1 st Period, November 1, 2023 up to October 31, 2025



Profil Komite Pemantau Risiko & Investasi

Profil Komite Pemantau Risiko & Investasi



Amir Hamzah

Ketua Komite Pemantau Risiko & Investasi/Komisaris
Chairman of the Risk Monitoring & Investment
Committee/Commissioner

Diangkat sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko & Investasi pada tanggal 01 September 2024 untuk periode pertama kalinya. Profil Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.

Appointed as Chairman of the Risk Monitoring & Investment Committee on September 1, 2024, for the first period. His profile can be found in the Board of Commissioners Profile section of this Annual Report.



Edi Ariawan

Anggota Komite Pemantau Risiko & Investasi
Member of the Risk Monitoring & Investment Committee

Domisili Domicile
Bekasi Bekasi

Kewarganegaraan Citizenship
Indonesia Indonesian

Usia/Tempat & Tanggal Lahir Age/Place & Date of Birth
57 tahun / Surabaya, 15 Februari 1967
57 years old, born in Surabaya on February 15, 1967

Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. Kpts-066/DEKOM.PTK/2024-S8 Tanggal 27 Mei 2024. Decree of the Board of Commissioners No. Kpts-066/DEKOM.PTK/2024-S8 Dated May 27, 2024.
Riwayat Pendidikan Educational Background	Menyelesaikan pendidikan S1 di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya pada tahun 1985–1991. Kemudian melanjutkan studi S2 di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta pada tahun 2009–2011. Completed his undergraduate education at the Sepuluh Nopember Institute of Technology (ITS) Surabaya in 1985–1991. Then continued his Master's study at Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta in 2009–2011.
Sertifikasi Profesi yang Dimiliki Professional Certifications	Certification in Audit Committee Practices "CACP" (2024) Certification in Audit Committee Practices "CACP" (2024)
Pengalaman Kerja Work Experience	Beliau pernah menjabat sebagai Manager Fleet Inspection & Assurance di PT Pertamina (Persero) pada 2017–2019. Selanjutnya, menjabat sebagai VP Logistics Optimization PT Pertamina (Persero) pada 2020–2021 dan pada tahun 2021–2023 menjabat sebagai VP Government Assignment PT Pertamina (Persero). He has served as the Fleet Inspection & Assurance Manager at PT Pertamina (Persero) in 2017–2019. Furthermore, he served as VP of Logistics Optimization of PT Pertamina (Persero) in 2020–2021 and as VP of Government Assignment of PT Pertamina (Persero) in 2021–2023. Concurrent Position: Does not have any concurrent positions
Rangkap Jabatan Rangkap Jabatan	Tidak memiliki rangkap jabatan Does not have any concurrent positions
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan Anggota Komite lainnya, Dewan Komisaris dan Direksi, maupun Pemegang Saham Utama dan Pengendali. Has no affiliation with other Committee Members, the Board of Commissioners and Board of Directors, as well as Major and Controlling Shareholders.



Dian Vita Alpha Suandi

Anggota Komite Pemantau Risiko & Investasi
Member of the Risk Monitoring & Investment Committee

Domisili Domicile
Jakarta Jakarta

Kewarganegaraan Citizenship
Indonesia Indonesian

Usia/Tempat & Tanggal Lahir Age/Place & Date of Birth
42 tahun / Yogyakarta, 4 September 1982
42 years old, born in Yogyakarta on September 4, 1982

Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. SK- 160 /DEKOM.PTK/2023 Tanggal 24 Oktober 2023. Decree of the Board of Commissioners No. SK- 160 /DEKOM.PTK/2023 Dated October 24, 2023.
Riwayat Pendidikan Educational Background	Meraih gelar Sarjana Jurusan Teknik Industri, Institut Teknologi Bandung (2004) Bachelor's degree in Industrial Engineering, Bandung Institute of Technology (2004).
Sertifikasi Profesi yang Dimiliki Professional Certifications	Certified Project Management Professional (PMP) dan Certified Professional Marketer Asia (CPMA). Certified Project Management Professional (PMP) and Certified Professional Marketer Asia (CPMA).
Pengalaman Kerja Work Experience	Sebelum menjabat sebagai anggota Komite, Beliau pernah menjabat sebagai Sekretaris Dekom PT Pertamina Trans Kontinental (Okt 2021- Okt 2023), Manager PMO Downstream PT. Pertamina (Persero) pada 2023-2024 dan Manager Downstream Government Assignment di tahun 2023. Prior to serving as a member of the Committee, she served as Secretary of the Board of Directors of PT Pertamina Trans Continental (Oct 2021- Oct 2023), Manager of Downstream PMO of PT Pertamina (Persero) in 2023-2024, and Manager of Downstream Government Assignment in 2023.
Rangkap Jabatan Concurrent Position	Saat ini menjabat sebagai Manager PMO Upstream di PT. Pertamina (Persero) Currently serves as Upstream PMO Manager at PT Pertamina (Persero).
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan sesama anggota Komite, anggota Direksi, Dewan Komisaris. Namun memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Utama/Pengendali atas jabatan rangkapnya. Has no affiliation with fellow Committee members, members of the Board of Directors, or Board of Commissioners. However, she has an affiliation with the Major/Controlling Shareholder for her concurrent position.

Independensi Komite Pemantau Risiko & Investasi

Independence of the Risk Monitoring & Investment Committee

Seluruh Anggota Komite Pemantau Risiko & Investasi yang berasal dari pihak independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham yang dapat mempengaruhi kemampuannya bertindak independen.

All members of the Risk Monitoring & Investment Committee who come from independent parties have no financial, management, share ownership, and/or family relationships with the Board of Commissioners, Board of Directors, and Shareholders that may affect their ability to act independently.

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Komite Pemantau Risiko & Investasi

Duties, Responsibilities, and Authorities of the Risk Monitoring & Investment Committee

Komite Pemantau Risiko & Investasi dalam melakukan tugas pendampingan, pengawasan, serta monitoring pengelolaan investasi dan manajemen risiko PTK memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi atas perencanaan investasi PTK termasuk anak perusahaannya.

In assisting, overseeing, and monitoring the execution of PTK's investments, the Risk Monitoring & Investment Committee has the following duties and responsibilities:

1. Evaluating the investment planning of PTK, including its subsidiaries.



2. Melakukan monitoring terhadap eksekusi pelaksanaan investasi berdasar rencana kerja PTK dan analisis paska investasi (*post mortem evaluation*).
3. Melakukan evaluasi atas asesmen dan penetapan tingkat risiko PTK termasuk anak perusahaannya yang telah dilakukan oleh Perusahaan.
4. Melakukan monitoring atas pengelolaan risiko yang dilaksanakan oleh Direksi dan jajarannya.
5. Melakukan evaluasi strategi pengelolaan risiko baik operasional, pengembangan Perusahaan dan investasi.
6. Melakukan review atas permohonan Direksi kepada Dewan Komisaris atas rencana Perusahaan, antara lain:
 - Investasi, Divestasi, usulan FUPP.
 - Pembentukan Anak Perusahaan.
 - Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP).
 - Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP).
 - Inisiatif lain terkait *Business Optimization*
7. Melakukan evaluasi kebijakan investasi dan manajemen risiko, baik dalam hal operasional dan pengembangan Perusahaan.
8. Melaporkan dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris termasuk Anak Perusahaan dalam seluruh aktivitas Perusahaan terkait investasi dan manajemen risiko.
9. Menyediakan bahan rujukan dan informasi untuk keperluan Dewan Komisaris terkait pengelolaan investasi dan manajemen risiko, apabila diminta.
10. Membuat rencana kerja tahunan yang diselaraskan dengan rencana kerja tahunan (Rencana Kerja Anggaran Perseroan/RKAP) atas kebijakan investasi Perseroan.
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris yang terkait dengan investasi dan manajemen risiko.

Komite Pemantau Risiko & Investasi memiliki wewenang sebagai berikut:

1. Komite bekerja secara kolektif dan bersifat mandiri dalam melaksanakan tugasnya dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris
2. Komite mempunyai wewenang untuk mendapatkan informasi Perusahaan tentang investasi, penggunaan dana terkait investasi, aset serta sumber daya Perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas.
3. Berkomunikasi dan berkoordinasi langsung dengan setiap pihak, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi perencanaan dan eksekusi investasi maupun pelaksanaan manajemen risiko terkait tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko & Investasi.
4. Menyusun, mengevaluasi, mengubah dan melaksanakan Piagam (*Charter*) termasuk menentukan prosedur dan lingkup pelaksanaan pekerjaan Komite Pemantau Risiko & Investasi dengan persetujuan Dewan Komisaris.

2. Monitoring the execution of investment implementation based on PTK's work plan and post-mortem evaluation.
3. Evaluating the assessment and determination of the risk level of PTK, including its subsidiaries, that have been carried out by the Company.
4. Monitoring the risk management carried out by the Board of Directors and its staff.
5. Evaluating risk management strategies in operational, corporate development, and investment.
6. Reviewing the request of the Board of Directors to the Board of Commissioners on the Company's plans, among others:
 - Investment, Divestment, FUPP proposal.
 - Establishment of Subsidiaries.
 - Company's Annual Budget & Operational Plan (ABOP).
 - Company's Long-Term Plan (RJPP).
 - Other initiatives related to Business Optimization
7. Evaluating investment and risk management policies, both in terms of the Company's operations and development.
8. Reporting and providing recommendations to the Board of Commissioners, including Subsidiaries, in all Company activities related to investment and risk management.
9. Providing reference materials and information for the needs of the Board of Commissioners related to investment management and risk management, if requested.
10. Preparing an annual work plan that is aligned with the annual work plan (Company Budget Work Plan/ABOP) on the Company's investment policy.
11. Carrying out other duties assigned by the Board of Commissioners related to investment and risk management.

The Risk Monitoring & Investment Committee has the authority as follows:

1. The Committee works collectively and independently in carrying out its duties and is responsible to the Board of Commissioners.
2. The Committee has the authority to obtain Company information on investments, use of funds related to investments, assets, and other Company resources related to the implementation of its duties.
3. Communicating and coordinating directly with each party, including the Board of Directors and those who carry out the function of investment planning and execution, as well as the implementation of risk management related to the duties and responsibilities of the Risk & Investment Monitoring Committee.
4. Preparing, evaluating, amending, and implementing the Charter, including determining the procedures and scope of work of the Risk Monitoring & Investment Committee with the approval of the Board of Commissioners.

5. Apabila diperlukan Komite dapat mempekerjakan tenaga ahli dan/atau konsultan untuk membantu Komite terkait dengan rencana pengembangan usaha Perusahaan dengan persetujuan tertulis Dewan Komisaris dan atas beban Perusahaan yang dialokasikan dari anggaran biaya Dewan Komisaris.
5. If necessary, the Committee may hire experts and/or consultants to assist the Committee in relation to the Company's business development plan with the written approval of the Board of Commissioners and at the expense of the Company allocated from the Board of Commissioners' expense budget.

Pengembangan Kompetensi Tahun 2024

Competency Development in 2024

Kebijakan PTK terkait pengembangan kompetensi Komite Pemantau Risiko & Investasi mengacu pada ketentuan pengembangan kompetensi sebagaimana tercantum dalam Piagam Komite Pemantau Risiko & Investasi. Sepanjang tahun 2024 anggota Komite Pemantau Risiko & Investasi telah mengikuti berbagai program pendidikan dan pelatihan sebagai berikut:

PTK's policy regarding the competency development of the Risk Monitoring & Investment Committee refers to the competency development provisions as stated in the Risk Monitoring & Investment Committee Charter. Throughout 2024, members of the Risk & Investment Monitoring Committee participated in various education and training programs as follows:

Nama Peserta Name of Participants	Topik Pelatihan Topics of Training	Tanggal Pelaksanaan Date of Implementation
Amir Hamzah	<i>The Art of Risk Management</i>	26 November 2024 November 26, 2024
Edi Ariawan	<i>Workshop Tindaklanjut Eksekusi Proyek Investasi Tahun 2024</i> Workshop on Follow-up of Investment Project Execution in 2024	12 Februari 2024 February 12, 2024
	<i>Workshop Finalisasi Atribut Organisasi dan Rapat Koordinasi STK PPL 2024</i> Workshop on Finalization of Organizational Attributes and Coordination Meeting of STK PPL 2024	7 - 9 Maret 2024 March 7-9, 2024
	<i>Inhouse Training Certification in Audit Committee Practices (CACP)</i>	30 September 2024 September 30, 2024
	<i>The Art of Risk Management</i>	26 November 2024 November 26, 2024
Dian Vita Alpha Suandi	<i>The Art of Risk Management</i>	26 November 2024 November 26, 2024

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Pemantau Risiko & Investasi

Report on the Activities of the Risk Monitoring & Investment Committee

Sepanjang tahun 2024 Komite Pemantau Risiko & Investasi telah melakukan telaah dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris antara lain terkait:

1. Melakukan review atas rencana investasi dalam usulan RKAP tahun 2024 berikut perubahannya yang disampaikan dalam rekomendasi Dewan Komisaris.
 2. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap realisasi kinerja investasi dan pengelolaan manajemen risiko di tahun berjalan yang disampaikan Direksi melalui laporan kinerja manajemen setiap bulan.
- Throughout 2024, the Risk Monitoring & Investment Committee conducted reviews and provided recommendations to the Board of Commissioners, including:
1. Reviewing the investment plan in the proposed 2024 ABOP and its amendments submitted at the recommendation of the Board of Commissioners.
 2. Monitoring and evaluating the realization of investment performance and risk management in the current year submitted by the Board of Directors through monthly management performance reports.



3. Melakukan monitoring eksekusi investasi sesuai RKAP tahun 2024 dan analisis pasca investasi (*post mortem evaluation*) atas investasi yang telah selesai selama 3 tahun ke belakang.
4. Monitoring pengelolaan risiko yang dijalankan oleh Perseroan.
5. Evaluasi terhadap tingkat risiko yang telah ditetapkan oleh Direksi.
6. Melakukan review atas usulan FUPP yang disampaikan dalam rekomendasi Dewan Komisaris.
7. Monitoring dan review secara periodik kegiatan investasi yang telah dilaksanakan oleh Perusahaan dan Anak Perusahaan yang meliputi kepatuhan dalam melaksanakan kebijakan investasi yang telah ditetapkan, termasuk pula risiko dalam kegiatan investasi.
8. Melakukan rapat koordinasi dengan fungsi Business Optimization selaku koordinator investasi dan fungsi-fungsi lainnya selaku pengusul dan pelaksana eksekusi proyek investasi terkait pencapaian realisasi fisik bulanan dan status kendala serta tindak lanjut yang diperlukan.
9. Melakukan evaluasi atas kebijakan investasi dan manajemen risiko, termasuk mengusulkan perbaikan jika dibutuhkan.
10. Melaksanakan kunjungan langsung (*site visit*) ke Region maupun wilayah kerja PTK sebagai bagian dari tahapan close monitoring.

3. Monitoring the execution of investments in accordance with the 2024 ABOP and post-mortem evaluation of investments that have been completed over the past three years.
4. Monitoring the risk management carried out by the Company.
5. Evaluation of the level of risk set by the Board of Directors.
6. Reviewing the FUPP proposal submitted in the recommendation of the Board of Commissioners.
7. Periodic monitoring and review of investment activities carried out by the Company and its Subsidiaries, including compliance in implementing the investment policy that has been determined, as well as risks in investment activities.
8. Holding coordination meetings with the Business Optimization function as investment coordinator and other functions as proposers and executors of investment projects related to the achievement of monthly physical realization and the status of constraints and necessary follow-up.
9. Evaluating investment and risk management policies, including proposing improvements if needed.
10. Carrying out site visits to the Region and PTK working areas as part of the close monitoring stage.

Rapat Komite Pemantau Risiko & Investasi

Risk Monitoring & Investment Committee Meetings

Komite Pemantau Risiko & Investasi secara rutin menyelenggarakan rapat komite untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan rencana investasi dan manajemen risiko di Perusahaan. Berdasarkan piagam Komite Pemantau Risiko & Investasi, rapat dapat diadakan sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun. Pelaksanaan rapat dapat digabung bersama dengan pelaksanaan rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan setiap bulan.

Pada tahun 2024, Komite Pemantau Risiko & Investasi telah melaksanakan rapat sebanyak 17 kali rapat dengan frekuensi kehadiran masing-masing anggota Komite dalam rapat sebagai berikut:

The Risk Monitoring & Investment Committee regularly holds committee meetings to discuss matters relating to investment plans and risk management in the Company. Based on the charter of the Risk & Investment Monitoring Committee, meetings may be held at least 4 (four) times a year. The implementation of the meeting can be combined with the implementation of the Board of Commissioners meeting, which is held every month.

In 2024, the Risk Monitoring & Investment Committee held 17 meetings with the frequency of attendance of each Committee member in the meetings as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Wajib Rapat Total Mandatory Meeting	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Tingkat Kehadiran (%) Attendance Rate (%)
Amir Hamzah	Ketua Chairman	17	15	94%
Edy Ariawan	Anggota Member	17	17	100%
Dian Vita Alpha Suandi	Anggota Member	17	16	94%

Penilaian Kinerja Komite Pemantau Risiko & Investasi

Performance Assessment of the Risk Monitoring & Investment Committee

Penilaian kinerja Komite Pemantau Risiko & Investasi dilakukan oleh Dewan Komisaris melalui pemantauan dan evaluasi atas laporan kinerja Komite dalam mencapai target-target dari program kerja Komite. Adapun realisasi atas evaluasi Komite Pemantau Risiko & Investasi tahun 2024, adalah sebagai berikut:

The performance assessment of the Risk Monitoring & Investment Committee is conducted by the Board of Commissioners through monitoring and evaluation of the Committee's performance report in achieving the targets of the Committee's work program. The realization of the evaluation of the Risk Monitoring & Investment Committee in 2024, is as follows:

No.	Nama Anggota Komite Name of Committee Member	Skor Nilai Score	Predikat Predicate
1	Edi Ariawan	94,4	High
2	Dian Vita Alpha Suandi	93,9	High

Sekretaris Perusahaan

Corporate Secretary

Sekretaris Perusahaan memiliki peran strategis sebagai salah satu organ pendukung Direksi dalam penerapan prinsip-prinsip GCG. Fungsi ini berperan penting dalam menjembatani komunikasi antara manajemen, Dewan Komisaris, pemegang saham, otoritas pasar modal, serta pemangku kepentingan lainnya. Dalam menjalankan tugasnya, Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab atas penyampaian keterbukaan informasi secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), serta penyusunan dan pendistribusian dokumen korporasi secara akurat. Selain itu, Sekretaris Perusahaan juga memberikan dukungan administratif kepada Direksi dan Dewan Komisaris, serta memastikan kepatuhan Perusahaan terhadap seluruh regulasi yang relevan.

The Corporate Secretary has a strategic role as one of the supporting organs of the Board of Directors in the implementation of GCG principles. This function plays an important role in bridging communication between management, the Board of Commissioners, shareholders, capital market authorities, and other stakeholders. In carrying out its duties, the Corporate Secretary is responsible for the submission of information disclosure promptly and in accordance with applicable laws and regulations, the organization of the General Meeting of Shareholders (GMS), and the preparation and distribution of corporate documents accurately. In addition, the Corporate Secretary provides administrative support to the Board of Directors and Board of Commissioners, and ensures the Company's compliance with all relevant regulations.



Fungsi Sekretaris Perusahaan PTK dijalankan oleh Vice President (VP) Legal & Relation, yang juga berperan sebagai pengelola hubungan dengan para pemegang saham serta bertanggung jawab atas administrasi korporasi, pencatatan notulen rapat, penyusunan kebijakan internal, serta perencanaan dan pengendalian komunikasi eksternal perusahaan dengan para pemangku kepentingan.

The Corporate Secretary function of PTK is carried out by the Vice President (VP) of Legal & Relations, who also serves as the manager of relations with shareholders and is responsible for corporate administration, recording meeting minutes, drafting internal policies, and planning and controlling the Company's external communications with stakeholders.

Struktur Organisasi Sekretaris Perusahaan

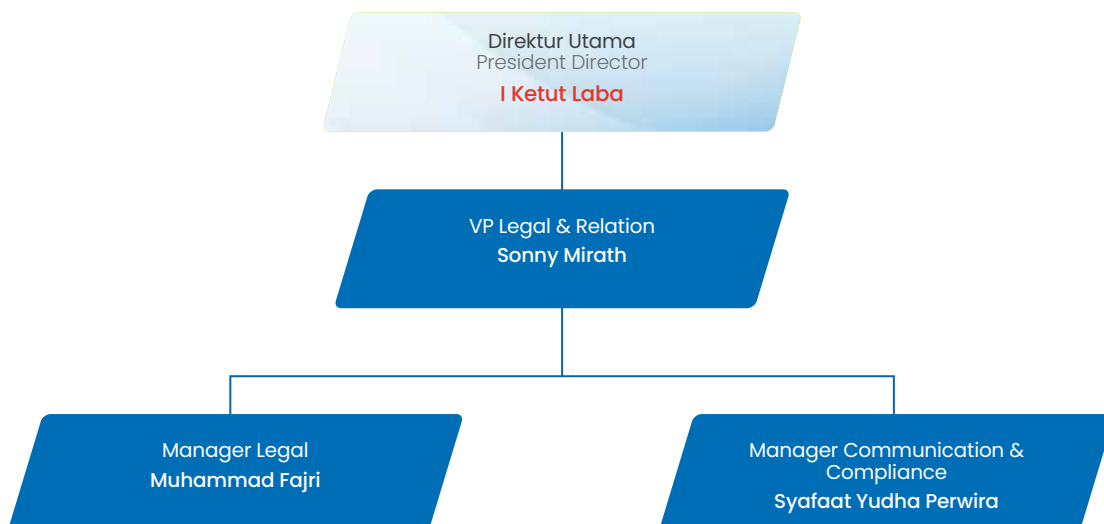
Organizational Structure of Corporate Secretary

Struktur organisasi Sekretaris Perusahaan dirancang secara fungsional untuk memastikan bahwa setiap peran dan tanggung jawab yang melekat pada fungsi ini dapat dijalankan secara optimal dan terarah. Dalam mendukung pelaksanaan peran strategisnya, fungsi Sekretaris Perusahaan berada di bawah koordinasi Vice President (VP) Legal & Relation.

The organizational structure of the Corporate Secretary is functionally designed to ensure that each role and responsibility attached to this function can be carried out optimally and purposefully. In supporting the implementation of its strategic role, the Corporate Secretary function is under the coordination of the Vice President (VP) of Legal & Relations.

Secara organisasi, Sekretaris Perusahaan berada langsung di bawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Dalam pelaksanaan tugasnya, Sekretaris Perusahaan membawahi beberapa fungsi dan bidang kerja yang telah diatur secara resmi melalui Keputusan Direksi No. Kpts-107/PTK0000/2024-S8 tanggal 21 Desember 2024 tentang Struktur Organisasi BOD-1 ke bawah PT Pertamina Trans Kontinental. Struktur yang diterapkan juga memberikan ruang bagi Sekretaris Perusahaan untuk menjalankan perannya sebagai mitra strategis bagi Direksi dan Dewan Komisaris, khususnya dalam memastikan kelancaran fungsi-fungsi tata kelola di Perusahaan.

Organizationally, the Corporate Secretary is directly under the coordination of and responsible to the President Director. In carrying out its duties, the Corporate Secretary oversees several functions and work fields that have been formally regulated through Board of Directors Decree No. Kpts-107/PTK0000/2024-S8 dated 21 December 2024 concerning the Organizational Structure of BOD-1 and below PT Pertamina Trans Kontinental. The implemented structure also provides space for the Corporate Secretary to carry out its role as a strategic partner for the Board of Directors and Board of Commissioners, especially in ensuring the smooth running of governance functions in the Company.



Profil Pejabat Sekretaris Perusahaan

Profile of the Corporate Secretary Officer

Per 31 Desember 2024 Sekretaris Perusahaan dijabat oleh Sdr. Sonny Mirath yang ditunjuk Direksi sebagai Vice President Legal and Relation berdasarkan Surat Keputusan Mutasi Jabatan VP Corporate Culture & Business Partner PT Pertamina (Persero) No. SKMJ-00500/K20500/2024-S8. Penetapan ini telah mempertimbangkan kualifikasi pendidikan, pengalaman kerja dan kualifikasi yang dipersyaratkan oleh Perusahaan.

As of December 31, 2024, the Corporate Secretary was held by Mr. Sonny Mirath, who was appointed by the Board of Directors as Vice President of Legal and Relations based on the Decision Letter of Position Mutation of VP of Corporate Culture & Business Partner of PT Pertamina (Persero) No. SKMJ-00500/K20500/2024-S8. This appointment has considered the educational qualifications, work experience, and qualifications required by the Company.

	
Sonny Mirath Vice President Legal and Relation Vice President of Legal and Relation	
Domisili Domicile Jakarta Jakarta	
Kewarganegaraan Citizenship Indonesia Indonesian	
Usia Age 39 tahun per 31 Desember 2024 39 years old as of December 31, 2024	
Menjabat sebagai Fungsi Sekretaris Perusahaan sejak 9 Oktober 2023 Served as the Corporate Secretary Function since October 9, 2023	
Dasar Hukum Penunjukan Basis of Appointment	Surat Keputusan Mutasi Jabatan VP Corporate Culture & Business Partner PT Pertamina (Persero) No. SKMJ-00500/K20500/2024-S8. Decree on Transfer of Position of VP of Corporate Culture & Business Partner of PT Pertamina (Persero) No. SKMJ-00500/K20500/2024-S8.
Riwayat Pendidikan dan Sertifikasi Educational Background and Certification	Meraih gelar Sarjana Ilmu Komunikasi (S.I.Kom) Bidang Ilmu Komunikasi dan Sosial Humaniora dari Universitas Padjadjaran, Bandung tahun 2007. Beliau juga telah memperoleh Sertifikasi Kompetensi di bidang Enterprise Risk Management (ERM) berbasis ISO 31000, dengan gelar <i>Certified Risk Professional (CRP)</i> dan <i>Certified Risk Associate (CRA)</i> . He holds a Bachelor's degree in Communication Science (S.I.Kom) in Communication Science and Social Humanities from Universitas Padjadjaran, Bandung in 2007. He has also obtained Competency Certification in the field of Enterprise Risk Management (ERM) based on ISO 31000, with the title of Certified Risk Professional (CRP) and Certified Risk Associate (CRA).
Pengalaman Kerja Pengalaman Kerja	Beliau memulai kariernya di luar Grup Pertamina pada PT Agrakom Para Relatika di Jakarta pada tahun 2007 hingga 2010. Sejak tahun 2010, beliau bergabung dengan PT Pertamina (Persero) melalui program Early Professional Development di Kantor Pusat, di bawah fungsi Corporate Secretary. Selanjutnya, beliau mengemban berbagai posisi strategis di lingkungan Pertamina dan anak usahanya, antara lain sebagai Assistant Customer Relation untuk wilayah Sumatera I di Medan, Junior Officer Administration dan Jr. Officer BOD Support di Kantor Pusat, serta Officer Business Support & Facilitation. Selanjutnya, beliau memiliki penugasan sebagai Officer CNG Industry dan Analyst Business Advancement di Kantor Pusat Pertamina. Pada tahun 2019, beliau dipercaya sebagai Assistant Manager Commercial Operation & Administration di PT Pertamina Internasional EP (PIEP), dilanjutkan dengan jabatan Assistant Manager CommProducts, OpExl & Trading di Upstream Regional 5. Sejak tahun 2022 hingga 2024, beliau menjabat sebagai Head of Commercial Opportunity di Regional Hulu 5, Kantor Pusat Jakarta.



	He started his career outside Pertamina Group at PT Agrakom Para Relatika in Jakarta from 2007 to 2010. Since 2010, he joined PT Pertamina (Persero) through the Early Professional Development program at the Head Office under the Corporate Secretary function. Subsequently, he held various strategic positions within Pertamina and its subsidiaries, including as Assistant Customer Relation for Sumatera I region in Medan, Junior Officer Administration and Jr. Officer BOD Support at Head Office, and Officer Business Support & Facilitation. Furthermore, he had an assignment as CNG Industry Officer and Business Advancement Analyst at Pertamina Headquarters. In 2019, he was appointed as Assistant Manager of Commercial Operation & Administration at PT Pertamina International EP (PIEP), followed by the position of Assistant Manager CommProducts, OpExl & Trading at Upstream Regional 5. From 2022 to 2024, he served as Head of Commercial Opportunity at Upstream Regional 5, Jakarta Headquarters.
Rangkap Jabatan Rangkap Jabatan	Tidak ada None
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham. Has no affiliation with members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and/or Shareholders.

Pedoman Kerja Sekretaris Perusahaan

Guidelines for the Corporate Secretary's Work

Pelaksanaan Fungsi Sekretaris Perusahaan mengacu pada Board Manual serta uraian tugas dan tanggung jawab yang tercantum dalam Surat Keputusan Direksi terkait pembentukan organ Sekretaris Perusahaan. Pedoman tersebut mencakup tugas pokok Sekretaris Perusahaan, uraian tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan, serta pedoman komunikasi Perusahaan dan hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Fungsi Sekretaris Perusahaan.

The implementation of the Corporate Secretary Function refers to the Board Manual and the descriptions of duties and responsibilities stated in the Board of Directors' Decree regarding the establishment of the Corporate Secretary organ. These guidelines include the main tasks of the Corporate Secretary, descriptions of the Corporate Secretary's duties and responsibilities, as well as guidelines for corporate communication and other matters related to the implementation of the Corporate Secretary Function.

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

Duties and Responsibilities of the Corporate Secretary

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Mengevaluasi dan merekomendasi sistem tata kerja Legal & Relation kepada direksi berdasarkan pedoman yang berlaku.
2. Menyusun rencana kerja dan anggaran jangka pendek dan jangka panjang corporate secretary serta memonitor, dan mengevaluasi pelaksanaannya.
3. Memastikan pengesahan dokumen RJPP dan RKAP dalam RUPS sesuai dengan target yang ditentukan.
4. Mengkoordinir agenda rapat direksi dan rapat manajemen.
5. Membangun, memelihara, dan meningkatkan citra positif perusahaan di mata masyarakat dan stakeholders, serta meminimalisir dan menghindarkan perusahaan dari timbulnya citra negatif, permasalahan hukum litigasi dan non-litigasi serta kehumasan yang berdampak pada Perusahaan.

The duties and responsibilities of the Corporate Secretary are as follows:

1. Evaluate and recommend Legal & Relation workflow systems to the board of directors based on applicable guidelines.
2. Develop short-term and long-term work plans and budgets for the Corporate Secretary and monitor and evaluate their implementation.
3. Ensure the approval of RJPP and RKAP documents in the GMS according to the specified targets.
4. Coordinate the agenda of board of directors' meetings and management meetings.
5. Build, maintain, and enhance the Company's positive image in the eyes of the public and stakeholders, as well as minimize and avoid negative image, legal litigation and non-litigation issues, and public relations problems affecting the Company.

6. Mengevaluasi dan memonitor pelaksanaan program-program CSR secara efektif, sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan tepat sasaran, sebagai bagian dari kepatuhan korporasi sekaligus meningkatkan citra positif Perusahaan di mata masyarakat. 7. Memastikan laporan kegiatan pengembangan, pembinaan, penerapan dan penegakan prinsip-prinsip GCG. 8. Mengkomunikasikan kebijakan Perusahaan dan pemerintah baik secara internal maupun eksternal perusahaan. 9. Menyelenggarakan kegiatan administrasi kesekretariatan Perusahaan, termasuk agenda Direksi, pemeliharaan database, dokumen asli, dan laporan-laporan Perusahaan. 10. Menyetujui dan memastikan kegiatan protokoler Direksi Perusahaan. 11. Mengendalikan data dan informasi manajemen yang akurat dan valid bagi kepentingan Perusahaan dan pemegang saham secara periodik dan tahunan. 12. Memastikan terbaruinya peraturan-peraturan perundangan dan regulasi lain yang berkaitan dengan proses bisnis dan produk (<i>compliance issue</i>), serta perijinan dan aspek hukum lain bagi Perusahaan dan anak perusahaan secara tepat waktu. 13. Menyetujui laporan bulanan/periodik.	6. Evaluate and monitor the effective implementation of CSR programs, in line with established plans and targets, as part of corporate compliance while enhancing the Company's positive image in the eyes of the public. 7. Ensure reports on the development, implementation, and enforcement of GCG principles. 8. Communicate Company policies and government policies both internally and externally. 9. Organize Company secretarial administrative activities, including board agendas, database maintenance, original documents, and Company reports. 10. Approve and ensure the Company's directorial protocol activities. 11. Control accurate and valid management data and information periodically and annually for the Company's and shareholders' interests. 12. Ensure the updating of legal regulations and other regulations related to business processes and products (<i>compliance issues</i>), as well as licensing and other legal aspects for the Company and its subsidiaries in a timely manner. 13. Approve monthly/periodic reports.

Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan Tahun 2024

Performance of Corporate Secretary Duties in 2024

Sepanjang tahun 2024, Sekretaris Perusahaan telah melaksanakan berbagai program kerja antara lain sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 14 Juni 2024 dan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham;
2. Mengkoordinasikan dan mendokumentasikan 28 kali rapat internal Direksi serta 12 kali rapat gabungan bersama Dewan Komisaris;
3. Menyusun dan menyampaikan laporan berkala kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham, yang meliputi: Laporan Manajemen Triwulanan, Laporan Manajemen Tahunan, Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan, serta Laporan Sekretaris Perusahaan;
4. Menyusun dan melakukan peninjauan atas Pedoman Tata Laksana Surat dan Kearsipan PTK, serta melaksanakan sosialisasi dan pemantauan terhadap implementasinya di seluruh unit kerja;
5. Mengkoordinasikan pelaksanaan program TJSL Perusahaan sepanjang tahun 2024 sebagai wujud komitmen terhadap keberlanjutan dan kepedulian sosial.

Throughout 2024, the Corporate Secretary carried out various work programs, among others, as follows:

1. Coordinating the organization of the Annual General Meeting of Shareholders (GMS) held on June 14, 2024, and Circular Resolutions of Shareholders;
2. Coordinated and documented 28 internal Board of Directors meetings and 12 joint meetings with the Board of Commissioners;
3. Preparing and submitting periodic reports to the Board of Directors, Board of Commissioners, and Shareholders, which include Quarterly Management Reports, Annual Management Reports, Annual Report and Sustainability Reports, and Corporate Secretary Reports;
4. Preparing and reviewing PTK's Manual on Letter Management and Archives, as well as conducting socialization and monitoring of its implementation in all work units;
5. Coordinating the implementation of the Company's TJSL program throughout 2024 as a form of commitment to sustainability and social care.



6. Menerbitkan siaran pers terkait kegiatan dan pencapaian Perusahaan dalam rangka membangun citra positif Perusahaan dan menjalin komunikasi yang konstruktif dengan publik;
7. Mengikuti berbagai pelatihan dan program pengembangan kompetensi sepanjang tahun 2024 guna mendukung peningkatan kinerja dan profesionalisme;
8. Mendukung pelaksanaan prinsip tata kelola dengan melakukan review terhadap manual, prosedur, dan petunjuk kerja di lingkup Sekretaris Perusahaan. Selain itu, Sekretaris Perusahaan juga melakukan penilaian atas implementasi GCG, memonitor pencapaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil asesmen GCG tahun sebelumnya, serta menyosialisasikan prinsip dan praktik GCG kepada seluruh karyawan dan mitra kerja.

6. Issuing press releases related to the Company's activities and achievements in order to build a positive image of the Company and establish constructive communication with the public;
7. Participate in various training and competency development programs throughout 2024 to support performance improvement and professionalism;
8. Supporting the implementation of governance principles by reviewing manuals, procedures, and work instructions within the scope of the Corporate Secretary. In addition, the Corporate Secretary also assesses GCG implementation, monitors the achievement of follow-up on recommendations from the previous year's GCG assessment results, and socializes GCG principles and practices to all employees and partners.

Pengembangan Kompetensi Sekretaris Perusahaan

Development of Corporate Secretary Competencies

Per 31 Desember 2024, Sekretaris Perusahaan dan tim Divisi Sekretaris Perusahaan telah mengikuti program pengembangan kompetensi berupa pendidikan dan pelatihan, sebagaimana tabel berikut.

As of 31 December 2024, the Corporate Secretary and the Corporate Secretary Division team participated in competency development programs in the form of education and training, as shown in the following table.

Nama dan Jabatan Name and Position	Nama Pelatihan Training Name	Waktu Pelaksanaan Date of Implementation	Penyelenggara Penyelenggara Organizer
Sonny Mirath (VP Legal & Realtion)	Executive Sustainability Academy	2 Februari 2024 February 2, 2024	Pertamina Corporate University
	Fraud Awareness	31 Juli 2024 July 31, 2024	Pertamina Corporate University
	<i>Certified Risk Professional</i>	26 Agustus 2024 August 26, 2024	PT Indonesia Risk & Business Advisory (IRBA)
	<i>Leader as Coah</i>	18 Desember 2024 December 18, 2024	Coaching Indonesia

Penilaian Kinerja Sekretaris Perusahaan

Performance Evaluation of the Corporate Secretary

Penilaian kinerja Sekretaris Perusahaan dilakukan oleh Direksi berdasarkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sepanjang tahun 2024. Evaluasi kinerja tersebut mengacu pada pencapaian *Key Performance Indicators* (KPI) yang telah ditetapkan, mencakup target-target strategis yang relevan dengan fungsi Sekretaris Perusahaan.

Pada tahun 2024, hasil penilaian menunjukkan bahwa kinerja Sekretaris Perusahaan mencapai 109,45% dari total target sebesar 100%. Capaian ini mencerminkan tingkat efektivitas dan kontribusi Sekretaris Perusahaan dalam mendukung implementasi tata kelola perusahaan yang baik serta mendukung kegiatan korporasi secara menyeluruh.

The performance evaluation of the Corporate Secretary was conducted by the Board of Directors based on the implementation of his duties and responsibilities throughout 2024. The performance evaluation refers to the achievement of Key Performance Indicators (KPI) that have been set, including strategic targets relevant to the function of the Corporate Secretary.

In 2024, the assessment results showed that the performance of the Corporate Secretary reached 109.45% of the total target of 100%. This achievement reflects the level of effectiveness and contribution of the Corporate Secretary in supporting the implementation of good corporate governance and supporting overall corporate activities.

Internal Audit

Internal Audit

Internal Audit merupakan bagian dari struktur pengendalian internal Perusahaan dan berperan sebagai *Third Line of Defense* dalam kerangka tata kelola perusahaan yang baik. Sebagai fungsi independen dan objektif, Internal Audit memberikan jasa *assurance* dan *consulting* untuk menilai serta meningkatkan efektivitas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal. Unit Internal Audit dibentuk untuk memberikan nilai tambah melalui evaluasi dan penguatan efektivitas sistem pengendalian dan penerapan prinsip-prinsip GCG di seluruh lini bisnis dan operasional Perusahaan.

Dalam menjalankan tugasnya, Internal Audit melakukan pengawasan dan konsultasi dengan menjunjung tinggi prinsip integritas, objektivitas, kerahasiaan, dan kompetensi. Audit dilaksanakan menggunakan pendekatan *Risk Based Audit* (RBA) dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas fungsi audit, serta memastikan kecukupan pengendalian internal dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Peran Internal Audit terus berkembang menjadi mitra strategis manajemen, dengan kontribusi yang tidak hanya terbatas pada fungsi pengawasan, tetapi juga sebagai *problem solver*, *insight generator*, dan *trusted advisor*. Dalam kapasitasnya, Internal Audit mendukung pengawasan oleh Direksi dan Dewan Komisaris, dengan akses langsung dan tidak terbatas terhadap data, dokumen, dan aktivitas perusahaan. Peran ini dijalankan secara independen untuk memastikan bahwa pengawasan yang dilakukan memberikan nilai tambah dan mendukung peningkatan efektivitas operasional Perusahaan secara berkelanjutan.

Internal Audit is part of the Company's internal control structure and serves as the Third Line of Defense within the framework of good corporate governance. As an independent and objective function, Internal Audit provides assurance and consulting services to assess and improve the effectiveness of governance, risk management, and internal control. The Internal Audit Unit was established to provide added value through evaluating and strengthening the effectiveness of the control system and the implementation of GCG principles in all lines of business and operations of the Company.

In carrying out its duties, Internal Audit conducts supervision and consultation by upholding the principles of integrity, objectivity, confidentiality, and competence. Audits are carried out using the Risk Based Audit (RBA) approach with the aim of improving the efficiency and effectiveness of the audit function, as well as ensuring the adequacy of internal controls and compliance with applicable regulations.

The role of Internal Audit continues to evolve into a strategic partner of management, with contributions that are not only limited to the supervisory function, but also as a problem solver, insight generator, and trusted advisor. In its capacity, Internal Audit supports oversight by the Board of Directors and Board of Commissioners, with direct and unrestricted access to company data, documents, and activities. This role is carried out independently to ensure that the supervision provides added value and supports the continuous improvement of the Company's operational effectiveness.

Struktur dan Kedudukan Internal Audit Dalam Perusahaan

Structure and Position of Internal Audit in the Company

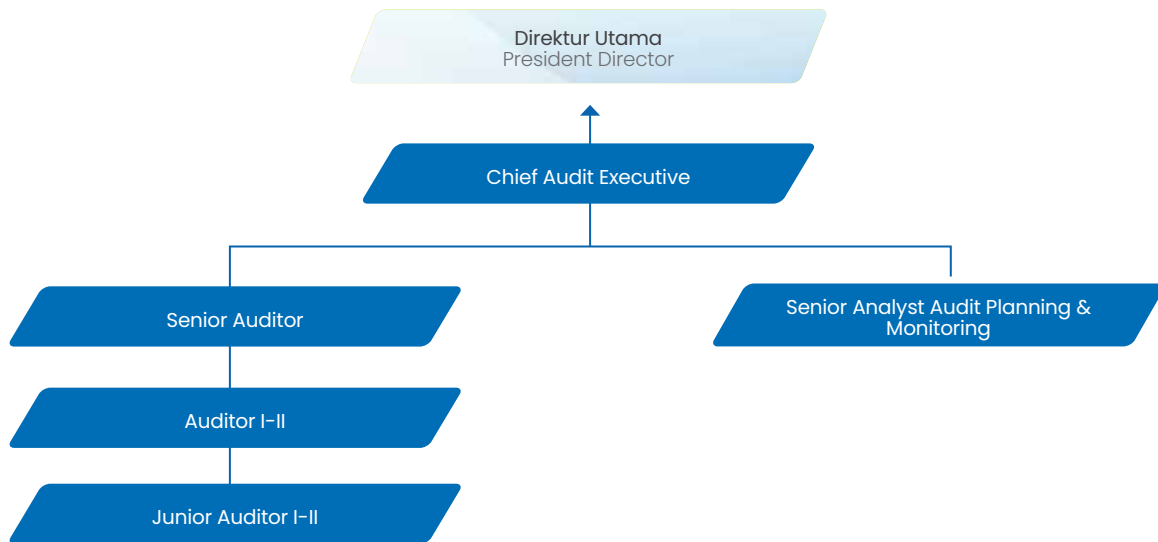
Dalam struktur organisasi Perusahaan, Fungsi Internal Audit berada di bawah Direktur Utama. Internal Audit dipimpin oleh seorang Chief Audit Executive yang secara struktural berada langsung di bawah Direktur Utama. Pengangkatan dan pemberhentian Chief Audit Executive dilakukan oleh Direktur Utama setelah mendapatkan rekomendasi dari Chief Audit Executive PT Pertamina (Persero) dan persetujuan dari Dewan Komisaris.

In the Company's organizational structure, the Internal Audit function is under the President Director. Internal Audit is led by a Chief Audit Executive who is structurally directly under the President Director. The appointment and dismissal of the Chief Audit Executive is carried out by the President Director after obtaining recommendations from the Chief Audit Executive of PT Pertamina (Persero) and approval from the Board of Commissioners.



Struktur organisasi Audit Internal PT Pertamina Trans Kontinental ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama No. Kpts-107/PTK0000/2023-S8 tanggal 21 Desember 2023.

The organizational structure of PT Pertamina Trans Kontinental Internal Audit is based on President Director Decree No. Kpts-107/PTK0000/2023-S8 dated December 21, 2023.



Secara struktural, Chief Audit Executive melaporkan kegiatan dan menjalin komunikasi serta koordinasi langsung dengan Direktur Utama, sedangkan secara fungsional, Chief Audit Executive berkomunikasi dan melapor kepada Komite Audit di bawah Dewan Komisaris.

Structurally, the Chief Audit Executive reports activities and maintains direct communication and coordination with the President Director, while functionally, the Chief Audit Executive communicates and reports to the Audit Committee under the Board of Commissioners.

Dewan Komisaris, melalui Komite Audit, memiliki peran aktif dalam proses diskusi dan pemberian persetujuan terkait remunerasi CAE. Komite Audit juga dapat berkomunikasi langsung dengan CAE untuk memastikan ruang lingkup audit yang tepat, kecukupan sumber daya, serta menjamin tidak adanya pembatasan terhadap akses data dan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas audit. Pengaturan ini dirancang guna menjaga independensi dan efektivitas fungsi pengawasan Internal Audit.

The Board of Commissioners, through the Audit Committee, has an active role in the discussion and approval process regarding the CAE's remuneration. The Audit Committee is also able to communicate directly with the CAE to ensure appropriate audit scope and adequate resources, and ensure there are no restrictions on access to data and information required in the performance of audit tasks. This arrangement is designed to maintain the independence and effectiveness of the Internal Audit oversight function.

Profil Chief Audit Executive

Profile of Chief Audit Executive

Pada tahun 2024, posisi Chief Audit Executive dijabat oleh Sdr. Asep Bhakti Mihadja, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan No. SKMJ-00096/K20500/2024-S8 Tentang Mutasi Jabatan. Penetapan ini telah mempertimbangkan kualifikasi pendidikan, pengalaman kerja dan kualifikasi yang dipersyaratkan oleh Perusahaan.

In 2024, the position of Chief Audit Executive was held by Mr. Asep Bhakti Mihadja, who was appointed based on the Decree No. SKMJ-00096/K20500/2024-S8 Concerning Position Reassignment. This appointment has considered the educational qualifications, work experience, and qualifications required by the Company.



Asep Bhakti Mihadja
Chief Audit Executive
Chief Audit Executive

Domisili Domicile
Depok Depok

Kewarganegaraan Citizenship **Usia** Age
Indonesia Indonesian 44 tahun per 31 Desember 2024
44 years old as of December 31, 2024

Menjabat sebagai Chief Audit Executive sejak 2024.
Served as Chief Audit Executive since 2024.

Dasar Hukum Penunjukan Basis of Appointment	Surat Keputusan No. SKMJ-00096/K20500/2024-S8 Tentang Mutasi Jabatan. Decree No. SKMJ-00096/K20500/2024-S8 Concerning Position Reassignment.
Riwayat Pendidikan dan Sertifikasi Educational History and Certification	Meraih gelar Sarjana Bidang Ekonomi Manajemen dari Universitas Padjajaran (2003) dan gelar Magister Manajemen dari Universitas Gadjah Mada (2018). Beliau juga telah memperoleh Sertifikasi Kompetensi di bidang audit, antara lain: Qualified Internal Auditor (QIA) dan Certified Risk Management Professional (CRMP). He holds a Bachelor's degree in Management Economics from Universitas Padjajaran (2003) and a Master's degree in Management from Universitas Gadjah Mada (2018). He has also obtained Competency Certifications in the field of auditing, including Qualified Internal Auditor (QIA) and Certified Risk Management Professional (CRMP).
Pengalaman Kerja Work Experience	Memulai kariernya di Perusahaan pada tahun 2007 dan telah menempati berbagai posisi strategis. Beberapa jabatan penting yang pernah diemban antara lain Manager Business Planning, Commercial & Business Support IA PT Pertamina International Shipping (2022-2023), serta Manager Business Planning, & Corporate Service IA PT Pertamina International Shipping (2014). He started his career in the Company in 2007 and has held various strategic positions. Some of the important positions he has held include Manager Business Planning, Commercial & Business Support IA PT Pertamina International Shipping (2022-2023), and Manager Business Planning, and Corporate Service IA of PT Pertamina International Shipping (2014).
Rangkap Jabatan Rangkap Jabatan	Tidak ada None
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham. Has no affiliation with members of the Board of Commissioners, Board of Directors and/or Shareholders.

Piagam Internal Audit

Internal Audit Charter

Fungsi Internal Audit telah memiliki Piagam Internal Audit antara Direksi dan Komisaris yang telah disahkan pada tanggal 31 Desember 2022. Piagam Internal Audit (*Audit Charter*) menginformasikan tentang visi, misi, tujuan, ruang lingkup, prinsip utama, kedudukan, independensi, wewenang, tugas dan tanggung jawab serta standar pelaksanaan.

The Internal Audit Function has an Internal Audit Charter between the Board of Directors and the Board of Commissioners that was ratified on December 31, 2022. The Internal Audit Charter informs about the vision, mission, objectives, scope, key principles, position, independence, authority, duties and responsibilities, and standards of implementation.



Tugas dan Tanggung Jawab Duties and Responsibilities

Tugas dan tanggung jawab Internal Audit adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan pengawasan melalui kegiatan *assurance* dan *consulting* di seluruh area kegiatan operasional dan bisnis Perusahaan.
2. Memastikan aspek integritas, objektivitas, kerahasiaan dan kompetensi diterapkan secara memadai.
3. Menyusun dan mengusulkan *Annual Audit Plan* (AAP) yang mencakup antara lain objek penugasan, jadwal penugasan, dan resources yang dibutuhkan untuk mendapatkan persetujuan Direktur Utama, dan Dewan Komisaris atas rekomendasi Komite Audit.
4. Melakukan *review* AAP yang sedang berjalan, untuk memastikan kesesuaiannya dengan proses bisnis dan risiko Perusahaan, serta lingkup dan tujuan penugasan.
5. Mengkomunikasikan keterbatasan sumber daya pelaksanaan penugasan, perubahan AAP, dan perubahan arah kebijakan kepada Direktur Utama, dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
6. Memastikan setiap penugasan dilakukan dengan supervisi dan didukung dengan kertas kerja yang memadai, serta rekomendasi, advice, dan insight yang disampaikan dapat diimplementasikan oleh Auditee.
7. Memastikan Fungsi Internal Audit secara kolektif memiliki/memperoleh pengetahuan, keterampilan dan kompetensi yang memadai.
8. Melaksanakan koordinasi pengelolaan kegiatan Internal Audit yang tidak terbatas pada kegiatan *assurance* dan *consulting* dengan Internal Audit Subholding, Anggota Subholding, dan Anak Perusahaan Services.
9. Menguji dan mengevaluasi efektivitas pengendalian dan manajemen risiko.
10. Melaksanakan pemeriksaan kepatuhan terhadap peraturan perundangan terkait.
11. Mengidentifikasi alternatif perbaikan dan peningkatan efisiensi operasional Perusahaan.
12. Melaksanakan koordinasi dengan Komite Audit.
13. Melaporkan hasil pengawasan kepada Direktur Utama dan Direktur lainnya yang relevan.
14. Memonitor pelaksanaan tindak lanjut hasil audit internal, eksternal dan institusi pengawasan lainnya dan melaporkan secara periodik kepada Direktur Utama dan Komite Audit.
15. Melaksanakan koordinasi kegiatan audit/ pemeriksaan oleh auditor eksternal.
16. Melaksanakan koordinasi dengan Fungsi Pengawas Perusahaan dalam melakukan tindak lanjut atas pengaduan/penyingkapan melalui *Whistleblowing System* (WBS) dan pengaduan masyarakat atau pihak lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

The responsibilities and duties of Internal Audit are as follows:

1. Conduct oversight activities through *assurance* and *consulting* across all areas of the Company's operational and business activities.
2. Ensure that aspects of integrity, objectivity, confidentiality, and competence are adequately applied.
3. Develop and propose the *Annual Audit Plan* (AAP), including assignment objects, assignment schedules, and required resources, for approval by the President Director and the Board of Commissioners upon the Audit Committee's recommendation.
4. Review the ongoing AAP to ensure its alignment with the Company's business processes and risks, as well as the assignment's scope and objectives.
5. Communicate resource constraints for assignment implementation, AAP changes, and policy direction changes to the President Director and the Board of Commissioners through the Audit Committee.
6. Ensure that each assignment is supervised and supported by adequate work papers, and recommendations, advice, and insights provided can be implemented by the Auditee.
7. Ensure that the Internal Audit Function collectively possesses/obtains adequate knowledge, skills, and competencies.
8. Coordinate the management of Internal Audit activities not limited to *assurance* and *consulting* activities with Internal Audit Subholding, Subholding Members, and Subsidiaries Services.
9. Test and evaluate the effectiveness of controls and risk management.
10. Conduct compliance examinations with relevant regulations.
11. Identify alternative improvements and operational efficiency enhancements for the Company.
12. Coordinate with the Audit Committee.
13. Report oversight results to the President Director and other relevant Directors.
14. Monitor the implementation of internal, external audit results, and other oversight institutions and periodically report to the President Director and the Audit Committee.
15. Coordinate audit/examination activities with external auditors.
16. Coordinate with the Company's Supervisory Function in following up on disclosures/complaints through the *Whistleblowing System* (WBS) and public or other party complaints in accordance with applicable regulations.

17. Membantu pelaksanaan audit investigasi terhadap masalah yang dapat menimbulkan kerugian bagi Perusahaan di PT Pertamina Trans Kontinental dan Anak Perusahaan. 18. Melaksanakan evaluasi dan peningkatan mutu (<i>improvement program</i>) kegiatan Internal Audit. 19. Melaporkan hasil kegiatan Internal Audit kepada Direktur Utama, dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit. 20. Melaksanakan penugasan lain yang diamanatkan oleh Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit. 21. Berkoordinasi dengan Chief Audit Executive PT Pertamina (Persero) dalam pelaksanaan kegiatan Internal Audit yang dikelola secara tersentralisasi di Holding sesuai dengan Tabel RASCI yang telah disetujui oleh Direktur Utama PT Pertamina (Persero).	17. Assist in conducting investigative audits into issues that may cause losses to the Company and its Subsidiaries. 18. Conduct evaluation and quality improvement (<i>improvement program</i>) of Internal Audit activities. 19. Report the results of Internal Audit activities to the President Director and the Board of Commissioners through the Audit Committee. 20. Perform other assignments mandated by the Board of Directors, the Board of Commissioners, and/or the Audit Committee. 21. Coordinate with the Chief Audit Executive of PT Pertamina (Persero) in carrying out Internal Audit activities managed centrally at the Holding as per the approved RASCI Table by the President Director of PT Pertamina (Persero).

Wewenang Authority

Dalam menjalankan tugasnya, Internal Audit memiliki kewenangan untuk:

1. Memiliki akses tidak terbatas atas semua data, dokumen, fungsi, kegiatan, dan sumber daya perusahaan lainnya termasuk meminta keterangan atau penjelasan pada semua pejabat/pekerja dalam rangka pelaksanaan tugas Internal Audit.
2. Menentukan ruang lingkup, metode, cara, teknik, strategi dan pendekatan audit.
3. Melaksanakan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit.
4. Melaksanakan koordinasi dengan auditor eksternal dan institusi pengawasan lainnya.
5. Meminta atau mendapatkan bantuan dari pekerja internal Perusahaan maupun dari pihak luar Perusahaan, dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
6. Mengadakan rapat secara berkala dan pada saat diperlukan dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/ atau Komite Audit.
7. Menentukan arah kebijakan, struktur organisasi, pengelolaan pembinaan karier pekerja (mutasi dan/ atau promosi), pengelolaan manpower, pelaksanaan penugasan, serta melakukan koordinasi dan pengawasan kegiatan terbatas dalam lingkup Internal Audit Perusahaan dan Anak Perusahaan setelah berkonsultasi dengan Chief Audit Executive PT Pertamina International Shipping.
8. Melaksanakan kegiatan assurance & consulting dan dapat menjadi bagian dari tim audit investigasi di Perusahaan dan Anak Perusahaan melalui mekanisme yang ditetapkan Chief Audit Executive PT Pertamina (Persero).

In carrying out its duties, Internal Audit has the authority to:

1. Have unrestricted access to all data, documents, functions, activities, and other company resources, including requesting information or explanations from all officers/employees in the performance of Internal Audit duties.
2. Determine the scope, methods, techniques, strategies, and audit approaches.
3. Communicate directly with the Board of Directors, the Board of Commissioners, and/or the Audit Committee.
4. Coordinate with external auditors and other oversight institutions.
5. Request or obtain assistance from internal Company employees or external parties in the performance of their duties.
6. Hold meetings periodically and when necessary with the Board of Directors, the Board of Commissioners, and/or the Audit Committee.
7. Determine policy directions, organizational structures, career development management for employees (transfers and/or promotions), manpower management, assignment implementation, as well as coordinate and supervise limited activities within the scope of the Company's and its Subsidiaries' Internal Audit after consulting with the Chief Audit Executive of PT Pertamina International Shipping.
8. Carry out assurance & consulting activities and may be part of investigation audit teams in the Company and its Subsidiaries through mechanisms established by the Chief Audit Executive of PT Pertamina (Persero).



Jumlah, Kualifikasi, dan Sertifikasi Internal Audit

Number, Qualifications, and Certifications of Internal Audit

Hingga akhir tahun 2024, jumlah personel di Fungsi Internal Audit adalah sebanyak 5 (lima) orang, yang seluruhnya telah memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan *job requirement* yang ditetapkan Perusahaan. Sesuai dengan kebijakan Perusahaan, setiap personil Auditor Internal dituntut untuk memiliki integritas tinggi serta perilaku profesional yang menjunjung nilai kejujuran, objektivitas, dan independensi. Selain itu, auditor juga harus memiliki kompetensi dan pengalaman yang memadai, baik dalam aspek operasional, bisnis, maupun fungsi pendukung lainnya.

Berikut pemenuhan kualifikasi pendidikan dan sertifikasi yang dimiliki personil Audit Perusahaan tahun 2024.

Until the end of 2024, the number of personnel in the Internal Audit Function was 5 (five) people, all of whom had met the qualification and competency requirements in accordance with the job requirements set by the Company. In accordance with Company policy, each Internal Auditor personnel is required to have high integrity and professional behavior that upholds the values of honesty, objectivity, and independence. In addition, auditors must also have adequate competence and experience both in operational, business, and other supporting functions.

The following is the fulfillment of educational qualifications and certifications held by Corporate Audit employees in 2024.

Nama Name	Jabatan Position	Pendidikan Education	Sertifikasi Certification
Asep Bhakti Mihadja	Chief Audit Executive	S2 Manajemen Master's degree in Management	Qualified Internal Auditor, Certified Risk Management Professional, Certification in Audit Committee Practices
Arini Putri Setoaty	Auditor	S1 Akuntansi Bachelor's degree in Accounting	Qualified Internal Auditor, Certified Risk Associate, Certified Risk Professional
Agil Juniantara	Auditor	S1 Manajemen Bachelor's degree in Management	Qualified Internal Auditor
Almira Mahsa	Junior Auditor	S1 Akuntansi Bachelor's degree in Accounting	Audit Tingkat Dasar, Certified Risk Professional Basic Level Audit
Baskara Dwi Harnantia	Junior Auditor	S1 Akuntansi Bachelor's degree in Accounting	Certified Risk Professional

Program Pengembangan Kompetensi Internal Audit

Competency Development Program of the Internal Audit

Pada tahun 2024, personil Internal Audit PTK telah mengikuti program pelatihan dan/atau sertifikasi profesi, yaitu sebagai berikut:

In 2024, PTK's Internal Audit employees participated in professional training and/or certification programs, as follows:

Nama Pelatihan Name of Training	Waktu Pelaksanaan Date	Penyelenggara Organizer	Peserta Pelatihan Training Participants
Persiapan Sertifikasi CFE (Lanjutan) Preparation for CFE Certification (Advanced)	27-31 Mei 2024 May 27-31, 2024	Pertamina Corporate University	Asep Bhakti Mihadja (Chief Audit Executive)
<i>Mobile Learning - Fundamental Enterprise Risk Management</i>	10-12 Juni 2024 8-10 Juli 2024 June 10-12, 2024 July 8-10, 2024	HC Business Partner PT PIS	Almira Mahsa (Junior Auditor) Baskara Dwi Harnantia (Junior Auditor)
Sertifikasi ERM ISO 31000 CRP CRA ERM ISO 31000 CRP CRA Certification	13 Juni 2024 11 Juli 2024 June 13, 2024 July 11, 2024	HC Business Partner PT PIS	Almira Mahsa (Junior Auditor) Baskara Dwi Harnantia (Junior Auditor)
<i>Mobile Learning - Basic HSSE Mandatory Training</i>	30 Juni 2024 31 Oktober 2024 30 November 2024 June 30, 2024 October 31, 2024 November 30, 2024	Pertamina Corporate University	Almira Mahsa (Junior Auditor) Baskara Dwi Harnantia (Junior Auditor) Agil Juniantara (Auditor)
<i>Mobile Learning - JMDP (Junior Management Development Program)</i>	30 Juni 2024 31 Juli 2024 June 30, 2024 July 31, 2024	Pertamina Corporate University	Almira Mahsa (Junior Auditor) Baskara Dwi Harnantia (Junior Auditor)
<i>Mobile Learning - HSE Mandatory - CLSR</i>	30 Juni 2024 June 30, 2024	Pertamina Corporate University	Almira Mahsa (Junior Auditor)
<i>Mobile Learning - Fraud Awareness</i>	30 Juni 2024 31 Juli 2024 June 30, 2024 July 31, 2024	Pertamina Corporate University	Almira Mahsa (Junior Auditor) Asep Bhakti Mihadja (Chief Audit Executive)
<i>Mobile Learning - Communication Skill</i>	30 Juni 2024 June 30, 2024	Pertamina Corporate University	Almira Mahsa (Junior Auditor)
Konferensi Auditor Internal	10-11 Juli 2024 July 10-11, 2024	Yayasan Pendidikan Internal Audit	Asep Bhakti Mihadja (Chief Audit Executive)
<i>Mobile Learning - Perilaku Hidup Sehat</i>	31 Juli 2024 31 Oktober 2024 31 Desember 2024 July 31, 2024 October 31, 2024 December 31, 2024	Pertamina Corporate University	Arini Putri Setoaty (Auditor) Baskara Dwi Harnantia (Junior Auditor) Agil Juniantara (Auditor)
<i>Mobile Learning - Fundamental Behavior Based Safety</i>	31 Oktober 2024 October 31, 2024	Pertamina Corporate University	Agil Juniantara (Auditor)
<i>Advanced SUPREME Mandatory Training</i>	6-8 November 2024 November 6-8, 2024	Pertamina Corporate University	Agil Juniantara (Auditor)
<i>Anti Fraud Agent</i>	20-21 November 2024 November 20-21, 2024	Pertamina Corporate University	Arini Putri Setoaty (Auditor)
<i>Mobile Learning - Respectful Workplace</i>	30 November 2024 November 30, 2024	Pertamina Corporate University	Agil Juniantara (Auditor)



Rapat Internal Audit Bersama Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit

Internal Audit Meetings with the Board of Directors, Board of Commissioners, and/or Audit Committee

Sepanjang tahun 2024, Internal Audit secara aktif berpartisipasi dalam forum koordinasi dan diskusi strategis dengan manajemen dan organ pengawasan. Internal Audit telah menghadiri rapat yang diselenggarakan oleh Direksi maupun oleh Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit.

Kehadiran dalam rapat-rapat ini bertujuan untuk menyampaikan hasil audit, membahas tindak lanjut temuan, menyampaikan rekomendasi perbaikan, serta memberikan pandangan terkait isu-isu pengendalian internal, manajemen risiko, dan tata kelola Perusahaan. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat sinergi antara fungsi pengawasan internal dengan manajemen dan Dewan Komisaris dalam mewujudkan pengelolaan Perusahaan yang transparan dan akuntabel.

Throughout 2024, the Internal Audit actively participated in coordination forums and strategic discussions with management and supervisory organs. Internal Audit attended meetings organized by the Board of Directors as well as by the Board of Commissioners and/or Audit Committee.

Attendance at these meetings aims to convey audit results, discuss follow-up findings, submit recommendations for improvement, and provide views related to internal control, risk management, and corporate governance issues. This activity is part of the effort to strengthen the synergy between the internal control function with management and the Board of Commissioners in realizing transparent and accountable management of the Company.

Laporan Pelaksanaan Program Kerja Internal Audit

Implementation Report of Internal Audit Work Program

Sepanjang tahun 2024, Fungsi Internal Audit telah melaksanakan program kerja sesuai dengan rencana kerja telah disusun berdasarkan pendekatan *Risk Based Internal Audit*, sebagai berikut:

1. Kegiatan *Annual Audit Plan* (AAP) 2024

Pada tahun 2024, Internal Audit PTK telah menyelesaikan kegiatan audit yang berdasarkan AAP, yaitu 1 (satu) kegiatan Audit Mandiri, 3 (tiga) Audit Terpadu, serta 1 (satu) kegiatan Konsultasi. Kegiatan Audit Mandiri yaitu Audit atas Kegiatan Operasional PT Pertamina Marine Engineering, sedangkan kegiatan Audit Terpadu terdiri dari Audit atas Pengelolaan Bunker pada Kegiatan Operasional Kapal, Audit atas Perencanaan & Implementasi Kebijakan HSSE, Audit atas Pengelolaan SDM di PT Pertamina Trans Kontinental. Adapun Kegiatan Konsultasi adalah Konsultasi Pengelolaan Investasi di PT Pertamina Trans Kontinental.

Throughout 2024, the Internal Audit Function implemented the work program as planned based on the Risk-Based Internal Audit approach, as follows.

1. 2024 Annual Audit Plan (AAP) Activities

In 2024, PTK's Internal Audit completed audit activities based on the AAP, namely 1 (one) Independent Audit activity, 3 (three) Integrated Audits, and 1 (one) Consulting activity. The Independent Audit activity is an Audit of the Operational Activities of PT Pertamina Marine Engineering, while the Integrated Audit activity consists of an Audit of Bunker Management in Ship Operational Activities, Audit of HSSE Policy Planning & Implementation, Audit of HR Management at PT Pertamina Trans Kontinental. The Consultation Activity is Investment Management Consultation at PT Pertamina Trans Kontinental.

2. **Monitoring Tindak Lanjut Hasil Temuan Audit Internal**
Tindak lanjut hasil audit internal terdiri dari rekomendasi hasil audit yang dilakukan oleh Internal Audit PTK dan hasil audit investigasi/penelaahan yang dilakukan oleh Fungsi Investigation, Fraud Prevention & WBS IA. Realisasi tindak lanjut hasil audit internal per 31 Desember 2024 tercapai 100%.
2. **Follow-Up Monitoring of the Internal Audit Findings**
Follow-up on internal audit findings consists of audit result recommendations conducted by PTK's Internal Audit and investigation/evaluation audit results conducted by the Investigation, Fraud Prevention & WBS IA Function. Realization of follow-up on audit findings as of December 31, 2024, reached 100%.
3. **Monitoring Tindak Lanjut Hasil Temuan Audit Eksternal**
Fungsi Internal Audit turut berperan aktif dalam menindaklanjuti temuan dan rekomendasi yang disampaikan oleh auditor eksternal, baik dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) maupun Kantor Akuntan Publik (KAP). Hingga Desember 2024, Fungsi Internal Audit telah melakukan *monitoring* terhadap sejumlah *outstanding* temuan dari BPK RI sebagaimana tabel berikut:
3. **Follow-Up Monitoring of the External Audit Findings**
The Internal Audit function plays an active role in following up on findings and recommendations submitted by external auditors, both from the Supreme Audit Agency of the Republic of Indonesia (BPK RI) and the Public Accounting Firm (KAP). Until December 2024, Internal Audit monitored several outstanding findings from BPK RI, as shown in the following table:

Monitoring Tindak Lanjut Temuan BPK RI Tahun 2024

Monitoring of BPK RI Findings in 2024

No.	Proses Bisnis Business Process	Jumlah Total	Tindak Lanjut Lanjut Follow-up	Outstanding sesuai PTL BPK RI Outstanding according to PTL BPK RI	TL Auditee TL Auditee	Outstanding Tindak Lanjut Outstanding Follow-up
1.	LHP Kinerja atas Efektivitas Kegiatan Pengelolaan Piutang Usaha untuk meningkatkan laba Perusahaan tahun 2019 s.d. semester I tahun 2021 pada PT Pertamina (Persero), Subholding dan Anak Perusahaan di Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur LHP Performance on the Effectiveness of Accounts Receivable Management Activities to increase Company profits in 2019 to 2019. semester I of 2021 at PT Pertamina (Persero), Subholding and Subsidiaries in Jakarta, West Java and East Java	11	9	2	0	2
2.	LHP dengan tujuan tertentu atas pengelolaan Pendapatan belanja dan investasi tahun 2019 sampai dengan 2021 pada PT Pertamina International Shipping dan instansi terkait lainnya di DKI Jakarta Jawa timur kepulauan Riau dan Jepang LHP with the specific objective of managing expenditure and investment income from 2019 to 2021 at PT Pertamina International Shipping and other related agencies in DKI Jakarta, East Java, Riau Islands and Japan	25	18	1	1	0
Jumlah Total		36	27	3	1	2

Keterangan: Penentuan status penyelesaian atau belum selesainya tindak lanjut atas rekomendasi tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan BPK RI. Dalam hal ini, Internal Audit berperan sebagai counterpart sekaligus fasilitator dalam proses penyelesaian, serta melakukan pemantauan secara berkala setiap triwulan.
Description: Determination of the status of completion or unfinished follow-up on the recommendation is entirely the authority of BPK RI. In this case, the Internal Audit acts as a counterpart and facilitator in the settlement process, and conducts regular monitoring every quarter.



Fungsi Internal Audit juga melakukan *monitoring* Tindak Lanjut Temuan Audit KAP Tahun 2024 yang diterbitkan oleh KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan dalam *Internal Control Memorandum* (ICM). ICM ini merupakan rekomendasi atas audit laporan keuangan konsolidasian PT Pertamina International Shipping dan entitas anak, termasuk PT Pertamina Trans Kontinental dan Entitas Anak, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan akurasi proses pelaporan keuangan.

Dalam ICM tersebut, terdapat 7 (tujuh) item observasi yang menjadi perhatian bagi PT Pertamina Trans Kontinental dan entitas anak. Sampai dengan Desember 2024, sebanyak 4 (empat) item observasi telah diselesaikan, sementara 3 (tiga) lainnya masih dalam proses penyelesaian dan berada dalam pemantauan KAP PwC. Fungsi Internal Audit terus melakukan koordinasi untuk memastikan seluruh rekomendasi dapat ditindaklanjuti secara tepat waktu dan sesuai standar yang ditetapkan.

The Internal Audit function also monitors the Follow-up of KAP Audit Findings Year 2024 issued by KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Partners (PwC) in the Internal Control Memorandum (ICM). This ICM is a recommendation on the audit of the consolidated financial statements of PT Pertamina International Shipping and its subsidiaries, including PT Pertamina Trans Kontinental and its subsidiaries, which aims to improve the quality and accuracy of the financial reporting process.

In the ICM, there are 7 (seven) observation items that are of concern to PT Pertamina Trans Kontinental and its subsidiaries. As of December 2024, 4 (four) observation items have been completed, while the other 3 (three) are still in the completion process and are under the monitoring of KAP PwC. The Internal Audit function continues to coordinate to ensure that all recommendations can be followed up in a timely manner and in accordance with established standards.

Sistem Pengendalian Internal Internal Control System

PTK menyadari bahwa pembentukan tata kelola perusahaan yang efektif dan sistem pengendalian internal yang kuat merupakan fondasi penting untuk mendukung pertumbuhan berkelanjutan dan peningkatan nilai perusahaan dalam jangka panjang. Sistem pengendalian internal tidak hanya menjadi tanggung jawab manajemen, tetapi melibatkan seluruh personil dalam Perusahaan, mulai dari Dewan Komisaris, Direksi, manajemen hingga karyawan sebagai bagian dari proses kolektif untuk mencapai tujuan operasional, pelaporan, dan kepatuhan Perusahaan secara menyeluruh.

Pengendalian internal di PTK dirancang untuk memberikan *reasonable assurance* atas tercapainya tujuan Perusahaan melalui pelaksanaan proses yang efisien dan efektif, keandalan laporan keuangan, serta kepatuhan terhadap hukum dan regulasi yang berlaku. Sistem ini mencakup kebijakan, prosedur, struktur organisasi, serta mekanisme evaluasi yang melekat dalam setiap aktivitas bisnis Perusahaan. Sebagai bentuk komitmen terhadap tata kelola yang baik, PTK secara terus menerus membangun, mengembangkan, dan menyempurnakan sistem pengendalian internal yang efektif dan adaptif. Sistem ini juga dimaksudkan untuk meminimalkan risiko usaha dan mencegah terjadinya penyimpangan yang dapat merugikan perusahaan.

PTK recognizes that the establishment of effective corporate governance and a robust internal control system is a crucial foundation to support sustainable growth and increased corporate value in the long term. The internal control system is not only the responsibility of management. However, it involves all personnel in the Company, from the Board of Commissioners, Board of Directors, management, to employees as part of a collective process to achieve the Company's overall operational, reporting, and compliance objectives.

Internal control at PTK is designed to provide reasonable assurance of the achievement of the Company's objectives through the implementation of efficient and effective processes, the reliability of financial statements, and compliance with applicable laws and regulations. This system includes policies, procedures, organizational structure, and evaluation mechanisms inherent in every business activity of the Company. As a commitment to good governance, PTK continuously builds, develops, and refines an effective and adaptive internal control system. This system is also intended to minimize business risks and prevent irregularities that could harm the Company.

Dengan pengendalian internal yang kuat, PTK memastikan bahwa setiap proses bisnis berjalan sesuai prinsip akuntabilitas, integritas, dan transparansi, serta mampu memberikan kontribusi nyata terhadap keberhasilan jangka panjang Perusahaan, baik dari sisi kinerja keuangan maupun keberlanjutan usaha.

With robust internal control, PTK ensures that every business process runs according to the principles of accountability, integrity, and transparency and can make a real contribution to the long-term success of the Company, both in terms of financial performance and business sustainability.

Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Perusahaan sesuai dengan Kerangka COSO (*Internal Control Framework*)

Implementation of the Company's Internal Control System in accordance with the COSO Framework (*Internal Control Framework*)

Perusahaan menerapkan sistem pengendalian internal sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas dan proses bisnis Perusahaan. Pendekatan ini mencerminkan komitmen insan Perusahaan dalam menjaga integritas, efektivitas, dan efisiensi operasional, serta memastikan tercapainya tujuan organisasi secara berkelanjutan.

The Company implements an internal control system as an integral part of the Company's business activities and processes. This approach reflects the commitment of the Company's employees to maintaining the integrity, effectiveness, and efficiency of operations, as well as ensuring the achievement of organizational goals sustainably.

Dalam pengembangannya, PTK mengacu pada kerangka kerja pengendalian internal yang diakui secara internasional, yaitu *Internal Control – Integrated Framework* yang disusun oleh Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). Kerangka ini menjadi dasar dalam membangun dan mengevaluasi efektivitas pengendalian internal Perusahaan dengan pendekatan sistematis dan terstruktur. Selain itu, PTK juga menerapkan pendekatan *three lines model* yang menegaskan peran unit operasional (*first line*), unit pemantau risiko dan kepatuhan (*second line*), serta fungsi Internal Audit (*third line*) dalam menjaga efektivitas pengendalian.

In its development, PTK refers to the internationally recognized internal control framework, namely the Internal Control-Integrated Framework prepared by the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). This framework is the basis for building and evaluating the effectiveness of the Company's internal control with a systematic and structured approach. In addition, PTK also applies the three-line model approach that emphasizes the role of the operational unit (*first line*), risk monitoring and compliance unit (*second line*), and internal audit function (*third line*) in maintaining control effectiveness.



THREE LINES OF DEFENSE

Sesuai COSO, PTK telah menerapkan mekanisme **Three Line of Defense** sebagai aktivitas penerapan pengendalian internal dan pelaksanaan tata kelola perusahaan secara terpadu.

In accordance with COSO, PTK has implemented third line of defense mechanism as part of the internal control implementation and integrated corporate governance

FIRST LINE OF DEFENSE

Dikelola oleh masing-masing unit atau satuan kerja sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing:

- Pengetahuan dan pemahaman atas proses bisnis, proses kerja utama.
- Identifikasi potensi risiko pada tugas yang menjadi wewenang dari setiap unit.
- Pengendalian dan pelaksanaan mitigasi potensi risiko.

Managed by each unit or task force in accordance with respective functions and duties:

- Knowledge and insight on business process, and main work process.
- Potential risks identification on the duties that have been authorized to each unit.
- Control and implementation of potential risks mitigation.

SECOND LINE OF DEFENSE

Dikelola oleh fungsi manajemen risiko yang berada pada unit **finance** dan fungsi **compliance** yang berada pada unit Corporate Secretary.

- Peningkatan fungsi **check & balance** mendukung operasi Perusahaan.
- Sosialisasi kesadaran terhadap penerapan tata kelola Perusahaan, kepatuhan dan manajemen risiko pada semua unit kerja dan tingkatan organisasi.
- Implementasi manajemen risiko yang terintegrasi.
- Penyempurnaan pedoman dan kebijakan operasional dan non-operasional.

Managed by risk management function under the finance unit and compliance function under the Corporate Security Unit.

- Increasing check & balance function in support of the Company's operation.
- Socializing awareness to the implementation of corporate governance, compliance and risk management in all work units and organizational levels.
- Implementing integrated risk management
- Improving operational and non-operational manuals and policies

THIRD LINE OF DEFENSE

Dikelola oleh Unit Audit Intern.

- Pelaksanaan internal audit sesuai program kerja audit tahunan.
- Pelaksanaan audit surprise untuk mengukur kesadaran penerapan tata kelola perusahaan.
- Kepatuhan dan manajemen risiko.
- Database temuan internal audit dan eksternal sebagai masukan untuk peningkatan kualitas setiap unit/fungsi

Managed by Internal Audit.

- Implementation of internal audits in accordance with the annual audit program.
- Implementation of a surprise audit to measure awareness of the corporate governance implementation.
- Compliance and risk management.
- Database of internal and external audit findings as input for improvement the quality of each unit/function.

Sistem Pengendalian Internal PTK didasarkan pada lima elemen utama sebagaimana ditetapkan dalam Kerangka COSO, yaitu: (1) Lingkungan pengendalian, sebagai dasar budaya kontrol organisasi; (2) Penilaian risiko, untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan; (3) Aktivitas pengendalian, yaitu kebijakan dan prosedur yang membantu mengurangi risiko; (4) Informasi dan komunikasi, guna memastikan keterbukaan dan kecepatan penyampaian informasi yang relevan; serta (5) Kegiatan pengawasan, untuk menilai efektivitas dan keberlanjutan sistem pengendalian internal secara keseluruhan.

PTK's Internal Control System is based on five main elements as set out in the COSO Framework, namely: (1) Control environment, as the basis of the organization's control culture; (2) Risk assessment, to identify and manage risks that may hinder the achievement of objectives; (3) Control activities, policies and procedures that help reduce risks; (4) Information and communication, to ensure openness and speed of delivery of relevant information; and (5) Monitoring activities, to assess the effectiveness and sustainability of the overall internal control system.

Sistem Pengendalian Keuangan, Operasional dan Kepatuhan Perusahaan

Financial, Operational, and Compliance Control Systems

Pengendalian Keuangan

Financial Control

Sebagai bagian dari upaya menerapkan sistem pengendalian internal yang efektif, PTK menjalankan pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas. Sistem ini dirancang untuk meminimalkan potensi penyimpangan, sekaligus mengoptimalkan arus keuangan demi mendukung kelancaran operasional dan bisnis Perusahaan. Pengelolaan keuangan dilaksanakan dengan mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dilakukan evaluasi secara berkala guna menjaga keselarasan dengan dinamika regulasi dan bisnis.

Perencanaan keuangan dilakukan dalam kerangka rencana jangka pendek, menengah, dan panjang. Penyusunan anggaran didasarkan pada program kerja masing-masing fungsi melalui pendekatan *bottom-up* dan *top-down* untuk memastikan sinergi dan akurasi usulan. Direksi menetapkan target pendapatan dan biaya secara realistis, memperhatikan kebutuhan, potensi pasar, serta sumber daya yang tersedia. Setiap unit wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangannya kepada Direksi dan menyampaikan laporan keuangan tepat waktu kepada Direktur Keuangan untuk dikonsolidasikan ke dalam laporan Perusahaan.

As part of the effort to implement an effective internal control system, PTK conducts financial management based on the principles of prudence and accountability. This system is designed to minimize potential irregularities while optimizing financial flows to support the Company's smooth operations and business. Financial management is carried out with reference to Financial Accounting Standards and applicable laws and regulations and is evaluated regularly to maintain alignment with regulatory and business dynamics.

Financial is planned within the framework of short-, medium-, and long-term plans. Budget preparation is based on the work program of each function through bottom-up and top-down approaches to ensure synergy and accuracy of proposals. The Board of Directors sets realistic revenue and cost targets, taking into account needs, market potential, and available resources. Each unit must be accountable for its financial management to the Board of Directors and submit financial reports on time to the Director of Finance to be consolidated into the Company's reports.

Pengendalian Operasional

Operational Control

Dalam hal penerapan sistem pengendalian pada aspek operasional, Perseroan menerapkan kebijakan dan prosedur yang ditujukan untuk mengarahkan seluruh sumber daya pada pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan. Perusahaan melaksanakan kegiatan usaha dimulai dengan identifikasi kebutuhan dan diakhiri dengan pengiriman jasa. Proses bisnis kunci PTK terdiri dari kegiatan pemasaran dan operasi kapal (*Marketing and Operation*), keagenan kapal, port operation and service untuk pelabuhan khusus migas. Direktur utama memastikan bahwa tujuan manajemen didefinisikan dalam semua proses kunci. Rencana dan pengembangan proses yang diperlukan untuk merealisasikan jasa perusahaan tertuang dalam Rencana Kerja Pendapatan dan Laba Tahunan (RKPL).

In implementing operational control, the Company enforces policies and procedures to direct all resources towards achieving established goals and targets. Business activities begin with identifying needs and end with delivering services. PTK's key business processes include marketing and ship operations, ship agency services, and port operations and services for specialized oil and gas ports. The President Director ensures that management objectives are defined in all key processes. Plans and process developments necessary to realize Company services are outlined in the Annual Revenue and Profit Work Plan (RKPL).



Dalam pelaksanaannya, pengelolaan operasional dilakukan sesuai dengan RKAP dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas biaya. Masing-masing pemilik proses kunci dan proses owner memimpin pelaksanaan kegiatan operasional guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan disetujui oleh Direktur Utama. Selanjutnya, dalam hal pelaporan realisasi kegiatan operasional Perusahaan dilakukan oleh unit/fungsi yang terkait secara berkala kepada Direksi. Semua jasa yang diberikan kepada pelanggan akan dikaji dan ditinjau, sehingga apabila terdapat perubahan persyaratan dalam perjanjian maka dapat segera ditindaklanjuti melalui pemberitahuan kepada pelanggan dan fungsi yang bersangkutan.

Operational management is conducted according to the ABOP, focusing on cost efficiency and effectiveness. Each key process owner leads operational activities to achieve the goals set and approved by the President Director. Operational activity reporting is performed periodically by the relevant units/functions to the Board of Directors. All services provided to customers are reviewed, and any changes in agreement requirements are promptly communicated to the customers and relevant functions.

Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang- Undangan Regulatory Compliance

PTK juga memberikan perhatian khusus terhadap aspek kepatuhan sebagai bagian penting dari sistem pengendalian internal. Untuk menjamin kesesuaian kegiatan usaha dengan ketentuan hukum yang berlaku, PTK telah membentuk Fungsi Legal yang bertugas memantau, mengelola, dan memastikan seluruh aktivitas Perusahaan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Fungsi ini berperan sebagai garda depan dalam menghindari risiko pelanggaran hukum yang dapat merugikan Perusahaan.

PTK also pays special attention to the compliance aspect as a crucial part of the internal control system. To ensure the conformity of business activities with applicable legal provisions, PTK has established a Legal Function in charge of monitoring, managing, and ensuring that all Company activities run in accordance with statutory regulations. This function acts as the front guard in avoiding the risk of legal violations that could harm the Company.

Hingga akhir periode pelaporan tahun 2024, PTK tidak pernah menerima sanksi atau teguran terkait ketidakpatuhan terhadap hukum. Hal ini mencerminkan komitmen kuat Perusahaan terhadap integritas, kepatuhan, dan tata kelola yang baik dalam setiap lini bisnisnya.

Until the end of the reporting period in 2024, PTK had never received sanctions or reprimands related to non-compliance with the law. This reflects the Company's unwavering commitment to integrity, compliance, and good governance in every line of business.

Evaluasi dan Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Evaluation and Effectiveness of the Internal Control System

Evaluasi terhadap efektivitas sistem pengendalian internal dilakukan oleh fungsi Internal Audit untuk memonitoring kecukupan dan efektivitas pengendalian internal. Perusahaan melakukan evaluasi melalui pemantauan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan operasional dan menyampaikan hasilnya kepada Direksi.

Internal Audit evaluates the internal control system's effectiveness to monitor its adequacy and effectiveness. The Company conducts evaluations by monitoring follow-up actions from operational audits and reporting the results to the Board of Directors.

Pengendalian internal dalam aspek keuangan perusahaan dilakukan melalui mekanisme pengawasan internal atas pelaporan keuangan (Internal Control Over Financial Reporting/ICOFR). Pelaksanaan ICOFR sebagai bagian

Internal control in the financial aspect of the company is carried out through the Internal Control Over Financial Reporting (ICOFR) mechanism. The implementation of ICOFR

dari tinjauan terhadap aspek keuangan perusahaan telah dilakukan oleh PTK sejak akhir tahun 2023 dengan melakukan pemetaan atas 5 siklus yang terdiri dari Revenue, Expenditure, Fixed Asset, Personnel & Payroll, dan Financial Closing & Reporting. Namun seiring dengan adanya perubahan Struktur Organisasi, Proses Bisnis Perusahaan dan terdapatnya permintaan untuk melakukan penambahan siklus dalam ruang lingkup ICOFR di Perusahaan, maka pada akhir tahun 2024, PTK melakukan pembaharuan atas 5 siklus sebelumnya serta melakukan penambahan 4 siklus baru yang terdiri dari Treasury, Taxation, Entity Level Control, dan IT General Control. Dengan adanya penambahan 4 siklus tersebut maka perusahaan akan mengimplementasikan ICOFR secara full cycle.

as a financial review of the Company has been carried out by PTK since late 2023, mapping five cycles: Revenue, Expenditure, Fixed Assets, Personnel & Payroll, and Financial Closing & Reporting. However, in line with changes to the Organizational Structure, the Company's Business Processes, and a request to expand the ICOFR scope, PTK—in late 2024—updated the original five cycles and added four new ones: Treasury, Taxation, Entity-Level Control, and IT General Control. With these four additional cycles, the Company will now implement ICOFR on a full-cycle basis.

Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris atas Kecukupan Sistem Pengendalian Internal

Statement of the Board of Directors and Board of Commissioners on the Adequacy of the Internal Control System

Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan menyatakan bahwa sistem pengendalian internal yang diterapkan sepanjang tahun 2024 telah berjalan secara memadai dan memenuhi standar minimum untuk memastikan efektivitas, efisiensi operasional, keandalan pelaporan keuangan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, penyempurnaan sistem secara berkelanjutan tetap dilakukan guna merespons dinamika bisnis dan menjaga relevansi pengendalian dalam mendukung pencapaian tujuan Perusahaan.

The Company's Board of Directors and Board of Commissioners stated that the internal control system implemented throughout 2024 had run adequately and met the minimum standards to ensure effectiveness, operational efficiency, reliability of financial reporting, and compliance with laws and regulations. Nevertheless, continuous improvement of the system is still carried out to respond to business dynamics and maintain the relevance of controls in supporting the achievement of the Company's objectives.

Berdasarkan hasil evaluasi atas efektivitas sistem pengendalian internal sepanjang tahun 2024, tidak ditemukan kelemahan yang material dalam pelaksanaannya. Seluruh temuan yang muncul telah ditindaklanjuti dan rekomendasi peningkatan telah diterapkan secara konsisten. Dengan demikian, Direksi dan Dewan Komisaris menilai bahwa sistem pengendalian internal PTK telah dijalankan secara efektif dan memberikan jaminan yang memadai atas kinerja dan tata kelola perusahaan.

Based on the evaluation of the effectiveness of the internal control system throughout 2024, no material weaknesses were found in its implementation. All findings have been followed up, and recommendations for improvement have been consistently implemented. Thus, the Board of Directors and Board of Commissioners assess that PTK's internal control system has been effectively implemented and provides adequate assurance of the Company's performance and governance.



Manajemen Risiko

Risk Management

PTK secara konsisten berupaya mengelola risiko dengan pendekatan yang cermat, terintegrasi, dan adaptif terhadap perkembangan terkini. Evaluasi dan penyempurnaan kebijakan serta proses manajemen risiko dilakukan secara berkala untuk memastikan efektivitas pengendalian risiko di seluruh lini operasional. Dalam pelaksanaannya, manajemen risiko membantu pengambilan keputusan yang lebih terukur, dengan mempertimbangkan ketidakpastian dan dampaknya terhadap pencapaian sasaran strategis Perusahaan. Penerapan manajemen risiko juga diperkuat dengan komitmen Dewan Komisaris dan Direksi agar kebijakan dan budaya sadar risiko tertanam di seluruh organisasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

PTK consistently strives to manage risk with a careful, integrated, and adaptive approach to the latest developments. Evaluation and improvement of risk management policies and processes are carried out regularly to ensure the effectiveness of risk control in all operational lines. In its implementation, risk management helps make more measured decisions, taking into account uncertainties and their impact on achieving the Company's strategic goals. The implementation of risk management is also strengthened by the commitment of the Board of Commissioners and Board of Directors so that risk-aware policies and culture are embedded throughout the organization in accordance with applicable regulations.

Sistem dan Kebijakan Manajemen Risiko Perusahaan

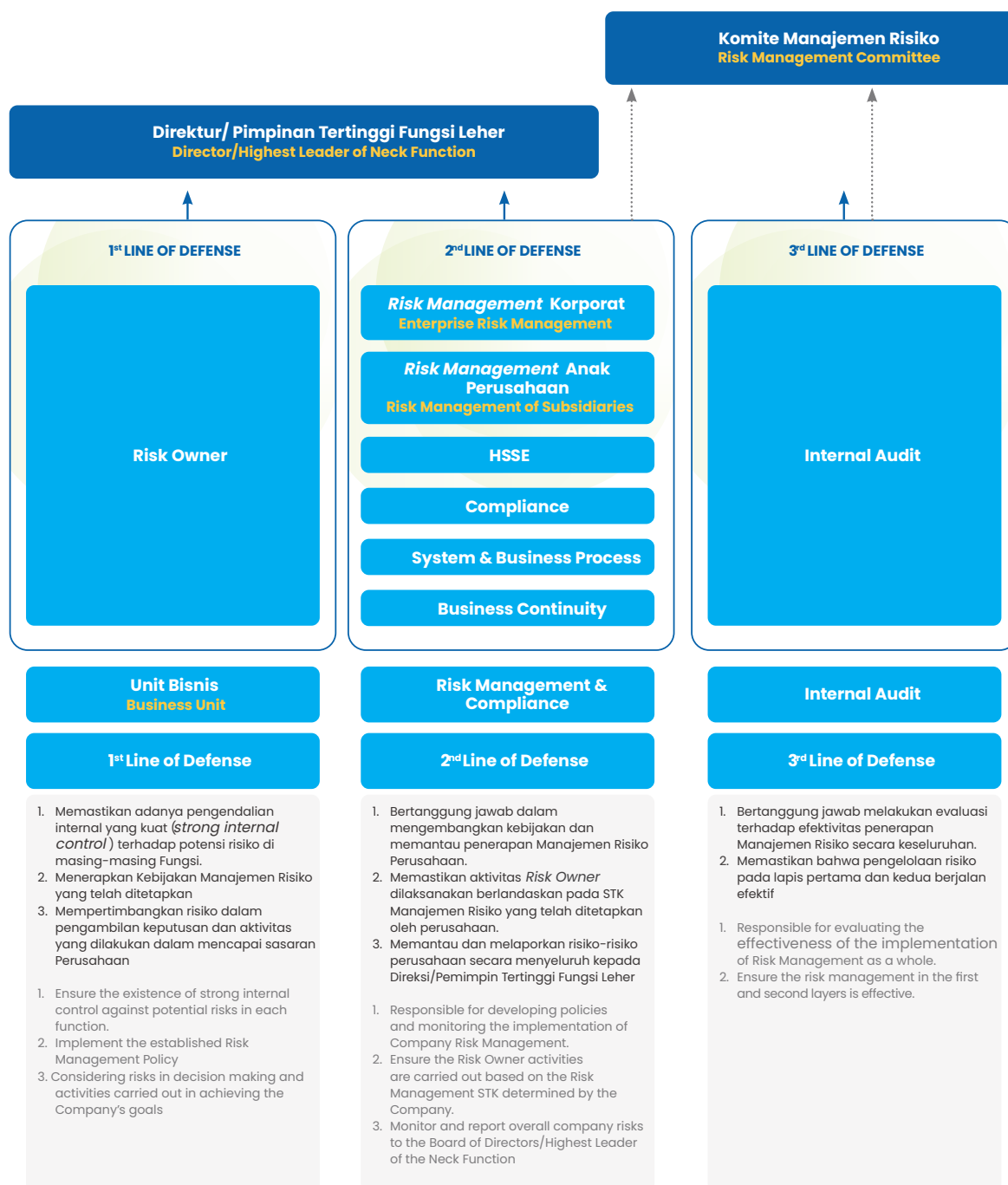
Company Risk Management System and Policy

Sebagai bagian dari penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, PTK telah mengimplementasikan sistem manajemen risiko berbasis standar internasional ISO 31000:2018. Sistem ini dirancang untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengelola, serta mengevaluasi risiko secara menyeluruh dan berkelanjutan, sehingga tujuan strategis Perusahaan dapat tercapai dengan dampak risiko yang minimal. Direksi telah menetapkan Kebijakan Manajemen Risiko sebagai panduan dalam mencapai sasaran jangka panjang Perusahaan melalui pendekatan yang sistematis, terstruktur, dan terintegrasi.

As part of the implementation of good corporate governance principles, PTK has implemented a risk management system based on the international standard ISO 31000:2018. This system is designed to identify, analyze, manage, and evaluate risks thoroughly and continuously so that the Company's strategic objectives can be achieved with minimal risk impact. The Board of Directors has established a Risk Management Policy as a guide in achieving the Company's long-term goals through a systematic, structured, and integrated approach.

Penerapan manajemen risiko dilakukan dalam kerangka kerja *Enterprise Risk Management* (ERM) yang mencakup seluruh jenis risiko signifikan yang dapat memengaruhi operasional dan kinerja Perusahaan. PTK mengadopsi sistem manajemen risiko berbasis model *Three Lines of Defense* sebagai struktur pengelolaan risiko yang jelas dan terukur. Lini pertama berada di setiap fungsi atau unit kerja sebagai pemilik risiko yang bertanggung jawab atas pengelolaan risiko sehari-hari dalam proses bisnisnya masing-masing. Lini kedua adalah unit manajemen risiko yang berperan dalam memberikan panduan, pemantauan, dan koordinasi atas implementasi manajemen risiko di seluruh unit. Sedangkan lini ketiga dijalankan oleh Internal Audit, yang bertugas melakukan penilaian independen terhadap efektivitas sistem manajemen risiko, pengendalian internal, dan tata kelola perusahaan.

The implementation of risk management is carried out within the framework of Enterprise Risk Management (ERM), which covers all types of significant risks that can affect the Company's operations and performance. PTK adopts a risk management system based on the Three Lines of Defense model as a clear and measurable risk management structure. The first line is in each function or work unit as the risk owner who is responsible for the day-to-day risk management in their respective business processes. The second line is the risk management unit whose role is to provide guidance, monitoring, and coordination of risk management implementation in all units. The third line is run by Internal Audit, which is tasked with conducting an independent assessment of the effectiveness of the risk management system, internal control, and corporate governance.



Komitmen terhadap pengelolaan risiko diperkuat melalui penandatanganan Traktat Manajemen Risiko oleh Direksi pada 1 September 2023, yang menjadi bentuk penguatan atas penerapan manajemen risiko korporasi berbasis ERM di lingkungan PTK. Seluruh fungsi di Perusahaan didorong untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dan kewaspadaan tinggi dalam setiap aktivitas bisnis guna meminimalkan potensi risiko. Langkah ini memastikan manajemen risiko tidak hanya menjadi formalitas, namun menjadi bagian integral dari budaya kerja dan proses pengambilan keputusan di seluruh tingkatan organisasi.

The commitment to risk management was strengthened through the signing of the Risk Management Treaty by the Board of Directors on September 1, 2023, which is a form of strengthening the implementation of ERM-based corporate risk management within PTK. All functions in the Company are encouraged to apply the principles of prudence and high vigilance in every business activity to minimize potential risks. This step ensures that risk management is not just a formality, but an integral part of the work culture and decision-making process at all levels of the organization.

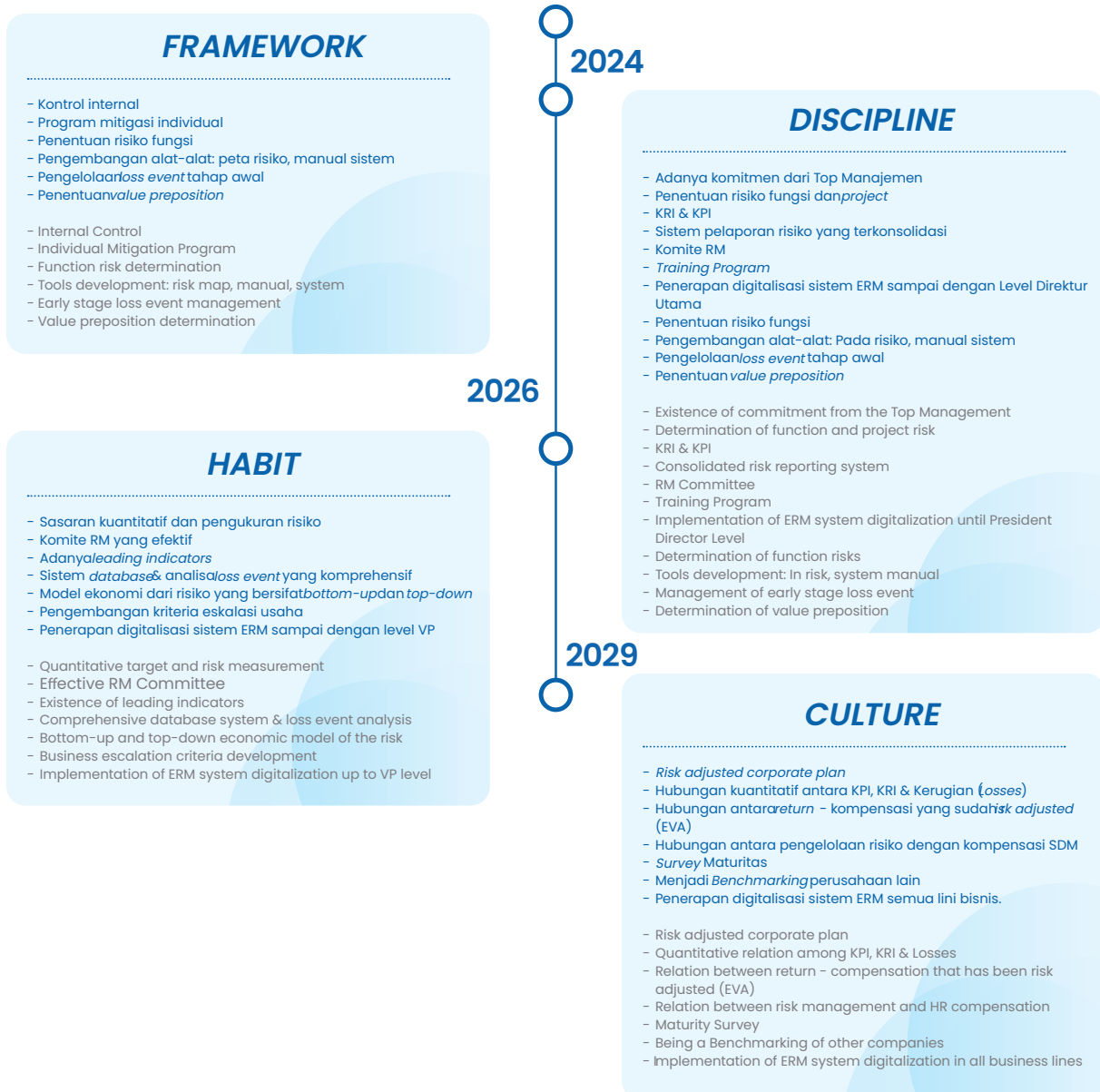


Roadmap Manajemen Risiko

Risk Management Roadmap

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan risiko yang terintegrasi secara menyeluruh di seluruh level organisasi, PTK telah menyusun *Roadmap* Manajemen Risiko periode 2020–2026. *Roadmap* ini disusun sebagai pedoman strategis dalam mengimplementasikan kerangka kerja ERM secara bertahap dan berkelanjutan, sekaligus sebagai alat ukur pencapaian sasaran manajemen risiko yang telah ditetapkan oleh Perusahaan.

In order to realize integrated risk management as a whole at all levels of the organization, PTK has developed a Risk Management Roadmap for the period 2020–2026. This roadmap is prepared as a strategic guideline for implementing the ERM framework gradually and sustainably, as well as a measuring tool for achieving the risk management goals set by the Company.







Peran Aktif Dewan Komisaris dan Direksi Dalam Penerapan Manajemen Risiko

Active Role of the Board of Commissioners and Board of Directors in the Risk Management Implementation

Peran aktif Dewan Komisaris dan Direksi tercermin dalam upaya membangun struktur organisasi yang mendukung penerapan manajemen risiko secara efektif. Struktur tersebut bertanggung jawab dalam memastikan adanya pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas antar unit, serta menjamin tersedianya sumber daya manusia yang kompeten dan memadai dari segi kuantitas maupun kualitas. Dengan struktur yang kuat, proses identifikasi, analisis, pengendalian, dan pemantauan risiko dapat dijalankan secara optimal sesuai karakteristik, kompleksitas, dan profil risiko Perusahaan.

Struktur pengelolaan manajemen risiko PTK dimulai dari pengawasan aktif Dewan Komisaris melalui Komite Investasi dan Risiko Usaha, serta Direksi melalui Komite Manajemen Risiko. Perusahaan juga didukung oleh fungsi-fungsi operasional yang terlibat dalam pengelolaan risiko, termasuk fungsi Budgeting & Management Analysis, fungsi manajemen risiko di tiap unit kerja, serta entitas Anak Perusahaan. Masing-masing memiliki peran dan tanggung jawab dalam proses pengendalian risiko sesuai wilayah kerjanya.

Lebih lanjut, sebagai bentuk pengawasan dan pengendalian yang berkelanjutan, Direksi bertugas menyusun kebijakan manajemen risiko secara menyeluruh dan mengusulkan strategi yang komprehensif. Kebijakan dan strategi tersebut selanjutnya dievaluasi serta disetujui oleh Dewan Komisaris, guna memastikan bahwa implementasi manajemen risiko di PTK terintegrasi dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, serta pencapaian tujuan strategis Perusahaan.

The active role of the Board of Commissioners and Board of Directors is reflected in efforts to build an organizational structure that supports the effective implementation of risk management. The structure is responsible for ensuring a clear division of duties and responsibilities between units, as well as ensuring the availability of competent and adequate human resources in terms of quantity and quality. With a strong structure, the process of identifying, analyzing, controlling, and monitoring risks can be carried out optimally according to the characteristics, complexity, and risk profile of the Company.

PTK's risk management structure begins with the active supervision of the Board of Commissioners through the Investment and Business Risk Committee and the Board of Directors through the Risk Management Committee. The Company is also supported by operational functions involved in risk management, including the Budgeting & Management Analysis function, risk management functions in each work unit, and subsidiaries. Each has a role and responsibility in the risk control process according to its working area.

Furthermore, as a form of continuous monitoring and control, the Board of Directors is tasked with formulating an overall risk management policy and proposing a comprehensive strategy. These policies and strategies are then evaluated and approved by the Board of Commissioners to ensure that the implementation of risk management at PTK is integrated into the planning, decision-making, and achievement of the Company's strategic objectives.

Profil Risiko Perusahaan dan Mitigasi Risiko

Company Risk Profile and Risk Mitigation

Pada tahun 2024, Perusahaan menghadapi sejumlah risiko utama yang mencakup aspek lingkungan bisnis, strategi bisnis, citra Perusahaan, manajemen keuangan, hukum, tata kelola dan kepatuhan, serta operasional. Untuk menghadapi risiko-risiko tersebut, Perusahaan telah melakukan pemetaan dan analisis menyeluruh terhadap potensi risiko serta menetapkan langkah-langkah mitigasi yang terukur dan terintegrasi ke dalam sistem manajemen risiko, guna memastikan keberlangsungan operasional dan pencapaian tujuan strategis

In 2024, the Company faced several key risks covering aspects of the business environment, business strategy, corporate image, financial management, legal, governance and compliance, and operations. To deal with these risks, the Company conducted a thorough mapping and analysis of potential risks and established measurable mitigation measures integrated into the risk management system to ensure operational sustainability and achievement of strategic objectives.

No.	Jenis Risiko Type of Risk	Risiko Risk	Mitigasi Mitigation
1.	Operational-Sales & Marketing-Marketing Strategy	Tidak tercapainya realisasi revenue PTK tahun 2024 Rp7,8Triliun The realization of PTK revenue in 2024 of Rp7.8 trillion is not achieved	1. Pendekatan target pasar untuk memperoleh kepastian pelaksanaan pekerjaan dan peningkatan <i>awareness</i> dan <i>branding</i> melalui <i>Customer Visit</i>, Rakor, FGD, Forum Sinergi dan Forum Kapnas (SKK Migas). 2. Melakukan percepatan dan mendorong fungsi terkait untuk melaksanakan realisasi investasi harus tepat waktu sesuai timeline yang ada di RKAP, antara lain melakukan <i>pulse check progress</i> bersama Tim Investasi serta berkoordinasi dengan HC Pusat untuk <i>hire expertise</i>/SDM sesuai kebutuhan. 3. Melakukan <i>sourcing</i> dan <i>approach</i> dalam rangka mendapatkan acuan HPP kapal yang sesuai dan berlaku umum di pasar. 4. Mendapatkan acuan atau <i>database</i> mitra <i>strategic</i> untuk mendapatkan peluang pasar, antara lain pendekatan dgn <i>Asset Owner</i> 1. Target market approach to obtain certainty of work implementation and increase awareness and branding through Customer Visit, Rakor, FGD, Synergy Forum, and Kapnas Forum (SKK Migas). 2. Accelerating and encouraging related functions to carry out investment realization on time according to the timeline in the ABOP, including conducting pulse check progress with the Investment Team and coordinating with the Central HC to hire expertise/HR as needed. 3. Sourcing and approaching to obtain a reference for ship HPP that is appropriate and generally accepted in the market. 4. Obtaining a reference or database of strategic partners to obtain market opportunities, including approaches with Asset Owners.
2.	Operational-Human Resources-Organization	Terhambatnya pelaksanaan proses bisnis perusahaan Delays in the implementation of the Company's business processes	1. Penetapan proses bisnis dan RASCI 2. Penyusunan uraian jabatan PTK 3. Evaluasi dan penyempurnaan organisasi. 4. Pembuatan <i>corporate charter</i> SH IML 5. Melakukan rekrutmen berdasarkan hasil persetujuan MPP 6. Membuat kajian urgensi kebutuhan organisasi 7. Percepatan persetujuan rekrutmen dengan <i>Holding</i> dan SH IML 1. Determination of business process and RASCI 2. Preparation of job descriptions for PTK 3. Evaluation and improvement of the organization. 4. Creation of SH IML corporate charter 5. Recruiting based on the results of MPP approval 6. Making an urgency study of organizational needs 7. Acceleration of recruitment approval with Holding and SH IML



No.	Jenis Risiko Type of Risk	Risiko Risk	Mitigasi Mitigation
3.	Financial Management- Financial Operation- Planning & Budgeting	Rendahnya tingkat pengembalian <i>idle cash</i> Low rate of return on <i>idle cash</i>	1. Menyusun perencanaan/kajian <i>cash flow</i> setiap bulan. 2. Mengikuti program <i>Liquidity Control Tower</i> ("LCT") Holding 3. <i>Monitoring</i> progres realisasi investasi atas pendanaan yang telah dilakukan 4. Melakukan update STK terkait pengelolaan <i>cash flow</i> 5. Pendekatan target pasar untuk mengetahui kebutuhan <i>customer</i> oleh Marketing dan pembahasan rencana investasi dengan melakukan pulse check progress sampai didapatkannya kepastian kerjasama/utilisasi oleh <i>customer</i> dalam bentuk kontrak/HoA/MoU, surat penunjukan atau dokumen/komitmen tertulis lainnya terkait dengan PTK sebagai pelaksana pekerjaan. 6. Melakukan <i>market sourcing</i> dan <i>market intelligence</i>, serta melakukan negosiasi <i>requirement</i>/kriteria dengan <i>customer</i> apabila terdapat perbedaan spesifikasi asset/onjek investasi dengan <i>requirement customer</i> 1. Preparing cash flow planning/assessment every month. 2. Participating in the Liquidity Control Tower ("LCT") Holding program. 3. Monitoring the progress of investment realization on the funding that has been done. 4. Updating STK related to cash flow management 5. Target market approach to find out customer needs by Marketing and discussion of investment plans by conducting pulse check progress until the certainty of cooperation/utilization by the customer in the form of contracts/HoA/MoU, appointment letters or other written documents/commitments related to PTK as the executor of the work. 6. Conducting market sourcing and market intelligence, as well as negotiating requirements/criteria with customers if there are differences in asset/investment object specifications with customer requirements.
4.	Operational- Operational Excellence- Operational Performance	Timbulnya <i>claim</i> dari <i>pencharter</i> dan <i>Off Hired</i> Incurrence of claims from charterers and Off Hired.	1. Melaksanakan perawatan tepat waktu sesuai <i>timeline</i> yang ditetapkan. 2. Penyampaian jadwal <i>docking</i> ke <i>pencharter</i> dan memberikan kapal pengganti 3. Penyampaian spek dan kondisi kapal oleh Fungsi Fleet Marine ke Marketing sebelum pelaksanaan kontrak 4. Melakukan sidak ke kapal, pemasangan alat <i>fuel monitoring system</i> 1. Carrying out maintenance on time according to the established timeline. 2. Submitting docking schedules to the charterer and providing replacement ships. 3. Submission of vessel specs and conditions by Fleet Marine Function to Marketing before contract execution. 4. Inspecting the ship, installation of fuel monitoring system tools.
5.	Operational-HSSE-Safety	Terjadinya insiden <i>catastrophic</i> yang berkaitan dengan <i>fire, explosion, spill, fatality</i> dan <i>process safety</i> insiden. Catastrophic incidents related to fire, explosion, spill, fatality, and process safety incidents.	1. Melaksanakan kampanye dalam bentuk sosialisasi, komunikasi, promosi aspek sistem manajemen HSSE 2. Pelaksanaan HSSE <i>Mandatory training</i> 3. Pelaksanaan MWT 4. Melaksanakan inspeksi umum 5. Membuat atau memperbaharui STK atas setiap kegiatan kritis terhadap setiap aspek keselamatan. 6. Sosialisasi <i>Learned From Event</i> (LFE), CSMS, Sosialisasi SLSR (<i>Shipping Life Saving Rules</i>). 7. Melaksanakan program peningkatan budaya HSSE.

No.	Jenis Risiko Type of Risk	Risiko Risk	Mitigasi Mitigation
			1. Carrying out campaigns in the form of socialization, communication, and promotion of HSSE management system aspects 2. Implementation of HSSE Mandatory training 3. Implementation of MWT 4. Carrying out general inspections 5. Establishing or updating STK for every critical activity on every safety aspect. 6. Socialization of Learned From Event (LFE), CSMS, Socialization of SLSR (Shipping Life-Saving Rules). 7. Carrying out HSSE culture improvement program.
6.	<i>Business Strategy-Planning-Portfolio Business Planning</i>	Tidak terealisasinya ABI dan progress fisik ABI and physical progress not realized	1. <i>Upskilling/training project management</i>, pembuatan <i>Owner Estimate, Capital Budgeting/Financial Modeling, Market Intelligence</i>, dan lain-lain untuk seluruh Fungsi Pengusul Investasi (<i>Project Owner</i>) dan Tim Pengadaan Kapal. 2. Pelaksanaan <i>Assesment</i>, verifikasi, dan seleksi secara ketat vendor/kontraktor yang menawarkan keberminatan dan implementasi SMART GEP untuk proses pengadaan barang/jasa di PTK 3. Revisi STK <i>Assesment</i> calon galangan, perbaikan klausul-kalusul pada draft kontrak new building vessel 4. Pendekatan target pasar untuk mengetahui kebutuhan <i>customer</i> oleh Marketing dan pembahasan rencana investasi dengan melakukan <i>pulse check progress</i> sampai didapatkannya kepastian kerjasama/utilisasi oleh customer dalam bentuk kontrak/HoA/MoU, surat penunjukan atau dokumen/komitmen tertulis lainnya terkait dengan PTK sebagai pelaksana pekerjaan. 5. Melakukan <i>market sourcing</i> dan <i>market intelligence</i>, serta melakukan negosiasi <i>requirement/kriteria</i> dengan customer apabila terdapat perbedaan spesifikasi asset/objek investasi dengan requirement customer. 6. Pelaksanaan <i>challenge session</i> dan pemilahan secara ketat atas usulan ABI yang diusulkan Fungsi Pengusul paralel dengan pendampingan oleh Fungsi SPBD selama pembuatan <i>Feasibility Study</i> dimana usulan yang dapat dimasukkan ke RKAP hanya usulan ABI dengan tingkat maturitas yang tinggi 1. Upskilling/training on project management, Owner Estimate, Capital Budgeting/Financial Modeling, Market Intelligence, etc. for all Investment Proposer Functions (Project Owner) and Ship Procurement Team. 2. Strict assessment, verification, and selection of vendors/contractors who offer their interest and implementation of SMART GEP for the procurement process of goods/services in PTK. 3. Revision of STK Assessment of prospective shipyards, improvement of clauses in the draft new building vessel contract 4. Target market approach to find out customer needs by Marketing and discussion of investment plans by conducting pulse check progress until the certainty of cooperation/utilization by the customer in the form of contracts/HoA/MoU, appointment letters or other written documents/commitments related to PTK as the executor of the work. 5. Conducting market sourcing and market intelligence and negotiating requirements/criteria with the customer if there are differences in asset/investment object specifications with customer requirements. 6. Implementation of challenge sessions and strict sorting of ABI proposals proposed by the Proposing Function in parallel with assistance by the SPBD Function during the preparation of the Feasibility Study where proposals that can be included in the ABOP are only ABI proposals with a high level of maturity.



No.	Jenis Risiko Type of Risk	Risiko Risk	Mitigasi Mitigation
7.	<i>Business Strategy- Planning-Commercial Planning</i>	Monetisasi aset (tanah dan/atau bangunan) milik perusahaan yang kurang optimal. Less than optimal monetization of assets (land and/or buildings) owned by the Company.	1. Melakukan koordinasi intensif dengan Pihak Ketiga dan melakukan <i>maintenance</i> aset milik PTK 2. Melakukan mapping dan approaching kepada customer potential (Melakukan penawaran kepada masing-masing calon penyewa di internal dan external (dengan mengutamakan calon penyewa dari Pertamina Group)) 3. Melakukan appraisal atas aset (Memberikan harga yang kompetitif) 4. Melakukan percepatan pengurusan perizinan 1. Intensive coordination with Third Parties and maintenance of PTK's assets. 2. Mapping and approaching potential customers (Make offers to each prospective tenant internally and externally (by prioritizing prospective tenants from Pertamina Group)) 3. Conducting appraisal of assets (Providing competitive prices) 4. Accelerating the licensing process
8.	<i>Legal, Governance & Compliance-Legal- Litigation and Dispute Resolution</i>	Timbulnya Kerugian bagi PTK dari Kontrak Kerjasama dengan Customer dan Gugatan Hukum dari Customer PTK incurred losses from Cooperation Contracts with Customers and Lawsuits from Customers	1. Fungsi Legal Counsel membuatkan format baku draft kontrak untuk berbagai jenis pekerjaan yang dilaksanakan oleh Perusahaan 2. Menginformasikan kepada fungsi procurement & logistics apabila terdapat kontrak revenue yang membutuhkan kontrak <i>back to back</i> (<i>mirroring</i> klausul kontrak antara ptk-customer dengan ptk-vendor) 3. Fungsi Legal membuatkan mitigasi risiko-risiko dari aspek legal yang mungkin dapat terjadi di kemudian hari atas setiap kontrak 1. The Legal Counsel function creates a standardized format of contract drafts for various types of work carried out by the Company. 2. Informing the procurement & logistics function if there is a revenue contract that requires a back-to-back contract (mirroring the contract clause between PTK-customer and PTK-vendor) 3. Legal function mitigates risks from legal aspects that may occur in the future for each contract.
9.	<i>Legal, Governance & Compliance-Legal- Litigation and Dispute Resolution</i>	Izin operasional perusahaan di cabut/dikenakan sanksi karena tidak <i>comply</i> dengan peraturan yang berlaku The Company's operational license is revoked/ sanctioned because it does not comply with applicable regulations	1. Melakukan penunjukan PIC di masing-masing fungsi yang bertanggung jawab untuk memonitor kesesuaian proses bisnis dengan perundangan yang berlaku 2. Sosialisasi aplikasi PRECISE 3. Penginputan dan updating master data pada aplikasi PRECISE 1. Appointing PICs in each function who are responsible for monitoring the conformity of business processes with applicable laws and regulations. 2. Socialization of PRECISE application 3. Inputting and updating master data in the PRECISE application

No.	Jenis Risiko Type of Risk	Risiko Risk	Mitigasi Mitigation
10.	<i>Corporate Image- Brand Image- Communication</i>	Citra perusahaan tidak dapat mendukung peningkatan nilai komersial perusahaan The Company's image cannot support the increase of the Company's commercial value	1. Berkoordinasi dengan fungsi-fungsi di internal Perusahaan dalam melaksanakan <i>mapping</i> dan <i>stakeholders engagement</i> 2. Melakukan media engagement, media gathering, publikasi kegiatan operasional, <i>marketing</i>, produk dan jasa PTK Grup 3. Melaksanakan program CSR sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat, kantor/wilayah operasi dan bersifat berkelanjutan 4. Membuat <i>backup</i> data penting Perusahaan dan berkoordinasi dengan Fungsi terkait 5. Berkoordinasi dengan fungsi-fungsi di internal Perusahaan dalam melaksanakan <i>stakeholders engagement</i> 6. Berkoordinasi dengan fungsi terkait dalam Penerapan tata nilai AKHLAK 7. Melaksanakan monitoring terkait publikasi media 1. Coordinating with functions within the Company in carrying out mapping and stakeholder engagement. 2. Conducting media engagement, media gathering, publication of PTK Group's operational activities, marketing, products, and services 3. Implementing CSR programs in accordance with the needs and characteristics of the community, office/operating area and is sustainable 4. Making backups of important Company data and coordinating with related functions 5. Coordinating with functions within the Company in implementing stakeholder engagement. 6. Coordinating with related functions in the implementation of AKHLAK values 7. Carrying out monitoring related to media publications
11.	<i>Financial Management- Financial Operation- Liquidity</i>	Piutang <i>overdue</i> yang belum terbayarkan Unpaid <i>overdue</i> receivables	1. Melakukan <i>monitoring</i> kelengkapan dokumen penagihan 2. Monitoring finalisasi kontrak 3. Implementasi <i>Advance Payment</i> 100% untuk Kapal Kapal Pihak Ke-3 dan Umum 4. Menerbitkan SOA (<i>Statement of Account</i>) kepada customer setiap bulannya sebagai upaya apabila nilai final tagihan kepada customer lebih besar dari nilai uang muka yang diberikan 5. Memberikan kesempatan kepada customer yang dalam keadaan kesulitan cash flow untuk melakukan cicilan pembayaran pelunasan piutang 6. Melayangkan somasi kepada debitur yang bermasalah dan tidak memenuhi kewajiban pembayaran serta mengupayakan agar Debitur memberikan pernyataan pengakuan hutang 7. Melaksanakan percepatan penandatanganan BA Coklit 8. Penerbitan Laporan bulanan piutang lengkap dengan aging piutang sebagai informasi kepada user terkait posisi piutang dan dasar tindak lanjut user dalam upaya penyelesaian piutang yang masih belum terbayarkan 1. Monitoring the completeness of billing documents 2. Monitoring contract finalization 3. Implementation of 100% Advance Payment for 3rd Party and General Vessels 4. Issuing SOA (Statement of Account) to customers every month as an effort if the final value of the bill to the customer is greater than the value of the advance given 5. Providing opportunities for customers who are in cash flow difficulties to make installments of payment of receivables repayment 6. Sending subpoenas to debtors who are problematic and do not fulfill payment obligations and strive for Debtors to provide a statement of debt recognition 7. Accelerating the signing of BA Coklit 8. Issuance of monthly accounts receivable reports complete with aging of accounts receivable as information to users regarding the position of accounts receivable and the basis for user follow-up in efforts to settle outstanding accounts receivable.



No.	Jenis Risiko Type of Risk	Risiko Risk	Mitigasi Mitigation
12.	<i>Business Environment-Technology-Technology Adaptability</i>	Kehilangan data yang diakibatkan oleh serangan siber ataupun <i>malware</i> Data loss caused by cyberattacks or malware	1. Melakukan edukasi kepada end user terkait pentingnya keamanan data 2. Implementasi sistem pengamanan data di sisi <i>end user</i> 1. Data loss caused by cyberattacks or malwareEducating end users on the importance of data security 2. Implementation of data security system on the end-user side

Monitoring Realisasi Mitigasi Risiko Perusahaan Tahun 2024

Monitoring the Realization of Company Risk Mitigation in 2024

PTK telah melakukan monitoring risiko di tahun 2024 yang disusun dan dilakukan secara menyeluruh pada proses bisnis di setiap unit kerja melalui tahapan proses pemantauan (*monitoring*) risiko yang diikuti dengan proses komunikasi dan koordinasi secara berkesinambungan. Hal ini dilakukan untuk memastikan efektivitas pelaksanaan atas mitigasi risiko (tindak lanjut) yang telah di susun oleh unit kerja telah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, sehingga diharapkan potensi risiko dapat diminimalisir dan dikendalikan.

Per 31 Desember 2024, pencapaian monitoring *Risk Management Performance* telah mencapai 100%. Pencapaian tersebut diperoleh dari keseluruhan rencana mitigasi yang telah dilakukan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Monitoring realisasi mitigasi risiko dilakukan setiap bulan dan dilaporkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris PTK melalui laporan manajemen serta dilaporkan kepada PT Pertamina International Shipping selaku Subholding Shipping dan PT Pertamina (Persero) melalui Sistem *Enterprise Risk Management System* (ERMS).

PTK conducted risk monitoring in 2024, which was compiled and carried out thoroughly in business processes in each work unit through the stages of the risk monitoring process, followed by a continuous communication and coordination process. It is conducted to ensure the effectiveness of the implementation of risk mitigation (follow-up) that has been compiled by the work unit has been carried out properly and in accordance with the predetermined plan, so it is expected that potential risks can be minimized and managed.

As of December 31, 2024, the achievement of Risk Management Performance monitoring reached 100%. This achievement was obtained from the overall mitigation plan carried out in accordance with the established plan. Monitoring of risk mitigation realization is carried out every month and reported to the Board of Directors and PTK Decommissioning through management reports and reported to PT Pertamina International Shipping as Subholding Shipping and PT Pertamina (Persero) through the Enterprise Risk Management System (ERMS).

Evaluasi atas Efektivitas Sistem Manajemen Risiko

Evaluation of Risk Management System Effectiveness

PTK secara konsisten melakukan evaluasi terhadap efektivitas penerapan sistem manajemen risiko sebagai bagian penting dari proses mitigasi risiko bisnis dan peningkatan pengambilan keputusan strategis. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai keberhasilan tindakan yang telah diambil dalam mengurangi atau menghindari risiko yang teridentifikasi,

PTK consistently evaluates the effectiveness of the risk management system implementation as a crucial part of the business risk mitigation process and improved strategic decision-making. This evaluation aims to assess the success of actions taken in reducing or avoiding identified risks, as well as the basis for adjusting risk management strategies.

serta sebagai dasar penyesuaian strategi pengelolaan risiko. Proses evaluasi dilakukan secara menyeluruh di seluruh lini operasional dan fungsi perusahaan oleh para pemilik risiko, termasuk pemilik program dan proses bisnis, untuk memastikan bahwa pengendalian risiko berjalan efektif dan sesuai sasaran.

Salah satu bentuk evaluasi dilakukan melalui *Pertamina Risk Maturity Self Assessment (PRISMA)* pada tahun 2022. Evaluasi ini mengacu pada tiga pilar ISO 31000:2018, yakni *Principles, Framework, dan Process*, untuk mengukur tingkat kematangan manajemen risiko di lingkungan PTK. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa PTK memperoleh skor *Risk Maturity Index* sebesar 3,78, yang berada pada Level 4 (Managed). Capaian ini mencerminkan bahwa manajemen risiko telah terintegrasi dalam proses bisnis, ditinjau secara berkala, dan didukung oleh kepemimpinan yang berkomitmen. Hasil dari penilaian ini juga menjadi dasar dalam penyusunan *Opportunity for Improvement (OFI)* dan *Action for Improvement (AFI)* sebagai upaya berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas dan kematangan sistem manajemen risiko Perusahaan di masa mendatang.

The evaluation process is conducted thoroughly across all operational lines and company functions by risk owners, including program and business process owners, to ensure that risk control is effective and on target.

One form of evaluation was carried out through *Pertamina Risk Maturity Self Assessment (PRISMA)* in 2022. This evaluation refers to the three pillars of ISO 31000:2018, namely *Principles, Framework, and Process*, to measure the level of risk management maturity in the PTK environment. The evaluation results show that PTK obtained a *Risk Maturity Index* score of 3.78, which is at Level 4 (Managed). This achievement reflects that risk management has been integrated into business processes, regularly reviewed, and supported by committed leadership. The results of this assessment also form the basis for the preparation of *Opportunity for Improvement (OFI)* and *Action for Improvement (AFI)* as an ongoing effort to improve the effectiveness and maturity of the Company's risk management system in the future.

Pernyataan Manajemen atas Kecukupan Sistem Manajemen Risiko

Management's Statement on the Adequacy of the Risk Management System

Dewan Komisaris dan Direksi PTK secara aktif melakukan pengawasan terhadap penerapan sistem manajemen risiko, termasuk melalui berbagai komite dan forum koordinasi rutin untuk memastikan bahwa proses manajemen risiko telah mencakup identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta didukung oleh sistem informasi yang memadai.

Pengelolaan risiko di seluruh aspek operasional dan keuangan Perusahaan dilaksanakan sesuai kebijakan yang berlaku. Dalam aspek keuangan, pengendalian dilakukan melalui mekanisme *Internal Control Over Financial Reporting (ICOFR)* dengan hasil evaluasi menunjukkan efektivitas yang memadai. Sementara itu, pengendalian operasional dilakukan melalui *Internal Control Review (ICR)* oleh Internal Audit, yang menegaskan bahwa prosedur operasi PTK telah dijalankan sesuai praktik terbaik industri marine sepanjang tahun 2024.

PTK's Board of Commissioners and Board of Directors actively supervise the implementation of the risk management system, including through various committees and regular coordination forums, to ensure that the risk management process includes identification, measurement, monitoring, and control of risks and is supported by adequate information systems.

Risk management in all operational and financial aspects of the Company is conducted in accordance with applicable policies. In the finance aspect, control is implemented through the *Internal Control Over Financial Reporting (ICOFR)* mechanism, with evaluation results showing adequate effectiveness. Meanwhile, operational control is carried out through an *Internal Control Review (ICR)* by Internal Audit, which confirms that PTK's operating procedures have been run according to marine industry best practices throughout 2024.



Perkara Penting yang Dihadapi Perusahaan

Important Cases Faced by the Company

Sepanjang tahun 2024, jumlah kasus hukum yang dihadapi PTK, anggota Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Anak dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Sepanjang tahun 2024, jumlah kasus hukum yang dihadapi PTK, anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta Entitas Anak dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Permasalahan Hukum Legal Cases	Pidana Criminal	Perdata Civil
Perusahaan Company		
Selesai dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap Completed and has permanent legal force	-	3
Dalam proses penyelesaian In the settlement process	-	3
Jumlah Total	-	6
Dewan Komisaris dan Direksi Board of Commissioners and Board of Directors		
Selesai dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap Completed and has permanent legal force	-	-
Dalam proses penyelesaian In the settlement process	-	-
Jumlah Total	-	-
Entitas Anak Subsidiaries		
Selesai dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap Completed and has permanent legal force	-	-
Dalam proses penyelesaian In the settlement process	-	1
Jumlah Total	-	1

Berikut adalah informasi mengenai perkara penting yang dihadapi Perusahaan sepanjang tahun 2024:

The following is information regarding important cases faced by the Company throughout 2024:

1. Kasus Hukum Gugatan Sewa Aset Lahan di Lahan Bagus Kuning, Palembang

Pada tanggal 27 April 2021, Perusahaan digugat oleh PT Batubara Mandiri (PT BBM) di Pengadilan Negeri Batam terkait pembatasan penggunaan lahan sewa di Lahan Bagus Kuning, Plaju, Palembang. Atas kasus hukum yang terjadi sejak tahun 2021 tersebut, pada tahun 2024 Perusahaan mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia di mana pada tanggal 20 Maret 2024, Mahkamah Agung Republik Indonesia memperkuat putusan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau. Selanjutnya pada 30 Desember 2024, Perusahaan menempuh Upaya Hukum Luar Biasa dengan menyampaikan Memori Peningjauan Kembali ke Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam atas perkara ini.

1. Legal Case of Land Asset Lease Lawsuit in Bagus Kuning, Palembang.

On April 27, 2021, the Company was sued by PT Batubara Mandiri (PT BM) at the Batam District Court regarding restrictions on the use of leased land at Lahan Bagus Kuning, Plaju, Palembang. For the legal case that occurred in 2021, in 2024, the Company filed an appeal to the Supreme Court of the Republic of Indonesia where on March 20, 2024, the Supreme Court of the Republic of Indonesia upheld the decision of the Riau Islands High Court. Furthermore, on December 30, 2024, the Company took Extraordinary Legal Efforts by submitting a Memorandum of Review to the Supreme Court of the Republic of Indonesia through the Batam District Court Registrar for this case.

2. Perkara Perdata di Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI") dengan PT Dok Bahari Nusantara ("DBN")

Pada 18 September 2019, Perusahaan dan DBN telah menandatangani perjanjian pembelian dan pembangunan 3 (tiga) unit kapal *harbour tug* 3200 HP. Berdasarkan perjanjian tersebut, DBN tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk menyelesaikan pembangunan kapal sesuai jangka waktu dalam perjanjian, sehingga Perusahaan telah melakukan pengakhiran lebih awal terhadap perjanjian tersebut pada tahun 2021. Atas perkara perdata ini, Majelis Arbiter BANI telah mengeluarkan putusan terhadap perkara dan mewajibkan PTK dan DBN untuk melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati, kecuali kewajiban untuk membayar denda oleh DBN kepada PTK karena telah ditolak oleh Majelis Arbitrase.

Status perkara saat ini, Para Pihak sedang dalam proses melaksanakan Putusan BANI dan Kesepakatan Perdamaian dengan melakukan lelang melalui KPKNL Cirebon atas 2 (dua) unit kapal yang menjadi objek Putusan BANI. Hingga diselesaikannya laporan keuangan konsolidasian ini, telah dilakukan 2 (dua) kali proses lelang, yaitu pada 10 Desember 2024 dan 20 Desember 2024, di mana kedua lelang tersebut telah berakhir tanpa adanya penawaran atas 2 (dua) unit kapal yang dilelang.

3. Perkara Perdata di Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI") dengan PT Batamec

Pada tanggal 27 Desember 2019, Perusahaan melakukan pemesanan 2 (dua) unit kapal kepada PT Batamec sebagaimana dituangkan dalam Pokok-Pokok Perjanjian Pembelian dan Pembangunan 2 (dua) Unit Kapal Harbour Tug 3200 HP. Hingga akhir jangka waktu Perjanjian, PT Batamec tidak juga menyelesaikan dan menyerahkan 2 (dua) unit kapal *Harbour Tug* 3200 HP tersebut sehingga Perusahaan melakukan pengakhiran lebih awal terhadap perjanjian tersebut pada tanggal 23 November 2022 efektif tanggal 30 November 2022.

Dalam rangka membela kepentingan hukum Perusahaan atas kerugian yang timbul akibat kegagalan Pembangunan kapal tersebut, Perusahaan telah mengajukan upaya hukum banding pada 5 Juli 2024, yang merupakan upaya hukum terakhir, ke Mahkamah Agung di mana atas hal tersebut Perusahaan telah menerima informasi bahwa telah terdapat Putusan Mahkamah Agung yang pada intinya menyatakan permohonan banding Perusahaan dikabulkan.

2. Civil Case at the Indonesian National Arbitration Board with PT Dok Bahari Nusantara ("DBN")

On September 18, 2019, the Company and DBN signed an agreement for the purchase and construction of 3 (three) units of 3200 HP harbor tug vessels. Based on the agreement, DBN was unable to fulfill its obligation to complete the construction of the vessel according to the period in the agreement, so the Company terminated the agreement early in 2021. For this civil case, the BANI Arbitration Panel issued a decision on the case and obliged PTK and DBN to implement the agreed Peace Agreement, except for the obligation to pay a fine by DBN to PTK because it has been rejected by the Arbitration Panel.

The current status of the case, the Parties are in the process of implementing the BANI Decision and the Peace Agreement by conducting an auction through KPKNL Cirebon for 2 (two) units of vessels that are the object of the BANI Decision. Until the completion of these consolidated financial statements, there have been 2 (two) auction processes, namely on December 10, 2024, and December 20, 2024, where both auctions have ended without any bids for the 2 (two) units of ships being auctioned.

3. Civil Case at the Indonesian National Arbitration Board with PT PT Batamec

On December 27, 2019, the Company placed an order for 2 (two) units of vessels to PT Batamec as outlined in the Principles of Purchase and Construction Agreement for 2 (two) Units of 3200 HP Harbor Tug Vessels. Until the end of the Agreement period, PT Batamec did not complete and deliver the 2 (two) units of the 3200 HP Harbor Tug Vessel, so the Company early terminated the agreement on November 23, 2022, effective on November 30, 2022.

In order to defend the Company's legal interests for the losses incurred due to the failure to construct the vessels, the Company filed an appeal on July 5, 2024, which is the last legal remedy, to the Supreme Court, where the Company received information that there has been a Supreme Court Decision which essentially states that the Company's appeal is granted.



4. Kasus hukum pekerjaan keagenan PT Spectra Samudera Line (PT SSL)

Pada tahun 2024, Perusahaan masih menghadapi perkara hukum atas Pekerjaan Keagenan antara Perusahaan kepada PT SSL yang merupakan transaksi keagenan tahun 2014 – 2015. Pada kasus hukum ini, PTK menuntut gugatan kepada PT Spectra Samudera Line atas kewajiban pembayaran terhadap pekerjaan keagenan kapal. Status perkara saat pada tahun 2024, yaitu pada tanggal 13 Juni 2024 telah dikeluarkan Putusan PN Tangerang yang pada intinya menyatakan gugatan Perusahaan tidak dapat diterima dengan verstek.

Bahwa atas hal tersebut, Perusahaan telah mengajukan banding dimana Putusan Banding dari Pengadilan Tinggi Banten menyatakan bahwa PT SSL diharuskan membayarkan sejumlah kerugian kepada Perusahaan. Selanjutnya, PT SSL telah mengajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung, sehingga pada tanggal 21 November 2024 Perusahaan telah mengajukan Kontra Memori Kasasi kepada Mahkamah Agung. Sampai dengan saat ini dokumen perkara masih dalam proses pemeriksaan di Mahkamah Agung.

5. Kasus hukum Pekerjaan Keagenan PT Pelayaran Hub Maritim Indonesia (PT PHMI)

Pada tahun 2024, Perusahaan masih menghadapi perkara hukum atas Pekerjaan Keagenan Perusahaan kepada PT PHMI yang merupakan transaksi keagenan tahun 2014. Pada kasus hukum ini, PTK menggugat PT Pelayaran Hub Maritim Indonesia atas kewajiban pembayaran terhadap pekerjaan keagenan kapal. Bahwa atas *outstanding* tersebut, Perusahaan telah mendaftarkan gugatan pada tanggal 26 Januari 2024 ke Pengadilan Negeri Surabaya dan saat ini Perusahaan telah melakukan penunjukan kepada konsultan hukum RAJ & Associates untuk mengajukan gugatan baru di PN Surabaya.

6. Kasus hukum pekerjaan keagenan PT Bushido Prima Agency (PT BPA)

Pada tahun 2024, Perusahaan masih menghadapi perkara hukum atas Pekerjaan Keagenan Perusahaan kepada PT BPA merupakan transaksi keagenan tahun 2014. Pada kasus hukum ini, PTK menggugat PT Bushido Prima Agency Atas Kewajiban Pembayaran Terhadap Pekerjaan Keagenan Kapal. Perusahaan telah melakukan pendaftaran gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor Perkara 1235/Pdt.G/2023/PN JKT. SEL tertanggal 27 Desember 2023. Status perkara per tanggal 31 Desember 2024, Perusahaan masih menunggu hasil putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

4. Legal case of Agency Work of PT Spectra Samudera Line (PT SSL)

In 2024, the Company still faced a legal case over the Agency Work between the Company, to PT SSL, which was an agency transaction in 2014 – 2015. In this legal case, PTK filed a lawsuit against PT Spectra Samudera Line for payment obligations for ship agency work. The case status in 2024, namely on June 13, 2024, a verdict was issued by the Tangerang District Court, which stated that the Company's lawsuit could not be accepted by verstek.

Upon this, the Company filed an appeal where the Appeal Decision from the Banten High Court stated that PT SSL was required to pay several losses to the Company. Furthermore, PT SSL filed a Cassation to the Supreme Court, so on November 21, 2024, the Company submitted a Counter Memorandum of Cassation to the Supreme Court. Until now, the case documents are still in the examination process at the Supreme Court.

5. Legal case of Agency Work of PT Pelayaran Hub Maritim Indonesia (PT PHMI)

In 2024, the Company still faced a legal case over the Company's Agency Work with PT PHMI, which was an agency transaction in 2014. In this legal case, PTK sued PT Pelayaran Hub Maritim Indonesia for payment obligations for ship agency work. For the outstanding, the Company registered a lawsuit on January 26, 2024, to the Surabaya District Court, and currently the Company has appointed RAJ & Associates legal consultants to file a new lawsuit at the Surabaya District Court.

6. Legal case of Agency Work of PT Bushido Prima Agency (PT BPA)

In 2024, the Company still faced a legal case over the Company's agency work to PT BPA, which was an agency transaction in 2014. In this legal case, PTK sued PT Bushido Prima Agency for payment obligations for ship agency work. The Company registered the lawsuit at the South Jakarta District Court with Case Number 1235/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL dated December 27, 2023. As of December 31, 2024, the case status remained pending a decision from the South Jakarta District Court.

Perkara Hukum Lainnya

Other Legal Cases

Sepanjang tahun 2024, tidak terdapat perkara lain yang dihadapi oleh Perusahaan, khususnya terkait perpajakan, lingkungan, Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial yang melibatkan Perusahaan, Dewan Komisaris dan Direksi serta Entitas Anak.

Throughout 2024, there were no other cases faced by the Company, especially related to taxation, environment, labor, and industrial relations involving the Company, the Board of Commissioners, the Board of Directors, and subsidiaries.

Sanksi Administratif

Administrative Sanctions

Sebagai bentuk komitmen Perusahaan terhadap pemenuhan kepatuhan peraturan perundang-undangan, pada tahun 2024 tidak terdapat teguran ataupun sanksi administratif yang diberikan kepada PTK dari instansi/lembaga yang berwenang di bidang usaha Perusahaan.

As part of the Company's commitment to legal compliance, there were no warnings or administrative sanctions issued to PTK by any authorities in the Company's business sector in 2024.

Keterbukaan Informasi dan Akses Data Perusahaan

Information Disclosure and Access to Company Data

PTK senantiasa menjalankan prinsip keterbukaan informasi sebagai bagian dari komitmen terhadap penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Perusahaan meyakini bahwa keterbukaan informasi tidak hanya mencerminkan transparansi, tetapi juga menjadi salah satu aspek penting dalam membangun kepercayaan publik dan memperkuat hubungan dengan para pemangku kepentingan. Oleh karena itu, PTK secara aktif menyediakan akses informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham, regulator, mitra usaha, karyawan, dan masyarakat luas.

Untuk mendukung keterbukaan informasi, PTK memanfaatkan berbagai saluran komunikasi, baik elektronik maupun cetak, termasuk situs web resmi, laporan tahunan, media sosial, publikasi internal, serta kegiatan diseminasi informasi seperti forum pemangku kepentingan dan pertemuan-pertemuan berkala dengan pemegang saham. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya membangun citra positif Perusahaan sekaligus menjawab kebutuhan publik akan informasi terkini terkait aktivitas dan kontribusi PTK dalam industri maritim nasional.

PTK always carries out the principle of information disclosure as part of its commitment to Good Corporate Governance implementation. The Company believes that information disclosure not only reflects transparency, but also becomes one of the crucial aspects in building public trust and strengthening relationships with stakeholders. Therefore, PTK actively provides access to accurate, relevant, and timely information to all stakeholders, including shareholders, regulators, business partners, employees, and the broader community.

To support information disclosure, PTK utilizes various communication channels, both electronic and print, including the official website, annual reports, social media, and internal publications, as well as information dissemination activities, such as stakeholder forums and periodic meetings with shareholders. This step was taken as part of the effort to build a positive image of the Company while responding to the public's need for up-to-date information regarding PTK's activities and contributions to the national maritime industry.



www.pertamina-ptk.com



Pertamina Trans Kontinental
Jl. Yos Sudarso No.32 Jakarta Utara 14320, Indonesia
Telephone : (+6221) 80678500
Email : pusat.ptk@pertamina.com
Email Marketing : marketing.ptk@pertamina.com
salesmarketing.ptk@pertamina.com



Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan, Laporan Keuangan, dan Laporan lainnya
Annual Report, Sustainability Report, Financial Statements, and other reports

Dalam menerapkan keterbukaan informasi, PTK tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab. Setiap insan Perusahaan diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan informasi yang bersifat terbatas atau rahasia, terutama informasi non-publik yang belum diumumkan secara resmi kepada khalayak umum. Pengelolaan informasi dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan internal mengenai perlindungan data dan informasi perusahaan. Dengan demikian, PTK dapat menjamin keamanan data strategis sekaligus tetap memenuhi hak publik untuk mendapatkan informasi secara adil dan proporsional.

In implementing information disclosure, PTK continues to prioritize the principles of prudence and responsibility. Every employee of the Company is required to maintain the confidentiality of limited or confidential information, especially non-public information that has not been officially announced to the general public. Information management is carried out with due regard to applicable laws and regulations as well as internal policies regarding the protection of company data and information. Thus, PTK can ensure the security of strategic data while still fulfilling the public's right to obtain information fairly and proportionally.

Kode Etik Perusahaan Code of Conduct

PTK berkomitmen untuk terus mengikuti perkembangan praktik tata kelola perusahaan yang baik salah satunya diwujudkan dengan menetapkan standar tinggi dalam penerapan Kode Etik Perusahaan (*Code of Conduct*) sebagai pedoman perilaku yang wajib dijalankan oleh seluruh insan Perusahaan, termasuk Dewan Komisaris dan Direksi.

Kode Etik ini menjadi landasan dalam membangun dan menjaga hubungan yang profesional, jujur, beretika, dan berintegritas dengan seluruh pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal. Pedoman ini wajib diterapkan dalam setiap interaksi bisnis, termasuk hubungan dengan pelanggan, mitra usaha, dan sesama rekan kerja. Kepatuhan terhadap Kode Etik diharapkan dapat mencegah terjadinya konflik kepentingan serta menghindarkan insan Perusahaan dari menjalin hubungan yang tidak wajar atau tidak etis, yang dapat merugikan integritas dan reputasi Perusahaan.

PTK is committed to keeping abreast of developments in good corporate governance practices, one of which is realized by setting high standards in the implementation of the Company's Code of Conduct as a code that must be carried out by all Company employees, including the Board of Commissioners and Board of Directors.

This Code of Conduct serves as a foundation for building and maintaining professional, honest, ethical, and integrity relationships with all stakeholders, both internal and external. This Code must be applied in every business interaction, including relationships with customers, business partners, and fellow colleagues. Compliance with the Code of Conduct is expected to prevent conflicts of interest and prevent Company employees from establishing improper or unethical relationships, which may harm the integrity and reputation of the Company.

Pokok-Pokok Isi Kode Etik

Principles of the Code of Conduct Contents

PTK telah menetapkan dan menerapkan Kode Etik Perusahaan (*Code of Conduct*) sebagai pedoman perilaku yang wajib diikuti oleh seluruh insan Perusahaan dalam menjalankan aktivitas usaha dan operasional sehari-hari. Kode Etik ini tertuang dalam dokumen Pedoman *Code of Conduct* No. A-003/PTK0300/2022-S9, dan menjadi acuan utama dalam membentuk budaya kerja di Perusahaan.

Penyusunan Kode Etik dilakukan secara selaras dengan nilai-nilai dan budaya AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif), yang merupakan fondasi moral dan etika kerja bagi seluruh insan BUMN, termasuk di lingkungan PTK. Secara garis besar, muatan Kode Etik PTK mencakup pengaturan prinsip-prinsip dan perilaku yang harus diterapkan dalam berinteraksi dengan para pemangku kepentingan, yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

PTK has established and implemented the Company's Code of Conduct as a code that must be followed by all Company employees in carrying out business activities and daily operations. This Code of Conduct is contained in the Guideline document for Code of Conduct No. A-003/PTK0300/2022-S9, and is the key reference in shaping the work culture in the Company.

The preparation of the Code of Conduct is carried out in line with the values and culture of AKHLAK (Trustworthy, Competent, Harmonious, Loyal, Adaptive, and Collaborative), which is the foundation of morals and work ethics for all SOE employees, including those in PTK. Broadly speaking, the content of the PTK Code of Conduct covers the regulation of principles and behaviors that must be applied in interacting with stakeholders, which include the following matters:

Komitmen Kepatuhan terhadap Kode Etik

Commitment to Compliance with Code of Conduct

PTK senantiasa menegaskan komitmennya dalam menegakkan Kode Etik sebagai standar perilaku dan etika tertinggi yang harus dipatuhi oleh seluruh insan Perusahaan. Sebagai bentuk nyata dari komitmen tersebut, seluruh insan PTK termasuk Direksi, Dewan Komisaris, dan seluruh karyawan diwajibkan untuk memahami, mematuhi, serta menandatangani Surat Pernyataan Kepatuhan terhadap Kode Etik secara berkala setiap tahun. Pada tahun 2024, tingkat kepatuhan terhadap Kode Etik mencapai 100%, di mana seluruh karyawan PTK telah menyelesaikan penandatanganan Surat Pernyataan Kepatuhan melalui aplikasi *Compliance Online System* (COMPOLS).

PTK always affirms its commitment to upholding the Code of Conduct as the highest standard of behavior and ethics that must be adhered to by all Company employees. As a tangible form of this commitment, all personnel, including the Board of Directors, Board of Commissioners, and all employees, must understand, comply with, and sign a Statement of Compliance with the Code of Conduct periodically every year. In 2024, the level of compliance with the Code of Conduct reached 100%, where all PTK employees completed the signing of the Statement of Compliance through the Compliance Online System (COMPOLS) application.



Nilai dan Budaya Perusahaan

Nilai dan Budaya Perusahaan

A

Amanah
Trustworthy

K

Kompeten
Competent

H

Harmonis
Harmonious

L

Loyal
Loyal

A

Adaptif
Adaptive

K

Kolaboratif
Collaborative

Pokok-Pokok Pedoman Code of Conduct:

Principles of Code of Conduct:

Mengatur prinsip-prinsip dan perilaku yang harus diterapkan dalam berinteraksi dengan pemangku kepentingan.

Set the principles and behavior that must be applied in interacting with stakeholders.

Bab Umum

- Pendahuluan
- Tujuan
- Ruang Lingkup
- Pengertian
- Referensi

Bab Visi, Misi dan Tata Nilai Unggulan Perusahaan

- Visi dan Misi
- Tata Nilai Unggulan Perusahaan

Prinsip-prinsip GCG, Perilaku Integritas Insan PTK

- Integritas
- Persaingan Usaha yang Sehat
- Sikap Kerja Profesional

Persaingan Sehat

- Persaingan Usaha yang Sehat
- Proses Pengadaan Penyedia Barang/Jasa
- Informasi Penting

Kerahasiaan Data dan Transparansi

- Kerahasiaan Data dan Informasi
- Pelaporan Akuntansi dan Keuangan
- Pengelolaan Arsip

Sikap Profesional

- Sikap Kerja Profesional
- Berani Mengungkapkan Masalah
- Pengambilan Keputusan
- Hak Kekayaan Intelektual
- Menghindari Diskriminasi
- Kesempatan Karir yang Sama
- Standar Ketenagakerjaan
- Bebas Narkoba dan Minuman Keras
- Aktivitas Politik
- Media Massa
- Organisasi Profesi

Komitmen Terhadap Pemangku Kepentingan Lainnya

- Komitmen Terhadap Pemegang Saham
- Komitmen Terhadap Pekerja
- Komitmen Terhadap Serikat Pekerja
- Komitmen Terhadap Anak Perusahaan
- Komitmen Terhadap Penyedia Barang/Jasa
- Komitmen Terhadap Pemerintah Sebagai Regulator
- Komitmen Terhadap Legislatif
- Komitmen Terhadap Investor, Kreditur dan Bank
- Komitmen Terhadap Mitra Usaha, Lembaga Penelitian dan Perguruan Tinggi
- Komitmen Terhadap Kesehatan, Keselamatan, Keamanan (K3) dan Lingkungan Lingkungan
- Komitmen Terhadap Masyarakat Sekitar dan Tanggung Jawab Sosial

Whistleblowing System

- Ruang Lingkup
- Struktur
- Fungsi Pengelola
- Saluran Penyampaian Pelaporan

General Chapter

- Introduction
- Objective
- Scope
- Understanding
- Reference

Chapter Vision, Mission and Values of the Company

- Visi dan Misi
- Tata Nilai Unggulan Perusahaan

GCG Principles, Integrity Behavior of PTK Employees

- Integrity
- Healthy Business Competition
- Professional Work Attitude

Healthy Competition

- Healthy Business Competition
- Procurement Process for Goods/Service Providers
- Important Information

Data Confidentiality and Transparency

- Data and Information Confidentiality
- Accounting and Financial Reporting
- Archives Management

Professional Attitude

- Professional Work Attitude
- Dare to Express Problems
- Decision-making
- Intellectual property rights
- Avoiding Discrimination
- Equal Career Opportunities
- Employment Standards
- Drug and Alcohol Free
- Political Activities
- Mass media
- Professional Organizations

Professional Attitude

- Commitment to Shareholders
- Commitment to Employees
- Commitment to Trade Unions
- Commitment to Subsidiaries
- Commitment to Goods/Service Providers
- Commitment to the Government as Regulator
- Commitment to the Legislature
- Commitment to Investors, Creditors and Banks
- Commitment to Business Partners, Research Institutions, and Universities
- Commitment to Health, Safety, Security (K3) and Environmental Protection
- Commitment to the Surrounding Community and Social Responsibility

Whistleblowing System

- Scope
- Structure
- Management Function
- Reporting Submission Channel

Pemberlakuan Kode Etik kepada Seluruh Insan PTK

Enactment of the Code of Conduct for All PTK Employees

PTK telah menetapkan kode etik sesuai dengan visi dan misi Perusahaan yang berfungsi sebagai pedoman perilaku bagi seluruh pegawai dalam berinteraksi, baik dengan pihak di dalam lingkungan Perusahaan maupun pihak luar. Kode etik Perusahaan diperkenalkan ke seluruh tingkatan di lingkungan Perusahaan dan tertulis dalam kontrak kerja perekrutan pegawai yang harus dipahami dan ditandatangani oleh seluruh pegawai. Seluruh pegawai diharapkan untuk berperilaku sesuai nilai-nilai Perusahaan dan menerapkan kode etik dalam kegiatan sehari-hari.

Seluruh insan PTK wajib menempatkan diri untuk menyamakan dan menyatukan keyakinan dan tekad agar dapat menerapkan sikap dan perilaku kerja yang sesuai dengan sistem nilai dan budaya kerja yang dianut Perusahaan, yang dikodifikasikan dalam *Code of Conduct*. Keberhasilan penerapan *Code of Conduct* merupakan tanggung jawab dari setiap insan PTK di lingkungan unit kerja masing-masing. *Code of Conduct* PTK wajib dilaksanakan mulai dari Dewan Komisaris, Direksi, Pemimpin Unit sampai dengan pekerja. *Code of Conduct* PTK dilaksanakan secara konsisten sebagai budaya kerja dalam aktivitas operasional sehari-hari.

PTK has set forth a Code of Conduct that aligns with the Company's vision and mission, serving as a behavioral guide for all employees in their interactions, both internally and externally. The Company introduces the Code of Conduct at all levels and includes it in employment contracts, which must be understood and signed by all employees. All employees are expected to act according to the Company's values and apply the Code of Conduct in their daily activities.

All PTK employees are required to align their beliefs and determination to adopt attitudes and behaviors consistent with the Company's value system and work culture, codified in the Code of Conduct. The successful implementation of the Code of Conduct is the responsibility of each PTK member within their respective units. The PTK Code of Conduct must be followed consistently from the Board of Commissioners, Directors, and Unit Leaders to all employees, integrating it as a work culture in daily operations.

Sosialisasi dan Penegakan Kode Etik

Socialization and Enforcement of the Code of Conduct

PTK senantiasa melakukan sosialisasi yang berkelanjutan atas Kode Etik Perusahaan untuk menanamkan budaya etika dan integritas di seluruh lini organisasi. Sosialisasi ini ditujukan kepada seluruh insan Perusahaan, termasuk jajaran manajemen, karyawan tetap, dan tenaga alih daya (*outsourcing*), guna memastikan bahwa seluruh pihak memahami dan menerapkan standar etika perusahaan dalam setiap aktivitas kerja.

Kegiatan sosialisasi dilakukan secara berkala melalui berbagai media internal dan momen Perusahaan, seperti dalam forum komunikasi, pelatihan internal, *onboarding* karyawan baru, serta *event-event* yang diselenggarakan Perusahaan. PTK juga memanfaatkan platform digital, seperti aplikasi *Compliance Online System* (COMPOLS), untuk mendukung pengisian survei kepatuhan dan pemahaman terhadap Kode Etik oleh seluruh karyawan.

Dalam rangka memastikan implementasi Kode Etik secara konsisten dan menyeluruh, PTK telah menetapkan Chief Compliance Officer (CCO) sebagai pihak yang bertanggung

PTK always conducts continuous socialization of its Code of Conduct to instill a culture of ethics and integrity throughout the organization. This socialization is aimed at all Company personnel, including management, permanent employees, and outsourcing employees, to ensure that all parties understand and apply the Company's ethical standards in every work activity.

Socialization activities are carried out regularly through various internal media and Company moments, such as in communication forums, internal training, new employee onboarding, and events held by the Company. PTK also utilizes digital platforms, such as the Compliance Online System (COMPOLS) application, to support the completion of compliance surveys and understanding of the Code of Conduct by all employees.

In order to ensure consistent and comprehensive implementation of the Code of Conduct, PTK has appointed a Chief Compliance Officer (CCO) as the party responsible



jawab dalam melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengembangan praktik-praktik tata kelola perusahaan yang baik. Peran CCO meliputi penguatan kepatuhan terhadap Kode Etik, etika bisnis, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai bentuk penguatan budaya disiplin dan integritas, PTK menerapkan sistem pemberian sanksi atas setiap pelanggaran terhadap Kode Etik Perusahaan. Penegakan disiplin ini dilakukan secara konsisten dan proporsional, serta mengacu pada ketentuan dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan aturan disiplin internal yang berlaku di lingkungan Perusahaan. Jenis-jenis sanksi yang dapat dikenakan meliputi: Teguran tertulis, Surat peringatan (SP), Penurunan golongan upah, dan Pemutusan hubungan kerja (PHK).

Selain itu, PTK juga telah menyediakan mekanisme pelaporan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik, yang dapat disampaikan langsung oleh insan Perusahaan kepada atasan, pimpinan unit kerja, atau fungsi kepatuhan yang telah ditunjuk secara resmi. Setiap laporan yang diterima akan diproses, diverifikasi, dan ditindaklanjuti secara profesional dan rahasia, sesuai dengan prosedur dan mekanisme internal yang berlaku.

for fostering, supervising, and developing good corporate governance practices. The CCO's role includes strengthening compliance with the Code of Conduct, business ethics, and the provisions of applicable laws and regulations.

As a form of strengthening the culture of discipline and integrity, PTK implements a sanctioning system for any violation of the Company's Code of Conduct. The enforcement of this discipline is carried out consistently and proportionally and refers to the provisions in the Collective Labor Agreement (CLA) and internal disciplinary rules that apply within the Company. The types of sanctions that may be imposed include a Written reprimand, Warning Letter (SP), Decrease in wage class, and Termination of employment (PHK).

In addition, PTK has provided a reporting mechanism for alleged violations of the Code of Conduct, which can be submitted directly by Company employees to their superiors, work unit leaders, or officially appointed compliance functions. Every report received will be processed, verified, and followed up professionally and confidentially, in accordance with applicable internal procedures and mechanisms.

Jumlah Pelanggaran Kode Etik dan Tindak Lanjutnya

Number of Code of Conduct Violations and Its Follow-Up

Pada tahun 2024, tidak terdapat pelanggaran terhadap Kode Etik Perusahaan.

In 2024, there were no violations of the Company's Code of Ethics.

Integritas sebagai Landasan Keunggulan Operasional dan Keberlanjutan

Integrity as the Foundation of Operational Excellence and Sustainability

PTK memastikan bahwa integritas tidak hanya dimaknai sebagai kepatuhan terhadap hukum, tetapi menjadi nilai inti yang terintegrasi dalam setiap aspek strategi bisnis. Integritas dijadikan landasan dalam pengambilan keputusan, membentuk budaya kerja yang etis, serta memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan. Melalui penerapan tata kelola perusahaan yang baik, sistem pengendalian internal, dan kode etik yang ketat, PTK menciptakan lingkungan yang mendukung transparansi dan akuntabilitas. Pendekatan ini tidak hanya melindungi reputasi perusahaan, tetapi juga meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi risiko, serta memperkuat keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang.

PTK ensures that integrity is viewed not only as compliance with the law but also as a core value integrated into every aspect of the business strategy. Integrity serves as the foundation for decision-making, shaping an ethical work culture, and strengthening stakeholder trust. Through the implementation of good corporate governance, internal control systems, and strict codes of conduct, PTK creates an environment that supports transparency and accountability. This approach not only protects the company's reputation but also enhances operational efficiency, reduces risks, and strengthens long-term business sustainability.

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

Policy on State Officials' Wealth Report (LHKPN)

100%

Menyadari pentingnya LHKPN sebagai salah satu kunci penting upaya pemberantasan korupsi, pada tahun 2024 seluruh pejabat yang menjadi wajib lapor LHKPN di PTK telah menyampaikan laporan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi secara tepat waktu.

Recognizing the importance of the LHKPN as a key element in the fight against corruption, in 2024, all officials at PTK are required to report their assets submitted their wealth reports to the Corruption Eradication Commission (KPK) on time.

PTK secara konsisten menerapkan pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola perusahaan yang baik serta meneguhkan komitmen terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas. Implementasi ini tidak hanya menunjukkan kepatuhan PTK terhadap regulasi yang berlaku, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam membangun budaya integritas di lingkungan Perusahaan. Untuk memastikan standar etika yang tinggi di setiap jajaran manajemen serta mencegah potensi praktik korupsi, PTK secara aktif mengarahkan dan mengoordinasikan para pejabat yang wajib melaporkan LHKPN agar menyampaikan laporan mereka secara tepat waktu.

PTK consistently implements the management of the State Officials' Wealth Report (LHKPN) as part of efforts to strengthen good corporate governance and strengthen commitment to the principles of transparency and accountability. This implementation not only shows PTK's compliance with applicable regulations, but also becomes a strategic step in building a culture of integrity within the Company. To ensure high ethical standards at every level of management and prevent potential corrupt practices, PTK actively directs and coordinates officials who are required to report LHKPN to submit their reports promptly.

Kebijakan Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

State Officials' Wealth Reporting Policy

PTK telah memiliki kebijakan mengenai pedoman pelaksanaan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Utama PT Pertamina Trans Kontinental No. Kpts-547/C0000/2021-S0 tanggal 27 Mei 2021 tentang Ratifikasi Pedoman PT Pertamina (Persero) No. A13-001/N00200/2021-S9 Rev-0 tentang Pengelolaan Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Kebijakan ini mengatur berbagai aspek terkait kewajiban pelaporan LHKPN, termasuk pegawai Perusahaan yang wajib melaporkan harta kekayaannya, tata cara penyampaian laporan, peran unit kerja pengelola dan administrator LHKPN, serta sanksi yang dapat dijatuhkan bagi pegawai yang tidak memenuhi kewajibannya.

PTK has a policy regarding the guidelines for the implementation of the State Officials' Wealth Report (LHKPN), which is stipulated through the Decree of the President Director of PT Pertamina Trans Kontinental No. Kpts-547/C0000/2021-S0 dated May 27, 2021, concerning Ratification of PT Pertamina (Persero) Guidelines No. A13-001/N00200/2021-S9 Rev-0 concerning Management of Obligations to Submit State Officials' Wealth Reports.

This policy regulates various aspects related to LHKPN reporting obligations, including Company employees who are required to report their assets, procedures for submitting reports, the role of the LHKPN management and administrator work unit, and sanctions that can be imposed for employees who do not fulfill their obligations.



Pejabat yang Diwajibkan Menyampaikan LHKPN

Officials Required to Submit LHKPN

Berdasarkan Kebijakan LHKPN Perusahaan, maka pejabat yang diwajibkan untuk menyampaikan LHKPN adalah sebagai berikut:

1. Direksi
2. Dewan Komisaris
3. Direksi Anak Perusahaan
4. Dewan Komisaris Anak Perusahaan
5. Vice President/Setara
6. Manager/Setara
7. Manager/Setara di Anak Perusahaan
8. Assistant Manager/Setara
9. Pejabat level struktural yang diberi kewenangan untuk memutuskan.

Based on the Company's LHKPN Policy, the officials required to submit LHKPN are as follows:

1. Board of Directors
2. Board of Commissioners
3. Subsidiaries' Board of Directors
4. Subsidiaries' Board of Commissioners
5. Vice President/Equivalent
6. Manager/Equivalent
7. Manager/Equivalent at Subsidiaries
8. Assistant Manager/Equivalent
9. Structural level officials authorized to make decisions.

Ketentuan dan Tata Cara Penyampaian LHKPN

Provisions and Procedures for Submitting LHKPN

LHKPN disampaikan satu (1) kali dalam setahun kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara elektronik melalui aplikasi berbasis web e-LHKPN. Prosedur penyampaian LHKPN di Perusahaan mengacu pada Peraturan KPK Nomor 03 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

LHKPN is submitted once a year to the Corruption Eradication Commission (KPK) electronically through the e-LHKPN web-based application. The procedure for submitting LHKPN in the Company refers to KPK Regulation Number 03 of 2024 concerning the Second Amendment to the Regulation of the Corruption Eradication Commission Number 07 of 2016 concerning Procedures for Registration, Announcement, and Examination of State Officials' Wealth.



LHKPN disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/berakhirnya jabatan/pensiun/pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun dan masih menjabat sebagai Penyelenggara Negara.

LHKPN is submitted within a period of no later than 2 (two) months from the time of the first appointment/end of office/retirement/reappointment after the end of the term of office or retirement and still serves as a State Official.

LHKPN selama Penyelenggara Negara menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas harta kekayaan per tanggal 31 Desember tahun laporan dan wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

LHKPN must be submitted no later than three (3) months from the date of initial appointment, end of term, retirement, or reappointment after the end of term or retirement as a State Official. During the tenure of the State Official, LHKPN is submitted periodically once a year, reporting assets as of December 31 of the reporting year and must be submitted no later than March 31 of the following year.

PTK juga secara aktif melakukan sosialisasi kepada seluruh pejabat wajib lapor agar pelaporan LHKPN dapat disampaikan secara akurat dan tepat waktu. Berdasarkan data yang tercantum dalam aplikasi e-LHKPN diketahui bahwa tingkat kepatuhan pejabat Perusahaan terkait kewajiban penyampaian LHKPN telah sangat memadai yaitu mencapai 100% dari 233 pejabat Perusahaan yang wajib melakukan LHKPN.

PTK also actively socializes the reporting requirements to all officials required to report, ensuring accurate and timely submission of the LHKPN. According to data recorded in the e-LHKPN application, the compliance rate of Company officials regarding the LHKPN submission obligation is very satisfactory, reaching 100% from 233 Company officials required to submit LHKPN.

Kebijakan Anti Korupsi, Anti Penyuapan dan Pengendalian Gratifikasi

Anti-Corruption, Anti-Bribery and Gratification Control Policies

Kebijakan Anti Korupsi dan Anti Suap

Anti-Corruption and Anti-Bribery Policy

PTK menerapkan kebijakan zero tolerance terhadap segala bentuk korupsi dan penyuapan. Perusahaan menegaskan bahwa setiap pelanggaran terhadap larangan tersebut akan dikenakan sanksi tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai salah satu bentuk pernyataan prinsip dan komitmen Perusahaan dalam mendukung praktik anti-penyuapan dan anti-korupsi, PTK telah mengimplementasikan berbagai kebijakan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan etika bisnis yang berlaku. Sebagai wujud komitmen tersebut, PTK telah mengadopsi Sistem Manajemen Anti Penyuapan secara konsisten mengacu pada standar ISO 37001:2016.

Kebijakan anti korupsi di PTK tertuang dalam sejumlah kebijakan yang menjadi panduan seluruh Insan Perusahaan dalam mencegah dan menangani tindakan korupsi, antara lain sebagai berikut:

PTK implements a zero-tolerance policy towards all forms of corruption and bribery. The Company emphasizes that any violation of this prohibition will be subject to strict sanctions in accordance with applicable laws and regulations. As a statement of the Company's principles and commitment to supporting anti-bribery and anti-corruption practices, PTK has implemented various policies to ensure compliance with applicable regulations and business ethics. As a manifestation of this commitment, PTK has adopted an Anti-Bribery Management System consistently referring to the ISO 37001: 2016 standard.

Anti-corruption policies at PTK are contained in several policies that guide all Company employees in preventing and handling acts of corruption, including the following:



1. Pedoman pengelolaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang telah disahkan melalui Direktur Utama melalui ketetapan No. A-001/PTK0320/2021-S0 pada Desember 2021;
 2. Pedoman Conflict Of Interest No. A-001/PTK0200/2024-S9 Revisi Ke-0 tanggal 11 September 2024 PT Pertamina Trans Kontinental;
 3. Surat Keputusan Direksi No. Kpts-062/PTK0000/2023-S9 tentang Ratifikasi Sistem Tata Kerja Pengelolaan Pengaduan;
 4. Pedoman Pengendalian Gratifikasi No.A-004/ PTK0300/2022-S9 tanggal 30 November 2022
 5. Pedoman Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ditetapkan melalui Surat Keputusan No. Kpts-547/C0000/2021-S0 tanggal 27 Mei 2021 tentang Gratifikasi Pedoman PT Pertamina (Persero) No A13-001/N00200/2021-S9 Tentang Pengelolaan Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
1. Guidelines for the management of the Anti-Bribery Management System (SMAP), authorized by the President Director through Decree No. A-001/PTK0320/2021-S0 in December 2021;
 2. Guideline for Conflict of Interest No. A-001/PTK0200/2024-S9 Revision 0 dated September 11, 2024, PT Pertamina Trans Kontinental;
 3. Board of Directors Decree No. Kpts-062/PTK0000/2023-S9 on the Ratification of the Complaint Management System;
 4. Gratification Control Guidelines No. A-004/PTK0300/2022-S9 on November 30, 2022;
 5. Guidelines for Reporting State Officials' Wealth (LHKPN) established through Decree No. Kpts547/C0000/2021-S0 on May 27, 2021, concerning PT Pertamina (Persero) Gratification Guidelines No. A13-001/N00200/2021-S9 on Managing Obligations for Reporting State Officials' Wealth.



Secara khusus, Direksi Perusahaan telah menandatangani deklarasi anti korupsi dan penyuapan yang dituangkan dalam kebijakan anti penyuapan yang berlaku bagi seluruh insan PTK.

Specifically, the Company's Board of Directors has signed an anti-corruption and bribery declaration as outlined in the anti-bribery policy that applies to all PTK employees.



Sosialisasi dan Pelatihan Anti Korupsi dan Anti Suap

Anti-Corruption and Anti-Bribery Socialization and Training

Sebagai bentuk pencegahan, PTK juga terus melakukan sosialisasi, pelatihan, serta pengawasan terhadap implementasi kebijakan dan komitmen anti korupsi dan anti suap guna menciptakan lingkungan kerja yang transparan, berintegritas, dan bebas dari praktik-praktik yang melanggar hukum. PTK secara aktif mengimplementasikan langkah-langkah anti korupsi dan anti suap melalui berbagai program yang telah konsisten dilakukan, antara lain pelaksanaan sosialisasi sharing session fraud awareness dan WBS, pengisian survey PERFECT (*Fraud Perception Index*) untuk mengetahui tingkat pemahaman seluruh pegawai dan vendor terhadap pencegahan dan penanganan anti korupsi serta sosialisasi gratifikasi pada tahun 2024.

As a form of prevention, PTK also continues to conduct socialization, training, and supervision of the implementation of anti-corruption and anti-bribery policies and commitments to create a transparent work environment that has integrity and is free from unlawful practices. PTK actively implements anti-corruption and anti-bribery measures through various programs that have been consistently carried out, including the implementation of socialization of fraud awareness and WBS sharing sessions, filling out the PERFECT (*Fraud Perception Index*) survey to determine the level of understanding of all employees and vendors on anti-corruption prevention and handling and gratification socialization in 2024.

Selanjutnya, pada tahun 2024, PTK juga telah menyelenggarakan sejumlah program pelatihan terkait anti korupsi yang diberikan kepada para pegawai. Salah satu pelatihan yang telah dilakukan yaitu pelatihan Internal Auditor dan *Awareness Sistem & Standar Manajemen Terintegrasi* (ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001:2015, ISO 27001:2013, dan ISO 37001:2016) yang diselenggarakan pada tanggal 9-11 Oktober 2024 di Yogyakarta kepada 39 orang peserta.

Atas berbagai upaya pencegahan tindakan anti korupsi yang dilakukan, hingga akhir 31 Desember 2024, tidak terdapat insiden korupsi yang terbukti yang mengakibatkan pegawai diberhentikan atau dihukum karena korupsi serta insiden korupsi yang terbukti dan mengakibatkan kontrak dengan mitra bisnis diakhiri atau tidak diperbarui karena pelanggaran terkait korupsi.

Furthermore, in 2024, PTK organized several training programs related to anti-corruption provided to employees. One of the trainings that has been carried out is the Internal Auditor Training and Awareness of Integrated Management Systems & Standards (ISO 9001: 2015, ISO 45001: 2018, ISO 14001: 2015, ISO 27001: 2013, and ISO 37001: 2016) which was held on October 9-11, 2024, in Yogyakarta for 39 participants.

Due to the various anti-corruption measures taken, by the end of December 31, 2024, there were no proven incidents of corruption that resulted in employees being dismissed or convicted of corruption, nor any proven incidents of corruption that resulted in contracts with business partners being terminated or not renewed due to corruption-related offenses.

Kebijakan Pengendalian Gratifikasi

Gratification Control Policy

Untuk memperkuat komitmen anti korupsi di Perusahaan, PTK juga menerapkan kebijakan pengendalian gratifikasi yang secara konsisten telah dilakukan secara berkesinambungan. Pengendalian gratifikasi ini adalah bagian dari upaya PTK untuk membangun budaya dan sistem pencegahan korupsi.

To strengthen the Company's anti-corruption commitment, PTK also implements a consistent and continuous gratification control policy. This control is part of PTK's efforts to build a culture and system of corruption prevention.

Pedoman Pengendalian Gratifikasi No.A-004/PTK0300/2022-S9 tanggal 30 November 2022 merupakan penjabaran lebih lanjut dari *Code of Conduct* (CoC) dan ketentuan dalam Pedoman Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2015, serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pedoman Pengendalian Gratifikasi dibuat untuk membantu pekerja PT Pertamina Trans Kontinental dalam memahami definisi dan konsep Gratifikasi serta mengetahui tindakan yang harus dilakukan apabila berhadapan dengan Gratifikasi. Melalui kebijakan ini, Perusahaan melarang setiap pegawai, termasuk Dewan Komisaris dan Direksi beserta jajarannya untuk menerima hadiah atau cinderamata yang dianggap tindakan penyuapan.

The Gratification Control Guidelines No. A-004/PTK0300/2022-S9 on November 30, 2022, further elaborate on the Code of Conduct (CoC) and the 2015 Gratification Control Guidelines of the Corruption Eradication Commission, as well as Law No. 20 of 2001 regarding Amendments to Law No. 31 of 1999 on the Eradication of Corruption Crimes. The Gratification Control Guidelines help PT Pertamina Trans Kontinental employees understand the definition and concept of gratification and know what actions to take when confronted with gratification. Through this policy, the Company prohibits all employees, including the Board of Commissioners and the Board of Directors, from accepting gifts or souvenirs that could be perceived as bribery.

Pengelola laporan gratifikasi di PTK dilakukan oleh Fungsi Compliance dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Berwenang untuk menerima dan menelaah atas Laporan penerimaan/penolakan Gratifikasi Insan PT Pertamina Trans Kontinental yang dilaporkan melalui Compliance Online System atau service. compliance@pertamina.com;

Gratification reports at PTK are managed by the Compliance Function with the following duties and responsibilities:

1. Authorized to receive and review reports on the acceptance/rejection of Gratification by PT Pertamina Trans Kontinental employees, submitted via the Compliance Online System or service.compliance@pertamina.com;



2. Berwenang untuk mengajukan usulan terkait tindak lanjut atas laporan penerimaan/penolakan Gratifikasi;
 3. Berwenang mengusulkan pengelolaan/peruntukan/penyaluran barang Gratifikasi yang menjadi kewenangan Pertamina Trans Kontinental;
 4. Berwenang untuk melakukan koordinasi dengan KPK terkait laporan Gratifikasi;
 5. Berwenang meneruskan laporan penerimaan/penolakan Gratifikasi dari Insan PT Pertamina Trans Kontinental kepada KPK melalui Pertamina;
 6. Memberikan laporan penerimaan/penolakan Gratifikasi dari Insan PT Pertamina Trans Kontinental yang telah dilaporkan kepada Pertamina yang kemudian dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) minimal 1 (satu) tahun sekali kepada Chief Officer Compliance;
 7. Berwenang untuk melaksanakan sosialisasi terkait Gratifikasi dan melaksanakan kegiatan lainnya yang terkait.
2. Authorized to propose follow-up actions related to reports on the acceptance/rejection of Gratification;
 3. Authorized to propose the management/distribution of gratification items under the authority of Pertamina Trans Kontinental;
 4. Authorized to coordinate with the Corruption Eradication Commission (KPK) regarding gratification reports;
 5. Authorized to forward reports on the acceptance/rejection of Gratification from PTK employees to the KPK through PT Pertamina (Persero);
 6. Providing reports on the acceptance/rejection of Gratification from PTK employees, which have been reported to Pertamina and then to the KPK at least once a year to the Chief Compliance Officer;
 7. Authorized to conduct socialization related to Gratification and other related activities.

Kebijakan Pencegahan *Insider Trading* Policy on Insider Trading Prevention

Kebijakan *insider trading* bertujuan untuk mengatur dan mencegah praktik perdagangan saham perusahaan yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, atau orang dalam lainnya dengan memanfaatkan informasi yang belum tersedia di pasar. Kebijakan ini memastikan bahwa tidak ada pihak yang memperoleh keuntungan secara tidak sah dari akses terhadap informasi non-publik perusahaan.

Hingga akhir tahun 2024, PTK belum berstatus sebagai perusahaan terbuka (emiten), sehingga kebijakan terkait *insider trading* belum diatur secara spesifik. Namun, Perusahaan telah menerapkan aturan terkait penyebaran informasi, sebagaimana diatur dalam Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*). Setiap karyawan memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi non-publik yang berkaitan dengan perusahaan, mitra kerja, dan pihak lainnya. Pengungkapan informasi rahasia kepada pihak yang tidak berkepentingan dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

Sepanjang tahun 2024, PTK tidak menerima laporan atau pengaduan terkait dugaan penyebaran informasi non-publik untuk kepentingan pihak tertentu (*insider trading*), yang menunjukkan komitmen perusahaan dalam menjaga transparansi dan kepatuhan terhadap prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG).

The insider trading policy aims to regulate and prevent the practice of trading in company shares by the Board of Directors, Board of Commissioners, or other insiders by utilizing unavailable information in the market. This policy ensures that no one benefits unlawfully from access to the Company's non-public information.

Until the end of 2024, PTK has not yet had the status of a public company (issuer). Therefore, the policy related to insider trading has not been specifically regulated. However, the Company implemented rules related to the dissemination of information, as stipulated in the Code of Conduct. Each employee must maintain the confidentiality of non-public information relating to the Company, its partners, and other parties. Disclosure of confidential information to unauthorized parties is prohibited and may be subject to sanctions.

Throughout 2024, PTK did not receive any reports or complaints related to the alleged dissemination of non-public information for the benefit of particular parties (*insider trading*), which demonstrates the Company's commitment to maintaining transparency and compliance with the principles of good corporate governance (GCG).

Kebijakan Pemenuhan Hak-Hak Kreditur Policy on Creditors' Rights

PTK telah menetapkan kebijakan terkait pemenuhan hak-hak dan kewajiban perusahaan kepada kreditur, sebagaimana diatur dalam Tata Kerja Organisasi Pendanaan No. B-021/EI300/2021-S0. Kebijakan ini mencakup pengelolaan kredit jangka panjang dan jangka pendek, serta memastikan bahwa hak dan kewajiban perusahaan kepada kreditur dituangkan dalam perjanjian yang mengatur aspek finansial dan non-finansial. Selain itu, kebijakan ini juga mencakup peran PTK sebagai *avalist* (penjamin) serta ketentuan terkait penggunaan dana, guna memastikan transparansi dan kepatuhan terhadap prinsip tata kelola keuangan yang baik.

PTK has established policies related to the fulfillment of the Company's rights and obligations to creditors, as stipulated in the Funding Organization Work Procedure No. B-021/EI300/2021-S0. This policy covers the management of long-term and short-term credit, as well as ensuring that the Company's rights and obligations to creditors are outlined in agreements governing financial and non-financial aspects. In addition, this policy also covers PTK's role as *avalist* (guarantor) as well as provisions related to the use of funds, to ensure transparency and compliance with the principles of good financial governance.

Manajemen Rantai Pasok dan Pengadaan Barang/Jasa Supply Chain and Goods/Services Procurement Management

Komitmen PTK dalam mewujudkan penerapan Good Corporate Governance (GCG) diwujudkan melalui kebijakan terkait Pengadaan Barang/Jasa. Dalam setiap proses Pengadaan, Perusahaan selalu berupaya memperhatikan prinsip-prinsip Pengadaan antara lain: efisien, efektif, kompetitif, transparan, adil & wajar, terbuka, akuntabel, integritas serta prinsip kehati-hatian demi mewujudkan tata kelola yang baik bagi Perusahaan.

Perusahaan juga berkomitmen untuk selalu mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri, rancang bangun dan perekayasaan nasional, serta perluasan kesempatan bagi golongan usaha kecil sepanjang kualitas, harga, dan tujuannya dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka mendorong pertumbuhan industri dalam negeri dan berupaya untuk bekerja dengan Penyedia Barang/ Jasa yang menjamin pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan dengan menggunakan prosedur yang jelas, objektif dan memberikan kesempatan yang sama, serta menghindari konflik kepentingan.

Dalam rangka memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh Penyedia Barang/ Jasa serta sebagai bentuk praktik pengadaan yang berkelanjutan, Perusahaan berkomitmen untuk memberikan peluang kerja sama yang adil kepada seluruh Penyedia Barang/ Jasa baik kepada Perusahaan Dalam Negeri ataupun Perusahaan lokal yang berdomisili di sekitar wilayah operasi PT PTK yang diharapkan dapat mewujudkan peran Perusahaan dalam menggerakkan

PTK's commitment to realizing the implementation of Good Corporate Governance (GCG) is realized through policies related to Goods/Services Procurement. In every Procurement process, the Company always strives to pay attention to the principles of procurement, among others, efficient, effective, competitive, transparent, fair & reasonable, open, accountable, integrity, and prudent principles to realize good governance for the Company.

The Company is also committed to always prioritizing the use of domestic production, national design, and engineering, as well as expanding opportunities for small business groups as long as the quality, price, and purpose can be accounted for to encourage the growth of domestic industry and strive to work with Goods/Services Providers that guarantee the procurement of eco-friendly goods and services by using clear, objective procedures and providing equal opportunities, and avoiding conflicts of interest.

In order to provide equal opportunities to all Goods/Services Providers and as a form of sustainable procurement practices, the Company is committed to providing fair cooperation opportunities to all Goods/Services Providers, both Domestic Companies and local companies domiciled around PTK's operational areas which are expected to realize the Company's role in driving the local economy. During 2024, the Company collaborated with 117 local suppliers, or 99.15% of



ekonomi lokal. Selama tahun 2024, Perusahaan telah menjalin kerjasama dengan 117 pemasok lokal atau 99.15% dari total pemasok, dengan nilai pengadaan pemasok lokal sebesar Rp 1,86T atau 99.07% dari total nilai pengadaan.

the total suppliers, with a local supplier procurement value of Rp 1.86T, or 99.07% of the total procurement value.

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Goods/Services Procurement Policies

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa tercantum didalam Pedoman pengadaan barang/jasa No. A-001/PTK3300/2024-S9, Pedoman Pengelolaan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) No. A3.5-03/L10000/2023-S9 Revisi Ke-0 melalui Surat Keputusan No. Kpts - 245/PTK00000/2024-S9 tentang Pemberlakuan Sistem Tata Kerja (STK) Pengelolaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Lingkungan PT Pertamina Trans Kontinental (Group). Pedoman tersebut digunakan sebagai panduan dalam proses pengadaan barang/jasa agar dapat menghasilkan barang dan jasa yang efektif dan efisien. Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa PTK juga telah mengadopsi implementasi QHSSE-MS (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018) dan ISO 37001:2016.

Selain itu, untuk mendukung proses pengadaan barang/jasa di Perusahaan, PTK juga menerbitkan beberapa prosedur/Tata Kerja Organisasi, sebagai berikut:

1. Tata Kerja Organisasi Pengadaan Barang/Jasa Dalam Keadaan Darurat No. B-001/PTK3320/2024-S9 Revisi Ke-0;
2. Tata Kerja Organisasi Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/ Jasa No. B-002/PTK3320/2024-S9 Revisi Ke-0;
3. Tata Kerja Organisasi Pelaksanaan Penerbitan Kontrak dan Amandemen Kontrak No. B-003/PTK3320/2024-S9 Revisi Ke-0;
4. Tata Kerja Organisasi Pelaksanaan Registrasi dan Update Data Penyedia Barang/ Jasa No. B-002/PTK3320/2021-S9 Revisi Ke-0;
5. Tata Kerja Organisasi Perencanaan Pengadaan Barang/ Jasa No. B-003/PTK3320/2021-S9 Revisi Ke-0;
6. Tata Kerja Organisasi Pelaksanaan Penilaian Kinerja Dan Koreksi Sanksi kepada Penyedia Barang/ Jasa No. B5-005/100100/2019-S9 Revisi Ke-0;
7. Tata Kerja Individu Extend Nomor Penyedia Barang/ Jasa No. C-001/PTK3320/2024-S9 Revisi Ke-0;
8. Tata Kerja Individu Pelaksanaan Negosiasi No. C-001/PTK3320/2021-S9 Revisi Ke-0;

The Goods/Services Procurement Policy is contained in the Guidelines for the Procurement of Goods/Services No. A-001/PTK3300/2024-S9, Guidelines for the Management of the Use of Domestic Products (P3DN) No. A3.5-03/L10000/2023-S9 Revision 0 through Decree No. Kpts - 245/PTK00000/2024-S9 concerning the Implementation of the Work Procedure System (STK) Management of Increased Use of Domestic Products within PT Pertamina Trans Kontinental (Group). The guideline is used as a guide in the goods/services procurement process to produce effective and efficient goods and services. PTK's Goods/Services Procurement Policy has also adopted the implementation of QHSSE-MS (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018) and ISO 37001:2016.

In addition, to support the procurement process of goods/ services in the Company, PTK also issued several procedures/ Organizational Work Rules, as follows:

1. Organizational Work Procedure for Procurement of Goods/ Services in Emergencies No. B-001/PTK3320/2024-S9 Revision 0;
2. Organizational Work Procedure for the Implementation of the Selection of Goods/Services Providers No. B-002/PTK3320/2024-S9 Revision 0;
3. Organizational Work Procedure for the Issuance of Contracts and Contract Amendments No. B-003/PTK3320/2024-S9 Revision 0;
4. Organizational Work Procedure for the Implementation of Registration and Update of Goods/Service Provider Data No. B-002/PTK3320/2021-S9 Revision 0;
5. Organizational Work Procedure for the Planning of Goods/ Services Procurement No. B-003/PTK3320/2021-S9 Revision to 0;
6. Organizational Work Procedure for the Implementation of Performance Assessment and Correction of Sanctions to Goods/Services Providers No. B5-005/100100/2019-S9 Revision to 0;
7. Individual Work Procedure for Extending the Goods/ Services Provider Number No. C-001/PTK3320/2024-S9 Revision to 0;
8. Individual Work Procedure for Negotiation Implementation No. C-001/PTK3320/2021-S9 Revision to 0;

9. Tata Kerja Individu Pembuatan Owner Estimate / Harga Perhitungan Sendiri No. C-002/PTK3320/2021-S9 Revisi Ke-0; 10. Tata Kerja Individu Pelaksanaan Risk Assessment Dalam Rangka Penentuan Besaran Jaminan Pelaksanaan Dan Denda Maksimal No. C5-001/I30000/2021-S9.	9. Individual Work Procedure for Creating Owner Estimate/ Own Calculation Price No. C-002/PTK3320/2021-S9 Revision to 0; 10. Individual Work Procedure for Conducting Risk Assessment to Determine the Amount of Implementation Guarantee and Maximum Penalty No. C5-001/I30000/2021-S9.

Metode dan Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa Goods/Services Procurement Methods and Mechanisms

Sesuai dengan Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Perusahaan No. A-001/PTK3300/2024-S9 Revisi Ke-0 tanggal 01 Agustus 2024, metode pemenuhan kebutuhan Barang/Jasa dapat dipenuhi dengan metode antara lain:

In accordance with the Guidelines for Procurement of Goods/ Services of the Company No. A-001/PTK3300/2024-S9 Revision 0 dated August 1, 2024, the method of meeting the needs of Goods/Services can be met by methods, among others:

1. Sinergi Pertamina Incorporated

- a. Metode Sinergi Pertamina Incorporated dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan barang/jasa di lingkungan Pertamina, sepanjang memenuhi persyaratan kompetensi dan memiliki kemampuan yang sesuai dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan serta mempertimbangkan batasan target dan *roadmap* sinergi yang telah ditetapkan oleh Fungsi yang bertanggung jawab dalam mengelola Sinergi Pertamina Incorporated.
- b. Penunjukan Kepada Anak Perusahaan Pertamina/ Perusahaan Terafiliasi Pertamina
Penunjukan kepada Anak Perusahaan Pertamina/ Perusahaan Terafiliasi Pertamina dapat dilaksanakan sepanjang Barang/Jasa yang dibutuhkan merupakan produk atau layanan dari Anak Perusahaan Pertamina/Perusahaan Terafiliasi Pertamina tersebut serta memperhatikan kesesuaian Bidang Usaha dengan lingkup Pekerjaan yang akan dilaksanakan. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Anak Perusahaan Pertamina/Perusahaan Terafiliasi Pertamina yang mampu menyediakan Barang/Jasa yang dibutuhkan Pertamina, maka dapat dilaksanakan Penunjukan kepada salah satu Anak Perusahaan Pertamina/ Perusahaan Terafiliasi Pertamina berdasarkan justifikasi Fungsi Pengguna dan disetujui oleh Pejabat Berwenang Fungsi Pengguna.
- c. Penugasan Kepada Anak Perusahaan Pertamina/ Perusahaan Terafiliasi Pertamina. Penugasan kepada Anak Perusahaan Pertamina/Perusahaan Terafiliasi Pertamina dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan Barang/Jasa Fungsi Pengguna maupun dalam rangka pengembangan bidang usaha/ kompetensi baru bagi Subholding/Anak Perusahaan Pertamina/Perusahaan Terafiliasi Pertamina.

1. Sinergi Pertamina Incorporated

- a. The Pertamina Incorporated Synergy method is implemented to meet the needs of goods/services within Pertamina, as long as it meets the competency requirements and has the ability in accordance with the work to be carried out and considers the target limits and synergy roadmap set by the Function responsible for managing Pertamina Incorporated Synergy.
- b. Appointment to Pertamina Subsidiary/Affiliated Company of Pertamina
Appointment to Pertamina Subsidiaries/Pertamina Affiliated Companies can be carried out as long as the Goods/Services required are products or services of the Pertamina Subsidiaries/Pertamina Affiliated Companies and pay attention to the suitability of the Field of Business with the scope of work to be carried out. If there is more than 1 (one) Pertamina Subsidiary/Pertamina Affiliated Company that can provide the Goods/Services required by Pertamina, an appointment may be made to one of the Pertamina Subsidiaries/Pertamina Affiliated Companies based on User Function justification and approved by the Authorized Official of the User Function.
- c. Assignment to Pertamina Subsidiaries/Pertamina Affiliated Companies. Assignments to Pertamina Subsidiaries/Pertamina Affiliated Companies are carried out to meet the needs of Goods/Services of User Functions as well as in the context of developing new business fields/competencies for Pertamina Subholding/Subsidiaries/Affiliated Companies.



2. Tender

Tender dilaksanakan oleh Fungsi Pengadaan terhadap penyedia Barang/ Jasa yang dilakukan secara terbuka melalui papan pengumuman Perusahaan, website Perusahaan atau media cetak, dan dapat dilakukan secara terbatas dengan mengundang penyedia Barang/ Jasa yang telah terdaftar sebagai rekanan Perusahaan dan/ atau penyedia jasa potensial yang dipilih oleh Fungsi Pengadaan. Berikut ini jenis tender yang dilakukan oleh Fungsi Pengadaan di Lingkungan Perusahaan:

a. Tender Terbatas

Pada prinsipnya, Tender Terbatas dilaksanakan apabila kebutuhan Barang/Jasa tidak dapat dipenuhi melalui metode Sinergi Pertamina Incorporated, Tender Terbuka, Penunjukan Langsung, Pengadaan Langsung dan Swakelola dan hanya dapat diikuti oleh seluruh Penyedia Barang/Jasa dalam DPT yang memenuhi persyaratan kualifikasi umum sesuai dengan Pekerjaan yang akan dilaksanakan

b. Tender Terbuka

Pengadaan barang/jasa dengan nilai paling sedikit atau sama dengan sebesar Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) dan/atau Pelaksanaan Pemilihan Penyedia melalui metode Tender Terbatas yang telah mengalami 1 (satu) kali proses pemilihan gagal

c. Penunjukan Langsung

Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai sampai dengan Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dengan mengundang DPT yang memenuhi persyaratan kualifikasi umum berdasarkan urutan teratas Bidder List yang didapatkan dari Sistem Aplikasi Procurement Pertamina (SAPP) diikuti oleh Golongan Usaha Kecil dan/ atau dengan kondisi tertentu yang tercantum di dalam Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa yang berlaku di Perusahaan.

d. Pemilihan Langsung

Metode ini dilaksanakan dengan ketentuan:

- Untuk Pembelian Kapal, mengundang lebih dari 1 (satu) Penyedia Kapal.
- Untuk Pengadaan Jasa Sewa Kapal, mengundang lebih dari 1 (satu) Penyedia jasa sewa kapal jika Penyedia Jasa sangat terbatas dan/atau dalam Keadaan Darurat. Keadaan Darurat tersebut harus didukung dengan justifikasi yang disiapkan dan diajukan oleh Fungsi Pengguna dan dinyatakan dalam suatu dokumen yang disahkan oleh pejabat satu tingkat diatas otorisasi, maksimum Direktur Teknis.
- Pemilihan Langsung dapat diikuti oleh Penyedia Barang/Jasa DPT dan non-DPT dengan pengecualian terhadap kesesuaian antara Golongan Usaha dan nilai pengadaan.

2. Tender

Tenders are conducted by the Procurement Function for goods/services providers through public announcements, the Company's website, or print media. Tenders can also be limited by inviting registered or potential providers selected by the Procurement Function. The following is the types of tenders conducted by the Procurement Function within the Company:

a. Limited Tender

In principle, a Limited Tender is carried out if the need for Goods/Services cannot be met through the Pertamina Incorporated Synergy, Open Tender, Direct Appointment, Direct Procurement, and Self-Management methods and can only be followed by all Goods/Services Providers in DPT who meet the general qualification requirements in accordance with the work to be carried out.

b. Open Tender

Procurement of goods/services with a value of at least or equal to Rp5,000,000,000 (five billion rupiah) and/ or Implementation of Provider Selection through the Limited Tender method that has experienced 1 (one) failed selection process.

c. Direct Appointment

Procurement of Goods/Services with a value of up to Rp300,000,000 (three hundred million rupiah) by inviting DPTs that meet the general qualification requirements based on the top order of the Bidder List obtained from the Pertamina Procurement Application System (SAPP) followed by Small Business Groups and/ or with certain conditions stated in the Goods/Services Procurement Guidelines applicable in the Company.

d. Direct Selection

This method is implemented with the following conditions:

- For Ship Purchase, invite more than 1 (one) Ship Provider.
- For Ship Charter Service Procurement, invite more than 1 (one) Ship Charter Service Provider if the Service Provider is very limited and/ or in an Emergency. Such Emergencies must be supported by justification prepared and submitted by the User Function and stated in a document authorized by an official one level above the authorization, maximum the Director of Engineering.
- Direct Selection can be participated by DPT and non-DPT Goods/Services Providers with the exception of the suitability between Business Class and procurement value.

- Untuk Penyedia Barang/Jasa non-DPT wajib melakukan proses Registrasi setelah ditetapkan sebagai pemenang.
- e. Pengadaan Langsung/*E-Purchasing*, yaitu mekanisme pemenuhan kebutuhan Barang/Jasa melalui Sistem Catalog, yang terdiri dari:
 - OA Catalog, yang merupakan daftar Barang/Jasa dalam Kontrak Payung. *E-Purchasing* dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak Payung;
 - E-Catalog, merupakan e-market place yang berisi daftar Barang/Jasa dengan spesifikasi tertentu dan merk yang bervariasi dari Penyedia Barang/Jasa. E-Catalog dilaksanakan dengan membandingkan harga penawaran antar Penyedia Barang/Jasa. E-Catalog yang menawarkan Barang/Jasa dengan spesifikasi tertentu sebagaimana yang dipersyaratkan Fungsi Pengguna. E-Catalog dilaksanakan sampai dengan nilai Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- f. User Purchase
User Purchase adalah proses pembelian langsung Barang/Jasa oleh Fungsi Pengguna apabila memenuhi salah satu kriteria yang dipersyaratkan di dalam Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa yang berlaku di Perusahaan.

3. Swakelola

Swakelola dilaksanakan dengan tujuan untuk :

- a. Memenuhi kebutuhan Barang/Jasa dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang dimiliki Perusahaan dan/ atau;
- b. Meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia di lingkungan Perusahaan dan/ atau;
- c. Kebutuhan Barang/Jasa dengan nilai pekerjaan kecil dan/ atau lokasi yang sulit dijangkau dan/ atau;
- d. Memenuhi kebutuhan Barang/Jasa yang dapat dilaksanakan oleh Non Pelaku Usaha dan/ atau;
- e. Memenuhi kebutuhan Barang/Jasa yang tidak diminati oleh Pelaku Usaha karena nilai Pekerjaannya kecil dan/atau lokasi yang sulit dijangkau dan/atau;
- f. Memenuhi kebutuhan Barang/Jasa yang dapat dilaksanakan oleh Non Pelaku Usaha, antara lain: Lembaga Pemerintah, Perguruan Tinggi dan Lembaga ilmiah dan/atau;
- g. Memenuhi kebutuhan Barang/Jasa atau mendukung kepentingan Perusahaan melalui pemberian kesempatan partisipasi dan/atau pemberdayaan Ormas/Kelompok Masyarakat.

- Non-DPT Goods/Services Providers are required to carry out the Registration process after being determined as the winner.
- e. Direct Procurement/*E-Purchasing*, which is a mechanism for fulfilling the needs of Goods/Services through the Catalog System, consisting of:
 - OA Catalog, which is a list of Goods/Services in the Umbrella Contract. E-purchasing is carried out in accordance with the provisions in the Umbrella Contract;
 - E-Catalog, which is an e-marketplace that contains a list of Goods/Services with particular specifications and various brands from Goods/ Services Providers. E-Catalog is implemented by comparing bid prices between E-Catalog Goods/ Services Providers who offer Goods/Services with certain specifications as required by the User Function. E-Catalog is carried out up to a value of Rp200,000,000.00 (two hundred million rupiah).
- f. User Purchase
User Purchase is the process of direct purchase of Goods/Services by the User Function if it meets one of the criteria required in the Guidelines for Procurement of Goods/Services applicable in the Company.

3. Self-Management

Self-management is implemented to:

- a. Meeting the needs of Goods/Services by optimizing the use of resources owned by the Company and/or;
- b. Improving the technical capabilities of human resources within the Company and/or;
- c. The need for Goods/Services with a small work value and/ or locations that are difficult to reach and/or;
- d. Meeting the needs of Goods/Services that can be implemented by Non-Business Actors and/or;
- e. Fulfilling the needs of Goods/Services that are not in demand by Business Actors due to the small value of work and/or locations that are difficult to reach and/or;
- f. Fulfilling the needs of Goods/Services that can be implemented by Non-Business Actors, among others: Government Institutions, Universities, and Scientific Institutions and/or;
- g. Fulfilling the needs of Goods/Services or supporting the interests of the Company through providing opportunities for participation and/or empowering public organizations/ community groups.



Alur Proses Pengadaan Barang dan Jasa Process Flow of Procurement of Goods and Services

FUNGSI PEMINTA PENGADAAN / USER PROCUREMENT REQUESTER / USER FUNCTION



Pemintaan barang/jasa (RL/SOW/TOR)
>> User (Kapal, Pekerja)
Demand for goods/services (RL/SOW/
TOR) >> User (Ship, Worker)



Evaluasi Permintaan >> Budget Holder
(User)
Evaluation of Demand >> Budget Holder
(User)



Pembuatan Estimasi Harga, Izin Prinsip
(Jika diperlukan) & PR.
Preparation of Price Estimation, Principle
Permit (if required) & PR.

FUNGSI PENGADAAN / USER PROCUREMENT / USER FUNCTION



1 Menerima dokumen
Receiving documents



2 Menentukan metode Pengadaan
Determine the method of procurement



3 Melakukan tender
Conducting tenders

3 TATA CARATENDER / TENDER PROCEDURES



A Fungsi Pengadaan menerima OE dan TOR dari Fungsi Peminta Pengadaan, Fungsi Peminta Pengadaan menyampaikan secara resmi Spesifikasi dan OE yang telah dilampiri Purchase Requisition (PR) / Requisition List (RL) / Requisition Repair (RR) dan TOR/KAK yang sudah disetujui oleh pejabat yang berwenang kepada Fungsi Pengadaan
The Procurement Function receives OE and TOR from the Procurement Requester Function, Procurement Requester function officially submits Specifications and OE attached with Purchase Requisitions (PR) / Requisition List (RL)/Requisition Repair (RR) and TOR/KAK that have been approved by the competent official to the Procurement Function



B Persiapan Dokumen
Pengadaan
Document Preparation



C Pengumuman
Tender
Announcement



D Prakuifikasi
Prequalification



I Negosiasi
Penawaran harga
Bid negotiation of
prices



H Evaluasi
Penawaran
Bid Evaluation



G Penyampaian
Dokumen Penawaran
Submission of Bid
Documents



F Pemberian Penjelasan/
aanwijzing (Jika diperlukan)
Giving explanation/
aanwijzing (if needed)



E Pelaksanaan Inspeksi Bersama/
Joint Inspection (Jika diperlukan)
Conducting Joint Inspection
(if needed)



J Jikatender gagal: Retender, dokumen
dikembalikan ke Fungsi Peminta
Pengadaan/ser untuk direview. /
tender fails -> Retender, the document
is returned to the Procurement Requester/
User Function for review.



K Jikatender tidak gagal: Usulan
Penunjukan Pemenang/
If the tender does not fail ->
Proposed Appointment of Winners



L Penunjukan Pemenang
The designation of a winner



M Pengumuman
Hasil Tender
Announcement of
Tender Results



Q Penyampaian PO/WO/
SPK/ SPJ/kontrak/OA ke
Rekanan terpilih.
Submission of PO/WO/
SPK/ SPJ/Contract/OA to
selected Associates.



P Sangahan Terhadap
Hasil Tender
Barriers to Tender
Results



O Negosiasi Penawaran Alternatif (Penawaran
alternatif hanya dapat ditindak-lanjuti untuk
dinegosiasi, setelah ada penunjukan pemenang)
Alternative Offer Negotiations (Alternative offers
can only be followed up for negotiation, after a
winner has been appointed)



N Tindak lanjut Hasil Tender:
Pembuatan PO WO/SPK/SPJ/
Kontrak/OA
Follow-up on Tender Results:
Preparation of PO/WO/ SPK/
SPJ/Contract/OA



4 Proses penyerahan Barang/Jasa
The process of delivering goods/services



5 SELESAI
Finish

Pakta Integritas Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Integrity Pact in the Goods/Services Procurement Process

Sebagai bentuk komitmen penerapan GCG serta dalam rangka penerapan ISO: 37001 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), Penyedia Barang dan Jasa diwajibkan untuk menandatangani Pakta Integritas dan Formulir Deklarasi Integritas Penyedia Barang dan Jasa. Dalam setiap proses pengadaan barang dan jasa, Perseroan juga mewajibkan Insan Jasa Marga untuk menandatangani Pakta Integritas sebagai bentuk tidak adanya benturan kepentingan dan sebagai wujud transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Dalam rangka implementasi ISO 37001 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), PTK mewajibkan seluruh pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa untuk menandatangani Pakta Integritas. Kewajiban ini berlaku bagi seluruh Penyedia Barang dan Jasa yang bekerja sama dengan Perusahaan, sebagai bentuk komitmen terhadap integritas, transparansi, dan bebas dari praktik suap atau korupsi. Melalui penandatanganan dokumen tersebut, para penyedia menyatakan kesediaan untuk:

- Menjalankan proses pengadaan secara profesional dan jujur,
- Menghindari segala bentuk benturan kepentingan,
- Menolak pemberian maupun penerimaan gratifikasi, serta
- Mematuhi seluruh ketentuan hukum dan kebijakan internal Perusahaan.

Selain penyedia, PTK juga mewajibkan seluruh insan perusahaan yang terlibat dalam proses pengadaan, baik sebagai panitia maupun sebagai pejabat pengadaan, untuk turut menandatangani Pakta Integritas. Hal ini dilakukan sebagai wujud tanggung jawab personal dalam menjaga objektivitas dan integritas dalam setiap tahapan pengadaan.

As a form of commitment to the GCG implementation and in the context of implementing ISO: 37001 regarding the Anti-Bribery Management System (SMAP), Goods and Services Providers must sign an Integrity Pact and Goods and Services Provider Integrity Declaration Form. In every process of procurement of goods and services, the Company also requires Jasa Marga employees to sign an Integrity Pact as a form of no conflict of interest and as a form of transparency in the process of procurement of goods and services.

In order to implement ISO 37001 on Anti-Bribery Management System (ABMS), PTK requires all parties involved in the procurement process of goods and services to sign an Integrity Pact. This obligation applies to all Goods and Services Providers working with the Company as a form of commitment to integrity, transparency, and freedom from bribery or corruption. Through the signing of the document, the providers declare their willingness to:

- Carry out the procurement process professionally and honestly,
- Avoid all forms of conflict of interest,
- Reject the provision and acceptance of gratuities, and
- Comply with all legal provisions and internal Company policies.

In addition to providers, PTK also requires all company employees involved in the procurement process, both as a committee and as a procurement official, to sign an Integrity Pact. It is carried out as a form of personal responsibility in maintaining objectivity and integrity in every stage of procurement.

Program Vendor Gathering dan Evaluasi Kinerja Pemasok

Vendor Gathering Program and Supplier Performance Evaluation

Untuk membangun hubungan kemitraan yang berkelanjutan, PTK secara berkala menyelenggarakan Program *Vendor Gathering* serta melakukan Evaluasi Kinerja Pemasok. *Vendor Gathering* merupakan forum komunikasi antara Perusahaan dengan para mitra usaha, khususnya penyedia barang dan jasa, yang bertujuan untuk mempererat hubungan kerja sama.

To build sustainable partnership relationships, PTK periodically organizes Vendor Gathering Programs and conducts Supplier Performance Evaluations. Vendor Gathering is a communication forum between the Company and business partners, especially providers of goods and services, which aims to strengthen cooperative relationships.



Program Kepemilikan Saham Oleh Karyawan dan/atau Manajemen (ESOP/MSOP)

Employee and/or Management Stock Ownership Program (ESOP/MSOP)

Pada tahun 2024, PTK tidak memiliki program Kepemilikan Saham oleh Karyawan (*Employee Stock Ownership Program/ESOP*) dan/atau Manajemen (*Management Stock Ownership Program/MSOP*).

In 2024, PTK did not have an Employee Stock Ownership Program (ESOP) and/or a Management Stock Ownership Program (MSOP).

Sistem Pelaporan Pelanggaran

Whistleblowing System

PTK menerapkan Sistem Pelaporan Pelanggaran atau *Whistleblowing System* (WBS) sebagai salah satu instrumen pengendalian internal untuk mendorong kepatuhan Perusahaan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan. Sistem WBS PTK saat ini terintegrasi dengan saluran pelaporan WBS "Pertamina Clean", yang dikelola secara independen. Pertamina Clean menyediakan berbagai saluran pelaporan yang aman dan terpercaya, serta menjamin kerahasiaan identitas pelapor. Sistem ini didukung oleh kebijakan yang kuat dan berbasis pada nilai-nilai AKHLAK, serta selaras dengan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

PTK telah melakukan ratifikasi atas sistem dan kebijakan pelaporan pelanggaran yang dimiliki oleh holding melalui penerbitan Surat Keputusan Direksi No. Kpts-06/PTK0000/2023-S9 tentang Ratifikasi Sistem Tata Kerja Pengelolaan Pengaduan. Kebijakan ini memberikan dasar hukum dan operasional bagi pelaksanaan sistem WBS di lingkungan PTK. Melalui sistem ini, seluruh insan PTK termasuk Dewan Komisaris, Direksi, karyawan, serta pemangku kepentingan lainnya, diberikan ruang untuk melaporkan dugaan pelanggaran.

PTK implements a Whistleblowing System (WBS) as one of the internal control instruments to encourage the Company's compliance with laws and regulations. PTK's WBS system is currently integrated with the "Pertamina Clean" WBS reporting channel, which is managed independently. Pertamina Clean provides various safe and reliable reporting channels and guarantees the confidentiality of the whistleblower's identity. This system is supported by a strong policy that is based on AKHLAK values and aligns with the principles of Good Corporate Governance.

PTK has ratified the holding's whistleblowing system and policies through the issuance of Board of Directors Decree No. Kpts-06/PTK0000/2023-S9 on Ratification of the Complaint Management System. This policy provides a legal and operational basis for the implementation of the WBS system within PTK. Through this system, all PTK employees, including the Board of Commissioners, Board of Directors, employees, and other stakeholders, are provided with space to report alleged violations.

Lingkup Pengaduan

Scope of Complaint

Jenis Pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui WBS mencakup hal-hal sebagai berikut:

Types of violations that can be reported through the WBS include the following matters:

Jenis Pelanggaran Type of Violation	Keterangan Description
Korupsi Corruption	Perbuatan yang dilakukan secara curang atau melawan hukum oleh Dewan Komisaris, Direksi, Manajemen dan Pekerja yang bekerja untuk dan atas nama PTK, yang bertentangan dengan kepentingan perusahaan atau penyalahgunaan wewenang jabatan/kepercayaan yang diberikan kepadanya dengan tujuan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan Perusahaan. Actions committed fraudulently or against the law by the Board of Commissioners, Directors, Management, and Employees who work for and on behalf of PTK, which conflict with the interests of the Company or abuse the authority of the position/trust given to them to enrich themselves, or other people or the corporation which could be detrimental to the Company.
Suap Bribery	Perbuatan seseorang berupa memberi uang sogok/menyogok/memberi hadiah atau janji yang diberikan atau diterima dalam bentuk apapun kepada seseorang yang berpengaruh atau berhubungan dengan jabatannya dengan tujuan ingin mendapatkan sesuatu untuk kepentingan pribadi ataupun korporasi. The act of a person in the form of giving bribes/bribing/giving gifts or promises given or received in any form to someone who is influential or related to their position to get something for personal or corporate interests.
Pencurian Theft	Mengambil barang atau sesuatu, baik seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau perusahaan, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Taking goods or something, whether wholly or partly belonging to another person or company, to possess it unlawfully.
Benturan Kepentingan Conflict of Interest	Sebuah situasi di mana seseorang dihadapkan pada perbedaan kepentingan yaitu antara kepentingan pribadi atau kepentingan perusahaan sehingga harus memilih dan mendahulukan kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadinya. A situation where a person is faced with differences in interests, namely between personal interests or company interests, so they must choose and prioritize the Company's interests above their personal interests.
Kecurangan Fraud	Perbuatan tidak jujur atau tipu muslihat meliputi antara lain penipuan, pemerasan, pemalsuan, menyembunyian atau penghancuran dokumen/laporan atau menggunakan dokumen palsu, yang dilakukan oleh seseorang/sekelompok orang yang menimbulkan potensi kerugian ataupun kerugian nyata terhadap perusahaan atau orang lain. Acts of dishonesty or deception include, among other things, fraud, extortion, forgery, concealment, or destruction of documents/reports or using fake documents, carried out by a person/group of people which causes potential or actual loss to the Company or other people.



Pihak yang Mengelola Pengaduan Complaint Management

Pengelolaan sistem pelaporan pelanggaran di Perusahaan dilaksanakan secara terpusat melalui saluran WBS Pertamina Clean, yang merupakan sistem pelaporan resmi milik PT Pertamina (Persero) selaku induk usaha (holding). Seluruh pengaduan yang disampaikan melalui saluran WBS tersebut akan dikelola secara independen oleh Fungsi WBS PT Pertamina (Persero). Selanjutnya, laporan yang masuk akan dianalisis dan ditindaklanjuti oleh Fungsi Investigation Audit, WBS & Fraud Prevention PT Pertamina (Persero).

Apabila diperlukan, proses tindak lanjut atas laporan tersebut dapat dikoordinasikan atau dilimpahkan kepada Fungsi Internal Audit di Perusahaan, sesuai dengan lingkup kasus dan keterkaitannya. Pelimpahan atau koordinasi tersebut dilakukan berdasarkan persetujuan Chief Audit Executive (CAE) Holding, untuk memastikan bahwa penanganan pengaduan dilakukan secara objektif, profesional, dan sesuai dengan standar investigasi yang berlaku.

The Company's whistleblowing system is managed centrally through the Pertamina Clean WBS channel, which is the official reporting system of PT Pertamina (Persero) as the holding company. All complaints submitted through the WBS channel will be managed independently by the WBS Function of PT Pertamina (Persero). Furthermore, incoming reports will be analyzed and followed up by the Audit Investigation, WBS & Fraud Prevention Function of PT Pertamina (Persero).

If necessary, the follow-up process on the report can be coordinated or delegated to the Internal Audit Function in the Company, according to the scope of the case and its relevance. Such delegation or coordination is carried out based on the approval of the Holding Chief Audit Executive (CAE) to ensure that complaints are handled objectively, professionally, and in accordance with applicable investigation standards.

Perlindungan Bagi Pelapor Protection for Whistleblowers

Setiap Pelapor pelanggaran akan mendapatkan perlindungan dari Perusahaan terhadap perlakuan yang merugikan seperti pemecatan yang tidak wajar, penurunan jabatan atau pangkat, pelecehan atau diskriminasi dalam segala bentuknya, catatan yang merugikan Personal File Record dan perlakuan merugikan lainnya. Perusahaan juga akan menyediakan perlindungan hukum jika diperlukan, sejalan dengan yang diatur pada pasal 43 Undang-undang No. 15 tahun 2002 jo. Undang-undang No. 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Pasal 13 Undang-undang No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus bagi Pelapor dan Saksi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pengelola WBS dilarang mengungkapkan identitas Pelapor. Apabila dalam faktanya bahwa identitas pelapor perlu diungkapkan atau tidak disembunyikan sebagaimana diperlukan oleh undang-undang dan proses peradilan atau dalam rangka diperlukannya pengambilan tindakan yang sesuai, maka Pengelola WBS wajib meminta persetujuan terlebih dahulu kepada pihak Pelapor secara tertulis.

Whistleblowers will receive protection from the Company against adverse treatment such as unfair dismissal, demotion, harassment, or discrimination in any form, negative records in their Personal File Records, and other detrimental actions. The Company will also provide legal protection if necessary, in accordance with Article 43 of Law No. 15 of 2002 in conjunction with Law No. 25 of 2003 on Money Laundering Crimes, Article 13 of Law No. 13 of 2006 on Witness and Victim Protection, and Article 5 of Government Regulation No. 57 of 2003 on Special Protection Procedures for Whistleblowers and Witnesses in Money Laundering Crimes.

The WBS manager is prohibited from disclosing the identity of the Whistleblower. If it becomes necessary to reveal the Whistleblower's identity as required by law or judicial process or to take appropriate action, the WBS Manager must first obtain written consent from the Whistleblower.

Perlindungan terhadap Pelapor dilaksanakan apabila pelaporan pelanggaran yang disampaikan memenuhi kriteria, yaitu informasi dan atau pelanggaran yang disampaikan telah terjadi dan dapat dipercaya/valid (setelah dilakukan verifikasi oleh Pengelola WBS). Kriteria perlindungan terhadap Pelapor wajib dipenuhi, dalam rangka menghindarkan adanya laporan palsu, fitnah, bersifat mengada-ada atau tidak beritikad baik.

Selain itu, PTK juga memberikan perlindungan kepada terlapor, sebab Perusahaan juga mengedepankan kerahasiaan, asas praduga tidak bersalah dan profesionalisme dalam rangka melakukan proses tindak lanjut atas setiap pengaduan.

Protection for Whistleblowers is granted if the reported violation meets the criteria of credible and valid information (after verification by the WBS Manager). These criteria must be met to avoid false reports, slander, fabricated accusations, or bad faith.

Additionally, PTK protects the reported party, emphasizing confidentiality, the presumption of innocence, and professionalism in following up on each complaint.

Mekanisme Penyampaian dan Penanganan Pelaporan Pelanggaran

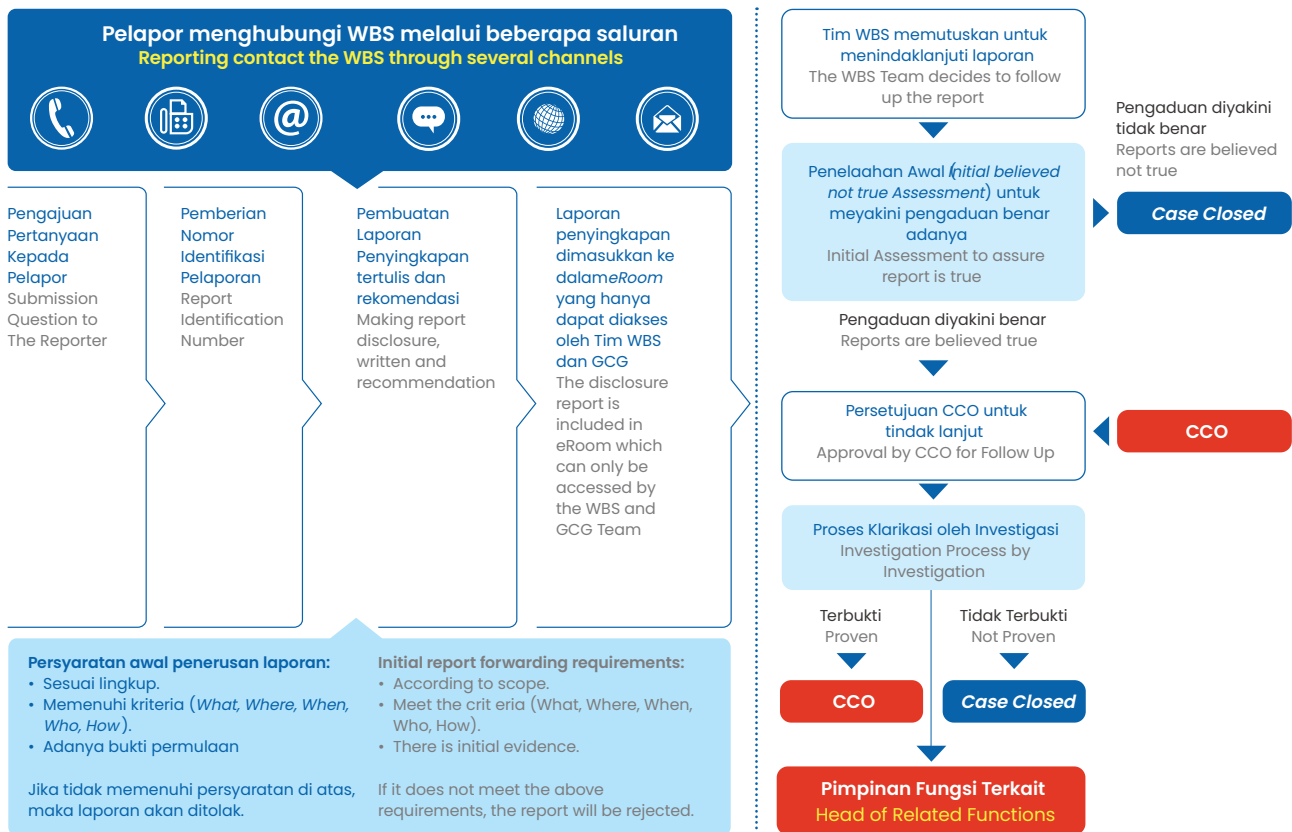
Reporting and Handling Mechanism

Mekanisme penyaluran pengaduan oleh pelapor pada dasarnya dilakukan melalui jalur formal yaitu melalui atasan langsung, direktorat dan fungsi terkait. Bila Pelapor memandang sarana pengaduan tidak efektif atau ada keraguan, Pelapor dapat menyalurkan pengaduan melalui WBS.

Mekanisme pelaporan dan penanganan pengaduan secara lengkap dapat dilihat pada skema proses pengaduan pelanggaran sebagai berikut:

The primary reporting mechanism involves formal channels through direct supervisors, directorates, and related functions. If the Whistleblower deems these channels ineffective or has doubts, they may report through the WBS.

The complete reporting and complaint handling mechanism is illustrated in the complaint process scheme:



Sarana dan Media Pelaporan Pelanggaran:

Reporting Channels and Media:



Setiap laporan yang masuk melalui WBS akan diproses dan diverifikasi secara seksama sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan. Apabila hasil investigasi menyatakan bahwa laporan tersebut terbukti kebenarannya, maka perusahaan akan memberikan sanksi yang tegas, proporsional, dan konsisten kepada pihak yang melakukan pelanggaran. Pengenaan sanksi ini tidak hanya dimaksudkan sebagai bentuk penegakan disiplin dan keadilan, namun juga sebagai upaya preventif untuk memberikan efek jera bagi pelaku maupun sebagai peringatan keras bagi pihak lain agar tidak melakukan pelanggaran serupa.

Every report submitted through the WBS will be carefully processed and verified in accordance with the established mechanism. If the results of the investigation state that the report is proven true, the Company will impose strict, proportional, and consistent sanctions on the offending party. The imposition of sanctions is not only intended as a form of enforcement of discipline and justice, but also as a preventive effort to provide a deterrent effect for the perpetrator as well as a stern warning to other parties not to commit similar violations.

Jumlah Pelaporan Pelanggaran dan Tindak Lanjut

Number of Violations Reported and Follow-Up Actions

Selama tahun 2024, terdapat 2 (dua) laporan pengaduan yang masuk melalui sarana pelaporan WBS. Setiap pengaduan ditindaklanjuti melalui analisis awal sampai dengan selesai dilakukan penanganan/investigasi.

In 2024, there were 2 (two) complaint reports submitted through the WBS reporting channels. Each complaint was followed up from initial analysis to the completion of handling/investigation.

Pemenuhan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Fulfillment of Good Corporate Governance Principles

Sepanjang tahun 2024, Direksi dan Dewan Komisaris beserta segenap jajaran Perusahaan telah menerapkan prinsip-prinsip GCG secara konsisten dan berkelanjutan pada setiap aktivitas bisnis Perusahaan. Perusahaan secara tegas mewajibkan setiap insan PTK untuk menjalankan praktik-praktik usaha yang sehat dengan menjunjung tinggi standar etika dan perilaku. PTK bertanggung jawab menjalankan seluruh kegiatan Perusahaan dengan memenuhi seluruh regulasi serta senantiasa menjalankan praktik GCG sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

In 2024, the Board of Directors and the Board of Commissioners, along with all levels of the Company, have consistently and sustainably applied GCG (Good Corporate Governance) principles in every business activity. The Company strictly mandates that every PTK employee practices sound business methods while upholding high ethical and behavioral standards. PTK is responsible for conducting all Company activities in compliance with all regulations and continually implementing GCG practices in accordance with the laws and regulations.

Penguatan Kinerja dan Keberlanjutan Melalui Tata Kelola Berintegritas

Strengthening Performance and Sustainability Through Integrity-Based Governance

Komitmen PTK dalam memperkuat kinerja dan menciptakan keberlanjutan jangka panjang tercermin melalui penerapan tata kelola yang berlandaskan integritas. Visi PTK menjadi arah strategis dalam meningkatkan daya saing dan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan, mendorong pengembangan layanan maritim yang efisien, inovatif, dan ramah lingkungan, selaras dengan tuntutan pasar global dan komitmen terhadap transisi energi.

PTK's commitment to strengthening performance and creating long-term sustainability is reflected through the implementation of governance based on integrity. PTK's vision serves as a strategic direction in enhancing competitiveness and sustainable business growth, promoting the development of efficient, innovative, and environmentally friendly maritime services in line with global market demands and commitments to energy transition.

Untuk mewujudkannya, PTK menempatkan peran Dewan Komisaris dan Direksi secara strategis, di mana pengawasan yang independen dan pengelolaan yang profesional berjalan beriringan. Implementasi tata kelola perusahaan (GCG) dijalankan dengan prinsip integritas, transparansi, dan akuntabilitas, serta selalu mempertimbangkan kepentingan seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian, visi PTK tidak hanya menjadi arah strategis, tetapi juga landasan dalam membangun tata kelola berintegritas yang mendorong penguatan kinerja dan keberlanjutan usaha.

To achieve this, PTK strategically positions the roles of the Board of Commissioners and the Board of Directors, where independent supervision and professional management go hand in hand. The implementation of corporate governance (GCG) is carried out with the principles of integrity, transparency, and accountability while always considering the interests of all stakeholders. Thus, PTK's vision not only serves as a strategic direction but also as a foundation for building integrity-based governance that promotes performance enhancement and business sustainability.



07



Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Social and Environmental Responsibility



Tata Kelola (Governansi) Berkelanjutan

Sustainable Governance

Dalam penerapan tata kelola berkelanjutan, PTK telah memiliki struktur dan infrastruktur tata kelola (governansi) Perusahaan yang berperan untuk mendukung penerapan governansi keberlanjutan, yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi. Dewan Komisaris bertugas dalam hal pengawasan serta pemberian nasihat terkait jalannya program tanggung jawab sosial Perusahaan. Selain itu, Direksi memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan TJSL di PTK. Dewan Komisaris dan Direksi juga melaporkan kepada RUPS terkait pelaksanaan kegiatan TJSL di PTK yang dimuat dalam Laporan Manajemen dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris. Dalam wujud komitmennya terhadap pelaksanaan TJSL, PTK telah menunjuk VP Legal & Relation sebagai penanggung jawab pelaksanaan TJSL di PTK. Penunjukan VP Legal & Relation sebagai penanggung jawab pelaksanaan TJSL Ditetapkan dalam Uraian Jabatan VP Legal & Relation No. JD-001/PTK0200/2024-S8 tanggal 1 September 2024. Kalau dalam bentuk SK Direksi sepertinya gak ada yang spesifik mengenai TJSL

In the implementation of sustainable governance, PTK has a corporate governance structure and infrastructure that plays a role in supporting the implementation of sustainable governance, which consists of the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Commissioners, and the Board of Directors. The Board of Commissioners is in charge of supervising and providing advice regarding the course of the Company's social responsibility program. In addition, the Board of Directors has the authority and responsibility for the implementation of CSR activities at PTK. The Board of Commissioners and the Board of Directors also report to the GMS regarding the implementation of TJSL activities in PTK, which is contained in the Management Report and the Board of Commissioners Supervisory Task Report. As part of its commitment to the implementation of TJSL, PTK appointed the VP of Legal & Relations as the person in charge of the implementation of TJSL at PTK. The appointment of the VP of Legal & Relations is stipulated in the Position Description of VP of Legal & Relations No. JD-001/PTK0200/2024-S8 dated September 1, 2024. There seems to be nothing specific about TJSL in the form of a Board of Directors Decree.

Dasar Hukum dan Pendekatan

Legal Basis and Approach

Dasar pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan berlandaskan pada beberapa aspek hukum dan pendekatan, di antaranya:

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang-undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
4. Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
5. Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
6. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

The basis for the implementation of the Corporate Social and Environmental Responsibility program is based on several legal aspects and approaches, including:

1. Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies;
2. Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management;
3. Law No. 1 of 1970 on Occupational Safety;
4. Law No. 13 of 2003 on Manpower;
5. Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection;
6. Government Regulation No. 47 of 2012 on Social and Environmental Responsibility of Limited Liability Companies.

Pengembangan Kompetensi Manajemen Di Bidang Keberlanjutan

Management Competency Development in the Sustainability Sector

PTK memfasilitasi Manajemen Perusahaan untuk meningkatkan kompetensi di bidang keberlanjutan. Sepanjang tahun 2024 program Pengembangan Kompetensi terkait Aspek Keberlanjutan yang diikuti oleh Manajemen Perusahaan adalah sebagai berikut:

PTK facilitates the Company's Management to improve their competencies in sustainability. Throughout 2024, the Competency Development programs related to Sustainability Aspects participated by the Company Management are as follows:

Nama Pelatihan Training Name	Penyelenggara Organizer	Waktu Pelaksanaan Date of Implementation
<i>Creating Shared Value (CSV) Programs</i>	Forum TJSL BUMN SOE TJSL Forum	18-19 Juli 2024 July 18-19, 2024
<i>Sustainability Reporting Standards & Implementation</i>	PT Pertamina International Shipping	8-9 Agustus 2024 August 8-9, 2024
<i>Executive Sustainability Academy</i>	Pertamina Corporate University	21 Februari 2024 February 21, 2024
GRC (Governance Risk Compliance) Masterclass		19-21 Januari 2024 January 19-21, 2024
Pelatihan Pembekalan Masa Purna Karya (PMPK) Batch 12 Tahun 2024 Post-retirement Debriefing Training (PMPK) Batch 12 in 2024	PTC	26 sd 30 Agustus 2024 August 26-30, 2024
Pelatihan Pembekalan Masa Purna Karya (PMPK) Batch 14 Tahun 2024 Post-retirement Debriefing Training (PMPK) Batch 14 in 2024	PTC	09 sd 13 September 2024 September 9-13, 2024
Pelatihan Pembekalan Masa Purna Karya (PMPK) Batch 15 Tahun 2024 Post-retirement Debriefing Training (PMPK) Batch 15 in 2024	PTC	07 sd 11 Oktober 2024 October 7-11, 2024

Penilaian Risiko atas Penerapan Program Keberlanjutan

Risk Assessment of Sustainability Program Implementation

Penerapan sistem manajemen risiko di Perusahaan dilakukan dengan mengelola risiko secara menyeluruh, termasuk risiko terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan sebagai langkah memitigasi berbagai dampak negatif yang berpotensi ditimbulkan dari aktivitas operasional Perusahaan.

The implementation of a risk management system in the Company is carried out by managing risks as a whole, including risks to economic, social, and environmental aspects, as a step to mitigate various negative impacts that could potentially arise from the Company's operational activities.



Pelibatan Pemangku Kepentingan Stakeholders Involvement

Keberlanjutan usaha PTK sangat berkaitan erat dengan kemampuan manajemen dalam berinteraksi dengan para pemangku kepentingan. Menurut Perusahaan, pemangku kepentingan adalah mereka yang memiliki dampak dan/atau terdampak oleh operasional Perusahaan. Dengan adanya interaksi yang positif, maka keberlanjutan usaha, juga pelaksanaan tanggung jawab sosial dan kelestarian lingkungan dapat dilaksanakan dengan optimal demi sebesar-besarnya manfaat bagi pemangku kepentingan. PTK telah mengidentifikasi dengan seksama kelompok-kelompok pemangku kepentingan utama, berdasarkan pengaruh dominan kelompok-kelompok tersebut terhadap keberlangsungan usaha Perusahaan. Pemangku kepentingan (*stakeholder*) PTK terdiri antara lain:

The sustainability of PTK's business is closely related to management's ability to interact with stakeholders. According to the Company, stakeholders are those who have an impact and/or are affected by the Company's operations. With positive interactions, business sustainability, as well as the implementation of social responsibility and environmental conservation can be implemented optimally for the maximum benefit of stakeholders. PTK has carefully identified the main stakeholder groups based on the dominant influence of these groups on the Company's business continuity. PTK's stakeholders consist of, among others:

Pemangku Kepentingan Stakeholders	Mekanisme Keterlibatan Involvement Mechanism	Isu/Topik Issues/Topics
Pihak Internal Internal Parties		
Pemegang Saham Shareholders	- Rapat; - Laporan Kinerja. - Meeting; - Performance Report.	- Peningkatan Kinerja; - Dukungan oleh Pemegang Saham. - Performance Improvement; - Support by Shareholders.
Pegawai Employees	- Perjanjian Kerja Pegawai; - Pendidikan dan Pelatihan. - Employee Work Agreement - Education and Training	- Terjaminnya kesejahteraan Pegawai dan keluarganya; - Suasana kerja kondusif, sehat, dan aman; - Jenjang karir dan penilaian kinerja yang jelas, setara, dan tidak terdapat praktik diskriminasi. - Employee and their families' welfare are guaranteed; - Conducive, healthy, and safe work atmosphere; - Career paths and performance assessments are clear, equal, and there are no discriminatory practices.
Pihak Eksternal External Parties		
Masyarakat Community	- Social Mapping - Komunikasi melalui media telepon dan tertulis; - Pelatihan Masyarakat; - Forum tatap muka - Social Mapping - Communication through telephone and written media; - Community training; - Face-to-face forums	- Dapat tumbuh dan berkembang selaras dengan berkembangnya PTK; - Hubungan yang harmonis; - Dampak negatif terhadap lingkungan terminimalisir. - Can grow and develop in line with the development of PTK; - Harmonious relationship; - Negative impact on the environment is minimized.
Pemasok Suppliers	- Kontrak dan Perjanjian; - Contract and Agreement;	- Proses pengadaan yang adil dan transparan; - Pembayaran tepat waktu; - Hubungan yang harmonis - Fair and transparent procurement process; - On-time payment; - Harmonious relationship

Pemangku Kepentingan Stakeholders	Mekanisme Keterlibatan Involvement Mechanism	Isu/Topik Issues/Topics
Pemerintah Government	- Kepatuhan terhadap Peraturan; - Kontribusi ekonomi pada Pemerintah (pajak dan subsidi) - Compliance with regulations; - Economic contribution to the Government (taxes and subsidies)	- Kepatuhan terhadap peraturan; - Kontribusi ekonomi pada Pemerintah (pajak dan subsidi) - Compliance with regulations; - Economic contribution to the Government (taxes and subsidies)
Media Massa Mass Media	- Konferensi pers - Press Release - Press Conference - Press Release	- Mendapatkan akses informasi yang mudah dan luas - Obtaining easy and wide access to information

Tantangan Dalam Penerapan Program Keberlanjutan

Challenges in Implementing Sustainability Program

Isu terkait lingkungan dan perubahan iklim merupakan tantangan nyata yang harus dihadapi oleh masyarakat global saat ini. Sebagai Perusahaan yang beroperasi dalam bidang kesehatan, PTK menyadari bahwa Perusahaan berpotensi memberikan dampak yang signifikan terhadap lingkungan. Perusahaan berupaya memenuhi tanggung jawab untuk berperan aktif mendorong terwujudnya berbagai upaya pelestarian lingkungan serta menghindari dampak ekologis yang mungkin ditimbulkan dari kegiatan operasional Perusahaan.

Issues related to the environment and climate change are real challenges that must be faced by the current global community. As a company that operates in the health sector, PTK realizes that the Company has the potential to have a significant impact on the environment. The Company strives to fulfill its responsibility to play an active role in encouraging the realization of various environmental conservation efforts and avoiding ecological impacts that may result from the Company's operational activities.

Biaya dan Anggaran Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Environmental and Social Responsibility Costs and Budget

PTK menyediakan anggaran khusus untuk pelaksanaan program TJSL. Penetapan besaran anggaran TJSL ditentukan dalam penyusunan RKAP Perusahaan. Dalam pencatatan Laporan Keuangan Perusahaan, anggaran TJSL dicatat sebagai bagian dari beban usaha Perusahaan. Tahun 2024, jumlah anggaran TJSL adalah sebesar Rp 1.879.463.844,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah).

PTK provides a specific budget for the implementation of the TJSL program. The amount of the TJSL budget is determined in the preparation of the Company's ABOP. In recording the Company's Financial Statements, the TJSL budget is recorded as part of the Company's operating expenses. In 2024, the total TJSL budget was Rp1,879,463,844 (one billion eight hundred seventy-nine million four hundred sixty-three thousand eight hundred forty-four rupiah).



Membangun Budaya Keberlanjutan Building Sustainability Culture

PTK senantiasa menerapkan budaya keberlanjutan melalui berbagai komitmen dan upaya Perusahaan yang telah dilakukan selama tahun 2024 serta menanamkannya kepada seluruh para pemangku kepentingan. Adapun ruang lingkup program keberlanjutan di Perusahaan, yaitu mencakup aspek pengelolaan lingkungan hidup, aspek Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), aspek pengembangan sosial kemasyarakatan, serta aspek tanggung jawab kepada pelanggan. Keseluruhan aspek tersebut dilaksanakan secara konsisten dan menjadi program prioritas dengan mensinergikan dengan program lainnya dalam upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran Perusahaan.

PTK continues to implement a sustainable culture through various Company commitments and efforts that have been carried out during 2024 and instill it in all stakeholders. The scope of sustainability programs in the Company includes aspects of environmental management, aspects of Employment, Occupational Health and Safety (OHS), aspects of social community development, and aspects of responsibility to customers. The overall aspects are carried out consistently and become priority programs by synergizing with other programs in an effort to achieve the Company's objectives and targets.

Laporan Keberlanjutan Sustainability Report

PTK secara konsisten telah menyusun Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Reporting*) sebagai bentuk tanggung jawab Perusahaan kepada stakeholders. Laporan Keberlanjutan memuat Informasi terkait dengan pengelolaan dan kinerja aspek keberlanjutan termasuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan PTK dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Untuk informasi lebih lengkap terkait Laporan Keberlanjutan, dapat dilihat dalam buku terpisah dari Buku Laporan Tahunan ini.

PTK has consistently prepared Sustainability Reporting as a form of the Company's responsibility to stakeholders. The Sustainability Report contains information related to the management and performance of sustainability aspects, including the implementation of PTK's social and environmental responsibilities in supporting the achievement of sustainable development goals. For more complete information regarding the Sustainability Report, please refer to a separate book from this Annual Report.

Inisiatif Program Keberlanjutan Sustainability Program Initiatives

Pada tahun 2024, PTK terus melakukan berbagai inisiatif dalam rangka mendukung upaya pemenuhan komitmen keberlanjutan Perusahaan. Berbagai program keberlanjutan ini dilakukan dengan mengacu pada berbagai peraturan dan standar yang berlaku dalam menjalankan kegiatan operasional Perusahaan. Inisiatif program keberlanjutan Perusahaan mencakup Aspek Ekonomi, Lingkungan dan Sosial yang telah dilakukan Perusahaan sepanjang tahun 2024.

In 2024, PTK continuously conducted various initiatives to support efforts to fulfill the Company's sustainability commitments. These various sustainability programs are carried out with reference to various applicable regulations and standards in carrying out the Company's operational activities. The Company's sustainability program initiatives cover Economic, Environmental, and Social Aspects carried out by the Company throughout 2024.

Kinerja Ekonomi

Economic Performance

Kontribusi Ekonomi

Economic Contribution

Berbagai strategi dan upaya yang telah dilakukan PTK sepanjang tahun 2024 telah membuat PTK mampu mempertahankan kinerja optimal. PTK juga dapat mendistribusikan sebagian dari pendapatan usaha yang diperoleh kepada para pemangku kepentingan. Kinerja ekonomi dari sisi target dan kinerja produksi, portofolio, target pembiayaan, atau Investasi, pendapatan dan laba rugi telah diuraikan pada bab Analisis dan Pembahasan Manajemen dalam laporan ini.

Various strategies and efforts that have been made by PTK throughout 2024 have allowed PTK to maintain optimal performance. PTK can also distribute a portion of the revenue earned to stakeholders. Economic performance in terms of production targets and performance, portfolio, financing targets, or Investment, revenues, and profit or loss have been described in the Management Discussion and Analysis chapter of this report.

Kontribusi Ekonomi terkait Keuangan Berkelanjutan

Economic Contribution Related to Sustainable Finance

Kegiatan Activities	Uraian Description	Dampak Ekonomi Economic Impact
Investasi infrastruktur dan teknologi berkelanjutan Sustainable infrastructure and technology investment	Pembangunan instalasi panel surya, pembangunan dan perbaikan fasilitas sosial. Construction of solar panel installations, construction and repair of social facilities.	Penghematan biaya listrik, nilai investasi, penggunaan tenaga kerja lokal. Electricity cost savings, investment value, use of local labor
Penciptaan peluang usaha masyarakat sekitar Creation of business opportunities for local communities	Pemberdayaan (pelatihan/pendampingan) Usaha Kecil Menengah. Empowerment (training/mentoring) of SMEs.	Jumlah Usaha Kecil Menengah yang ikut pelatihan/pendampingan. Number of SMEs participating in training/mentoring
Pelibatan penyedia lokal Involvement of local providers	Jumlah penyedia lokal Number of local providers	Nilai pengadaan dari penyedia lokal Value of procurement from local providers

PTK ikut berperan memberikan kontribusi dalam pembangunan negeri melalui kepatuhan pemenuhan kewajiban Perusahaan sebagai Wajib Pajak. Jumlah pemenuhan kewajiban keuangan kepada Negara PTK pada tahun 2024 sebesar Rp333.771 juta, meningkat dari tahun 2023 yaitu sebesar Rp294.834 juta.

PTK plays a role in contributing to the development of the country through compliance with the fulfillment of the Company's obligations as a taxpayer. The total fulfillment of financial obligations to the State of PTK in 2024 amounted to Rp333,771 million, an increase from 2023, which amounted to Rp294,834 million.



Kinerja Lingkungan

Environmental Performance

Komitmen dan Kebijakan Dalam Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan

Commitment and Policy in Environmental Management and Conservation

Sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa perkapalan, PTK sangat menyadari pentingnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan penggunaan sumber daya alam yang bijaksana. PTK berkomitmen untuk menjalankan kegiatan usahanya dengan memperhatikan aspek lingkungan secara serius, tidak hanya untuk memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga untuk mendukung keberlanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan. Pengelolaan limbah, pencegahan pencemaran, pengelolaan emisi gas rumah kaca dan emisi bahan perusak ozon, hingga usaha pelestarian lingkungan yang telah dilakukan merupakan beberapa upaya Perusahaan untuk bertanggung jawab terhadap kelestarian alam. Komitmen PTK terhadap kelestarian lingkungan sebagai pilar *Health Safety Security and Environment* tertuang dalam Peraturan Direksi PTK.

Selain itu, PTK juga melakukan serangkaian audit seperti audit internal ISO 14001: 2015 Environmental Management System di Minggu III-IV Oktober 2023 dengan area audit Top Management, seluruh fungsi kantor pusat, Marine Business & Operation Region I-II-III, Peteka Shorebase Tanjung Batu, Port (Plaju, Surabaya, Wayame), Kapal Milik (ASD Transko Dara 3206 dan TB Wonokromo). Proses audit tersebut dilakukan guna melakukan monitoring implementasi SML pada masing-masing lokasi.

As a company engaged in shipping services, PTK is well aware of the importance of sustainable environmental management and wise use of natural resources. PTK is committed to carrying out its business activities with serious attention to environmental aspects, not only to fulfill applicable legal provisions, but also to support sustainability and corporate social responsibility. Waste management, pollution prevention, management of greenhouse gas emissions and emissions of ozone-depleting substances, and environmental conservation efforts that have been carried out are some of the Company's efforts to be responsible for the preservation of nature. PTK's commitment to environmental sustainability as a pillar of Health Safety Security and Environment is contained in the PTK's Board of Directors Regulation.

In addition, PTK also conducts a series of audits such as the internal audit of ISO 14001: 2015 Environmental Management System in Week III-IV October 2023, with audit areas of Top Management, all head office functions, Marine Business & Operation Region I-II-III, Peteka Shorebase Tanjung Batu, Port (Plaju, Surabaya, Wayame), Owned Vessels (ASD Transko Dara 3206 and TB Wonokromo). The audit process is carried out to monitor the SML implementation at each location.

Inisiatif Program Pengelolaan Lingkungan Tahun 2024

Environmental Management Program Initiatives in 2024

Sepanjang tahun 2024 PTK telah melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dalam rangka tata kelola keberlanjutan aspek lingkungan. Upaya-upaya ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk menjaga keberlanjutan dan kelestarian lingkungan melalui berbagai program dan inisiatif yang dirancang untuk mengurangi dampak negatif dari kegiatan operasional terhadap alam, serta mendukung

Throughout 2024, PTK made various efforts to optimize environmental management and monitoring in order to manage the sustainability of environmental aspects. These efforts are part of the Company's commitment to maintaining sustainability and environmental preservation through various programs and initiatives designed to reduce the negative impact of operational activities on nature, as well as supporting sustainable development

tujuan pembangunan berkelanjutan. Program dan inisiatif lingkungan yang dilakukan mencakup pengelolaan limbah dan pencemaran air laut, pengendalian pencemaran udara dan kebisingan, pengelolaan emisi gas rumah kaca dan emisi bahan perusak ozon, pengelolaan sumber daya alam (energi, air dan kertas), pembersihan lingkungan pelabuhan dan aktivitas operasi ramah lingkungan lainnya. Dengan melakukan program tersebut, PTK berkomitmen untuk tidak hanya menjalankan kegiatan operasional yang menguntungkan secara finansial, tetapi juga memastikan bahwa perusahaan berperan aktif dalam pelestarian lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam secara bertanggung jawab.

Selama tahun 2024 PTK telah mengeluarkan biaya lingkungan sebesar Rp. 948,88 juta, meningkat 10,72% dari tahun 2023 sebesar Rp. 875,00 juta untuk melaksanakan berbagai program pengelolaan dan pemantauan dan pelestarian lingkungan seperti mengurus sertifikasi pelabuhan berwawasan (*green port*). Selain itu, PTK juga telah mengeluarkan biaya sebesar Rp150 juta di tahun 2024 untuk program pelestarian lingkungan yaitu untuk kegiatan *Green Mangrove Action Program (Green MAP)* di Bali dan Rp200 juta untuk program *Coastal Clean Up* di Surabaya.

goals. Environmental programs and initiatives include waste management and seawater pollution, air, and noise pollution control, management of greenhouse gas emissions and ozone-depleting substance emissions, natural resource management (energy, water, and paper), port environmental cleanup, and other green operation activities. By undertaking such programs, PTK is committed to not only running financially profitable operations, but also ensuring that the Company plays an active role in environmental conservation and responsible management of natural resources.

During 2024, PTK incurred environmental costs of Rp948.88 million, an increase of 10.72% from 2023 of Rp875.00 million to implement various management and monitoring programs and environmental preservation such as managing green port certification. In addition, PTK also spent Rp150 million in 2024 for environmental conservation programs, namely for the Green Mangrove Action Program (Green MAP) activities in Bali and Rp200 million for the Coastal Clean Up program in Surabaya.

Mengelola Penggunaan dan Efisiensi Energi

Managing Energy Use and Efficiency

Hingga tahun 2024, PTK memanfaatkan tiga sumber energi utama untuk mendukung operasional Perusahaan, yaitu Bahan Bakar Minyak (BBM), *Liquefied Natural Gas* (LNG), dan listrik. BBM jenis *High Speed Diesel* (HSD) digunakan sebagai sumber energi utama untuk kapal-kapal operasional, sementara BBM jenis solar dan bensin dimanfaatkan untuk kendaraan operasional dan moda transportasi darat. Selain itu, listrik digunakan untuk penerangan dan sebagai sumber energi bagi berbagai sarana dan prasarana elektronik kantor, termasuk komputer, laptop, *lift*, mesin fotokopi dan peralatan pendukung operasional lainnya.

Selama tahun 2024, jumlah penggunaan energi fosil operasional kantor sebesar 7.603,04 gigajoule, meningkat 14,9% dari tahun 2023 yaitu sebesar 6.463,93 gigajoule. Untuk mengetahui total penggunaan energi untuk setiap pegawai, PTK juga melakukan perhitungan intensitas penggunaan energi dengan nilai di tahun 2024 sebesar 2,56 gigajoule/orang, meningkat 31,64% dari tahun 2023 yaitu sebesar 1,75 gigajoule/orang. Sementara itu, jumlah penggunaan energi fosil operasional kapal sebesar 20.267,40 gigajoule dan jumlah penggunaan energi terbarukan operasional kapal sebesar 1.520.088,31 gigajoule.

Until 2024, PTK utilized three main energy sources to support the Company's operations, namely Fuel Oil (BBM), Liquefied Natural Gas (LNG), and electricity. High-speed diesel (HSD) fuel was used as the main energy source for operational vessels, while diesel and gasoline fuel were used for operational vehicles and land transportation modes. In addition, electricity was used for lighting and as an energy source for various electronic office facilities and infrastructure, including computers, laptops, elevators, photocopiers, and other operational support equipment.

During 2024, PTK's total office operations fossil energy usage was 7.603,04 gigajoules, an increase of 14,9% from 2023, which was 6,463.93 gigajoules. To find out the total energy use for each employee, PTK also calculated the intensity of energy use with a value in 2024 of 2,56 gigajoules, an increase/decrease of 31,64% from 2023, which was 1.75 gigajoules/person. Meanwhile, total vessel operations fossil energy usage amounted to 20,267.40 gigajoule and total vessel operations renewable energy usage amounted to 1,520,088.31 gigajoule.



Dalam rangka mengurangi dampak lingkungan, PTK terus mendorong efisiensi energi untuk dapat berperan dalam transisi ke bahan bakar ramah lingkungan yang turut berkontribusi dalam mendukung target *Net Zero Emission* (NZE) dan pencapaian tujuan SDGs terutama dalam hal pengurangan emisi karbon dan peningkatan penggunaan energi terbarukan. Upaya efisiensi energi yang dilakukan di sepanjang tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- Melakukan konversi dari HSD menjadi Berbahan Bakar Ganda-Diesel Dual Fuel (DDF), yaitu bahan bakar HSD dan LNG. Pemanfaatan LNG tidak hanya mendukung kebijakan pemerintah dalam mengurangi ketergantungan terhadap impor HSD, tetapi juga merupakan peran PTK untuk menggunakan energi yang lebih ramah lingkungan karena dapat mengurangi emisi sekitar 85%;
- Mengoptimalkan penggunaan B30 (Biodiesel 30) berkontribusi dalam menciptakan sistem energi yang lebih berkelanjutan, ramah lingkungan dan mendukung ketahanan energi jangka panjang;
- Menjalankan inovasi teknologi hijau lainnya dalam kegiatan operasional diantaranya yaitu pemasangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di beberapa kapal, penggunaan energi substitution shore connection di port terminal, penggunaan bahan bakar alternatif methanol dan telah melakukan uji coba penggunaan Compressed Natural Gas (CNG)
- Penggunaan PLTS *rooftop* kapasitas 200 kWp sebagai sumber energi terbarukan di PTK Shorebase Tanjung Batu (PSTB);
- Menyenggarakan rapat tertentu dengan sistem online untuk menghemat penggunaan solar dan bensin pada alat transportasi darat;
- Kampanye hemat energi melalui pelatihan dan penggunaan listrik dan air oleh setiap *crew*, khususnya pada jam istirahat dan penerapan *energy conservation* di atas kapal dengan melakukan kecepatan ekonomis;
- Kapal melakukan penghematan penggunaan BBM dengan cara menggunakan mesin kapal sesuai dengan kebutuhan operasional secara ekonomis dan *safety*;
- Mengganti unit *Air Conditioning* (AC) konvensional ke unit AC *inverter* dan Refrijeran non CFC;
- Mengganti lampu dengan tipe LED yang lebih hemat energi (lampu kawasan/*outdoor*);
- Mematikan AC central, lampu, dan berbagai piranti elektronik saat sudah tidak digunakan;
- Menggunakan sistem pencahayaan alami di gedung Warehouse;
- Menghentikan operasional Genset (program elektrifikasi dan penghematan konsumsi BBM solar) dan beralih ke sistem suplai listrik dari penyedia listrik (PT Karingau Power); serta
- Mengoptimalkan sinar matahari sebagai sumber penerangan di siang hari.

In order to reduce environmental impacts, PTK continues to encourage energy efficiency to play a role in the transition to environmentally friendly fuels that contribute to supporting Net Zero Emission (NZE) targets and achieving SDGs goals, especially in terms of reducing carbon emissions and increasing the use of renewable energy. Energy efficiency efforts carried out throughout 2024 are as follows:

- Converting from HSD to Dual Fuel-Diesel (DDF), namely HSD and LNG fuel. The utilization of LNG not only supports the government's policy of reducing dependence on HSD imports, but it is also PTK's role to use more green energy as it can reduce emissions by around 85%;
- Optimizing the use of B30 (Biodiesel 30) contributes to creating a more sustainable, green energy system and supports long-term energy security;
- Running other green technology innovations in operational activities, including the installation of solar power plants (SPP) on several vessels, the use of energy substitution shore connection at the port terminal, the use of alternative fuel methanol, and conducted trials using Compressed Natural Gas (CNG).
- The use of 200 kWp rooftop SPP as a renewable energy source at PTK Shorebase Tanjung Batu (PSTB);
- Holding particular meetings with an online system to save the use of diesel and gasoline on land transportation;
- Energy saving campaign through training and the use of electricity and water by each crew, especially during rest hours, and the application of energy conservation on board by doing economical speed;
- The vessel saves the use of fuel by using its engine in accordance with operational needs economically and safely;
- Replacing conventional Air Conditioning (AC) units with inverter AC units and non-CFC Refrijeran;
- Replacing lights with more energy-efficient LED type (area/*outdoor* lights);
- Turning off central air conditioning, lights, and various electronic devices when not in use;
- Using a natural lighting system in the Warehouse building;
- Stopping the operation of Genset (electrification program and saving diesel fuel consumption) and switching to an electricity supply system from an electricity provider (PT Karingau Power); and
- Optimizing sunlight as a source of lighting during the day.

Pengelolaan Penggunaan dan Konservasi Air

Water Use Management and Conservation

PTK berkomitmen untuk menggunakan air secara bijak dan menjaga keberlangsungan sumbernya melalui upaya konservasi air. Hal ini dilakukan PTK karena ketersediaan air bersih saat ini semakin menjadi isu penting karena menjadi aspek vital dalam kehidupan dan kesejahteraan manusia serta ekosistem. Hal ini mendorong PTK untuk terus melakukan penghematan air bersih dengan melakukan program sebagai berikut:

- Tidak melakukan penarikan dan penggunaan air yang bersumber dari badan air yang berada di wilayah yang mengalami kelangkaan air;
- Tidak melakukan pembuangan air ke seluruh wilayah yang mengalami langka air;
- Melakukan pengecekan saluran air, keran atau valve, dan segera melakukan perbaikan secepatnya apabila terjadi kebocoran atau kerusakan;
- Melakukan kampanye dan himbauan penghematan air; serta
- Melakukan penampungan air hujan untuk diolah dan digunakan kembali sesuai dengan baku mutu peruntukannya.

Selama tahun 2024, PTK melakukan penarikan dan penggunaan air sebanyak 71.951 m³ atau 71,93 megaliter, meningkat 18,81% dari tahun 2023 yaitu sebanyak 60.555 m³ atau 60,55 megaliter.

PTK is committed to using water wisely and maintaining the sustainability of its source through water conservation efforts. This is conducted by PTK because the availability of clean water is currently increasingly becoming an important issue. After all, it is a vital aspect of the life and welfare of humans and ecosystems. It encourages PTK to continue to save clean water by conducting the following program:

- Not withdrawing and using water sourced from water bodies located in areas experiencing water scarcity;
- Not discharging water to all areas experiencing water scarcity;
- Checking water lines, taps, or valves and immediately making repairs as soon as possible if there is a leak or damage;
- Conducting water-saving campaigns and appeals; and
- Collecting rainwater to be treated and reused in accordance with the quality standards of its designation.

During 2024, PTK withdrew and used 71.951 m³ or 71,93 megaliters of water, an increase/decrease of 18,81% from 2023, which was 60,555 m³ or 13.11 megaliters.

Volume Penarikan dan Penggunaan Air Berdasarkan Sumber (megaliter)

Volume of Water Withdrawal and Use by Source (megaliter)

Sumber Air Water Source	Volume Penggunaan Air (m ³) Volume of Water Use (m ³)			Volume Penggunaan Air (megaliter) Volume of Water Use (megaliter)		
	2024	2024	2024	2024	2024	2024
Air PDAM PDAM Water	71.951	60.555	39.770	71,93	60,555	39,770
Jumlah Total	71.951	60.555	39.770	71,93	60,555	39,770

Catatan:

- Metode pengukuran menggunakan flowmeter debit yang di pasang di titik-titik tertentu
- PTK tidak melakukan penarikan dan penggunaan air yang bersumber dari badan air yang berada di wilayah yang mengalami kelangkaan air

Notes:

- The measurement method uses a discharge flowmeter installed at certain points
- PTK does not use water sourced from water bodies located in areas experiencing water scarcity.



Pengelolaan Emisi Gas Rumah Kaca dan Emisi Bahan Perusak Ozon

Management of Greenhouse Gas Emissions and Ozone-Depleting Substances Emissions

Kualitas udara merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan lingkungan. Hal ini karena berpotensi memiliki dampak langsung terhadap kesehatan manusia, keberlanjutan ekosistem dan kelangsungan operasional bisnis Perusahaan. Oleh karena itu, PTK mendukung upaya pemerintah dalam mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Hal ini tercermin melalui upaya dan inisiatif PTK terkait pengurangan emisi kegiatan operasi dengan melakukan penghematan energi dan merealisasikan program penanaman pohon yang mampu menyerap CO₂ di dalam maupun di luar daerah operasi PTK.

Pada tahun 2024, PTK terus melaksanakan strategi dekarbonisasi yang salah satunya berfokus pada pengurangan emisi karbon, sebagai upaya mengurangi dampak negatif terhadap perubahan iklim dan mendukung transisi global menuju ekonomi yang lebih hijau dan berkelanjutan, sejalan dengan kebijakan nasional dan komitmen global untuk mencapai NZE di masa depan. Beberapa langkah yang diambil oleh PTK dalam strategi dekarbonisasi antara lain: pengurangan emisi karbon, peningkatan efisiensi energi, transisi ke ekonomi hijau dan berkelanjutan dan penerapan teknologi ramah lingkungan.

Dalam menjalankan operasional yang lebih ramah lingkungan, PTK juga telah mengidentifikasi sumber penghasil emisi lain, yaitu emisi yang menyebabkan kerusakan lapisan ozon atau emisi Bahan Perusak Ozon/ BPO (*Ozone Depleting Substances*/ODS). BPO merupakan zat-zat kimia yang dapat merusak lapisan ozon di atmosfer, yang berfungsi melindungi bumi dari radiasi ultraviolet berbahaya. Penggunaan dan pelepasan BPO ke atmosfer dapat menyebabkan penipisan lapisan ozon, yang berpotensi memiliki dampak negatif bagi kesehatan manusia dan ekosistem. Emisi ini antara lain bersumber dari berbagai sistem seperti pendinginan dan pemanasan, seperti refrigeran mesin pengatur suhu ruangan (AC) yang menggunakan *freon* berbahan chlorofluorocarbon (CFC) dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang menggunakan halon.

Upaya yang dilakukan PTK dalam melakukan perlindungan lapisan ozon adalah dengan menggunakan refrigeran R419 A yang lebih ramah lingkungan karena tidak mengandung BPO. Sementara itu, untuk APAR, PTK memilih yang tidak menggunakan bahan kimia halon. Upaya ini sebagai bentuk

Air quality is one of the most important aspects of environmental management since it potentially has a direct impact on human health, ecosystem sustainability, and the continuity of the Company's business operations. Therefore, PTK supports the government's efforts to reduce Greenhouse Gas (GHG) emissions, reflected through PTK's efforts and initiatives related to reducing emissions from operating activities by saving energy and realizing tree planting programs that can absorb CO₂ inside and outside PTK's operating areas.

In 2024, PTK continuously implemented a decarbonization strategy, one of which focuses on reducing carbon emissions as an effort to reduce the negative impacts of climate change and support the global transition to a greener and more sustainable economy, in line with national policies and global commitments to achieve NZE in the future. Some of the steps taken by PTK in the decarbonization strategy include reducing carbon emissions, improving energy efficiency, transitioning to a green and sustainable economy, and implementing environmentally friendly technologies.

In carrying out more environmentally friendly operations, PTK also identified other sources of emissions, namely emissions that cause damage to the ozone layer or Ozone-Depleting Substances (BPO) emissions. BPOs are chemicals that can damage the ozone layer in the atmosphere, which protects the earth from harmful ultraviolet radiation. The use and release of BPOs into the atmosphere can cause depletion of the ozone layer, which has the potential to have adverse effects on human health and ecosystems. These emissions, among others, come from various systems such as cooling and heating, such as refrigerants for air-conditioning machines that use chlorofluorocarbon (CFC)-based freons and light fire extinguishers that use halons.

The efforts made by PTK in protecting the ozone layer are by using more environmentally friendly R419 A refrigerant because it does not contain BPOs. Meanwhile, PTK chooses not to use halon chemicals for fire extinguishers. This effort is a form of PTK's compliance with international

kepatuhan PTK atas regulasi internasional dan nasional yaitu Protokol Montreal yang merupakan perjanjian internasional untuk melakukan perlindungan lapisan ozon (penghapusan BPO) dan mengikuti pedoman dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia. Sebagai bentuk penerapan komitmen ini, selama tahun 2024 PTK tidak menggunakan BPO dalam kegiatan operasional sehingga tidak terdapat perhitungan volume produksi, impor maupun ekspor BPO

and national regulations, namely the Montreal Protocol, which is an international agreement to protect the ozone layer (elimination of BPOs) and follow guidelines from the Indonesian Ministry of Environment and Forestry. As a form of implementing this commitment, during 2024, PTK did not use BPOs in operational activities, so there was no calculation of the volume of production, import, or export of BPOs.

Meminimalisir Limbah Minimizing Waste

Dalam rangka mewujudkan lingkungan kerja yang bersih dan sehat, PTK berkomitmen untuk melaksanakan pengelolaan limbah yang efektif dan berkelanjutan. Pengelolaan limbah padat/sampah serta limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dilakukan secara terpadu dan terintegrasi untuk memastikan bahwa limbah yang dihasilkan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan atau kesehatan manusia. Hal ini bertujuan untuk menghindari masalah seperti bau, penyakit, kerusakan lingkungan, serta dampak buruk lainnya yang dapat merugikan perusahaan dan masyarakat sekitar.

To realize a clean and healthy working environment, PTK is committed to implementing effective and sustainable waste management. The management of solid waste/waste and Hazardous and Toxic Substances (B3) waste is carried out in an integrated manner to ensure that the waste produced does not have a negative impact on the environment or human health. This aims to avoid issues such as odor, disease, environmental damage, and other adverse impacts that can harm the Company and the surrounding community.

Dalam praktiknya, PTK telah menerapkan berbagai strategi untuk mengelola limbah secara berkelanjutan, dengan mengadopsi prinsip 4R (*Reduce, Reuse, Recycle, dan Recovery*) untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan manfaat dari limbah yang dihasilkan. Tindakan yang diambil untuk mencegah/memitigasi, menangani dan mengelola limbah dan dampak terkait adalah sebagai berikut:

In practice, PTK has implemented various strategies to manage waste sustainably by adopting the 4R principles (*Reduce, Reuse, Recycle, and Recovery*) to minimize negative impacts and maximize the benefits of the waste generated. Actions taken to prevent/mitigate, handle, and manage waste and related impacts are as follows:

- *Reuse*: menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama ataupun fungsi lainnya;
- *Reduce*: mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah;
- *Recycle*: mengolah kembali (daur ulang) sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat; serta
- *Recovery*: mengambil komponen-komponen yang masih dapat dipergunakan.

- *Reuse*: reusing waste that can still be used for the same function or another function;
- *Reduce*: reducing everything that causes waste;
- *Recycle*: reprocessing (recycling) waste into new useful goods or products; and
- *Recovery*: taking components that can still be used.

Jenis limbah yang dihasilkan oleh PTK adalah limbah cair, limbah padat kapal dan limbah pada gedung. Proses pengumpulan dan pemantauan data terkait limbah dilakukan melalui kolaborasi beberapa fungsi seperti Fungsi Asset Management untuk lokasi kantor pusat, Fungsi Fleet untuk limbah di kapal, serta Fungsi HSSE pada masing-masing Anak Perusahaan, region dan *joint-venture*. Metode pengelolaan limbah PTK adalah sebagai berikut:

The types of waste generated by PTK are effluent, shipboard solid waste, and building waste. The process of collecting and monitoring data related to waste is carried out through the collaboration of several functions, such as the Asset Management Function for the head office location, the Fleet Function for waste on ships, and the HSSE Function in each subsidiary, region, and joint-venture. PTK's waste management methods are as follows:



Metode Pengelolaan Limbah (Ton)

Waste Management Method (Ton)

Kategori Limbah Waste Category	Jenis Limbah Type of Waste	Metode Pengelolaan Management Method
Limbah Cair Effluent	Oli Bekas Used Oil	Reuse diserahkan kepada fasilitas darat/pelabuhan pemanfaat berizin Reuse is handed over to onshore facilities/port-licensed users
Limbah Padat: Kapal Solid Waste: Ship	Plastik Plastic	Dibuang ke fasilitas darat/terminal yang kemudian akan didaur ulang Discharged to an onshore facility/terminal where it will be recycled
	Food Wastes	Dibuang ke laut setelah dipotong-potong kecil kurang dari 1cm2 kemudian dibuang ke laut dengan jarak lebih dari 12 NM dari daratan terdekat Discharged to sea after being cut into small pieces of less than 1 cm2 and then discharged to sea at a distance of more than 12 NM from the nearest landfall
	Domestic Wastes: Sampah yang dihasilkan dari operasional harian kapal Waste generated from daily vessel operations	Dikumpulkan di dalam kantung plastik besar kemudian bersamaan dengan sampah plastik dibuang ke fasilitas pembuangan sampah di darat / terminal yang kemudian akan diolah kembali Collected in large plastic bags, then together with plastic waste disposed of at landfill/terminal waste disposal facilities, which will then be reprocessed
	Cooking Oil	Dikumpulkan di dalam drum kemudian bersamaan dengan sampah plastik dibuang ke fasilitas pembuangan sampah di darat/ terminal yang kemudian akan diolah kembali Collected in drums, then together with plastic waste is disposed of landfill/terminal waste disposal facilities, which will then be reprocessed
	Incinerator Ashes	Dikumpulkan di dalam cylinder kemudian dikumpulkan di dalam kantung plastik besar kemudian bersamaan dengan sampah plastik dibuang ke fasilitas pembuangan sampah di darat/terminal yang kemudian akan diolah kembali Collected in cylinders, then collected in large plastic bags then together with plastic waste disposed of at landfill/terminal waste disposal facilities, which will then be reprocessed
	Electronic Wastes	Dikumpulkan di dalam kantung plastik besar kemudian bersamaan dengan sampah plastik dibuang ke fasilitas pembuangan sampah di darat/terminal yang kemudian akan diolah kembali Collected in a large plastic bag, then together with plastic waste disposed of at landfill/terminal waste disposal facilities, which will then be reprocessed
Limbah Padat: Gedung Solid Waste: Building	Lampu Lamp	Diserahkan kepada Pengelola Gedung untuk dikelola lebih lanjut Handed over to the Building Manager for further management
	Cartridge Fotokopi Photocopy Cartridge	Diserahkan kembali kepada vendor IT untuk proses daur ulang Handed back to IT vendor for recycling process

Keanekaragaman Hayati

Biodiversity

PTK berkomitmen untuk secara rutin melaksanakan berbagai program pelestarian keanekaragaman hayati yang diharapkan berpotensi dapat membawa banyak dampak positif bagi manusia, seperti menyediakan air dan udara bersih, berkontribusi terhadap ketersediaan pangan, dan juga berperan dalam mengurangi dampak erosi pantai dan perubahan iklim. Selama tahun 2024, program pelestarian keanekaragaman hayati PTK adalah sebagai berikut:

PTK is committed to regularly implementing various biodiversity conservation programs that are expected to potentially deliver many positive impacts to humans, such as providing clean water and air, contributing to food availability, and also playing a role in reducing the impact of coastal erosion and climate change. During 2024, PTK's biodiversity conservation programs are as follows:

Program Pelestarian Keanekaragaman Hayati PTK

PTK Biodiversity Conservation Program

Lokasi Perlindungan Protection Location	Flora dan Fauna yang dilindungi Protected Flora and Fauna	Nama Ilmiah Scientific Name	Status IUCN Red List Red List IUCN Status	Upaya Pelestarian Conservation Effort
Kampung Wisata Mangrove Lantebung, Kecamatan Tamalanrea, Makassar Lantebung Mangrove Tourism Village, Tamalanrea District, Makassar	Mangrove	<i>Rhizophora Mucronata</i>	Risiko Rendah Least Concern	Tahun 2023: - Peresmian rumah pembibitan berkapasitas 2.045 bibit mangrove - Penanaman 2.023 bibit mangrove In 2023: - Inauguration of a seedling house with a capacity of 2,045 mangrove seedlings - Planting of 2,023 mangrove seedlings
Tuwed Mangrove Park, Bali Tuwed Mangrove Park, Bali	Mangrove	<i>Rhizophora Mucronata</i>	Risiko Rendah Least Concern	Tahun 2024: - Peresmian rumah pembibitan berkapasitas 8.000 bibit mangrove - Penanaman 5.000 bibit mangrove In 2024: - Inauguration of a seedling house with a capacity of 8,000 mangrove seedlings - Planting of 5,000 mangrove seedlings



Menangani Pengaduan Lingkungan Handling Environmental Complaints

PTK menyediakan mekanisme bagi para pemangku kepentingan untuk menyampaikan pengaduan terkait masalah lingkungan yang dapat disampaikan melalui web “We-Care” dengan link www.complain.pptk-shipping.com, telepon (021 31923005), maupun email CCMS.ptk@pertamina.com. Pengaduan juga dapat disampaikan secara langsung kepada Perusahaan untuk selanjutnya ditindaklanjuti secara responsif dan terbuka oleh PTK.

selama tahun 2024 PTK tidak menerima pengaduan dari masyarakat maupun pemangku kepentingan lainnya terkait lingkungan hidup dan juga tidak menerima sanksi atau denda, baik material maupun non material, terkait ketidakpatuhan terhadap regulasi lingkungan.

PTK provides a mechanism for stakeholders to submit complaints related to environmental issues that can be submitted through the “We-Care” web at www.complain.pptk-shipping.com, telephone (021 31923005), or email CCMS.ptk@pertamina.com. Complaints can also be submitted directly to the Company to be followed up responsively and openly by PTK.

During 2024, PTK did not receive any complaints from the public or other stakeholders related to the environment and also did not receive any sanctions or fines, either material or non-material, related to non-compliance with environmental regulations.

Kinerja Sosial Social Performance

PT Pertamina Trans Kontinental (PTK) terus menunjukkan komitmennya dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (TJSL) dengan memberikan dampak positif bagi pelanggan, karyawan, dan masyarakat. PTK percaya bahwa keberlanjutan bisnis tidak hanya bergantung pada aspek ekonomi, tetapi juga pada kontribusi sosial yang berkelanjutan. Oleh karena itu, PTK secara konsisten menjalankan program-program yang berorientasi pada peningkatan layanan pelanggan, kesejahteraan karyawan, serta pemberdayaan masyarakat, khususnya di wilayah pesisir.

Demi meningkatkan kepuasan pelanggan, PTK terus melakukan optimalisasi layanan melalui digitalisasi dan peningkatan standar keselamatan operasional. Program peningkatan kualitas layanan ini diperkuat dengan survei kepuasan pelanggan yang dilakukan secara berkala guna memastikan bahwa kebutuhan dan harapan pelanggan dapat terpenuhi secara optimal. Selain itu, PTK juga memberikan pelatihan dan sertifikasi bagi kru kapal dan tenaga operasional untuk meningkatkan profesionalisme dalam memberikan layanan terbaik kepada pelanggan.

Di sisi internal, PTK berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan, kesempatan pengembangan karier, serta pemberian insentif dan tunjangan yang

PT Pertamina Trans Kontinental (PTK) continuously demonstrates its commitment to implementing corporate social responsibility (CSR) by positively impacting customers, employees, and the community. PTK believes that business sustainability depends not only on economic aspects, but also on sustainable social contributions. Therefore, PTK consistently runs programs that are oriented toward improving customer service, employee welfare, and community empowerment, especially in coastal areas.

To improve customer satisfaction, PTK continues to optimize services through digitalization and improved operational safety standards. This service quality improvement program is strengthened by regular customer satisfaction surveys to ensure that customer needs and expectations are optimally met. In addition, PTK also provides training and certification for ship crews and operational personnel to improve professionalism in providing the best service to customers.

Internally, PTK is committed to improving employee welfare through various education and training programs, career development opportunities, and the provision of competitive incentives and benefits. PTK also instills an inclusive work

kompetitif. PTK juga menanamkan budaya kerja yang inklusif dan berlandaskan nilai AKHLAK guna menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan harmonis. Selain itu, perusahaan memberikan perhatian khusus pada kesejahteraan keluarga karyawan dengan menyediakan program kesehatan, bantuan pendidikan bagi anak karyawan, serta berbagai fasilitas penunjang lainnya.

Untuk masyarakat, PTK aktif dalam program pemberdayaan berbasis lingkungan dan ekonomi, terutama di wilayah pesisir. Program seperti “berSEAnergi untuk Laut” yang melibatkan aksi bersih pantai dan penanaman mangrove menjadi wujud nyata kepedulian PTK terhadap kelestarian lingkungan maritim. Selain itu, PTK juga menjalankan program Inkubasi Ekonomi Bahari yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pelaku usaha mikro di sektor kelautan. Melalui inisiatif ini, PTK tidak hanya menciptakan nilai ekonomi, tetapi juga memperkuat ekosistem masyarakat maritim yang lebih mandiri dan berkelanjutan.

culture based on AKHLAK values to create a productive and harmonious work environment. In addition, the Company pays special attention to the welfare of employees' families by providing health programs, educational assistance for employees' children, and various other supporting facilities.

For the community, PTK is active in environmental and economic-based empowerment programs, especially in coastal areas. Programs such as “berSEAnergi untuk Laut/ Synergy for the Sea”, which involves beach clean-ups and mangrove planting, are a tangible manifestation of PTK's concern for the preservation of the maritime environment. In addition, PTK also runs a Maritime Economic Incubation program that aims to improve the welfare of fishermen and micro-entrepreneurs in the marine sector. Through this initiative, PTK not only creates economic value, but also strengthens a more independent and sustainable maritime community ecosystem.

Kinerja Sosial – Ketenagakerjaan

Social Performance – Employment

Komitmen dan Kebijakan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Commitment and Policy in Human Resource Management

Pengelolaan ketenagakerjaan di Perusahaan dilakukan berdasarkan PKB periode tahun 2023-2025 dan Sistem Tata Kerja SDM. Selain itu, PTK juga melakukan pengelolaan SDM sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, terutama Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang diperbaharui menjadi Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta peraturan dan kebijakan lainnya yang relevan. Selain aspek ketenagakerjaan, Perusahaan juga memprioritaskan aspek Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) bagi pekerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, serta Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 26 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penilaian Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Employment management in the Company is carried out based on the CLA for the period 2023-2025 and the HR Work System. In addition, PTK also manages HR in accordance with applicable laws and regulations, especially Law No. 13 of 2003 concerning Manpower, which was updated to Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation, as well as other relevant regulations and policies. In addition to employment aspects, the Company also prioritizes Occupational Health and Safety (OHS) aspects for employees as stipulated in Law No. 1 of 1970 concerning Occupational Health and Safety, as well as Minister of Manpower Regulation No. 26 of 2014 concerning the Organization of Assessment of Occupational Health and Safety Management System Implementation.



Inisiatif Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Tahun 2024

Human Resources Management Program Initiatives in 2024

Bentuk kegiatan tanggung jawab Perusahaan terhadap ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja terdiri dari 2 (dua) bidang kegiatan yaitu Kegiatan Tanggung Jawab Perusahaan terkait Ketenagakerjaan dan Kegiatan Tanggung Jawab Perusahaan terhadap Kesehatan Dan Keselamatan Kerja.

PTK berfokus pada keberlanjutan dalam peningkatan produktivitas karyawan. Peningkatan produktivitas karyawan merupakan bagian pengelolaan sumber daya manusia (SDM) yang dilakukan PTK pada tahun 2024. Kegiatan pengelolaan SDM di PTK diantaranya peningkatan kompetensi, peningkatan kesejahteraan, *benefit*, kompensasi yang kompetitif dan berbasis kinerja, serta pengelolaan HSE melalui peningkatan budaya HSE.

Adapun beberapa kegiatan/program yang direncanakan oleh Perusahaan yaitu:

1. Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Kompetensi Karyawan
2. Penghargaan Produktivitas Karyawan
3. Pemberian Kesejahteraan
4. Pengelolaan HSE

The form of the Company's responsibility activities towards employment, occupational health and safety consists of 2 (two) areas of activity, namely Corporate Responsibility Activities related to Employment and Corporate Responsibility Activities for Occupational Health and Safety.

PTK focuses on sustainability in increasing employee productivity. Increasing employee productivity is part of human resource management (HR) carried out by PTK in 2024. HR management activities at PTK include competency improvement, welfare improvement, benefits, competitive and performance-based compensation, and HSE management through improving HSE culture.

Some of the activities/programs planned by the Company are:

1. Employee Education, Training, and Competency Development
2. Employee Productivity Rewards
3. Provision of Welfare
4. HSE Management

Kesetaraan Dalam Kesempatan Kerja

Equality in Employment Opportunities

PTK menerapkan proses rekrutmen yang selalu menjunjung tinggi prinsip transparansi dan keadilan, tanpa membedakan suku, agama, dan ras sehingga setiap rekrutmen yang diadakan oleh Perusahaan dapat dipastikan selalu terbebas dari unsur diskriminasi. Dalam melakukan perekrutan pegawai, PTK senantiasa berpedoman pada aturan ketenagakerjaan yang berlaku, yaitu Pasal 68 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 mengenai usia minimum calon pegawai.

Pada tahun 2024, jumlah pegawai PTK sebanyak 2.971 orang, dengan komposisi jumlah pegawai wanita sebanyak 291 orang dan pegawai pria sebanyak 2680 orang. PTK juga memberikan kesempatan pada masyarakat lokal untuk menjadi bagian dari Perusahaan sesuai dengan kompetensi dan kapabilitas. Selama tahun pelaporan, Perusahaan tidak pernah mempekerjakan pekerja di bawah 18 tahun.

PTK implements a recruitment process that always upholds the principles of transparency and fairness, without distinguishing ethnicity, religion, and race, so that every recruitment held by the Company can be guaranteed to always be free from discrimination elements. In recruiting employees, PTK is continuously guided by applicable employment regulations, namely Article 68 of Law No. 13 of 2003 regarding the minimum age of prospective employees.

In 2024, the number of PTK employees was 2,971 people, with a composition of 291 female employees and 2680 male employees. PTK also provides opportunities for local communities to become part of the Company in accordance with competencies and capabilities. During the reporting year, the Company never employed employees under 18 years old.

Selama tahun 2024, tidak terdapat laporan mengenai insiden diskriminasi terkait ras, warna kulit, gender, agama, opini politik, asal usul sosial dan segala bentuk diskriminasi lainnya yang melibatkan pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal yang terkait Perusahaan.

During 2024, there were no reports of discrimination incidents related to race, color, gender, religion, political opinion, social origin, or any other forms of discrimination involving internal and external stakeholders related to the Company.

Kesetaraan Dalam Pengembangan Kompetensi

Equality in Competency Development

PTK memberikan pengembangan kompetensi bagi setiap pegawai untuk mendukung produktivitas SDM. Program pengembangan kompetensi SDM dilakukan melalui program pelatihan, *workshop*, dan pengembangan keterampilan bagi pegawai, yang mencakup peningkatan dalam bidang teknis, manajerial, dan interpersonal.

PTK provides competency development for each employee to support HR productivity. The HR competency development program is carried out through training programs, workshops, and skills development for employees, which includes improvements in technical, managerial, and interpersonal fields.

Remunerasi dan Kesejahteraan Pegawai

Remuneration and Employee Welfare

PTK senantiasa berkomitmen memberikan hak pegawai yang disesuaikan pada aspek klasifikasi jabatan, pengalaman kerja, tanggung jawab pekerjaan, dan pencapaian individu tanpa membedakan jenis kelamin sehingga rasio pemberian remunerasi pada setiap level jabatan yang sama adalah 1:1 antara pegawai wanita dan pria. Remunerasi yang diberikan berbentuk gaji pokok, tunjangan operasional, tunjangan kesehatan, cuti, tunjangan lainnya, program pensiun dan berbagai tunjangan lainnya sesuai dengan kebijakan Perusahaan.

PTK is continuously committed to providing employee rights adjusted to the aspects of position classification, work experience, job responsibilities, and individual achievements without discriminating against gender; hence, the ratio of remuneration provision at each level of the same position is 1:1 between female and male employees. Remuneration is provided in the form of basic salary, operational allowances, health allowances, leave, other allowances, pension programs, and various other allowances in accordance with Company policy.

Remunerasi dan tunjangan pegawai yang diberikan telah ditinjau berdasarkan kinerja pegawai dan kinerja Perusahaan serta selalu mengacu pada standar upah minimum yang berlaku sesuai dengan peraturan pemerintah.

Remuneration and employee allowance provided have been reviewed based on employee performance and Company performance, as well as always referring to the applicable minimum wage standards in accordance with government regulations.

Selain itu, PTK juga memberikan program pensiun sebagai bentuk penghargaan dan jaminan masa depan bagi para pegawai saat telah memasuki masa purnabakti. Perusahaan mengikutsertakan seluruh pegawainya pada program wajib BPJS Ketenagakerjaan berupa Jaminan Kematian, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun. Selain itu, Perusahaan juga turut serta menyelenggarakan program pensiun bagi para pegawai tetap dengan menunjuk DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan) sebagai pengelola.

In addition, PTK also provides a pension program as a form of appreciation and future security for employees upon entering retirement. The Company includes all employees in the mandatory Social Security for Employment program in the form of Death Insurance, Work Accident Insurance, Old Age Insurance, and Pension Insurance. In addition, the Company also participates in organizing pension programs for permanent employees by appointing DPLK (Financial Institution Pension Fund) as the manager.

Bentuk remunerasi lainnya yang diberikan Perusahaan, yaitu berupa izin cuti melahirkan yang diberikan selama 1,5 bulan sebelum persalinan dan 1,5 bulan setelah persalinan kepada pegawai wanita, serta memberikan kelonggaran kepada pegawai pria untuk mendampingi pasangannya yang akan melakukan proses melahirkan dengan lamanya izin cuti selama dua hari.

Another form of remuneration provided by the Company is in the form of maternity leave granted for 1.5 months before childbirth and 1.5 months after childbirth to female employees, as well as providing leeway to male employees to accompany their spouses who will carry out the process of giving birth with a two-day leave permit.



Penanganan Pengaduan Pegawai

Employee Complaint Handling

Dalam rangka menciptakan suasana kerja yang kondusif, PTK secara terbuka menerima pengaduan karyawan atas keluhan-keluhan yang mereka hadapi baik dalam lingkup pekerjaan maupun personal. PTK telah menyediakan saluran pengaduan terkait masalah ketenagakerjaan melalui *Whistleblowing System* Perusahaan.

Pengaduan karyawan diterima dan dievaluasi oleh Divisi SDM. Divisi SDM meneruskan pengaduan karyawan kepada unit-unit yang bertanggung jawab atas pokok permasalahan sehingga karyawan dapat berkomunikasi langsung tanpa perantara.

Pada tahun 2024, tercatat terdapat 2 pengaduan yang diterima oleh PTK terkait kode etik karyawan. PTK telah menindaklanjuti seluruhnya terkait laporan tersebut.

In order to create a conducive working atmosphere, PTK openly accepts employee grievances for complaints they face both in the scope of work and personal. PTK has provided a complaint channel related to employment issues through the Company's *Whistleblowing System*.

Employee grievances are received and evaluated by Human Capital Division. The Human Capital Division forwards employee complaints to the units responsible for the subject matter so that employees can communicate directly without intermediaries.

In 2024, two complaints were received by PTK related to employee code of conduct. PTK followed up on all of these reports.

Program Membangun Budaya HSE

HSE Culture-Building Program

Program membangun budaya *health, safety & environment* dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan dan kepedulian karyawan agar dapat tercipta budaya HSE di PTK. Terdapat delapan aspek utama dalam gambaran umum program kerja HSSE tahun 2024. Delapan aspek program dimaksud adalah sebagai berikut:

The health, safety & environment culture-building program is implemented to increase employee knowledge and awareness to create an HSE culture at PTK. There are eight main aspects in the overview of the HSSE work program in 2024. The eight aspects of the program are as follows:

No.	Aspek Aspect	Isi Program Content of Program	Tujuan/Sasaran Objectives/Targets	Indikator Keberhasilan Indikator Keberhasilan
1.	Program inisiatif utama Key initiative program	Terdapat 5 program yang rencananya dilakukan, antara lain: 1. Mandatory Wellness Challenge (PETEKA FIT) 2. GEMILANG (Generasi Muda Inisiatif Keberlanjutan yang Generative) 3. Green Port & Green Building 4. Deployment MTSI (Marine Terminal Safety Inspector) 5. Transko AFBULO (Anti Fraud Bunker Looses) There are five programs that are planned to be conducted, including: 1. Mandatory Wellness Challenge (PETEKA FIT) 2. GEMILANG (Young Generation of Generative Sustainability Initiatives) 3. Green Port & Green Building 4. Deployment MTSI (Marine Terminal Safety Inspector) 5. Transko AFBULO (Anti-Fraud Bunker Looses)	Peningkatan kinerja HSSE yang secara spesifik mendorong dalam hal mendorong transformasi gaya hidup sehat, budaya keselamatan (<i>safety culture</i>), dan implementasi program perlindungan/pelestarian lingkungan. Improved HSSE performance that specifically encourages the transformation of healthy lifestyles, safety culture, and implementation of environmental protection/conservation programs.	Beberapa indikator yang dipergunakan antara lain penurunan angka obesitas pada pekerja, jumlah pelaksanaan training, sertifikasi green building & green port, deployment personnel MTSI, dan laporan evaluasi dari program Transko AFBULO. Several indicators used include a decrease in obesity rates among employees, the number of trainings conducted, green building & green port certification, deployment of MTSI personnel, and evaluation reports from the Transko AFBULO program.

No.	Aspek Aspect	Isi Program Content of Program	Tujuan/Sasaran Objectives/Targets	Indikator Keberhasilan Indikator Keberhasilan
2.	Umum General	Program yang mencakup aspek HSSE secara umum. Program terdiri atas audit ISO SMT, audit SUPREME, Rapat Tinjauan Manajemen, pelatihan, kampanye, pemberian penghargaan, dan pemutakhiran STK. Programs that cover HSSE aspects in general. The program consists of ISO SMT audits, SUPREME audits, Management Review Meetings, training, campaigns, awards, and STK updates.	Mendorong implementasi sistem secara siklus penuh. Encouraging full-cycle implementation of the system.	Beberapa indikator yang dipergunakan antara lain hasil peringkat SUPREME, jumlah peserta pelatihan, jumlah materi kampanye, dan jumlah penerima penghargaan Several indicators were used, including SUPREME ranking results, number of trainees, number of campaign materials, and number of award recipients
3.	IT Tools	Terdapat 3 IT Tools yang diprogramkan: 1. OBIT 2.0 2. HSSE Passport 3. Inspeksi Umum There are three IT Tools programmed: 1. OBIT 2.0 2. HSSE Passport 3. General Inspection	Membantu dalam dokumentasi, pengingat, penyimpanan data, dan alat menjalankan program. Assisting in documentation, reminders, data storage, and program execution tools.	Jumlah IT Tools yang sudah Go Live Number of IT Tools that have been Go Live
4.	Health	Program terdiri dari pelaksanaan MCU, DCU, IH <i>Monitoring</i> , dan <i>food hygiene</i> . The program consists of the implementation of MCU, DCU, IH Monitoring, and food hygiene.	Memastikan kesehatan bagi Pekerja. Ensuring health for Workers.	Jumlah pelaksanaan MCU, DCU, IH <i>Monitoring</i> , dan inspeksi <i>food hygiene</i> Number of MCU, DCU, IH Monitoring, and food hygiene inspections implemented
5.	Safety	Program mencakup beberapa aspek utama, antara lain Manajemen risiko operasional, Verification & Validation (V&V), OBIT Card, pelatihan HSSE, FERRAT & OSERRAT, Audit SIKa, CSMS <i>full cycle</i> , Tindak lanjut rekomendasi hasil investigasi recordable incident, Learning from event, dan Transko HSSE Forum. The program covers several main aspects, including Operational risk management, Verification & Validation (V&V), OBIT Card, HSSE training, FERRAT & OSERRAT, SIKa Audit, CSMS full cycle, Follow-up of recommendations on recordable incident investigation results, Learning from events, and Transko HSSE Forum.	Peningkatan pengelolaan aspek keselamatan berdasarkan pendekatan risiko. Improved management of safety aspects based on a risk approach.	<i>Risk register</i> yang termutakhir, tersedianya checklist V&V, jumlah laporan OBIT card beserta tindak lanjutnya, jumlah peserta pelatihan, laporan inspeksi FERRAT & OSERRAT, Audit SIKa, Persentase tindak lanjut incident, pelaksanaan event, dan pelaksanaan LFE. Up-to-date risk register, availability of V&V checklist, number of OBIT card reports and follow-ups, number of trainees, FERRAT & OSERRAT inspection reports, SIKa Audit, Percentage of incident follow-ups, event implementation, and LFE implementation.



No.	Aspek Aspect	Isi Program Content of Program	Tujuan/Sasaran Objectives/Targets	Indikator Keberhasilan Indikator Keberhasilan
6.	Security	Program fokus pada <i>Joint Safety and Security Inspection (JSSI)</i> , Sistem Manajemen Pengamanan (SMP), <i>Security Risk Assessment</i> , dan <i>security drill</i> . The program focuses on Joint Safety and Security Inspection (JSSI), Security Management System (SMP), Security Risk Assessment, and security drills.	Peningkatan pengelolaan aspek pengamanan serta pencegahan <i>fraud</i> . Improved management of security aspects and fraud prevention.	Pelaksanaan inspeksi, sertifikasi SMP, pelaksanaan drill, dan risk register termutakhir. Implementation of inspections, SMP certification, drill implementation, and up-to-date risk register.
7.	Environment	Program fokus pada Implementasi pengelolaan dan pelaporan dokumen lingkungan, upaya penurunan emisi karbon, verifikasi lapangan terkait aspek lingkungan, audit PERCA, studi <i>Green Port</i> , sertifikasi <i>Green Building</i> , dan penyusunan <i>Green company roadmap</i> . The program focuses on the implementation of environmental document management and reporting, efforts to reduce carbon emissions, field verification related to environmental aspects, PERCA audits, Green Port studies, Green Building certification, and preparation of Green company roadmaps.	Pengelolaan aspek lingkungan sesuai dengan peraturan yang berlaku Management of environmental protection aspects in accordance with applicable regulations	Laporan monitoring & evaluasi lingkungan, laporan perhitungan emisi karbon, jumlah event, dan hasil studi baseline pemenuhan kriteria Green Port, sertifikasi Green building, dan tersedianya <i>green company roadmap</i> . Environmental monitoring & evaluation reports, carbon emission calculation reports, number of events, and baseline study results for the fulfillment of Green Port criteria, Green building certification, and the availability of a green company roadmap.
8.	SSA	Program Vetting PSA, inspeksi umum, FERRAT, seminar, <i>Emergency exercise</i> , dan <i>deployment</i> personel MTSI. PSA Vetting Program, general inspections, FERRAT, seminars, Emergency exercises, and deployment of MTSI personnel.	Memastikan aspek keselamatan operasi kapal sesuai standar dan peraturan yang berlaku Ensuring the safety aspects of ship operations in accordance with applicable standards and regulations.	Beberapa indikator yang dipergunakan antara lain Validitas PSA, hasil inspeksi FERRAT, pelaksanaan <i>drill</i> , dan <i>deployment</i> personel MTSI. Several indicators used include PSA validity, FERRAT inspection results, drill implementation, and MTSI personnel deployment.

Secara umum, realisasi dari kinerja HSSE sebagaimana yang telah dievaluasi pada akhir tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- Health : 105,7% dari target 100% base on KPI
- Safety & Environment : 104,5% dari target 100% base on KPI
- Security : 104,9% dari target 100% base on KPI

Secara keseluruhan pencapaian rerata realisasi Program Kerja HSSE pada tahun 2024 adalah 105,40% Base on KPI VP HSSE. Terdapat beberapa program yang masih mengalami kendala, diantaranya Digitalisasi HSSE Passport, dan Pemutakhiran HIRADC. Terdapat beberapa fokus pekerjaan yang harus dilakukan tahun berikutnya sehubungan dengan maraknya beberapa insiden yang terjadi di

In general, the realization of HSSE performance as evaluated at the end of 2024 is as follows:

- Health: 105.7% of target 100% based on KPIs
- Safety & Environment: 104.5% of target 100% based on KPIs
- Security: 104.9% of target 100% based on KPIs

Overall, the average achievement of HSSE Work Program realization in 2024 was 105.40% based on VP HSSE KPI. Several programs are still experiencing obstacles, including HSSE Passport Digitalization and HIRADC Updating. Several focuses of work must be carried out in the following year in connection with the rampant incidents that occurred at Pertamina, including Increasing HSSE Culture, Health Program/Smart,

Pertamina diantaranya Peningkatan Budaya HSSE, Health Program/Cerdik, Implementasi Program Fraud & Bunker, People Centered Safety Program, Peningkatan Peran MTSL. Hal ini menjadikan fokus pencapaian program HSSE lebih ditekankan pada program utama dan *leading indicators*.

Implementation of Fraud & Bunker Program, People-Centered Safety Program, and Increasing the Role of MTSL. This makes the focus of HSSE program achievement more emphasized on the main program and leading indicators.

HSE Meeting

HSE *meeting* merupakan pertemuan dalam lingkup manajemen yang membahas temuan dan/atau kinerja HSE. HSE *meeting* dilaksanakan 1 (satu) bulan sekali dengan unit usaha di lingkungan PTK. HSE *meeting* bertujuan untuk *knowledge update* terkait perkembangan pengelolaan HSE di PTK.

HSE meetings are meetings within the scope of management that discuss HSE findings and/or performance. HSE meetings are held once a month with business units within PTK. The HSE meeting aims to update knowledge related to the development of HSE management in PTK.

Kecelakaan Kerja Occupational Accidents

Komitmen terhadap keselamatan kerja menjadi indikator utama dalam pelaksanaan kegiatan HSE di PTK. Pengelolaan K3 yang baik dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja serta penyakit kerja. Bukti komitmen PTK terhadap keselamatan kerja ditunjukkan dengan angka NOA (NIHIL) dari target NOA (NIHIL).

Commitment to occupational safety is a key indicator in the implementation of HSE activities at PTK. Good HSE management can minimize the occurrence of occupational accidents and diseases. Evidence of PTK's commitment to occupational safety is shown by the NOA (NIL) number from the NOA (NIL) target.

Kinerja Sosial – Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat

Social Performance – Community Development And Empowerment

Komitmen dan Kebijakan Dalam Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat

Commitment and Policy in Community Development and Empowerment

PTK berkomitmen untuk secara berkelanjutan mengembangkan dan memberdayakan masyarakat melalui kebijakan pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR). Kebijakan CSR ini dirancang untuk memastikan bahwa perusahaan tidak hanya fokus pada aspek finansial dan operasional, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. PTK menyadari bahwa keberlanjutan perusahaan sangat dipengaruhi oleh hubungan yang harmonis dengan masyarakat, serta kontribusi yang diberikan untuk memperbaiki kualitas hidup dan kesejahteraan sosial.

PTK is committed to sustainably developing and empowering communities through its Corporate Social Responsibility (CSR) implementation policy. This CSR policy is designed to ensure that the Company not only focuses on financial and operational aspects, but also provides a positive impact on the community and the environment. PTK realizes that the sustainability of the Company is greatly influenced by harmonious relationships with the community, as well as contributions made to enhance the quality of life and social welfare. In the implementation of its activities, the TJSL program is carried out by the CSR manager under the



Dalam pelaksanaan kegiatannya, program TJSL dilakukan oleh pengelola CSR di bawah koordinasi Fungsi *Legal & Relation* dan dievaluasi oleh Direktur Utama.

Lebih lanjut, berbagai program yang dijalankan PTK selaras dengan komitmen pembangunan berkelanjutan, baik itu di bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, infrastruktur, lingkungan, sosial dan budaya.

coordination of the Legal & Relations Function and evaluated by the President Director.

Furthermore, the various programs run by PTK are in line with the commitment to sustainable development, whether in the fields of education, economy, health, infrastructure, environment, social, and culture.

Inisiatif Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2024

Community Development and Empowerment Program Initiatives in 2024

Sepanjang tahun 2024, realisasi penyaluran dana yang dikeluarkan PTK untuk membiayai program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat mencapai Rp2,07 miliar. Realisasi kegiatan yang dilaksanakan meliputi bidang pendidikan, sosial, kerohanian, kesehatan, olah raga, bencana alam dan lingkungan hidup.

Berikut ini ringkasan program unggulan CSR yang telah dilaksanakan PTK sepanjang tahun 2024.

1. Program Penyediaan Sarana Air Bersih (PENA AIR BERSIH)

Program Penyediaan Sarana Air Bersih (PENA AIR BERSIH) merupakan wujud penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT Pertamina Trans Kontinental yang berfokus dalam mendukung penerapan prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG). Program Penyediaan Sarana Air Bersih (PENA AIR BERSIH) menjadi salah satu implementasi ESG yang dilakukan oleh PT Pertamina Trans Kontinental dengan melakukan pembangunan sebuah sistem pengelolaan air yang berbasis masyarakat secara berkelanjutan. Program ini dilatar belakangi oleh terjadinya krisis akan air bersih yang dialami oleh masyarakat Dusun Klotong, Desa Bura Bekor, Kecamatan Bola, Kabupaten Sikka. Jika masyarakat ingin mengonsumsi atau menggunakan air bersih mereka harus membeli air atau mengambil air di sumber mata air yang berjarak 8 km dari Dusun Klotong. Selain itu, kondisi ini juga diperkuat oleh data akses terhadap sanitasi layak di NTT pada tahun 2022 masih rendah atau dibawah rata-rata nasional yakni sebesar 80,9%. Program ini juga selaras dengan Peraturan Bupati Sikka Nomor 20 Tahun

Throughout 2024, the realization of funds disbursed by PTK to finance community development and empowerment programs reached Rp2,07 billion. The realization of activities carried out covers the education, social, spiritual, health, sports, natural disaster, and environmental sectors.

The following is a summary of the CSR flagship programs that have been implemented by PTK throughout 2024.

1. Clean Water Facilities Provision Program (PENA AIR BERSIH)

The Clean Water Facilities Provision Program (PENA AIR BERSIH) is a form of implementation of PT Pertamina Trans Kontinental's Social and Environmental Responsibility (TJSL), which focuses on supporting the implementation of Environmental, Social, and Governance (ESG) principles. The Clean Water Facilities Provision Program (PENA AIR BERSIH) is one of the ESG implementations carried out by PT Pertamina Trans Kontinental by building a sustainable community-based water management system. This program is motivated by the clean water crisis experienced by the people of Klotong Sub-village, Bura Bekor Village, Bola District, Sikka Regency. If the community wants to consume or use clean water, they must buy water or collect water from a spring 8 km away from Klotong Sub-village. In addition, this condition is also reinforced by data on access to proper sanitation in NTT in 2022, which is still low or below the national average of 80.9%. This program is also in line with Sikka Regent Regulation Number 20 of 2021 concerning the master plan for a clean water supply system in Sikka Regency. Therefore, the Clean

2021 tentang rencana induk sistem penyediaan air bersih di Kabupaten Sikka. Oleh karena itu, Program Penyediaan Sarana Air Bersih (PENA AIR BERSIH) akan memberikan kontribusi peningkatan kualitas dan kuantitas air bersih sebagai inisiatif TJSL PT Pertamina Trans Kontinental juga menjadi bagian dari BerSEnergi untuk laut yang berkomitmen dalam keberlanjutan lingkungan, melalui pembangunan instalasi air bersih.

Program Penyediaan Sarana Air Bersih (PENA AIR BERSIH) memiliki tujuan:

- Menyediakan akses air bersih yang layak dan terjangkau
- Meningkatkan kualitas sanitasi air
- Menyediakan lapangan pekerjaan

2. Program Coastal Clean UP

Pemerintah Indonesia melalui Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Plastik (TKN PSL) meluncurkan kampanye *Redefining Solutions on Plastic Pollution Towards Integrated Policy and Knowledge* (RESIK). TKN PSL menyatakan bahwa target Indonesia penurunan jumlah sampah di Indonesia tahun 2025 sebanyak 70% melalui penanganan sampah laut dan darat, perubahan pola pikir, dan penguatan pendanaan pengembangan riset. Penyelesaian masalah sampah tersebut tidak hanya menjadi tugas pemerintah melalui Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Plastik (TKN PSL) saja, namun menjadi tanggung jawab bersama untuk peduli terhadap keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, PT Pertamina Trans Kontinental melalui Program *Coastal Clean Up* juga ikut berkontribusi pada upaya penanganan sampah yang berada di kawasan pantai Trisik, Kulon Progo. Program tersebut menjadi sebuah upaya untuk mengatasi masalah polusi sampah operasional bisnis PT Pertamina Transkontinental. Program ini merupakan bukti nyata dari komitmen PT Pertamina Trans Kontinental dalam menjaga kelestarian lingkungan dengan pendekatan yang berkelanjutan. Penanganan sampah plastik merupakan bagian penting dari strategi untuk mengurangi emisi karbon yang berasal dari sampah plastik. Oleh karena itu, melalui program ini, PT Pertamina Trans Kontinental menerapkan prinsip-prinsip *Environment, Social, Governance* (ESG) sebagai langkah konkret untuk mengurangi emisi karbon dan menjaga ekosistem laut melalui pendekatan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Program *Coastal Clean Up* memiliki tujuan:

- Meningkatkan kesadaran tentang masalah limbah dan mendorong tindakan yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan limbah

Water Facilities Provision Program (PENA AIR BERSIH) will contribute to improving the quality and quantity of clean water as a TJSL initiative of PT Pertamina Trans Kontinental as well as being part of Energize for the ocean, which is committed to environmental sustainability, through the construction of clean water installations.

The Clean Water Facilities Provision Program (PENA AIR BERSIH) has the following objectives:

- Providing access to decent and affordable clean water
- Improving the quality of water sanitation
- Providing employment opportunities

2. Coastal Clean UP Program

The Indonesian government, through the National Coordination Team for Plastic Waste Management (TKN PSL), launched the *Redefining Solutions on Plastic Pollution Towards Integrated Policy and Knowledge* (RESIK) campaign. The TKN PSL stated that Indonesia's target is to reduce the amount of waste in Indonesia by 70% by 2025 through handling marine and land waste, changing mindsets, and strengthening research development funding. The resolution of the waste problem is not only the task of the government through the National Coordination Team for Plastic Waste Handling (TKN PSL), but is a shared responsibility to care about environmental sustainability. Therefore, PT Pertamina Trans Kontinental, through the Coastal Clean Up Program, also contributes to the efforts to handle waste in the Trisik beach area, Kulon Progo. The program is an effort to overcome the problem of waste pollution from PT Pertamina Transcontinental's business operations. This program is clear evidence of PT Pertamina Transcontinental's commitment to preserving the environment with a sustainable approach. Handling plastic waste is a crucial part of the strategy to reduce carbon emissions from plastic waste. Therefore, through this program, PT Pertamina Trans Kontinental applies the principles of Environment, Social, and Governance (ESG) as a concrete step to reduce carbon emissions and maintain marine ecosystems through a Corporate Social Responsibility (CSR) approach.

The Coastal Clean-Up program has the following objectives:

- Raising awareness about waste issues and encouraging responsible action towards waste management



- Mengurangi polusi sampah plastik di lingkungan perairan (pesisir)
- Meningkatkan partisipasi multistakeholder dalam penanganan polusi sampah plastik
- Mengelola sampah plastik dengan prinsip keberlanjutan melalui sirkuler ekonomi
- Menjaga kelestarian lingkungan laut

3. Program Nusantara Competition

Salah satu upaya untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat dilakukan oleh PT Pertamina Trans Kontinental berupa Program Nusantara *Competition*. Program Nusantara Competition merupakan inisiatif program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang berfokus dalam kegiatan kompetisi bagi mahasiswa untuk dapat memberikan alternatif penyelesaian terhadap berbagai isu permasalahan nelayan yang ada di Indonesia. Nusantara merupakan singkatan dari “Nelayan unggul dengan Semangat Mahasiswa Berdaya”. Program ini dilaksanakan secara berkelompok (tim) dengan cakupan peserta se-Indonesia melalui berbagai tahapan seleksi dan pembekalan bagi peserta sehingga dapat mengembangkan ide untuk kebermanfaatan yang berkelanjutan. Pelaksanaan Program Nusantara *Competition* tidak hanya menjadi katalisator bagi mahasiswa untuk dapat berinovasi, namun juga menjadi jembatan bagi PT Pertamina Trans Kontinental untuk mendapatkan inisiasi program pemberdayaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Program Nusantara *Competition* diarahkan untuk dapat berkontribusi dalam capaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau pembangunan berkelanjutan berupa: Tujuan Pembangunan Pendidikan Bermutu. Artinya, mahasiswa diharapkan mampu memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk meningkatkan pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya, Tujuan Pembangunan Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi. Melalui Program Nusantara *Competition* diharapkan mampu menciptakan inovasi teknologi yang dapat menyelesaikan permasalahan nelayan, sehingga terjadi peningkatan produktivitas dan PDB per kapita. Tujuan Pembangunan Menjaga Ekosistem Laut. Program Nusantara *Competition* diharapkan mampu memberikan sumbangsih berupa ide atau inovasi yang bisa diterapkan untuk menciptakan keberlanjutan

- Reducing plastic waste pollution in the coastal environment
- Increasing multi-stakeholder participation in handling plastic waste pollution
- Managing plastic waste with sustainability principles through circular economy
- Preserving the marine environment

3. Nusantara Competition Program

One of the efforts to increase community empowerment is carried out by PT Pertamina Trans Kontinental in the form of the Nusantara Competition Program. The Nusantara Competition Program is a Social and Environmental Responsibility (TJSL) program initiative focusing on competition activities for students to be able to provide alternative solutions to various issues of fishermen's problems in Indonesia. Nusantara stands for 'Superior Fishermen with Empowered Student Spirit'. This program is carried out in groups (teams) with coverage of participants throughout Indonesia through various stages of selection and debriefing for participants so that they can develop ideas for sustainable benefits. The implementation of the Nusantara Competition Program is not only a catalyst for students to be able to innovate, but also a bridge for PT Pertamina Trans Kontinental to gain the initiation of empowerment programs that are in accordance with the needs of the community.

The Nusantara Competition program is directed to contribute to the achievement of Sustainable Development Goals (SDGs) in the form of: The Development Goal of Quality Education. It means that students are expected to be able to acquire the knowledge and skills needed to improve sustainable development. Next, the Development Goal of Decent Work and Economic Growth. Through the Nusantara Competition Program, students are expected to be able to create technological innovations that can solve the problems of fishermen, resulting in increased productivity and GDP per capita. The Development Goal of Maintaining Marine Ecosystems. The Nusantara Competition Program is expected to be able to contribute in the form of ideas or innovations that can be applied to create sustainability of marine resources, including

sumber daya laut, termasuk melalui inovasi pengelolaan perikanan, budidaya, dan pariwisata yang berkelanjutan.

Program Nusantara *Competition* memiliki tujuan:

- Menciptakan inovasi untuk membantu memberikan alternatif solusi bagi permasalahan nelayan
- Memberikan ruang bagi mahasiswa dalam menciptakan berbagai ide inovasi sektor kelautan dan perikanan.
- Sebagai bentuk komitmen perusahaan dalam membantu pemberdayaan masyarakat di lingkungan operasional perusahaan.
- *Output* dari Program ini sebagai rekomendasi program prioritas TJSL PT Pertamina Trans Kontinental 2025.

4. Program Desa Energi Berdikari

Program Desa Energi Berdikari merupakan bagian integral dari program CSR PT Pertamina Trans Kontinental, yang termasuk dalam kluster Pertamina TRANSCO CARE. Program ini berfungsi sebagai ruang edukasi dan inovasi, bertujuan untuk menciptakan nilai ekonomis dari sumber daya perikanan melalui berbagai aktivitas pemberdayaan masyarakat yang berlandaskan pada prinsip kepedulian lingkungan. Sebagai tindak lanjut dari pilar *Environmental, Social, and Governance* (ESG) yang berfokus pada *Energy Transition and Low Carbon Solution*, program ini mencerminkan komitmen PT Pertamina Trans Kontinental untuk menghadirkan solusi berkelanjutan bagi masyarakat. Melalui pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebagai pendukung utama, program Desa Energi Berdikari tidak hanya mendukung pengembangan desa wisata, tetapi juga meningkatkan efisiensi dalam budidaya ikan sistem bioflok dan budidaya maggot. Inisiatif ini diharapkan dapat menjadi model bagi pengembangan ekonomi lokal yang berkelanjutan, sekaligus mempromosikan kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan. Dengan demikian, program ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomis, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan sosial dan keberlanjutan ekosistem di Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat.

Program Desa Energi Berdikari memiliki tujuan berikut:

- Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang potensi desa wisata dan budidaya ikan sistem bioflok;

through innovations in sustainable fisheries, aquaculture, and tourism management.

The Nusantara Competition program has the following objectives:

- Creating innovations to help provide alternative solutions to fishermen's problems
- Providing space for students to create various innovation ideas in the marine and fisheries sector.
- As a form of company commitment to helping empower communities in the Company's operational environment.
- The output of this program is a recommendation for PT Pertamina Trans Kontinental's TJSL 2025 priority program.

4. Self-sufficient Energy Village Program

The Self-Sufficient Energy Village Program is an integral part of PT Pertamina Trans Kontinental's CSR program, which is included in the Pertamina TRANSCO CARE cluster. This program serves as a space for education and innovation, aiming to create economic value from fishery resources through various community empowerment activities based on the principle of environmental care. As a follow-up to the Environmental, Social, and Governance (ESG) pillar, which focuses on Energy Transition and Low Carbon Solutions, this program reflects PT Pertamina Trans Kontinental's commitment to providing sustainable solutions for the community. Through the utilization of Solar Power Plants (SPP) as the main support, the Self-Sufficient Energy Village program not only supports the development of tourism villages, but also increases efficiency in biofloc fish farming and maggot cultivation. This initiative is expected to become a model for sustainable local economic development while promoting awareness of the importance of environmental conservation. Thus, the program not only provides economic benefits, but also contributes to social welfare and ecosystem sustainability in Kariangau Sub-district, West Balikpapan District.

The Self-sufficient Energy Village Program has the following objectives:

- Increasing public awareness and knowledge about the potential of tourism villages and biofloc fish farming systems;



- Menciptakan alternatif lapangan kerja baru melalui desa wisata dan budidaya ikan sistem bioflok;
- Mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan dan produktif oleh kelompok binaan melalui budidaya maggot BSF

- Creating new alternative employment opportunities through tourism villages and biofloc fish farming systems;
- Managing natural resources sustainably and productively by assisted groups through the BSF maggot cultivation.

5. Green Mangrove Action Program

Green Mangrove Action Program merupakan wujud penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT Pertamina Trans Kontinental yang berfokus dalam mendukung penerapan prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG). Badan Restorasi Mangrove dan Gambut (BRMG) pada tahun 2022, menyatakan bahwa seluas 700.000 hektar lahan mangrove mengalami deforestasi atau kerusakan. Implementasi *Green Mangrove Action Program* ini diharapkan mampu berkontribusi dalam upaya merehabilitasi kawasan mangrove agar tidak hanya berdampak positif pada aspek lingkungan, namun pada aspek ekonomi dan sosial secara berkelanjutan. *Green Mangrove Action Program* juga diarahkan untuk dapat berkontribusi terhadap SDGs pada pilar lingkungan terkait penanganan perubahan iklim. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan *Copernicus Climate Change Service* (C3S), pada 2023 suhu global meningkat 1,48 C. Salah satu solusi menangani krisis iklim dengan menyerap emisi karbon melalui mangrove. Indonesia memiliki hutan mangrove terluas di dunia dengan persentase 20,37% dan luas ini bertambah dari tahun 2021 ke tahun 2022. Akan tetapi, Pulau Bali yang terkenal dengan wisata pantainya hanya menyumbang 5,25% dari total ekosistem mangrove di Indonesia dibandingkan pulau lainnya. Oleh karena itu, *Green Mangrove Action Program* akan memberikan kontribusi penambahan mangrove dan peningkatan kesadaran dalam pembibitan mangrove. *Green Mangrove Action Program* sebagai inisiatif TJSL PT Pertamina Trans Kontinental juga menjadi bagian dari BerSEnergi untuk laut yang berkomitmen dalam keberlanjutan lingkungan, melalui konservasi mangrove sebagai tumbuhan yang mampu menyerap semua jenis logam berbahaya dan membuat kualitas air dan udara menjadi lebih bersih.

Green Mangrove Action Program memiliki tujuan:

- Meningkatkan gerakan tanam mangrove sebagai bentuk perlindungan dari abrasi
- Mengedukasi perawatan mangrove sebagai kawasan konservasi

5. Green Mangrove Action Program

The Green Mangrove Action Program is a form of PT Pertamina Trans Kontinental's Social and Environmental Responsibility (TJSL) implementation that focuses on supporting the implementation of Environmental, Social, and Governance (ESG) principles. The Mangrove and Peat Restoration Agency (BRMG) stated that an area of 700,000 hectares of mangrove land was deforested or damaged in 2022. The implementation of the Green Mangrove Action Program is expected to contribute to efforts to rehabilitate mangrove areas so that they not only positively impact environmental aspects, but also economic and social aspects sustainably. The Green Mangrove Action Program is also directed to be able to contribute to the SDGs on the environmental pillar related to handling climate change. It is in accordance with the statement of the Copernicus Climate Change Service (C3S) that in 2023, the global temperature increased by 1.48 C. One solution to dealing with the climate crisis is to absorb carbon emissions through mangroves. Indonesia has the largest mangrove forest in the world, with a percentage of 20.37%, and this area increases from 2021 to 2022. However, the island of Bali, which is famous for its beach tourism, only contributes 5.25% of the total mangrove ecosystem in Indonesia compared to other islands. Therefore, the Green Mangrove Action Program will contribute to mangrove addition and awareness raising in mangrove seedlings. Green Mangrove Action Program as PT Pertamina Trans Kontinental's TJSL initiative is also part of Energize for the ocean, which is committed to environmental sustainability through mangrove conservation as a plant that can absorb all types of harmful metals and making water and air quality cleaner.

The Green Mangrove Action Program has the following objectives:

- Increasing mangrove planting movement as a form of protection from abrasion
- Educating mangrove care as a conservation area

- Meningkatkan peran serta komunitas binaan dalam menjaga pesisir
- Mendukung pengurangan Gas Rumah Kaca (GRK)

- Increasing the participation of the assisted community in protecting the coastal area
- Supporting Greenhouse Gas (GHG) reduction

6. Program Si Nore (Inkubasi Ekonomi Bahari)

Program Si Nore (Inkubasi Ekonomi Bahari) merupakan wujud penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT Pertamina Trans Kontinental yang berfokus dalam mendukung penerapan prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG). Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2023, para umkm memiliki kontribusi sebesar 60,5% terhadap PDB. Dengan pendampingan dan intervensi komprehensif, diharapkan UMKM dapat berkembang menjadi yang lebih baik, meningkatkan kapasitas dan kinerjanya untuk menghaadpi perubahan kondisi ekonomi. Implementasi Program Si Nore (Inkubasi Ekonomi Bahari) ini diharapkan mampu berkontribusi dalam upaya peningkatan perekonomian masyarakat agar tidak hanya berdampak positif pada aspek ekonomi, namun pada aspek lingkungan dan sosial secara berkelanjutan. Program Si Nore (Inkubasi Ekonomi Bahari) juga diarahkan untuk dapat berkontribusi terhadap SDGs pada pilar ekonomi, sosial, dan lingkungan. Hal tersebut sesuai dengan data UMKM dan kontribusinya terhadap perekonomian negara. Oleh karena itu, Program Si Nore (Inkubasi Ekonomi Bahari) akan memberikan kontribusi peningkatan kapasitas dalam pengolahan produk UMKM dan peningkatan kesadaran dalam keberlanjutan usaha. Program Si Nore (Inkubasi Ekonomi Bahari) sebagai inisiatif TJSL PT Pertamina Trans Kontinental juga menjadi bagian dari Sinergi Ekonomi Bahari yang berkomitmen dalam keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Program Si Nore (Inkubasi Ekonomi Bahari) memiliki tujuan:

- Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kelompok binaan dalam bidang kewirausahaan
- Optimalisasi sumber daya lokal dalam upaya menciptakan nilai tambah ekonomi bagi kelompok binaan
- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor ekonomi kreatif

6. Si Nore (Maritime Economic Incubation) Program

The Si Nore (Maritime Economic Incubation) program is a form of PT Pertamina Trans Kontinental's implementation of Social and Environmental Responsibility (TJSL), which focuses on supporting the implementation of Environmental, Social, and Governance (ESG) principles. Based on data from the Ministry of Cooperatives and SMEs, MSMEs contributed 60.5% to GDP in 2023. With comprehensive assistance and intervention, it is expected that MSMEs can develop for the better, increasing their capacity and performance to deal with changing economic conditions. The implementation of the Si Nore (Maritime Economic Incubation) Program is expected to contribute to efforts to improve the community's economy so that it not only has a positive impact on economic aspects, but also on environmental and social aspects sustainably. The Si Nore (Maritime Economic Incubation) Program is also directed to contribute to the SDGs on the economic, social, and environmental pillars. It is in accordance with MSME data and their contribution to the country's economy. Therefore, the Si Nore (Maritime Economic Incubation) Program will contribute to increasing capacity in processing MSME products and increasing awareness of business sustainability. The Si Nore (Maritime Economic Incubation) Program, as a TJSL initiative of PT Pertamina Trans Kontinental, is also part of the Maritime Economic Synergy, which is committed to economic, social, and environmental sustainability.

The Si Nore (Maritime Economic Incubation) program has the following objectives:

- Improving the knowledge and skills of the fostered groups in the field of entrepreneurship
- Optimizing local resources in an effort to create economic added value for the fostered groups
- Improving community welfare through the creative economy sector



Penanganan Pengaduan Masyarakat

Handling Public Complaints

PTK memberikan perhatian besar terhadap pentingnya etika, integritas, dan kepatuhan terhadap peraturan dalam setiap kegiatan operasionalnya. Oleh karena itu PTK menyediakan sarana bagi para pemangku kepentingan untuk melaporkan atau menyampaikan pengaduan atas hal-hal yang bertentangan dengan etika, integritas, norma-norma dan dugaan pelanggaran peraturan atau tindakan yang mengganggu keamanan sosial, lingkungan hidup, dan lainnya di lingkungan wilayah operasional PTK. Mekanisme pengaduan masyarakat dapat dilakukan melalui mekanisme pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) maupun penyampaian pengaduan melalui email atau kontak center yang disediakan di website PTK. PTK percaya bahwa dengan adanya saluran yang jelas dan mudah diakses, perusahaan dapat menjaga reputasi dan kepercayaan para pemangku kepentingan, serta beroperasi secara bertanggung jawab.

Hingga akhir tahun 2024, PTK mencatat tidak terdapat pengaduan dari masyarakat terkait aktivitas operasional Perusahaan yang diterima dan perlu ditindaklanjuti.

PTK pays great attention to the importance of ethics, integrity, and compliance with regulations in every operational activity. Therefore, PTK provides a means for stakeholders to report or submit complaints on matters contrary to ethics, integrity, norms, and alleged violations of regulations or actions that interfere with social, environmental, and other security in the PTK operational area. The public complaint mechanism can be carried out through a whistleblowing system or the submission of complaints via email or the contact center provided on the PTK website. PTK believes that with clear and accessible channels, the Company can maintain the reputation and trust of stakeholders and operate responsibly.

Until the end of 2024, PTK recorded no complaints from the public related to the Company's operational activities received and needed to be followed up.

Kinerja Sosial – Pelanggan

Social Performance –Customers

Komitmen dan Kebijakan Dalam Pengembangan Produk dan Layanan

Commitment and Policy in Product and Service Development

Untuk memastikan terpenuhinya kualitas layanan kepada pelanggan, PTK telah menetapkan kebijakan yang jelas dan terstruktur, yang tertuang dalam Perilaku Perusahaan (*Code of Conduct*). Kebijakan ini berfungsi sebagai pedoman bagi seluruh karyawan dan manajemen dalam menjalankan tugasnya, serta untuk menjaga standar tinggi dalam setiap interaksi dengan pelanggan, pemangku kepentingan, dan pihak terkait lainnya. PTK juga menyediakan informasi yang lengkap terkait produk dan layanan yang dipasarkannya. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pelanggan mendapatkan informasi yang jelas, akurat, dan transparan

To ensure the fulfillment of quality service to customers, PTK has established a clear and structured policy, which is contained in the Company's Code of Conduct. This policy serves as a guideline for all employees and management in carrying out their duties, as well as to maintain high standards in every interaction with customers, stakeholders, and other related parties. PTK also provides complete information regarding the products and services it markets. It ensures that customers get clear, accurate, and transparent information about the products or services they choose. Customers can easily obtain information related

mengenai produk atau layanan yang mereka pilih. Pelanggan dapat dengan mudah memperoleh informasi terkait produk yang dipasarkan Perusahaan melalui *website* Perusahaan yang beralamat di <https://www.pertamina-ptk.com/>.

to the products marketed by the Company through the Company's website at <https://www.pertamina-ptk.com/>.

Kesetaraan Pemenuhan Kualitas Layanan kepada Pelanggan

Equality of Fulfillment of Service Quality to Customers

PTK berfokus menyediakan produk dan layanan yang dapat diandalkan dengan kualitas dan spesifikasi yang tepat kepada para pelanggan. PTK senantiasa menjamin kualitas produk dan layanan sesuai standar mutu dan sertifikasi yang diterapkan secara setara dan adil kepada seluruh pelanggan.

PTK focuses on providing customers with reliable products and services with the right quality and specifications. PTK continuously guarantees the quality of products and services in accordance with quality standards and certifications applied equally and fairly to all customers.

Peningkatan Layanan Pelanggan

Customer Service Improvement

PTK komitmen untuk terus meningkatkan standar mutu dan layanan sebagai bentuk tanggung jawab sosial Perusahaan terhadap Pelanggan. Adapun langkah-langkah yang dilakukan Perusahaan dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada Pelanggan yaitu:

1. Memberikan kemudahan layanan bagi Pelanggan untuk memperoleh informasi terkait produk, layanan, dan operasional bisnis Perusahaan di *call center*, *website*, dan media sosial Perusahaan;
2. Melakukan survei kepuasan Pelanggan;
3. Menangani keluhan serta pendapat Pelanggan untuk terus menyempurnakan proses dan kualitas pelayanan;
4. Melakukan inovasi berupa pengembangan produk dan layanan Perusahaan.

Melalui pelaksanaan program-program tersebut diharapkan kepuasan pelanggan dapat terus meningkat sehingga mendorong pencapaian kinerja operasional dan keuangan Perusahaan.

PTK is committed to continuously improving quality and service standards as a form of corporate social responsibility towards Customers. The steps taken by the Company in an effort to enhance services to customers are:

1. Providing convenience services for Customers to obtain information related to the Company's products, services, and business operations in the Company's call center, website, and social media;
2. Conducting customer satisfaction surveys;
3. Handling customer complaints and opinions to continuously improve the process and quality of service;
4. Innovating in the form of the Company's product and service development.

Through implementing these programs, it is expected that customer satisfaction can continue to increase, thus encouraging the achievement of the Company's operational and financial performance.



Inovasi Pengembangan Produk dan Layanan Perusahaan

Innovation in Company's Product and Service Development

PTK selalu mencari peluang inovasi dalam setiap aspek operasional, mulai dari proses produksi, fitur produk, hingga solusi layanan. Inovasi tidak hanya dilakukan dalam hal penciptaan produk baru, tetapi juga dalam peningkatan produk yang sudah ada untuk memastikan bahwa produk tersebut tetap relevan dan sesuai dengan kebutuhan pasar. PTK juga melakukan riset dan pengembangan (R&D) yang intensif untuk memanfaatkan teknologi terbaru dan menciptakan produk yang lebih efisien serta ramah lingkungan. Adapun inovasi dan upaya pengembangan produk dan layanan yang dilakukan PTK meliputi:

1. Pelaksanaan asesmen Green dan Smart Port pada PTK Shorebase Kabil Batam sesuai Green Smart Port Guidelines V3.0/2023 dan berhasil memiliki kategori bintang 3.

PTK is always looking for innovation opportunities in every aspect of its operations, from production processes to product features and service solutions. Innovation is not only conducted in terms of new product creation but also in the improvement of existing products to ensure that they remain relevant and in line with market needs. PTK also conducts intensive research and development (R&D) to utilize the latest technology and create more efficient and environmentally friendly products. PTK's innovation and product and service development efforts include:

1. Implementation of Green and Smart Port assessment at PTK Shorebase Kabil Batam in accordance with the Guidelines for Green Smart Port V3.0/2023 and succeeded in obtaining a 3-star category.

Survei Kepuasan Pelanggan

Customer Satisfaction Survey

Pada tahun 2024 telah dilaksanakan survei kepuasan pelanggan oleh Pihak Independen. Dari Hasil survey tersebut menunjukkan Indeks Kepuasan Pelanggan PTK pada sebesar 4.0. Skor tersebut mengindikasikan bahwa pelanggan puas dengan pelayanan yang diberikan oleh Perusahaan.

In 2024, a customer satisfaction survey was conducted by an Independent Party. The survey results showed PTK's Customer Satisfaction Index at 4.0. This score indicates that customers are satisfied with the Company's services.

Layanan Pengaduan Pelanggan

Customer Complaint Service

Perusahaan berkomitmen untuk terus memperbaiki nilai jual kepada customer melalui tanggung jawab sosial perusahaan kepada pelanggan. Dalam pelaksanaannya di PTK, Unit yang bertanggung jawab terhadap keluhan pelanggan berada di Unit Customer Care. Pengaduan dapat disampaikan pelanggan melalui berbagai media berupa surat, telepon, email, wa, sms dan/atau dengan mengunjungi website Perusahaan di alamat ://www.pertamina-ptk.com/.

Upaya penyelesaian terhadap setiap keluhan pelanggan diatur dengan jelas melalui kebijakan penanganan keluhan yang diterbitkan oleh PTK, yang mengacu pada ISO 9001:2015, standar internasional untuk sistem manajemen mutu.

The Company is committed to continuously improving its value to customers through corporate social responsibility. In its implementation at PTK, the unit responsible for customer complaints is the Customer Care Unit. Complaints can be submitted by customers through various media such as mail, telephone, email, WA, SMS, and/or by visiting the Company's website at www.pertamina-ptk.com/.

Efforts to resolve customer complaints are regulated through a complaint handling policy issued by PTK, which refers to ISO 9001: 2015, an international standard for quality management systems.

Realisasi Anggaran Peningkatan Kualitas Layanan Pelanggan

Realization of Budget for Customer Service Quality Improvement

Realisasi anggaran peningkatan kualitas layanan pelanggan telah digunakan PTK untuk mengelola dan meningkatkan hubungan dengan pelanggan melalui program Marketing Assessment guna meningkatkan kompetensi *product knowledge*, *communication skill*, dan *sales skill* para Pekerja Perusahaan khususnya di Direktorat Pemasaran.

The realization of the budget for improving the quality of customer service has been used by PTK to manage and improve relationships with customers through the Marketing Assessment program to improve the competence of product knowledge, communication skills, and sales skills of Company Employees, especially in the Marketing Directorate.



08



PERTAMINA
TRANS KONTINENTAL

Laporan Keuangan Audit

Audited Financial Statements

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES***

**LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/
*CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS***

**31 DESEMBER 2024/
*31 DECEMBER 2024***

PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PADA
TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024**

**BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT
REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR
THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AS AT AND FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024**

Atas nama Direksi, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

On behalf of the Board of Directors, we, the undersigned:

1. Nama : I Ketut Laba
Alamat : Jl. Yos Sudarso Kav 32-34
Tanjung Priok
Jakarta Utara 14320
Telepon : 021-80678500
Jabatan : Direktur Utama

1. Name : I Ketut Laba
Address: Jl. Yos Sudarso Kav 32-34
Tanjung Priok
Jakarta Utara 14320
Phone : 021-80678500
Position : President Director

2. Nama : Afan Aftory
Alamat : Jl. Yos Sudarso Kav 32-34
Tanjung Priok
Jakarta Utara 14320
Telepon : 021-80678500
Jabatan : Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia

2. Name : Afan Aftory
Address: Jl. Yos Sudarso Kav 32-34
Tanjung Priok
Jakarta Utara 14320
Phone : 021-80678500
Position : Director of Finance and Human Resources

menyatakan bahwa:

declare that:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Pertamina Trans Kontinental dan entitas anak ("Grup");
2. Laporan keuangan konsolidasian Grup telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian Grup telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan konsolidasian Grup tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; dan
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Grup.

1. We are responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements of PT Pertamina Trans Kontinental and its subsidiaries (the "Group");
2. The Group's consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;
3. a. All information has been fully and correctly disclosed in the Group's consolidated financial statements;
b. The Group's consolidated financial statements do not contain any false material information or facts, nor do they omit material information or facts; and
4. We are responsible for the Group's internal control systems.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Thus, this statement is made truthfully.

Atas nama dan mewakili Direksi.

For and on behalf of the Board of Directors.

Jakarta, 25 April 2025




I Ketut Laba
Direktur Utama/President Director


Afan Aftory
Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia/
Director of Finance and Human Resources



**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

**INDEPENDENT AUDITORS' REPORT
TO THE SHAREHOLDERS OF**

PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Pertamina Trans Kontinental dan entitas anaknya ("Grup"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2024, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada laporan kami. Kami independen terhadap Grup berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Opinion

We have audited the consolidated financial statements of PT Pertamina Trans Kontinental and its subsidiaries (the "Group"), which comprise the consolidated statement of financial position as at 31 December 2024, and the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statement of changes in equity and consolidated statement of cash flows for the year then ended, and notes to the consolidated financial statements, including material accounting policy information.

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as at 31 December 2024, and its consolidated financial performance and its consolidated cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditors' Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Group in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the consolidated financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan

WTC 3, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920 – Indonesia

T: +62 (21) 5099 2901 / 3119 2901, F: +62 (21) 5290 5555 / 5290 5050, www.pwc.com/id



Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Grup atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Grup.

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Grup.

In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Group's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Group's financial reporting process.

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgement and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group's internal control.*



- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Grup tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditors' report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.*
- Mengevaluasi penyajian, struktur dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*
- Memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis dalam Grup untuk menyatakan opini atas laporan keuangan konsolidasian. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi dan pelaksanaan audit grup. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.
- *Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the group audit. We remain solely responsible for our audit opinion.*

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

JAKARTA,
25 April 2025

Yusron, S.E., Ak., CPA
Izin Akuntan Publik/Public Accountant License No. AP.0243



Pertamina Trans Kontinental
00667/2.1457/AU.1/06/0243-1/1/IV/2025

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 1/1 Schedule

**LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali nilai nominal dan data saham)

**CONSOLIDATED STATEMENT
OF FINANCIAL POSITION
AS AT 31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah
except for par value and share data)

	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>	
ASET				ASSETS
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	4, 24	1,209,305	1,843,431	Cash and cash equivalents
Kas yang dibatasi penggunaannya		2,710	2,072	Restricted cash
Piutang usaha				Trade receivables
- Pihak ketiga	5	205,098	84,180	Third parties -
- Pihak berelasi	5, 24	1,279,971	878,662	Related parties -
Aset kontrak				Contract assets
- Pihak ketiga	6	267,629	330,175	Third parties -
- Pihak berelasi	6, 24	1,307,211	1,224,849	Related parties -
Piutang sewa pembiayaan		-	22,574	Finance lease receivables
Pajak dibayar dimuka				Prepaid taxes
- Pajak lain-lain	14a	165,052	124,444	Other taxes -
Aset lancar lainnya	7	<u>82,773</u>	<u>157,651</u>	Other current assets
Jumlah aset lancar		<u>4,519,749</u>	<u>4,668,038</u>	Total current assets
ASET TIDAK LANCAR				NON-CURRENT ASSETS
Aset tetap	9	3,753,640	3,652,243	Fixed assets
Aset hak-guna	13a	522,480	485,284	Right-of-use assets
Aset pajak tangguhan	14d	126,051	100,830	Deferred tax assets
Penyertaan saham	24	6,652	6,652	Investment in shares
Investasi pada ventura bersama	8	105,962	98,132	Investment in joint venture
Pajak dibayar dimuka – pajak penghasilan	14a	31,898	4,933	Prepaid taxes – corporate income tax
Aset tidak lancar lainnya	7	<u>14,009</u>	<u>8,687</u>	Other non-current assets
Jumlah aset tidak lancar		<u>4,560,692</u>	<u>4,356,761</u>	Total non-current assets
JUMLAH ASET		<u>9,080,441</u>	<u>9,024,799</u>	TOTAL ASSETS

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 1/2 Schedule

**LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali nilai nominal dan data saham)

**CONSOLIDATED STATEMENT
OF FINANCIAL POSITION
AS AT 31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah
except for par value and share data)

	Catatan/ <i>Notes</i>	2024	2023	
LIABILITAS				LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PENDEK				CURRENT LIABILITIES
Utang usaha				Trade payables
- Pihak ketiga	10	172,733	91,727	Third parties -
- Pihak berelasi	10, 24	1,115,210	935,385	Related parties -
Biaya masih harus dibayar	11	1,580,932	1,483,781	Accrued expenses
Liabilitas kontrak				Contract liabilities
- Pihak ketiga	12	183,727	192,382	Third parties -
- Pihak berelasi	12, 24	20,307	41,153	Related parties -
Utang pajak				Taxes payable
- Pajak penghasilan	14b	42,228	124,999	Corporate income tax -
- Pajak lain-lain	14b	55,588	38,479	Other taxes -
Liabilitas sewa	13b	365,298	335,390	Lease liabilities
Bagian jangka pendek dari pinjaman jangka panjang	15	175,300	305,012	Current portion of long-term borrowings
Bagian jangka pendek dari liabilitas imbalan pasca kerja	16	27,749	-	Current portion of post employment benefits obligation
Jumlah liabilitas jangka pendek		3,739,072	3,548,308	Total current liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG				NON-CURRENT LIABILITIES
Liabilitas sewa	13b	141,905	187,498	Lease liabilities
Pinjaman jangka panjang	15	386,220	426,950	Long-term borrowings
Bagian jangka panjang dari liabilitas imbalan pasca kerja	16	209,379	221,658	Non-current portion of post-employment benefits obligation
Jumlah liabilitas jangka panjang		737,504	836,106	Total non-current liabilities
JUMLAH LIABILITAS		4,476,576	4,384,414	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS				EQUITY
Modal saham - modal ditempatkan dan disetor penuh 1.234.747 lembar saham A dengan nilai nominal Rp1.000.000 dan 819 saham B dengan nilai nominal Rp1.000	17	1,234,748	1,234,748	Share capital - issued and fully paid 1,234,747 shares A at par value of Rp1,000,000 per share and 819 shares B at par values of Rp1,000
Tambahan modal disetor		(76,051)	(76,051)	Additional paid-in capital
Rugi komprehensif lain		(76,031)	(99,560)	Other comprehensive loss
Saldo laba				Retained earnings
- Ditentukan penggunaannya	25	1,092,776	845,826	Appropriated -
- Belum ditentukan penggunaannya		2,427,843	2,734,901	Unappropriated -
		4,603,285	4,639,864	
Kepentingan non-pengendali		580	521	Non-controlling interest
JUMLAH EKUITAS		4,603,865	4,640,385	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		9,080,441	9,024,799	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 2 Schedule

**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah)

**CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah)

	Catatan/ Notes	2024	2023	
Pendapatan usaha	19	7,559,108	6,746,509	Revenue
Beban pokok pendapatan	20	(4,963,954)	(4,153,993)	Cost of revenue
Laba bruto		2,595,154	2,592,516	Gross profit
Beban umum dan administrasi	21	(1,255,901)	(1,161,113)	General and administrative expenses
Pendapatan/(beban) lain-lain, neto	22	3,960	(53,526)	Other income/(expenses), net
Pendapatan keuangan		55,586	46,690	Finance income
Beban keuangan	23	(89,898)	(97,270)	Finance costs
Bagian atas laba bersih ventura bersama	8	32,565	30,925	Share in profit of joint venture
Beban pajak final		(13,551)	(11,894)	Final tax expenses
Laba sebelum pajak penghasilan		1,327,915	1,346,328	Profit before income tax
Beban pajak penghasilan	14c	(252,615)	(294,834)	Income tax expense
Laba tahun berjalan		1,075,300	1,051,494	Profit for the year
Penghasilan komprehensif lain				Other comprehensive income
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi: Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti	16	29,598	(23,375)	Items that will not be reclassified to the profit or loss: Remeasurement of defined benefit obligation
Pos-pos yang akan direklasifikasikan ke laba rugi: Perubahan nilai wajar instrumen ekuitas melalui penghasilan komprehensif lain		-	(10)	Items that will be reclassified to the profit or loss: Changes in the fair value of equity instruments at fair value through other comprehensive income
Pajak penghasilan terkait	14d	(6,068)	4,697	Related income tax
Jumlah penghasilan/(rugi) komprehensif lain		23,530	(18,688)	Total other comprehensive income/(loss)
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan		1,098,830	1,032,806	Total comprehensive income for the year
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:				Profit for the year attributable to:
- Pemilik entitas induk		1,075,242	1,051,369	Owners of the parent entity -
- Kepentingan non-pengendali		58	125	Non-controlling interests -
Laba tahun berjalan		1,075,300	1,051,494	Profit for the year
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:				Total comprehensive income for the year attributable to:
- Pemilik entitas induk		1,098,771	1,032,681	Owners of the parent entity -
- Kepentingan non-pengendali		59	125	Non-controlling interests -
Jumlah penghasilan komprehensif lain		1,098,830	1,032,806	Total other comprehensive income

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

Lampiran 3 Schedule

**CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2024**
(Expressed in millions of Rupiah)

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 4 Schedule

**LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah)

**CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024**
(Expressed in millions of Rupiah)

	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>	
Arus kas dari aktivitas operasi				Cash flows from operating activities
Penerimaan dari pelanggan		6,962,435	6,912,440	Receipts from customers
Pembayaran kepada pemasok		(2,094,911)	(2,893,050)	Payments to suppliers
Pembayaran kepada karyawan		(2,800,847)	(2,140,664)	Payments to employees
Pembayaran beban keuangan		(89,898)	(97,270)	Payments of finance costs
Pembayaran pajak final		(13,551)	(11,894)	Payments of final tax expense
Penerimaan penghasilan keuangan		55,586	46,690	Receipts of finance income
Pembayaran pajak penghasilan badan		(388,151)	(276,658)	Payment of corporate income tax
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi		1,630,663	1,539,594	Net cash generated from operating activities
Arus kas dari aktivitas investasi				Cash flows from investing activities
Penerimaan dividen dari ventura bersama	8	24,735	20,400	Dividends received from joint venture
Penerimaan piutang pembiayaan		22,574	23,021	Receipts from lease receivables
Perolehan aset tetap		(489,000)	(145,280)	Acquisition of fixed assets
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi		(441,691)	(101,859)	Net cash used in investing activities
Arus kas dari aktivitas pendanaan				Cash flows from financing activities
Penerimaan pinjaman	29	179,135	51,761	Proceeds from borrowings
Pembayaran pinjaman	29	(350,937)	(273,641)	Repayments of borrowings
Pembayaran dividen tunai	18	(1,135,350)	-	Payment of cash dividends
Pembayaran atas liabilitas sewa	13b	(505,569)	(505,481)	Payments of lease liabilities
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan		(1,812,721)	(727,361)	Net cash used in financing activities
Efek perubahan nilai kurs pada kas dan setara kas		(10,377)	7,433	Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents
(Penurunan)/kenaikan bersih kas dan setara kas		(634,126)	717,807	Net (decrease)/increase in cash and cash equivalents
Kas dan setara kas pada awal tahun	4	1,843,431	1,125,624	Cash and cash equivalents at the beginning of the year
Kas dan setara kas pada akhir tahun	4	1,209,305	1,843,431	Cash and cash equivalents at the end of the year

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/1 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM

a. Pendirian dan informasi umum

PT Pertamina Trans Kontinental ("Perusahaan") didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 3 tanggal 9 September 1969, yang diubah dengan notaris yang sama dengan Akta Notaris No. 1 tanggal 3 Januari 1975, oleh Tan Thong Kie dengan nama PT Pertamina Tongkang. Akta pendirian tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No.Ya.5/5/4 tanggal 21 Januari 1975 dan telah diumumkan dalam Lembaran Berita Negara No. 10 tanggal 4 Februari 1975. Nama Perusahaan diubah menjadi PT Pertamina Trans Kontinental berdasarkan Akta Notaris No. 12 tanggal 26 Oktober 2011 oleh Dewantari Handayani, S.H., M.P.A., notaris di Jakarta. Akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusannya No. AHU-58581.AH.01.02 Tahun 2011 tanggal 29 November 2011.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir dilakukan berdasarkan Akta Notaris No. 38 tertanggal 23 Oktober 2024 dari Ivan Lazuardi Suwana, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, mengenai pengalihan tugas dan pengangkatan anggota direksi. Perubahan ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.09-0267290 Tahun 2024 tanggal 24 Oktober 2024.

Perusahaan berdomisili di Jakarta Utara dan kantor pusat Perusahaan beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 32-34.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan adalah sebagai berikut:

- Maksud Perusahaan adalah untuk menyelenggarakan usaha di bidang jasa pelayaran, maritim dan logistik baik di dalam negeri maupun diluar negeri serta kegiatan usaha lain yang terkait atau menunjang kegiatan usaha di bidang jasa pelayaran, maritim dan logistik tersebut.
- Tujuan Perusahaan adalah untuk:
 - a. Mengusahakan keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan Perusahaan secara efektif dan efisien; dan
 - b. Memberikan kontribusi dalam kegiatan ekonomi untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

1. GENERAL INFORMATION

a. Establishment and general information

PT Pertamina Trans Kontinental (the "Company") was established based on Notarial Deed No. 3 dated 9 September 1969, as amended by Notarial Deed No. 1 of the same notary dated 3 January 1975, by Tan Thong Kie under the name of PT Pertamina Tongkang. The deed of establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No.Ya.5/5/4 dated 21 January 1975 and was published in State Gazette No. 10 dated 4 February 1975. The Company's name was changed to PT Pertamina Trans Kontinental based on Notarial Deed No. 12 dated 26 October 2011, of Dewantari Handayani, S.H., M.P.A, notary in Jakarta. The deed was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decision Letter No. AHU-58581.AH.01.02 Year 2011 dated 29 November 2011.

The Company's Articles of Association have been amended several times, with the latest amendment made by Notarial Deed No. 38 of Ivan Lazuardi Suwana, S.H., M.Kn., notary in Jakarta, dated 23 October 2024, regarding the changes in the composition of board of directors. The change was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-AH.01.09-0267290 Year 2024 dated 24 October 2024.

The Company is domiciled in North Jakarta and its head office is in Jl. Yos Sudarso No. 32-34.

In accordance with Article 3 of the Company's Articles of Association, the scope of its activities are as follows:

- *The Company's objective is to conduct business in shipping, maritime and logistics services both domestically and abroad, as well as other related or supporting business activities in shipping, maritime and logistics services.*
- *The Company's objectives are to:*
 - a. *Make profits based on the principles of effective and efficient management; and*
 - b. *Contribute to economic activities for the welfare and prosperity of the people.*

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/2 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

b. Struktur Grup

i. Entitas anak

Pada laporan keuangan konsolidasian ini, Perusahaan dan entitas anak secara keseluruhan dirujuk sebagai "Grup".

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, struktur Grup adalah sebagai berikut:

Entitas anak/ Subsidiaries	Aktivitas bisnis/ Business activities	Domisili/ Domicile	Mulai beroperasi komersial/ Commencement of commercial operations	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership		Jumlah aset sebelum eliminasi/ Total asset before elimination	
				2024	2023	2024	2023
1, PT Pertamina Port and Logistics ("PPL") Berdiri tanggal 10 Februari 1986/ Established on 10 February 1986	Jasa bongkar muat, jasa pengangkutan dan pergudangan/ Cargo handling, freight and warehousing	Jakarta	1996	100%	100%	841,699	776,891
2, PT Pertamina Marine Solutions ("PMSol") Berdiri tanggal 5 Juni 1987/ Established on 5 June 1987	Jasa angkutan, penyediaan tenaga kerja dan perdagangan umum/ Transportation service, labour supply and general trade	Jakarta	1998	100%	100%	763,482	497,897
3, PT Pertamina Marine Engineering ("PME") Berdiri tanggal 6 November 1991/ Established on 6 November 1991	Perawatan dan pengadaan barang dan jasa/ Maintenance and procurement of goods	Jakarta	1991	99,17%	99,17%	383,385	322,808

Pada tanggal 31 Desember 2023, Perusahaan melakukan penambahan modal pada anak perusahaan PMSol sebesar Rp47.234 sehingga meningkatkan investasi total Perusahaan menjadi Rp51.928. Penambahan modal tersebut telah disetujui melalui keputusan pemegang saham secara sirkuler No. 363 di tanggal 10 Januari 2024 yang ditandatangani oleh notaris Fernandia Fabiola, S.H., M.Kn dan telah disahkan melalui lampiran keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0002651.AH.01.02. tahun 2024 tentang persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas PMSol di tanggal 15 Januari 2024.

1. GENERAL INFORMATION (continued)

b. The Group structure

i. Subsidiaries

In these consolidated financial statements, the Company and its subsidiaries are collectively referred to as the "Group".

As at 31 December 2024 and 2023, the structure of the Group was as follows:

On 31 December 2023, the Company added capital to its PMSol subsidiary amounting to Rp47,234 bringing the Company's total investment to Rp51,928. The additional capital was approved through circular shareholder decision No. 363 on 10 January 2024 which was signed by notary Fernandia Fabiola, SH, M.Kn and has been ratified through the attachment to the decision of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia number AHU-0002651.AH.01.02. year 2024 concerning approval of changes to the articles of association of limited liability companies PMSol on 15 January 2024.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/3 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

b. Struktur Grup (lanjutan)

ii. Ventura bersama

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 16 September 2014 yang risalah rapatnya didokumentasikan dalam Akta Notaris No. 41 oleh Notaris Dewantari Handayani, S.H., MPA, Perusahaan dan Tong Yeong Tug Co. Ltd. ("TYT"), mendirikan ventura bersama bernama PT Trans Yeong Maritime ("TYM"), sebuah perusahaan yang berkedudukan di Jakarta Pusat. Maksud dan tujuan ventura bersama adalah untuk menyelenggarakan usaha dibidang jasa pelayaran dan kepelabuhan laut. Kepemilikan saham Perusahaan di TYM adalah sebesar 51%.

Perusahaan induk utama Perusahaan adalah PT Pertamina (Persero) ("Pertamina"), badan usaha milik negara ("BUMN").

c. Dewan Komisaris dan Dewan Direksi dan Karyawan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	2024
Dewan Komisaris	
Komisaris Utama	Subagjo Hari Moeljanto
Komisaris	Amir Hamzah Andi Saiful Haq Hartanto A.I.T. Prasetyantoko*
Direksi	
Direktur Utama	I Ketut Laba
Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia	Afan Aftory
Direktur Operasi Armada	Slamet Harianto
Direktur Operasi	Yudi Wibisono
Direktur Pemasaran	Andy Arvianto

*) Komisaris Independen

Jumlah seluruh karyawan Perusahaan dan entitas anaknya pada tanggal 31 Desember 2024 adalah 434 (31 Desember 2023: 582) (tidak diaudit).

d. Penyelesaian atas laporan keuangan konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian ini diotorisasi untuk diterbitkan sesuai dengan resolusi Direksi Perusahaan pada tanggal 25 April 2025.

1. GENERAL INFORMATION (continued)

b. The Group structure (continued)

ii. Joint venture

Based on the Annual General Meeting of Shareholders dated 16 September 2014, which was documented in Notarial Deed No. 41 by Notary Dewantari Handayani S.H., MPA, the Company and Tong Yeong Tug Co. Ltd. ("TYT") established a joint venture named PT Trans Yeong Maritime ("TYM"), a company located in Central Jakarta. The joint venture's purpose and objective are related to shipping and harbour services. The Company's share of ownership in TYM is 51%.

The Company's ultimate parent company is PT Pertamina (Persero) ("Pertamina"), a state-owned enterprise ("SOE").

c. Board of Commissioners and Board of Directors and Employees

The members of the Company's Boards of Commissioners and Directors as at 31 December 2024 and 2023 were as follows:

	2023	
		Board of Commissioners
Amir Hamzah		President Commissioner
Khalid Zabidi		Commissioners
Andi Saiful Haq		
-		
-		
		Board of Directors
I Ketut Laba		President Director
Afan Aftory		Finance and Human Resources Director
		Fleet Operation Director
-		Director
Slamet Harianto		Operation Director
Andy Arvianto		Commercial Director

*) Independent Commissioner

The total number of employees of the Company and its subsidiary as at 31 December 2024 was 434 (31 December 2023: 582) (unaudited).

d. Completion of the consolidated financial statements

These consolidated financial statements were authorised for issuance in accordance with a resolution of the Board of Directors of the Company on 25 April 2025.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/4 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

Berikut ini adalah kebijakan akuntansi yang material yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup, yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Kebijakan akuntansi telah diterapkan secara konsisten terhadap semua periode yang disajikan, kecuali dinyatakan lain.

a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan konsep harga perolehan serta menggunakan dasar akrual kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Untuk tujuan penyusunan laporan arus kas konsolidasian, kas dan setara kas mencakup kas, kas di bank, dan deposito dengan jangka waktu tiga bulan atau kurang.

Seluruh angka dalam laporan keuangan konsolidasian ini, dibulatkan dan disajikan dalam jutaan Rupiah ("Rp"), kecuali dinyatakan lain. Lihat catatan 2c untuk informasi mata uang fungsional.

Kecuali dinyatakan dibawah ini, kebijakan akuntansi telah diterapkan secara konsisten dengan laporan keuangan konsolidasian tahunan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 yang telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi dan asumsi dan juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Grup. Area yang memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau kompleks atau area dimana asumsi dan estimasi dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian diungkapkan di Catatan 3.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION

Presented below are the material accounting policies adopted in preparing the consolidated financial statements of the Group, which are in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards.

The accounting policies have been consistently applied to all the periods presented, unless otherwise stated.

a. Basis of preparation of the consolidated financial statements

The consolidated financial statements have been prepared under the historical cost convention and using the accrual basis except for the consolidated statement of cash flows.

The consolidated statement of cash flows is prepared based on the direct method by classifying cash flows on the basis of operating, investing and financing activities. For the purpose of the consolidated statements of cash flows, cash and cash equivalents include cash on hand, cash in banks and deposits with a maturity of three months or less.

Figures in the consolidated financial statements are rounded to and stated in millions of Rupiah ("Rp"), unless otherwise specified. Refer to notes 2c for the information on the group's functional currency.

Except as described below, the accounting policies applied are consistent with those of the annual consolidated financial statements for the year ended 31 December 2024, which conform to the Indonesian Financial Accounting Standards.

The preparation of consolidated financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the use of certain critical accounting estimates and assumptions. It also requires management to exercise its judgement in the process of applying the Group's accounting policies. The areas involving a higher degree of judgement or complexity, or areas where assumptions and estimates are significant to the consolidated financial statements are disclosed in Note 3.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/5 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Perubahan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK")

Mulai dari 1 Januari 2024, referensi terhadap masing-masing PSAK dan ISAK diubah sesuai dengan penerbitan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK-IAI").

Penerapan dari revisi standar berikut yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2024, tidak menimbulkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Grup dan pengaruh yang material atas jumlah yang dilaporkan atas tahun berjalan atau tahun sebelumnya:

- Amendemen PSAK 201 "Penyajian Laporan Keuangan" tentang liabilitas jangka panjang dengan kovenan;
- Amendemen PSAK 116 "Sewa" tentang liabilitas sewa pada transaksi jual dan sewa balik;
- Amendemen PSAK 207 "Laporan Arus Kas" dan amendemen PSAK 107 "Instrumen Keuangan: Pengungkapan" tentang pengaturan pembiayaan pemasok.

Standar baru, amendemen dan interpretasi yang telah diterbitkan, namun berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2025, tapi penerapan dini diperkenankan, adalah sebagai berikut:

- PSAK 117 "Kontrak Asuransi";
- Amendemen PSAK 221 "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing – Kekurangan Ketertukaran".

Pada tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, Grup sedang mempelajari dampak yang mungkin timbul terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup dari penerapan standar baru dan amendemen ini, yang tidak diadopsi dini oleh Grup.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)**

a. Basis of preparation of the consolidated financial statements (continued)

Changes to Statements of Financial Accounting Standards ("SFAS") and Interpretations of Statements of Financial Accounting Standards ("IFAS")

Beginning 1 January 2024, references to the individual SFASs and IFASs has been changed as published by the Financial Accounting Standards Board of Indonesian Institute of Accountants ("DSAK-IAI").

The adoption of these amended standards that are effective beginning 1 January 2024 did not result in substantial changes to the Group's accounting policies and had no material effect on the amounts reported for the current or prior financial years:

- Amendment of SFAS 201 "Presentation of Financial Statements" about non-current liabilities with covenants;
- Amendment of SFAS 116 "Leases" about lease liability in a sale and leaseback;
- Amendment of SFAS 207 "Statement of Cash Flows" and amendment SFAS 107 "Financial Instruments: Disclosures" about supplier finance arrangements.

New standards, amendments and interpretations issued but only effective for financial years beginning on or after 1 January 2025, but early adoption is permitted, are as follows:

- SFAS 117 "Insurance Contracts";
- Amendment of SFAS 221 "The effect of Changes in Foreign Exchange Rates - Lack of Exchangeability".

As at the issuance date of these consolidated financial statements, the Group is evaluating the potential impact of these new standards and amendments which have not been early adopted by the Group, on the Group's consolidated financial statements.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/6 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL
(lanjutan)**

b. Konsolidasian

(i) Entitas anak

Entitas anak adalah seluruh entitas (termasuk entitas yang terstruktur) dimana Grup memiliki kontrol. Grup memiliki kontrol atas entitas anak apabila Grup memiliki dampak dari, atau memiliki hak atas, penerimaan variabel dari hubungannya dengan entitas anak dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi penerimaan tersebut melalui kuasa atas entitas anak. Entitas anak secara utuh dikonsolidasikan dari tanggal dimana kontrol dialihkan ke Grup. Entitas anak tidak lagi dikonsolidasikan sejak tanggal Grup kehilangan pengendalian.

(ii) Pengaturan bersama

Kepentingan dalam ventura bersama dicatat dengan menggunakan metode ekuitas (lihat (iii) di bawah), setelah pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Ventura bersama dicatat menggunakan metode ekuitas, setelah pada awalnya diakui sebagai biaya pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

(iii) Metode ekuitas

Sesuai metode ekuitas, investasi pada awalnya dicatat pada biaya perolehan dan selanjutnya disesuaikan untuk mengakui bagian Grup atas laba rugi pasca akuisisi dari *investee* pada laba rugi, dan bagiannya dalam pergerakan pendapatan komprehensif lainnya dari *investee* di pendapatan komprehensif lainnya.

Jika bagian Grup atas kerugian ventura bersama sama dengan atau melebihi kepentingannya pada ventura bersama, termasuk piutang tanpa agunan, Grup menghentikan pengakuan bagian kerugiannya, kecuali Grup memiliki kewajiban hukum atau konstruktif atau melakukan pembayaran atas nama ventura bersama.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)**

b. Consolidation

(i) Subsidiaries

Subsidiaries are all those entities (including structured entities) over which the Group has control. The Group controls an entity when the Group is exposed to, or has rights to, variable returns from its involvement with the entity and has the ability to affect those returns through its power over the entity. Subsidiaries are fully consolidated from the date on which control is transferred to the Group. They are de-consolidated from the date that control ceases.

(ii) Joint arrangements

Interests in joint ventures are accounted for using the equity method (see (iii) below), after initially being recognised at cost in the consolidated statement of financial position.

A joint venture is accounted for using the equity method, after initially being recognised at cost in the consolidated statement of financial position.

(iii) Equity method

Under the equity method, the investment is initially recognised at cost and adjusted thereafter to recognise the Group's share of the post-acquisition profits or losses of the investee in profit or loss, and its share of movements in other comprehensive income of the investee in other comprehensive income.

When the Group's share of losses in a joint venture equal or exceeds its interest in the joint venture, including any other unsecured receivables, the Group does not recognise further losses, unless it has incurred legal or constructive obligations or made payments on behalf of the joint venture.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/7 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL
(lanjutan)**

b. Konsolidasian (lanjutan)

(iii) Metode ekuitas (lanjutan)

Keuntungan yang belum terealisasi atas transaksi antara Grup dengan ventura bersama dieliminasi sebesar kepentingan Grup dalam entitas tersebut. Kerugian yang belum terealisasi juga dieliminasi kecuali transaksi tersebut memberikan bukti adanya penurunan nilai aset yang dialihkan. Kebijakan akuntansi ventura bersama telah diubah jika diperlukan untuk memastikan konsistensi dari kebijakan yang diterapkan oleh Grup.

Dividen yang diterima dan yang akan diterima dari ventura bersama diakui sebagai pengurang jumlah tercatat investasi.

Pada setiap tanggal pelaporan, Grup menentukan apakah terdapat bukti objektif bahwa telah terjadi penurunan nilai pada investasi pada ventura bersama. Jika demikian, maka nilai tercatat dari investasi yang dicatat dengan akuntansi ekuitas diuji untuk penurunan nilai.

c. Penjabaran mata uang asing

(i) Mata uang fungsional dan penyajian

Laporan keuangan konsolidasian disajikan dalam Rupiah yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan.

(ii) Transaksi dan saldo

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang fungsional dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada setiap tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang fungsional menggunakan kurs penutup. Kurs yang digunakan sebagai acuan adalah kurs yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang timbul dari penyelesaian transaksi dalam mata uang asing dan dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing diakui di dalam laporan laba rugi.

Nilai tukar yang digunakan adalah sebagai berikut (dalam satuan penuh):

	2024
Rupiah per Dolar Amerika Serikat ("AS\$")	16,157

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)**

b. Consolidation (continued)

(iii) Equity method (continued)

Unrealised gains on transactions between the Group and its joint venture are eliminated to the extent of the Group's interest in this entity. Unrealised losses are also eliminated unless the transaction provides evidence of an impairment of the asset transferred. Accounting policies of the joint venture have been changed where necessary to ensure consistency with the policies adopted by the Group.

Dividends received or receivable from the joint venture are recognised as a reduction in the carrying amount of the investment.

The Group determines at each reporting date whether there is any objective evidence that the investment in the joint venture is impaired. If this is the case, the carrying amount of the equity accounting investments is tested for impairment.

c. Foreign currency transactions

(i) Functional and presentation currency

The consolidated financial statements are presented in Rupiah, which is the Company's functional currency.

(ii) Transactions and balances

Foreign currency transactions are translated into functional currency using the exchange rates prevailing at the dates of the transactions. At each reporting date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currency are translated into functional currency using the closing exchange rate. The exchange rate used as a benchmark is the rate that is issued by the Bank of Indonesia. Foreign exchange gains and losses resulting from the settlement of such transactions and from the translation at period-end exchange rates of monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are recognised in the profit or loss.

The rates of exchange used are as follows (in full amounts):

	2023	
	15,439	Rupiah equivalent to United States Dollar ("US\$")

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/8 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL
(lanjutan)

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)

d. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas yang telah ditentukan penggunaannya atau yang tidak dapat digunakan secara bebas tidak tergolong dalam kas dan setara kas.

d. Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents which have been restricted for a certain purpose, or which cannot be used freely, are not defined as cash and cash equivalents.

e. Transaksi dengan pihak berelasi

Grup mempunyai transaksi dengan pihak berelasi. Definisi pihak berelasi sesuai dengan yang diatur dalam PSAK 224 "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi".

e. Transactions with related parties

The Group has transactions with related parties. The definition of related parties is in accordance with SFAS 224 "Related Party Disclosures".

Saldo dan transaksi yang material antara Grup dengan Pemerintah Negara Republik Indonesia dan entitas berelasi dengan Pemerintah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang relevan. Grup memilih untuk mengungkapkan transaksi dengan entitas berelasi dengan Pemerintah dengan menggunakan pengecualian dari persyaratan pengungkapan pihak berelasi.

All significant transactions and balances of the Group with the Government of the Republic of Indonesia and Government-related entities are disclosed in the relevant notes to the consolidated financial statements. The Group elected to disclose the transactions with Government-related entities, using the exemption from general related party disclosure requirements.

Transaksi dengan pihak-pihak berelasi dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, yang mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

Transactions with related parties are based on terms agreed by the parties, which may not be the same as those of the transaction between unrelated parties.

f. Piutang usaha

Piutang usaha adalah jumlah piutang pelanggan atas jasa yang diberikan sehubungan dengan kegiatan usaha. Bila pembayaran diharapkan akan diterima dalam jangka waktu satu tahun atau kurang, maka diklasifikasikan sebagai aset lancar. Bila tidak, disajikan sebagai aset tidak lancar.

f. Trade receivables

Trade receivables are amounts due from customers for services performed in the ordinary course of business. If collection is expected in one year or less, they are classified as current assets. If not, they are presented as non-current assets.

Piutang usaha pada awalnya diakui pada nilai wajar dan kemudian diukur dengan menggunakan biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif ("SBE"), dikurangi dengan penyisihan penurunan nilai.

Trade receivables are recognised initially at fair value and subsequently measured at amortised cost using the effective interest rate ("EIR") method, less provision for impairment.

Lihat Catatan 2o untuk informasi lebih lanjut mengenai kebijakan penentuan jumlah cadangan kerugian piutang Grup.

See Note 2o for further information regarding the policy on the determination of the amount for the loss allowance on the Group's receivables.

g. Kontrak aset

Kontrak aset merupakan jumlah pendapatan yang belum ditagihkan pada akhir periode pelaporan keuangan sehubungan dengan jasa yang telah diberikan.

g. Contract assets

Contract assets represent the unbilled amounts at the end of the financial reporting period in respect of services performed.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/9 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL
(lanjutan)**

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)**

h. Aset tetap

Aset tetap diakui sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai. Harga perolehan termasuk pengeluaran yang dapat didistribusikan secara langsung atas perolehan aset tersebut.

Biaya-biaya setelah pengakuan awal diakui sebagai bagian nilai tercatat aset atau sebagai aset yang terpisah, sebagaimana mestinya, hanya jika kemungkinan besar Grup mendapat manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut dan biaya perolehan aset dapat diukur dengan andal. Nilai tercatat dari komponen yang diganti dihapuskan. Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan ke dalam laporan laba rugi dalam periode keuangan ketika biaya-biaya tersebut terjadi.

Pengedokan atas kapal milik Grup dilakukan setiap dua hingga dua setengah tahun dan biaya pengedokan tersebut dikapitalisasi sepanjang pengeluarannya dapat menunjukkan peningkatan manfaat ekonomis mendatang kapal. Kapitalisasi biaya tersebut dicatat sebagai penambahan ke harga perolehan kapal dan disusutkan selama periode hingga jadwal pengedokan berikutnya. Total biaya pengedokan terdahulu yang tersisa, jika ada, dihentikan pengakuannya dan dibebankan ke laporan laba rugi periode berjalan.

Tanah tidak disusutkan. Penyusutan aset lain dihitung dengan menggunakan metode garis lurus selama estimasi umur manfaat aset tetap sebagai berikut:

Tahun/Years

Bangunan	20
Kendaraan dan alat berat	5 - 15
Peralatan kantor	5
Kapal	25
Peralatan kapal	5

Masa manfaat aset, nilai sisa, dan metode penyusutan ditelaah dan disesuaikan, jika diperlukan, setidaknya setiap akhir periode pelaporan. Dampak dari setiap revisi diakui dalam laporan laba rugi, ketika perubahan terjadi.

Apabila suatu aset tetap tidak digunakan lagi atau dilepas, nilai tercatatnya dikeluarkan dari laporan keuangan konsolidasian, dan keuntungan dan kerugian yang timbul dari pelepasan aset tetap diakui dalam laba rugi pada periode aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Nilai tercatat aset segera diturunkan sebesar jumlah yang dapat dipulihkan jika nilai tercatat aset lebih besar dari estimasi jumlah yang dapat dipulihkan.

h. Fixed assets

Fixed assets are stated at the cost of acquisition less accumulated depreciation and accumulated impairment losses. Cost of acquisition includes expenditure that is directly attributable to the acquisition of the items.

Subsequent costs are included in the asset's carrying amount or recognised as separate assets, as appropriate, only when it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the Group and when the cost of the item can be measured reliably. The carrying amount of the replaced part is derecognised. All other repairs and maintenance are charged to profit or loss during the financial period in which they are incurred.

Docking for the Group's vessels are performed in general every two up to two and a half years periodically and the docking costs are capitalised to the extent that the expenditure results in an increase in the future economic benefit of the vessels. The capitalised costs are recorded as an additional cost of the owned vessels and the costs are amortised over the period up to the next scheduled dry-docking. Any remaining carrying amount of the cost of the previous docking is derecognised and charged to current period profit or loss.

Land is not depreciated. Depreciation is calculated on a straight-line basis over the estimated useful lives of the fixed assets as follows:

<i>Buildings</i>
<i>Vehicles and heavy equipments</i>
<i>Office equipments</i>
<i>Vessels</i>
<i>Vessel equipments</i>

The assets' useful lives, residual values and depreciation method are reviewed and adjusted if appropriate, at least at the financial period-end. The effects of any revisions are recognised in the profit or loss, when the changes arise.

When property, plant and equipment are retired or otherwise disposed of, their carrying values are eliminated from the consolidated financial statements, and the resulting gains and losses on the disposal of property, plant and equipment are recognised in the profit or loss and in the period in which the asset is derecognised.

An asset's carrying amount is written down immediately to its recoverable amount if the asset's carrying amount is greater than its estimated recoverable amount.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/10 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL
(lanjutan)**

h. Aset tetap (lanjutan)

Biaya konstruksi kapal dikapitalisasi sebagai aset dalam penyelesaian. Penyusutan aset dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan, yaitu pada saat aset tersebut berada pada lokasi dan kondisi yang diinginkan agar siap digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud manajemen.

i. Penurunan nilai aset non-keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, maka Grup membuat estimasi formal atas jumlah terpulihkan aset tersebut.

Jumlah terpulihkan adalah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakai aset. Jika nilai tercatat aset lebih besar daripada nilai terpulihkannya, maka aset tersebut dipertimbangkan mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan nilainya menjadi sebesar nilai terpulihkannya.

Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan neto didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset.

Dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, digunakan harga penawaran pasar terakhir, jika tersedia. Jika tidak terdapat transaksi tersebut, model penilaian yang sesuai digunakan dapat untuk menentukan nilai wajar aset. Perhitungan-perhitungan ini dikuatkan oleh penilaian berganda atau indikator nilai wajar yang tersedia.

Aset non-keuangan yang mengalami penurunan nilai diuji setiap tanggal pelaporan untuk menentukan apakah terdapat kemungkinan pemulihan penurunan nilai.

Pemulihan rugi penurunan nilai, untuk aset selain *goodwill*, diakui jika, dan hanya jika, terdapat perubahan estimasi yang digunakan dalam menentukan jumlah terpulihkan aset sejak pengujian penurunan nilai terakhir kali. Pembalikan rugi penurunan nilai tersebut diakui segera dalam laba rugi.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)**

h. Fixed assets (continued)

The costs of the construction of vessels are capitalised as construction in progress. Depreciation of an asset begins when it is available for use, i.e. when it is in the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management.

i. Impairment of non-financial assets

The Group assesses at each reporting period whether there is an indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, the Group makes an estimate of the asset's recoverable amount.

The recoverable amount is the higher of an asset's Fair Value Less Cost to Sell ("FVLCTS") and Value in Use ("VIU"). Where the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount, the asset is considered impaired and is written down to its recoverable amount.

In assessing the value in use, the estimated net future cash flows are discounted to their present value using a pretax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset.

In determining fair value less costs to sell, recent market transactions are taken into account, if available. If no such transactions can be identified, an appropriate valuation model is used to determine the fair value of the assets. These calculations are corroborated by multiple valuations or other available fair value indicators.

Non-financial assets that suffer impairment are reviewed for possible reversal of the impairment at each reporting date.

Reversal on impairment loss for assets other than goodwill would be recognised if, and only if, there has been a change in the estimates used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment test was carried out. Reversal on impairment losses will be immediately recognised on profit or loss.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/11 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL
(lanjutan)**

i. Penurunan nilai aset non-keuangan (lanjutan)

Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan neto didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset.

Dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, digunakan harga penawaran pasar terakhir, jika tersedia. Jika tidak terdapat transaksi tersebut, model penilaian yang sesuai digunakan dapat untuk menentukan nilai wajar aset. Perhitungan-perhitungan ini dikuatkan oleh penilaian berganda atau indikator nilai wajar yang tersedia.

Aset non-keuangan yang mengalami penurunan nilai diuji setiap tanggal pelaporan untuk menentukan apakah terdapat kemungkinan pemulihan penurunan nilai.

Pemulihan rugi penurunan nilai, untuk aset selain *goodwill*, diakui jika, dan hanya jika, terdapat perubahan estimasi yang digunakan dalam menentukan jumlah terpulihkan aset sejak pengujian penurunan nilai terakhir kali. Pembalikan rugi penurunan nilai tersebut diakui segera dalam laba rugi.

j. Sewa

Grup sebagai penyewa

Pada tanggal permulaan kontrak, Grup menilai apakah kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan, atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasi selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)**

**i. Impairment of non-financial assets
(continued)**

In assessing the value in use, the estimated net future cash flows are discounted to their present value using a pretax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset.

In determining fair value less costs to sell, recent market transactions are taken into account, if available. If no such transactions can be identified, an appropriate valuation model is used to determine the fair value of the assets. These calculations are corroborated by multiple valuations or other available fair value indicators.

Non-financial assets that suffer impairment are reviewed for possible reversal of the impairment at each reporting date.

Reversal on impairment loss for assets other than goodwill would be recognised if, and only if, there has been a change in the estimates used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment test was carried out. Reversal on impairment losses will be immediately recognised on profit or loss.

j. Leases

The Group as lessee

At the inception of a contract, the Group assesses whether the contract is, or contains, a lease. A contract is, or contains a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/12 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL
(lanjutan)**

j. Sewa (lanjutan)

Grup sebagai penyewa (lanjutan)

Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasi, Grup harus menilai apakah:

- Kontrak melibatkan penggunaan aset yang diidentifikasi - ini dapat ditentukan secara eksplisit atau implisit, dan harus berbeda secara fisik atau secara substansial mewakili seluruh kapasitas aset. Jika pemasok memiliki hak substitusi substentif, maka aset tidak teridentifikasi;
- Grup memiliki hak untuk memperoleh secara substansial semua manfaat ekonomik dari penggunaan aset identifikasi selama periode penggunaan; dan
- Grup memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset. Grup memiliki hak ini hanya jika Grup memiliki hak untuk pengambilan keputusan yang relevan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa aset tersebut digunakan telah ditentukan sebelumnya, dan:
 1. Grup memiliki hak untuk mengoperasikan aset; atau
 2. Grup telah mendesain aset dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan selama periode penggunaan.

Pada tanggal inisiasi atau pada penilaian kembali atas kontrak yang mengandung sebuah komponen sewa, Grup mengalokasikan imbalan dalam kontrak ke masing-masing komponen sewa berdasarkan harga tersendiri relatif dari komponen sewa dan harga tersendiri agregat dari komponen non-sewa.

Pada tanggal permulaan sewa, Grup mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa. Aset hak-guna diukur pada biaya perolehan, dimana meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa yang disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan atau sebelum tanggal permulaan, ditambah dengan biaya langsung awal yang dikeluarkan dan estimasi biaya yang akan dikeluarkan untuk membongkar dan memindahkan aset pendasar atau untuk merestorasi aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan oleh ketentuan sewa, dikurangi dengan insentif sewa yang diterima. Liabilitas sewa diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Pada umumnya, Grup menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai tingkat bunga diskonto.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)**

j. Leases (continued)

The Group as lessee (continued)

To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset, the Group shall assess whether:

- The contract involves the use of an identified asset - this can be explicitly specified or implicitly, and must be physically distinct or represents substantially all of the total capacity. If the supplier has substantive substitution rights, then there is no identified asset;
- The Group has the right to obtain substantially all economic benefits from use of the asset throughout the period of use; and
- The Group has the right to direct the use of the asset. The Group has this right only if it has the rights to make relevant decisions about how and for what purpose the asset is being used is predetermined, and:

1. The Group has the right to operate the asset; or
2. The Group has designed the asset in a way that predetermines how and for what purposes it will be used throughout the period of use.

At the inception date or on reassessment of a contract that contains a lease component, the Group allocates the consideration in the contract to each lease component on the basis of their relative stand-alone prices and the aggregate stand-alone prices of the non-lease component.

The Group recognises a right-of-use asset and a lease liability at the lease commencement date. The right-of-use asset is initially measured at cost, which comprises the initial amount of the lease liability adjusted for any lease payment made at or before the commencement date, plus any initial direct cost incurred and an estimate of costs to dismantle and remove the underlying asset or to restore the underlying asset to the condition required by the terms and conditions of the lease, less any lease incentives received. The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at the commencement date, discounted using the interest rate implicit in the lease or, if that rate cannot be readily determined, using the incremental borrowing rate. Generally, the Group uses its incremental borrowing rate as the discount rate.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/13 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL
(lanjutan)

j. Sewa (lanjutan)

Grup sebagai penyewa (lanjutan)

Aset hak-guna kemudian disusutkan menggunakan metode garis lurus dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

Liabilitas sewa diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode bunga efektif. Liabilitas sewa diukur kembali ketika ada perubahan pembayaran sewa di masa depan yang timbul dari perubahan suatu indeks atau tingkat, jika ada perubahan dalam estimasi Grup dari jumlah yang diharapkan akan dibayarkan berdasarkan jaminan nilai residu atau jika Grup mengubah penilaiannya apakah akan melakukan opsi pembelian, perpanjangan atau pemutusan kontrak. Ketika liabilitas sewa diukur kembali dengan cara tersebut, penyesuaian dilakukan terhadap jumlah tercatat dari aset hak-guna, atau diakui dalam laba rugi jika jumlah tercatat dari aset hak-guna telah dikurangi menjadi nol.

Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar kepada Grup pada akhir masa sewa atau jika biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan Grup akan mengeksekusi opsi beli, maka Grup menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga akhir umur manfaat aset pendasar. Jika tidak, maka Grup menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

Pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa meliputi pembayaran tetap, termasuk pembayaran tetap secara substansi dikurangi dengan piutang insentif sewa.

Setiap pembayaran sewa dialokasikan sebagai beban keuangan dan pengurangan liabilitas sewa sehingga menghasilkan tingkat suku bunga yang konstan atas saldo liabilitas yang tersisa. Utang sewa yang terkait, dikurangi dengan beban keuangan, dimasukkan ke dalam "liabilitas sewa pembiayaan". Elemen bunga dari beban keuangan dibebankan pada laba rugi selama periode sewa sehingga menghasilkan tingkat bunga periodik yang konstan untuk saldo liabilitas yang tersisa pada setiap periode.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)

j. Leases (continued)

The Group as lessee (continued)

The right-of-use asset is subsequently depreciated using the straight-line method from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use asset or the end of the lease term.

The lease liability is measured at amortised cost using the effective interest method. It is remeasured when there is a change in future lease payments arising from a change in an index or rate, if there is a change in the Group's estimate of the amount expected to be payable under a residual value guarantee or if the Group changes its assessment of whether it will exercise a purchase, extension or termination option. When the lease liability is remeasured in this way, a corresponding adjustment is made to the carrying amount of the right-of-use asset or is recorded in profit or loss if the carrying amount of the right-of-use asset has been reduced to zero.

If the lease transfers ownership of the underlying asset to the Group by the end of the lease term or if the cost of the right-of-use asset reflects that the Group will exercise a purchase option, the Group depreciates the right-of-use asset from the commencement date to the end of the useful life of the underlying asset. Otherwise, the Group depreciates the right-of-use asset from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use asset or the end of the lease term.

Lease payments included in the measurement of the lease liability comprise fixed payments, including in-substance fixed payments less any lease incentive receivable.

Each lease payment is allocated between finance charges and reduction of the lease liability so as to achieve a constant rate of interest on the liability balance outstanding. The corresponding rental obligations, net of finance charges, are included in "finance lease liabilities". The interest element of the finance cost is charged to profit or loss over the lease period so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability for each period.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/14 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL
(lanjutan)**

j. Sewa (lanjutan)

Grup sebagai penyewa (lanjutan)

Grup menyajikan aset hak-guna dan liabilitas sewa sebagai akun terpisah di dalam laporan posisi keuangan.

Sewa jangka pendek dan yang aset
pendasarnya bernilai rendah

Grup memutuskan untuk tidak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa untuk sewa jangka pendek yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang dan sewa yang aset pendasarnya bernilai rendah. Grup mengakui pembayaran sewa atas sewa tersebut sebagai beban dengan metode garis lurus selama masa sewa.

Grup sebagai pesewa

- Ketika Grup bertindak sebagai pesewa, Grup mengklasifikasi masing-masing sewanya baik sewa operasi atau sewa pembiayaan.
- Untuk mengklasifikasi masing-masing sewa, Grup membuat penilaian secara keseluruhan atas apakah sewa mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset pendasar. Jika penilaian membuktikan hal tersebut, maka sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan; jika tidak maka, merupakan sewa operasi. Sebagai bagian dari penilaian ini, Grup mempertimbangkan beberapa indikator seperti apakah masa sewa adalah sebagian besar dari umur ekonomik aset pendasar.

Dalam sewa pembiayaan, dimana Grup mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Grup mengakui dan menyajikan aset berupa piutang sewa pembiayaan di laporan posisi keuangan sebesar jumlah yang sama dengan investasi sewa neto. Penerimaan piutang sewa diperlakukan sebagai pembayaran pokok dan pendapatan keuangan. Pengakuan pendapatan keuangan didasarkan pada suatu pola yang mencerminkan suatu tingkat pengembalian periodik yang konstan atas investasi neto Grup sebagai pesewa dalam sewa pembiayaan.

Grup mengakui pembayaran sewa yang diterima dari sewa operasi sebagai pendapatan dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)**

j. Leases (continued)

The Group as lessee (continued)

The Group presents right-of-use assets and lease liabilities as separate line items in the statement of financial position.

Short-term leases and leases of low-value
assets

The Group has elected not to recognise right-of-use assets and lease liabilities for short-term leases that have a lease term of 12 months or less and leases of low-value assets. The Group recognises the lease payments associated with these leases as an expense on a straight-line basis over the lease term.

The Group as lessor

- *When the Group acts as a lessor, it shall classify each of its leases as either an operating lease or a finance lease.*
- *To classify each lease, the Group makes an overall assessment of whether the lease transfers substantially all of the risks and rewards incidental to ownership of the underlying asset. If this is the case, then the lease is classified as a finance lease; if not, then it is an operating lease. As part of this assessment, the Group considers certain indicators such as whether the lease term is for the major part of the economic life of the asset.*

Under a finance lease, where the Group transfers substantially all of the risks and rewards related to the ownership of the leased item, the Group recognised and presents a finance lease receivables in the statement of financial position at an amount equal to the net investment in the lease. Lease payments received are treated as payments of principal and finance income. The recognition of finance income is based on a pattern reflecting a constant periodic rate of return on the Group's net investment as lessors in finance leases.

The Group recognises lease payments received under operating leases as income on a straight-line basis over the lease term.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/15 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL
(lanjutan)**

k. Utang usaha dan utang lain-lain

Utang usaha adalah kewajiban untuk membayar barang atau jasa yang diperoleh dari pemasok dalam kegiatan usaha normal. Utang usaha lain-lain berkaitan dengan transaksi pihak ketiga atau pihak berelasi di luar kegiatan usaha normal. Utang usaha dan utang lain-lain diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek bila pembayaran dilakukan dalam jangka waktu satu tahun atau kurang. Bila tidak, akan disajikan sebagai liabilitas jangka panjang.

Utang usaha dan utang lain-lain pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif.

l. Pinjaman

Pada saat pengakuan awal, pinjaman diakui sebesar nilai wajar, dikurangi dengan biaya-biaya transaksi yang terjadi. Selanjutnya, pinjaman diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi; selisih antara penerimaan (dikurangi biaya transaksi) dan nilai pelunasan dicatat pada laporan laba rugi selama periode pinjaman dengan menggunakan metode SBE.

Biaya-biaya yang dibayarkan untuk mendapatkan fasilitas pinjaman diakui sebagai biaya transaksi dari pinjaman tersebut, apabila besar kemungkinan akan dilakukan penarikan atas sebagian atau seluruh fasilitas tersebut. Dalam hal ini, biaya tersebut ditangguhkan sampai dengan penarikan dilakukan. Apabila tidak ada bukti bahwa besar kemungkinan akan dilakukan penarikan atas sebagian atau seluruh fasilitas tersebut, biaya tersebut dikapitalisasi sebagai pembayaran di muka untuk jasa likuiditas dan diamortisasi selama periode dari fasilitas yang terkait.

Pinjaman diklasifikasikan sebagai liabilitas lancar kecuali Grup mempunyai hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas tersebut untuk setidaknya 12 bulan setelah tanggal laporan pelaporan.

Kovenan yang harus dipatuhi oleh Grup, pada atau sebelum akhir periode pelaporan, dipertimbangkan dalam mengklasifikasikan perjanjian pinjaman dengan perjanjian sebagai lancar atau tidak lancar. Kovenan yang harus dipatuhi oleh Grup setelah periode pelaporan tidak memengaruhi klasifikasi pada tanggal pelaporan.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)**

k. Trade and other payables

Trade payables are obligations to pay for goods or services that have been acquired in the ordinary course of business from suppliers. Other payables are amounts due to third or related parties for transactions outside the ordinary course of business. Trade and other payables are classified as current liabilities if payment is due within one year or less. If not, they are presented as non-current liabilities.

Trade payables are recognised initially at fair value and subsequently measured at amortised cost using the effective interest method.

l. Borrowings

Borrowings are recognised initially at fair value, net of transaction costs incurred. Borrowings are subsequently carried at amortised cost; any difference between the proceeds (net of transaction costs) and the redemption value is recognised in profit or loss over the period of the borrowings using the EIR method.

Fees paid on the establishment of the loan facilities are recognised as transaction costs of the loan to the extent that it is probable that some or all of the facility will be drawn down. In this case, the fee is deferred until the drawdown occurs. To the extent that there is no evidence that it is probable that some or all of the facility will be drawn down, the fee is capitalised as a prepayment for liquidity services and amortised over the period of the facility to which it relates.

Borrowings are classified as current liabilities unless the Group has an unconditional right to defer the settlement of the liability for at least 12 months after the reporting date.

Covenants that the Group is required to comply with, on or before the end of the reporting period, are considered in classifying loan arrangements with covenants as current or non-current. Covenants that the Group is required to comply with after the reporting period do not affect the classification at the reporting date.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/16 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL
(lanjutan)**

m. Perpajakan

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui pada laporan laba rugi, kecuali untuk pajak atas transaksi yang diakui di pendapatan komprehensif lain atau langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam pendapatan komprehensif lain atau ekuitas.

Beban pajak kini dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku atau yang secara substansial telah berlaku pada tanggal pelaporan. Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang dilaporkan di Surat Pemberitahuan Tahunan ("SPT") sehubungan dengan situasi dimana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi. Jika perlu, manajemen menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar kepada otoritas pajak.

Pajak penghasilan tangguhan diakui, dengan menggunakan metode *balance sheet liability*, untuk semua perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak atas aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya dalam laporan keuangan konsolidasian. Pajak penghasilan tangguhan tidak diakui jika berasal dari pengakuan awal aset atau liabilitas yang timbul dari transaksi selain kombinasi bisnis dan saat transaksi tersebut tidak mempengaruhi laba rugi akuntansi dan laba rugi kena pajak.

Pajak penghasilan tangguhan ditentukan dengan menggunakan tarif pajak yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan dan diharapkan diterapkan ketika aset pajak penghasilan tangguhan direalisasi atau liabilitas pajak penghasilan tangguhan diselesaikan. Aset pajak tangguhan diakui hanya jika besar kemungkinan jumlah penghasilan kena pajak di masa depan akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang masih dapat dimanfaatkan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan akan saling hapus jika ada hak yang berkekuatan hukum untuk saling hapus aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini dan jika aset dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dipungut oleh otoritas pajak yang sama pada entitas kena pajak yang sama atau entitas kena pajak yang berbeda serta jika ada keinginan untuk melakukan penyelesaian saldo secara neto.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)**

m. Taxation

The tax expense comprises current and deferred tax. Tax is recognised in the profit or loss, except to the extent that it relates to items recognised in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax is also recognised in other comprehensive income or directly in equity, respectively.

The current income tax charge is calculated using tax laws that have been enacted or substantively enacted at the reporting date. Management periodically evaluates positions taken in Annual Tax Return with respect to situations in which applicable tax regulations are subject to interpretation. It establishes provisions, where appropriate, based on the amounts expected to be paid to the tax authorities.

Deferred income tax is recognised, using the balance sheet liability method, on temporary differences arising between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts in the consolidated financial statements. The deferred income tax is not accounted for if it arises from the initial recognition of an asset or liability in a transaction other than a business combination and when the transaction affects neither accounting nor taxable profit or loss.

Deferred income tax is determined using tax rates pursuant to laws or regulations that have been enacted or substantially enacted by the end of reporting date and are expected to apply when the related deferred income tax asset is realised or the deferred income tax liability is settled. Deferred tax assets are recognised only to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which the temporary differences can be utilised.

Deferred income tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right to offset current tax assets against current tax liabilities and when the deferred income tax assets and liabilities relate to income taxes levied by the same taxation authority on either the same taxable entity or different taxable entities where there is an intention to settle the balances on a net basis.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/17 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL
(lanjutan)**

m. Perpajakan (lanjutan)

Pendapatan usaha Grup ada yang terkena pajak penghasilan final. Penghasilan Grup atas pendapatan dari jasa perkapalan yang diberikan kepada perusahaan domestik dikenakan pajak final dengan tarif 1,20% sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan di Indonesia.

n. Liabilitas imbalan kerja

(i) Kewajiban jangka pendek

Liabilitas untuk upah dan gaji, termasuk imbalan non-moneter dan akumulasi cuti sakit yang akan diselesaikan dalam waktu 12 bulan setelah akhir dari periode ketika pekerja memberikan jasa yang berhubungan diakui hingga jasa yang diberikan hingga akhir dari periode pelaporan dan dihitung pada jumlah yang diperkirakan akan dibayar ketika liabilitas diselesaikan. Liabilitas disajikan sebagai kewajiban imbalan kerja masa kini pada neraca.

(ii) Kewajiban pensiun

Program pensiun imbalan pasti adalah program pensiun yang menentukan jumlah imbalan pensiun yang akan diberikan, biasanya berdasarkan satu faktor atau lebih seperti usia, masa kerja, atau kompensasi.

Grup menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti untuk seluruh karyawan tetap yang memenuhi syarat. Program dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan ("DPLK") Dana Pensiun Pertamina.

Grup harus menyediakan imbalan pensiun dengan jumlah minimal sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja No. 6/2023 (sebelumnya Undang-Undang Cipta Kerja No. 2/2022) yang berlaku atau Kontrak Kerja Bersama ("KKB"), mana yang lebih tinggi. Karena UU Cipta Kerja atau KKB menentukan rumus tertentu untuk menghitung jumlah minimal imbalan pensiun, pada dasarnya program pensiun berdasarkan Undang-Undang atau KKB adalah program pensiun imbalan pasti.

Kewajiban program pensiun imbalan pasti yang diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian adalah nilai kini kewajiban imbalan pasti pada tanggal akhir periode dikurangi nilai wajar aset program.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)**

m. Taxation (continued)

Certain revenues are subject to final income tax. The Group's vessel charter income provided to Indonesian companies is subject to a final tax at a rate of 1.20% and under the Taxation Laws of Indonesia.

n. Employee benefits liabilities

(i) Short term obligations

Liabilities for wages and salaries, including non-monetary benefits and accumulating sick leave that are expected to be settled wholly within 12 months after the end of the period in which the employees render the related service are recognised in respect of employees' services up to the end of the reporting period and are measured at the amounts expected to be paid when the liabilities are settled. The liabilities are presented as current employee benefit obligations in the balance sheet

(ii) Pension obligations

A defined benefit plan is a pension plan that defines an amount of pension benefit to be provided, usually as a function of one or more factors such as age, years of service, or compensation.

The Group established a defined benefit pension plan covering all of its qualified permanent employees. The plan is managed by Dana Pensiun Lembaga Keuangan ("DPLK") Dana Pensiun Pertamina.

The Group is required to provide a minimum amount of pension benefits in accordance with prevailing Job Creation Law No. 6/2023 ("the Law") (previously Job Creation Law No. 2/2022) or the Group's Collective Agreement ("CLA"), whichever is higher. Since the Law and the CLA set the formula for determining the minimum amount of benefits, in substance pension plans under the Law or the CLA represent defined benefit plans.

The liability recognised in the consolidated statement of financial position in respect of the defined benefit pension plan is the present value of the defined benefit obligation at the period end date less the fair value of plan assets.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/18 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL
(lanjutan)**

n. Liabilitas imbalan kerja (lanjutan)

(ii) Kewajiban pensiun (lanjutan)

Kewajiban imbalan pasti dihitung setiap tahun oleh aktuaris independen menggunakan metode *projected unit credit*. Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskonto estimasi arus kas keluar masa depan menggunakan tingkat bunga obligasi pemerintah (dengan pertimbangan saat ini tidak ada pasar aktif untuk obligasi korporat berkualitas tinggi) dalam mata uang yang sama dengan mata uang imbalan yang akan dibayarkan dan memiliki jangka waktu jatuh tempo mendekati jangka waktu kewajiban pensiun.

Biaya bunga bersih dihitung dengan menerapkan tingkat diskonto terhadap saldo bersih kewajiban imbalan pasti dan nilai wajar aset program. Biaya ini termasuk dalam beban imbalan kerja dalam laporan laba rugi.

Biaya jasa kini dari program pensiun imbalan pasti diakui dalam laporan laba rugi pada beban imbalan kerja dimana mencerminkan peningkatan kewajiban imbalan pasti yang dihasilkan dari jasa karyawan dalam tahun berjalan.

Biaya jasa lalu diakui secara langsung di laporan laba rugi.

Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian dan perubahan asumsi aktuarial dibebankan atau dikreditkan ke laba komprehensif lainnya dan merupakan bagian dari cadangan lainnya pada tahun dimana terjadinya perubahan tersebut.

(iii) Imbalan kerja jangka panjang lainnya

Imbalan kerja jangka panjang lainnya, yang terdiri dari penghargaan masa kerja, diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian berdasarkan nilai kini dari kewajiban imbalan pasti. Keuntungan dan kerugian aktuarial serta biaya jasa lalu diakui secara langsung di laporan laba rugi.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)**

n. Employee benefits liabilities (continued)

(ii) Pension obligations (continued)

The defined benefit obligation is calculated annually by independent actuaries using the projected unit credit method. The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using interest rates of high-quality government bonds (considering that currently there is no deep market for high-quality corporate bonds) that are denominated in the currency in which the benefit will be paid, and that have terms to maturity approximating the terms of the related pension obligation.

The net interest cost is calculated by applying the discount rate to the net balance of the defined benefit obligation and the fair value of plan assets. This cost is included in employee benefit expense in the statement of profit or loss.

The current service cost of the defined benefit plan is recognised in the profit or loss in employee benefits expenses reflecting the increase in the defined benefit obligation resulting from employee service in the current year.

Past service costs are recognised immediately in the profit or loss.

Actuarial gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are charged or credited to other comprehensive income and presented as part of other reserves in the year in which they arise.

(iii) Other long-term employee benefits

Other long-term employee benefits, which consist of long service rewards, are recognised in the consolidated statements of financial position at the present value of the defined benefit obligation. The actuarial gains and losses and past service costs are recognised immediately in profit or loss.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/19 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL
(lanjutan)**

n. Liabilitas imbalan kerja (lanjutan)

(iv) Pesangon pemutus kontrak kerja

Pesangon pemutusan kontrak kerja terutang ketika Grup memberhentikan hubungan kerja sebelum usia pensiun normal, atau ketika seorang pekerja menerima penawaran mengundurkan diri secara sukarela dengan kompensasi imbalan pesangon. Grup mengakui pesangon pemutusan kontrak kerja pada tanggal yang lebih awal antara (i) ketika Grup tidak dapat lagi menarik tawaran atas imbalan tersebut dan (ii) ketika Grup mengakui biaya untuk restrukturisasi yang berada dalam ruang lingkup PSAK 237 "Provisi, Liabilitas Kontijensi dan Aset Kontijensi" dan melibatkan pembayaran pesangon. Dalam hal menyediakan pesangon sebagai penawaran untuk mengundurkan diri secara sukarela, pesangon pemutusan kontrak kerja diukur berdasarkan jumlah karyawan yang diharapkan menerima penawaran tersebut. Imbalan yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah periode pelaporan didiskontokan menjadi nilai kininya

(v) Program bonus

Grup mengakui liabilitas dan beban untuk bonus berdasarkan rumusan yang mempertimbangkan laba yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham setelah penyesuaian tertentu. Grup mengakui provisi ketika diwajibkan secara kontrak atau terdapat praktik masa lalu yang menyebabkan kewajiban konstruktif.

Jumlah program bonus yang diprovisikan dan akan dibayarkan dalam kurun waktu kurang dari 12 bulan sejak tanggal laporan keuangan, disajikan di laporan posisi keuangan sebagai "Akrual dan Provisi".

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)**

n. Employee benefits liabilities (continued)

(iv) Termination benefits

Termination benefits are payable when employment is terminated by the Group before the normal retirement date, or whenever an employee accepts voluntary redundancy in exchange for these benefits. The group recognises termination benefits at the earlier of the following dates: (i) when the group can no longer withdraw the offer of those benefits; and (ii) when the entity recognises costs for a restructuring that is within the scope of SFAS 237 "Provision, Contingent Liabilities and Contingent Assets" and involves the payment of termination benefits. In the case of an offer made to encourage voluntary redundancy, the termination benefits are measured based on the number of employees expected to accept the offer. Benefits falling due more than 12 months after the reporting date are discounted to their present value.

(v) Bonus plans

The Group recognises a liability and an expense for bonuses, based on a formula that takes into consideration the profit attributable to the Company's shareholders after certain adjustments. The Group recognises a provision where contractually obliged or where there is a past practice that has created a constructive obligation.

Provision amount of bonus plans which will be paid within 12 months from reporting date is presented in statement of financial position as "Accruals and Provisions".

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/20 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL
(lanjutan)**

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)**

o. Instrumen keuangan

o. Financial instruments

1. Aset keuangan

1. Financial assets

Klasifikasi

Classification

Grup mengklasifikasikan aset keuangannya dalam kategori pengukuran berikut:

The Group classifies its financial assets in the following measurement categories:

- aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar, (baik melalui penghasilan komprehensif lain, atau melalui laba rugi), dan
- aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi.

- *those to be measured subsequently at fair value (either through other comprehensive income, or through profit or loss), and*
- *those to be measured at amortised cost.*

Klasifikasi tersebut tergantung pada model bisnis entitas untuk mengelola aset keuangan dan persyaratan kontraktual arus kas.

The classification depends on the entity's business model for managing the financial assets and the contractual terms of the cash flows.

Untuk aset yang diukur pada nilai wajar, keuntungan dan kerugian akan dicatat dalam laporan laba rugi atau penghasilan komprehensif lain. Untuk investasi pada instrumen utang, hal ini akan bergantung pada model bisnis dimana investasi tersebut diadakan. Untuk investasi pada instrumen ekuitas yang tidak dimiliki untuk diperdagangkan, hal ini akan tergantung pada apakah grup telah melakukan pemilihan tak terbatalakan pada saat pengakuan awal untuk mencatat investasi ekuitas pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

For assets measured at fair value, gains and losses will either be recorded in profit or loss or other comprehensive income. For investments in debt instruments, this will depend on the business model in which the investment is held. For investments in equity instruments that are not held for trading, this will depend on whether the group has made an irrevocable election at the time of initial recognition to account for the equity investment at fair value through other comprehensive income.

Grup melakukan reklasifikasi instrumen utang jika dan hanya jika terdapat perubahan model bisnis atas aset keuangan tersebut.

The Group reclassifies debt instruments when and only when its business model for managing those assets changes.

Pengakuan dan pengukuran

Recognition and measurement

Pada pengakuan awal, grup mengukur aset keuangan pada nilai wajarnya ditambah, dalam hal aset keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan aset keuangan. Biaya transaksi dari aset keuangan yang dicatat pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dibebankan pada laporan laba rugi.

At initial recognition, the group measures a financial asset at its fair value plus, in the case of a financial asset not at fair value through profit or loss, transaction costs that are directly attributable to the acquisition of the financial asset. Transaction costs of financial assets carried at fair value through profit or loss are expensed in profit or loss.

Instrumen utang

Debt instruments

Pengukuran selanjutnya atas instrumen utang bergantung kepada model bisnis Grup dalam mengelola aset dan karakteristik dari arus kas. Terdapat tiga kategori pengukuran dalam mengklasifikasikan instrumen utang:

Subsequent measurement of debt instruments depends on the business model for managing the asset and the cash flow characteristics of the asset. There are three measurement categories into which the group classifies its debt instruments:

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/21 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL
(lanjutan)

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)

o. Instrumen keuangan (lanjutan)

o. Financial instruments (continued)

1. Aset keuangan (lanjutan)

1. Financial assets (continued)

Pengakuan dan pengukuran (lanjutan)

Recognition and measurement
(continued)

Instrumen utang (lanjutan)

Debt instruments (continued)

- Biaya perolehan diamortisasi: Aset yang dimiliki untuk pengumpulan arus kas kontraktual, dimana arus kas tersebut merupakan pembayaran pokok dan bunga, diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Penghasilan bunga dari aset keuangan ini termasuk dalam penghasilan keuangan menggunakan metode suku bunga efektif. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan diakui secara langsung dalam laporan laba rugi dan disajikan dalam keuntungan/(kerugian) lainnya bersama dengan keuntungan dan kerugian selisih kurs. Penurunan nilai aset keuangan disajikan terpisah dalam laporan laba rugi.
- Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ("FVOCI"): Aset yang dimiliki untuk pengumpulan arus kas kontraktual dan untuk penjualan keuangan aset, dimana arus kas aset merupakan pembayaran pokok dan bunga diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Mutasi dalam jumlah tercatat dilakukan melalui penghasilan komprehensif lain, kecuali untuk pengakuan keuntungan atau kerugian penurunan nilai, pendapatan bunga dan keuntungan dan kerugian selisih kurs, yang diakui dalam laporan laba rugi. Ketika aset keuangan dihentikan pengakuannya, akumulasi keuntungan atau kerugian yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laporan laba rugi pada pendapatan/(beban) lain-lain. Pendapatan bunga dari aset keuangan ini termasuk dalam penghasilan keuangan menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan dan kerugian selisih kurs disajikan pada pendapatan/(beban) lain-lain.

- *Amortised cost: Assets that are held for collection of contractual cash flows, where those cash flows solely represent payments of principal and interest, are measured at amortised cost. Interest income from these financial assets is included in finance income using the effective interest rate method. Any gain or loss arising on derecognition is recognised directly in profit or loss and presented in other gains/(losses) together with foreign exchange gains and losses. Impairment losses are presented as a separate line item in the profit or loss.*
- *Fair value through other comprehensive income ("FVOCI"): Assets that are held for collection of contractual cash flows and for selling the financial assets, where payments of principal and interest are measured at FVOCI. Movements in the carrying amount are taken through OCI, except for the recognition of impairment gains or losses, interest income and foreign exchange gains and losses, which are recognised in profit or loss. When the financial asset is derecognised, the cumulative gain or loss previously recognised in OCI is reclassified from equity to profit or loss and recognised in other income/(expenses). Interest income from these financial assets is included in finance income using the effective interest rate method. Foreign exchange gains and losses are presented in other income/(expenses).*

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/22 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL
(lanjutan)**

o. Instrumen keuangan (lanjutan)

1. Aset keuangan (lanjutan)

Pengakuan dan pengukuran (lanjutan)

Instrumen ekuitas

Grup selanjutnya mengukur semua investasi ekuitas pada nilai wajar. Dimana manajemen Grup telah memilih untuk menyajikan keuntungan dan kerugian nilai wajar dari investasi ekuitas pada penghasilan komprehensif lain. Tidak ada reklasifikasi selanjutnya atas keuntungan dan kerugian dari nilai wajar ke laba rugi setelah penghentian pengakuan investasi. Dividen dari investasi tersebut terus diakui dalam laporan laba rugi sebagai penghasilan lainnya ketika hak Grup untuk menerima pembayaran ditetapkan. Investasi pada instrumen ekuitas tidak diuji penurunan nilai.

2. Penurunan nilai aset keuangan

Grup menerapkan pendekatan yang disederhanakan untuk mengukur Kerugian Kredit Ekspektasian (KKE) yang menggunakan cadangan KKE seumur hidup berdasarkan basis *forward-looking* untuk seluruh saldo piutang usaha dan kontrak aset tanpa komponen pendanaan yang signifikan. Selain untuk piutang usaha dan kontrak aset tanpa komponen pendanaan yang signifikan, Grup menerapkan pendekatan umum untuk mengukur KKE.

Grup menilai dengan basis *forward-looking* kerugian kredit ekspektasian terkait dengan instrumen utangnya yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Metodologi penurunan nilai yang diterapkan tergantung pada apakah telah terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan. Catatan 3 merinci bagaimana grup menentukan apakah telah terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)**

o. Financial instruments (continued)

1. Financial assets (continued)

Recognition and measurement (continued)

Equity instruments

The Group subsequently measures all equity investments at fair value. Where the Group's management has elected to present fair value gains and losses on equity investments in OCI, there is no subsequent reclassification of fair value gains and losses to profit or loss following the derecognition of the investment. Dividends from such investments continue to be recognised in profit or loss as other income when the Group's right to receive payments is established. Equity investments are not tested for impairment.

2. Impairment of financial assets

The Group applies the "simplified approach" to measure the Expected Credit Loss (ECL) which uses a lifetime expected loss allowance on a forward-looking basis for all trade receivables and contract assets without significant financing component. Other than trade receivables and contract assets without significant financing component, the Group applies general model to ensure ECL.

The Group assesses on a forward-looking basis the expected credit losses associated with its debt instruments carried at amortised cost and FVOCI. The impairment methodology applied depends on whether there has been a significant increase in credit risk. Note 3 details how the group determines whether there has been a significant increase in credit risk.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/23 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL
(lanjutan)**

o. Instrumen keuangan (lanjutan)

3. Instrumen keuangan disalinghapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan jumlah netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan. Hak saling hapus tidak kontingen atas peristiwa di masa depan dan dapat dipaksakan secara hukum dalam situasi bisnis yang normal dan dalam peristiwa gagal bayar, atau peristiwa kepailitan atau kebangkrutan Grup atau pihak lawan.

p. Provisi

Provisi atas tuntutan hukum diakui ketika: Grup memiliki kewajiban hukum atau konstruktif masa kini sebagai akibat peristiwa masa lalu; terdapat kemungkinan besar penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya; dan jumlah kewajiban tersebut dapat diukur secara andal. Provisi tidak diakui untuk kerugian operasi masa depan.

Ketika terdapat beberapa kewajiban yang serupa, kemungkinan penyelesaian mengakibatkan arus keluar ditentukan dengan mempertimbangkan kelas kewajiban secara keseluruhan. Provisi diakui walaupun kemungkinan adanya arus keluar sehubungan dengan item manapun yang termasuk dalam kelas kewajiban yang sama mungkin kecil.

Provisi diukur sebesar nilai kini dari estimasi terbaik manajemen atas pengeluaran yang diharapkan diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan. Tingkat diskonto yang digunakan untuk menentukan nilai kini adalah tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar atas nilai waktu uang dan risiko yang terkait dengan kewajiban. Peningkatan provisi karena berjalannya waktu diakui sebagai beban bunga.

q. Modal saham

Saham biasa diklasifikasikan sebagai ekuitas, Biaya tambahan yang secara langsung dapat diatribusikan kepada penerbitan saham baru atau opsi disajikan pada ekuitas sebagai pengurang penerimaan, setelah dikurangi pajak.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)**

o. Financial instruments (continued)

3. Offsetting of financial instruments

Financial assets and liabilities are offset and the net amount is reported in the statement of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognised amounts and there is an intention to settle on a net basis, or realise the asset and settle the liability simultaneously. The legally enforceable right must not be contingent on future events and must be enforceable in the normal course of business and in the event of default in solvency or bankruptcy of the company or the counterparty.

p. Provision

Provision for legal claims is recognised when: the Group has a present legal or constructive obligation as a result of past events; it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation; and the amount has been reliably estimated. Provision is not recognised for future operating losses.

Where there are a number of similar obligations, the likelihood that an outflow will be required in settlement is determined by considering the class of obligations as a whole. A provision is recognised even if the likelihood of an outflow with respect to any one item included in the same class of obligations may be small.

Provisions are measured at the present value of management's best estimate of the expenditure required to settle the present obligation at the end of the reporting period. The discount rate used to determine the present value is a pre-tax rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the liability. The increase in the provision due to the passage of time is recognised as interest expense.

q. Share capital

Ordinary shares are classified as equity, Incremental costs directly attributable to the issue of new shares or options are shown in equity as a deduction, net of tax, from the proceeds.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/24 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL
(lanjutan)**

r. Dividen

Pembayaran dividen kepada pemegang saham Perusahaan diakui sebagai liabilitas dalam laporan keuangan konsolidasian Grup dalam periode dimana pembagian dividen diumumkan.

s. Pengakuan pendapatan dan beban

Pendapatan

Pengakuan pendapatan harus memenuhi lima langkah analisa sebagai berikut:

1. Identifikasi kontrak dengan pelanggan;
2. Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan;
3. Penetapan harga transaksi, Harga transaksi merupakan jumlah imbalan yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diteruskannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan. Jika imbalan yang dijanjikan di kontrak mengandung suatu jumlah yang bersifat variabel, maka Grup membuat estimasi jumlah imbalan tersebut sebesar jumlah yang diharapkan berhak diterima atas diteruskannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan dikurangi dengan estimasi jumlah jaminan kinerja jasa yang akan dibayarkan selama periode kontrak;
4. Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di yang tertuang dalam nilai kontrak. Ketika tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diperkirakan berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah margin; dan
5. Pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki kendali atas barang atau jasa tersebut).

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)**

r. Dividends

Dividend distributions to the Company's shareholders are recognised as a liability in the Group's consolidated financial statements in the period in which the dividends are declared.

s. Revenue and expense recognition

Revenue

Revenue recognition has to fulfill five steps of assessment:

1. *Identify contract(s) with customer;*
2. *Identify the performance obligations in the contract. Performance obligations are promises in a contract to transfer to a customer goods or services that are distinct;*
3. *Determine the transaction price, Transaction price is the amount of consideration to which an entity expects to be entitled in exchange for transferring promised goods or services to a customer. If the consideration promised in a contract includes a variable amount, the Group estimates the amount of consideration to which it expects to be entitled in exchange for transferring the promised goods or services to a customer less the estimated amount of service level guarantee which will be paid during the contract period;*
4. *Allocate the transaction price to each performance obligation on the basis of the relative stand-alone selling prices of each of the distinct goods or services promised in the contract. Where these are not directly observable, the relative standalone selling price is estimated based on expected cost plus margin; and*
5. *Recognise revenue when performance obligation is satisfied by transferring a promised goods or services to a customer (which is when the customer obtains control of said goods or services).*

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/25 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL
(lanjutan)

s. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

Pendapatan (lanjutan)

Kewajiban pelaksanaan dapat dipenuhi dengan cara sebagai berikut:

- a. Suatu titik waktu (umumnya janji untuk menyerahkan barang ke pelanggan); atau
- b. Suatu periode waktu (umumnya janji untuk menyerahkan jasa ke pelanggan). Untuk kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi dalam suatu periode waktu, Grup memilih ukuran penyelesaian yang sesuai untuk penentuan jumlah pendapatan yang harus diakui karena telah terpenuhinya kewajiban pelaksanaan.

Pembayaran harga transaksi berbeda untuk setiap kontrak. Aset kontrak diakui ketika jumlah penerimaan dari pelanggan kurang dari saldo kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi. Kewajiban kontrak diakui ketika jumlah penerimaan dari pelanggan lebih dari saldo kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi.

Sewa kapal

Pendapatan dari jasa penyewaan kapal diakui dalam laba rugi sepanjang waktu jasa sewa kepada pelanggan dengan ukuran berbasis waktu.

Jasa penunjang operasi *marine*

Pendapatan dari jasa penunjang operasi *marine* diakui sepanjang waktu berdasarkan aktivitas kontrak operasional atas segmen bisnis pada periode pelaporan. Tingkat penyelesaian aktivitas transaksi ditentukan dengan memperhatikan survei pekerjaan yang telah dilaksanakan pada periode kontrak.

Keagenan kapal dan jasa kepelabuhanan

Pendapatan dari keagenan kapal dan jasa kepelabuhanan diakui sepanjang waktu untuk segmen bisnis pihak berelasi dan titik waktu tertentu untuk pihak ketiga berdasarkan aktivitas kontrak operasional pada periode pelaporan. Tingkat penyelesaian aktivitas transaksi ditentukan dengan memperhatikan survei pekerjaan yang telah dilaksanakan pada periode kontrak.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)

s. Revenue and expense recognition (continued)

Revenue (continued)

A performance obligation may be satisfied at the following:

- a. A point in time (typically for promises to transfer goods to a customer); or*
- b. Over time (typically for promises to transfer services to a customer). For a performance obligation satisfied over time, the Group selects an appropriate measure of progress to determine the amount of revenue that should be recognised as the performance obligation is satisfied.*

Payment of the transaction price differs for each contract. A contract asset is recognised when the consideration paid by the customer is less than the balance of performance obligation which has been satisfied. A contract liability is recognised when the consideration paid by the customer is more than the balance of performance obligation which has been satisfied.

Vessel charter

Revenue from vessel charter is recognised in the profit or loss over time over the charter service period to the customer using time based measure.

Marine operations support services

Revenues from marine operation support services are recognised overtime based on operating contract activities for business segments in the reporting period. The level of completion of transaction activities is determined by reference to surveys of work performed during the contract period.

Shipping agency and port services

Revenues from shipping agency and port services are recognised over time for the related party business segment and point in time for third parties based on operating contract activities in the reporting period. The level of completion of transaction activities is determined by reference to surveys of work that has been performed during the contract period.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/26 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL
(lanjutan)**

s. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

Pendapatan (lanjutan)

Penyediaan tenaga kerja

Pendapatan dari jasa penyediaan tenaga kerja diakui sepanjang waktu berdasarkan aktivitas kontrak operasional pada periode pelaporan. Penyelesaian aktivitas transaksi ditentukan dengan pekerjaan yang telah dilaksanakan berdasarkan kontrak.

Jasa broker kapal

Pendapatan jasa broker kapal diakui dalam titik waktu tertentu ketika transaksi sewa *back-to-back* terjadi dan disajikan secara neto setelah memperhitungkan beban langsung yang terkait, saat Grup bertindak sebagai agen.

Perdagangan umum

Pendapatan dari perdagangan umum diakui pada satu titik waktu tertentu berdasarkan aktivitas kontrak operasional. Penyelesaian aktivitas transaksi ditentukan dengan pekerjaan.

Grup bertindak sebagai agen apabila aktivitas dalam jasa keagenan (pemenuhan kewajiban pelaksanaan) dilakukan oleh pihak ketiga dan tarif yang ditagihkan ke pelanggan berdasarkan biaya aktual.

Pendapatan lainnya terdiri dari "pengerukan", "air bersih", "perdagangan umum", "bongkar muat", "pendapatan komisi" dan "pengoperasian kapal".

Beban dari kontrak dengan pelanggan

Biaya yang secara langsung berhubungan dengan kontrak dan menghasilkan meningkatkan atau meningkatkan sumber daya untuk memenuhi kontrak ("biaya untuk memenuhi") dan biaya inkremental untuk mendapatkan kontrak ("biaya untuk memperoleh") diakui sebagai aset bila biaya tersebut memenuhi syarat untuk dikapitalisasi berdasarkan PSAK 115 "Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan" dan diharapkan akan dipulihkan. Aset ini diamortisasi dengan dasar sistematis yang konsisten dengan pengalihan atas barang atau jasa yang berkaitan dengan aset tersebut.

Beban lainnya

Beban diakui pada saat terjadinya dengan dasar akrual.

Penerapan panduan praktis

Grup memilih untuk menerapkan panduan praktis untuk mengakui biaya yang terjadi untuk mendapatkan kontrak sebagai beban saat terjadinya jika periode amortisasi aset tersebut adalah satu tahun atau kurang.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)**

s. Revenue and expense recognition (continued)

Revenue (continued)

Labor supply services

Revenue from manpower supply services is recognised overtime based on the operating contract activities in the reporting period. The level of completion of transaction activities is determined by work that has been performed based on the contract.

Charter broker services

Charter broker services are recognised at a point in time when back-to-back charter transactions occurred and is presented on a net basis after taking into account the underlying direct expenses, when the Group acts as an agent.

General trading

Revenue from general trading is recognised at point in time based on operating contract activities. The completion of transaction activities is determined by work that has been performed based on contract.

The Group is an agent when activities in agency services (fulfillment of performance obligations) are carried out by a third party and the tariff billed to customers are based on actual costs from the third party.

Other revenue comprises "dredging", "clean water", "general trading", "cargo handling", "commission income" and "vessel operation services".

Expenses from contracts with customers

The costs that directly relate to the contract generate or enhance resources to satisfy the contract ("cost to fulfill") and incremental costs of obtaining a contract ("cost to obtain") are recognised as assets if they meet the criteria for capitalisation under SFAS 115 "Revenue from contract with customer" and expected to be recovered. These assets are amortised on a systematic basis that is consistent with the transfer to the customer of the goods or services to which the assets relate.

Other expenses

Expenses are recognised as incurred on an accrual basis.

Application of practical expedient

The Group applies the practical expedient to recognise the incremental cost of obtaining a contract as an expense when incurred if the amortisation period of the asset that the Group otherwise would have recognised is one year or less.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/27 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI
YANG PENTING**

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah pendapatan, beban, aset dan liabilitas, pengungkapan nilai aset dan liabilitas kontinjensi pada akhir periode pelaporan. Estimasi, asumsi, dan pertimbangan akan dievaluasi secara berkelanjutan dan didasarkan pada pengalaman masa lalu dan faktor-faktor lainnya, termasuk ekspektasi terhadap kejadian masa depan yang diyakini cukup beralasan dalam situasi tertentu.

Grup telah mengidentifikasi kebijakan-kebijakan akuntansi penting berikut yang melibatkan pertimbangan, estimasi, dan asumsi yang signifikan dimana hasil yang sebenarnya dapat berbeda dari estimasi-estimasi yang dibuat berdasarkan asumsi dan kondisi yang berbeda pada saat itu dan kemungkinan dapat mempengaruhi hasil atau posisi keuangan secara material yang dilaporkan dalam periode mendatang.

Estimasi dan asumsi

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada akhir periode pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun finansial berikutnya, diungkapkan di bawah ini. Grup mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan konsolidasian disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Grup. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

a. Rugi penurunan nilai piutang

Grup menghitung KKE piutang usaha dan aset kontrak. Tingkat provisi adalah berdasarkan hari jatuh tempo atas kelompok segmen pelanggan yang mempunyai karakteristik risiko kredit yang serupa.

Grup menyesuaikan pengalaman kerugian kredit historis dengan informasi *forward-looking*. Sebagai contoh, jika prakiraan atas kondisi ekonomi diperkirakan memburuk selama periode/tahun depan, yang dapat menyebabkan meningkatnya jumlah gagal bayar, tingkat gagal bayar historis disesuaikan. Pada setiap tanggal pelaporan, tingkat gagal bayar historis diperbaharui dan perubahan estimasi *forward-looking* dianalisis.

3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGEMENTS AND ESTIMATES

The preparation of the Group's consolidated financial statements requires management to make judgements, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities and the disclosure of contingent assets and liabilities at the end of the reporting period. Estimates, assumptions and judgements are continually evaluated and are based on historical experience and other factors, including expectations of future events that are believed to be reasonable under the circumstances.

The Group has identified the following critical accounting policies under which significant judgements, estimates and assumptions are made and where actual results may differ from these estimates under different assumptions and conditions and may materially affect the financial results or the financial position reported in future periods.

Estimation and assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that carry a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are disclosed below. The Group based its assumptions and estimates on parameters available when the consolidated financial statements were prepared. Existing assumptions and circumstances about future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Group. Such changes are reflected in the assumptions as they occur.

a. Impairment loss on receivables

The Group calculates ECL for trade receivables and contract assets. The provision rates are based on days past due for groupings of various customer segments that have similar credit risk characteristics.

The Group adjusts the historical credit loss experience with forward-looking information. For instance, if forecast economic conditions are expected to deteriorate over the next period/year, which can lead to an increased number of defaults, the historical default rates are adjusted. At every reporting date, the historical observed default rates are updated and changes in the forward-looking estimates are analysed.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/28 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI
YANG PENTING (lanjutan)**

Estimasi dan asumsi (lanjutan)

b. Rugi penurunan nilai piutang (lanjutan)

Penilaian atas korelasi antara tingkat gagal bayar historis yang diobservasi, prakiraan atas kondisi ekonomi dan KKE merupakan estimasi yang signifikan. Jumlah KKE paling dipengaruhi oleh perubahan keadaan dan prakiraan kondisi ekonomi. Pengalaman kerugian kredit historis Grup dan prakiraan kondisi ekonomi juga mungkin tidak menggambarkan gagal bayar aktual pelanggan di masa yang akan datang.

c. Estimasi masa manfaat aset tetap

Grup mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap berdasarkan utilisasi dari aset yang diharapkan dan didukung dengan rencana dan strategi usaha dan perilaku pasar. Estimasi dari masa manfaat aset tetap adalah berdasarkan penelaahan Grup terhadap praktek industri, evaluasi teknis internal dan pengalaman untuk aset yang setara. Estimasi masa manfaat ditelaah minimal setiap akhir tahun pelaporan dan diperbarui jika ekspektasi berbeda dari estimasi sebelumnya dikarenakan pemakaian dan kerusakan fisik, keusangan secara teknis atau komersial dan hukum atau pembatasan lain atas penggunaan dari aset.

Tetapi, adalah mungkin, hasil di masa depan dari operasi dapat dipengaruhi secara material oleh perubahan-perubahan dalam estimasi yang diakibatkan oleh perubahan faktor-faktor yang disebutkan di atas.

Grup mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara 5 sampai dengan 25 tahun. Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri dimana Grup menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi. Lihat Catatan 9 untuk pengungkapan lebih lanjut.

**3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGEMENTS AND
ESTIMATES (continued)**

Estimation and assumptions (continued)

b. Impairment loss on receivables (continued)

The assessment of the correlation between historical observed default rates, forecast economic conditions and ECLs is a significant estimate. The amount of ECLs is sensitive to changes in circumstances and of forecast economic conditions. The Group's historical credit loss experience and forecast of economic conditions may also not be representative of customers' actual default in the future.

c. Estimating the useful lives of fixed assets

The Group estimates the useful lives of its fixed assets based on expected asset utilisation, as anchored to business plans and strategies that also consider expected market behaviour. The estimation of the useful lives of fixed assets is based on the Group's assessment of industry practice, internal technical evaluation and experience with similar assets. The estimated useful lives are reviewed at least at each financial year end and are updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence and legal or other limitations on the use of the assets.

It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the estimates brought about by changes in the factors mentioned above.

The Group estimates the useful lives of these fixed assets to be within 5 and 25 years. These are common life expectancies applied in the industry where the Group conducts its business. Changes in the expected level of usage and technological development could have an impact on the economic useful lives and the residual values of these assets and therefore future depreciation charges could be revised. Further details are disclosed in Note 9.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/29 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI
YANG PENTING (lanjutan)**

Estimasi dan asumsi (lanjutan)

b. Imbalan pasca kerja

Nilai kini kewajiban pensiun tergantung pada sejumlah faktor yang ditentukan berdasarkan basis dari aktuarial dengan menggunakan sejumlah asumsi. Asumsi yang digunakan dalam menentukan beban/(pendapatan) bersih untuk pensiun termasuk tingkat diskonto, perubahan remunerasi masa depan, tingkat pengurangan karyawan, tingkat harapan hidup, dan tahun sisa yang diharapkan dari masa aktif karyawan. Setiap perubahan dalam asumsi-asumsi ini akan berdampak pada nilai tercatat atas kewajiban pensiun.

Grup menentukan tingkat diskonto yang sesuai pada setiap akhir tahun. Tingkat suku bunga inilah yang digunakan untuk menentukan nilai kini dari estimasi arus kas keluar masa depan yang akan dibutuhkan untuk memenuhi kewajiban pensiun.

Dalam menentukan tingkat diskonto yang sesuai, Grup menggunakan tingkat suku bunga obligasi korporat berkualitas tinggi (atau obligasi pemerintah, dengan pertimbangan saat ini tidak ada pasar aktif untuk obligasi korporat berkualitas tinggi) dalam mata uang yang sama dengan mata uang imbalan yang akan dibayarkan dan memiliki waktu jatuh tempo yang kurang lebih sama dengan waktu jatuh tempo kewajiban pensiun yang bersangkutan. Asumsi kunci lainnya untuk kewajiban pensiun didasarkan sebagian pada kondisi pasar saat ini.

d. Pajak penghasilan dan pajak lainnya

Pertimbangan dan asumsi diperlukan dalam menentukan pengurangan biaya tertentu ketika mengestimasi penyisihan pajak penghasilan untuk setiap perusahaan dalam Grup. Terdapat transaksi dan perhitungan yang dapat menyebabkan ketidakpastian dalam penentuan kewajiban pajak selama kegiatan usaha normal. Apabila terdapat perbedaan perhitungan pajak dengan jumlah yang telah dicatat, perbedaan tersebut akan berdampak pada penetapan pajak penghasilan dan pajak penghasilan yang ditangguhkan dalam tahun penentuan pajak tersebut.

Grup mengestimasi bagian final atas biaya umum yang tidak dapat dipisahkan antara bagian pajak penghasilan final dan tidak final dengan alokasi secara proporsional berdasarkan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final terhadap penghasilan bruto.

**3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGEMENTS AND
ESTIMATES (continued)**

Estimation and assumptions (continued)

c. Post-employment benefit

The present value of the pension obligation depends on a number of factors that are determined on an actuarial basis using a number of assumptions. The assumptions used in determining the net cost/(income) for pensions include the discount rate, future remuneration changes, employee attrition rates, life expectancy and expected remaining years of service of employees. Any changes in these assumptions will have an impact on the carrying amount of the pension obligation.

The Group determines the appropriate discount rate at the end of each year. This is the interest rate that should be used to determine the present value of estimated future cash outflows expected to be required to settle the related pension obligation.

In determining the appropriate discount rate, the Group considers the interest rates of high-quality corporate bonds (or government bonds, if there is no deep market for high quality corporate bonds) that are denominated in the currency in which the benefits will be paid and that have terms to maturity approximating the terms of the related pension obligation. Other key assumptions for pension obligation benefits are based in part on current market conditions.

d. Income taxes and other taxes

Judgement and assumptions are required in determining the deductibility of certain expenses during the estimation of the provision for income taxes for each company within the Group. There are transactions and calculations for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business. Where the final tax outcome of these matters is different from the amounts that were initially recorded, such differences will affect the income tax and deferred income tax provisions in the year in which that determination is made.

The Group estimates the final portion of general expenses that cannot be itemised between the final and non-final income tax portion, using an allocation based on proportion of revenue subject to final income tax to the gross revenue.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/30 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI
YANG PENTING (lanjutan)**

Estimasi dan asumsi (lanjutan)

d. Pajak penghasilan dan pajak lainnya (lanjutan)

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan maupun pajak lainnya atas transaksi tertentu. Ketidakpastian timbul terkait dengan interpretasi dari peraturan perpajakan yang kompleks dan jumlah dan waktu dari penghasilan kena pajak di masa depan. Dalam menentukan jumlah yang harus diakui terkait dengan liabilitas pajak yang tidak pasti, Grup menerapkan pertimbangan yang sama yang akan digunakan dalam menentukan jumlah cadangan yang harus diakui sesuai dengan PSAK 237 "Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi". Grup membuat analisa terhadap semua posisi pajak yang terkait dengan pajak penghasilan untuk menentukan jika liabilitas pajak untuk manfaat pajak yang belum diakui harus diakui.

Grup mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 2m dan 14.

e. Penurunan nilai aset non-keuangan

Sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup, aset atau unit penghasil kas dievaluasi pada setiap periode pelaporan untuk menentukan ada tidaknya indikasi penurunan nilai aset non-keuangan.

Penentuan atas indikasi penurunan nilai memerlukan estimasi manajemen dan asumsi tentang ekspektasi volume transaksi *time charter*, harga jual *time charter* (mempertimbangkan harga saat ini dan masa lalu, tren harga dan faktor-faktor terkait), biaya operasi, dan belanja modal di masa depan. Estimasi dan asumsi ini memiliki risiko dan ketidakpastian; sehingga ada kemungkinan bahwa perubahan situasi akan mengubah proyeksi ini, yang selanjutnya dapat mempengaruhi penentuan atas indikasi penurunan nilai.

**3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGEMENTS AND
ESTIMATES (continued)**

Estimation and assumptions (continued)

d. Income taxes and other taxes (continued)

Significant judgement is involved in determining the provision for corporate income tax and other taxes on certain transactions. Uncertainties exist with respect to the interpretation of complex tax regulations and the amount and timing of future taxable income. In determining the amount to be recognised in respect of an uncertain tax liability, the Group applies similar considerations as it would use in determining the amount of a provision to be recognised in accordance with SFAS 237 "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets". The Group conducts an analysis of all tax positions related to income taxes in order to determine if a tax liability for unrecognised tax expense should be recognised.

The Group recognises liabilities for expected corporate income tax issues based on estimates of whether additional corporate income tax will be due. Further details are disclosed in Notes 2m and 14.

e. Impairment of non-financial assets

In accordance with the Group's accounting policy, an asset or a cash generating unit is evaluated at every reporting period to determine whether there are any indications of impairment of non-financial assets.

The determination of the impairment indicator requires management's estimates and assumptions regarding expected time charter transaction volumes, time charter selling prices (considering current and historical prices, price trends and related factors), operating costs and future capital expenditure. These estimates and assumptions are subject to risk and uncertainty; hence there is a possibility that changes in circumstances will alter these projections, which may have an impact on the determination of impairment indicator.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/31 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI
YANG PENTING (lanjutan)**

Estimasi dan asumsi (lanjutan)

f. Sewa

Penentuan apakah suatu perjanjian mengandung unsur sewa membutuhkan pertimbangan yang cermat untuk menilai apakah perjanjian tersebut memberikan hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset identifikasian dan hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian, bahkan jika hak tersebut tidak dijabarkan secara eksplisit di perjanjian.

Grup mempunyai beberapa perjanjian sewa di mana Grup bertindak sebagai penyewa untuk beberapa aset tertentu. Grup mengevaluasi apakah terdapat risiko dan manfaat kepemilikan yang signifikan dari aset sewaan yang dialihkan kepada berdasarkan PSAK 116, yang mensyaratkan Grup untuk membuat pertimbangan dan estimasi dari pengalihan risiko dan manfaat terkait atas kepemilikan aset sewaan.

Karena Grup tidak dapat dengan mudah menentukan suku bunga implisit, manajemen menggunakan suku bunga pinjaman inkremental Grup sebagai tingkat diskonto. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan suku bunga pinjaman inkremental, yang banyak di antaranya memerlukan pertimbangan untuk dapat secara andal mengukur penyesuaian yang diperlukan untuk sampai pada tingkat diskonto akhir. Dalam menentukan suku bunga pinjaman inkremental, Grup mempertimbangkan faktor-faktor utama berikut: risiko kredit korporat Grup, jangka waktu sewa, jangka waktu pembayaran sewa, lingkungan ekonomi, waktu di mana sewa dimasukkan, dan mata uang di mana pembayaran sewa ditentukan.

**3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGEMENTS AND
ESTIMATES (continued)**

Estimation and assumptions (continued)

f. Leases

Determining whether an arrangement is or contains a lease requires careful judgement to assess whether the arrangement conveys a right to obtain substantially all the economic benefits from use of the asset throughout the period of use and right to direct the use of the asset, even if the right is not explicitly specified in the arrangement.

The Group has various lease agreements where the Group acts as a lessee in respect of certain assets. The Group evaluates whether significant risks and rewards of ownership of the leased asset are transferred to the lessee based on SFAS 116, which requires the Group to make judgements and estimates of transfer of risks and rewards of ownership of a leased asset.

Since the Group could not readily determine the implicit rate, management used the Group's incremental borrowing rate as a discount rate. There are a number of factors to consider in determining an incremental borrowing rate, many of which need judgement in order to be able to reliably quantify any necessary adjustments to arrive at the final discount rates. In determining an incremental borrowing rate, the Group considers the following main factors: the Group's corporate credit risk, the lease term, the lease payment term, the economic environment, the time at which the lease is entered into and the currency in which the lease payments are denominated.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/32 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI
YANG PENTING (lanjutan)**

Estimasi dan asumsi (lanjutan)

f. Sewa (lanjutan)

Dalam menentukan jangka waktu sewa, Grup mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang menimbulkan insentif ekonomi untuk menggunakan opsi perpanjangan, atau tidak menggunakan opsi penghentian. Opsi perpanjangan (atau periode setelah opsi penghentian kontrak kerja) hanya termasuk dalam jangka waktu sewa jika cukup pasti akan diperpanjang (atau tidak dihentikan). Penilaian tersebut ditinjau kembali jika terjadi peristiwa signifikan atau perubahan signifikan dalam situasi yang mempengaruhi penilaian ini dan berada dalam kendali Grup.

**3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGEMENTS AND
ESTIMATES (continued)**

Estimation and assumptions (continued)

f. Leases (continued)

In determining the lease term, the Group considers all facts and circumstances that create an economic incentive to exercise an extension option, or not exercise a termination option. Extension options (or periods after termination options) are only included in the lease term if the lease is reasonably certain to be extended (or not terminated). The lease term is reviewed if a significant event or a significant change in circumstances occurs which affects this assessment and that is within the control of the Group.

4. KAS DAN SETARA KAS

4. CASH AND CASH EQUIVALENTS

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	
Kas			Cash on hand
Rupiah	401	664	Rupiah
Jumlah kas	401	664	Total cash on hand
Kas di bank			Cash in banks
Rupiah			Rupiah
Entitas berelasi dengan			Government-related
Pemerintah (Catatan 24)			entities (Note 24)
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk			PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
("Mandiri")	409,870	410,927	("Mandiri")
PT Bank Negara Indonesia			PT Bank Negara Indonesia
(Persero) Tbk ("BNI")	105,895	138,224	(Persero) Tbk ("BNI")
PT Bank Rakyat Indonesia			PT Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk ("BRI")	103,840	73,661	(Persero) Tbk ("BRI")
PT Bank Syariah Indonesia ("BSI")	27,359	80,415	PT Bank Syariah Indonesia ("BSI")
	646,964	703,227	
Pihak ketiga			Third parties
PT Bank SMBC			PT Bank SMBC
Indonesia Tbk ("SMBC")	19,650	35,395	Indonesia Tbk ("SMBC")
PT Bank Central Asia Tbk ("BCA")	445	496	PT Bank Central Asia Tbk ("BCA")
	20,095	35,891	
Jumlah rekening Rupiah	667,059	739,118	Total Rupiah accounts

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/33 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

4. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)

4. CASH AND CASH EQUIVALENTS (continued)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	
Dolar AS			US Dollar
Entitas berelasi dengan Pemerintah (Catatan 24)			Government-related entities (Note 24)
BNI	126,546	332,174	BNI
Mandiri	14,104	13,223	Mandiri
BRI	76	-	BRI
BSI	-	69	BSI
	<u>140,726</u>	<u>345,466</u>	
Pihak ketiga			Third parties
BCA	13,351	12,749	BCA
SMBC	-	29,995	SMBC
	<u>13,351</u>	<u>42,744</u>	
Jumlah rekening Dolar AS	<u>154,077</u>	<u>388,210</u>	Total US Dollar accounts
Jumlah kas di bank	<u>821,136</u>	<u>1,127,328</u>	Total cash in banks
Deposito berjangka Dolar AS			Time deposits US Dollar
Entitas berelasi dengan Pemerintah (Catatan 24)			Government-related entities (Note 24)
BNI	16,157	15,439	BNI
BSI	-	700,000	BSI
	<u>16,157</u>	<u>715,439</u>	
Pihak ketiga			Third party
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk ("BJB")	<u>371,611</u>	<u>-</u>	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk ("BJB")
Jumlah deposito berjangka	<u>387,768</u>	<u>715,439</u>	Total time deposits
Jumlah kas dan setara kas	<u>1,209,305</u>	<u>1,843,431</u>	Total cash and cash equivalents
Tingkat suku bunga tahunan deposito berjangka selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:			The annual interest rates on time deposits during the year were as follows:
	<u>2024</u>	<u>2023</u>	
Dolar AS	1,0% - 5,4%	1,0% - 7,6%	US Dollar

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/34 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

5. PIUTANG USAHA

5. TRADE RECEIVABLES

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	
Pihak berelasi (Catatan 24)	1,285,772	881,215	<i>Related parties (Note 24)</i>
Dikurangi:			<i>Less:</i>
Provisi penurunan nilai pihak berelasi	<u>(5,801)</u>	<u>(2,553)</u>	<i>Provision for doubtful accounts of related parties</i>
	<u>1,279,971</u>	<u>878,662</u>	
Pihak ketiga			<i>Third parties</i>
PT Lintas Benua Handalan	16,893	-	<i>PT Lintas Benua Handalan</i>
PT Petro Papua Mogoi Wasian	14,820	14,820	<i>PT Petro Papua Mogoi Wasian</i>
PT Andhika GAC	12,913	-	<i>PT Andhika GAC</i>
PT Spectra Samudra Line	12,736	12,736	<i>PT Spectra Samudra Line</i>
Systemindo Contr Psd	11,166	11,166	<i>Systemindo Contr Psd</i>
Lain-lain	<u>260,817</u>	<u>150,186</u>	<i>Others</i>
	329,345	188,908	
Dikurangi:			<i>Less:</i>
Provisi penurunan nilai pihak ketiga	<u>(124,247)</u>	<u>(104,728)</u>	<i>Provision for doubtful accounts of third parties</i>
	<u>205,098</u>	<u>84,180</u>	
Jumlah	<u>1,485,069</u>	<u>962,842</u>	Total

Rincian piutang usaha berdasarkan umur piutang adalah sebagai berikut:

The details of trade receivables based on aging schedule are as follows:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	
0 - 30 hari	1,189,803	863,449	<i>0 - 30 days</i>
30 - 90 hari	228,116	38,915	<i>30 - 90 days</i>
90 - 365 hari	60,092	66,357	<i>90 - 365 days</i>
Lebih dari 365 hari	<u>137,106</u>	<u>101,402</u>	<i>More than 365 days</i>
	1,615,117	1,070,123	
Dikurangi:			<i>Less:</i>
Provisi penurunan nilai	<u>(130,048)</u>	<u>(107,281)</u>	<i>Provision for doubtful accounts</i>
Jumlah	<u>1,485,069</u>	<u>962,842</u>	Total

Mutasi saldo provisi penurunan nilai piutang usaha adalah sebagai berikut:

The movements in the provision for impairment of trade receivables are as follows:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	
Saldo awal	107,281	103,492	<i>Beginning balance</i>
Tambahan			<i>Additional</i>
provisi penurunan nilai piutang usaha, neto (Catatan 22)	<u>22,767</u>	<u>3,789</u>	<i>provision for impairment of trade receivables, net (Note 22)</i>
Jumlah	<u>130,048</u>	<u>107,281</u>	Total

Manajemen berkeyakinan bahwa provisi penurunan nilai cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya piutang usaha tersebut. Manajemen juga berkeyakinan bahwa tidak ada konsentrasi risiko kredit yang signifikan atas piutang usaha.

Management believes that the provision for impairment is adequate to cover possible losses on uncollectible trade receivables. Management also believes that there are no significant concentrations of credit risk in trade receivables.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/35 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

6. ASET KONTRAK

6. CONTRACT ASSETS

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	
Pihak berelasi (Catatan 24)	1,309,213	1,226,058	<i>Related parties (Note 24)</i>
Dikurangi:			<i>Less:</i>
Provisi penurunan nilai pihak berelasi	<u>(2,002)</u>	<u>(1,209)</u>	<i>Provision for doubtful accounts of related parties</i>
	<u>1,307,211</u>	<u>1,224,849</u>	
 Pihak ketiga	 272,240	 333,217	 <i>Third parties</i>
Dikurangi:			<i>Less:</i>
Provisi penurunan nilai pihak ketiga	<u>(4,611)</u>	<u>(3,042)</u>	<i>Provision for doubtful accounts third parties</i>
	<u>267,629</u>	<u>330,175</u>	
 Jumlah	 <u>1,574,840</u>	 <u>1,555,024</u>	 Total

Mutasi saldo provisi penurunan nilai kontrak aset adalah sebagai berikut:

The movements in the provision for impairment of contract assets are as follows:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	
Saldo awal	4,251	3,544	<i>Beginning balance</i>
Tambahan			<i>Additional provision for</i>
provisi penurunan nilai aset kontrak, neto (Catatan 22)	<u>2,362</u>	<u>707</u>	<i>impairment of contract assets, net (Note 22)</i>
 Jumlah	 <u>6,613</u>	 <u>4,251</u>	 Total

7. ASET LAIN-LAIN

7. OTHER ASSETS

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	
Uang muka kerja	35,970	56,963	<i>Operational advances</i>
Uang muka karyawan	26,973	90,700	<i>Employee advances</i>
Biaya dibayar dimuka	11,205	9,929	<i>Prepaid expenses</i>
Lain-lain	<u>22,634</u>	<u>8,746</u>	<i>Others</i>
 Jumlah	 <u>96,782</u>	 <u>166,338</u>	 Total
 Bagian lancar	 82,773	 157,651	 <i>Current portion</i>
Bagian tidak lancar	<u>14,009</u>	<u>8,687</u>	<i>Non-current portion</i>
 Jumlah	 <u>96,782</u>	 <u>166,338</u>	 Total

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/36 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

8. INVESTASI PADA VENTURA BERSAMA

8. INVESTMENT IN JOINT VENTURE

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	
Pada awal tahun	98,132	87,607	<i>At the beginning of the year</i>
Bagian atas laba bersih	32,565	30,925	<i>Share of net profit</i>
Dividen yang diterima	<u>(24,735)</u>	<u>(20,400)</u>	<i>Dividends receipt</i>
Saldo akhir	<u>105,962</u>	<u>98,132</u>	<i>Ending balance</i>

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Grup memiliki ventura bersama sebagai berikut:

As at 31 December 2024 and 2023, the Group had the following joint venture:

<u>Nama entitas/ Name of entity</u>	<u>Lokasi usaha/Place of business</u>	<u>Persentase kepemilikan/ % of ownership interest</u>	<u>Kegiatan usaha/ Business activities</u>	<u>Metode pengukuran/ Measurement method</u>
TYM	Indonesia	51%	Menyelenggarakan usaha di bidang jasa pelayaran dan kepelabuhan laut/ <i>Conduct activities related to shipping and harbour services</i>	Ekuitas/ <i>Equity</i>

Berikut ini adalah ringkasan informasi keuangan TYM pada 31 Desember 2024 dan 2023 yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas:

Set out below is the summary of financial information for TYM as at 31 December 2024 and 2023, accounted for using the equity method:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	
Jumlah aset	247,006	278,418	<i>Total assets</i>
Jumlah liabilitas	<u>(39,238)</u>	<u>(86,003)</u>	<i>Total liabilities</i>
Aset netto	<u>207,768</u>	<u>192,415</u>	<i>Net assets</i>
Laba bersih tahun berjalan	<u>63,853</u>	<u>60,637</u>	<i>Net profit for the year</i>

Tidak ada liabilitas kontinjensi terkait dengan investasi pada TYM.

There is no contingent liability related to the investment in TYM.

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat kejadian-kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai investasi, sehingga tidak diperlukan cadangan penurunan nilai atas investasi pada ventura bersama.

Management is of the opinion that there are no events or changes in circumstances which may indicate impairment in the value of the investment, therefore, no provision for impairment in the value of investment in a joint venture is necessary.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/37 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

9. ASET TETAP

9. FIXED ASSETS

2024					
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Disposal	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo akhir/ Ending balance
Harga perolehan					
<u>Aset tetap non-pelayaran</u>					
Tanah	29,779	-	-	-	29,779
Bangunan	195,921	-	-	44,077	239,998
Kendaraan dan alat berat	110,059	21,190	-	-	131,249
Peralatan kantor	35,891	10,099	-	3,680	49,670
	371,650	31,289	-	47,757	450,696
<u>Aset tetap pelayaran</u>					
Kapal	5,120,773	-	-	287,309	5,408,082
Peralatan kapal	343,917	-	-	44,260	388,177
	5,464,690	-	-	331,569	5,796,259
Aset dalam penyelesaian	50,250	430,191	-	(379,326)	101,115
Jumlah	5,886,590	461,480	-	-	6,348,070
Akumulasi penyusutan					
<u>Aset tetap non-pelayaran</u>					
Bangunan	(62,011)	(11,526)	-	-	(73,537)
Kendaraan dan alat berat	(42,007)	(16,067)	-	-	(58,074)
Peralatan kantor	(10,029)	(5,723)	-	-	(15,752)
	(114,047)	(33,316)	-	-	(147,363)
<u>Aset tetap pelayaran</u>					
Kapal	(1,996,065)	(288,102)	-	-	(2,284,167)
Peralatan kapal	(124,235)	(38,665)	-	-	(162,900)
	(2,120,300)	(326,767)	-	-	(2,447,067)
Jumlah	(2,234,347)	(360,083)	-	-	(2,594,430)
Nilai buku	3,652,243				3,753,640
2023					
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Disposal	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo akhir/ Ending balance
Harga perolehan					
<u>Aset tetap non-pelayaran</u>					
Tanah	29,779	-	-	-	29,779
Bangunan	190,092	600	-	5,229	195,921
Kendaraan dan alat berat	96,989	13,070	-	-	110,059
Peralatan kantor	35,664	227	-	-	35,891
	352,524	13,897	-	5,229	371,650
<u>Aset tetap pelayaran</u>					
Kapal	5,013,239	-	(2,672)	110,206	5,120,773
Peralatan kapal	308,530	-	-	35,387	343,917
	5,321,769	-	(2,672)	145,593	5,464,690
Aset dalam penyelesaian	62,239	140,847	(2,014)	(150,822)	50,250
Jumlah	5,736,532	154,744	(4,686)	-	5,886,590
Akumulasi penyusutan					
<u>Aset tetap non-pelayaran</u>					
Bangunan	(50,063)	(11,948)	-	-	(62,011)
Kendaraan dan alat berat	(28,043)	(13,964)	-	-	(42,007)
Peralatan kantor	(9,543)	(486)	-	-	(10,029)
	(87,649)	(26,398)	-	-	(114,047)
<u>Aset tetap pelayaran</u>					
Kapal	(1,707,665)	(289,517)	1,117	-	(1,996,065)
Peralatan kapal	(79,275)	(44,960)	-	-	(124,235)
	(1,786,940)	(334,477)	1,117	-	(2,120,300)
Jumlah	(1,874,589)	(360,875)	1,117	-	(2,234,347)
Nilai buku	3,861,943				3,652,243

Acquisition cost
Non-shipping fixed assets
Land
Buildings
Vehicles and heavy
equipments
Office equipments

Shipping fixed assets
Vessels
Vessel equipments

Construction in progress

Total

Accumulated depreciation
Non-shipping fixed assets
Buildings
Vehicles and heavy
equipments
Office equipments

Shipping fixed assets
Vessels
Vessel equipments

Total

Net book value

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/38 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

9. ASET TETAP (lanjutan)

Penyusutan dialokasi sebagai berikut:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Beban pokok pendapatan (Catatan 20)	350,341	350,099
Beban umum dan administrasi (Catatan 21)	<u>9,742</u>	<u>10,776</u>
Jumlah	<u>360,083</u>	<u>360,875</u>

Beberapa aset tetap digunakan sebagai jaminan atas pinjaman jangka panjang Grup.

Pada tahun 2024, aset tetap Grup diasuransikan terhadap risiko kerugian, kecelakaan, kebakaran dan risiko lainnya dengan nilai pertanggungan sebesar Rp5.593.448 (2023: Rp4.760.269). Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas risiko tersebut.

Berdasarkan penelaahan manajemen, tidak terdapat indikasi penurunan nilai terhadap aset tetap pada tanggal 31 Desember 2024.

Aset dalam penyelesaian terutama terdiri dari pembuatan kapal yang sampai dengan tanggal pelaporan masih dalam proses pembangunan.

9. FIXED ASSETS (continued)

Depreciation is allocated as follows:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	
			<i>Cost of revenue (Note 20)</i>
			<i>General and administrative expenses (Note 21)</i>
			Total

Certain fixed assets are pledged as collateral for long-term loans by the Group.

In 2024, fixed assets of the Group are insured against losses, accidents, fire and other risks with the sum insured amounting to Rp5,593,448 (2023: Rp4,760,269). Management believes that the sum insured is adequate to cover possible losses arising from such risks.

Based on management's assessment, there is no impairment indicator identified to fixed assets as at 31 December 2024.

Construction in progress mainly consisted of construction of vessels that have not been completed as at the reporting date.

10. UTANG USAHA

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Pihak berelasi (Catatan 24)	1,115,210	935,385
Pihak ketiga		
PT Megaraya Kurnia Abadi	23,727	517
PT Samudera Pelabuhan Indonesia	16,175	3,067
V. Ship Offshore (Asia) Pte Ltd	10,860	-
PT Fabila Teknik Sejahtera	10,159	2,180
PT Dermaga Emas Nusantara	6,083	-
Lain-lain	<u>105,729</u>	<u>85,963</u>
	<u>172,733</u>	<u>91,727</u>
Jumlah	<u>1,287,943</u>	<u>1,027,112</u>

Saldo utang usaha pada akhir tahun tidak memiliki jaminan. Tidak ada surat garansi yang diberikan maupun diterima untuk utang usaha. Lihat Catatan 27 untuk penjelasan tentang manajemen risiko likuiditas Grup.

10. TRADE PAYABLES

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	
			<i>Related parties (Note 24)</i>
			<i>Third parties</i>
			<i>PT Megaraya Kurnia Abadi</i>
			<i>PT Samudera Pelabuhan Indonesia</i>
			<i>V. Ship Offshore (Asia) Pte Ltd</i>
			<i>PT Fabila Teknik Sejahtera</i>
			<i>PT Dermaga Emas Nusantara</i>
			<i>Others</i>
			Total

Outstanding balances of trade payables at year-end are unsecured. There are no guarantees provided or received for any trade payables. Refer to Note 27 for explanation on the Group's liquidity risk management processes.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/39 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

11. BIAYA MASIH HARUS DIBAYAR

11. ACCRUED EXPENSES

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	
Jasa penunjang operasi dan penyediaan tenaga kerja	452,463	470,801	Marine operations support and labour supply services
Pemanduan dan penundaan	337,642	283,170	Pilotage and towage
Insentif, bonus dan tantiem	334,562	292,746	Incentive, bonus and tantiem
Keagenan umum	319,971	305,539	General agencies
Sewa kapal jangka pendek	54,283	50,255	Short-term ship rentals
Kasus hukum (Catatan 26g)	48,964	48,964	Legal case (Note 26g)
Lain-lain	33,047	32,306	Others
Jumlah	<u>1,580,932</u>	<u>1,483,781</u>	Total

12. LIABILITAS KONTRAK

12. CONTRACT LIABILITIES

Liabilitas kontrak adalah uang muka pelanggan
dengan rincian sebagai berikut:

Contract liabilities are advances from customers with
the following details:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	
Pihak ketiga	183,727	192,382	Third parties
Pihak berelasi (Catatan 24)	20,307	41,153	Related parties (Note 24)
Jumlah	<u>204,034</u>	<u>233,535</u>	Total

13. SEWA

13. LEASES

a. Aset hak-guna

a. Right-of-use assets

	<u>2024</u>				
	<u>Saldo awal/ Beginning balance</u>	<u>Penambahan/ Additions</u>	<u>Pengurangan/ Disposals</u>	<u>Saldo akhir/ Ending balance</u>	
Biaya perolehan					Costs
Tanah dan bangunan	198,822	5,782	-	204,604	Land and buildings
Kendaraan dan alat berat	175,558	-	-	175,558	Vehicles and heavy equipments
Kapal	959,628	489,884	(98,545)	1,350,967	Vessels
Jumlah	<u>1,334,008</u>	<u>495,666</u>	<u>(98,545)</u>	<u>1,731,129</u>	Total
Akumulasi penyusutan					Accumulated depreciation
Tanah dan bangunan	(97,585)	(24,761)	-	(122,346)	Land and buildings
Kendaraan dan alat berat	(33,331)	(40,100)	-	(73,431)	Vehicles and heavy equipments
Kapal	(717,808)	(393,609)	98,545	(1,012,872)	Vessels
Jumlah	<u>(848,724)</u>	<u>(458,470)</u>	<u>98,545</u>	<u>(1,208,649)</u>	Total
Nilai tercatat	<u>485,284</u>			<u>522,480</u>	Net carrying value

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/40 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

13. SEWA (lanjutan)

13. LEASES (continued)

a. Aset hak-guna (lanjutan)

a. Right-of-use assets (continued)

2023					
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Disposals	Saldo akhir/ Ending balance	
Biaya perolehan				Costs	
Tanah dan bangunan	76,067	124,593	(1,838)	198,822	Land and buildings
Kendaraan dan alat berat	19,219	156,339	-	175,558	Vehicles and heavy equipments
Kapal	648,576	311,052	-	959,628	Vessels
Jumlah	743,862	591,984	(1,838)	1,334,008	Total
Akumulasi penyusutan				Accumulated depreciation	
Tanah dan bangunan	(72,525)	(25,991)	931	(97,585)	Land and buildings
Kendaraan dan alat berat	(15,375)	(17,956)	-	(33,331)	Vehicles and heavy equipments
Kapal	(345,987)	(371,821)	-	(717,808)	Vessels
Jumlah	(433,887)	(415,768)	931	(848,724)	Total
Nilai tercatat	309,975			485,284	Net carrying value

Alokasi beban penyusutan aset hak-guna adalah
sebagai berikut:

The depreciation expenses of right-of-use assets
were allocated as follows:

	2024	2023	
Beban pokok pendapatan (Catatan 20)	418,370	398,552	Cost of revenue (Note 20)
Beban umum dan administrasi (Catatan 21)	40,100	17,216	General and administrative expenses (Note 21)
Jumlah	458,470	415,768	Total

b. Liabilitas sewa

b. Lease liabilities

	2024	2023	
Saldo awal	522,888	436,385	Beginning balance
Penambahan	489,884	591,984	Additions
Beban bunga (Catatan 23)	34,616	27,520	Interest expense (Note 23)
Pembayaran	(540,185)	(533,001)	Payments
Saldo akhir	507,203	522,888	Ending balance
Bagian lancar	365,298	335,390	Current portion
Bagian tidak lancar	141,905	187,498	Non-current portion
Jumlah	507,203	522,888	Total

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/41 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

13. SEWA (lanjutan)

b. Liabilitas sewa (lanjutan)

Jumlah yang diakui di laporan laba rugi konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Beban bunga (Catatan 23)	34,616	27,520
Beban terkait sewa jangka pendek dan bernilai rendah (Catatan 21)	24,586	14,447

Jumlah yang terkait dengan sewa jangka pendek, sewa atas aset bernilai rendah, dan sewa variabel tidak dimasukkan sebagai liabilitas sewa berdasarkan sifatnya sebagaimana dibahas pada Catatan 2j.

Laporan arus kas konsolidasian menyajikan saldo berikut berkaitan dengan sewa:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Arus kas dari aktivitas operasi		
Pembayaran beban keuangan	(34,616)	(27,520)
Arus kas dari aktivitas pendanaan		
Pembayaran atas liabilitas sewa	(505,569)	(505,481)

13. LEASES (continued)

b. Lease liabilities (continued)

The amounts recognised in the consolidated profit or loss for the years ended 31 December 2024 and 2023 were as follows:

Interest expense (Note 23)
Expenses related to short-term leases and low value assets (Note 21)

Amounts related to short-term leases, leases of low value assets and variable leases are not required to be included as lease liabilities based on their nature as discussed in Note 2j.

The consolidated statement of cash flows shows the following amounts related to leases:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Cash flow from operating activities		
Payments of finance costs	(34,616)	(27,520)
Cash flow from financing activities		
Payments of lease liabilities	(505,569)	(505,481)

14. PERPAJAKAN

a. Pajak dibayar dimuka

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Pajak penghasilan		
<u>Perusahaan</u>		
- 2024	24,775	-
<u>Entitas anak</u>		
- 2024	2,647	-
- 2023	4,476	4,933
	<u>31,898</u>	<u>4,933</u>

Pajak lain-lain

<u>Perusahaan</u>		
Pajak pertambahan nilai ("PPN")	36,154	31,941
<u>Entitas anak</u>		
PPN	128,898	92,503
	<u>165,052</u>	<u>124,444</u>

Jumlah	<u>196,950</u>	<u>129,377</u>
Dikurangi: Bagian lancar	(165,052)	(124,444)
Bagian tidak lancar	<u>31,898</u>	<u>4,933</u>

14. TAXATION

a. Prepaid taxes

Corporate income tax

<u>The Company</u>
2024 -
<u>Subsidiaries</u>
2024 -
2023 -

Other tax

<u>The Company</u>
Value added tax ("VAT")

<u>Subsidiaries</u>
VAT

Total
Less: Current portion
Non-current portion

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/42 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

14. PERPAJAKAN

14. TAXATION

b. Utang pajak

b. Taxes payable

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	
Pajak penghasilan			Corporate income tax
<u>Perusahaan</u>			<u>The Company</u>
Kurang bayar pajak penghasilan			Underpayment of corporate income tax
- 2023	-	96,453	2023 -
	-	96,453	
<u>Entitas anak</u>			<u>Subsidiaries</u>
Kurang bayar pajak penghasilan			Underpayment of corporate income tax
- 2024	42,228	-	2024 -
- 2023	-	28,546	2023 -
	42,228	28,546	
Jumlah	<u>42,228</u>	<u>124,999</u>	Total
Pajak lain-lain			Other taxes
<u>Perusahaan</u>			<u>The Company</u>
Pasal 21	460	19,291	Article 21
Pasal 25	6,931	3,028	Article 25
Pasal 4(2), 15, 23, dan 26	4,941	8,239	Article 4(2), 15, 23 and 26
	12,332	30,558	
<u>Entitas anak</u>			<u>Subsidiaries</u>
PPN	6,554	-	VAT
Pasal 21	28,605	3,169	Article 21
Pasal 25	5,209	3,622	Article 25
Pasal 4(2), 15, 22, 23 dan 26	2,888	1,130	Article 4(2), 15, 22, 23 and 26
	43,256	7,921	
Jumlah	<u>55,588</u>	<u>38,479</u>	Total

c. Beban pajak penghasilan

c. Income tax expense

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	
<u>Perusahaan</u>			<u>The Company</u>
Kini	162,637	216,976	Current
Tangguhan	(6,708)	(8,627)	Deferred
Penyesuaian tahun lalu	(5,608)	(6,018)	Adjustment in respect of prior years
	150,321	202,331	
<u>Entitas anak</u>			<u>Subsidiaries</u>
Kini	127,253	91,886	Current
Tangguhan	(24,581)	110	Deferred
Penyesuaian tahun lalu	(378)	507	Adjustment in respect of prior years
	102,294	92,503	
Jumlah	<u>252,615</u>	<u>294,834</u>	Total

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/43 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

14. PERPAJAKAN (lanjutan)

14. TAXATION (continued)

c. Beban pajak penghasilan

c. Income tax expense

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak konsolidasian dengan estimasi penghasilan kena pajak Perusahaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

The reconciliations between consolidated profit before income tax and the estimated taxable income for the years ended 31 December 2024 and 2023, are as follows:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	
Laba konsolidasian sebelum pajak penghasilan	1,327,915	1,346,328	Consolidated profit before income tax
Laba sebelum pajak entitas anak setelah dilakukan penyesuaian pada tingkat konsolidasian	<u>(477,138)</u>	<u>(415,462)</u>	Profit before tax of subsidiaries after consolidation adjustments
Laba sebelum pajak penghasilan - Perusahaan	850,777	930,866	Profit before income tax - the Company
Provisi atas liabilitas imbalan pasca kerja	27,187	20,490	Provision for post-employment benefits obligation
Provisi atas bonus karyawan	(66,632)	69,913	Provision for employee bonus
Provisi atas cadangan penurunan nilai piutang	12,580	2,614	Provision for impairment of receivables
Penyusutan aset tetap	(13,806)	19,004	Depreciation of fixed assets
Perbedaan perlakuan liabilitas sewa antara komersial dan fiskal	(435,113)	(152,883)	Difference between commercial and tax treatment of lease liabilities
Penyusutan aset hak-guna	426,193	80,073	Depreciation of right-of-use assets
Beban yang tidak dapat diperhitungkan untuk keperluan pajak	99,598	105,999	Non-deductible expenses
Penghasilan bunga yang dikenakan pajak final	(49,040)	27,081	Interest income subject to final tax
Pendapatan yang dikenakan pajak final	(486,053)	(449,581)	Revenue subject to final tax
Beban pokok pendapatan atas pendapatan yang dikenakan pajak final	406,133	363,600	Cost of revenue related to revenue subject to final tax
Bagian atas laba bersih ventura bersama	<u>(32,565)</u>	<u>(30,925)</u>	Share in net profit of joint venture
	<u>(111,518)</u>	<u>55,385</u>	
Penghasilan kena pajak - Perusahaan	<u>739,259</u>	<u>986,251</u>	Taxable income - the Company
Beban pajak kini:			Current tax expenses:
Perusahaan	162,637	216,976	The Company
Entitas anak	<u>127,253</u>	<u>91,886</u>	Subsidiaries
Beban pajak penghasilan kini konsolidasian	<u>289,890</u>	<u>308,862</u>	Consolidated current income tax
Beban pajak kini Perusahaan	162,637	216,976	Current tax expense of the Company
Dikurangi:			Less:
Pajak dibayar di muka			Prepaid income taxes
- Pasal 22	(2,149)	(1,784)	Article 22 -
- Pasal 25	(103,079)	(53,865)	Article 25 -
- Pasal 23	<u>(82,184)</u>	<u>(64,874)</u>	Article 23 -
	<u>(187,412)</u>	<u>(120,523)</u>	
(Lebih)/kurang bayar pajak penghasilan - Perusahaan	<u>(24,775)</u>	<u>96,453</u>	(Overpayment)/underpayment corporate income tax - the Company

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/44 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

14. PERPAJAKAN (lanjutan)

14. TAXATION (continued)

c. Beban pajak penghasilan (lanjutan)

c. Income tax expense (continued)

Perhitungan pajak penghasilan kini dilakukan berdasarkan estimasi penghasilan kena pajak. Nilai tersebut mungkin disesuaikan ketika SPT disampaikan ke Direktur Jenderal Pajak ("DJP").

Current income tax computations are based on estimated taxable income. The amounts may be adjusted when the Annual Tax Return is submitted to the Directorate General of Taxation ("DGT").

Pajak atas laba Grup sebelum pajak berbeda dari nilai teoritis yang muncul apabila menggunakan rata-rata tertimbang tarif pajak terhadap laba pada entitas anak yang dikonsolidasi sebagai berikut:

The tax on the Group's profit before tax differs from the theoretical amount that would arise using the weighted average tax rate applicable to profits of the consolidated entities as follows:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	
Laba konsolidasian sebelum pajak penghasilan	1,327,915	1,346,328	<i>Consolidated profit before income tax</i>
Pajak penghasilan dihitung dengan tarif yang berlaku	292,141	296,190	<i>Income tax calculated at applicable tax rate</i>
Dampak pajak penghasilan pada:			<i>Tax effects of:</i>
Beban yang tidak dapat dikurangkan untuk keperluan pajak	8,649	26,174	<i>Non-deductible expenses</i>
Pendapatan yang dikenakan pajak final	(156,811)	(123,373)	<i>Revenue subject to final tax</i>
Beban pokok pendapatan atas pendapatan yang dikenakan pajak final	121,786	108,157	<i>Cost of revenue related to revenue subject to final tax</i>
Bagian atas laba bersih ventura bersama	(7,164)	(6,803)	<i>Share in profit of joint venture</i>
Penyesuaian tahun lalu	(5,986)	(5,511)	<i>Adjustment in respect of prior years</i>
Beban pajak penghasilan konsolidasian	<u>252,615</u>	<u>294,834</u>	<i>Consolidated income tax expense</i>

d. Aset pajak tangguhan

d. Deferred tax assets

Rincian dari aset pajak tangguhan adalah sebagai berikut:

The details of deferred tax assets are as follows:

	<u>1 Januari/ January 2024</u>	<u>Dibebankan/ (Dikreditkan) ke laba rugi/ Charged/ (Credited) to profit or loss</u>	<u>Dibebankan ke penghasilan komprehensif lain/ Charged to other comprehensive income</u>	<u>31 Desember/ December 2024</u>	
Penyusutan aset tetap	21,616	(3,483)	-	18,133	<i>Depreciation of fixed assets</i>
Liabilitas imbalan pascakerja	28,186	13,205	(6,068)	35,323	<i>Post-employment benefit liabilities</i>
Bonus karyawan	43,415	1,126	-	44,541	<i>Employee benefits</i>
Liabilitas sewa	104,172	(78,107)	-	26,065	<i>Lease liabilities</i>
Provisi penurunan nilai piutang usaha	17,669	4,786	-	22,455	<i>Provision for impairment of trade receivables</i>
Provisi penurunan nilai persediaan	542	-	-	542	<i>Provision for impairment of inventories</i>
Penyusutan aset hak-guna	(113,141)	93,762	-	(19,379)	<i>Depreciation of right-of-use assets</i>
Penyertaan saham	(1,629)	-	-	(1,629)	<i>Investment in shares</i>
Aset pajak tangguhan, bersih	<u>100,830</u>	<u>31,289</u>	<u>(6,068)</u>	<u>126,051</u>	<i>Deferred tax assets, net</i>

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/45 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

14. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Aset pajak tangguhan (lanjutan)

Rincian dari aset pajak tangguhan adalah sebagai berikut: (lanjutan)

	1 Januari/ January 2023	Dibebankan/ (Dikreditkan) ke laba rugi/ Charged/ (Credited) to profit or loss	Dibebankan ke penghasilan komprehensif lain/ Charged to other comprehensive income	31 Desember/ December 2023	
Penyusutan aset tetap	17,760	3,856	-	21,616	Depreciation of fixed assets
Liabilitas imbalan pascakerja	19,004	4,419	4,763	28,186	Post-employment benefit liabilities
Bonus karyawan	28,138	15,277	-	43,415	Employee benefits
Liabilitas sewa	88,498	15,674	-	104,172	Lease liabilities
Provisi penurunan nilai piutang usaha	16,840	829	-	17,669	Provision for impairment of trade receivables
Provisi penurunan nilai persediaan	543	(1)	-	542	Provision for impairment of inventories
Penyusutan aset hak-guna	(81,604)	(31,537)	-	(113,141)	Depreciation of right-of-use assets
Penyertaan saham	(1,563)	-	(66)	(1,629)	Investment in shares
Aset pajak tangguhan, bersih	87,616	8,517	4,697	100,830	Deferred tax assets, net

14. TAXATION (continued)

d. Deferred tax assets (continued)

The details of deferred tax assets are as follows: (continued)

e. Hasil pemeriksaan pajak

PME

Pada tanggal 16 Maret 2023, DJP menerbitkan surat izin pemeriksaan dengan nomor PRIN-P-212/RIKSIS/KPP.1903/2023 terkait pencatatan pajak tahun buku 2019. Pada tanggal 15 Agustus 2024 berdasarkan hasil akhir pemeriksaan nomor S-457/RIKSIS/KPP.1903/2024, DJP dan Perusahaan telah menyepakati atas kekurangan bayar dari PPh Pajak Badan, PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4(2) dan PPN dengan total nilai sebesar Rp739 dan bunga sebesar Rp332. Perusahaan telah membayar kurang bayar beserta bunga pajak tersebut pada tanggal 14 Oktober 2024.

Pada tanggal 19 Maret 2024 dan 2 Juli 2024, DJP menerbitkan surat izin pemeriksaan pajak dengan nomor PRIN-69/RIKSIS/KPP.1903/2024 dan PRIN-166/RIKSIS/KPP.1903/2024 terkait pemeriksaan keseluruhan pajak tahun buku 2020 dan 2023. Hingga tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, pemeriksaan pajak belum dimulai oleh DJP.

f. Administrasi

Berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia, entitas yang berdomisili di Indonesia menghitung dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang. DJP dapat menetapkan atau mengubah pajak dalam batas waktu lima tahun saat terutangnya pajak.

e. Results of tax audits

PME

On 16 March 2023, the DGT issued an audit permit with the number PRIN-P-212/RIKSIS/KPP.1903/2023 related to the tax records for the 2019 fiscal year. On 15 August 2024, based on the final audit results number S-457/RIKSIS/KPP.1903/2024, the DGT and the Company agreed on the underpayment of Corporate Income Tax, Article 21 Income Tax, Article 23 Income Tax, Article 4(2) Income Tax, and VAT with a total amount of IDR739 and interest of IDR332. The Company has paid the underpayment along with the tax interest on 14 October 2024.

On 19 March 2024 and 2 July 2024, the DGT issued tax audit permits with the numbers PRIN-69/RIKSIS/KPP.1903/2024 and PRIN-166/RIKSIS/KPP.1903/2024 related to the comprehensive tax audit for the 2020 and 2023 fiscal years. As at the completion date of this consolidated financial report, the tax audit has not yet commenced by the DGT.

f. Administration

Under the taxation laws of Indonesia, entities which are domiciled in Indonesia calculate and pay taxes on the basis of self assessment. The DGT may assess or amend taxes within five years of the time the tax becomes due.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/46 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

15. PINJAMAN

15. BORROWINGS

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	
Entitas berelasi dengan Pemerintah (Catatan 24)			Government-related entities (Note 24)
Mandiri	439,834	344,662	Mandiri
BSI	<u>92,218</u>	<u>137,375</u>	BSI
	<u>532,052</u>	<u>482,037</u>	
Pihak ketiga			Third parties
PT Bank SMBC Indonesia	<u>29,468</u>	<u>249,925</u>	PT Bank SMBC Indonesia
Jumlah	<u>561,520</u>	<u>731,962</u>	Total
Jatuh tempo dalam satu tahun	175,300	305,012	Due next year
Bagian jangka panjang	386,220	426,950	Non-current portion

BSI

BSI

Rincian pinjaman bank jangka panjang dari BSI adalah sebagai berikut:

The details of the long-term bank loans from BSI are as follows:

Jenis pinjaman dan jumlah batas pinjaman/ Type of loan and maximum credit limit	Bunga/ Interest	Bulan jatuh tempo fasilitas/ Facility maturity	Peruntukan/ Purpose	Saldo 31 Desember 2024/ Balance as at 31 December 2024
Fasilitas kredit investasi kapal/ Vessel investing credit facility Rp82.934/Rp82,934	7,50% per tahun/ 7,50% per annum	Juli 2026/ July 2026	Pembiayaan pembelian kapal Transko Taurus/Financing for purchase of Transko Taurus	Rp25.653
Fasilitas kredit investasi kapal/ Vessel investing credit facility Rp44.720/Rp44,720	7,50% per tahun/ 7,50% per annum	November 2027/ November 2027	Pembiayaan pembelian kapal Harbour Tug/Financing for purchase of Harbour Tug	Rp24.239
Fasilitas kredit investasi kapal/ Vessel investing credit facility Rp26.832/Rp26,832	7,50% per tahun/ 7,50% per annum	Desember 2027/ December 2027	Pembiayaan pembelian kapal Harbour Tug/Financing for purchase of Harbour Tug	Rp14.753
Fasilitas kredit investasi kapal/ Vessel investing credit facility Rp17.888/Rp17,888	7,50% per tahun/ 7,50% per annum	Desember 2027/ December 2027	Pembiayaan pembelian kapal Harbour Tug/Financing for purchase of Harbour Tug	Rp10.933
Fasilitas kredit investasi kapal/ Vessel investing credit facility Rp206.910/Rp206,910	Tingkat bunga JIBOR 1 bulan +2,35%/Interest at rates of 1 month JIBOR +2,35%	Februari 2026/ February 2026	Pembiayaan pembelian kapal Harbour Tug/Financing for purchase of Harbour Tug	Rp10.400
Fasilitas kredit investasi kapal/ Vessel investing credit facility Rp90.180/Rp90,180	Tingkat bunga JIBOR 1 bulan +2,35%/Interest at rates of 1 month JIBOR +2,35%	Februari 2026/ February 2026	Pembiayaan pembelian kapal Harbour Tug/Financing for purchase of Harbour Tug	Rp6.240

Beban bunga dari pinjaman bank untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp9.367 (2023: Rp13.313).

Interest expense from loan for the year ended 31 December 2024 was amounting to Rp9,367 (2023: Rp13,313).

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/47 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

15. PINJAMAN (lanjutan)

Mandiri

Rincian pinjaman bank jangka panjang dari Mandiri adalah sebagai berikut:

Jenis pinjaman dan jumlah batas pinjaman/ Type of loan and maximum credit limit	Bunga/ Interest	Bulan jatuh tempo fasilitas/ Facility maturity	Peruntukan/ Purpose	Saldo 31 Desember 2024/ Balance as at 31 December 2024
Fasilitas kredit investasi kapal/ Vessel investing credit facility Rp442.259/Rp442,259	Tingkat bunga JIBOR 1 bulan +2,05%/Interest at rates of 1 month JIBOR +2.05%	Juli 2028/ July 2028	Pembiayaan pembelian kapal Harbour Tug/ Financing for purchase of Harbour Tug	Rp260.700
Fasilitas kredit investasi kapal/ Vessel investing credit facility Rp133,380/Rp133,380	Tingkat bunga JIBOR 1 bulan +1%/Interest at rates of 1 month JIBOR +1%	Maret 2030/ March 2030	Pembiayaan pembelian Kapal/ Financing for purchase of Vessel	Rp133.380
Fasilitas kredit investasi kapal/ Vessel investing credit facility Rp45,754/Rp45,754	Tingkat bunga JIBOR 1 bulan +1%/Interest at rates of 1 month JIBOR +1%	September 2031/ September 2031	Pembiayaan pembelian Kapal/ Financing for purchase of Vessel	Rp45,754

Beban bunga dari pinjaman bank adalah sebesar Rp35.471 untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 (2023: Rp24.394).

SMBC Indonesia (dahulu BTPN)

Rincian pinjaman bank jangka panjang dari SMBC Indonesia (dahulu BTPN) adalah sebagai berikut:

Jenis pinjaman dan jumlah batas pinjaman/ Type of loan and maximum credit limit	Bunga/ Interest	Bulan jatuh tempo fasilitas/ Facility maturity	Peruntukan/ Purpose	Saldo 31 Desember 2024/ Balance as at 31 December 2024
Fasilitas kredit investasi kapal/ Vessel investing credit facility Rp93.759/Rp93,759	Tingkat bunga JIBOR +1,75% per tahun/Interest at a rates of JIBOR +1,75% per annum	September 2025/ September 2025	Pembiayaan pembelian Transko Rajawali/ Financing for purchase of Transko Rajawali	Rp29.468

Beban bunga dari pinjaman bank untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp10.444 (2023: Rp32.043).

15. BORROWINGS (continued)

Mandiri

The detail of long-term bank loans from Mandiri are as follows:

Jenis pinjaman dan jumlah batas pinjaman/ Type of loan and maximum credit limit	Bunga/ Interest	Bulan jatuh tempo fasilitas/ Facility maturity	Peruntukan/ Purpose	Saldo 31 Desember 2024/ Balance as at 31 December 2024
Fasilitas kredit investasi kapal/ Vessel investing credit facility Rp442.259/Rp442,259	Tingkat bunga JIBOR 1 bulan +2,05%/Interest at rates of 1 month JIBOR +2.05%	Juli 2028/ July 2028	Pembiayaan pembelian kapal Harbour Tug/ Financing for purchase of Harbour Tug	Rp260.700
Fasilitas kredit investasi kapal/ Vessel investing credit facility Rp133,380/Rp133,380	Tingkat bunga JIBOR 1 bulan +1%/Interest at rates of 1 month JIBOR +1%	Maret 2030/ March 2030	Pembiayaan pembelian Kapal/ Financing for purchase of Vessel	Rp133.380
Fasilitas kredit investasi kapal/ Vessel investing credit facility Rp45,754/Rp45,754	Tingkat bunga JIBOR 1 bulan +1%/Interest at rates of 1 month JIBOR +1%	September 2031/ September 2031	Pembiayaan pembelian Kapal/ Financing for purchase of Vessel	Rp45,754

Interest expense from loan was amounting to Rp35,471 for the year ended 31 December 2024 (2023: Rp24,394).

SMBC Indonesia (formerly BTPN)

The details of the long-term bank loans from SMBC Indonesia (formerly BTPN) are as follows:

Jenis pinjaman dan jumlah batas pinjaman/ Type of loan and maximum credit limit	Bunga/ Interest	Bulan jatuh tempo fasilitas/ Facility maturity	Peruntukan/ Purpose	Saldo 31 Desember 2024/ Balance as at 31 December 2024
Fasilitas kredit investasi kapal/ Vessel investing credit facility Rp93.759/Rp93,759	Tingkat bunga JIBOR +1,75% per tahun/Interest at a rates of JIBOR +1,75% per annum	September 2025/ September 2025	Pembiayaan pembelian Transko Rajawali/ Financing for purchase of Transko Rajawali	Rp29.468

Interest expense from loan for the year ended 31 December 2024 was amounting to Rp10,444 (2023: Rp32,043).

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/48 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

16. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA

Grup memberikan imbalan pasca kerja kepada semua karyawan tetapnya. Imbalan yang diberikan adalah imbalan pasti yang berkaitan dengan penghargaan masa kerja yang tergantung pada lamanya masa kerja. Grup mengakui timbulnya biaya pada saat Grup menerima manfaat ekonomis dari jasa yang diberikan karyawan.

Grup melakukan penyisihan untuk liabilitas imbalan pasca kerja jangka panjang, Liabilitas imbalan pasca kerja jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 telah disajikan berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh aktuaris independen. Kantor Konsultan Aktuaria Steven dan Mourits, menggunakan metode *projected unit credit*.

Nilai yang termasuk dalam laporan posisi keuangan yang berasal dari kewajiban Grup sehubungan dengan liabilitas imbalan pasca kerja adalah sebagai berikut:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Nilai kini liabilitas	368,707	344,444
Nilai wajar aset program	<u>(131,579)</u>	<u>(122,786)</u>
Liabilitas imbalan pasca kerja	237,128	221,658
Dikurangi: bagian jangka pendek	<u>(27,749)</u>	<u>-</u>
Bagian jangka panjang dari liabilitas imbalan pasca kerja	<u>209,379</u>	<u>221,658</u>

Beban imbalan pasca kerja yang dibebankan di laporan laba rugi adalah sebagai berikut:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Biaya jasa kini	54,850	33,688
Biaya jasa lalu	-	479
Biaya bunga	10,995	10,173
Pengukuran kembali atas liabilitas yang diakui sebagai imbalan kerja jangka panjang lainnya	<u>946</u>	<u>(1,087)</u>
Biaya imbalan pasca kerja	<u>66,791</u>	<u>43,253</u>

Pengukuran kembali kewajiban imbalan kerja yang diakui sebagai rugi atau penghasilan komprehensif lainnya (sebelum pajak) adalah sebagai berikut:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Pengukuran kembali nilai kini liabilitas:		
Keuntungan/(kerugian) atas perubahan asumsi keuangan	18,780	(5,983)
Keuntungan/(kerugian) atas penyesuaian pengalaman	11,114	(10,150)
Imbal hasil atas aset program program tidak termasuk pendapatan bunga	<u>(296)</u>	<u>(7,242)</u>
Penghasilan/(rugi) komprehensif lain	<u>29,598</u>	<u>(23,375)</u>

16. POST-EMPLOYMENT BENEFITS OBLIGATION

The Group provides post-employment benefits to all permanent employees. Benefits provided are defined benefits related to long service appreciation. The Group recognises expenses when the economic benefits of the services provided by the employees have been received.

The Group provides provision for long-term employee benefits liabilities. Long-term employee benefits liabilities as at 31 December 2024 and 2023 were presented based on calculations performed by the independent actuary. Kantor Konsultan Aktuaria Steven and Mourits, using the projected unit credit method.

The amounts included in the statement of financial position arising from the Group's obligation in respect of these post-employment benefits are as follows:

*Present value of obligation
Fair value of plan assets*

Post-employment benefit obligation

Less: Current portion

Non-current portion of post-employment benefits obligation

Amounts charged in the profit or loss and in respect of these post-employment benefits are as follows:

*Current service cost
Past service cost
Interest cost
Remeasurement on obligation recognised as other long-term employee benefit*

Post-employment benefit expenses

Remeasurement of employee benefit obligation recognised as other comprehensive loss or income (before tax) is as follows:

*Remeasurement of present value of obligation: Gain/(loss) from changes in financial assumptions
Gain/(loss) from changes in experience adjustments*

Return on plan assets excluding interest income

Other comprehensive income/(loss)

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/49 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

16. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA (lanjutan)

**16. POST-EMPLOYMENT BENEFITS OBLIGATION
(continued)**

Mutasi nilai kini kewajiban yang tidak didanai selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

The movements in the present value of unfunded obligations in the current year were as follows:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	
Pada awal tahun	221,658	176,556	Beginning of the year
Dibebankan pada laporan laba rugi (Keuntungan)/kerugian aktuarial yang diakui pada penghasilan komprehensif lain	66,791	43,253	Charged to profit or loss
luran oleh Grup	(29,598)	23,375	Actuarial (gain)/loss recognised in other comprehensive income
Pembayaran imbalan	(12,966)	(17,039)	The Group's contribution
	<u>(8,757)</u>	<u>(4,487)</u>	Benefit payments
Nilai kini liabilitas pada akhir tahun	<u>237,128</u>	<u>221,658</u>	Present value of obligation at the end of the year

Asumsi-asumsi utama yang digunakan adalah sebagai berikut:

The main assumptions used are as follows:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	
Tingkat diskonto	7.1%	6.6%	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji per tahun	7.3%	8.2%	Basic salary growth rate
Tabel mortalitas	TMI IV - 2019	TMI IV - 2019	Mortality table
Usia pensiun normal	56 tahun/years	56 tahun/years	Normal retirement age

Dampak akibat dari setiap satu persen (1%) perubahan dari asumsi tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji pada 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

A one percentage (1%) point change in the assumed discount rate and salary increase rate at 31 December 2024, would have the following effects:

	<u>Perubahan asumsi/ Change in assumptions</u>	<u>Kenaikan pada kewajiban imbalan pasti/ Increase in defined benefit obligations</u>	<u>Penurunan pada kewajiban imbalan pasti/ Decrease in defined benefit obligations</u>	
Tingkat diskonto	1%	24,957	(19,119)	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji di masa depan	1%	14,601	(10,411)	Salary growth rate

Pada 31 Desember 2024, rata-rata durasi atas provisi imbalan pasca kerja karyawan adalah 11,69 tahun.

As at 31 December 2024, the weighted average duration of the provision for employee service entitlements is 11.69 years.

Analisis jatuh tempo yang diharapkan dari manfaat pensiun yang tidak terdiskonto pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

The expected maturity analysis of undiscounted pension benefits as at 31 December 2024 is presented below:

	<u>Kurang dari satu tahun/ Less than one year</u>	<u>1 sampai 5 tahun/ Between 1 and 5 years</u>	<u>5 sampai 10 tahun/ Between 5 and 10 years</u>	<u>Lebih dari 10 tahun/ Over 10 years</u>	<u>Jumlah/Total</u>	
Liabilitas imbalan pasca kerja	27,749	116,856	151,174	773,836	1,069,615	Post-employment benefit obligation

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/50 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

17. MODAL SAHAM

Susunan pemegang saham dan persentase kepemilikannya pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Pemegang saham	Jumlah saham (nilai penuh)/ Number of shares (full amount)	Nilai/ Value	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Shareholders
Saham Seri A				Series A shares
PIS	1,234,737	1,234,737	99.93%	PIS
PT Pertamina Pedeve Indonesia	10	10	0.01%	PT Pertamina Pedeve Indonesia
Saham Seri B				Series B shares
PIS	819	1	0.06%	PIS
Jumlah	1,235,566	1,234,748	100%	Total

Berdasarkan Akta No. 69 tanggal 28 April 2021 oleh Aulia Taufani S.H., pemegang saham sepakat untuk mengalihkan saham Pertamina ke PIS sebesar Rp693.698 saham seri A dan Rp1 saham seri B.

The structure of shareholders and the percentage of ownerships as at 31 December 2024 and 2023 are as follows:

In accordance with Notarial Deed No. 69 dated 28 April 2021 by Aulia Taufani S.H., the shareholders agreed to transfer Pertamina's shares to PIS in the amount of Rp693,698 series A shares and Rp1 series B shares.

Berdasarkan Akta No. 104 tanggal 29 April 2021 oleh Aulia Taufani S.H., Perusahaan telah meningkatkan modal dengan menerbitkan saham baru yang diambil oleh PIS dengan inbreng aset *marine* non-sarana tambat sebesar Rp412.437. Selain itu Perusahaan memutuskan untuk meningkatkan modal dasar dari semula Rp2.000.001 menjadi Rp4.424.581 dan modal ditempatkan dan disetor untuk saham seri A dari semula Rp693.709 menjadi Rp1.106.145. Modal dasar yang semula dibagi menjadi 2.000.000 lembar saham seri A dan 819 lembar saham seri B menjadi 4.424.580 lembar saham seri A dan 819 lembar saham seri B.

In accordance with Notarial Deed No. 104 dated 29 April 2021 by Aulia Taufani S.H., The Company increased its capital by issuing new shares which were subscribed by PIS through in-kind capital contribution in the form of non-mooring marine assets of Rp412,437. In addition, the Company decided to increase the authorised capital from Rp2,000,001 to Rp4,424,581 and the issued and paid-up capital for series A shares from Rp693,709 to Rp1,106,145. The authorised capital was originally divided into 2,000,000 series A shares and 819 series B shares to 4,424,580 series A shares and 819 series B shares.

Berdasarkan Akta No. 30 tanggal 29 November 2022 oleh Lenny Janis Ishak S.H., Perusahaan telah meningkatkan modal dengan menerbitkan saham baru yang diambil oleh PIS dengan inbreng aset *marine* non-sarana tambat sebesar Rp128.602. Selain itu Perusahaan memutuskan untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor untuk saham seri A dari semula Rp1.106.145 menjadi Rp1.234.747.

In accordance with Notarial Deed No. 30 dated 29 November 2022 by Lenny Janis Ishak S.H., The Company increased its capital by issuing new shares which were subscribed by PIS through in-kind capital contribution in the form of non-mooring marine assets of Rp128,602. In addition, the Company decided to increase the issued and paid-up capital for series A share from Rp1,106,145 to Rp1,234,747.

18. DIVIDEN

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 30 September 2024, Perusahaan mengumumkan dividen final untuk tahun 2023 sebesar AS\$75.000.000 (nilai penuh) setara dengan Rp1.135.350, yang mana telah dibayarkan pada Oktober 2024.

18. DIVIDENDS

Based on the Annual General Meeting of Shareholders on 30 September 2024, the Company declared final dividends for the 2023 financial year of US\$75,000,000 (full amount) equivalent to Rp1,135,350, which was paid in October 2024.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/51 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

19. PENDAPATAN USAHA

19. REVENUE

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	
Jasa penunjang operasi <i>marine</i>	2,132,567	2,526,724	<i>Marine operations support services</i>
Sewa kapal	1,875,961	1,276,436	<i>Vessel charter</i>
Keagenan kapal dan jasa kepelabuhanan	1,443,473	1,636,746	<i>Shipping agency and port services</i>
Jasa penyediaan tenaga kerja	994,297	275,079	<i>Labour supply services</i>
Jasa broker kapal, neto	795,070	688,458	<i>Charter broker services, net</i>
Perdagangan umum	169,575	240,966	<i>General trading</i>
Pengerukan	78,588	25,000	<i>Dredging</i>
Bongkar muat	67,283	75,604	<i>Cargo handling</i>
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp2.000)	<u>2,294</u>	<u>1,496</u>	<i>Others (each below Rp2,000)</i>

Jumlah	<u>7,559,108</u>	<u>6,746,509</u>	Total

Grup mengakui kontrak aset terkait pendapatan berikut ini:

The Group has recognised contract assets related to the following revenues:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	
Aset kontrak (Catatan 6)			Contract assets (Note 6)
Keagenan kapal dan jasa kepelabuhanan	726,525	391,817	<i>Shipping agency and port services</i>
Sewa kapal	343,780	369,230	<i>Vessel charter</i>
Jasa penyediaan tenaga kerja	227,981	52,017	<i>Labour supply services</i>
Jasa penunjang operasi <i>marine</i>	176,193	427,335	<i>Marine operations support services</i>
Jasa <i>broker</i> kapal	81,794	183,695	<i>Charter broker services</i>
Perdagangan umum	15,418	129,805	<i>General trading</i>
Pengerukan	<u>3,149</u>	<u>1,125</u>	<i>Dredging</i>

Jumlah, setelah dikurangi provisi penurunan nilai	<u>1,574,840</u>	<u>1,555,024</u>	Total, net of expected credit loss

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	
Liabilitas kontrak (Catatan 12)			Contract liabilities (Note 12)
Keagenan kapal dan jasa kepelabuhanan	<u>204,034</u>	<u>233,535</u>	<i>Shipping agency and port services</i>
Jumlah	<u>204,034</u>	<u>233,535</u>	Total

Lihat Catatan 24 untuk rincian transaksi dan saldo pihak berelasi.

Refer to Note 24 for related party transactions and balances.

Grup memiliki konsentrasi pelanggan yang melebihi 10% dari penjualan bersih konsolidasian kepada pihak-pihak berelasi Pertamina (Catatan 24).

The Group has a concentration of customers that exceeded 10% of the consolidated net revenue to related parties Pertamina (Note 24).

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/52 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

20. BEBAN POKOK PENDAPATAN

20. COST OF REVENUE

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	
Biaya karyawan dan kesejahteraan	1,852,068	1,513,660	Employee costs and welfare
Biaya kepelabuhanan	985,766	745,719	Port charges
Jasa penunjang operasi <i>marine</i>	870,836	771,508	Marine operations support services
Penyusutan (Catatan 9 dan 13)	768,711	748,651	Depreciation (Notes 9 and 13)
Pemeliharaan	122,602	108,325	Maintenance
Perlengkapan	118,604	67,487	Supplies
Lain-lain	245,367	198,643	Others
Jumlah	<u>4,963,954</u>	<u>4,153,993</u>	Total

Lihat catatan 24 untuk rincian transaksi dan saldo pihak berelasi.

Refer to Note 24 for related party transactions and balances.

Grup memiliki konsentrasi pemasok yang melebihi 10% dari beban pokok pendapatan bersih konsolidasian kepada pihak berelasi Pertamina dan Pelindo (Catatan 24).

The Group has a concentration of suppliers that exceeded 10% of the consolidated cost of revenue to related party Pertamina and Pelindo (Note 24).

21. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

21. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	
Biaya karyawan dan kesejahteraan	915,047	843,400	Employee costs and welfare
Perlengkapan kantor	75,954	78,087	Office supplies
Jasa profesional	73,627	66,313	Professional fees
Pemeliharaan bangunan	64,684	106,109	Maintenance of buildings
Penyusutan (Catatan 9 dan 13)	49,842	27,992	Depreciation (Notes 9 and 13)
Hubungan masyarakat	46,476	16,895	Public relations
Sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah	24,586	14,447	Short-term leases and leases of low value assets
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp2.000)	5,685	7,870	Others (each below Rp2,000)
Jumlah	<u>1,255,901</u>	<u>1,161,113</u>	Total

Lihat Catatan 24 untuk rincian transaksi dan saldo pihak berelasi.

Refer to Note 24 for related party transactions and balances.

22. PENDAPATAN/(BEBAN) LAIN-LAIN, NETO

22. OTHER INCOME/(EXPENSES), NET

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	
Keuntungan/(kerugian) atas selisih kurs, neto	15,027	(8,414)	Foreign exchange gain/(loss), net
Penyisihan tambahan atas provisi penurunan nilai piutang usaha dan kontrak aset neto (Catatan 5 dan 6)	(25,129)	(4,496)	Additional provision for impairment of trade receivables and contract assets, net (Notes 5 and 6)
Denda pajak dan beban pajak lain-lain	(4,913)	(5,438)	Taxes penalty and other tax expenses
Provisi atas kasus hukum (Catatan 26g)	-	(48,964)	Provision for legal case (Note 26g)
Lain-lain, neto	18,975	13,786	Others, net
Jumlah	<u>3,960</u>	<u>(53,526)</u>	Total

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/53 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

23. BEBAN KEUANGAN

23. FINANCE COSTS

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	
Beban keuangan atas pinjaman jangka panjang (Catatan 15)	55,282	69,750	Finance cost of long-term borrowings (Note 15)
Beban keuangan atas liabilitas sewa (Catatan 13b)	34,616	27,520	Finance costs of lease liabilities (Note 13b)
Jumlah	<u>89,898</u>	<u>97,270</u>	Total

24. SALDO DAN TRANSAKSI SIGNIFIKAN DENGAN PIHAK BERELASI

24. SIGNIFICANT BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

Dalam kegiatan usaha normal, Grup melakukan transaksi usaha dan bukan usaha dengan pihak-pihak berelasi, yang terafiliasi dengan Grup melalui kepemilikan langsung dan tak langsung, dan/atau di bawah kendali pihak yang sama ataupun entitas berelasi dengan Pemerintah. Harga jual atau beli antara pihak-pihak berelasi ditentukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, yang mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak ketiga.

In the normal course of business, the Group enters into trade and non-trade with related parties, which are affiliated with the Group through equity ownership, either direct or indirect, and/or under common control or Government-related entities. Sales or purchase price among related parties are made based on terms agreed by the parties, which may not be the same as those of the transactions between third parties.

Sifat hubungan dan transaksi dengan pihak yang berelasi adalah sebagai berikut:

The nature of transactions and relationships with related parties are as follows:

<u>Pihak berelasi dan entitas berelasi dengan Pemerintah/Related parties and Government-related entities</u>	<u>Sifat hubungan/Nature of relationships</u>	<u>Saldo dan sifat transaksi/Balances and nature of transactions</u>
PT Pertamina (Persero) ("Pertamina")	Perusahaan induk utama/Ultimate parent company	Beban pokok pendapatan, piutang usaha, kontrak aset dan utang usaha/Cost of revenue, trade receivables, contract assets and trade payables
PT Pertamina International Shipping ("PIS")	Pemegang saham mayoritas/Majority shareholder	Pendapatan, beban pokok pendapatan, piutang usaha, kontrak aset, utang usaha dan liabilitas kontrak/Revenue, cost of revenue, trade receivables, contract assets, trade payables and contract liabilities
PT Pertamina Energy Terminal ("PET")	Entitas sepengendali/Entity under common control	Pendapatan, beban pokok pendapatan, piutang usaha, kontrak aset, utang usaha dan penyertaan saham/Revenue, cost of revenue, trade receivables, contract assets, trade payables and investment in shares
PT Kilang Pertamina International ("KPI")	Entitas sepengendali/Entity under common control	Pendapatan, beban pokok pendapatan, piutang usaha, kontrak aset, dan utang usaha/Revenue, cost of revenue, trade receivables, contract asset and trade payables
PT Pertamina Patra Niaga ("Patra Niaga")	Entitas sepengendali/Entity under common control	Pendapatan, beban pokok pendapatan, piutang usaha, kontrak aset, utang usaha dan penyertaan saham/Revenue, cost of revenue, trade receivables, contract liabilities, trade payables and investment in shares
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI")	Entitas yang berelasi dengan Pemerintah/Government-related entity	Penempatan kas dan setara kas/Placement of cash and cash equivalents
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI")	Entitas yang berelasi dengan Pemerintah/Government-related entity	Penempatan kas dan setara kas /Placement of cash and cash equivalents
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Mandiri")	Entitas yang berelasi dengan Pemerintah/Government-related entity	Penempatan kas dan setara kas, pinjaman jangka panjang dan beban keuangan/Placement of cash and cash equivalents, long-term borrowings and finance costs
PT Bank Syariah Indonesia Tbk ("BSI")	Entitas yang berelasi dengan Pemerintah/Government-related entity	Penempatan kas dan setara kas, pinjaman jangka panjang dan beban keuangan/Placement of cash and cash equivalents, long-term borrowings and finance costs

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/54 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**24. SALDO DAN TRANSAKSI SIGNIFIKAN DENGAN
PIHAK BERELASI (lanjutan)**

**24. SIGNIFICANT BALANCES AND TRANSACTIONS
WITH RELATED PARTIES (continued)**

Pihak berelasi dan entitas berelasi dengan Pemerintah/Related parties and Government-related entities	Sifat hubungan/ Nature of relationships	Saldo dan sifat transaksi/ Balances and nature of transactions
PT Perta Arun Gas ("PAG")	Entitas sepengendali/Entity under common control	Pendapatan, beban pokok pendapatan, piutang usaha, kontrak aset dan utang usaha/Revenue, cost of revenue, trade receivables, contract assets and trade payables
PT Pertamina Retail ("PTPR")	Entitas sepengendali/Entity under common control	Pendapatan, beban pokok pendapatan, piutang usaha dan kontrak aset/Revenue, cost of revenue, trade receivables and contract assets
PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur ("PHKT")	Entitas sepengendali/Entity under common control	Pendapatan, piutang usaha dan kontrak aset/Revenue, trade receivables and contract assets
PT Pertamina Hulu Mahakam ("PHM")	Entitas sepengendali/Entity under common control	Pendapatan, piutang usaha dan kontrak aset/Revenue, trade receivables and contract assets
PT Pertamina Hulu Energi Offshore North-West Java ("PHE ONWJ")	Entitas sepengendali/Entity under common control	Pendapatan, piutang usaha dan kontrak aset/Revenue, trade receivables and contract assets
PT Pertamina Hulu Sanga Sanga ("PHSS")	Entitas sepengendali/Entity under common control	Pendapatan, piutang usaha dan kontrak aset/Revenue, trade receivables and contract assets
PT Pertamina Lubricants ("PTPL")	Entitas sepengendali/Entity under common control	Pendapatan, beban pokok pendapatan, piutang usaha, kontrak aset dan utang usaha/Revenue, cost of revenue, trade receivables, contract assets and trade payables
PT PGN LNG Indonesia ("PGN LNG")	Entitas sepengendali/Entity under common control	Pendapatan, piutang usaha, dan kontrak aset/Revenue, trade receivables and contract assets
PT Pertamina EP ("PEP")	Entitas sepengendali/Entity under common control	Pendapatan, piutang usaha dan kontrak aset/Revenue, trade receivables and contract assets
PT Pertamina Drilling Service ("PDSI")	Entitas sepengendali/Entity under common control	Pendapatan dan piutang usaha/Revenue and trade receivables
PT Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore ("PHE WMO")	Entitas sepengendali/Entity under common control	Pendapatan, piutang usaha dan kontrak aset/Revenue, trade receivables and contract assets
PT Pertamina Bina Medika ("Pertamedika")	Entitas sepengendali/Entity under common control	Beban umum dan administrasi dan utang usaha/General and administrative expenses and trade payables
PT Patra Logistik ("Patra Logistik")	Entitas sepengendali/Entity under common control	Beban pokok pendapatan dan utang usaha /Cost of revenue and trade payables
PT Nusantara Regas ("Nusantara Regas")	Entitas sepengendali/Entity under common control	Pendapatan, piutang usaha dan kontrak aset/Revenue, trade receivables and contract assets
PT Pertamina Hulu Energi Offshore Southeast Sumatra ("PHE OSES")	Entitas sepengendali/Entity under common control	Pendapatan, piutang usaha dan kontrak aset/Revenue, trade receivables and contract assets
PT Kilang Pertamina Balikpapan ("KP Balikpapan")	Entitas sepengendali/Entity under common control	Pendapatan, piutang usaha dan kontrak aset/Revenue, trade receivables and contract assets
PT Pertamina Hulu Energi North Sumatera Offshore ("PHE NSO")	Entitas sepengendali/Entity under common control	Pendapatan dan kontrak aset/Revenue and contract assets
PT Prima Armada Raya ("PAR")	Entitas sepengendali/Entity under common control	Beban umum dan administrasi dan utang usaha/General and administrative expenses and trade payables

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/55 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**24. SALDO DAN TRANSAKSI SIGNIFIKAN DENGAN
PIHAK BERELASI (lanjutan)**

**24. SIGNIFICANT BALANCES AND TRANSACTIONS
WITH RELATED PARTIES (continued)**

Pihak berelasi dan entitas berelasi dengan Pemerintah/Related parties and Government-related entities	Sifat hubungan/ Nature of relationships	Saldo dan sifat transaksi/ Balances and nature of transactions
PT Pertamina Training & Consulting ("PTC")	Entitas sepengendali/Entity under common control	Beban umum dan administrasi dan utang usaha/General and administrative expenses and trade payables
PT Mitra Tours & Travel ("MTT")	Entitas sepengendali/Entity under common control	Beban umum dan administrasi dan utang usaha/General and administrative expenses and trade payables
PT Pertamina International Marketing & Distribution Pte, Ltd ("PIMD")	Entitas sepengendali/Entity under common control	Liabilitas kontrak/Contract liabilities
PT Pertamina Hulu Rokan ("PHR")	Entitas sepengendali/Entity under common control	Pendapatan, piutang usaha dan kontrak aset/Revenue, trade receivables and contract assets
PT Pertamina Hulu Energi Jambi Merang ("PHE JM")	Entitas sepengendali/Entity under common control	Pendapatan dan kontrak aset/Revenue and contract assets
PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia ("ATPI")	Entitas sepengendali/Entity under common control	Beban umum dan administrasi dan utang usaha/General and administrative expenses and trade payables
PT Benggala Laju Abadi ("Benggala" atau "SPV PIS")	Entitas sepengendali/Entity under common control	Penyertaan saham/Investment in shares
PT Banggai Bahtera Laju Abadi ("Banggai" atau "SPV PIS")	Entitas sepengendali/Entity under common control	Penyertaan saham/Investment in shares
PT Aru Bahtera Laju Abadi ("Aru" atau "SPV PIS")	Entitas sepengendali/Entity under common control	Penyertaan saham/Investment in shares
PT Alor Bahtera Laju Abadi ("Alor" atau "SPV PIS")	Entitas sepengendali/Entity under common control	Penyertaan saham/Investment in shares
PT Ararkula Bahtera Laju Abadi ("Ararkula" atau "SPV PIS")	Entitas sepengendali/Entity under common control	Penyertaan saham/Investment in shares
PT Bangkit Bahtera Laju Abadi ("Bangkit" atau "SPV PIS")	Entitas sepengendali/Entity under common control	Penyertaan saham/Investment in shares
PT Liran Bahtera Laju Abadi ("Liran" atau "SPV PIS")	Entitas sepengendali/Entity under common control	Penyertaan saham/Investment in shares
PT Barung Bahtera Laju Abadi ("Barung" atau "SPV PIS")	Entitas sepengendali/Entity under common control	Penyertaan saham/Investment in shares
PT Miangas Bahtera Laju Abadi ("Miangas" atau "SPV PIS")	Entitas sepengendali/Entity under common control	Penyertaan saham/Investment in shares
PT Brass Bahtera Laju Abadi ("Brass" atau "SPV PIS")	Entitas sepengendali/Entity under common control	Penyertaan saham/Investment in shares
PT Damar Bahtera Laju Abadi ("Damar" atau "SPV PIS")	Entitas sepengendali/Entity under common control	Penyertaan saham/Investment in shares
PT Damanusa Bahtera Laju Abadi ("Damanusa" atau "SPV PIS")	Entitas sepengendali/Entity under common control	Penyertaan saham/Investment in shares
PT Bepondi Bahtera Laju Abadi ("Bepondi" atau "SPV PIS")	Entitas sepengendali/Entity under common control	Penyertaan saham/Investment in shares
PT Trans Yeong Maritime ("TYM")	Entitas ventura bersama/Joint venture entity	Pendapatan, beban pokok pendapatan, piutang usaha dan utang usaha/Revenue, cost of revenue, trade receivables and trade payables

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/56 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**24. SALDO DAN TRANSAKSI SIGNIFIKAN DENGAN
PIHAK BERELASI (lanjutan)**

**24. SIGNIFICANT BALANCES AND TRANSACTIONS
WITH RELATED PARTIES (continued)**

Pihak berelasi dan entitas berelasi dengan Pemerintah/Related parties and Government-related entities	Sifat hubungan/ Nature of relationships	Saldo dan sifat transaksi/ Balances and nature of transactions
PT Pelabuhan Indonesia (Persero) ("Pelindo")	Entitas yang berelasi dengan Pemerintah/Government-related entity	Pendapatan, beban pokok pendapatan, piutang usaha, kontrak aset dan utang usaha/Revenue, cost of revenue, trade receivables, contract assets and trade payables
PT Pelindo Marine Service ("Pelindo MS")	Entitas yang berelasi dengan Pemerintah/Government-related entity	Pendapatan dan piutang usaha/Revenue and trade receivables
PT Administrasi Medika ("Admedika")	Entitas yang berelasi dengan Pemerintah/Government-related entity	Beban umum dan administrasi dan utang usaha/General and administrative expenses and trade payables
PT Pratama Mitra Sejati ("PMS")	Entitas yang berelasi dengan Pemerintah/Government-related entity	Beban umum dan administrasi dan utang usaha/General and administrative expenses and trade payables
PT Sigma Cipta Utama ("SCU")	Entitas yang berelasi dengan Pemerintah/Government-related entity	Beban pokok pendapatan dan utang usaha/Cost of sales and trade payables
PT Jawa Satu Power ("JSP")	Entitas yang berelasi dengan Pemerintah/Government-related entity	Piutang usaha dan kontrak aset//Trade receivables and contract assets
PT Trans Pacific Petrochemical Indotama ("TPPI")	Entitas yang berelasi dengan Pemerintah/Government-related entity	Beban pokok pendapatan dan utang usaha/Cost of sales and trade payables
PT Peralife Insurance ("Peralife")	Entitas yang berelasi dengan Pemerintah/Government-related entity	Beban umum dan administrasi dan utang usaha/General and administrative expenses and trade payables
PT Surveyor Indonesia (Persero) ("Surveyor Indonesia")	Entitas yang berelasi dengan Pemerintah/Government-related entity	Beban umum dan administrasi dan utang usaha/General and administrative expenses and trade payables
PT Telkom Satelit Indonesia ("Telkomsat")	Entitas yang berelasi dengan Pemerintah/Government-related entity	Beban umum dan administrasi dan utang usaha/General and administrative expenses and trade payables
PT Biro Klasifikasi Indonesia ("BKI")	Entitas yang berelasi dengan Pemerintah/Government-related entity	Beban pokok pendapatan dan utang usaha/Cost of sales and trade payables
PT PAL Indonesia ("PAL")	Entitas yang berelasi dengan Pemerintah/Government-related entity	Utang usaha/Trade payables
PT Jasa Armada Indonesia ("IPCM")	Entitas anak dari BUMN yang dikendalikan pemerintah/ Subsidiaries of SOEs controlled by the Government	Beban pokok pendapatan dan utang usaha/Cost of sales and trade payables
PT Pelindo Jasa Maritim ("PJM")	Entitas anak dari BUMN yang dikendalikan pemerintah/ Subsidiaries of SOEs controlled by the Government	Beban pokok pendapatan dan utang usaha/Cost of sales and trade payables
PT Superintending Company of Indonesia ("SUCOFINDO")	Entitas anak dari BUMN yang dikendalikan pemerintah/ Subsidiaries of SOEs controlled by the Government	Beban umum dan administrasi dan utang usaha/General and administrative expenses and trade payables

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/57 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**24. SALDO DAN TRANSAKSI SIGNIFIKAN DENGAN
PIHAK BERELASI (lanjutan)**

**24. SIGNIFICANT BALANCES AND TRANSACTIONS
WITH RELATED PARTIES (continued)**

**Pihak berelasi dan entitas berelasi
dengan Pemerintah/Related parties
and Government-related entities**

**Sifat hubungan/
Nature of relationships**

**Saldo dan sifat transaksi/
Balances and nature of transactions**

PT Jasamarga Related Business ("JRB")

Entitas anak dari BUMN yang
dikendalikan pemerintah/
Subsidiaries of SOEs controlled
by the Government

Piutang usaha/Trade receivables

Saldo-saldo signifikan dengan pihak-pihak berelasi
dan entitas berelasi dengan Pemerintah adalah
sebagai berikut:

Significant balances with related parties and
Government-related entities are as follows:

Kas dan setara kas (Catatan 4)

Cash and cash equivalents (Note 4)

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, saldo
kas dan setara kas yang ditempatkan pada entitas
berelasi dengan Pemerintah masing-masing sebesar
8,85% dan 19,32% dari jumlah aset.

As at 31 December 2024 and 2023, the balances of
cash and cash equivalents placed in Government-
related entities represent 12.94% and 19.32%,
respectively, of the total assets.

Piutang usaha (Catatan 5)

Trade receivables (Note 5)

	2024	2023
KPI	487,272	15,102
PIS	330,309	648,915
Patra Niaga	203,657	33,299
PAG	93,192	12,116
PHE OSES	61,812	30,376
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp50.000)	109,530	141,407
Jumlah	1,285,772	881,215
Persentase terhadap jumlah aset	14.16%	9.76%

KPI
PIS
Patra Niaga
PAG
PHE OSES
Others (each
below Rp50,000)

Total

As a percentage of total assets

Kontrak aset (Catatan 6)

Contract assets (Note 6)

	2024	2023
PIS	741,971	285,873
Patra Niaga	231,086	427,938
PHE OSES	87,402	64,586
KPI	69,108	284,257
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp50.000)	179,646	163,404
Jumlah	1,309,213	1,226,058
Persentase terhadap jumlah aset	14.42%	13.59%

PIS
Patra Niaga
PHE OSES
KPI
Others (each
below Rp50,000)

Total

As a percentage of total assets

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/58 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**24. SALDO DAN TRANSAKSI SIGNIFIKAN DENGAN
PIHAK BERELASI (lanjutan)**

Saldo-saldo signifikan dengan pihak-pihak berelasi dan entitas berelasi dengan Pemerintah adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Penyertaan saham

	Kepemilikan/ Ownership (%)	2024	2023
SPV PIS	0.10%	5,285	5,285
PET	0.01%	1,200	1,200
Patra Niaga	0.01%	167	167
Jumlah		6,652	6,652

Persentase terhadap jumlah aset **0.07%** **0.07%**

Penyertaan saham diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas yang dicatat menggunakan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Utang usaha (Catatan 10)

	2024	2023
KPI	698,766	296,890
Pertamina	153,493	219,415
Patra Niaga	55,441	40,795
PIS	27,690	64,914
Pelindo	3,517	171,277
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp50.000)	176,303	142,094
Jumlah	1,115,210	935,385

**Persentase terhadap
jumlah liabilitas** **24.91%** **21.33%**

Liabilitas kontrak (Catatan 12)

	2024	2023
PIS	18,969	40,526
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp1.000)	1,338	627
Jumlah	20,307	41,153

**Persentase terhadap
jumlah liabilitas** **0.45%** **0.94%**

**24. SIGNIFICANT BALANCES AND TRANSACTIONS
WITH RELATED PARTIES (continued)**

Significant balances with related parties and Government-related entities are as follows: (continued)

Investment in shares

SPV PIS
PET
Patra Niaga

Total

**As a percentage
of total assets**

Investment in shares are classified as equity instruments measured at fair value through other comprehensive income.

Trade payables (Note 10)

KPI
Pertamina
Patra Niaga
PIS
Pelindo
Others (each
below Rp50,000)

Total

**As a percentage of
of total liabilities**

Contract liabilities (Note 12)

PIS
Others (each
below Rp1,000)

Total

**As a percentage of
of total liabilities**

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/59 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**24. SALDO DAN TRANSAKSI SIGNIFIKAN DENGAN
PIHAK BERELASI (lanjutan)**

Saldo-saldo signifikan dengan pihak-pihak berelasi dan entitas berelasi dengan Pemerintah adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Pinjaman jangka panjang (Catatan 15)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Mandiri	439,834	344,662
BSI	<u>92,218</u>	<u>137,375</u>
Jumlah	<u>532,052</u>	<u>482,037</u>
Persentase terhadap jumlah liabilitas	<u>11.89%</u>	<u>10.99%</u>

Transaksi signifikan dengan pihak-pihak berelasi dan entitas berelasi dengan Pemerintah adalah sebagai berikut:

Pendapatan usaha

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
PIS	2,075,862	2,178,552
Patra Niaga	2,028,757	1,356,306
KPI	1,204,464	982,642
PTPR	275,691	245,053
PHE OSES	181,133	204,278
PAG	151,334	153,012
PHM	143,329	19,538
Pelindo	102,872	7,373
PET	76,555	88,150
PHKT	63,776	10,597
PHI	-	256,768
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp50.000)	<u>235,522</u>	<u>188,734</u>
Jumlah	<u>6,539,295</u>	<u>5,691,003</u>
Persentase terhadap jumlah pendapatan usaha	<u>86.51%</u>	<u>84.35%</u>

**24. SIGNIFICANT BALANCES AND TRANSACTIONS
WITH RELATED PARTIES (continued)**

Significant balances with related parties and Government-related entities are as follows: (continued)

Long-term borrowings (Note 15)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Mandiri	439,834	344,662
BSI	<u>92,218</u>	<u>137,375</u>
Total	<u>532,052</u>	<u>482,037</u>
As a percentage of of total liabilities	<u>11.89%</u>	<u>10.99%</u>

Significant transactions with related parties and Government-related entities are as follows:

Revenue

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
PIS	2,075,862	2,178,552
Patra Niaga	2,028,757	1,356,306
KPI	1,204,464	982,642
PTPR	275,691	245,053
PHE OSES	181,133	204,278
PAG	151,334	153,012
PHM	143,329	19,538
Pelindo	102,872	7,373
PET	76,555	88,150
PHKT	63,776	10,597
PHI	-	256,768
Others (each below Rp50,000)	<u>235,522</u>	<u>188,734</u>
Total	<u>6,539,295</u>	<u>5,691,003</u>
As a percentage of of total revenue	<u>86.51%</u>	<u>84.35%</u>

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/60 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**24. SALDO DAN TRANSAKSI SIGNIFIKAN DENGAN
PIHAK BERELASI (lanjutan)**

Transaksi signifikan dengan pihak-pihak berelasi dan entitas berelasi dengan Pemerintah adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Beban pokok pendapatan

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Pelindo	573,266	375,025
Patra Niaga	454,183	477,087
KPI	441,798	296,443
PAG	146,004	64,563
PIS	64,542	68,820
Pertamina	52,340	42,073
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp50.000)	<u>104,831</u>	<u>95,245</u>
Jumlah	<u>1,836,964</u>	<u>1,419,256</u>

**Persentase terhadap jumlah
beban pokok pendapatan**

<u>37.01%</u>	<u>34.17%</u>

Beban umum dan administrasi

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
MTT	33,784	2,881
ATPI	30,363	18,369
PTC	29,867	10,680
Pertamedika	13,307	9,187
Admedika	13,054	31,713
PMS	8,617	5,344
Patra Jasa	6,920	1,361
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp1.000)	<u>2,186</u>	<u>1</u>
Jumlah	<u>138,098</u>	<u>79,536</u>

**Persentase terhadap jumlah
beban umum dan administrasi**

<u>11.00%</u>	<u>6.85%</u>

Kompensasi dan imbalan lain

Kompensasi dan imbalan lain yang diberikan oleh Perusahaan kepada manajemen kunci adalah sebagai berikut:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Gaji dan imbalan lainnya	<u>53,502</u>	<u>39,889</u>

**24. SIGNIFICANT BALANCES AND TRANSACTIONS
WITH RELATED PARTIES (continued)**

Significant transactions with related parties and Government-related entities are as follows: (continued)

Cost of revenue

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Pelindo	573,266	375,025
Patra Niaga	454,183	477,087
KPI	441,798	296,443
PAG	146,004	64,563
PIS	64,542	68,820
Pertamina	52,340	42,073
Lain-lain (masing-masing below Rp50,000)	<u>104,831</u>	<u>95,245</u>
Total	<u>1,836,964</u>	<u>1,419,256</u>

**As a percentage of
total cost of revenue**

<u>37.01%</u>	<u>34.17%</u>

General and administrative expenses

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
MTT	33,784	2,881
ATPI	30,363	18,369
PTC	29,867	10,680
Pertamedika	13,307	9,187
Admedika	13,054	31,713
PMS	8,617	5,344
Patra Jasa	6,920	1,361
Lain-lain (masing-masing below Rp1,000)	<u>2,186</u>	<u>1</u>
Total	<u>138,098</u>	<u>79,536</u>

**As a percentage of
total general and
administrative expenses**

<u>11.00%</u>	<u>6.85%</u>

Compensation and other benefits

Compensation and other benefits provided by the Company to its key management is as follows:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Salaries and other benefits	<u>53,502</u>	<u>39,889</u>

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/61 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

25. SALDO LABA DICADANGKAN

Undang-Undang Perseroan Terbatas Republik Indonesia No. 40/2007 yang diterbitkan pada bulan Agustus 2007, mengharuskan setiap Perusahaan untuk membentuk cadangan wajib dari laba bersih sampai cadangan mencapai paling sedikit 20% dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh. Tidak ada batasan waktu untuk membentuk cadangan tersebut.

Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diadakan pada tanggal 30 September 2024 yang diaktakan dalam Akta Notaris No. 19 oleh Ivan Lazuardi Suwana, S.H., M.Kn., tanggal 30 September 2024, para pemegang saham menyetujui Cadangan Wajib sebesar AS\$15.995.181 (nilai penuh) atau setara dengan Rp246.950 yang dialokasikan dari Saldo Laba yang belum ditentukan penggunaannya.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Perusahaan telah membentuk dana cadangan masing-masing sebesar Rp1.092.776 dan Rp845.826.

25. APPROPRIATED RETAINED EARNINGS

The Limited Liability Company Law of the Republic of Indonesia No. 40/2007 issued in August 2007, requires each Company to establish a statutory reserve from net profits amounting to at least 20% of a Company's issued and paid-up capital. There is no time limit on the establishment of such reserve.

Based on the Minutes of the Company's Annual General Meeting of Shareholders held on 30 September 2024 which was notarised in the Notarial Deed No. 19 of Ivan Lazuardi Suwana, S.H., M.Kn., dated 30 September 2024, the shareholders approved the General Reserves of US\$15,995,181 (full amount) or equivalent to Rp246,950 which were allocated from the Unappropriated Retained Earnings.

As at 31 December 2024 and 2023, the Company has provided for Rp1,092,776 and Rp845,826 respectively as general reserves.

26. PERIKATAN PENTING DAN KONTINJENSI

a. Perjanjian pengelolaan pelabuhan *bundling dan unbundling*

Pada tanggal 9 Juni 2021, konsorsium grup Perusahaan, yang terdiri dari Perusahaan, PPL, PMSol, PME dan PET, mengadakan perjanjian pengelolaan pelabuhan *bundling dan unbundling* terkait jasa kepelabuhanan, jasa *marine*, dan jasa konstruksi untuk *Subholding Refinery and Petrochemical* Pertamina. Perjanjian ini berlaku selama 10 (sepuluh) tahun yang efektif sejak tanggal 1 Mei 2021. Nilai kontrak atas perjanjian tersebut adalah Rp908.884 per tahun.

Pada tanggal 11 Juni 2021, konsorsium grup Perusahaan juga mengadakan perjanjian pengelolaan pelabuhan *bundling dan unbundling* terkait jasa kepelabuhanan, jasa *marine*, dan jasa konstruksi untuk *Subholding Commercial and Trading* Pertamina yang telah diperbaharui melalui addendum pada 8 November 2023. Perjanjian ini berlaku selama 10 (sepuluh) tahun yang efektif sejak tanggal 1 Mei 2021. Nilai kontrak atas perjanjian tersebut adalah Rp35 per liter dengan jumlah Rp1.835.965 per tahun.

26. SIGNIFICANT COMMITMENTS AND CONTINGENCIES

a. *Bundling and unbundling port management agreement*

On 9 June 2021, the Company's group consortium, which consists of the Company, PPL, PMSol, PME and PET, entered into a bundling and unbundling port management agreement related to port, marine and construction services for Subholding Refinery and Petrochemical Pertamina. The agreement is valid for 10 (ten) years effective from 1 May 2021. Contract value of this agreement is Rp908,884 per year.

On 11 June 2021, the Company's group consortium also entered into a bundling and unbundling port management agreement related to port, marine and construction services for Subholding Commercial and Trading Pertamina that has been renewed with addendum on 8 November 2023. The agreement is valid for 10 (ten) years effective from 1 May 2021. Contract value of this agreement is Rp35 for each liter with total amount of Rp1,835,965 per year.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/62 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**26. PERIKATAN PENTING DAN KONTINJENSI
(lanjutan)**

b. Perjanjian kerjasama dengan PAG

Pada tanggal 30 Januari 2015 telah ditandatangani perjanjian kerjasama pengelolaan terminal antara Perusahaan dengan PAG. Perjanjian ini berlaku selama tiga tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan. Nilai kontrak atas perjanjian tersebut adalah untuk jasa rutin sebesar Rp40.990 per tahun, dan untuk jasa non-rutin adalah sebesar pengeluaran nyata ditambah dengan *margin* yang sudah di atur dalam perjanjian.

Pada tanggal 30 Mei 2017, perjanjian ini diperpanjang selama lima belas tahun dan dapat diperpanjang lagi sesuai kesepakatan.

c. Perjanjian layanan sewa *shorebase*

Pada tanggal 1 November 2023, telah ditandatangani perjanjian layanan sewa *shorebase* antara Perusahaan dengan PHKT. Perjanjian ini berlaku selama 24 bulan yang efektif sejak tanggal 1 November 2023. Nilai total kontrak selama jangka waktu perjanjian tidak melebihi Rp118.953.

d. Perjanjian kerjasama dengan Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia ("APROBI")

Pada tanggal 30 Mei 2024 telah ditandatangani perjanjian kerjasama pengelolaan *ship-to-ship* antara Perusahaan dengan APROBI. Perjanjian ini berlaku selama satu tahun dan memiliki opsi perpanjangan sesuai kesepakatan. Nilai kontrak dengan skema penyewaan 2 kapal *floating storage* dan 2 kapal *harbor tug* dengan biaya sebesar Rp29.709 per bulan. Nilai kontrak akan dibayarkan masing-masing pengguna sesuai dengan perjanjian pembagian pada kontrak.

e. Perjanjian sewa berdasarkan waktu

Perusahaan memiliki beberapa perjanjian untuk menyewakan kapal-kapal ke beberapa pelanggan. Perjanjian yang signifikan adalah dengan Pertamina. Periode perjanjian-perjanjian tersebut umumnya 1 - 2 tahun dengan opsi perpanjangan jangka waktu.

Selain itu, pada tahun 2024, Perusahaan telah menandatangani satu kontrak sewa kapal dengan Harvester Offshore untuk periode dua belas bulan tertanggal 17 Mei 2024 untuk kapal AHTS Transko Moloko dengan nilai total AS\$1.860.000.

f. Jasa Manning Agent

Pada tanggal 1 Februari 2024, telah ditandatangani perjanjian Jasa *Manning Agent* antara PMSol dengan PIS. Perjanjian ini berlaku selama dua tahun yang efektif sejak tanggal 1 Februari 2024. Nilai kontrak atas perjanjian tersebut adalah Rp1.288.109.

26. SIGNIFICANT COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

b. Contract with PAG

On 30 January 2015, a cooperation agreement for port terminal management was signed between the Company and PAG. The agreement is valid for three years and may be extended according to the agreement. The contract value of the agreement is for a routine service at Rp40,990 per year, and for non-routine services amounting to actual expenditures plus a margin as set out in the agreement.

On 30 May 2017, this agreement was extended for fifteen years and may be further extended according to the agreement.

c. Shorebase rental service

On 1 November 2023, an agreement for shorebase rental services was signed between the Company and PHKT. The agreement is valid for 24 months effective from 1 November 2023. The total contract value during agreement valid is no more than Rp118,953.

d. Agreement with Indonesia Biofuel Producer Association ("APROBI")

On 15 May 2024, a cooperation agreement for ship-to-ship management was signed between the Company and APROBI. The agreement is valid for one year and have extension clause according to the agreement. The contract value with the rental scheme for 2 floating storage vessels and 2 harbor tugboats is Rp29,709 per month. The contract value will be paid by each user according to the sharing agreement in the contract.

e. Time charter agreement

The Company has several agreements to lease vessels to various customers. The significant agreements are with Pertamina. The period of these agreements is typically made for 1 - 2 years with options to extend the term.

Furthermore, in 2024, the Company signed one vessel charter agreement with Harvester Offshore, for a period of twelve months dated 17 May 2024 for AHTS Transko Moloko with a total value US\$1,860,000.

f. Manning Agent Service

On 1 February 2024, an agreement for Manning Agent Service was signed between PMSol and PIS. The agreement is valid for two years effective from 1 February 2024. The total contract value of the agreement is Rp1,288,109.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/63 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**26. PERIKATAN PENTING DAN KONTINJENSI
(lanjutan)**

**g. Kasus hukum atas lahan disewakan kepada
PT Batubara Mandiri ("PTBBM")**

Pada tanggal 27 April 2021, Perusahaan digugat oleh PTBBM terkait pembatasan penggunaan lahan sewa di Lahan Bagus Kuning, Plaju, Palembang. Menurut PT Batubara Mandiri, mereka hanya dapat menggunakan lahan seluas 15.000m² dari 42.650m² luas lahan yang dinyatakan dalam kontrak.

Pada tanggal 8 April 2014, PTBBM menerima surat peringatan dan denda dari Dinas Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan dikarenakan lokasi lahan sewa tidak termasuk di dalam lokasi persediaan batu bara yang telah ditentukan. Dikarenakan pembatasan ini mempengaruhi aktivitas operasional. PTBBM berpendapat bahwa Perusahaan bertanggung jawab atas kerugian mereka sebesar Rp298.964.

Pada tanggal 22 September 2021, perkara ini ditangani oleh Pengadilan Negeri Batam dimana keputusan pengadilan memenangkan Perusahaan. Berdasarkan Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura, Pengadilan Negeri Batam berpendapat bahwa perkara ini dapat diputuskan oleh Pengadilan Negeri Palembang. Atas putusan ini, PTBBM mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau.

Pada tanggal 29 Desember 2021, Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau mengabulkan banding yang diajukan PTBBM dan memutuskan bahwa Pengadilan Negeri Batam berhak dan berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara. Atas putusan ini, Perusahaan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Pada tanggal 13 Desember 2022, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dan memutuskan bahwa Pengadilan Negeri Batam berhak dan berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara.

Pada 12 April 2023, Pengadilan Negeri Batam memenangkan Perusahaan dan memutuskan bahwa PTBBM harus membayar Rp10.567 kepada Perusahaan. Selanjutnya, PTBBM mengajukan banding, dan pada 8 September 2023, Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau mengabulkan banding tersebut, mewajibkan Perusahaan membayar Rp48.964. Perusahaan kemudian mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia dan menyampaikan Memori Kasasi pada 26 September 2023.

**26. SIGNIFICANT COMMITMENTS AND
CONTINGENCIES (continued)**

**g. Legal case of leased land to PT Batubara
Mandiri ("PTBBM")**

On 27 April 2021, the Company was sued by PTBBM due to leased land use limitation in Lahan Bagus Kuning, Plaju, Palembang. According to PT Batubara Mandiri, they can only use 15,000m² from 42,650m² of total area stated in contract.

On 8 April 2014, PTBBM received a warning letter and penalty from the Ministry of Energy and Mineral Resources of South Sumatera due to leased land location not included in the location determined as coal stockpile area. Since these limitations are impacting their operational activity. PTBBM believes that the Group is responsible for their losses amounting to Rp298,964.

On 22 September 2021, this legal case was handled by Batam District Court which decided in favour of the Company. Based on Regulation of Legal Events for Regions Outside Java and Madura, Batam District Court is of the opinion that this legal case should be decided by Palembang District Court. Against this decision, the PTBBM filed an appeal to the Riau High Court.

On 29 December 2021, Riau High Court granted the appeal request by PTBBM and decided that the Batam District Court has the right and authority to examine and decide cases. Against this decision, the Defendant filed an appeal to the Supreme Court.

On 13 December 2022, the Supreme Court rejected the appeal and decided that the Batam District Court had the right and authority to examine and decide the case.

On 12 April 2023, the Batam District Court ruled in favor of the Company and decided that PTBBM must pay Rp10,567 to the Company. Subsequently, PTBBM filed an appeal, and on 8 September 2023, the Riau Islands High Court granted PTBBM appeal, requiring the Company to pay Rp48,964. The Company then filed a cassation to the Supreme Court of the Republic of Indonesia and submitted the Cassation Memorandum on 26 September 2023.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/64 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**26. PERIKATAN PENTING DAN KONTINJENSI
(lanjutan)**

**g. Kasus hukum atas lahan disewakan kepada
PT Batubara Mandiri ("PTBBM") (lanjutan)**

Pada tanggal 12 Agustus 2024, Perusahaan telah menerima Salinan Putusan Kasasi atas kasus tersebut, dimana permohonan kasasi Perusahaan ditolak sehingga harus membayar ganti rugi kepada PTBBM sebesar Rp48.964.

Pada tanggal 30 Desember 2024, Perusahaan telah mendaftarkan dan mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali di Pengadilan Negeri Batam.

Pendapat Perusahaan atas hasil kasus hukum ini adalah terdapat potensi kerugian, sehingga Perusahaan telah mencadangkan kerugian atas tuntutan ini sebesar Rp48.964 pada 31 Desember 2024.

**h. Perkara Perdata di Badan Arbitrase Nasional
Indonesia ("BANI") dengan PT Dok Bahari
Nusantara ("DBN")**

Pada 18 September 2019, Perusahaan dan DBN telah menandatangani perjanjian pembelian dan pembangunan 3 unit kapal *harbour tug* 3200 HP. Berdasarkan perjanjian tersebut, DBN memiliki kewajiban untuk membangun dan menyerahkan kepada Perusahaan sejumlah kapal tersebut dalam kurun waktu 13 bulan dengan nilai sebesar Rp156.000.

Dikarenakan DBN tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk menyelesaikan pembangunan kapal sesuai jangka waktu dalam perjanjian, Perusahaan telah melakukan pembatalan lebih awal terhadap perjanjian tersebut pada tahun 2021.

Pada tanggal 10 November 2022, Perusahaan telah mendaftarkan permohonan perkara perdata melalui Arbitrase di BANI atas tuntutan ganti rugi keterlambatan penyelesaian pembangunan Kapal sesuai jangka waktu di dalam Perjanjian. Tuntutan ganti rugi yang diajukan adalah sebesar Rp97.869.

**26. SIGNIFICANT COMMITMENTS AND
CONTINGENCIES (continued)**

**g. Legal case of leased land to PT Batubara
Mandiri ("PTBBM") (continued)**

On 12 August 2024, the Company received a copy of the Supreme Court's decision regarding the case, in which the Company's appeal was rejected, and are required to pay compensation to PTBBM in the amount of Rp48,964.

On 30 December 2024, the Company registered and submitted a Legal Effort for Judicial Review at the Batam District Court.

The Company opinion of the results of this legal case is it has the potential loss, so the Company has recorded provision for the loss on this claim amounting to Rp48,964 million as at 31 December 2024.

**h. Civil Case at the Indonesian National
Arbitration Board ("BANI") with PT Dok Bahari
Nusantara ("DBN")**

On 18 September 2019, the Company and DBN signed an agreement to purchase and build 3 units of harbor tug 3200 HP. Based on the agreement, DBN has an obligation to build and deliver to the Company these ships within 13 months with a value of Rp156,000.

Due to DBN not being able to fulfill its obligations to complete the shipbuilding within the timeframe based on the agreement, the Company terminated the agreement earlier in 2021.

On 10 November 2022, the Company registered a request for a civil case through Arbitration at BANI regarding claim for compensation of delays in the completion of the shipbuilding according to the timeframe in the Agreement. The claim for compensation that was filed amounted to Rp97,869.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/65 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**26. PERIKATAN PENTING DAN KONTINJENSI
(lanjutan)**

h. Perkara Perdata di Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI") dengan PT Dok Bahari Nusantara ("DBN") (lanjutan)

Pada tanggal 8 September 2023 Majelis Arbiter telah membacakan Putusan Perkara yang memutuskan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan Permohonan Perusahaan untuk sebagian;
- b. Mewajibkan Perusahaan dan DBN untuk melaksanakan Kesepakatan Perdamaian tertanggal 24 Juli 2023 yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak, kecuali kewajiban untuk membayar denda oleh DBN kepada Perusahaan karena telah ditolak oleh Majelis Arbitrase;
- c. Menghukum DBN untuk membayar ganti kerugian atas 1 (satu) unit Kapal HT 3200 HP (DBN-042) yang telah dijual oleh DBN tanpa persetujuan Perusahaan sebesar Rp11.500 kepada Perusahaan;
- d. Mewajibkan Perusahaan dan DBN untuk membayar biaya administrasi, biaya pemeriksaan, dan biaya arbiter masing-masing ½ (seperdua) bagian;
- e. Mewajibkan dan memerintahkan DBN untuk membayar/mengembalikan ½ (seperdua) bagian biaya administrasi, biaya pemeriksaan, dan biaya arbiter, yaitu sebesar Rp774.333 kepada Perusahaan;
- f. Menolak permohonan Perusahaan untuk selebihnya;
- g. Mewajibkan Para Pihak untuk melaksanakan putusan ini selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari kalender terhitung sejak putusan arbitrase dibacakan;
- h. Menyatakan putusan arbitrase ini adalah putusan yang final dan mengikat kedua belah pihak serta mempunyai kekuatan hukum tetap bagi Para Pihak; dan
- i. Menetapkan agar Salinan Otentik Putusan Arbitrase ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Cirebon dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa atas biaya Perusahaan dan DBN.

26. SIGNIFICANT COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

h. Civil Case at the Indonesian National Arbitration Board ("BANI") with PT Dok Bahari Nusantara ("DBN") (continued)

On 8 September 2023, the Arbitration Panel issued its decisions as follows:

- a. Grant the Company's Application in part;
- b. Mandate the Company and DBN to implement the Settlement Agreement dated 24 July 2023 which has been made and signed by the Parties, except for the obligation to pay fines by DBN to the Company because it has been rejected by the Arbitration Panel;
- c. Sentence DBN to compensate for 1 (one) unit of HT 3200 HP Ship (DBN-042) which had been sold by DBN without the Company's approval in the amount of Rp11,500 to the Company;
- d. Mandate each of the Company and DBN pay ½ (half) portion of administration fees, inspection fees and arbitrator fees respectively;
- e. Mandate and order DBN to pay/to return ½ (half) of the administrative costs, examination costs and arbitrator cost, in the amount of Rp774,333 to the Company;
- f. Reject the the Company application for the remaining;
- g. Mandate the Parties to implement these decisions no later than 45 (forty five) calendar days from the date the arbitration decision was issued;
- h. Declare that this arbitration decision is final and binding to both parties and has permanent legal force for the Parties; and
- i. Order that the Authentic Copy of the Arbitration Decision be registered at the Cirebon District Court within the time limit as regulated in the provisions of Law Number 30 of 1999 regarding Arbitration and Alternative Dispute Resolution by the Company and DBN.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/66 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

26. PERIKATAN PENTING DAN KONTINJENSI (lanjutan)	26. SIGNIFICANT COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

h. Perkara Perdata di Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI") dengan PT Dok Bahari Nusantara ("DBN") (lanjutan)

Kesepakatan perdamaian yang dimaksud adalah berkaitan dengan:

- a. Para Pihak sepakat untuk dilakukan serah terima atas 2 (dua) unit Kapal HT 3200 HP dengan harga sebesar Rp104.000 dikurangi denda dan ganti rugi yang nilainya akan diserahkan dan diputuskan oleh Majelis Arbitrase;
- b. Termin pembayaran pertama sebesar 35% akan dibayarkan melalui rekening escrow; dan
- c. Termin pembayaran kedua adalah sisa setelah dikurangi pembayaran Termin Pertama setelah Kapal selesai dibangun yang diikuti penandatanganan *Protocole of Delivery and Acceptance* ("PODA").

Pada tanggal 26 Juni 2024, Perusahaan bersama dengan Asuransi Tugu Pertamina Indonesia ("ATPI") melakukan penjualan kapal dengan harga optimal untuk menutup harga kerugian.

Pada tanggal 5 Agustus 2024, Perusahaan mengirimkan dua surat kepada ATPI berkaitan dengan penjualan kapal. ATPI sedang melaksanakan *Aanwizing/open house* di kantor DBN Cirebon bersama Balai Lelang, DBN dan KPKNL sebagai bagian dari proses lelang 2 Unit Kapal tersebut. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, proses lelang yang dimaksud masih berlangsung.

h. Civil Case at the Indonesian National Arbitration Board with PT Dok Bahari Nusantara ("DBN") (continued)

The Settlement Agreement is related to:

- a. *The Parties agreed to hand over 2 (two) units of HT 3200 HP vessels at the price of Rp104,000 minus fines and compensation, the value of which will be submitted to and decided by the Arbitration Tribunal;*
- b. *The first payment term of 35% will be paid through an escrow account; and*
- c. *The second payment term is the remaining amount after deducting the first payment term, once the vessel is completed and followed by the signing of the Protocole of Delivery and Acceptance ("PODA").*

On 26 June 2024, the Company sold the vessel to Asuransi Tugu Pertamina Indonesia ("ATPI") at an optimal price to cover the loss.

*On 5 August 2024, the Company sent two letters to ATPI regarding the sale of the vessels. ATPI is conducting *Aanwizing/open house* at the DBN Cirebon office together with the Auction House, DBN, and KPKNL as part of the auction process for the 2 units of the vessel. As at the completion date of these consolidated financial information, auction process is still ongoing.*

27. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Risiko pasar

Risiko pasar adalah risiko nilai wajar arus kas masa depan suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan harga pasar yang menggambarkan risiko tingkat suku bunga dan risiko mata uang asing, harga pasar mengandung dua tipe risiko: risiko tingkat suku bunga dan risiko nilai tukar mata uang asing.

27. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

Market risk

Market risk is the risk that the fair value of future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market prices which represent interest rate risk and foreign currency risk, market prices contain two types of risk: interest rate risk and foreign exchange rate risk.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/67 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

27. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Risiko tingkat suku bunga

Risiko tingkat suku bunga adalah risiko dimana arus kas di masa depan akan berfluktuasi karena perubahan tingkat suku bunga pasar. Grup terpengaruh risiko perubahan suku bunga pasar terutama terkait dengan kas dan setara kas, utang pembiayaan konsumen, liabilitas sewa pembiayaan dan pinjaman bank jangka panjang yang dimiliki Grup.

Tidak ada kebijakan formal untuk lindung nilai sehubungan dengan eksposur tingkat suku bunga, eksposur terhadap risiko tingkat suku bunga dipantau secara berkelanjutan.

Pada tanggal 31 Desember 2024, jika tingkat suku bunga pinjaman lebih tinggi/lebih rendah sebesar 100 basis poin dengan semua variabel konstan, laba sebelum pajak penghasilan badan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 akan lebih rendah/tinggi sebesar Rp238 terutama sebagai akibat lebih tinggi/lebih rendah biaya bunga atas pinjaman dengan tingkat bunga mengambang.

Risiko nilai tukar mata uang asing

Risiko nilai tukar mata uang asing adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa datang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan nilai tukar mata uang asing. Risiko yang dihadapi oleh Grup sebagai akibat fluktuasi nilai tukar terutama terkait dengan kas dan setara kas, piutang usaha, aset kontrak, piutang sewa pembiayaan, utang usaha, liabilitas kontrak dan pinjaman jangka panjang dalam mata uang Dolar AS.

Pada tanggal 31 Desember 2024, Grup memiliki aset keuangan neto dalam mata uang asing sebesar AS\$45.504.580 (nilai penuh) (2023: AS\$30.246.984), jika nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS melemah/menguat sebanyak 1% dengan semua variabel konstan, laba sebelum pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 akan lebih tinggi/rendah sebesar Rp7.352.

Risiko kredit

Pada tanggal pelaporan, eksposur maksimum Grup terhadap risiko kredit adalah sebesar nilai tercatat masing-masing kategori dari aset keuangan yang disajikan pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

Untuk mengukur KKE, piutang usaha dan kontrak aset telah dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko kredit gabungan dan waktu jatuh tempo.

27. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Interest rate risk

Interest rate risk is the risk that the future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rates. The Group's exposure to the risk of changes in market interest rates relates primarily to the Group's cash and cash equivalents, consumer finance liability, finance lease liabilities and long-term bank loans.

There is no formal hedging policy with respect to the interest rate exposure, exposure to interest rate is monitored on an ongoing basis.

As at 31 December 2024, had the interest rates of the loans and borrowings been 100 basis points higher/lower with all other variables held constant, income before corporate income tax for the year ended 31 December 2024 would have been Rp238 lower/higher, accordingly, mainly as a result of higher/lower interest charges on the loans and borrowings with floating interest rates.

Foreign exchange rate risk

Foreign exchange rate risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in foreign exchange rates. The Group's exposure to exchange rate fluctuations results primarily from US Dollar denominated cash and cash equivalents, trade receivables, contract assets, finance lease receivables, trade payables, contract liabilities and long-term borrowings.

As at 31 December 2024, The Group have a net financial asset denominated in foreign currency amounting to US\$45,504,580 (full amount) (2023: US\$30,246,984), had the exchange rate of the Rupiah against US Dollar depreciated/appreciated by 1%, with all other variables held constant, profit before income tax for the year ended 31 December 2024 would have been Rp7,352 higher/lower.

Credit risk

At the reporting date, the Group's maximum exposure to credit risk is represented by the carrying amount of each class of financial assets presented in the consolidated statement of financial position.

To measure the ECL, trade receivables and contract assets have been grouped based on shared credit risk characteristics and the days past due.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/68 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

27. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Risiko kredit (lanjutan)

Tarif kerugian ekspektasian adalah berdasarkan profil pembayaran penjualan masing-masing selama periode 36 bulan sebelum 31 Desember 2024 atau 2023 dan kerugian kredit historis terkait yang dialami dalam periode ini. Tarif historis kerugian disesuaikan dengan informasi pada saat ini dan dimasa depan atas faktor makroekonomi yang mempengaruhi kemampuan pelanggan untuk melunasi piutangnya. Grup telah mengidentifikasi harga minyak mentah sebagai faktor yang paling relevan dan menyesuaikan tarif kerugian historis berdasarkan perubahan yang diekspektasi pada faktor tersebut.

Pada tanggal 31 Desember 2024, piutang usaha sebesar Rp1.615.117 (2023: Rp1.070.123) mengalami penurunan nilai dan telah diprovokasi sebesar Rp130.048 (2023: Rp107.281).

Pada tanggal 31 Desember 2024, aset kontrak sebesar Rp1.581.453 (2023: Rp1.559.275) mengalami penurunan nilai dan telah diprovokasi sebesar Rp6.613 (2023: Rp4.251).

Risiko likuiditas

Risiko likuiditas didefinisikan sebagai risiko saat posisi arus kas Grup menunjukkan bahwa pendapatan jangka pendek tidak cukup untuk menutupi pengeluaran jangka pendek.

Kebutuhan likuiditas kas Grup terutama berasal dari kebutuhan untuk melakukan pembayaran biaya operasional kapal dan pelunasan atas pinjaman bank jangka panjang. Sumber dana pembayaran berasal dari kontrak sewa kapal jangka pendek, menengah dan panjang dan pendanaan yang diperoleh melalui pinjaman bank jangka panjang.

Grup secara rutin mengevaluasi proyeksi arus kas dan arus kas aktual dan terus menerus menjaga kestabilan hari pembayaran utang dan penerimaan piutangnya.

27. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Credit risk (continued)

The expected loss rates are based on the payment profiles of sales over a period of 36 months before 31 December 2024 or 2023, respectively and the corresponding historical credit losses experienced within this period. The historical loss rates are adjusted to reflect current and forward-looking information on macroeconomic factors affecting the ability of the customers to settle the receivables. The Group has identified the crude oil prices to be the most relevant factor and accordingly adjusts the historical loss rates based on expected changes in this factor.

As at 31 December 2024, trade receivables of Rp1,615,117 (2023: Rp1,070,123) were impaired and had been provided for with an amount of Rp130,048 (2023: Rp107,281).

As at 31 December 2024, contract assets of Rp1,581,453 (2023: Rp1,559,275) were impaired and had been provided for with an amount of Rp6,613 (2023: Rp4,251).

Liquidity risk

The liquidity risk is defined as a risk when the cash flow position of the Group indicates that the short-term revenue is not enough to cover the short-term expenditure.

The Group's liquidity requirements mainly come from payments and repayments of long-term borrowings vessel operation costs. The source of funds to fulfil the repayment of long-term bank loans is from contractual rental with third parties in the short, medium and long-term and funds obtained from long-term bank loans.

The Group evaluates its projected and actual cash flow information and continuously maintain its payables and receivables days' stability.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/69 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

27. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

27. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Risiko likuiditas (lanjutan)

Liquidity risk (continued)

Tabel berikut ini menunjukkan profil jangka waktu pembayaran liabilitas keuangan Grup berdasarkan pembayaran kontraktual dalam kontrak:

The table below summarises the maturity profile of the Group's financial liabilities based on contractual payments:

	<u>< 1 tahun/ < 1 year</u>	<u>1 - 2 tahun/ 1 - 2 years</u>	<u>2 - 3 tahun/ 2 - 3 years</u>	<u>> 3 tahun/ > 3 years</u>	<u>Jumlah/Total</u>
31 Desember 2024					
Liabilitas keuangan					
Utang usaha					
- Pihak berelasi	1,115,210	-	-	-	1,115,210
- Pihak ketiga	172,733	-	-	-	172,733
Biaya masih harus dibayar	1,246,306	-	64	-	1,246,370
Liabilitas kontrak					
- Pihak berelasi	20,307	-	-	-	20,307
- Pihak ketiga	183,727	-	-	-	183,727
Liabilitas sewa	403,346	72,754	39,903	29,066	545,069
Pinjaman jangka panjang	217,412	160,657	138,739	147,933	664,741
Jumlah	<u>3,359,041</u>	<u>233,411</u>	<u>178,706</u>	<u>176,999</u>	<u>3,948,157</u>

31 December 2024
Financial liabilities
Trade payables
Related parties -
Third parties -
Accrued expenses
Contract liabilities
Related parties -
Third parties -
Lease liabilities
Long-term borrowings
Total

	<u>< 1 tahun/ < 1 year</u>	<u>1 - 2 tahun/ 1 - 2 years</u>	<u>2 - 3 tahun/ 2 - 3 years</u>	<u>> 3 tahun/ > 3 years</u>	<u>Jumlah/Total</u>
31 Desember 2023					
Liabilitas keuangan					
Utang usaha					
- Pihak berelasi	935,385	-	-	-	935,385
- Pihak ketiga	91,727	-	-	-	91,727
Biaya masih harus dibayar	1,190,971	64	-	-	1,191,035
Liabilitas kontrak					
- Pihak berelasi	41,153	-	-	-	41,153
- Pihak ketiga	192,382	-	-	-	192,382
Liabilitas sewa	352,878	95,956	54,035	52,400	555,269
Pinjaman jangka panjang	335,286	215,682	113,109	136,739	800,816
Jumlah	<u>3,139,782</u>	<u>311,702</u>	<u>167,144</u>	<u>189,139</u>	<u>3,807,767</u>

31 December 2023
Financial liabilities
Trade payables
Related parties -
Third parties -
Accrued expenses
Contract liabilities
Related parties -
Third parties -
Lease liabilities
Long-term borrowings
Total

Estimasi nilai wajar

Fair value estimation

Nilai wajar adalah suatu jumlah dimana suatu aset dapat dipertukarkan atau suatu liabilitas diselesaikan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Fair value is the amount for which an asset could be exchanged or liability settled between knowledgeable and willing parties in an arm's length transaction.

Aset dan liabilitas keuangan lancar Grup diharapkan akan dapat direalisasi atau diselesaikan dalam jangka waktu dekat, kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar. Oleh karena itu, nilai tercatatnya mendekati nilai wajarnya.

The Group's current financial assets and liabilities are expected to be realised or settled in the near term, except for financial assets which are measured at fair value. Therefore, their carrying amounts approximate their fair value.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/70 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

27. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Estimasi nilai wajar (lanjutan)

Grup menganalisis aset keuangan yang diukur pada nilai wajar, Perbedaan pada setiap tingkatan metode penilaian dijelaskan sebagai berikut:

- Harga dikutip (tidak disesuaikan) dari pasar yang aktif untuk aset dan liabilitas yang identik (Tingkat 1);
- Input selain harga yang dikutip dari pasar yang disertakan pada Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung (yaitu sebagai sebuah harga) atau secara tidak langsung (yaitu sebagai turunan dari harga) (Tingkat 2); dan
- Input untuk aset atau liabilitas yang tidak didasarkan pada data pasar yang dapat diobservasi (informasi yang tidak dapat diobservasi) (Tingkat 3).

Hirarki nilai wajar Grup pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

2024			
<u>Jumlah/Total</u>	<u>Tingkat 1/ Level 1</u>	<u>Tingkat 2/ Level 2</u>	<u>Tingkat 3/ Level 3</u>
Penyertaan saham/ <i>Investments in shares</i>	6,652	-	6,652
Jumlah/Total	6,652	-	6,652

27. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Fair value estimation (continued)

The Group analyses its financial assets which are measured at fair value, The different levels of valuation methods have been defined as follows:

- Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities (Level 1);
- Inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly (that is, as prices) or indirectly (that is, derived from prices) (Level 2); and
- Inputs for the assets or liability that are not based on observable market data (that is, unobservable input) (Level 3).

The Group's fair value hierarchy as of 31 December 2024 is as follows:

28. ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN

Pada tanggal 31 Desember 2024, Grup mengklasifikasikan kas dan setara kas, kas yang dibatasi penggunaannya, piutang usaha, aset kontrak, piutang lainnya dan piutang sewa pembiayaan sebesar Rp4.277.676 (2023: Rp4.386.003) sebagai aset keuangan yang dicatat pada biaya amortisasi dan piutang, serta mengklasifikasikan penyertaan saham sebesar Rp6.652 (2023: Rp6.652) sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Pada tanggal 31 Desember 2024, Grup mengklasifikasikan utang usaha, biaya masih harus dibayar, liabilitas kontrak, utang dividen, liabilitas sewa, pinjaman jangka panjang sebesar Rp4.141.632 (2023: Rp3.999.278) sebagai liabilitas keuangan yang dicatat pada biaya amortisasi.

28. FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES

As at 31 December 2024, the Group classified its cash and cash equivalents, restricted cash, trade receivables, contract assets, other receivables and finance lease receivables amounting to Rp4,277,676 (2023: Rp4,386,003) as financial assets at amortised cost, and classified its investment in shares amounting to Rp6,652 (2023: Rp6,652) as financial assets measured at fair value through other comprehensive income.

As at 31 December 2024, the Group classified its trade payables, accrued expenses, contract liabilities, dividends payable, lease liabilities, long-term borrowings amounting to Rp4,141,632 (2023: Rp3,999,278) as financial liabilities measured at amortised cost.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/71 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

29. INFORMASI TAMBAHAN KAS

29. SUPPLEMENTAL CASH FLOW INFORMATION

Transaksi non-kas

Non-cash transactions

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	
Perolehan aset hak-guna melalui sewa	489,884	591,984	Acquisition of right-of-use assets through lease liabilities
Perolehan aset tetap melalui utang usaha	-	27,520	Acquisition of fixed assets through trade payables
Reklasifikasi biaya dibayar di muka pada aset hak-guna	5,182	-	Reclassification of prepayment to right-of-use asset

Rekonsiliasi liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan

Reconciliation of liabilities from financing activities

Tabel di bawah ini menunjukkan rekonsiliasi liabilitas yang timbul dari pendanaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut:

The below table sets out a reconciliation of liabilities arising from financing activities for the years ended 31 December 2024 dan 2023 as follows:

	<u>Liabilitas sewa/ Lease liabilities</u>	<u>Pinjaman bank jangka panjang/ Long-term bank loan</u>	<u>Jumlah/ Total</u>	
1 Januari 2023	436,385	954,819	1,391,204	1 January 2023
Arus kas masuk	-	51,761	51,761	Cash inflows
Arus kas keluar	(505,481)	(273,641)	(779,122)	Cash outflows
Penambahan liabilitas sewa	591,984		591,984	Addition of lease liabilities
Efek perubahan lainnya	-	(977)	(977)	Other adjustment effect
31 Desember 2023	522,888	731,962	1,254,850	31 December 2023
Arus kas masuk	-	179,135	179,135	Cash inflows
Arus kas keluar	(505,569)	(350,937)	(856,506)	Cash outflows
Penambahan liabilitas sewa	489,884	-	489,884	Addition of lease liabilities
Efek perubahan lainnya	-	1,360	1,360	Other adjustment effect
31 Desember 2024	507,203	561,520	1,068,723	31 December 2024

30. INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN

30. SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION

Informasi keuangan tambahan adalah informasi keuangan Grup pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024, yang menyajikan laporan keuangan entitas induk.

The supplementary financial information represents financial information of the Group as at and for the year ended 31 December 2024, which present separate financial statements of parent entity.

**Catatan 30. Informasi keuangan tambahan/
Note 30. Supplementary financial information**

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
PERUSAHAAN INDUK/PARENT COMPANY**

Lampiran 5/72 Schedule

**LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2024**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali nilai nominal dan data saham)

**STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah,
except for par value and share data)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	
ASET			ASSETS
ASET LANCAR			CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	905,734	1,507,262	Cash and cash equivalents
Kas yang dibatasi penggunaannya	2,609	1,970	Restricted cash
Piutang usaha			Trade receivables
- Pihak ketiga	184,327	67,530	Third parties -
- Pihak berelasi	1,144,317	788,891	Related parties -
Aset kontrak			Contract assets
- Pihak ketiga	240,731	326,018	Third parties -
- Pihak berelasi	1,056,286	1,152,115	Related parties -
Piutang sewa pembiayaan	-	22,574	Finance lease receivables
Piutang lain-lain	181	60	Other receivables
Pajak dibayar dimuka			Prepaid taxes
- Pajak lain-lain	36,154	31,941	Other taxes -
Uang muka dan biaya dibayar dimuka	82,125	105,246	Advance and prepayments
Aset lancar lainnya	<u>2,873</u>	<u>-</u>	Other current assets
Jumlah aset lancar	<u>3,655,337</u>	<u>4,003,607</u>	Total current assets
ASET TIDAK LANCAR			NON-CURRENT ASSETS
Aset tetap	3,657,829	3,573,818	Fixed assets
Aset hak-guna	501,827	463,895	Right-of-use assets
Aset pajak tangguhan	99,867	99,149	Deferred tax assets
Penyertaan saham	6,652	6,652	Investment in shares
Investasi pada entitas anak	1,038,604	858,089	Investment pada entitas anak
Investasi pada ventura bersama	105,962	98,132	Investment in joint venture
Pajak dibayar dimuka			Prepaid taxes
- Pajak penghasilan	24,775	-	Corporate income tax -
Aset tidak lancar lainnya	<u>13,982</u>	<u>9,210</u>	Other non-current assets
Jumlah aset tidak lancar	<u>5,449,498</u>	<u>5,108,945</u>	Total non-current assets
JUMLAH ASET	<u>9,104,835</u>	<u>9,112,552</u>	TOTAL ASSETS

**Catatan 30. Informasi keuangan tambahan/
Note 30. Supplementary financial information**

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
PERUSAHAAN INDUK/PARENT COMPANY**

Lampiran 5/73 Schedule

**LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2024**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali nilai nominal dan data saham)

**STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah,
except for par value and share data)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	
LIABILITAS			LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PENDEK			CURRENT LIABILITIES
Utang usaha			Trade payables
- Pihak ketiga	71,360	53,728	Third parties -
- Pihak berelasi	1,801,568	1,379,946	Related parties -
Biaya masih harus dibayar	1,140,931	1,233,586	Accrued expenses
Liabilitas kontrak			Contract liabilities
- Pihak ketiga	20,307	186,825	Third parties -
- Pihak berelasi	176,466	19,574	Related parties -
Utang pajak			Taxes payable
- Pajak penghasilan	-	96,453	Corporate income taxes -
- Pajak lain-lain	12,332	30,558	Other taxes -
Liabilitas sewa	365,298	335,390	Lease liabilities
Bagian jangka pendek dari pinjaman jangka panjang	175,300	295,536	Current portion of long-term borrowings
Bagian jangka pendek dari liabilitas imbalan pasca kerja	27,749	-	Current portion of post employment benefits obligation
Jumlah liabilitas jangka pendek	3,791,311	3,631,596	Total current liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG			NON-CURRENT LIABILITIES
Liabilitas sewa	141,905	187,498	Lease liabilities
Pinjaman jangka panjang	386,220	426,950	Long-term borrowings
Liabilitas imbalan pasca kerja	175,842	220,595	Post-employment benefits obligation
Jumlah liabilitas jangka panjang	703,967	835,043	Total non-current liabilities
JUMLAH LIABILITAS	4,495,278	4,466,639	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS			EQUITY
Modal saham - modal ditempatkan dan disetor penuh 1.234.747 lembar saham A dengan nilai nominal Rp1.000.000 dan 819 saham B dengan nilai nominal Rp1.000	1,234,748	1,234,748	Share capital - issued and fully paid 1,234,747 shares A at par value of Rp1.000.000 per share and 819 shares B at par values of Rp1,000
Tambahan modal disetor	(76,051)	(76,051)	Additional paid-in capital
Rugi komprehensif lain	(71,032)	(94,281)	Other comprehensive loss
Saldo laba	3,521,892	3,581,497	Retained earnings
JUMLAH EKUITAS	4,609,557	4,645,913	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	9,104,835	9,112,552	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

**Catatan 30. Informasi keuangan tambahan/
Note 30. Supplementary financial information**

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
PERUSAHAAN INDUK/PARENT COMPANY**

Lampiran 5/74 Schedule

**LAPORAN LABA RUGI
DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**STATEMENT OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	
Pendapatan usaha	7,053,490	6,695,213	Revenue
Beban pokok pendapatan	<u>(5,226,499)</u>	<u>(4,595,396)</u>	Cost of revenue
Laba bruto	1,826,991	2,099,817	Gross profit
Beban umum dan administrasi	(979,247)	(1,087,078)	General and administrative expenses
Pendapatan/(beban) lain-lain, neto	19,197	(49,703)	Other income/(expense), net
Pendapatan keuangan	49,040	42,412	Finance income
Beban keuangan	(89,494)	(97,016)	Finance costs
Bagian atas laba bersih investasi pada entitas anak	375,289	321,395	Income from investment in subsidiaries
Bagian atas investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama	32,565	30,924	Income from investment in associate and joint venture
Beban pajak final	<u>(8,275)</u>	<u>(8,490)</u>	Final tax expense
Laba sebelum pajak penghasilan	1,226,066	1,252,261	Profit before income tax
Beban pajak penghasilan	<u>(150,321)</u>	<u>(202,331)</u>	Income tax expense
Laba tahun berjalan	1,075,745	1,049,930	Profit for the year
Penghasilan komprehensif lain			Other comprehensive income
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi:			Items that will not be reclassified to the profit or loss:
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti	29,238	(23,212)	Remeasurement of defined benefit obligation
Perubahan nilai wajar instrumen ekuitas melalui penghasilan komprehensif lain	-	(10)	Changes in the fair value of equity instruments at fair value through other comprehensive income
Pajak penghasilan terkait	<u>(5,989)</u>	<u>4,729</u>	Related income tax
Jumlah penghasilan/(rugi) komprehensif tahun berjalan	<u>23,249</u>	<u>(18,493)</u>	Total other comprehensive income/(loss)
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan	<u>1,098,994</u>	<u>1,031,437</u>	Total comprehensive income for the year

Catatan 30. Informasi keuangan tambahan/
Note 30. *Supplementary financial information*

PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
PERUSAHAAN INDUK/PARENT COMPANY

Lampiran 5/75 Schedule

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah)

STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2024
(Expressed in millions of Rupiah)

	Modal Saham/ Share capital	Tambahan modal disetor/ Additional paid-in capital	Rugi komprehensif lain/Other comprehensive loss	Saldo laba/ Retained earnings	Total ekuitas/ Total equity
Saldo per 1 Januari 2023	1,234,748	(76,051)	(75,788)	2,531,567	3,614,476
Laba tahun berjalan	-	-	-	1,049,930	1,049,930
Rugi komprehensif lain	-	-	(18,493)	-	(18,493)
Saldo per 31 Desember 2023	<u>1,234,748</u>	<u>(76,051)</u>	<u>(94,281)</u>	<u>3,581,497</u>	<u>4,645,913</u>
Laba tahun berjalan	-	-	-	1,075,745	1,075,745
Dividen	-	-	-	(1,135,350)	(1,135,350)
Pendapatan komprehensif lain	-	-	23,249	-	23,249
Saldo per 31 Desember 2024	<u>1,234,748</u>	<u>(76,051)</u>	<u>(71,032)</u>	<u>3,521,892</u>	<u>4,609,557</u>

**Catatan 30. Informasi keuangan tambahan/
Note 30. Supplementary financial information**

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
PERUSAHAAN INDUK/PARENT COMPANY**

Lampiran 5/76 Schedule

**LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**STATEMENT OF CASH FLOW
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	
Arus kas dari aktivitas operasi			Cash flows from operating activities
Penerimaan dari pelanggan	6,727,626	7,102,283	Receipts from customers
Pembayaran kepada pemasok	(2,236,829)	(3,001,698)	Payments to suppliers
Pembayaran kepada karyawan	(2,741,965)	(2,507,614)	Payments to employees
Pembayaran beban keuangan	(89,494)	(97,016)	Payments of finance costs
Pembayaran pajak final	(8,275)	(8,490)	Payments of final tax expense
Penerimaan penghasilan keuangan	49,040	42,412	Receipts of finance income
Pembayaran pajak penghasilan badan	<u>(274,354)</u>	<u>(182,400)</u>	Payment of corporate income tax
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi	<u>1,425,749</u>	<u>1,347,477</u>	Net cash generated from operating activities
Arus kas dari aktivitas investasi			Cash flows from investing activities
Penerimaan dividen dari entitas anak	194,776	2,256	Dividends received from investment in subsidiaries
Penerimaan dividen dari ventura bersama	24,735	20,400	Dividends received from joint venture
Penerimaan piutang pembiayaan	22,574	23,021	Receipts from lease receivables
Perolehan aset tetap	<u>(455,842)</u>	<u>(114,612)</u>	Acquisition of fixed assets
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi	<u>(213,757)</u>	<u>(68,935)</u>	Net cash used in investing activities
Arus kas dari aktivitas pendanaan			Cash flows from financing activities
Penerimaan pinjaman	179,135	(210,066)	Proceeds from borrowings
Pembayaran pinjaman	(341,462)	-	Repayments of borrowings
Pembayaran dividen tunai	(1,135,350)	-	Payment of cash dividends
Pembayaran atas liabilitas sewa	<u>(505,571)</u>	<u>(483,418)</u>	Payments of lease liabilities
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan	<u>(1,803,248)</u>	<u>(693,484)</u>	Net cash used in financing activities
Efek perubahan nilai kurs pada kas dan setara kas	<u>(10,272)</u>	<u>7,434</u>	Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents
(Penurunan)/kenaikan bersih kas dan setara kas	<u>(601,528)</u>	<u>592,492</u>	Net (decrease)/ increase in cash and cash equivalents
Kas dan setara kas pada awal tahun	<u>1,507,262</u>	<u>914,770</u>	Cash and cash equivalents at the beginning of the year
Kas dan setara kas pada akhir tahun	<u>905,734</u>	<u>1,507,262</u>	Cash and cash equivalents at the end of the year

**Catatan 30. Informasi keuangan tambahan/
Note 30. Supplementary financial information**

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
PERUSAHAAN INDUK/PARENT COMPANY**

Lampiran 5/77 Schedule

Dasar penyusunan laporan keuangan tersendiri entitas induk

Laporan keuangan tersendiri entitas induk disusun sesuai dengan PSAK 227 (Revisi 2015), "Laporan Keuangan Tersendiri".

PSAK 227 (Revisi 2015) mengatur dalam hal entitas memilih untuk menyajikan laporan keuangan tersendiri maka laporan tersebut hanya dapat disajikan sebagai informasi tambahan dalam laporan keuangan konsolidasian. Laporan keuangan tersendiri adalah laporan keuangan yang disajikan oleh entitas induk yang mencatat investasi pada entitas anak, entitas asosiasi, dan pengendalian bersama entitas berdasarkan kepemilikan ekuitas langsung bukan berdasarkan pelaporan hasil dan aset neto *investee*.

PSAK 227 (Revisi 2015): Laporan Keuangan Tersendiri yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2016, memperkenalkan metode biaya perolehan dan metode ekuitas sebagai metode pencatatan investasi pada entitas anak, ventura bersama, dan entitas asosiasi dalam laporan keuangan tersendiri. Perusahaan menerapkan metode ekuitas dalam laporan keuangan entitas induk saja pada tanggal dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2024.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan tersendiri entitas induk adalah sama dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2 atas laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk penyertaan pada entitas anak dan entitas asosiasi

Mata uang fungsional entitas induk adalah Rupiah Indonesia. Mata uang penyajian yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan tersendiri adalah Rupiah Indonesia.

Basis of preparation of the separate financial statements of the parent entity

The separate financial statements of the parent entity are prepared in accordance with the SFAS 227 (Revised 2015), "Separate Financial Statements".

SFAS 227 (Revised 2015) regulates that when an entity elected to present the separate financial statements, such financial statements should be presented as supplementary information to the consolidated financial statements. Separate financial statements are those presented by a parent entity, in which the investments are accounted for on the basis of the direct equity interest rather than on the basis of the reported results and net assets of the investees.

SFAS 227 (Revised 2015): Separate Financial Statements that effective since 1 January 2016, allows the use of the cost method and equity method to record the investment in subsidiaries, joint ventures, and associates in the separate financial statements. The Company implemented equity method in the financial statements of the parent entity only as at and for the years ended 31 December 2023 and 2024.

Accounting policies adopted in the preparation of the parent entity separate financial statements are the same as the accounting policies adopted in the preparation of the consolidated financial statements as disclosed in Note 2 to the consolidated financial statements, except for investments in subsidiaries and associates.

The parent entity's functional currency is Indonesian Rupiah. Presentation currency used in the preparation of the separate financial statements is the Indonesian Rupiah.

Driving Innovation and **Sustainability** in **Marine Industry**

Mendorong Inovasi dan Keberlanjutan dalam Industri Kelautan



PT Pertamina Trans Kontinental

Jl. Yos Sudarso No. 32-34
Jakarta Utara 14320, Indonesia

 (+6221) 80678500
 pusat.ptk@pertamina.com



pertamina-ptk.com